

RKPD²⁰²⁶



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2026**



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat dengan DPRD Kabupaten Karo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II PENYUSUNAN RKPD Pasal 2

- (1) RKPD yang disusun memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rencana kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

(3). RKPD...

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman untuk penyempurnaan rancangan Renja PD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- (5) Ketentuan mengenai dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam rangka penyempurnaan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, PD menggunakan RKPD untuk:

- a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Daerah dengan rencana program dan kegiatan prioritas PD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
- b. penetapan Renja PD Tahun Anggaran 2026 oleh Kepala PD.

Pasal 4

Dalam rangka penetapan Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2026, sebagai berikut:

- a. Kepala PD menyampaikan rancangan Renja PD Tahun 2026 kepada Bappedalitbang;
- b. Bappedalitbang melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja PD Tahun 2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan PD tahun 2026 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026;
- c. Bappedalitbang menghimpun seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- d. Penetapan Renja PD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut:

- a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup perumusan kebijakan Renja PD dan RKPD Kabupaten Karo;
- b. Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD;
- c. Kepala Bappedalitbang menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing PD;
- d. Kepala PD wajib memperbaiki dan menyempurnakan Renja PD bila belum sesuai dengan RKPD;

e. dalam...

- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, perubahan Renja PD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026.

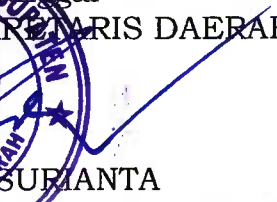
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 JULI 2025
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 JULI 2025
PA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

IRENA D. SURLANTA
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025 NOMOR 19



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **i**

DAFTAR TABEL **iii**

DAFTAR GAMBAR **ix**

DAFTAR GRAFIK **x**

DAFTAR PETA **xii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3. Hubungan Antar Dokumen I-5

1.4. Maksud dan Tujuan I-6

1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-7

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **II-1**

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam II-18

2.1.1.3. Berketahanan Energi, Air dan Pangan II-22

2.1.1.4. Lingkungan Hidup Berkualitas II-25

2.1.1.5. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-28

2.1.1.6. Aspek Demografi II-30

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-34

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II-34

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua II-39

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata II-42

2.1.2.4. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-46

2.1.2.5. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-47

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah II-56

2.1.4. Stabilitas Ekonomi Makro II-67

2.15. Aspek Pelayanan Umum II-67

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-76

2.2.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan II-77

2.2.2. Realisasi Capaian Indikator IKU Kepala Daerah II-78

2.2.3. Realisasi Capaian Indikator Kunci Perangkat Daerah II-81

2.2.4. Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Keuangan II-95

2.3. Permasalahan Pembangunan II-99

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-99

2.3.1.1	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat belum mencapai standar optimal	II-99
2.3.1.2	Kinerja produktivitas ekonomi belum optimal.....	II-100
2.3.1.3.	Sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum secara optimal.	II-100
2.3.1.4.	Stabilitas, ketenteraman, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, dan pemenuhan HAM belum mencapai kondisi yang ideal.....	II-102
2.3.1.5.	Ketahanan sosial, budaya, ekologi dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal.....	II-104
2.3.1.6.	Pembangunan kewilayahan yang belum merata dan berkeadilan.....	II-104
2.3.1.7.	Pembangunan sarana dan prasarana yang belum optimal.....	II-105
2.3.1.8.	Pembangunan yang berkesinambungan belum dilaksanakan secara optimal.....	II-107
2.3.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-108
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN		
DAERAH		III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-17
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026.....	IV-11
4.3.	Program Strategis Daerah	IV-37
4.4.	Inovasi Daerah Kabupaten Karo	IV-63
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....		
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		
BAB VII PENUTUP		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo	II-2
Tabel 2.2	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Karo	II-5
Tabel 2.3	Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Karo	II-8
Tabel 2.4	Kondisi Tutupan Lahan Kabupaten Karo	II-8
Tabel 2.5	Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Karo 2020-2024..	II-9
Tabel 2.6	Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo	II-12
Tabel 2.7	Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo	II-12
Tabel 2.8	Potensi Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-13
Tabel 2.9	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-14
Tabel 2.10	Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-15
Tabel 2.11	Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-17
Tabel 2.12	Potensi Bahaya di Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-17
Tabel 2.13	Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Kabupaten Karo	II-19
Tabel 2.14	Hasil Produksi Perkebunan Kabupaten Karo Tahun 2022–2024 (Ribu ton)	II-20
Tabel 2.15	Realisasi Intensifikasi Tanaman Palawija (Ha) Tahun 2024.....	II-20
Tabel 2.16	Populasi Ternak Kabupaten Karo Menurut Kecamatan Tahun 2024 (ekor)	II-21
Tabel 2.17	Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-22
Tabel 2.18	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-23
Tabel 2.19	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-23
Tabel 2.20	Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-24
Tabel 2.21	Persentase Penduduk berakses air minum layak dan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 ..	II-25
Tabel 2.22	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-26
Tabel 2.23	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-26
Tabel 2.24	Capaian Timbulan sampah yang ditangani Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-27
Tabel 2.25	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-27

Tabel 2.26 Penurunan Intensitas Rumah Gas Rumah Kaca Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-29

Tabel 2.27 Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-29

Tabel 2.28 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-30

Tabel 2.29 Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo 2020-2024..... II-31

Tabel 2.30 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Karo 2020-2024..... II-31

Tabel 2.31 Kepadatan Penduduk Kabupaten Karo 2020-2024..... II-32

Tabel 2.32 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2024..... II-32

Tabel 2.33 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-34

Tabel 2.34 PDRB perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 II-36

Tabel 2.35 Gini Ratio Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 II-36

Tabel 2.36 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-38

Tabel 2.37 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-47

Tabel 2.38 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-48

Tabel 2.39 Persentase organisasi pemuda yang aktif Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 II-51

Tabel 2.40 Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024..... II-52

Tabel 2.41 Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 II-52

Tabel 2.42 Prevalensi Tuberculosis Per 100.000 Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-53

Tabel 2.43 Perkembangan dan Pengobatan TBC di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-54

Tabel 2.44 Data Penerima Bantuan Sosial Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-54

Tabel 2.45 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Karo Tahun 2021sd 2024 II-56

Tabel 2.46 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Karo Tahun 2019-2024..... II-57

Tabel 2.47 Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 II-59

Tabel 2.48 Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-59

Tabel 2.49 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-59

Tabel 2.50 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2019-2023..... II-60

Tabel 2.51 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-61

Tabel 2.52 Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi

	Daerah yang Diterapkan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-61
Tabel 2.53	Indeks Masyarakat Digital Indonesia Di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-64
Tabel 2.54	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah	II-65
Tabel 2.55	Net Ekspor Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 (miliar Rp)	II-65
Tabel 2.56	Indeks Daya Saing Infrastruktur Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-66
Tabel 2.57	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-66
Tabel 2.58	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-67
Tabel 2.59	Rasio Pajak terhadap PDRB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-67
Tabel 2.60	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Karo Tahun 2022-2024.....	II-68
Tabel 2.61	Indeks Integritas Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-70
Tabel 2.62	Capaian Indeks SPBE Kabupaten Karo Tahun 2021-2024.....	II-71
Tabel 2.63	Persentase Capaian Aksi HAM	II-72
Tabel 2.64	Indikator Demokrasi, Narkoba dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-72
Tabel 2.65	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-73
Tabel 2.66	IDSD Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-74
Tabel 2.67	Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2024	II-77
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2024.....	II-79
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah Tahun 2024.....	II-83
Tabel 2.70	Rekapitulasi Capaian Program, Kegiatan dan Keuangan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 ..	II-95
Tabel 3.1	PDRB perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	III-8
Tabel 3.2	Tren Capaian dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026.....	III-17
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 s.d Tahun 2027	III-21
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 s.d Tahun 2027	III-23
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 s.d Tahun 2027	III-24
Tabel 4.1	17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat NasionalKeterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Outcome, Indikator.....	IV-13

Tabel 4.2 Kegiatan Prioritas Utama Nasional..... III-14

Tabel 4.3 Program Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 III-22

Tabel 4.4 Sasaran Utama/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2026..... IV-26

Tabel 4.5 Penyelarasan Sasaran Utama/Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara..... IV-26

Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas, Sasaran, Indikator dan Program Prioritas Kabupaten Karo Tahun 2026..... IV-28

Tabel 4.7 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Karo dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN ... IV-38

Tabel 4.8 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RKPD Kabupaten Karo dengan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun pelaksanaan 2026..... IV-56

Tabel 4.9 Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama dalam RKP dengan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026..... IV-62

Tabel 4.10 Predikat Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 - 2024 IV-65

Tabel 4.11 Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... IV-65

Tabel 4.12 Jumlah usulan Inovasi Perangkat Daerah Siindahkaka Tahun 2022-2026..... IV-66

Tabel 4.13 Inovasi Daerah Kab. Karo Pelaksanaan dan Penerapan Tahun 2026 Pada Aplikasi Siindahkaka (Sistem Informasi Daerah Kab. Karo) IV-67

Tabel 5.1 Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026..... V-3

Tabel 5.2 Dukungan Program, Kegiatan dan Subkegiatan terhadap Program Strategis Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 V-22

Tabel 5.3 Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun pelaksanaan 2026 V-34

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo Tahun 2026 . VI-1

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-6

Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD
Kabupaten/Kota..... I-7

Gambar 2.1 Indeks Pembangunan TIK dan Subindeks Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2022 dan 2023 II-65

Gambar 2.2 Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kab. Karo Tahun 2024
per Pilar II-78

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan beberapa Negara
lain Tahun 2024 (persen)..... III-1

Gambar 4.1 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026 IV-12

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 II-25

Grafik 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2024 II-33

Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo, Sumut dan Nasional Tahun 2020-2024 II-34

Grafik 2.4. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 II-35

Grafik 2.5. Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-37

Grafik 2.6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 II-37

Grafik 2.7. Perkembangan Dimensi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-38

Grafik 2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-39

Grafik 2.9. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024..... II-40

Grafik 2.10.Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 II-41

Grafik 2.11.Perkembangan Prevalensi Stunting Kab. Karo Berdasarkan Data SSGI/SKi II-41

Grafik 2.12.Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024 II-42

Grafik 2.13.Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024 II-43

Grafik 2.14.Kemampuan Literasi Jenjang SD dan SMP Kabupaten Karo Tahun 2022-2023 II-44

Grafik 2.15.Kemampuan Numerasi SD dan SMP Kabupaten Karo Tahun 2022-2023 II-45

Grafik 2.16.Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023 II-45

Grafik 2.17.Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Di Sumatera Utara Tahun 2023..... II-46

Grafik 2.18.Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024 II-47

Grafik 2.19.Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2022-2023..... II-49

Grafik 2.20.Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023 II-50

Grafik 2.21.Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024 II-51

Grafik 2.22.Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 II-57

Grafik 2.23.Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... II-58

Grafik 2.24.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo
Tahun 2020-2024 II-60

Grafik 2.25.Bagan Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik II-69

Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo, Sumut
dan Nasional Tahun 2020-2024 III-7

Grafik 3.2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... III-8

Grafik 3.3 Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... III-9

Grafik 3.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun
2020-2024 III-10

Grafik 3.5 Perkembangan Dimensi Indeks Pembangunan
Manusia Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 III-10

Grafik 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024..... III-11

DAFTAR PETA

Peta 2.1	Administrasi Kabupaten Karo.....	II-1
Peta 2.2	Topografi Kabupaten Karo	II-3
Peta 2.3	Geologi Kabupaten Karo	II-5
Peta 2.4	Peta Sebaran Mata Air Kabupaten Karo.....	II-6
Peta 2.5	Peta Ketersediaan Air Tanah Kabupaten Karo.....	II-6
Peta 2.6	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Karo.....	II-7
Peta 2.7	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Karo.....	II-9
Peta 2.8	Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo	II-13
Peta 2.9	Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Karo	II-14
Peta 2.10	Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Karo.....	II-15
Peta 2.11	Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo	II-16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Mekanisme dan tata cara perencanaan pembangunan mengacu pada ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaan dari Undang-undang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional serta pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada pasal 14 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam penyusunan RKPD tersebut, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dan

dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman RPJMD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Karo berpedoman pada arah kebijakan nasional/Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya dengan menjabarkan visi pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita sebagai landasan strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah serta RPJMD dan RKPD Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026 sebagai dokumen terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 ini antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76); dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 01);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026 tidak terlepas dari RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 yang saat ini secara simultan terkoordinasi sedang disusun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan strategis daerah jangka panjang selama 20 tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD) secara berkesinambungan.

Sementara itu, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Karo Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun yang memuat prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan rencana pendanaan tahun anggaran 2026. RKPD 2026 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran tahap awal dari RPJPD 2025-2045.

Dengan demikian, hubungan antara RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2026 bersifat hierarkis dan substantif, dimana RKPD Tahun 2026 merupakan instrumen tahunan untuk mewujudkan tahapan awal pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Karo Tahun 2045. RKPD 2026 harus mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD serta memperhatikan tahapan pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMD periode 2025-2029.

RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026 menjadi penting karena berada pada fase awal pelaksanaan RPJPD, sehingga pelaksanaannya akan sangat menentukan dasar pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2026 harus mampu mengakomodasi:

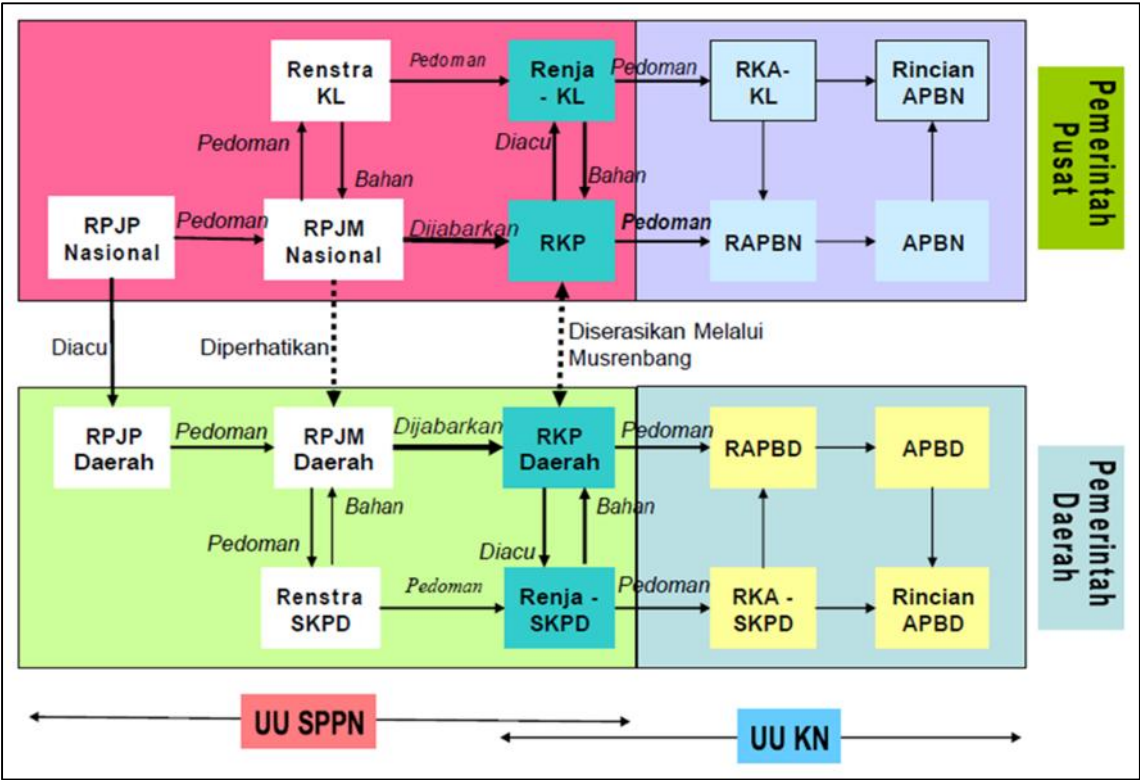
- a) Agenda transformasi awal pembangunan daerah,
- b) Fondasi program prioritas jangka panjang,
- c) Sinkronisasi dengan arah pembangunan nasional dan provinsi,
- d) Serta kesinambungan dengan capaian RPJMD tahap pertama.

Secara garis besar, RKPD 2026 tidak hanya berperan sebagai dokumen teknokratis tahunan, tetapi juga sebagai bagian penting dari strategi implementasi RPJPD yang lebih luas dan berjangka panjang.

Memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Berpedoman pada uraian di atas, maka RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen lain, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.4. Maksud dan Tujuan

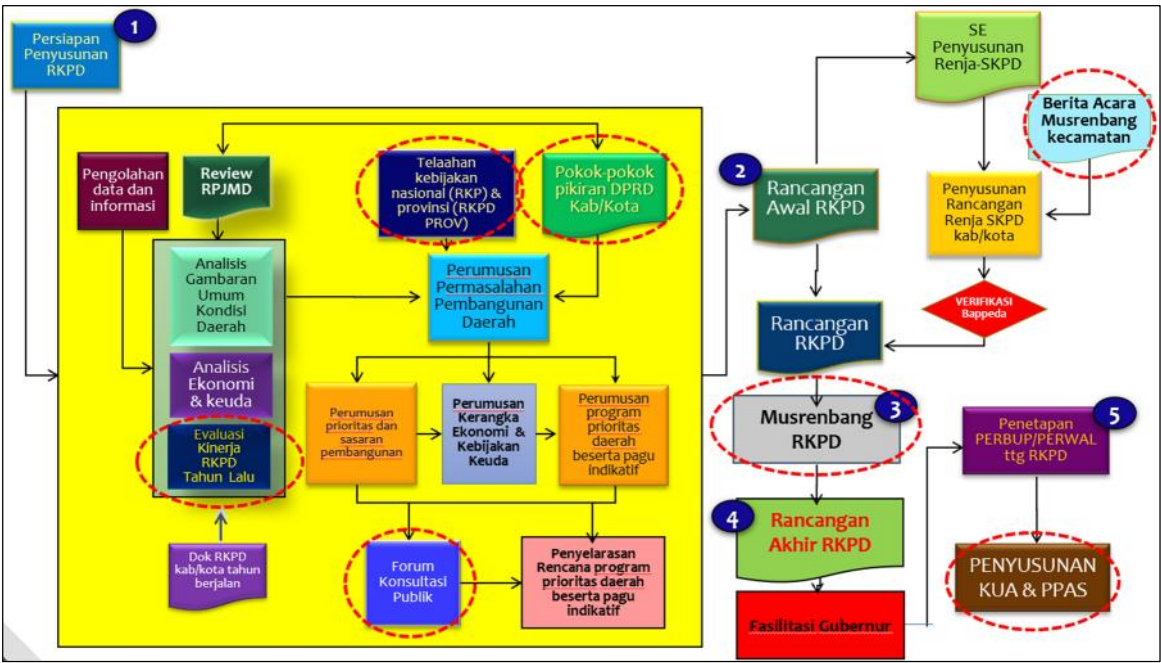
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026 merupakan tahapan dari serangkaian tahapan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan RKPD merupakan konsekuensi dari perencanaan yang berorientasi pada proses dan substansi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan

yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke ruangan dalam perencanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.

Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota



Mekanisme dan tahapan perencanaan yang dilakukan ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak untuk berperan dalam proses pembangunan daerah serta secara substansi dapat menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang mampu mewujudkan target dan sasaran yang ingin dicapai baik secara tahunan maupun jangka menengah di daerah yang pada akhirnya dapat mendukung untuk pencapaian visi misi kepala daerah terpilih.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

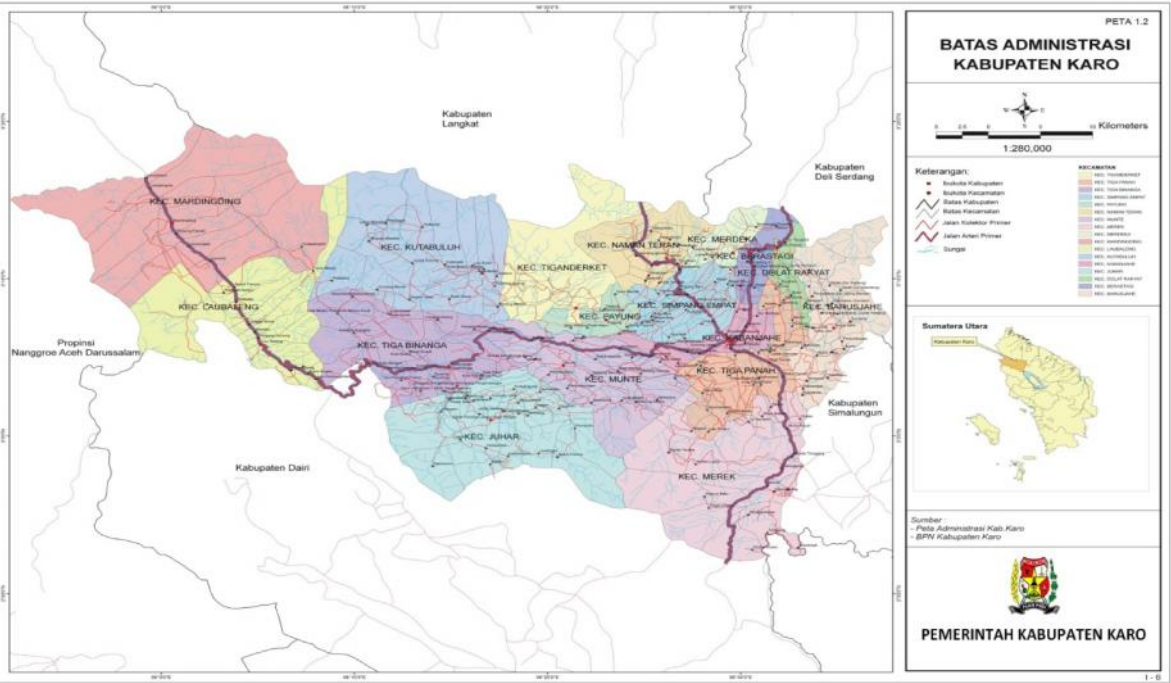
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****BAB VII PENUTUP****LAMPIRAN**

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Aspek geografi dan demografi saling berhubungan dalam menentukan karakteristik suatu daerah. Faktor geografis dapat memengaruhi pola kehidupan penduduk, sementara kondisi demografi mencerminkan bagaimana masyarakat berkembang dalam suatu wilayah. Geografi menentukan kondisi fisik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, sementara demografi mencerminkan karakteristik penduduk dalam wilayah tersebut. Kedua aspek ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah, perencanaan tata kota, dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara geografis letak Kabupaten Karo merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Berada diantara 2.500-3.190 Lintang Utara dan 97.550-98.380 Bujur Timur dengan luas 2.206,88 km² yang terdiri dari 17 kecamatan, 259 desa dan 10 kelurahan. Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik. Batas administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Peta 2.1



Sumber: RTRW Kabupaten Karo 2022-2042

Wilayah Kabupaten Karo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase thd Luas Kab. (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kel/Desa
1	Mardinding	325,30	14,740	12	-	12
2	Laubaleng	184,16	8,345	15	-	15
3	Tigabinanga	176,44	7,995	19	1	20
4	Juhar	220,02	9,970	25	-	25
5	Munte	140,63	6,372	22	-	22
6	Kutabuluh	259,38	11,753	16	-	16
7	Payung	31,36	1,421	8	-	8
8	Tiganderket	67,17	3,044	17	-	17
9	Simpang Empat	65,13	2,951	17	-	17
10	Naman Teran	121,89	5,523	14	-	14
11	Merdeka	42,45	1,923	9	-	9
12	Kabanjahe	34,31	1,555	8	5	13
13	Berastagi	33,76	1,530	6	4	10
14	Tigapanah	127,04	5,756	26	-	26
15	Dolat Rayat	22,85	1,035	7	-	7
16	Merek	229,36	10,393	19	-	19
17	Barusjahe	125,63	5,693	19	-	19
Jumlah		2.206,88	100	259	10	269

Sumber: Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi, Pemerintahan, dan Pulau.

Dari tabel pembagian wilayah administrasi tersebut dapat dilihat bahwa kecamatan di Kabupaten Karo sebanyak 17 (tujuh belas) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) yang terdiri dari 259 desa dan 10 kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Mardinding dengan luas 325,301 km² (14,740 persen dari luas kabupaten) dan luas terkecil adalah Kecamatan Dolatrayat seluas 22,852 km² (1,035 persen dari luas kabupaten).

Kabupaten Karo berada pada posisi geografis 2°50’ sampai 3°19’ lintang utara dan 97°55’ sampai 98°38’ bujur timur, dan berada pada wilayah dataran tinggi bukit barisan.

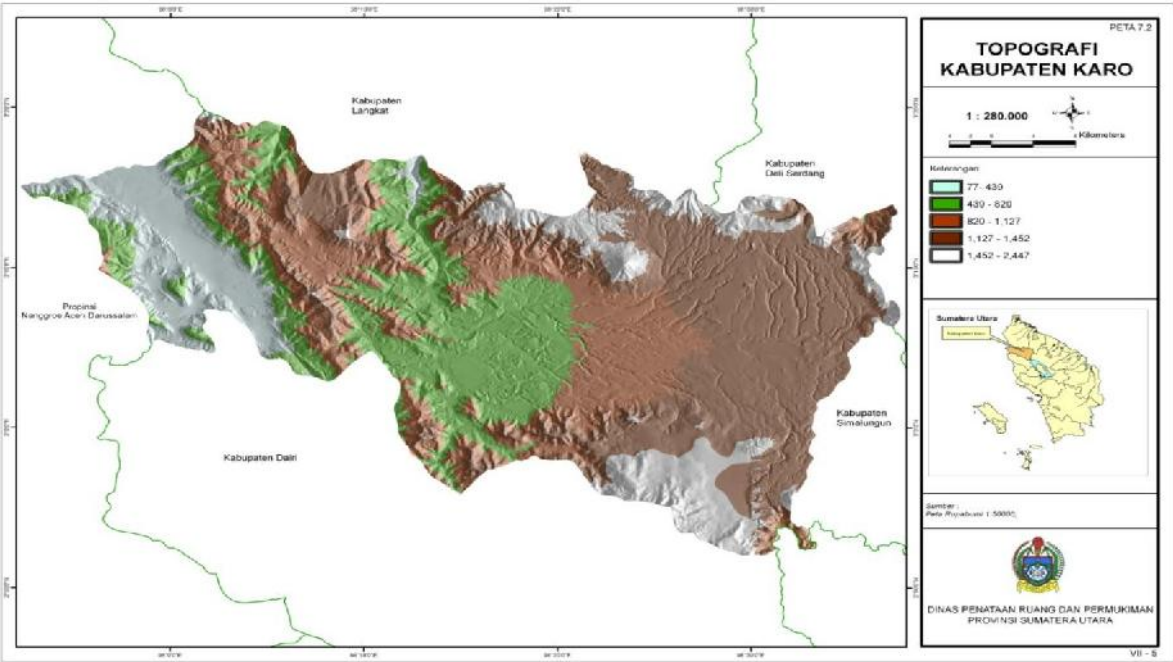
Letak geografis Kabupaten Karo yang berada di dataran tinggi bukit barisan dengan hawa sejuk, dan berada pada jalur perlintasan Kota Medan dengan Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir dan beberapa kabupaten/kota Provinsi NAD sehingga posisinya menjadi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi dan daerah tujuan wisata. Kabupaten Karo merupakan wilayah dengan karakter agraris yang ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk lahan sawah seluas 10.750 hektar, luas lahan pertanian bukan sawah seluas 191.010 hektar dan luas lahan bukan pertanian seluas 18.928,00 hektar.

A. Topografi

Kondisi topografi adalah bentuk permukaan bumi dan karakteristik fisiknya, seperti gunung, lembah, dan lainnya. Tujuan utama topografi adalah mengetahui posisi geografis dan ketinggian di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Karo dengan elevasi terendah +77 m di atas permukaan laut berada di Paya Lah-lah (Kecamatan Mardinding) dan elevasi tertinggi +2.447 m di atas permukaan laut adalah di gunung Sinabung.

Wilayah Kabupaten Karo yang berada di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang, maka di wilayah ini ditemui banyak lembah dan alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang curam/terjal.

Peta 2.2
Topografi Kabupaten Karo



Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

B. Geologi

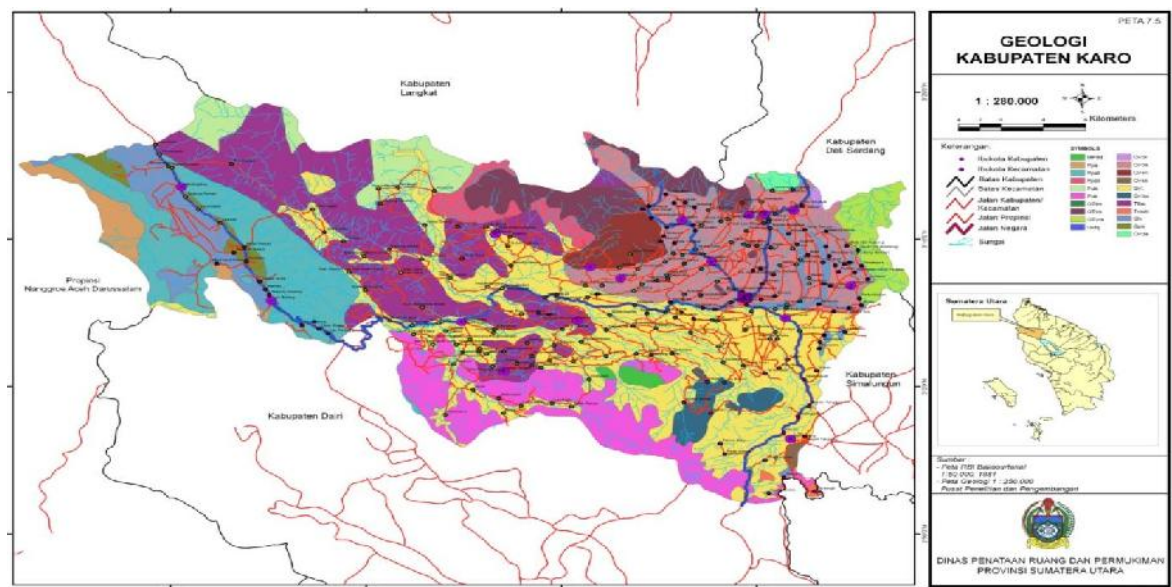
Geologi adalah pengetahuan bumi yang menyelidiki lapisan-lapisan batuan yang ada dalam kerak bumi. Di dalam kerak bumi terdapat bermacam-macam batuan dan diantar lapisan-lapisan kerak bumi terdapat air yang digunakan sehari-hari, sedangkan peta geologi adalah gambaran kecil permukaan bumi, gambaran ini mengenai informasi sebaran dan juga jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain-lain yang berhubungan dengan adanya sumber daya.

Keadaan geologi di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

- a. Qh: Kerikil, pasir, lempung. Jenis batuan ini banyak terdapat di Kecamatan Mardinding dan Lau Baleng.
- b. Qvsn, Erupsi Sinabung: Lava andesit-dasit. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Tiganderket dan Payung.
- c. Qvba, Erupsi Sibayak, Satuan Sibayak: Andesit, Dasit piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Berastagi dan Merdeka.
- d. Qvbr, Erupsi Barus: Lava andesit piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di sebelah utara Kecamatan Dolat Rayat.
- e. Qvbs, Erupsi Sibayak, Satuan Singkut: Andesit, dasit, mikrodiorit, tufa. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Barusjahe, Kabanjahe, Simpang Empat, Payung, Dolat Rayat, Berastagi, Merdeka, Naman Teran dan Tigapanah.
- f. Qpm, Formasi Melaboh: Gravel, pasir dan lempung
- g. Qvss, Erupsi Sipiso-piso: Dasit dan Andesit. Jenis batuan ini terdapat di bagian Timur Kecamatan Merek.

- h. Qpk, Formasi Kotacane: Kerikil, pasir, lempung. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardinding dan Lau Baleng.
- i. Qvtsu, Erupsi Toba, Satuan Sibutar: Campuran lava riolitik dan piroklastik. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Merek.
- j. Qvt, Erupsi Toba: Tufa riodasit sebagian terelaskan. Jenis batuan ini merupakan jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Karo. Hampir semua kecamatan memiliki jenis batuan ini, akan tetapi yang lebih mendominasi adalah Kecamatan Merek, Tiga Panah, Munte dan Kutabuluh.
- k. QTvm, Erupsi Takurtakur, Satuan Mentar: Piroklastik andesitik-dasitik. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Barusjahe.
- l. QTvk, Erupsi Takurtakur, Satuan Takurtakur: Andesit, dasit dan piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di sebelah Utara Kabupaten Karo, yaitu Kecamatan Kutabuluh, Tiganderket, Naman Teran dan Merdeka.
- m. Tmvh, formasi Gunung Api Haranggaol: Andesit, dasit, piroklastik
- n. Tlbu, formasi Butar: Selang seling batu pasir dengan batu pasir, batu lumpur. Formasi Tlbu juga termasuk formasi yang banyak terdapat di Kabupaten Karo. Jenis batuan ini melingkupi sebagian Kecamatan Mardinding, Lau Baleng, Tiga Binanga, Kutabuluh dan Tiganderket.
- o. Ppbl, formasi batu gamping batu milmil: Batu gamping dan rijan. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Kutabuluh dan Tiganderket.
- p. Mpikt: Intrusi Granit. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Munte.
- q. Mpik: Intrusi granit
- r. Ppal, Formasi Alas, Anggota Batu gamping: Batu gamping oolit atau batu gamping kristalin. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardinding dan sebagian Kecamatan Lau Baleng.
- s. Ppa, Formasi Alas: Batuserpih, batulanau, batupasir, konglomerat, *wacke*. Jenis batuan ini terdapat di sebelah Barat Kecamatan Mardinding.
- t. Puk, Formasi Kluet: Batu sabak, filit, meta batu pasir, meta batu lempung. Jenis batuan ini terletak di sebelah Selatan Kabupaten Karo, melingkupi sebagian Kecamatan Juhar dan Merek.
- u. Pub, Formasi Bahorok: batu *metawacke*, batu sabak, meta batu lanau, meta batu pasir arenit meta batu konglomerat. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardinding dan Kutabuluh.

Peta 2.3
Geologi Kabupaten Karo



Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

C. Hidrologi

Kabupaten Karo dilalui oleh dua sungai utama yaitu Sungai Wampu (Lau Biang) yang bermuara ke Selat Malaka dan Sungai Lau Renun (Lau Bengap) yang bermuara Samudra Hindia. Jumlah anak-anak sungai yang bermuara ke kedua sungai di atas tercatat lebih kurang 43 buah. Pada umumnya Daerah Aliran Sungai (DAS) anak-anak sungai tersebut relatif kecil dan mempunyai kemiringan relatif tinggi. Selain dari pada air dalam bentuk aliran sungai dan anak-anak sungai juga terdapat air permukaan dalam bentuk danau yakni Danau Lau Kawar di Kecamatan Naman Teran dan Danau Toba di Kecamatan Merek.

Kabupaten Karo merupakan daerah hulu bagi sejumlah sungai primer di Sumatera Utara. Sungai-sungai di Kabupaten Karo termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli, DAS Wampu, dan DAS-DAS lainnya.

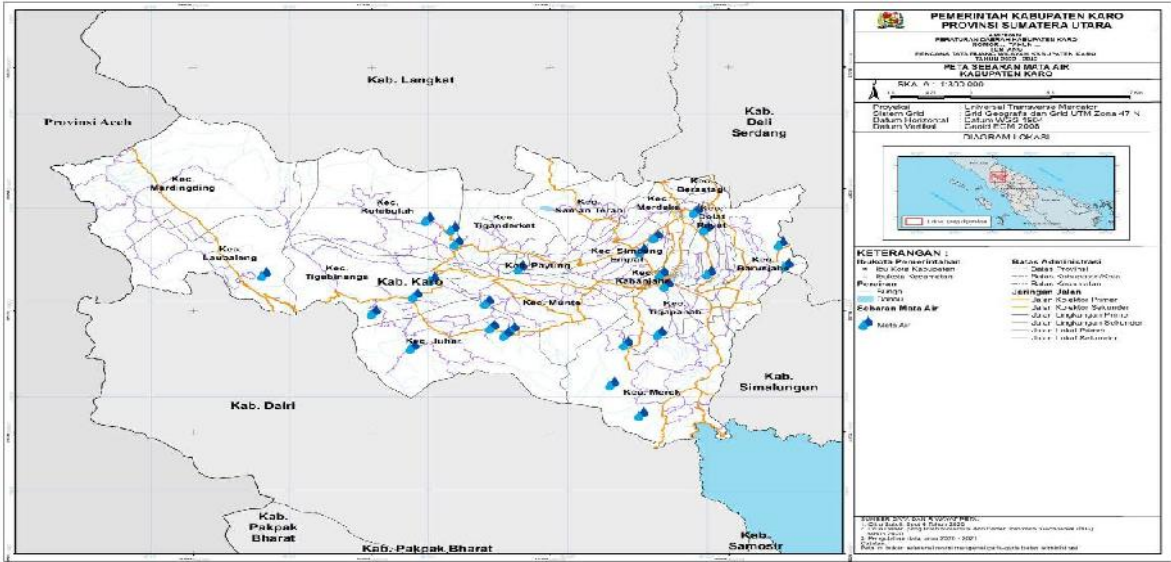
Tabel 2.2
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Karo

No	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)
1	Belumai	Belumai	10,38
2	Deli	Lau Petani	1.417,66
3	Percut	Percut	2.898,94
4	Singkil	➤ Lau Gunung/Lau Bengap	43.895,43
		➤ Lau Renun Hilir	2.170,26
		➤ Lau Renun Hulu	150,73
		➤ Lau Soraya	1.733,13
		➤ Lau Pakam	32.713,33
			80.662,88
5	Ular	Buaya	28,19
6	Wampu	➤ Lau Bekulap	81,52
		➤ Lau Biang/Lau Dah - Lau Cimba	17.585,86
		➤ Lau Meriah/Lau Mbelin	85.994,00
		➤ Lau Tegah	10.506,72
		➤ Sei Bingei	9.015,38
		➤ Ketekunan	206,65
	3.159,87		
		126.550,00	
7	Asahan	Aek Bolon	8.049

Sumber: RTRW Kabupaten Karo Tahun 2022-2042

Selanjutnya, mata air mempunyai manfaat penting dalam penyediaan air baku. Potensi sebaran mata air di Kabupaten Karo hamper merata di seluruh kecamatan.

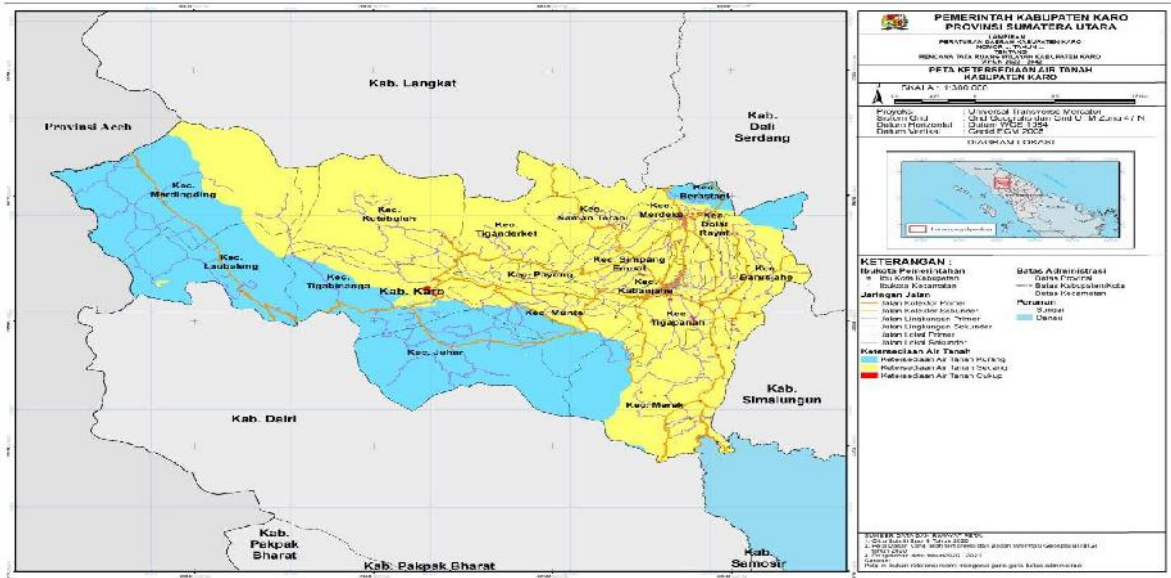
Peta 2.4
Peta Sebaran Mata Air Kabupaten Karo



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo

Selain air tanah, potensi air tanah di Kabupaten Karo diperoleh melalui sumur bor dan mata air. Untuk sumur bor terbagi menjadi dua jenis yaitu sumur bor yang dibangun oleh masyarakat dan sumur bor yang dibangun oleh pihak provinsi dan pusat. Sumur bor yang dibangun oleh masyarakat memiliki debit air 0-10 m³/jam, sedangkan sumur bor yang dibangun oleh pihak provinsi memiliki debit air 0-150 m³/jam. Untuk mata air yang terdapat di Kabupaten Karo memiliki debit 25 liter/detik yang dikelola oleh PT. Tirta Sibyakindo. Adapun mata air yang terdapat di Kabupaten Karo tersebar hampir di seluruh kecamatan yang dapat dilihat dari peta di bawah.

Peta 2.5
Peta Ketersediaan Air Tanah Kabupaten Karo

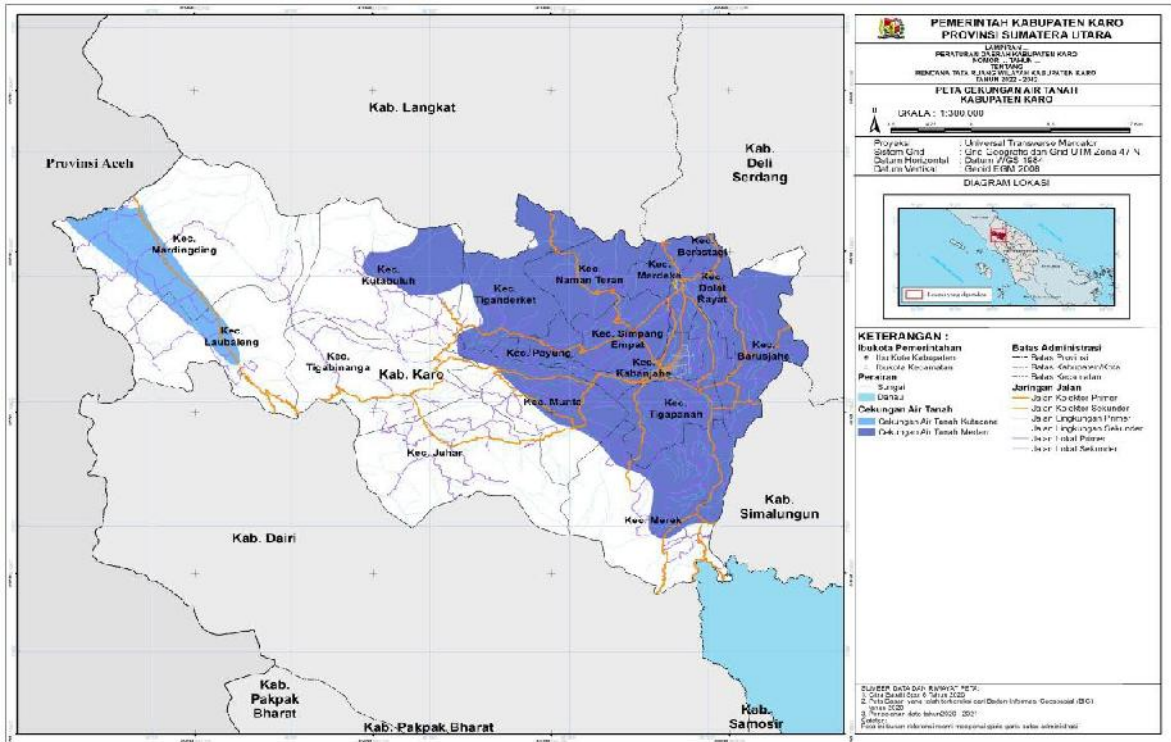


Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo

Persebaran mata air di Kabupaten Karo dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah yang mengalami proses geologi di bawah tanah. Adapun

ketersediaan air tanah di Kabupaten Karo dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu ketersediaan air kurang, ketersediaan air sedang, dan ketersediaan air cukup. Adapun wilayah yang memiliki ketersediaan air kurang berada di sebagian wilayah Kecamatan Mardinding, sebagian wilayah Kecamatan Lau Baleng, sebagian wilayah Kecamatan Tigabinanga, Juhar, Munte, dan sebagian wilayah Kecamatan Berastagi dan Dolat Rayat. Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Karo didominasi oleh ketersediaan air sedang yang tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan untuk cekungan air tanah di Kabupaten Karo terbagi menjadi 2 bagian yaitu cekungan air tanah Kutacane dan cekungan air tanah Medan. Untuk peta ketersediaan air tanah dan cekungan air tanah di Kabupaten Karo dapat dilihat dari peta.

Peta 2.6
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Karo



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

D. Klimatologi

Kabupaten Karo terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga keadaan iklim di Kabupaten Karo tergolong ke dalam daerah beriklim tropis yang mempunyai 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Tipe iklim daerah Kabupaten Karo adalah E2 menurut klasifikasi *Oldeman* dengan bulan basah lebih tiga bulan dan bulan kering berkisar 2-3 bulan atau A menurut *Koppen* dengan curah hujan rata-rata di atas 1.000 mm/tahun dan merata sepanjang tahun. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.000-4.000 mm/tahun. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus sampai dengan Januari dan musim kedua pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni dan Juli. Curah hujan dan hari hujan Kabupaten karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Karo

Bulan (Month)	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)
Januari/ January	348	17
Februari/ February	21	2
Maret/ March	39	10
April/ April	74	15
Mei/ May	73	10
Juni/ June	206	18
Juli/ July	189	12
Agustus/ August	346	16
September/ September	331	18
Oktober/ October	317	12
November/ November	395	25
Desember/ December	206	15

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2023

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa curah hujan di Kabupaten Karo tahun 2021 tertinggi pada bulan November sebesar 395 mm dan terendah pada bulan Februari sebesar 21 mm. Sedangkan jumlah hari hujan tertinggi pada bulan November sebanyak 25 hari dan terendah pada bulan Februari sebanyak 2 hari.

Suhu udara di Kabupaten Karo berkisar antara 17,4^oC-23,6^oC dengan kelembaban udara antara 86,9-117,7 persen. Sedangkan arah angin di Kabupaten Karo terbagi atas dua musim yakni:

- a. Angin berhembus dari arah Barat, kira-kira bulan Oktober sampai dengan bulan Maret.
- b. Angin berhembus dari arah Timur dan Tenggara, antara bulan April sampai dengan bulan September.

E. Penggunaan Lahan

Tutupan Lahan di Kabupaten Karo tutupan hutan seluas 78.688,13 Ha atau 36 persen, kemudian perkebunan dan ladang masing-masing 40.427,95 ha dan 62.805,73 ha, atau keduanya 47,22 persen. Lahan non budidaya masih cukup luas sebesar semak belukar seluas 21.598,35 ha atau 9,88 persen. Lahan permukiman hanya seluas 2.939,22 ha atau 1,34 persen. Area yang rawan akan bencana berupa lahan hamparan lahar/lava seluas 1.528 ha atau 0,7 persen.

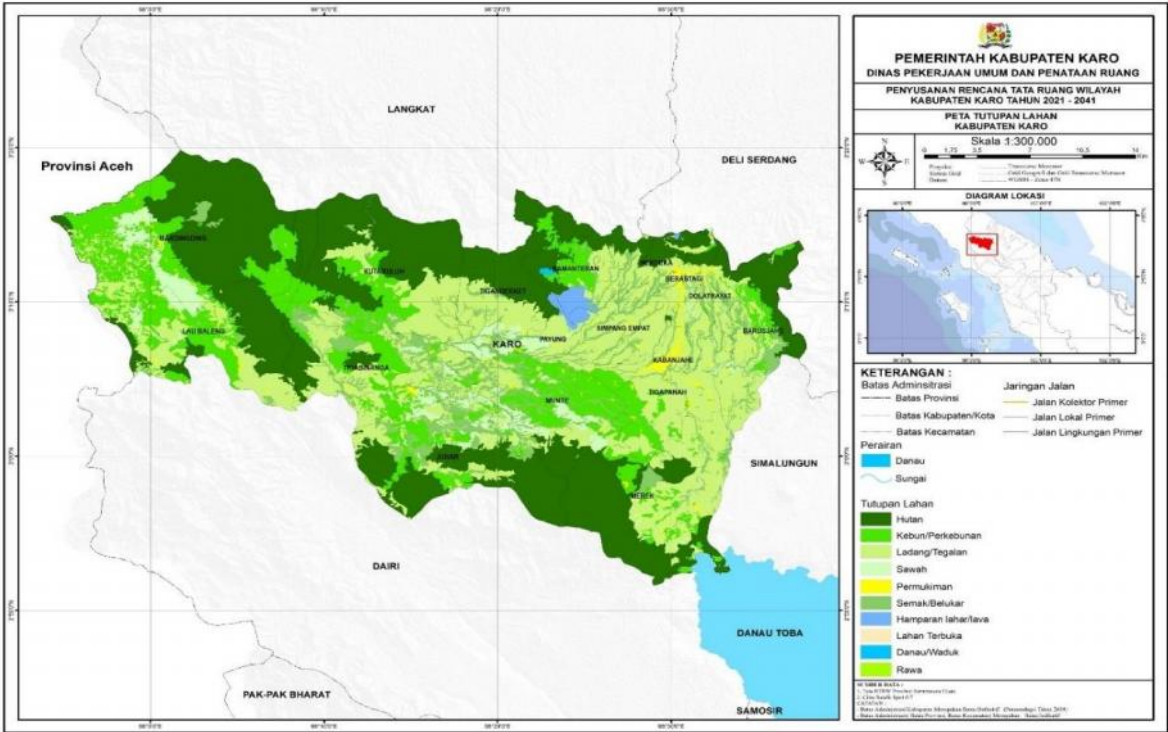
Tabel 2.4
Kondisi Tutupan Lahan Kabupaten Karo

Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Permukiman	2.939,22	1,34
Kebun/Perkebunan	40.427,95	18,49
Ladang/Tegalan	62.805,73	28,73
Sawah	10.280,39	4,70
Hutan	78.688,13	36,00
Kolam	12,70	0,01

Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Lahan Terbuka	48,02	0,02
Semak/Belukar	21.598,35	9,88
Hamparan lahar/lava	1.528,73	0,70
Rawa	2,65	0,00
Danau/Waduk	5,71	0,00
Danau	108,20	0,05
Sungai	145,69	0,07
Total	218.591,47	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Karo

Peta 2.7
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Karo



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

F. Pemanfaatan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo baru ditetapkan pada tahun 2022, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2045. Ketaatan terhadap tata ruang belum dapat dilaksanakan 100 persen, hal ini akibat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat dan kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahun 2024 ketaatan terhadap tata ruang baru mencapai 73 persen. Oleh karena itu, ke depan pengendalian pemanfaatan ruang dimaksud harus menjadi perhatian untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Tabel 2.5
Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Karo 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketaatan terhadap RTRW (%)	N/A	N/A	N/A	72	73

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo

Kedepannya, kondisi tutupan lahan Kabupaten Karo pasti ada perubahan. Perubahan dimaksud akibat pertumbuhan penduduk pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Karo. Lahan pertanian dan perkebunan cenderung akan berkurang, akan tetapi alih fungsi lahan tersebut akan dikendalikan secara ketat. Bahkan pada saat ini Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga mendapat tekanan yang besar akibat kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum maupun kepentingan umum lainnya. Alih fungsi lahan dimaksud akan dikendalikan secara ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Karo merupakan salah satu Kabupaten yang berada pada Kawasan rawan bencana. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Risiko Bencana yang diterbitkan oleh BNPB. Indeks risiko bencana dipengaruhi oleh komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dari ketiganya, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa diturunkan. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \text{Vulnerability/Capacity}$$

Dimana *hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

- 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
- 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- 7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen kapasitas (*capacity*) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan uraian pengaruh komponen dalam penurunan indeks risiko bencana serta strategi pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas, capaian penanggulangan bencana dinilai berdasarkan investasi peningkatan komponen kapasitas. Untuk itu, komponen bahaya dan kerentanan diasumsikan konstan atau sama dengan baseline IRBI 2013. Untuk itu, data-data yang digunakan dalam perhitungan IRBI adalah sebagai berikut:

- a) Komponen bahaya: mengacu pada baseline IRBI 2013 yang diolah dari KRB skala provinsi tahun 2011.
- b) Komponen kerentanan: mengacu pada baseline IRBI 2013 yang diolah dari KRB skala provinsi tahun 2011.
- c) Komponen kapasitas: dihitung berdasarkan kapasitas pemerintah daerah menggunakan perangkat Penilaian IKD (24 Indikator) tahun 2023.

Menurut laman <https://inarisk.bnnpb.go.id/irbi> tingkat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana adalah dalam Tingkatan Sedang. Sistem Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Baru terdiri dari 24 Indikator. Perangkat pengukuran IKD Baru dikembangkan oleh BNPB pada tahun 2020 hingga 2023. IKD Baru terdiri atas empat (4) pilar berdasarkan kuadran bencana, yang meliputi:

1. Standar Tata Kelola, Kebijakan, dan Perencanaan
2. Standar Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penguatan Sosial Ekonomi
3. Standar Perlindungan dan Pemulihan Infrastruktur Kritis
4. Standar Pelayanan Kedaruratan Bencana.

Empat pilar dari IKD Baru dipecah menjadi 24 Indikator. Pada IKD Baru, dikenalkan pembobotan sebagai upaya untuk memodelkan realita dan melalui proses refleksi berbasis pengetahuan dan pengalaman pakar-pakar kebencanaan di Indonesia. Selain itu, alat ukur IKD Baru telah melalui proses ujicoba penilaian di tahun 2021 pada 243 Kabupaten/Kota untuk memberikan masukan dalam penyempurnaannya. Adapun 24 Indikator pada perhitungan IKD adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan penanggulangan bencana;
- b. Kelembagaan penanggulangan bencana;
- c. Pendanaan untuk penanggulangan pengurangan risiko bencana;
- d. Pengarusutamaan PRB ke dalam pembangunan dan penataan ruang daerah;
- e. Sistem manajemen data dan informasi;
- f. Koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana lintas daerah;
- g. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi penanggulangan bencana bagi aparatur pemerintah daerah;
- h. Latihan dan kesiapsiagaan masyarakat;
- i. Sistem peringatan dini bencana daerah;
- j. Sistem kesehatan aman bencana;
- k. Sistem pendidikan aman bencana;
- l. Desa/kelurahan siaga dan tangguh bencana;
- m. Penguatan peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
- n. Perlindungan sosial dan penyediaan akses asuransi perlindungan sosial dan akses asuransi kebencanaan
- o. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur kritis-air;
- p. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur kritis-energi;
- q. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur kritis-telekomunikasi;
- r. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur kritis-transportasi;
- s. Perlindungan dan kesiapan pemulihan ketersediaan kebutuhan pangan;
- t. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur hijau;
- u. Perencanaan penanggulangan kedaruratan bencana;
- v. Kesiapan sistem komando dan sumberdaya manusia untuk operasi darurat;
- w. Kesiapan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (Pusdalops); dan
- x. Sistem manajemen logistik, peralatan dan sumber daya darurat.

Dari Analisis Kajian Resiko Bencana terdapat beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Karo yaitu bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Melalui Kajian Resiko Bencana terdapat 4 (empat) prioritas jenis bencana yaitu, letusan Gunung Api Sinabung, gempa bumi, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Rekapitulasi kajian bahaya di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo

Jenis Bahaya	Bahaya	
	Total Luas (ha)	Kelas
Banjir	7.542	Tinggi
Banjir Bandang	3.185	Tinggi
Cuaca Ekstrim	164.569	Tinggi
Gempa Bumi	212.723	Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan	66.117	Tinggi
Kekeringan	212.723	Tinggi
Letusan Gunung Api Sibayak	10.110	Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung	44.635	Tinggi
Longsor	103.845	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ **Banjir**

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal, antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan sejenisnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia.

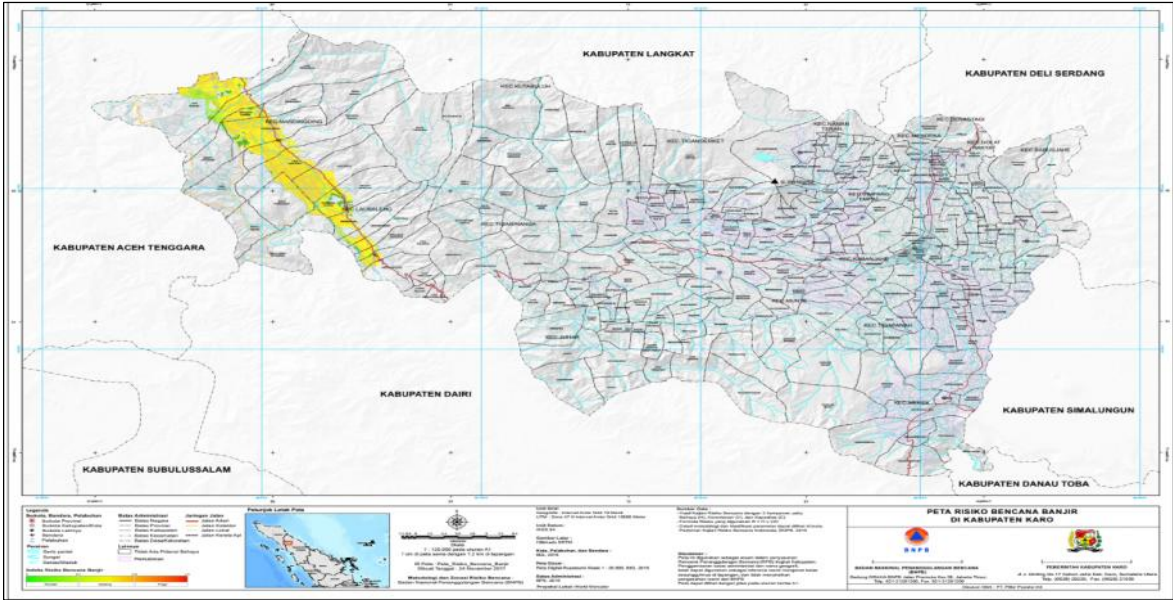
Tabel 2.7
Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Laubaleng	2.951	Tinggi
2	Mardinding	4.591	Tinggi
Total Kabupaten Karo		7.542	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Laubaleng dan Mardinding. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir di Kabupaten Karo adalah **7.542 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

Peta 2.8
Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ **Banjir Bandang**

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh kosentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai.

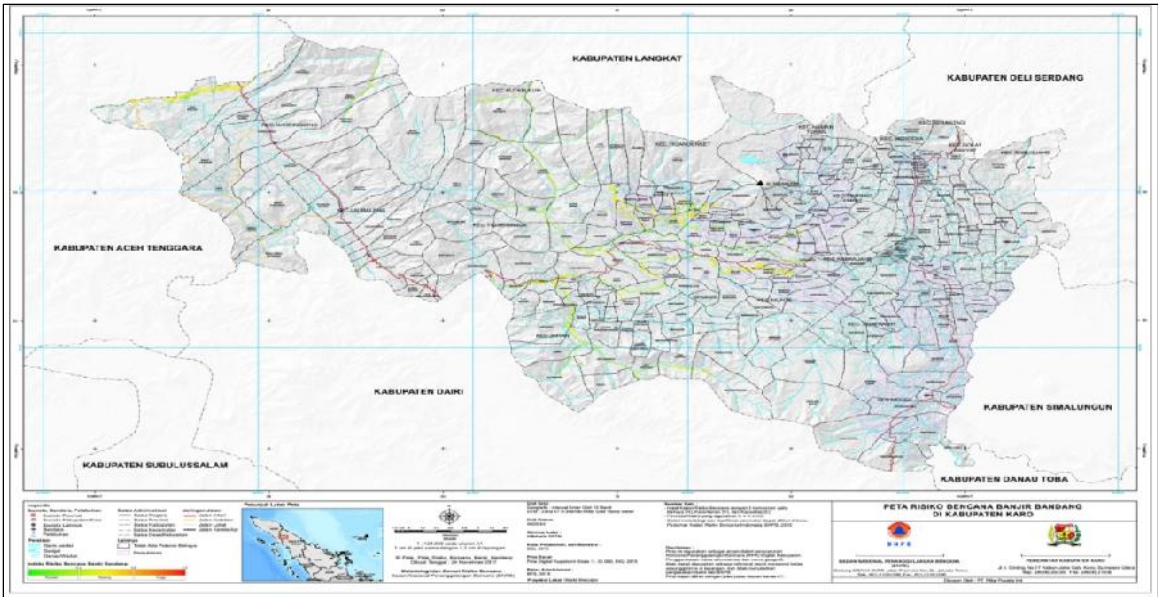
Tabel 2.8
Potensi Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Juhar	518	Tinggi
2	Kabanjahe	51	Tinggi
3	Kutabuluh	624	Tinggi
4	Laubaleng	7	Tinggi
5	Mardingding	397	Tinggi
6	Munte	465	Tinggi
7	Payung	160	Tinggi
8	Simpang Empat	54	Tinggi
9	Tigabinanga	515	Tinggi
10	Tiganderket	393	Tinggi
Total Kabupaten Karo		3.185	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir bandang, diperoleh potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Karo di 10 (Sepuluh) kecamatan, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir bandang di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **3.185 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak.

Peta 2.9
Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi.

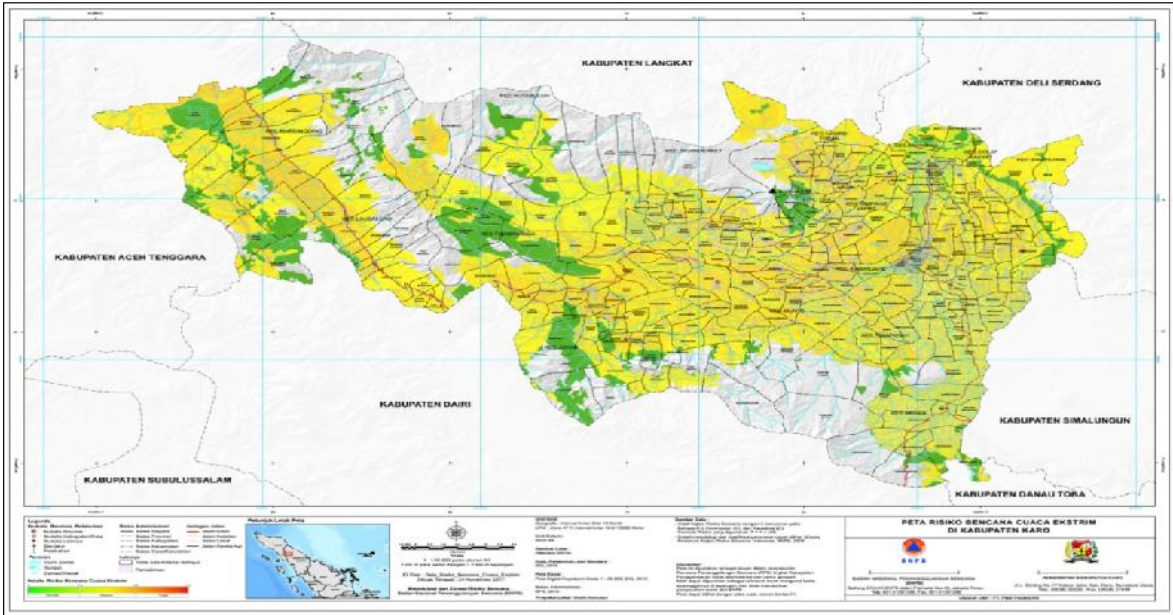
Tabel 2.9
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Barusjahe	12.267	Tinggi
2	Berastagi	3.050	Tinggi
3	Dolat Rakyat	3.225	Tinggi
4	Juhar	13.789	Tinggi
5	Kabanjahe	4.465	Tinggi
6	Kutabuluh	11.153	Tinggi
7	Laubaleng	16.620	Tinggi
8	Mardingding	17.910	Tinggi
9	Merdeka	4.393	Tinggi
10	Merek	7.292	Tinggi
11	Munte	11.326	Tinggi
12	Naman Teran	6.884	Tinggi
13	Payung	4.517	Tinggi
14	Simpang Empat	9.346	Tinggi
15	Tigabinanga	14.277	Tinggi
16	Tiganderket	5.371	Tinggi
17	Tigapanah	18.684	Tinggi
Total Kabupaten Karo		164.569	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo, sebagaimana tabel tersebut di atas dapat menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana cuaca ekstrim diperoleh bahwa potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo terdapat di 17 kecamatan dan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **164.569 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak.

Peta 2.10
Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ **Gempa Bumi**

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhuan batuan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>).

Tabel 2.10
Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo

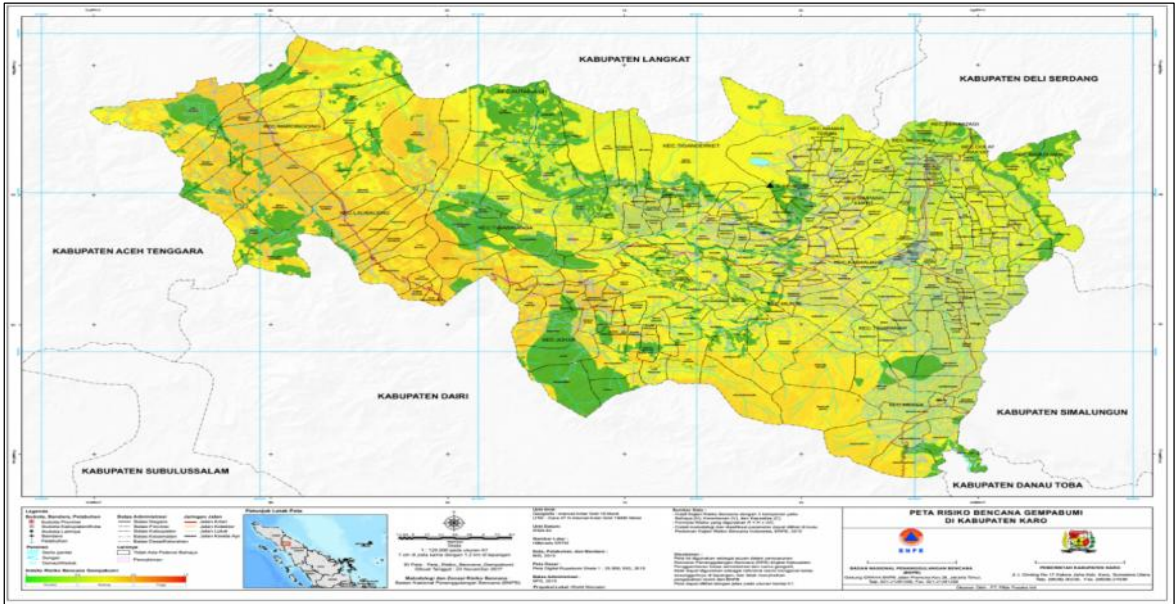
No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
1	Barusjahe	12.804	Sedang
2	Berastagi	3.050	Sedang
3	Dolat Rakyat	3.225	Sedang
4	Juhar	21.857	Tinggi
5	Kabanjahe	4.465	Sedang
6	Kutabuluh	19.569	Tinggi
7	Laubaleng	25.260	Tinggi
8	Mardingding	26.710	Tinggi
9	Merdeka	4.417	Sedang
10	Merek	12.551	Tinggi
11	Munte	12.564	Sedang
12	Naman Teran	8.782	Sedang
13	Payung	4.725	Sedang
14	Simpang Empat	9.348	Sedang

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
15	Tigabinanga	16.039	Tinggi
16	Tiganderket	8.675	Sedang
17	Tigapanah	18.684	Sedang
Total Kabupaten Karo		212.723	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Karo terdapat di 17 (Tujuh belas) kecamatan dan berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut sedangkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana gempa bumi di Kabupaten Karo adalah **212.723 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo dapat dilihat pada pada peta berikut.

Peta 2.11
Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ **Letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung**

Letusan gunung api bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun dan banjir lahar (*Definisi dan Jenis Bencana, BNPB*). Paramater yang digunakan untuk menghitung luas bahaya letusan gunung api antara lain zona aliran (aliran lava, aliran piroklastik, gas beracun, lahar erupsi, dan *suage*), dan zona jatuhan (jatuhan piroklastik). Hasil dari pengkajian potensi bahaya berdasarkan parameter tersebut menentukan kelas bahaya setiap wilayah Kabupaten Karo. Maka diperoleh hasil kajian bahaya letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung untuk Kabupaten Karo seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak
per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
Letusan Gunung Api Sibayak			
1	Berastagi	1.042	Rendah
2	Merdeka	7.389	Sedang
3	Naman Teran	1.679	Tinggi
Total Kabupaten Karo		10.110	Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung			
1	Kabanjahe	144	Rendah
2	Kutabuluh	31	Rendah
3	Merdeka	90	Rendah
4	Munte	444	Rendah
5	Naman Teran	13.687	Tinggi
6	Payung	14.771	Tinggi
7	Simpang Empat	8.812	Tinggi
8	Tigabinanga	12	Rendah
9	Tiganderket	6.639	Tinggi
Total Kabupaten Karo		44.635	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana Gunung Api Sibayak dan Sinabung, diketahui potensi luas bahaya letusan Gunung Api Sibayak tersebar di 3 (Tiga) kecamatan dan Gunung Api Sinabung pada 9 (Sembilan) kecamatan. Berdasarkan luas dan kelas bahaya, dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana letusan Gunung Api Sibayak adalah **10.110 ha** yang berada pada kelas **tinggi** dan luas bencana Gunung Api Sinabung adalah **44.635 ha** yang berada pada kelas **tinggi**.

❖ Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (*BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>*). Faktor utama penyebab terjadinya tanah longsor adalah jenis tanah pada lapisan atas permukaan (*top soil*), vegetasi penutup, kemiringan lereng, dan tinggi rendahnya curah hujan.

Dari parameter bahaya tanah longsor tersebut, maka dapat ditentukan potensi luas bahaya terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Karo. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Potensi Bahaya di Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Barusjahe	6.438	Sedang
2	Berastagi	1.101	Sedang
3	Dolat Rakyat	1.172	Sedang

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
4	Juhar	14.992	Sedang
5	Kabanjahe	373	Sedang
6	Kutabuluh	15.032	Sedang
7	Laubaleng	16.257	Sedang
8	Mardingding	16.570	Sedang
9	Merdeka	2.434	Sedang
10	Merek	4.634	Sedang
11	Munte	3.038	Sedang
12	Naman Teran	3.770	Sedang
13	Payung	1.366	Sedang
14	Simpang Empat	1.794	Sedang
15	Tigabinanga	8.756	Sedang
16	Tiganderket	4.426	Sedang
17	Tigapanah	1.694	Sedang
Total Kabupaten Karo		103.845	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Tabel tersebut menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana tanah longsor. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo terdapat di 17 (tujuh belas) kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor di Kabupaten Karo, total luas bahaya adalah **103.845 ha** yang berada pada kelas **sedang**.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Karo, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam. Wilayah ini dikenal dengan kondisi geografisnya yang berbukit, tanahnya yang subur, serta iklimnya yang sejuk, menjadikannya daerah yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, pertambangan, sumber daya air, dan pariwisata. Jika dikelola dengan baik, sumber daya ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

A. Pertanian

Sektor Pertanian merupakan bagian terpenting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Peranan sektor ini terhadap PDRB Karo pada tahun 2024 sekitar 53,04 persen untuk harga berlaku. Sektor pertanian dikelompokkan menurut subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor kehutanan.

❖ Subsektor Tanaman Pangan

Beberapa kategori dari intensifikasi padi di Kabupaten Karo yaitu Intensifikasi Padi Sawah (Insus) dan Intensifikasi Padi Ladang (Inmum). Secara keseluruhan perkembangan produksi padi sawah dan ladang di Kabupaten Karo realisasi mencapai 185.858 Ton dengan Luas Tanam 20.233 ha untuk Padi Sawah melebihi dari target 19.327 ha. Kecamatan Mardingding memiliki realisasi tertinggi seluas 8.766 ha dibandingkan target 6.444 ha, menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebaliknya, Kecamatan Munte dan Barusjahe mengalami realisasi yang jauh di bawah

target. Munte hanya mencapai 699 ha dari target 1.737 ha, dan Barusjahe 384 ha dari target 625 ha.

Secara keseluruhan Intensifikasi Padi Ladang (Inmum) Realisasi lebih rendah dari target, yaitu 6.050 ha dari target 9.652 ha. Kecamatan dengan realisasi tertinggi yaitu Tigapanah realisasi 829 ha dari target 1.250 ha dan Mardinding realisasi 954 ha dari target 843 ha. Kecamatan dengan realisasi terendah yaitu Tigabinanga realisasi 91 ha dari target 650 ha dan Juhar realisai 115 ha dari target 426 ha.

Perkembangan produksi padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Kabupaten Karo

Kecamatan		Intensifikasi PadiSawah/ Wet Land Paddy		Intensifikasi Padi Ladang/ Dry Land Paddy			
		Insus		Insus		Inmum	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mardinding	6,444	8766	-	-	843	954
2	Laubaleng	5,661	6258	-	-	621	457
3	Tigabinanga	270	146	-	-	650	91
4	Juhar	3,653	3167	-	-	426	115
5	Munte	1,737	699	-	-	565	510.5
6	Kutabuluh	20	12	-	-	1,125	300
7	Payung	868	773	-	-	643	275
8	Tiganderket	14	11	-	-	991	688.5
9	Simpang Empat	-	0	-	-	980	870
10	Naman Teran	-	0	-	-	30	45
11	Merdeka	-	0	-	-	-	0
12	Kabanjahe	-	0	-	-	162	152
13	Berastagi	-	0	-	-	-	0
14	Tigapanah	30	15	-	-	1,250	829
15	Dolat Rayat	-	0	-	-	15	15
16	Merek	5	2	-	-	641	246
17	Barusjahe	625	384	-	-	710	502
	Karo	19,327	20,233	-	-	9,652	6,050

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2025

❖ Subsektor Perkebunan

Tahun 2024 luas area perkebunan di Kabupaten Karo seperti kelapa sawit sebesar 1.723 ha, perkebunan kelapa sebesar 1.703 ha, karet sebesar 205 ha, kopi sebesar 7.618 ha, kakao sebesar 4.123 ha, dan tembakau sebesar 479 ha. Sedangkan untuk produksi perkebunan di Kabupaten Karo, untuk kelapa sawit sebesar 6.588,29 ton, kelapa sebesar 1.360,75 ton, karet sebesar 160,75 ton, kopi sebesar 7.698,73 ton, kakao sebesar 3.640,68 ton, dan tembakau sebesar 499,74 ton. Pada umumnya usaha perkebunan di Kabupaten Karo adalah usaha perkebunan rakyat. Jenis tanaman yang biasa ditanam ialah karet, kopi, kelapa, tembakau, coklat, dan kelapa sawit. Untuk data hasil produksi perkebunan dapat dilihat pada

Tabel dan data realisasi Intensifikasi tanaman Palawija di Kabupaten Karo dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.14
Hasil Produksi Perkebunan Kabupaten Karo Tahun 2022–2024 (Ribuan ton)

Jenis Tanaman	2022	2023	2024
Kelapa Sawit	6,60	6,55	6,59
Kelapa	1,37	1,45	1,36
Karet	0,08	0,08	0,16
Kopi	8,34	7,57	7,70
Kakao	3,43	3,47	3,64
Tebu	-	-	-
Teh	-	-	-
Tembakau	0,40	0,40	0,50

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2025

Tabel 2.15
Realisasi Intensifikasi Tanaman Palawija (Ha) Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Kedele
1	Mardinding	28,230	-	-
2	Lau Baleng	16,325	-	-
3	Tigabinanga	19,215	-	-
4	Juhar	10,765	-	-
5	Munte	14,322	-	-
6	Kutabuluh	11,562	2	-
7	Payung	710	6	-
8	Tiganderket	4,481	-	-
9	Simpang Empat	1,731	-	-
10	Naman Teran	0	-	-
11	Merdeka	10	-	-
12	Kabanjahe	487	-	-
13	Berastagi	0	-	-
14	Tigapanah	831	-	-
15	Dolatrayat	18	-	-
16	Merek	839	-	-
17	Barus Jahe	810	-	-
Jumlah		110.336	-	-

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2025

❖ **Subsektor Peternakan**

Usaha Peternakan umumnya diusahakan oleh rakyat yang bertujuan untuk dikonsumsi dan juga menambah pendapatan rumah tangga. Ternak yang umum dipelihara masyarakat Karo adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, kelinci, ayam buras, itik dan itik manila. Beberapa populasi ternak pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Populasi Ternak Kabupaten Karo Menurut Kecamatan Tahun 2024 (ekor)

Kecamatan	Sapi Potong	Sapi Perah	Kerbau	Kuda	Kambing / Domba	Babi	Kelinci
Mardingding	1,789	-	98	-	1,145	674	-
Lau Baleng	3,195	-	636	-	1,037	910	-
Tigabinanga	1,214	-	19	-	1,000	2,137	-
Juhar	1,201	-	346	-	1,352	1,533	-
Munte	964	-	89	-	3,141	2,083	37
Kutabuluh	639	-	67	-	771	404	-
Payung	755	-	31	-	1,075	401	-
Tiganderket	1,044	-	35	-	1,499	493	-
Simpang Empat	1,356	-	8	-	2,960	1,105	155
Naman Teran	84	-	15	-	439	-	-
Merdeka	156	-	8	88	767	84	562
Kabanjahe	611	-	31	-	975	2,188	113
Berastagi	341	16	6	119	1,013	379	1,582
Tigapanah	1,372	6	233	-	2,719	2,117	17
Dolatrayat	109	-	15	-	878	90	250
Merek	232	2,995	87	23	581	2,241	283
Barus Jahe	901	-	79	-	3,171	346	950
Jumlah	15,983	3,017	1,803	230	23,940	17,185	3,949

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2025

B. Pariwisata

Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi yang luar biasa yang tidak kalah menariknya dengan daerah wisata lainnya yang ada di Indonesia. Pariwisata Kabupaten Karo memiliki prospek yang sangat strategis bagi daerah dan menjadi sektor penting yang dapat diandalkan ke depan untuk menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup masyarakat untuk mengenal alam dan budaya ke beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Karo.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Karo perlu diarahkan pada terciptanya kesempatan kerja dan lapangan usaha, setidaknya di daerah sekitar obyek wisata. Oleh karena itu, penataan dan pemeliharaan obyek-obyek wisata perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk mendukung pengembangan kepariwisataan tersebut maka keterlibatan masyarakat luas baik dalam bentuk sadar wisata maupun keterlibatan langsung sebagai investor di bidang kepariwisataan perlu dikembangkan. Oleh karena itu, bentuk kerjasama pengelolaan obyek/kawasan wisata dengan pihak swasta/investor perlu mendapat perhatian khusus, terutama bagi obyek wisata yang potensial dipasarkan.

Kabupaten Karo juga berada pada posisi strategis dalam pengembangan pariwisata yaitu letak geografis yang strategis terletak pada jajaran Bukit Barisan, Sebagian besar wilayah merupakan dataran tinggi, menjadi perlintasan antar kabupaten dan Provinsi, memiliki banyak potensi wisata antara lain wisata alam, wisata religi dan budaya, wisata kuliner dan wisata Sejarah dan memiliki potensi alam seperti pertanian yang berlimpah dengan udara pegunungan yang sejuk dan asri. Sektor pariwisata diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan daya tarik obyek wisata yang meliputi keindahan dan kekayaan alam flora, daya

tarik tradisi yang mengandung seni dan budaya serta adat istiadat. Semua itu didukung oleh jasa dan sarana pariwisata seperti biro perjalanan, penyediaan akomodasi serta pembangunan dan pembenahan fasilitas wisata. Adapun obyek wisata di Kabupaten Karo antara lain: wisata alam, seperti obyek wisata Air Terjun Sipiso-piso, Air terjun Pola Tebu, Kawasan wisata Air Panas Semangat Gunung-Daulu, Gunung Sibayak, Taman Mejuah-juah Berastagi, Bukit Gundaling, Danau Lau Kawar, Gunung Sinabung, Gua Liang Dahar, Deleng Kutu, Air Terjun Sipiso-piso, Tongging, dan lain-lain wisata Sejarah dan Budaya, seperti Rumah Adat Desa Lingga, Desa Dokan dan Desa Pengambatan), pakaian adat, budaya kerja tahun, benda-benda peninggalan sejarah, rumah interniran Soekarno, tugu pertempuran, atraksi wisata, even wisata, dll. Selain itu, wilayah Kabupaten Karo juga merupakan wilayah Destinasi unggulan provinsi Sumatera Utara dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba serta bagian Geopark Kaldera Toba. Kabupaten Karo merupakan salah satu *Key Tourism Area* (KTA) yang sangat potensial untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata tematik. Untuk melihat perkembangan kunjungan wisatawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tamu Domestik	227.812	262.250	500.656	780.322	1.402.549
2	Tamu Asing	0	0	0	0	32.248
Jumlah		227.812	262.250	500.656	780.322	1.434.797

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

2.1.1.3. Berketahanan Energi, Air dan Pangan

Energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Ketahanan energi yang baik menunjukkan bahwa daerah memiliki akses yang memadai dan pemanfaatan energi yang efisien. Hal ini penting karena akses yang memadai terhadap energi listrik mendukung produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, efisiensi energi yang tinggi mengurangi dampak lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Akses listrik yang luas juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan fasilitas dasar seperti penerangan, pemanas/memasak, dan perangkat elektronik. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengukur persentase penduduk yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang cukup dalam jangka waktu tertentu, mencerminkan tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di masyarakat. Ketahanan pangan yang baik penting untuk memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi. Hal ini penting karena kecukupan gizi meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Selain itu, gizi yang baik mendukung kemampuan belajar anak-anak dan produktivitas kerja orang dewasa. Memastikan semua penduduk mendapatkan cukup pangan juga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ketahanan air yang baik menunjukkan bahwa daerah mampu menyediakan sumber daya air yang memadai dan aman bagi penduduknya. Hal ini penting karena akses terhadap air minum yang aman mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air. Selain itu, ketersediaan air baku mendukung irigasi

dan produksi pertanian, yang penting untuk ketahanan pangan. Ketersediaan air yang memadai juga mendukung industri dan kebutuhan ekonomi lainnya, mendukung pembangunan ekonomi daerah.

A. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Penilaian menggunakan IKP memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi di suatu wilayah (kabupaten/kota) dan memberikan gambaran peringkat pencapaian pangan wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional, berikut adalah skor IKP Kabupaten Karo dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.18
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Pangan	83,37	83,22	80,36	81,35	82,28

Sumber: Badan Pangan Nasional

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Karo mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2024, IKP kembali meningkat menjadi **82,28**, menunjukkan tren pemulihan yang positif. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam aspek ketahanan pangan, baik dari segi produksi, distribusi, maupun kebijakan yang mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Karo. Secara keseluruhan, meskipun mengalami fluktuasi, indeks ketahanan pangan Kabupaten Karo tetap berada dalam kategori yang cukup baik, dengan tren perbaikan dalam dua tahun terakhir. Upaya peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan perlu terus dilakukan untuk memastikan stabilitas pangan di Kabupaten Karo, selain itu diversifikasi pangan perlu terus ditekankan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan yang cenderung fokus pada satu komoditas.

B. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidacukupan pangan (*Prevalence of Undernourishment/ PoU*) merupakan indikator yang mengukur proporsi penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang diperlukan untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	4,56	3,78	6,42	5,42	

Sumber: Badan Pangan Nasional

PoU di Kabupaten Karo, mencapai 5,42 persen pada tahun 2023 menurun dari tahun sebelumnya, artinya penduduk di Kabupaten Karo

yang mengkonsumsi makanan tetapi kebutuhan energinya kurang, tidak sampai 5,42 persen dari total penduduk, angka tersebut perlu untuk terus ditekan. Peningkatan PoU mengindikasikan adanya penurunan dalam akses atau ketersediaan pangan yang memadai bagi Masyarakat dan sebaliknya. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya pangan dapat berkontribusi terhadap peningkatan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Strategi yang dapat diterapkan antara lain peningkatan produksi pangan lokal, perbaikan distribusi pangan, penyuluhan gizi, serta program bantuan sosial yang tepat sasaran. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Karo dapat ditekan, sehingga masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

C. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita merujuk pada jumlah total konsumsi listrik yang digunakan oleh setiap individu dalam suatu wilayah atau negara, yang dihitung berdasarkan pembagian total konsumsi listrik dengan jumlah penduduk. Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Karo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat sehingga banyaknya kebutuhan akan listrik di berbagai sektor kehidupan seperti rumah tangga, industri, dan teknologi. Peningkatan konsumsi listrik per kapita ini seiring dengan bertumbuhnya jumlah penduduk dan berkembangnya infrastruktur yang mendukung akses Listrik. Listrik menjadi salah satu kebutuhan pokok yang tidak hanya mendukung kegiatan rumah tangga, tetapi juga mendukung sektor industri, pendidikan, dan kesehatan.

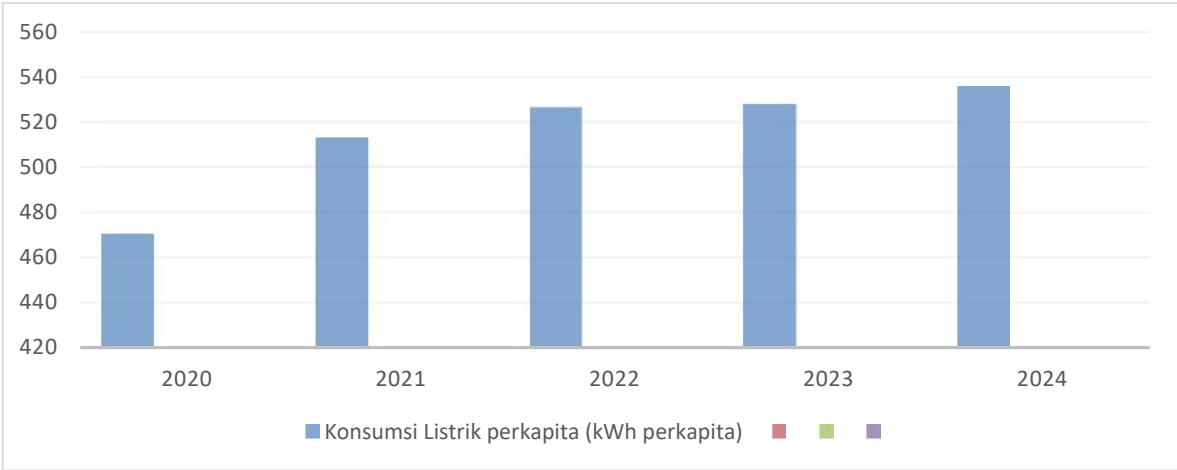
Seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk periode selanjutnya, maka permintaan untuk listrik dari sektor industri dan komersial akan semakin meningkat. Untuk itu pemerintah harus terus berusaha untuk meningkatkan infrastruktur, mengembangkan infrastruktur, efisiensi energi dan diversifikasi energi dengan cara mendorong energi terbarukan. Konsumsi Listrik perkapita tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	421.997	409.077	414.429	420.799	426,471
2	Konsumsi Listrik (kWh)	198.492.250	209.737.646	218.076.914	222.021.744	228.492.886
3	Konsumsi Listrik perkapita	470,364	512,709	526,210	527,619	535,776

Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe, 2025

Grafik 2.1
Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe, 2025

D. Persentase penduduk berakses air minum layak dan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan

Untuk meningkatkan akses penduduk terhadap air minum layak termasuk akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan maka diperlukan beberapa hal untuk dilakukan yakni perluasan, peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada serta pembangunan SPAM baru pada daerah daerah yang belum tersedia. Dalam meningkatkan akses tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo menghadapi beberapa kendala antara lain sumber-sumber mata air yang berada di kawasan hutan, dan dibeberapa lokasi sulit menemukan sumber mata air. Untuk mempertahankan peningkatan persentase penduduk berakses air minum layak dan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan maka diperlukan pendanaan secara kolektif yaitu APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta pendanaan alternatif yang memungkinkan.

Tabel 2.21
Persentase Penduduk berakses air minum layak dan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penduduk berakses air minum layak (%)	68,7	69,23	70,35	70,45	70,50
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	37,75	38,28	39,40	39,45	39,5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo, 2025

2.1.1.4. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup yang baik sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting karena lingkungan yang bersih dan sehat mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pengelolaan lingkungan yang baik mendukung pembangunan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Lingkungan hidup yang berkualitas juga meningkatkan daya tarik daerah bagi wisatawan dan investor. Pengelolaan Keanekaragaman

Hayati yang tinggi menunjukkan bahwa daerah berhasil melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. Hal ini penting karena keanekaragaman hayati yang terjaga mendukung ekosistem yang seimbang dan berfungsi dengan baik. Selain itu, keanekaragaman hayati yang kaya dapat menjadi daya tarik pariwisata dan mendukung ekonomi hijau. Ekosistem yang sehat juga mendukung ketahanan pangan, air bersih, dan kesehatan masyarakat.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan indeks tutupan lahan. Capaian IKLH Kabupaten Karo tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.22
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	66,55	66,05	71,66	72,21

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, capaian IKLH di Kabupaten Karo menunjukkan kecenderungan yang meningkat hingga tahun 2024 Nilai IKLH sebesar 72,21 poin. Hal ini mengidentifikasikan bahwa terjadi perbaikan dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, nilai ini juga mencerminkan bahwa kondisi lingkungan telah mengalami perbaikan dan berada pada tingkat yang lebih baik selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Karo.

B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Karo hanya terdapat pada lokasi yang telah dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah dikarenakan Kabupaten Karo belum memiliki Instalasi Penegelolaan Lumpur Tinja sebagai tempat pembuangan akhir lumpur tinja yang di sedot dari tangka septik rumah tangga. Untuk meningkatkan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman maka selain pembangunan IPLT juga diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat agar membangun tangki septik kedap air.

Tabel 2.23
Rumah tangga dengan akses sanitasi aman
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	2,88	3,03	3,32	3,5	3,64

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo, 2025

C. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah artinya adalah jumlah atau porsi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang kemudian berhasil diproses, dikelola, dan diolah melalui fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah, seperti TPA (Tempat Pembuangan Akhir), TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu), atau SPA (Sentra Pengolahan Sampah). Untuk melihat perkembangan Capaian Timbulan sampah yang ditangani Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 yaitu:

Tabel 2.24
Capaian Timbulan sampah yang ditangani
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan sampah yang ditangani (%)	74,86	84	85	78,06	78,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Secara garis besar, terdapat peningkatan pengelolaan sampah, namun penurunan terjadi di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya tantangan atau perubahan kondisi yang mempengaruhi efektivitas penanganan sampah. Sudah ada upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Karo namun tantangan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan pendanaan masih menjadi kunci permasalahan yang perlu segera diatasi agar pengelolaan sampah dapat lebih efektif dan ramah lingkungan. Hal ini menjadi perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi atau kebijakan yang diterapkan guna memperbaiki kinerja pada penanganan timbulan sampah di Kabupaten Karo secara berkelanjutan.

D. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Upaya peningkatan layanan pengumpulan sampah di Kabupaten Karo terus dilakukan melalui pembenahan infrastruktur, peningkatan koordinasi antar instansi, serta program edukasi kepada masyarakat agar partisipasi dalam pengelolaan sampah dapat meningkat. Berikut capaian proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah:

Tabel 2.25
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase cakupan area Pelayanan (%)	28,72	35,32	35	35	41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Dalam 5 (lima) tahun terakhir persentase cakupan area pelayanan mengalami peningkatan, dari kondisi tahun 2020 sebesar 28,72 persen menjadi 41 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam memperluas jangkauan layanan. Ini dapat diartikan bahwa secara bertahap, lebih banyak wilayah atau rumah tangga mendapatkan akses terhadap layanan yang disediakan dari tahun ke tahun.

2.1.1.5. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Karo merupakan wilayah rawan bencana, dimana beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Karo yaitu bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Melalui Kajian Resiko Bencana terdapat 4 (empat) prioritas jenis bencana yaitu, letusan Gunung Api Sinabung, gempa bumi, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Indeks Risiko Bencana yang rendah menunjukkan bahwa daerah memiliki tingkat risiko bencana yang rendah atau telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang efektif. Hal ini penting karena mengurangi risiko bencana membantu melindungi nyawa dan properti masyarakat. Selain itu, mengurangi dampak bencana alam mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, serta mempercepat pemulihan pasca bencana. Daerah dengan risiko bencana rendah juga lebih menarik bagi investor karena menawarkan lingkungan bisnis yang lebih aman dan stabil.

Kabupaten Karo menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim, terutama karena posisi geografisnya yang rawan bencana dan ketergantungannya pada sektor pertanian dan pariwisata. Pembangunan berkelanjutan dan adaptif terhadap iklim sangat penting untuk memastikan daya tahan sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah. Isu pembangunan terkait perubahan iklim di Kabupaten Karo sangat relevan mengingat karakteristik wilayah Karo yang bergunung-gunung, memiliki kawasan hutan lindung, dan sangat bergantung pada sektor pertanian serta pariwisata alam. Kenaikan suhu dan ketidakpastian iklim, banjir dan longsor, degradasi hutan dan lahan, ketahanan pangan dan energi, ketahanan sektor pariwisata

Penurunan emisi gas rumah kaca yang signifikan menunjukkan komitmen daerah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini penting karena mengurangi emisi GRK adalah langkah penting dalam mitigasi perubahan iklim global yang berdampak pada suhu, pola cuaca, dan fenomena alam ekstrem. Selain itu, penurunan emisi GRK mengurangi polusi udara, yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Daerah yang berhasil mengurangi emisi GRK juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan menunjukkan tanggung jawab lingkungan yang tinggi.

A. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah menyadari perubahan iklim merupakan persoalan krusial, berdampak luas pada berbagai sendi kehidupan serta dapat mempengaruhi capaian pembangunan nasional atas dasar itu persoalan perubahan iklim memerlukan respon yang cepat, tepat, dan terintegrasi. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan indikator penting dalam pembangunan rendah karbon, yang mengukur jumlah emisi GRK per unit *output* ekonomi. Penurunan intensitas emisi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan emisi GRK yang lebih rendah, mencerminkan efisiensi dan keberlanjutan dalam Pembangunan.

Tabel 2.26
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	924,005	50.408,939	50.425,018	83.532,448	--

sumber: AKSARA, Bappenas

Di Kabupaten Karo Realisasi penurunan emisi gas rumah kaca ditopang oleh beberapa faktor antara lain dari sektor pertanian, transportasi dan persampahan. Angka 83.532,44817 ton CO₂ eq pada Tahun 2023 mengacu pada jumlah total pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berhasil direduksi atau diproyeksikan dalam suatu periode tertentu. Ini adalah ukuran absolut dari penurunan emisi, yang menyatukan berbagai jenis GRK ke dalam satu nilai perbandingan (dengan dasar efek pemanasan yang setara dengan CO₂). Sementara itu, intensitas emisi mengukur jumlah emisi yang dihasilkan per unit *output* ekonomi, misalnya per unit Produk Domestik Bruto (PDB) atau per unit produksi. Jadi, penurunan intensitas emisi menunjukkan bahwa dalam setiap unit kegiatan ekonomi, emisi yang dilepaskan semakin sedikit. Artinya, meskipun angka 83.532,44817 ton CO₂ eq menunjukkan pengurangan total yang signifikan, jika intensitas emisi juga menurun, hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi dengan dampak lingkungan yang lebih rendah, karena setiap unit output ekonomi menghasilkan emisi yang lebih sedikit.

B. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Indeks Risiko Bencana (IRBI) adalah alat untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah. IRBI juga menunjukkan riwayat bencana yang pernah terjadi di wilayah tersebut.

IRBI disusun oleh BNPB dan dapat memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nilai-nilai dalam IRBI dapat menjadi panduan untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana. Tujuan IRBI adalah:

-) Memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia
-) Memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana
-) Memberikan panduan untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana
-) Meningkatkan ketangguhan masyarakat

IRBI mencakup nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karo dapat terlihat dari tabel sebagai berikut

Tabel 2.27
Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
IRBI	107,99	100,62	109,41	103,81

Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>

C. Indeks Kapasitas Daerah (IKD)

Kapasitas daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana. Indeks Kapasitas Daerah (IKD) adalah alat untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Tujuan IKD Mengukur kapasitas penanggulangan bencana, Membantu menyusun peta kapasitas, Memutakhirkan peta risiko bencana, Membantu pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kapasitas. Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini. Berdasarkan <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi> Tingkat Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana adalah Tingkatan Sedang.

Tabel 2.28
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
IKD	-	0.37	0.47	0.49	0.48

Sumber: BPBD Kabupaten Karo, 2025

Pada tabel tersebut Penurunan Nilai IKD pada tahun 2024 disebabkan karena dokumen KRB dan RPB belum diupdate dan dinilai oleh BNPB.

2.1.1.6. Aspek Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Secara demografi berdasarkan hasil proyeksi penduduk hasil sensus penduduk 2020, pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Karo adalah berjumlah 426.471 jiwa yang mendiami wilayah seluas 2.206,87 km². Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kabanjahe sebanyak 77.672 jiwa, sedangkan Laju Pertumbuhan tertinggi berada di Kecamatan Merek sebesar 2,20% dan kepadatan tertinggi ada di Kecamatan Kabanjahe sebesar 2.263,97 km².

A. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. rasio ketergantungan juga bisa diartikan sebagai ukuran

demografi dari rasio jumlah tanggungan terhadap total penduduk angkatan kerja di suatu wilayah atau Negara.

Tabel 2.29
Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Ketergantungan (%)	57,17	51,84	49,17	47,64	47,42

Sumber: BPS, 2025

Rasio ketergantungan Kabupaten Karo selama 5 (lima) tahun menunjukkan tren positif menurun dari tahun ke tahun sehingga setiap tahunnya yang berarti beban ketergantungan terhadap penduduk yang tidak produktif semakin menurun. Pada tahun 2024 rasio ketergantungan sebesar 47,42 artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 47-48 penduduk nonproduktif. Rasio ketergantungan tersebut dikategorikan rendah karena angka sudah mencapai di bawah 50. Rasio ketergantungan tersebut dapat menjadi indikator kemajuan ekonomi Kabupaten Karo, hal ini diartikan ketika rasio ketergantungan tinggi maka pertumbuhan ekonomi terganggu atau penghasilan masyarakat rendah karena beban tinggi, sementara itu rasio yang rendah dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

B. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, rasio jenis kelamin bermanfaat dalam perencanaan pembangunan berwawasan gender.

Tabel 2.30
Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Karo 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Jenis Kelamin	97,80	98,51	98,00	98,30	98,42

Sumber: BPS, 2025

Secara umum jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Karo lebih sedikit dibanding pendudukan perempuan. Pada tahun 2024 mencapai nilai 98,42 artinya bahwa terdapat 98 penduduk laki-laki berbanding 100 penduduk perempuan. Data diatas juga menunjukkan bahwa hampir setiap tahun kelahiran anak laki-laki selalu lebih sedikit dari perempuan akan tetapi trennya menuju keseimbangan dengan penduduk perempuan.

C. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, perkembangan wilayah, dan dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan data kepadatan penduduk selama lima tahun terakhir, pada tahun 2024 merupakan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 193,25 km². Dilihat dari kewilayahannya 3 (tiga) kecamatan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Kabanjahe dengan kepadatan 2.263,97 km², Berastagi sebesar 1.494,46 km², dan Dolat Rayat kepadatan 458 km². Sedangkan kepadatan yang rendah berada di Kecamatan Kutabuluh sebesar 51,77 km², Mardinding dengan kepadatan 64,92 km², dan Juhar sebesar 69,86 km².

Tabel 2.31
Kepadatan Penduduk Kabupaten Karo 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Wilayah	2.206,87 km ²				
Jumlah Penduduk	404.998	409.077	414.429	420.799	426.471
Kepadatan Penduduk	183,52	185,37	187,79	190,68	193,25

Sumber: BPS, 2025

D. Kondisi Laju Pertumbuhan Penduduk, Piramida Penduduk berdasarkan kelompok umur dan jensi kelamin

Penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2015 berjumlah 389.591 jiwa dengan rincian yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 193.397 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 196.194 jiwa. Tahun 2020, penduduk Kabupaten Karo meningkat menjadi 421.997 dengan rincian yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 209.389 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan 212.608 jiwa.

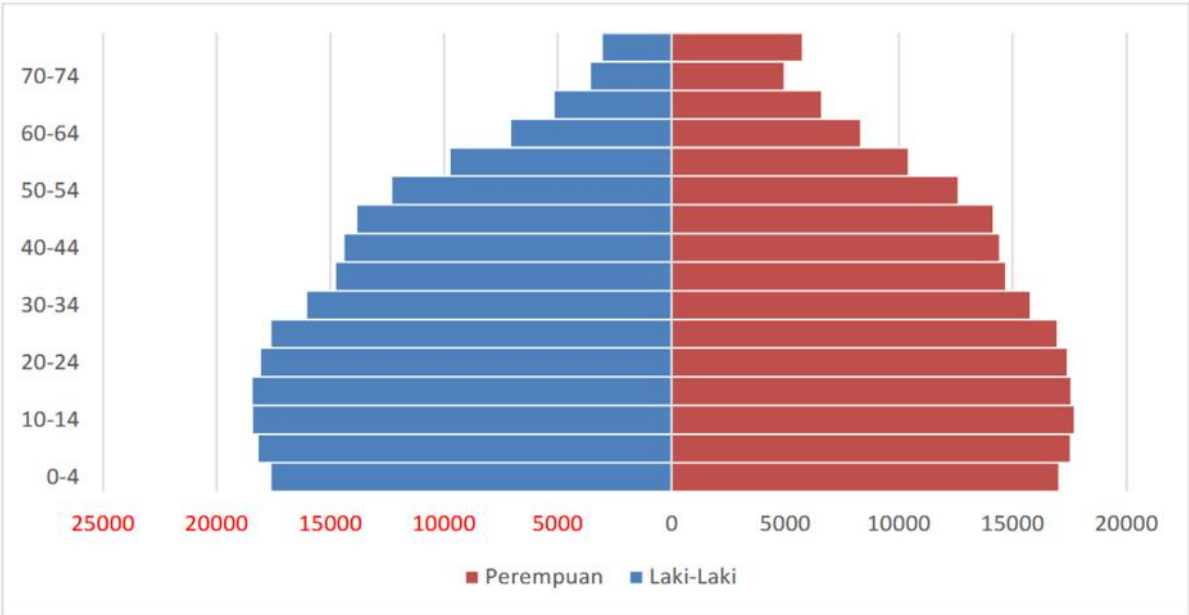
Tabel 2.32
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2010	174.970	177.626	352.596
2015	193.397	196.194	389.591
2020	209.389	212.608	421.997
2021	202.327	206.750	409.077
2022	205.035	209.394	414.429
2023	208.600	212.199	420.799
2024	211.531	214.940	426.471

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2024, penduduk Kabupaten Karo mencapai 426.471 jiwa. Dibanding jumlah penduduk pada tahun 2023, terjadi pertambahan penduduk sebesar 5.672 jiwa (1,32 persen). Dengan luas wilayah mencapai 2.206,87 km², kepadatan penduduk Kabupaten Karo di tahun 2023 diperkirakan sebesar 193,25 jiwa/km². Komposisi penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki, dimana pada tahun 2024 terdapat 214.940 jiwa penduduk Kabupaten Karo berjenis kelamin perempuan sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 211.531 jiwa.

Grafik 2.2
Piramida Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

Piramida penduduk tersebut merupakan piramida penduduk muda yang menggambarkan bahwa jumlah penduduk berusia muda lebih banyak dari jumlah penduduk usia tua. Jumlah Penduduk Kabupaten Karo paling banyak pada kelompok umur 25-29 tahun yang diikuti oleh kelompok umur 30-34 tahun dan kelompok umur 0-4 tahun. Sedangkan kelompok umur 70 tahun ke atas merupakan jumlah penduduk yang paling sedikit dibandingkan kelompok umur lainnya. Komposisi ini menunjukkan potensi kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki Kabupate Karo untuk 30-40 tahun kedepan sebagai salah satu modal dasar pembangunan ekonomi yang juga harus diikuti dengan perbaikan serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga menjadi motor penggerak perekonomian yang pada akhirnya mampu mendorong perbaikan kehidupan sosial penduduk 30-40 tahun mendatang. Piramida penduduk muda menunjukkan bahwa sebagian besar populasi berada di kelompok usia muda, biasanya 0-14 tahun, bentuknya melebar di bagian bawah dan mengecil ke atas. Implikasi dari piramida penduduk muda pada berbagai aspek antara lain kebutuhan pendidikan dan kesehatan dibutuhkan peningkatan pelayanan pendidikan seperti guru dan sarana prasarana pendidikan, fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk melayani populasi muda. Jika pendidikan dan lapangan kerja tidak memadai ada potensi meningkatnya masalah sosial seperti penangguran, kriminalitas dan ketidakstabilan sosial. Kedepannya dibutuhkan investasi besar di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial untuk menyiapkan generasi muda menjadi tenaga kerja produktif di masa depan.

2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi masyarakat mengacu pada tingkat kemakmuran dan kualitas hidup yang dinikmati oleh suatu kelompok atau komunitas dalam suatu wilayah. Aspek ini mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, serta mencapai kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat:

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif. Perlambatan yang sangat dominan terjadi pada tahun 2020, Laju pertumbuhan ekonomi berkontraksi hingga minus 0.80 persen. Hal ini akibat pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang berkontraksi. Pada tahun 2021 kembali mengalami akselerasi hingga tahun 2024 menjadi 4,22 persen. Tabel di bawah menunjukkan gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo.

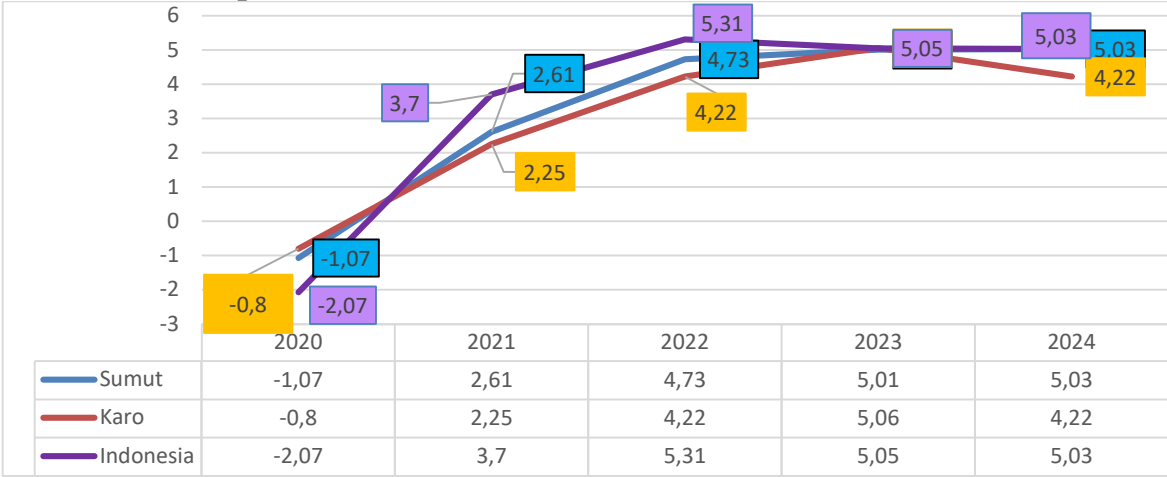
Tabel 2.33
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,80	2.25	4,22	5,06	4,22

Sumber: BPS Kabupaten Karo

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo memiliki pola pertumbuhan yang mirip namun pada periode tahun 2021 hingga tahun 2024 cenderung lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi Sumut dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Karo, Sumut dan Nasional Tahun 2020-2024



Berdasarkan kondisi diatas, maka dapat dinyatakan bahwa Masyarakat Kabupaten Karo mengalami peningkatan kesejahteraan walaupun pertumbuhan

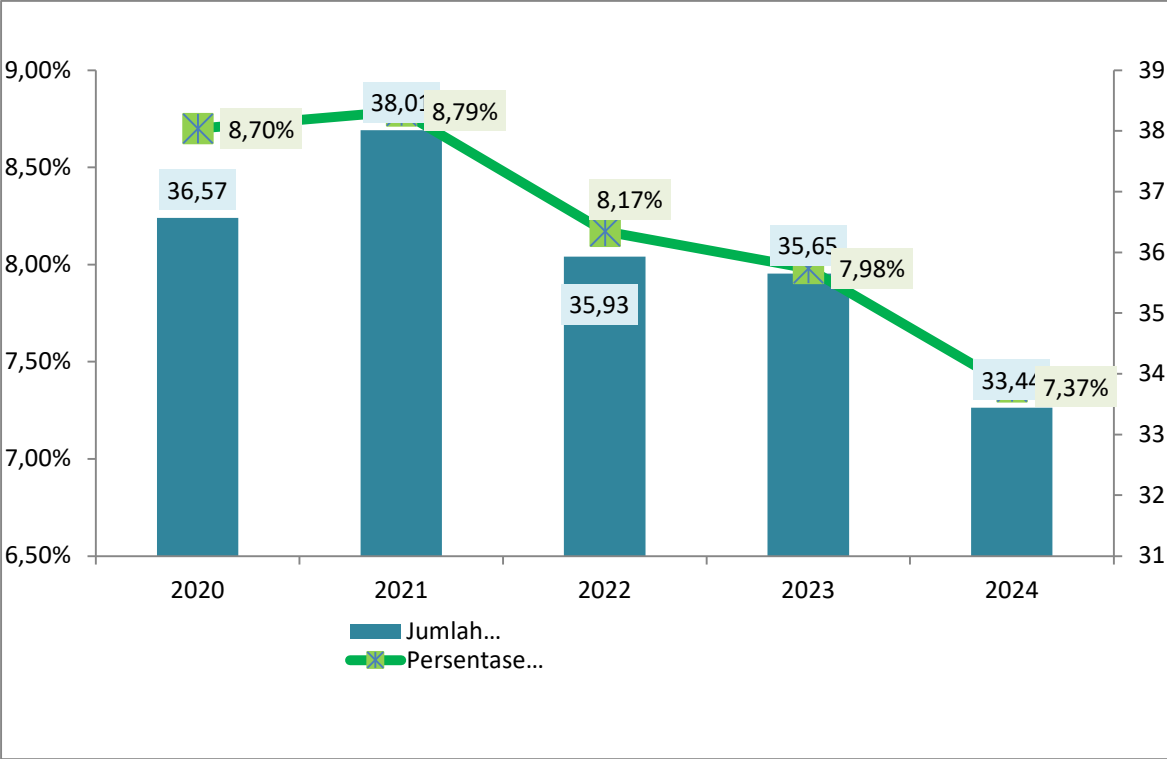
tahun 2024 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2023 pertumbuhan mencapai 5,06 persen, sedangkan pada tahun 2024 hanya tumbuh sebesar 4,22 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan Pembangunan di suatu wilayah, untuk itu pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin berakselerasi dengan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya lokal.

B. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Karo dari tahun 2020-2024 berlangsung fluktuatif. Secara *trend* dalam periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan nilai positif dimana persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dari tahun 2020 sebesar 8,70 persen berangsur-angsur menurun menjadi 7,37 persen di tahun 2024.

Peningkatan persentase kemiskinan terjadi akibat dampak bencana erupsi Gunung Sinabung yang merusak lahan dan tanaman pertanian sehingga produksi pertanian menjadi menurun yang berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat serta dampak *Covid-19*. Sedangkan penurunan kemiskinan pada tahun 2024 didukung dari program pengurangan beban pengeluaran masyarakat misalnya program bantuan langsung tunai (BLT), pemberian bantuan pangan, pemberian bantuan jaminan kesehatan dan lain sebagainya.

Grafik 2.4
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Garis kemiskinan adalah jumlah minimum pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Garis kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2024 adalah Rp656.812 per kapita per bulan, berdasarkan garis kemiskinan tersebut didapatkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karo sekitar 7,37 persen dari penduduk Kabupaten Karo.

C. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan. Perkembangan produk domestik regional bruto perkapita per tahun Kabupaten Karo ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2.34
PDRB perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Perkapita ADHB (juta rupiah)	51,96	53,35	57,76	62,76	67,69
PDRB Perkapita ADHK (juta rupiah)	35,21	35,65	36,67	37,94	39,02

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2025

PDRB perkapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2020 sampai 2024 cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Karo yang dibarengi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

D. Indeks Gini

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Koefisien Gini Kabupaten pada periode tahun 2020 sampai 2024 fluktuatif setiap tahunnya. Akan tetapi, secara umum dapat disimpulkan dari periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan hasil yang positif yaitu penurunan dari angka 0,271 tahun 2020 menjadi 0,214 tahun 2024.

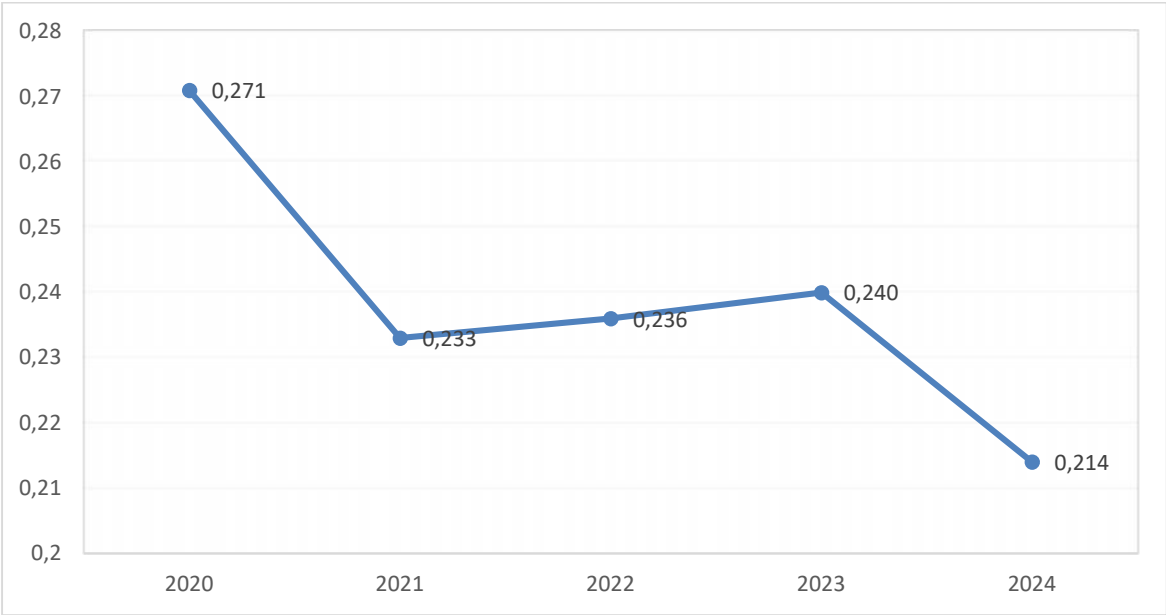
Tabel 2.35
Gini Ratio Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Gini Ratio	0,271	0,233	0,236	0,240	0,214

Sumber: BPS Sumatera Utara

Nilai Rasio Gini Kabupaten Karo tersebut dapat diartikan berada pada kategori rendah atau semakin merata. Pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal.

Grafik 2.5
Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



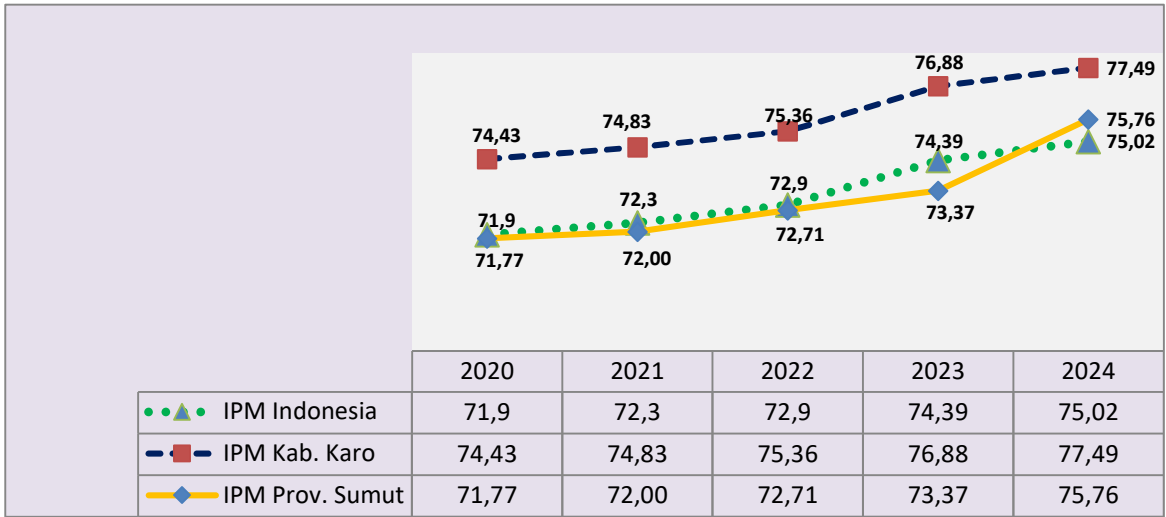
Sumber: BPS

E. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karo tetap konsisten mengalami peningkatan setiap tahun dari 74,43 pada 2020 menjadi 77,49 pada 2024. Peningkatan yang stabil ini menunjukkan perbaikan yang terus-menerus dalam berbagai aspek pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 75,76 poin dan Nasional sebesar 75,02 poin tahun 2024. Selama tahun 2022-2024 IPM Kabupaten Karo rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen per tahun.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo tahun 2024 mencapai 77,49 tahun. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Karo berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”.

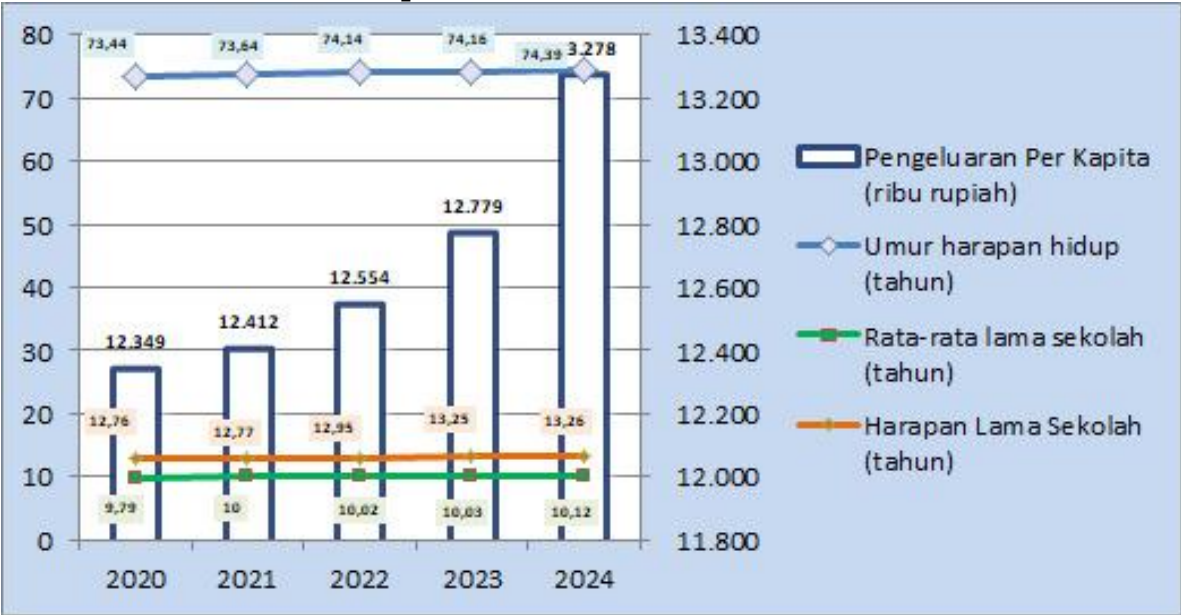
Grafik 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, (2025)

Terdapat 4 (empat) indikator yang mendukung IPM di Kabupaten Karo mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Seperti dilihat pada grafik selama 5 (lima) tahun indikator Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,52 poin. Indikator Harapan Lama sekolah sebesar 0,10 dan Rata-rata Lama Sekolah rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 0,10 poin. Sedangkan pada indikator Pengeluaran per Kapita berfluktuasi dengan rata-rata 161 setiap tahunnya. Pada indikator pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan.

Grafik 2.7
Perkembangan Dimensi Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2024

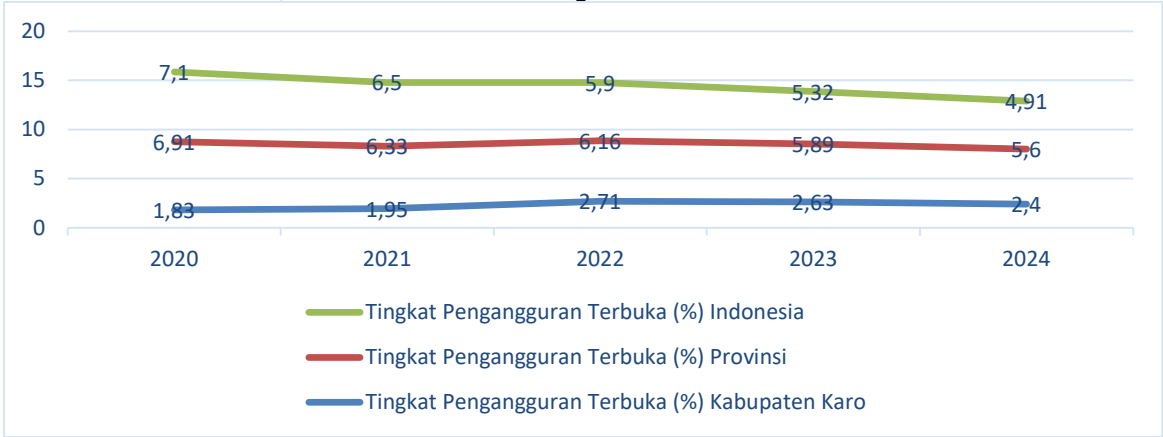
F. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo termasuk pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,83	1,95	2,71	2,63	2,40

Grafik 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka
Nasional, Provinsi dan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Grafik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Karo memiliki TPT yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia. Selain itu Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo merupakan pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Jika dilihat dari sektor pekerjaan, dominan penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian hal ini sejalan dengan kontribusi sektor pertanian memiliki peran dominan terhadap perekonomian daerah, sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun masih ada yang bekerja sebagai pekerja keluarga. Angkatan kerja yang bekerja masih dominan memiliki pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Dasar.

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kualitas tenaga kerja belum sesuai dengan dengan permintaan pasar (keterbatasan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja, kurangnya akses terhadap pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha, kurangnya keahlian dan kompetensi digital), sistem perlindungan tenaga kerja yang belum optimal, sarana dan prasarana ketenagakerjaan masih kurang, belum optimalnya iklim ketenagakerjaan termasuk penerapan upah minimum serta informasi pasar kerja, pengangguran terselubung akibat migrasi masuk, belum optimalnya penciptaan wirausaha baru. Hal tersebut dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang belum optimal. Produktivitas tenaga kerja yang rendah menjadi hambatan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik serta berkelanjutan. Untuk itu peningkatan kompetensi tenaga kerja harus terus ditingkatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja. Dengan peningkatan kompetensi ini diharapkan tenaga kerja juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat memberi peluang kerja bagi tenaga kerja lainnya sehingga akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi yang lebih baik.

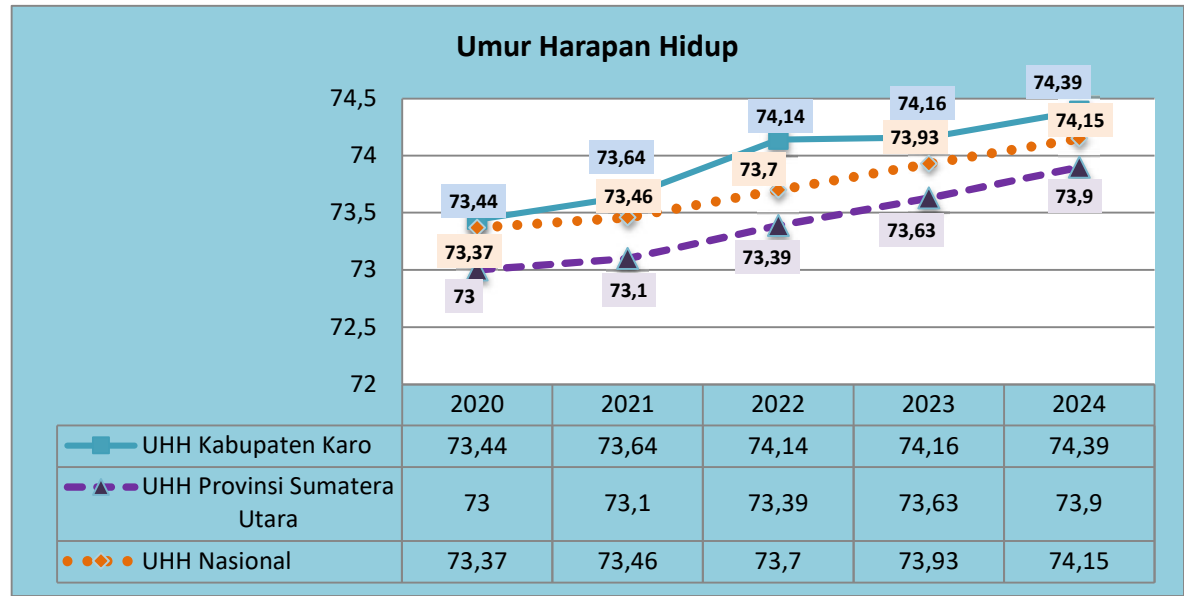
2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan antara lain:

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Karo mengalami peningkatan dari 73,44 tahun pada tahun 2020 menjadi 74,39 tahun pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, Usia Harapan Hidup Kabupaten Karo pada tahun 2024 berada di atas UHH nasional dan Provinsi Sumatera Utara, serta diantara 33 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo berada pada posisi paling tinggi atau terbaik.

Grafik 2.9
Perbandingan Umur Harapan Hidup
Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS, 2025

B. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan untuk mengetahui seberapa sehat suatu keluarga. IKS didapatkan dari penilaian 12 indikator keluarga sehat yaitu 1. Keluarga mengikuti program KB, 2. Ibu melahirkan difasilitas kesehatan, 3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, 4. Bayi mendapatkan ASI eksklusif, 5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, 6. Penderita TB mendapatkan pengobatan sesuai standar, 7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, 8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, 9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok, 10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN, 11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, 12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

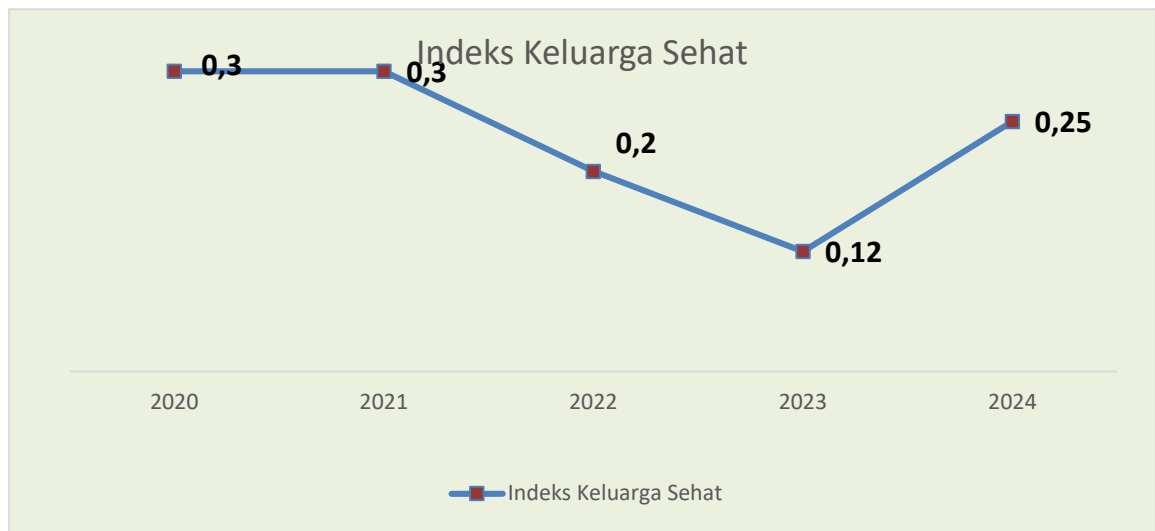
Berdasarkan nilai IKS, keluarga dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

-) Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8
-) Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS 0,5 – 0,8
-) Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5

Berdasarkan data yang didapat dari perhitungan yang dilakukan oleh Puskesmas, dimana masing-masing puskesmas melakukan survei secara langsung dengan menggunakan kuesioner ke masyarakat didapatkan bahwa masyarakat Kabupaten Karo masih masuk kedalam kategori Tidak Sehat. Faktor penyumbang terbesar yaitu dari indikator masih tingginya anggota keluarga yang merokok, masih adanya keluarga yang belum

mempunyai akses sarana air bersih dan masih adanya keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Grafik 2.10
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

C. Prevalensi Stunting

Prevalensi *stunting* adalah persentase jumlah balita yang mengalami stunting di suatu wilayah atau negara. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Prevalensi balita *stunting* digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau Negara. Berdasarkan hasil *Survey Status Gizi (SSGI)* yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tren selama 5 tahun survei yang dilakukan menunjukkan tren yang menurun, akan tetapi ada kecenderungan penurunan yang kecil khususnya periode tahun 2021-2023. Capaian angka tersebut menunjukkan prevalensi *stunting* yang masih tinggi di Kabupaten Karo. Hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam menerapkan kesehatan pada siklus 1000 hari pertama kehidupan anak serta faktor kondisi sosial ekonomi keluarga.

Grafik 2.11
Perkembangan Prevalensi Stunting Kab. Karo
Berdasarkan Data SSGI/SKi



Sumber: SSGI/SKi

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

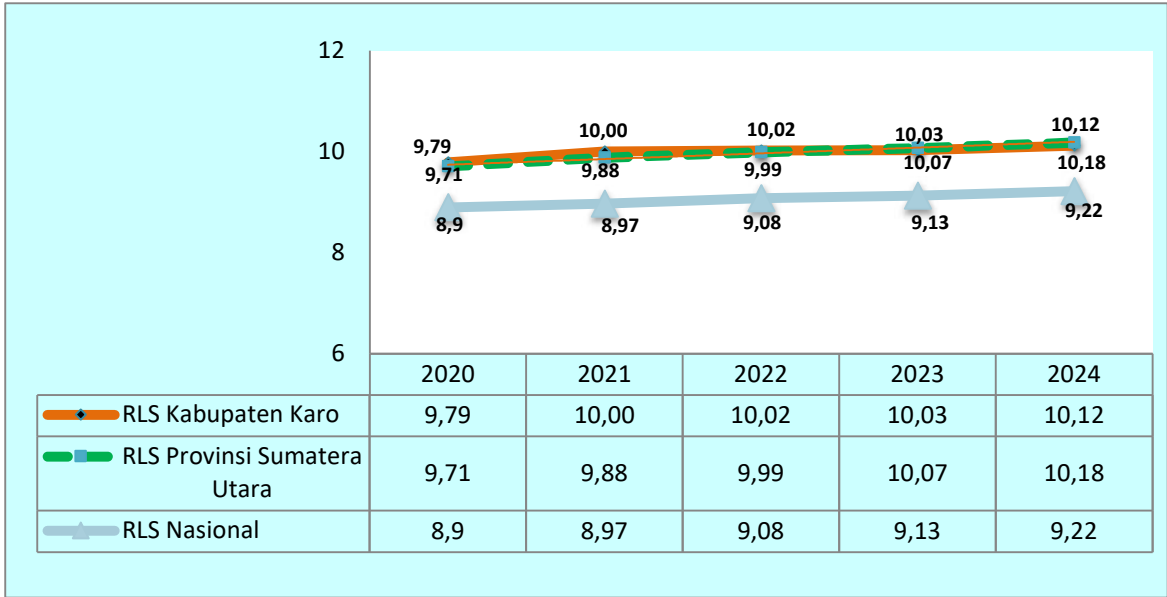
Menjelaskan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, antara lain:

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun keatas, RLS menggambarkan tingkat dan kualitas pendidikan suatu daerah. RLS Kabupaten Karo tahun 2024 adalah 10,12 tahun, ini berarti rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 10,12 tahun artinya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karo mencapai kelas 2 SMP, ini menggambarkan kualitas pendidikan di Kabupaten Karo belum mengalami perbaikan yang signifikan. Angka Rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 masih di angka 10,12 tahun yaitu belum mencapai target nasional program wajib belajar 13 tahun. Penyebabnya antara lain tingginya angka putus sekolah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya motivasi atau dukungan dari keluarga dan masyarakat

RLS Kabupaten Karo pada mulai tahun 2023-2024 berada dibawah atau lebih buruk dari RLS Provinsi Sumatera Utara akan tetapi lebih bagus dari RLS Nasional, perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karo dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.12
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Karo

Indikator rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

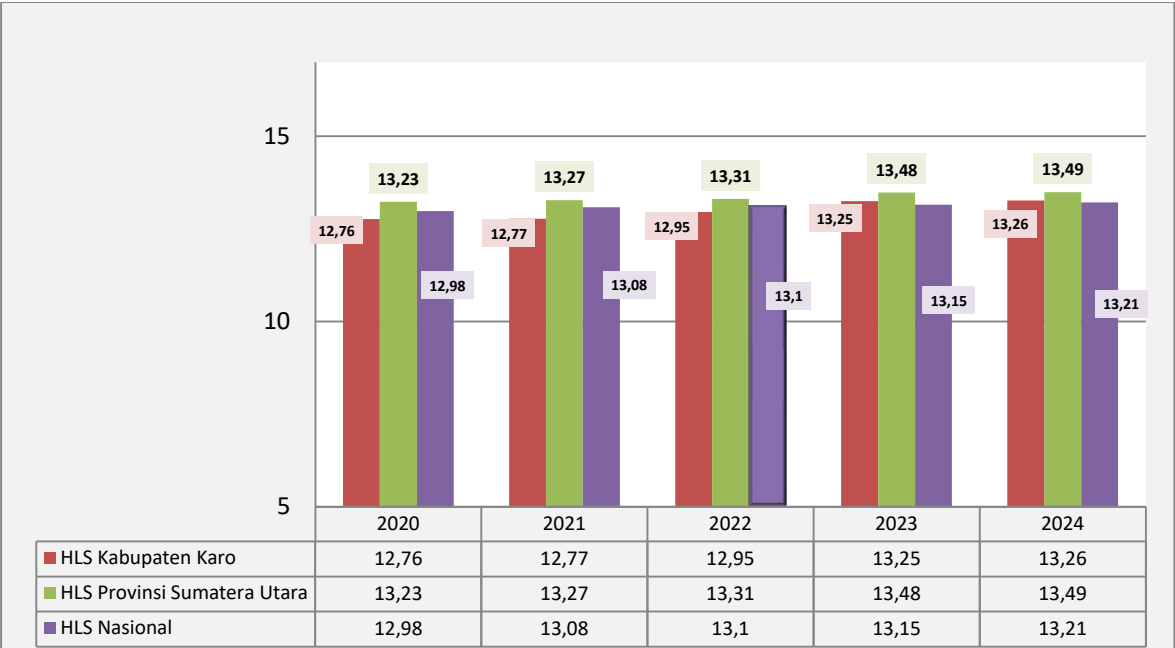
B. Harapan Lama Sekolah

HLS menggambarkan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang peluang anak 7 tahun keatas untuk mengenyam pendidikan formal. Capaian Harapan

Lama Sekolah berada dibawah capaian Propinsi Sumatera Utara dan Nasional artinya system pendidikan Karo tidak sebaik system pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Angka HLS Kabupaten Karo pada tahun 2024 sebesar 13,26 tahun artinya harapan lama sekolah di Kabupaten Karo setara dengan kelas 3 sekolah menengah atas atau menuju Perguruan Tinggi Diploma 1.

HLS Kabupaten Karo pada tahun 2020-2024 berada dibawah atau lebih buruk dari HLS Provinsi Sumatera Utara sedangkan jika dibandingkan HLS Nasional HLS mulai tahun 2023-2024 HLS Kabupaten Karo lebih bagus dari HLS nasional. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karo dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.13
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Karo,
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Karo

C. Angka Literasi/Numerasi

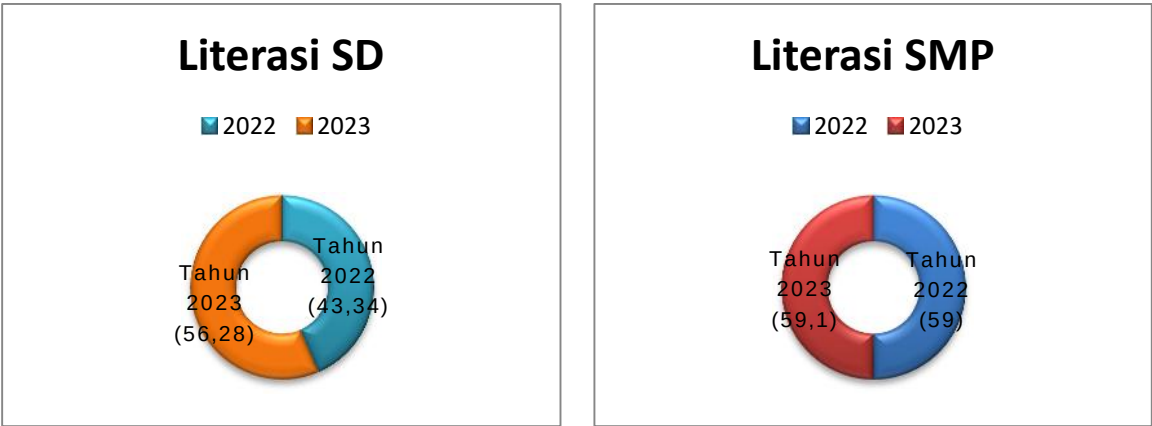
Angka literasi dan numerasi digambarkan melalui kemampuan literasi dan numerasi pada jenis pendidikan. Kemampuan literasi yaitu Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan fiksi). Sedangkan Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Berdasarkan Asesmen Nasional yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) skor rapor pendidikan kemampuan literasi tingkat SD Kabupaten Karo Tahun 2022 sebesar skor 43,34 kategori sedang dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 56,28 poin. Terdapat peningkatan sebesar 12,94 poin, sedangkan literasi tingkat SMP terjadi penurunan pada tahun 2022 angkanya sebesar 59,1 poin dan pada tahun 2023 turun sebesar 0,1 dengan skor 59 poin.

Pada tahun 2023 kemampuan literasi tingkat SD masih dikategori **sedang** dan kemampuan literasi SMP juga dikategori **sedang** hal ini

disebabkan antara lain karena belum meratanya distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan, kurangnya pendampingan ke Satuan Pendidikan dalam membangun kemampuan dasar literasi, kurangnya konten pembelajaran dalam meningkatkan literasi siswa, masih kurangnya buku teks dan non teks menjadi sumber baca siswa serta kurangnya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru.

Grafik 2.14
Kemampuan Literasi Jenjang SD dan SMP
Kabupaten Karo Tahun 2022-2023

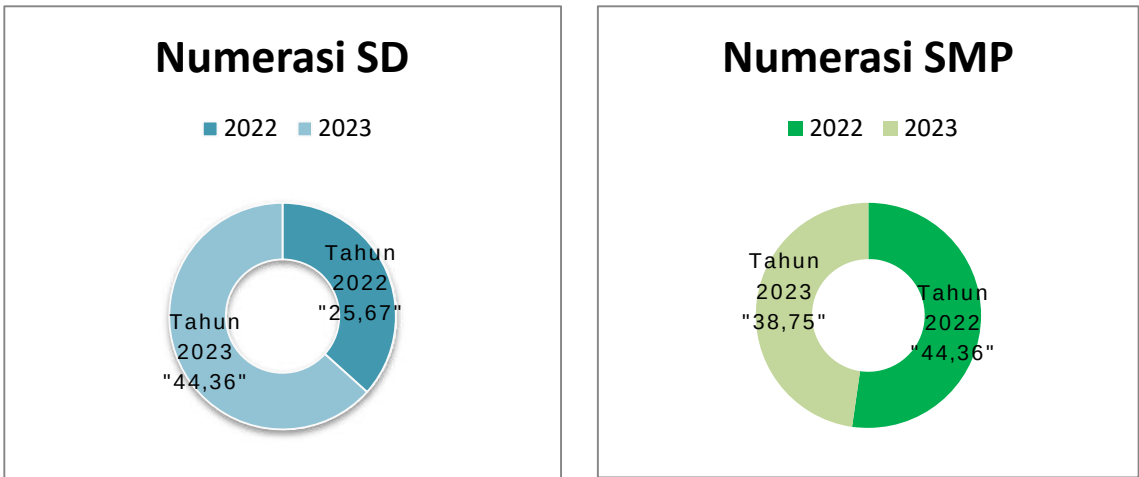


Sumber: BPMP Sumatera Utara

Untuk numerasi Tingkat SD pada tahun 2022 nilainya 25,67 poin meningkat menjadi 44,36 poin pada tahun 2023 artinya ada peningkatan sebesar 18,08 poin, sedangkan tingkat SMP pada tahun 2022 angkanya 42,51 poin akan tetapi pada tahun 2023 menurun menjadi 38,75 poin artinya ada penurunan sebesar 3,7 poin.

Pada tahun 2023 kemampuan numerasi tingkat SD masih dikategori **sedang** dan kemampuan numerasi tingkat SMP dikategori **rendah** hal ini disebabkan antara lain karena belum mencukupinya jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan, kurangnya pendampingan ke Satuan Pendidikan dalam membangun kemampuan dasar numerasi, kurangnya konten pembelajaran dalam meningkatkan numerasi siswa, masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran terkait numerasi serta kurangnya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru.

Grafik 2.15
Kemampuan Numerasi SD dan SMP Kabupaten Karo Tahun 2022-2023

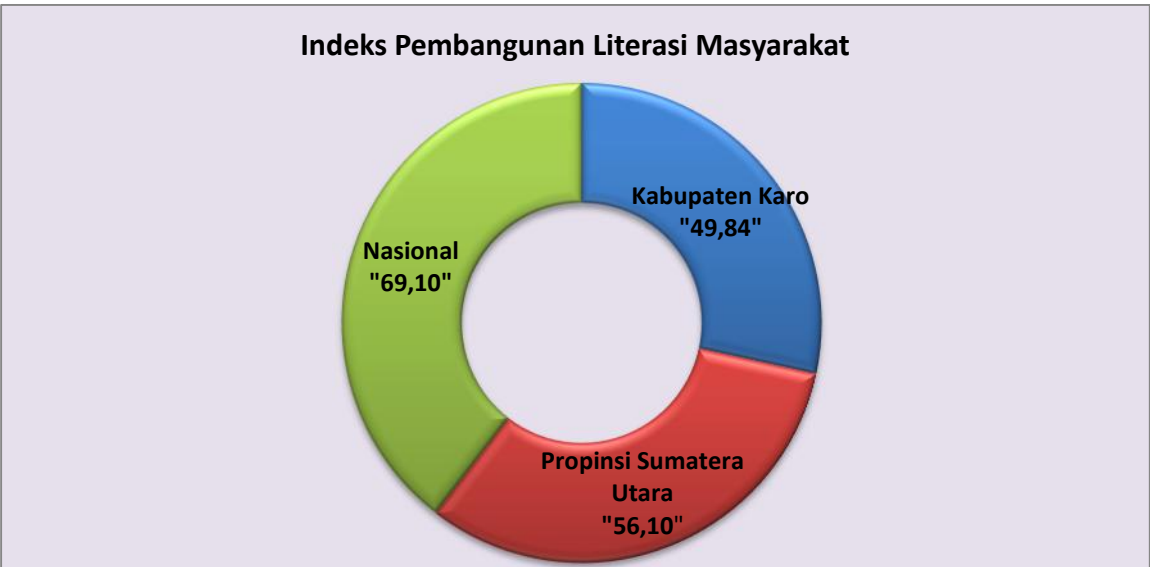


Sumber: BPMP Sumatera Utara

D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang menggambarkan kinerja pemerintah dalam pembangunan literasi, pada tahun 2023 IPLM Kabupaten Karo mencapai angka 49,84 poin berada pada kategori rendah, capaian ini lebih rendah dengan IPLM Propinsi Sumatera Utara yang mencapai angka 56,10 poin berada pada kategori sedang dan capaian nasional dengan angka 69,10 poin berada pada kategori sedang. Dari data menunjukkan bahwa capaian IPLM Karo lebih rendah dari Propinsi Sumatera Utara dan Nasional bahkan IPLM Sumatera Utara lebih rendah dari nasional. Berdasarkan data tersebut Propinsi Sumatera Utara khususnya Kabupaten Karo perlu strategi untuk mengejar ketertinggal dari capaian nasional.

Grafik 2.16
Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2023

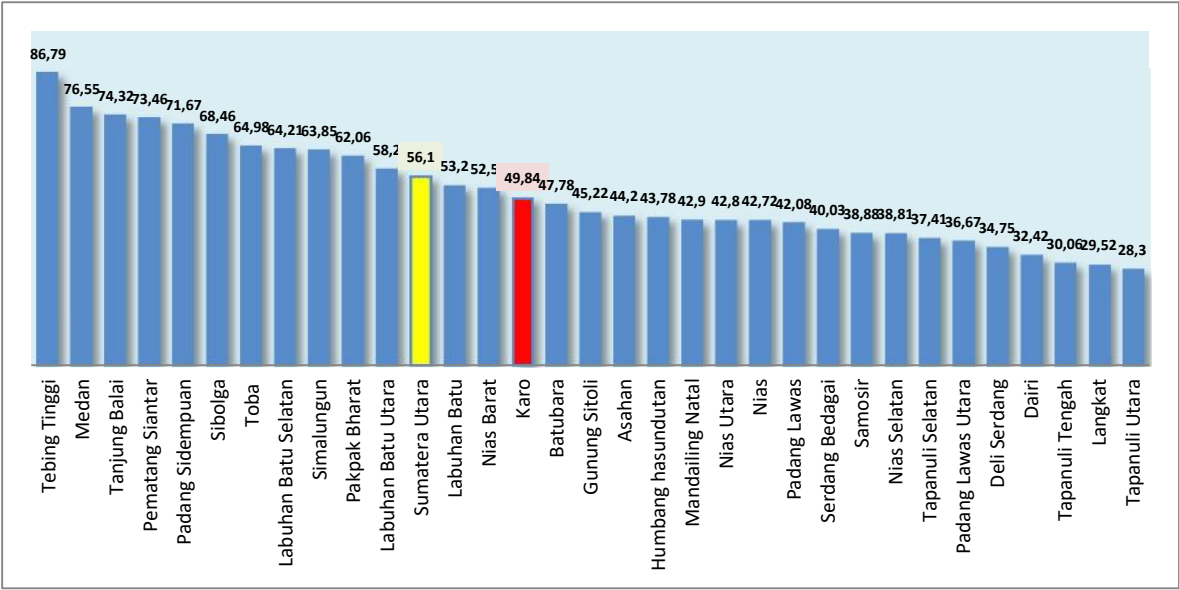


Sumber: Perpustakaan Nasional

Pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun 2023, IPLM Kabupaten Karo berada diposisi urutan ke 15 (lima belas), posisi paling tinggi dicapai Kabupaten Tebing Tinggi dengan angka 86,79 poin disusul

Kota Medan dengan angka 76,53 poin sedangkan angka terendah di Kabupaten Tapanuli Utara dengan angka 28,3 poin. Capaian IPLM Kabupaten Karo tahun 2023 dilihat dari unsur pembangunan literasi masyarakat yaitu jumlah perpustakaan (0,0016), koleksi perpustakaan (0,5620), SDM Perpustakaan (0,0009), kunjungan perpustakaan/hari (0,342), perpustakaan yang dibina sesuai SNP (1,7021), keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (0,4209) dan anggota perpustakaan (0,4664). Dari uraian tersebut capaian semua unsur masih rendah dan terendah pada SDM perpustakaan dan jumlah perpustakaan.

Grafik 2.17
Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
di Sumatera Utara Tahun 2023



Sumber: Perpustakaan Nasional

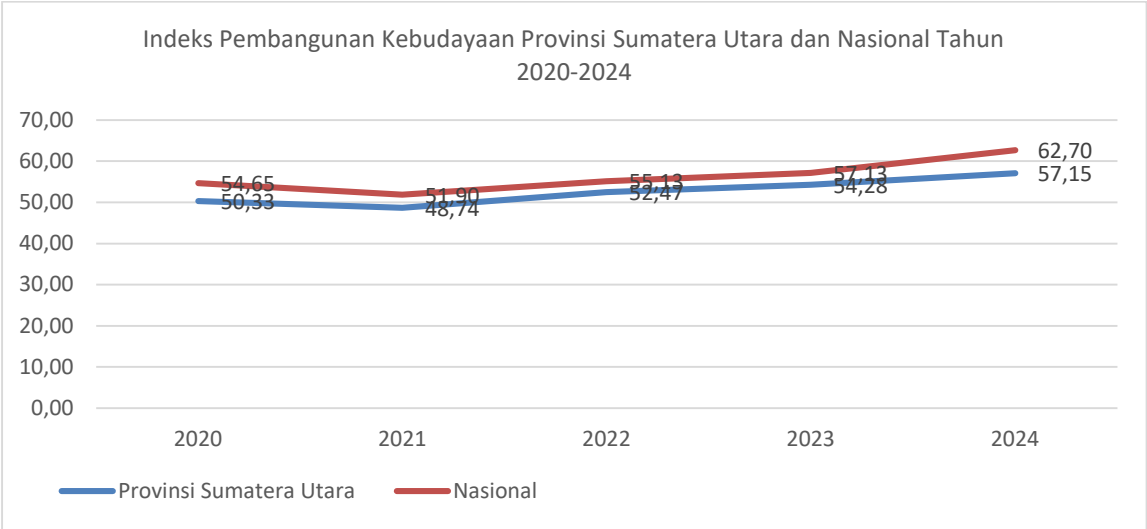
2.1.2.4. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa, antara lain:

A. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Karo belum dapat dihitung mengingat ada beberapa data dimensi pengukuran yang belum tersedia di tingkat kabupaten/kota yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi Pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi dan dimensi gender. Saat ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Karo mengacu pada Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan hasil yang cukup baik dan mengalami perubahan yang fluktuatif.

Grafik 2.18
Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2025

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen yang disusun dengan tujuan untuk menggambarkan kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dibidang kebudayaan serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemajuan kebudayaan. Untuk melihat perkembangan kemajuan kebudayaan di Kabupaten Karo, indikatornya meliputi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan.

Tabel 2.37
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Ditetapkan	0	3	10	10	11

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Ditetapkan di Kabupaten Karo masih terbilang cukup rendah sehingga pemerintah masih butuh upaya keras dalam peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Ditetapkan ini. Saat ini Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Karo masih diduga sebagai warisan cagar budaya di Kabupaten Karo sehingga perlu untuk dikaji dan pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung untuk dapat dilakukan penetapan sebagai cagar budaya. Salah satu permasalahan penetapan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya saat ini adalah kepemilikan akses cagar budaya oleh pribadi sehingga sulitnya dilakukan penetapan terhadap cagar budaya. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan dan berkoordinasi secara rutin dengan ahli waris objek cagar budaya.

2.1.2.5. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, antara lain:

A. Indeks Perlindungan Anak

Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) dapat dilihat melalui penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA. Pada tahun 2020 tidak dilakukan penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak karena terjadinya pandemi Covid 19 dan pengukuran Indeks Perlindungan Anak tahun 2024 belum dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena belum selesainya pelaksanaan evaluasi penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak untuk tahun evaluasi.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Karo mengalami peningkatan sekitar 5,80 poin pada tahun 2021 ke tahun 2022, serta peningkatan 0,59 poin pada Tahun 2022 ke 2023. Dalam Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2024 tahap pra-evaluasi memperoleh nilai 592,32 (nilai maksimal 1000). Permasalahan yang dihadapi dalam Penilaian KLA Tahun 2024 yaitu Belum tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), taman terbuka hijau, tempat bermain aman yang dikelola pemerintah daerah serta tidak berbayar, aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas di sekolah dan di kantor pemerintah, peraturan-peraturan terkait pelayanan terhadap anak masih belum diadaptasi oleh daerah, pusat pengasuhan alternatif belum semua terstandarisasi untuk memenuhi kategori penilaian kabupaten layak anak dan kurangnya koordinasi antar OPD dalam memenuhi sarana prasarana yang menunjang KLA.

Dalam penanganan kasus belum ada tenaga ahli dalam pendampingan, pemulihan dan penguatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, demikian pula dengan tenaga hukum, Sarjana Psikologi yang sudah ada belum mengikuti Pelatihan sebagai Konselor dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan.

Tabel 2.38
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Perlindungan Anak (%)	n/a	57,582	63,39	63,98	n/a

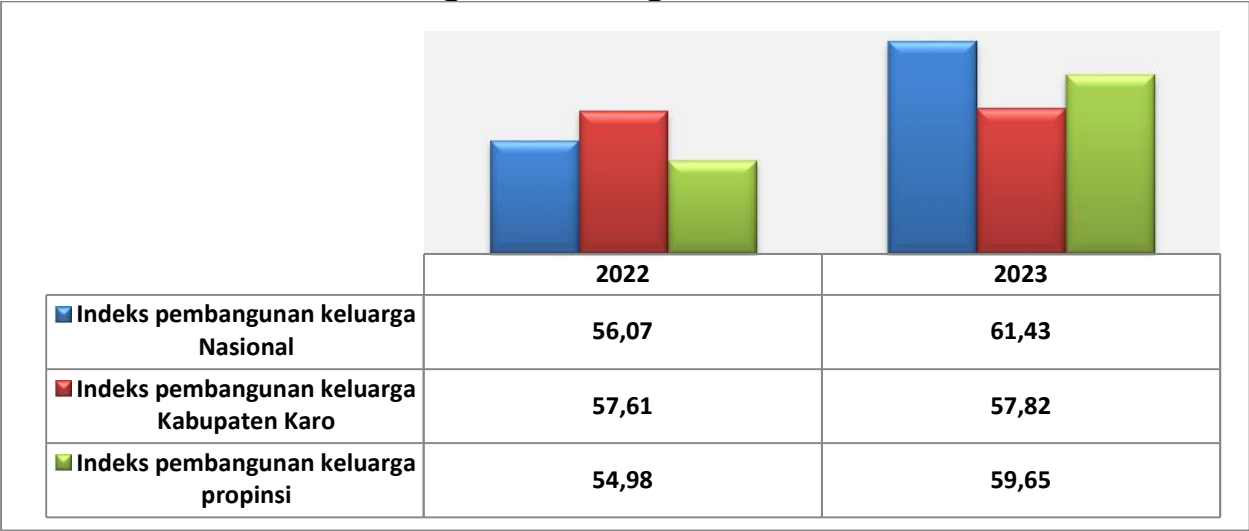
Sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia oleh KemenPPPA

B. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Konteks pembangunan dan peningkatan kualitas SDM tidak bisa terlepas dari pentingnya peran keluarga. Keluarga sebagai institusi sosial memiliki peran sentral dalam pembangunan manusia, pembinaan generasi baru, serta pemenuhan kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul harus dimulai dari penyiapan keluarga berkualitas sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu berperan penting dalam perekonomian, politik, dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Nilai Bangsa berkisar antar 0-100 dengan kategori nilai >70 (baik/Tangguh), 40-70 (cukup baik/berkembang) dan <40 (kurang baik/rentan), Jika dilihat dari grafik di bawah ini capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Karo terus mengalami peningkatan, namun capaiannya masih dalam

kategori cukup baik/berkembang, begitu juga dengan nasional belum mencapai 70 persen dan capaian Sumatera Utara masih berada di bawah.

Grafik 2.19
Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2022-2023



Sumber: BPS, 2024

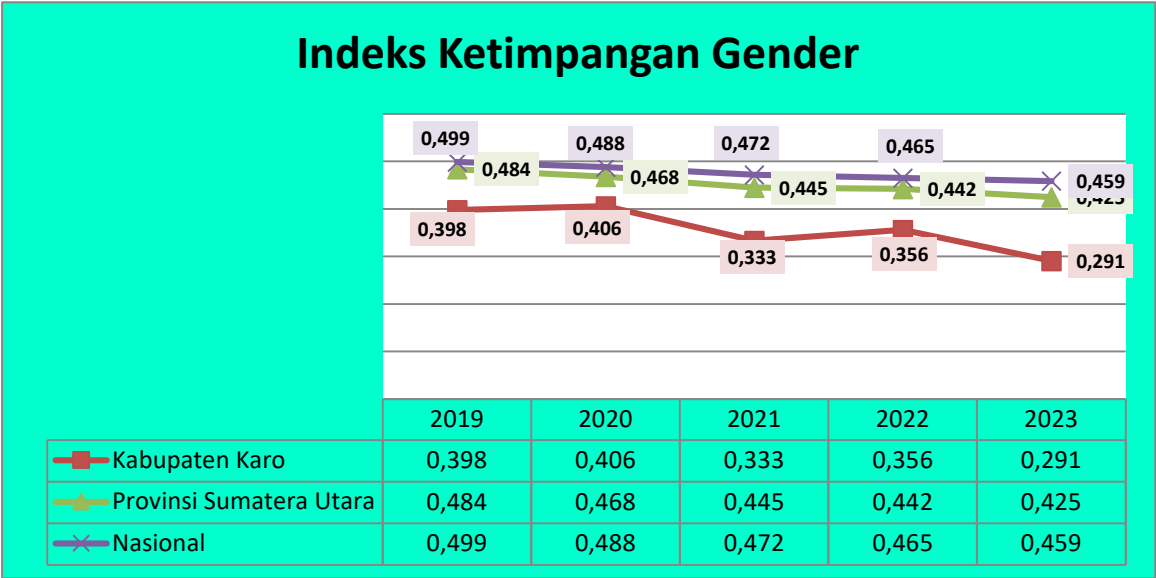
Capaian yang terus meningkat tidak terlepas dari upaya pemerintah diantaranya menyiapkan kehidupan keluarga melalui bimbingan perkawinan dan pendampingan calon pengantin serta penyediaan konseling keluarga, memberikan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan, memberikan pengasuhan tentang tumbuh kembang anak dan memperkuat data keluarga sebagai dasar intervensi pembangunan keluarga.

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender mengukur seberapa besar ketimpangan gender yang diukur dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten tahun 2019-2023 disparitas IKG terendah pada tahun 2023 dengan angka 0,291 poin dan tertinggi di tahun 2020 dengan angka 0,406 poin. Untuk menurunkan disparitas akibat ketimpangan gender perlu penguatan kesetaraan gender diberbagai upaya lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, hingga lembaga lainnya. Peningkatan kesadaran dan kolaborasi antar berbagai pihak dapat mempercepat proses menuju masyarakat yang lebih setara secara gender.

Posisi Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Karo tahun 2023 dengan angka 0,291 poin berada dibawah Propinsi Sumatera Utara dengan angka 0,425 poin dan Nasional dengan angka 0,427 poin dan selama tahun 2019-2023 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Karo disparitasnya lebih rendah dari Provinsi dan Nasional.

Grafik 2.20
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Karo,
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023



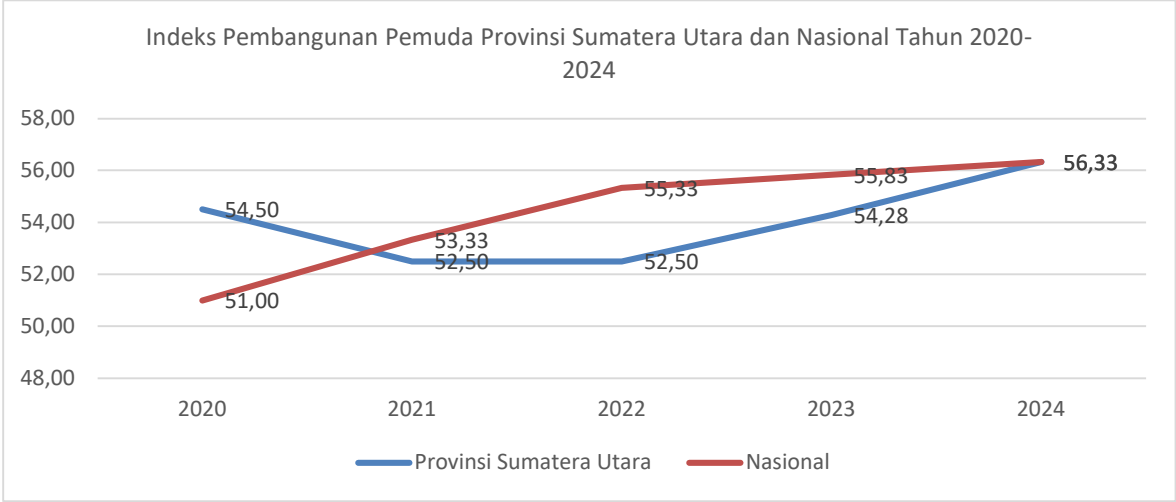
Sumber: Badan Pusat Statistik

D. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks pembangunan pemuda adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Indeks Pembangunan Pemuda dapat dijadikan pedoman bagi pemangku kebijakan dalam menentukan kebijakannya sekaligus menjadi peringatan kondisi pemuda terutama dari sisi lapangan kerja. Indikator-indikator Indeks Pembangunan Pemuda terdiri dari: Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; Kesempatan dan lapangan kerja; Kepemimpinan dan partisipasi; Gender dan diskriminasi.

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Karo belum dapat dihitung mengingat ada beberapa data aspek pembangunan pemuda yang belum tersedia di tingkat kabupaten/kota yaitu domain Pendidikan, domain Kesehatan dan kesejahteraan, domain lapangan dan kesempatan kerja, domain partisipasi dan kepemimpinan serta domain gender dan diskriminasi. Saat ini, Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Karo mengacu pada Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Utara masih berada di bawah Indeks Pembangunan Pemuda Nasional dikarenakan sejumlah domain yang lebih rendah disbanding capaian nasional yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan, domain partisipasi dan kepemimpinan perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah. Pemerintah Daerah perlu mendorong, mengupayakan dan memfasilitasi untuk memaksimalkan potensi pemuda sebagai generasi produktif, kreatif dan inovatif serta meningkatkan koordinasi antar Lembaga kepemudaan dan keolahragaan dan menyelaraskan program kerja pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Grafik 2.21
Indeks Pembangunan Pemuda
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2025

Tabel 2.39
Persentase organisasi pemuda yang aktif Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	28	28	28	28	15
2	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	28	28	28	28	28
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100	100	100	100	53

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo

Pelaksanaan Pembangunan pada urusan pemuda diarahkan pada Upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup dikalangan pelajar dan pemuda. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam Pembangunan dalam Upaya untuk meningkatkan kehidupan Masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam Pembangunan maka dilakukan berbagai fasilitas kegiatan kepemudaan.

E. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dan balita adalah jumlah bayi dan balita yang meninggal per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi dan balita berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup anak dan menggambarkan kondisi sosial, ekonomi serta lingkungan tempat anak-anak tinggal, termasuk pemeliharaan kesehatannya. Indikator ini juga berkaitan langsung dengan kehamilan dan pelayanan kesehatan pasca melahirkan. Formula untuk menghitung Angka Kematian Bayi dan Balita adalah Angka Kematian Bayi sama dengan Jumlah kematian bayi selama tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup dikali 1000.

Tabel 2.40
Perkembangan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kelahiran	Jumlah Kematian Bayi	Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran
2020	6.537	47	7,19
2021	6.101	16	2,62
2022	6.136	30	4,73
2023	6.062	26	4,15
2024	5260	21	3,99

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo

Perkembangan angka kematian bayi dan balita dari tahun 2020-2024 masih cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian bayi 7,19 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2021 menurun menjadi 2,62 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2022 meningkat menjadi 4,73 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup dan tahun 2023 menurun menjadi 4,15 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2024 menurun menjadi 3.99 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup.

F. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.41
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kelahiran	Jumlah Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran
2020	6.528	6	91,79
2021	6.099	6	98,34
2022	6.136	2	32,59
2023	6.028	9	149,28
2024	5.260	5	94,98

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo

Perkembangan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2020-2024 di Kabupaten Karo bersifat fluktuatif. Angka kematian ibu tahun 2020 meningkat menjadi 91,79 per 100.000 kelahiran hidup (6 kasus), tahun 2021 meningkat menjadi 98,34 per 100.000 kelahiran hidup (6 kasus), pada tahun 2022 turun menjadi 32,59 per 100.000 kelahiran hidup (2 kasus), dan pada tahun 2023 meningkat menjadi

149,28 per 100.000 kelahiran hidup (9 kasus) dan pada tahun 2024 menurun lagi menjadi 94,98 per 100.000 kelahiran hidup (5 kasus).

Penyebab angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Karo adanya keterlambatan rujukan dari daerah sehingga terlambat dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit Daerah dan terlambat untuk ditangani, yang menyebabkan kematian. Hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi kesehatan dan bidan di desa terkait layanan rujukan maternal untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan bayi terutama dalam kondisi yang darurat.

G. Prevalensi Tuberculosis

Tuberculosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis*. *Prevalensi Tuberculosis* adalah banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) dibagi jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan tingkat prevalensi *tuberculosis* per 100.000 penduduk di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Prevalensi Tuberculosis Per 100.000 Penduduk
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Penduduk	Prevalensi Tuberklosis per 100.000 penduduk
2020	589	404.998	145
2021	508	409.077	124
2022	812	434.246	186
2023	1053	448.535	235
2024	1172	418.705	387

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo

Berdasarkan data diatas periode tahun 2020-2024 terjadi fluktuasi penurunan prevalensi *tuberculosis* per 100.000 penduduk, pada tahun 2020 Prevalensi Tuberklosis menjadi 145 atau sebanyak 589 kasus, pada tahun 2021 menurun menjadi 124 atau sebanyak 508 kasus, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 186 atau sebanyak 812 kasus, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 235 sebanyak 1.053 kasus dan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 387 sebanyak 1.172 kasus

Penyebab terjadinya *tuberculosis* di Kabupaten Karo selama 5 (lima) tahun karena meningkatnya individu yang terinfeksi kuman mikobakterium tuberkulosis hal ini didukung dengan adanya kegiatan *active case finding* melalui skriining *tuberculosis* ke populasi padat dan pelacakan kontak serumah target penemuan kasus 90 % dari perkiraan kasus, semakin tinggi kasus ditemukan maka akan lebih meningkatkan target penemuan kasus. Faktor yang lain karena gaya hidup yang kurang sehat atau ketidakperdulian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan belum optimalisasi Pemerintah Kabupaten Karo dalam mendukung

pencegahan *tuberculosis* serta kurangnya anggaran yang diperlukan untuk pencegahan *tuberculosis* di Kabupaten Karo.

Tabel 2.43
Perkembangan dan Pengobatan TBC di Kabupaten Karo
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penemuan kasus TC (<i>Treatment Coverage</i>) TBC	Persen	-	-	44,7	58,7	71,3
Pengobatan (<i>Treatment Succes Rate</i>) (kohort) TBC	Persen	-	91,6	91,9	94,0	65,0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo

Berdasarkan data di atas capaian perkembangan dan pengobatan TBC di Kabupaten Karo pada tahun 2022 sebanyak 44,7 persen, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 58,7 persen dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 71,3 persen. Untuk Pengobatan (*Treatment Succes Rate*) (kohort) TBC pada tahun 2021 sebanyak 91,6 persen, pada tahun 2022 meningkat menjadi 91,9 persen, pada tahun 2023 meningkat menjadi 94,0 persen dan pada tahun 2024 menurun menjadi 65 persen karena banyak pasien dari Rumah Sakit Efarina tidak dievaluasi sehingga pasien yang datang dari kabupaten lain tidak bisa dilacak atau di obati.

H. Kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif

Kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif adalah sistem dukungan sosial yang dirancang untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (seperti bantuan tunai, layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan), tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan krisis, seperti bencana alam, pandemi, atau krisis ekonomi.

Bantuan Sosial

Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat maka pemerintah memberikan bantuan sosial ke masyarakat Kabupaten Karo. Data terkait Penerimaan Bantuan Sosial Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.44
Data Penerima Bantuan Sosial
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	PKH (Program Keluarga Harapan)	PBI (Penerima Bantuan Iuran)	Penerima Alat Bantu
2020	16.253	13.152	145.276	170
2021	20.037	13.070	115.316	0
2022	18.998	12.282	129.159	85
2023	17.733	13.735	131.928	50
2024	17.947	12.899	127.931	43

Sumber : Siks-NG Kemensos

Dinas Sosial Kabupaten Karo

Berdasarkan data di atas periode tahun 2020-2024 Masyarakat Kabupaten Karo mendapat bantuan sosial dari BPNT, PKH, PBI dan Alat Bantu. BPNT (Bantuan Pemerintah Nontunai) merupakan Bantuan yang diberikan Pemerintah berupa Sembako saja atau sering disebut Non PKH.

PKH adalah Program Keluarga Harapan, yaitu bantuan yang diberikan pemerintah berupa uang tunai. PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Program ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan, seperti keluarga miskin atau rentan miskin yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan alat bantu yang diberikan kepada disabilitas berupa kursi roda, Matras, atau tongkat.

Data penerima bantuan sosial pada tabel diatas dapat dilihat pada aplikasi Siks-NG Kementerian Sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Karo. Pada Tahun 2020 penerima BPNT sebanyak 16.253 jiwa, tahun 2021 untuk 20.037 jiwa, tahun 2022 menurun menjadi 18.998 jiwa, tahun 2023 menurun lagi menjadi 17.733 jiwa dan tahun 2024 menjadi 17.947 jiwa. Untuk PKH pada tahun 2020 untuk 13.152 jiwa, tahun 2021 menurun untuk 13.070 jiwa, pada tahun 2022 menurun lagi menjadi 12.282, pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 13.737 dan pada tahun 2024 menurun lagi menjadi 12.899. Pada Tahun 2020 penerima PKH sebanyak 145.276 jiwa, tahun 2021 untuk 115.316 jiwa, tahun 2022 meningkat menjadi 129.159 jiwa, tahun 2023 meningkat lagi menjadi 131.928 jiwa dan tahun 2024 menurun menjadi 127.931 jiwa. Untuk alat Bantu pada tahun 2020 alat bantu untuk 170 jiwa, tahun 2021 tidak ada bantuan alat bantu, tahun 2022 sebanyak 85 alat bantu, tahun 2023 sebanyak 50 alat bantu dan pada tahun 2024 menurun menjadi 43 alat bantu.

Penyebab bantuan setiap tahun berubah karena adanya verifikasi data, terdapatnya masyarakat yang sudah mampu dan tidak layak menerima bantuan sehingga dikeluarkan dari aplikasi, dan bertambah penerima bantuan karena pertambahan kuota penerima dari kemeterian sosial untuk masyarakat di Kabupaten Karo.

Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja untuk menjamin kesejahteraan sosial, ekonomi, dan perlindungan dari risiko kerja. Program ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Program ini mewajibkan perusahaan dan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya serta membayar iuran secara rutin. Meski tingkat partisipasi pekerja dalam program ini sudah cukup tinggi, kesadaran akan pentingnya kepesertaan masih perlu ditingkatkan, khususnya di kalangan pekerja sektor informal dan pekerja kontrak. Potensi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Karo terus mengalami peningkatan, hal ini dapat di lihat dari Komitmen Pemerintah Kabupaten Karo atas *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) dalam memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tabel 2.45
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kabupaten Karo Tahun 2021 sd 2024

Tahun	Potensi Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			Realisasi Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			Persentase Universal Coverage Jamsostek (UCJ)		
	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Total	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Total	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Total
2021	38,350	99,730	138,080	16,047	4,470	20,517	41.84	4.48	14.86
2022	38,350	99,730	138,080	17,476	8,304	25,780	45.57	8.33	18.67
2023	40,125	108,025	148,150	21,558	15,612	37,170	53.73	14.45	25.09
2024	41,733	110,038	151,771	23,689	20,766	44,455	56.76	18.87	29.29

Sumber: BPJS Tenaga Kerja Kabupaten Karo

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah mengacu pada kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya dalam menghadapi persaingan ekonomi di tingkat lokal, nasional, maupun global. Daya saing daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan seberapa efektif suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

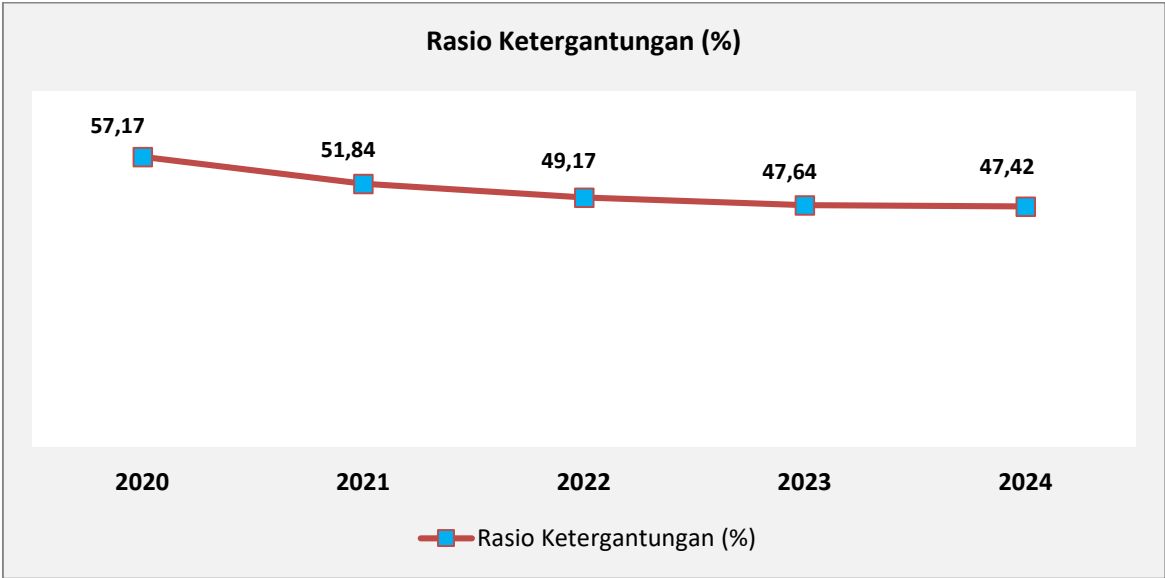
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja di suatu daerah sangat menentukan daya saingnya. Daerah dengan SDM yang unggul cenderung lebih inovatif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar. Salah satu gambaran tentang daya saing sumber daya manusia dalam suatu daerah adalah angka ketergantungan. Angka ketergantungan adalah suatu indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif (usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk produktif (usia 15–64 tahun). Angka ini digunakan untuk mengukur beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam suatu wilayah.

Angka ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*depecency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15–64 tahun). Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif. Angka ketergantungan tinggi jika lebih dari 40, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30.

Hasil analisis *trend* angka ketergantungan Kabupaten Karo tahun 2020-2024, terlihat bahwa angka ketergantungan semakin menurun dimana tahun 2020 mencapai 57,17, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 47,42. Angka rasio ketergantungan pada tahun sebesar 47,42 artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 48 penduduk non produktif dan berada di tingkat angka ketergantungan tinggi. Angka ketergantungan tinggi dipengaruhi dari komposisi usia muda yang menggambarkan masih tinggi angka kelahiran.

Grafik 2.22
Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Untuk mengurangi beban ketergantungan Pemerintah Kabupaten Karo perlu menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan serta upaya peningkatan pendapatan penduduk karena adanya peningkatan jumlah usia produktif.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

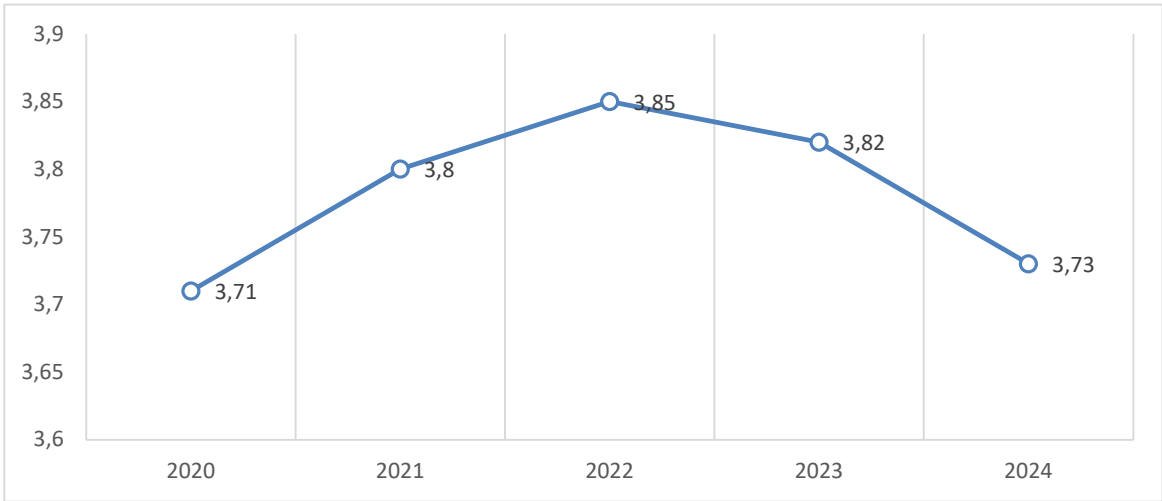
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB adalah indikator yang dapat mengindikasikan sejauh mana sektor lapangan usaha industri berkembang dan mempengaruhi perekonomian suatu daerah. Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang di Kabupaten Karo sebagian besar merupakan industri rumah tangga. Adapun industri yang berkembang di Kabupaten Karo antara lain kerajinan, bahan bangunan, pangan, dan logam. Kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Karo perlu ditingkatkan sejalan dengan potensi Kabupaten Karo di bidang pertanian dan pariwisata. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel 2.46
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
Kabupaten Karo Tahun 2019-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor Industri pengolah terhadap PDRB	3,71	3,80	3,85	3,82	3,73

Sumber: BPS Kab. Karo, 2025

Grafik 2.23
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Jika dilihat dari Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB selama lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif namun pada periode tahun 2022 sampai tahun 2024 kontribusi sektor tersebut mengalami penurunan dari 3,85 persen menjadi 3,73 persen. Sektor ini sangat penting dalam perekonomian Kabupaten Karo yang berperan dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja melalui proses produksi yang dilaksanakan sehingga dimasa yang akan datang, penting untuk terus ditingkatkan dan menentukan strategi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

B. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Karo belum menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo sehingga pemerintah masih butuh upaya keras dalam peningkatan Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum ini. Saat ini Pemerintah Kabupaten Karo berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karo, melalui kunjungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum. Salah satu permasalahan peningkatan PDRB Akomodasi dan Makan Minum saat ini adalah bencana alam yang mengakibatkan aksesibilitas menuju Kabupaten Karo rawan bencana sehingga menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Karo selain itu belum optimalnya promosi pariwisata, pemanfaatan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif belum optimal, masih terbatasnya 6A di Destinasi Wisata (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, Aktivitas, Ancillary dan Available Packages), Belum Optimalnya Pengembangan Industri Pariwisata, Belum optimalnya peran Masyarakat sadar wisata dan pelaku pariwisata (Pemandu Wisata, Pokdarwis, Pengelola Desa Wisata dan Destinasi Wisata) dalam menerapkan Sapta Pesona, kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata belum optimalnya, Kolaborasi dan sinergitas stakeholders dalam pengembangan pariwisata belum optimal. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Akomodasi dan Makan Minum	537.680.000.000	546.070.000.000	589.960.000.000	650.670.000.000	746.750.000.000
2	Total PDRB	20.974.570.000.000	21.824.140.000.000	23.9750.570.000.000	26.408.980.000.000	28.867.890.000.000
3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum	2,56	2,50	2,46	2,46	2,59

Sumber: BPS Kabupaten Karo

C. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif (Ekraf) merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi nasional yang berkelanjutan dan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreativitas manusia. Kontribusi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karo dapat dilihat melalui perkembangan Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI. Dari data diperoleh bahwa Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI masih terbilang cukup rendah sehingga pemerintah masih butuh upaya keras untuk meningkatkan ekosistem industri ekonomi kreatif dan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual dalam peningkatan produk ekonomi yang memiliki HAKI. Pelaku ekonomi kreatif juga perlu terus difasilitasi dalam pendaftaran produk HAKI. Selain itu, untuk peningkatan produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI dilakukan melalui peningkatan SDM, peningkatan akses pasar, permodalan, kolaborasi, inovasi dan promosi.

Tabel 2.48
Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	-	-	67	15	27

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo

D. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Rasio kewirausahaan Kabupaten Karo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.49
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Kewirausahaan (%)	3,69	3,87	3,79	4,65	3,78

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Rasio kewirausahaan Kabupaten Karo mengalami fluktuasi selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 sektor ini mengalami penurunan dari periode sebelumnya tahun 2023, beberapa permasalahan perlu untuk terus dibenahi antara lain melalui peningkatan kemampuan UMKM untuk terus naik kelas dan berdaya saing, meningkatkan

produktivitas Koperasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan infrastruktur pendukung, kebijakan untuk mendukung kewirausahaan yang kondusif, mendorong implementasi IPTEKIN, mengembangkan kemitraan, memfasilitasi akses ke sumber daya, dll.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

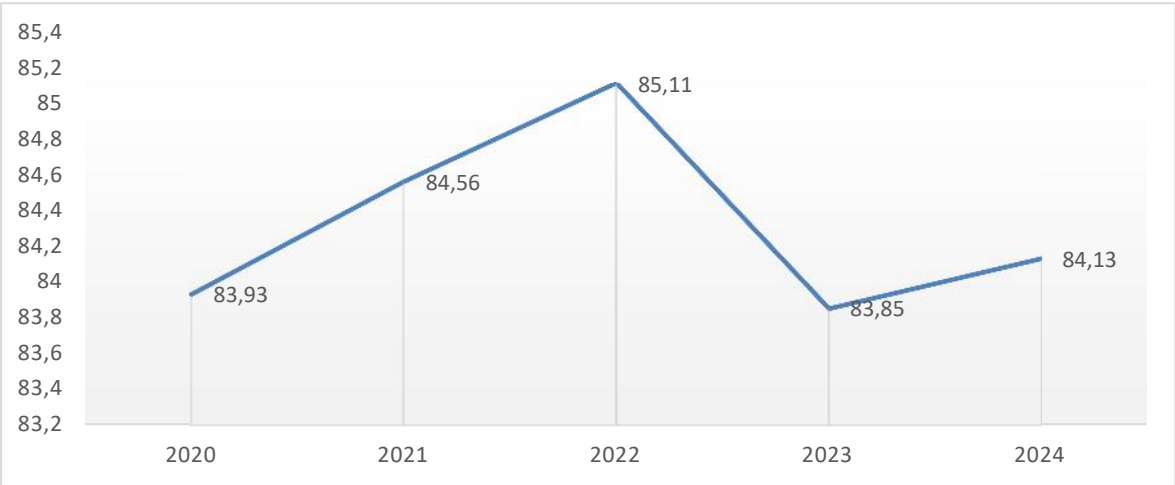
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah angka yang menunjukkan rasio antara banyaknya angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sendiri merupakan suatu indikator yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah dapat disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya jumlah penduduk yang tidak aktif dalam ekonomi, kurangnya kompetensi tenaga kerja, sebaliknya TPAK yang tinggi dapat mengindikasikan adanya lebih banyak peluang kerja dan partisipasi aktif dalam perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	83,93	84,56	85,11	83,85	84,13

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Grafik 2.24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja untuk Kabupaten Karo cenderung meningkat disetiap tahun kecuali pada tahun 2023 mengalami penurunan namun pada tahun 2024 kembali meningkat. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan perlu tetap ditingkatkan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan. Selain itu infrastruktur dan peningkatan investasi juga sangat dibutuhkan untuk ketersediaan lapangan pekerjaan.

F. Indeks Inovasi Daerah

Komitmen Pemerintah Kabupaten Karo untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Karo diwujudkannyatakan dengan menetapkan:

- 1. Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.

Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 secara perlahan terus meningkat, dengan melakukan perubahan-perubahan strategi setiap tahun. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karo ini masih tetap harus dilakukan untuk mempertahankan predikat Kabupaten Karo Sangat Inovatif dan mencapai Kabupaten Karo Terinovatif ke depannya.

Tidak hanya pada 2 (dua) regulasi di atas, komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karo juga terlihat lebih serius ketika menetapkan Peraturan Bupati Karo 01 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, yang memuat “pengurangan TPP akan dikenakan kepada seluruh ASN pada perangkat daerah tersebut apabila tidak memenuhi pelaporan kinerja berupa “Laporan Inovasi Perangkat Daerah” setiap triwulan dan akhir tahun. Implementasi ketiga regulasi ini, sangat berambak terhadap pencapaian IID Kabupaten Karo saat ini dan ke depannya. Itu dapat dilihat seperti dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	IID (skor/indeks)	3.319 (skor)	53,24 (Indeks)	53,69 (Indeks)	55,96 (Indeks)	62,02 (Indeks)
2	Predikat Kabupaten Karo	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif
3	Peringkat Kab/Kota Se-Sumut	3	3	2	2	1
4	Peringkat Kab Se-Indonesia	49	67	107	61	63

Sumber: BSKDN Kemendagri Tahun 2020-2024

Disamping itu, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah capainnya 100% dimana semua perangkat daerah mau difasilitasi dalam melaksanakan dan menerapkan inovasi. Begitu jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah terus meningkat karena jumlah inovasi yang diusulkan meningkat, seperti digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52
Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penerapan SIDA					

1.1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	60	59	46	46	46
1.2	Jumlah total perangkat daerah	60	59	46	46	46
2	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	43	27	43	71	111
2.2	Jumlah inovasi yang diusulkan	21	22	49	62	49
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	205	123	88	115	227

Sumber: Bappedalitbang Kab. Karo, 2024;
* Jumlah inovasi yang diusulkan ke IGA/Siindahkaka mulai 2 tahun terakhir sampai tahun berjalan

Bappedalitbang Kabupaten Karo sebagai penyelenggara Inovasi Daerah Kabupaten Karo juga berinovasi dengan menyediakan Ruang Diskusi Rutin Inovasi *Learning Organization Innovation Based* sejak tahun 2021 sebagai media yang dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi, setiap jam dan hari kerja untuk dapat berdiskusi terkait kendala dan permasalahan pelaksanaan dan penerapan inovasi pada instansinya. Tahun 2025, Ruang Diskusi Rutin Inovasi *Learning Organization Innovation Based* dikembangkan menjadi RUDII/MO/RO dimana ruang diskusi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu RUDII (Ruang Diskusi Inovasi) via WhatsApp, RUDIIMO (Ruang Diskusi Inovasi Mingguan *Online*) dan RUDIIRO (Ruang Diskusi Inovasi Rutin *Offline*). Inovasi ini dibuat dalam rangka menyelaraskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi. Disamping itu, ada pertemuan-pertemuan rutin inovasi, *workshop* dan desk inovasi untuk fasilitator inovasi instansi.

2.1.3.3. Transformasi Digital

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam kemajuan transformasi digital. Transformasi digital membawa banyak potensi dan berbagai manfaat, beserta dengan potensi dampak negatif, tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk merespon perkembangan teknologi digital dengan berbagai regulasi kebijakan. Tranformasi Digital terdiri dari:

1. Infrastruktur Digital
- Infrastruktur Digital merupakan Fondasi Akselerasi Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Pada awal tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 79.5% atau 221,6 juta penduduk. Penggunaan jumlah *mobile connection* meningkat sebesar 3.6% sejak terjadi pandemi *Covid-19*. Saat ini, penetrasi *fiber optic* mencapai 60.84% dari seluruh kecamatan. Jaringan *fiber optic* menjangkau sekitar 4.398 Kecamatan dari total 7.281 kecamatan di Indonesia. Total pembangunan jaringan *fiber optic* hingga saat ini adalah 460.000 Km. Di beberapa provinsi di Indonesia, kecepatan unduh mobile broadband telah lebih dari 25 Mbps. Saat ini, memasuki era 5G, sudah terdapat penetrasi jaringan 5G di 48 kota. Penetrasi jaringan *broadband* meningkatkan penggunaan data dan *traffic internet*.
2. Pemerintahan Digital
- Pemerintahan Digital membuka Akses dan Kemudahan Pelayanan Publik. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemanfaatan

teknologi digital dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif. Dengan menginisiasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai landasan konseptual dalam mengelola pemerintahan digital di Indonesia. Meskipun masih ada tantangan dalam mencapai keterjangkauan merata, pemerintah fokus pada percepatan pembangunan pusat data nasional dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia untuk memastikan layanan digital yang andal di seluruh pelosok negeri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengangkat peringkat Indonesia dalam indeks global e-government dan mempercepat transformasi digital yang inklusif. Integrasi aplikasi pemerintah juga mulai menunjukkan hasil positif, dengan upaya konsolidasi 24 ribu aplikasi yang tersebar di berbagai lembaga. Pemerintah aktif mendorong penerapan standar interoperabilitas, memperkuat efisiensi tata kelola dan mencegah duplikasi data. Dengan terobosan ini, proses administrasi pemerintahan diharapkan akan semakin cepat, efisien, dan transparan, memberikan layanan publik yang lebih baik.

Di bidang keamanan siber, Indonesia terus memperkuat regulasi dan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk melindungi masyarakat dari ancaman kebocoran data. Pemerintah berkomitmen mempercepat pembahasan regulasi keamanan siber yang lebih komprehensif dan memastikan sistem perlindungan yang lebih kuat, menciptakan fondasi yang kokoh untuk kepercayaan publik terhadap transformasi digital di Indonesia.

3. Ekonomi Digital

Ekonomi Digital berperan sebagai Pengungkit Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Nilai ekonomi digital Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2021, nilai ekonomi digital Indonesia diestimasi berkontribusi sebesar Rp1,490 Triliun dimana kontribusi industri digital mencapai 6.12% terhadap PDB. Pada tahun 2022, jumlah startup di Indonesia mencapai 2.341 startup—kedua tertinggi di Asia setelah India. Lebih lanjut, Jakarta menempati peringkat 12 dari 100 kota di dunia dalam Top 100 Emerging Ecosystems. Nilai ecosystem value Jakarta mencapai USD71 Miliar, melampaui nilai rata-rata global sebesar USD34.6 Miliar. Pesatnya pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia juga didukung oleh kehadiran 120 inkubator dan akselerator startup, serta 200 institusi keuangan yang mendukung finansial startup. Adopsi teknologi digital pada sektor manufaktur, pertanian, logistik, dan keuangan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga mendorong adopsi teknologi untuk sektor UMKM agar memiliki produktivitas lebih tinggi.

4. Masyarakat Digital

Masyarakat Digital akan mengalami Peningkatan Keterampilan Digital, Perkuat Daya Saing Bangsa. Di tahun 2045 proyeksi penduduk dengan kelompok umur 15-64 tahun akan mencapai 214,2 juta dari total populasi sebanyak 329,1 juta. Artinya, pada tahun 2045 penduduk usia produktif menyumbang 65% dari total populasi penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk usia produktif di Indonesia menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Peningkatan

kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi kunci untuk mewujudkan potensi tersebut. Dengan membekali generasi produktif dengan keterampilan digital yang relevan, Indonesia dapat memperkuat posisi di tengah persaingan global. Pemerintah dan ekosistem digital berkolaborasi untuk meningkatkan literasi digital melalui kampanye edukasi yang masif dan inklusif.

Tabel 2.53
Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesi (IMDI) (indeks)	n/a	n/a	39,21	47,12	39,99

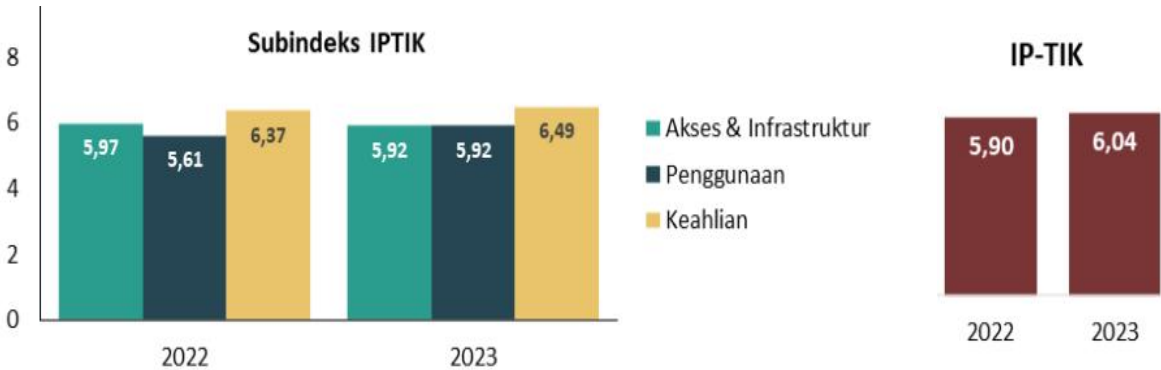
Tahun 2024 IMDI Kabupaten Karo menurun dari 47,12 tahun 2023 menjadi 39,99 poin. Penurunan dimaksud disebabkan rendahnya pilar pemberdayaan.

Untuk meningkatkan masyarakat digital Indonesia di Kabupaten Karo, diperlukan pemberdayaan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan, pengembangan digital skill dan diperoleh dari tingkat intensitas aktivitas digital masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan, e-commerce, marketplace, media sosial, dan platform e-learning. Sebagai penunjang diperlukan program kerja yang berbasis Platform integrasi yang memungkinkan pertukaran data secara efisien antara sistem, aplikasi, layanan SPBE, dan perangkat IoT melalui API.

A. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dengan nama *ICT Development Index* (ICT-DI). Indeks Pembangunan TIK merupakan ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, Indeks Pembangunan TIK mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK.

Gambar 2.1
Indeks Pembangunan TIK dan Subindeks Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2022 dan 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi 2023

2.1.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Karo terbilang cukup baik namun pemerintah masih butuh upaya keras dalam peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto ini. Saat ini Pemerintah Kabupaten Karo telah Menyusun peraturan daerah untuk pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi. Salah satu permasalahan Pembentukan Modal Tetap Bruto saat ini adalah iklim investasi dan kemudahan berusaha. Iklim investasi yang tidak kondusif dapat menghambat peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto, kemudahan berusaha yang terbatas serta kurangnya minat investasi. Untuk itu perlu dilakukan mendorong investor untuk berminat berinvestasi di Kabupaten Karo serta menyiapkan dokumen IPRO (*Investment Ready to Offer*) untuk ditawarkan kepada investor. PMTB Kabupaten Karo tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui tabel berikut

Tabel 2.54
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.610.301.103,46	6.910.120.274,43	7.371.063.846,37	8.641.188.95	9.243.229.14

Sumber: BPS Kabupaten Karo

B. Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor. Jika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, maka net ekspor akan bernilai positif. Sebaliknya, jika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, maka net ekspor akan bernilai negatif. Net ekspor yang positif menunjukkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan oleh pasar. Sebaliknya, net ekspor yang negatif menunjukkan bahwa lebih banyak mengimpor barang dan jasa daripada yang dihasilkan.

Perdagangan di Kabupaten Karo diupayakan akan terus ditingkatkan untuk kesiapan dalam menghadapi persaingan perdagangan global. Perdagangan di Kabupaten Karo juga berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Data net ekspor kabupaten Karo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Net Ekspor Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 (milliar Rp)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Net Ekspor	6,35	151,93	-17.027	860,47	1.691,13

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2025

Kualitas produk yang baik yang sesuai dengan kebutuhan pasar sangat diperlukan untuk itu pendidikan dan pelatihan bagi petani dalam

menghasilkan produk yang berkualitas maupun dalam pengolahan pasca panen agar produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan asosiasi perdagangan atau pihak yang terkait untuk menciptakan peluang pemasaran dan memperluas akses pasar.

2.1.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan dinilai dari beberapa indikator, antara lain:

A. Indeks Daya Saing Infrastruktur

Indeks daya saing infrastruktur Kabupaten Karo berada termasuk dalam kategori rendah yakni masih berada dibawah Indeks Daya Saing Infrastruktur Nasional sebesar 2,71 pada tahun 2023. Namun demikian Indeks daya saing infrastruktur Kabupaten Karo mengalami peningkatan dengan melaksanakan pembangunan jalan dan penyediaan air minum layak yang dilakukan secara berkesinambungan. Di sisi lain, Kabupaten Karo belum memiliki Stasiun Kereta Api serta Bandara yang juga menjadi salah satu faktor penunjang Indeks daya saing infrastruktur

Tabel 2.56

Indeks Daya Saing Infrastruktur Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Daya Saing Infrastruktur	n/a	n/a	1,54	2,62	n/a

Sumber: BRIN

B. Rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau

Penyediaan hunian layak dan terjangkau merupakan salah satu kendala dalam pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Karo. Rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau belum 100%. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahun pada tahun 2024 akses hunian layak dan terjangkau masih 98,91%. Pembangunan rumah layak huni dan terjangkau akan menjadi program ke depan untuk memnuhi akses rumah layak huni dan terjangkau 100%

Tabel 2.57

Rumah Tangga dengan Akses hunian layak dan terjangkau Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	n/a	n/a	63.30	95.14	98.91

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Karo

C. Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Karo mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, akan tetapi masih jauh dari apa yang diharapkan, berdasarkan analisis angka Desa Maju menuju Mandiri tahun 2024 Kabupaten Karo, terdapat beberapa kendala dari faktor dimensi pendukung, antara lain:

- Dimensi Pendidikan: tujuh (7) dari 47 Desa Maju memiliki akses menuju PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK sangat rendah.

- Dimensi Kesehatan: 29 dari 47 Desa Maju memiliki layanan dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta kepemilikan jaminan kesehatan yang rendah.
- Dimensi Aktivitas Desa: 20 dari 47 Desa Maju memiliki aktivitas kegiatan olah raga yang rendah berupa keberadaan kelompok olah raga dan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga.
- Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi: 16 dari 47 Desa Maju memiliki akses pendidikan nonformal (pusat keterampilan dan kursus) yang rendah.

Tabel 2.58
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Desa Mandiri	0,38 %	0,38 %	0,38 %	1,93 %	2,31 %

2.1.4. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan.

2.1.4.1. Rasio Pajak terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Karo masih terbilang cukup rendah walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya sehingga pemerintah masih butuh upaya keras dalam peningkatan Ratio pajak daerah ini. Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak daerah ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan data wajib pajak yang belum akurat. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi teknologi, intensifikasi serta ekstensifikasi pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan pajak daerah di Kabupaten Karo.

Tabel 2.59
Rasio Pajak terhadap PDRB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Daerah	36.711.550.305,76	41.674.222.166,31	51.640.157.978,00	58.674.293.730,00	61.540.045.940,28
2	Total PDRB	20.974,57	21.824,14	23.975,57	26.408,98	28.867,89
3	Rasio Pajak terhadap PDRB	0,0017	0,0019	0,0021	0,0022	0,0021

Sumber: BPS Kabupaten Karo dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo

2.1.5. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merujuk pada kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pelayanan ini mencakup berbagai sektor seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keamanan. Tujuan utama pelayanan umum adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan sosial dan ekonomi.

2.1.5.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum.

A. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mengukur reformasi hukum. IRH merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi, penilaian dimulai pada tahun 2022 tetapi Kabupaten Karo mulai ikut penilaian pada tahun 2023. Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Karo pada Tahun 2024, Skor IRH mencapai 87.22, skor ini menunjukkan kinerja yang baik. Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor yang menjadi indikator dari penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), antara lain:

- a. Penguatan sistem regulasi yakni Upaya peningkatan koordinasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi.
- b. Peningkatan pelayanan hukum kepada Masyarakat yakni dengan penataan database peraturan perundang-undangan dan memperluas akses Masyarakat terhadap layanan hukum yang berkualitas dan terjangkau

Beberapa hal yang yang menjadi permasalahan sehingga belum tercapainya Skor Indeks Reformasi Hukum yang maksimal yakni:

- 1. belum tersedianya kegiatan peningkatan Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan Bimtek untuk Analis Hukum
- 2. belum terlaksananya kegiatan regulasi/deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu.

Tabel 2.60
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Karo Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	0	0	87.22

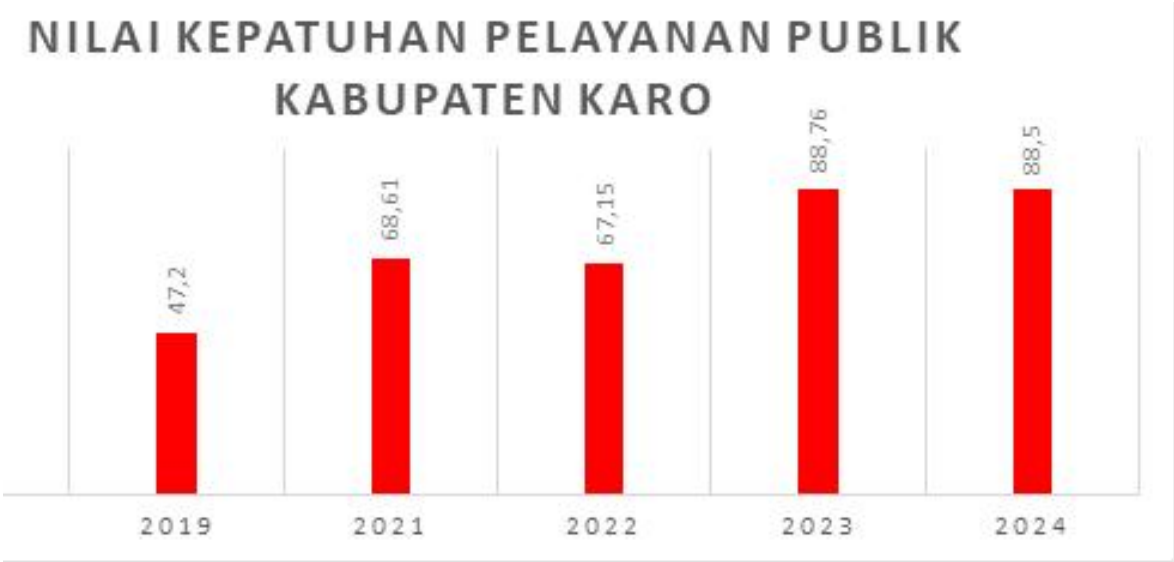
Sumber: Kemenkumham, 2024

B. Indeks Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik tentunya mengharapkan untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melihat hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karo bekerja keras untuk meningkatkan layanan yang dimaksud dengan berbagai cara.

Laporan Hasil Kepatuhan terhadap Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan Ombudsman RI untuk Kabupaten Karo senantiasa berubah ke arah yang lebih baik, sebagaimana di bawah ini:

Grafik 2.25
Bagan Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik



Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009) dinyatakan bahwa Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) dan dari hasil pemantauan yang dilakukan ke Kabupaten Karo diperoleh nilai sebagai berikut :

1. Tahun 2021 dengan Lokus Penilaian 2 (dua) Perangkat Daerah (DPM-PTSP dan DISDUKCAPIL), dengan Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Karo berada pada Kategori C dengan Skor 2,73.
2. Tahun 2022 dengan Lokus Penilaian 2 (dua) Perangkat Daerah (DPM-PTSP dan DISDUKCAPIL), dengan Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Karo berada pada Kategori - B dengan Skor 3,45.
3. Tahun 2023 dengan Lokus Penilaian 3 (tiga) Perangkat Daerah (Kecamatan Tiganderket, Dinas Sosial dan RSUD), dengan Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Karo NA (Not Available) tidak ternilai karena kesalahan teknis diaplikasi.
4. Tahun 2024 dengan Lokus Penilaian 3 (tiga) Perangkat Daerah (Dinas Sosial, RSUD dan Disdukcapil), dengan Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Karo berada pada Kategori B dengan Skor 3,63 poin.

Pencapaian Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik di Kabupaten Karo, pelaksanaanya memiliki kendala antara lain:

- 1) Perangkat Daerah sebagai Unit Pelayanan Publik Kabupaten Karo belum seluruhnya menyusun dan menetapkan visi misi pelayanan standar Pelayanan Publik, maklumat pelayanan serta sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana ketentuan berlaku.
- 2) Masyarakat masih ada yang merasakan pelayan public yang mereka terima tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga dibutuhkan media komunikasi antara masyarakat sebagai penerima Layanan

Publik dan Perangkat Daerah sebagai unit Pelayanan Publik Kabupaten Karo

C. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat risiko korupsi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Indeks Integritas Daerah. Indeks Integritas Nasional diperoleh dari Nilai Aregat Survey Penilaian Integritas pada setiap daerah, sehingga Nilai SPI Daerah ini dapat diartikan sebagai Indeks Integritas Daerah. Survey Penilaian Integritas menjadi Instrumen untuk mengetahui dampak atas berbagai upaya pemberantasan korupsi yang telah di lakukan pemerintah dalam perspektif responden.

Responden SPI berasal dari Internal (ASN Pemkab Karo); Eksternal (Masyarakat pengguna layanan atau mitra kerja sama K/L/PD); Eksper (Ahli yang terdiri dari ahli/tokoh yang di pandang mengetahui keadaan pemerintahan diwilayah sampel yaitu Pensiunan PNS, Auditor BPK, Auditor BPKP, Perwakilan Ombusman, PIC Program Stranas KPK, Asosiasi Pengusaha, Pimpinan DPRD/Ketua Komisi DPRD, Advokat , Aparat Penegak Hukum terkait Saber Pungli, Jurnalis, LSM, Akademisi, Lembaga Donor, Penyuluh Anti Korupsi dan ahli lainnya.

Indeks Integritas Daerah Kabupaten Karo menunjukkan tren yang meningkat, tetapi belum mencapai 80, hal ini menggambarkan tata kelola Pemerintah Kabupaten Karo Belum Optimal, yang beberapa hal antara lain SDM belum mencukupi dalam hal kuantitas dan kualitas serta sistem Merit belum berjalan dalam proses mutasi dan promosi ASN.

Tabel 2.61
Indeks Integritas Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Integritas Daerah	-	61,76	71,85	72,60	76,07

Sumber: KPK

D. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. SPBE juga dikenal sebagai *e-Government*. Tujuan SPBE adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan. Peningkatan penyelenggaraan SPBE untuk pembangunan daerah meliputi:

- 1. Instansi pusat
- 2. Pemerintah daerah
- 3. Aparatur sipil negara (ASN)
- 4. Perorangan
- 5. Masyarakat
- 6. Pelaku usaha
- 7. Pihak lain yang memanfaatkan SPBE

Untuk mendukung penerapan SPBE, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral. Manajemen SPBE dilakukan

melalui Pengoperasian layanan SPBE, Pengelolaan aplikasi SPBE, Pelayanan pengguna SPBE, Audit teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 2.62
Capaian Indeks SPBE Kabupaten Karo Tahun 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	n/a	2.42	2.57	3.04

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Karo

2.1.5.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

A. Persentase Capaian Aksi HAM

Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Pemerintah Kabupaten Karo telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dan Kerjasama dari semua pihak untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi masyarakat di Kabupaten Karo. Capaian Aksi HAM di Kabupaten Karo mencakup berbagai bidang yakni

- a. pemberian bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah
- b. optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum
- c. penyediaan layanan Pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- d. penyediaan layanan Kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan Kesehatan tingkat pertama.
- e. implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya, dan;
- f. pembangunan sarana dan prasarana transportasi aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Capaian Aksi HAM Kabupaten Karo menunjukkan tren positif atau meningkat, tetapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu:

- 1. Indikator yang digunakan dalam penilaian pelaksanaan Aksi HAM berbeda setiap tahunnya dan disampaikan kementerian terkait pada saat tahun berjalan Pemerintah Daerah sering mengalami kesulitan dalam menyesuaikan sub kegiatan yang telah ditetapkan dengan tujuan pelaksanaan Aksi HAM.
- 2. Pelaksanaan penilaian Aksi HAM belum menjadi salah satu prioritas Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya.

Tabel 2.63
Persentase Capaian Aksi HAM

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Capaian Aksi HAM	34.20	56.18	85.7	93.3

Sumber: Kemenkumham

B. Demokrasi Substansial, Narkoba dan Wawasan Kebangsaan

Pada bidang politik dan wawasan kebangsaan berdasarkan data menggambarkan bahwa jumlah masyarakat yang menerima pendidikan politik, wawasan kebangsaan dan revolusi mental mengalami kenaikan sedangkan jumlah kawasan bahaya narkoba menjadi kawasan waspada cenderung fluktuatif paling tinggi pada tahun 2021 sebanyak 92 desa sedangkan pada tahun 2024 belum mendapatkan angka realisasi. Data kawasan narkoba cenderung tinggi artinya masih tingginya peredaran narkoba di desa dan perkotaan serta tingginya generasi muda yang terjerumus narkoba. Hal ini kedepannya menjadi ancaman keamanan dan ancaman produktivitas serta daya saing sumber daya manusia khususnya generasi muda yang akan menjadi beban non produktif bahkan generasi emas Kabupaten Karo terancam gagal karena narkoba.

Tabel 2.64
Indikator Demokrasi, Narkoba dan Wawasan Kebangsaan
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah masyarakat yang menerima pendidikan politik	Orang	-	-	150	300	500
2.	Jumlah Ormas yang terbina dan aktif	Ormas	63	76	89	97	108
3.	Jumlah kawasan bahaya narkoba menjadi kawasan waspada	Desa	57	92	82	37	-
4.	Laporan rencana aksi penanganan konflik	Peringkat	3	2	2	3	1
5.	Jumlah masyarakat yang menerima pendidikan politik wawasan kebangsaan dan revolusi mental	Orang	-	-	200	150	420

Sumber : Bakesbangpol Kab. Karo, 2025

C. Keamanan daerah

Keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi setiap tahun. Selain angka kriminalitas, kejadian unjuk rasa juga sangat berpengaruh terhadap faktor keamanan. Kegiatan unjuk rasa di Kabupaten Karo pada tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) kali sedangkan tahun 2021-2022 tidak ada unjuk rasa. Akan tetapi pada tahun 2023-2024 terjadi 4 kali demonstrasi. Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan memiliki berbagai strategi dalam menjaga kestabilan dan keamanan serta perlunya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Karo.

Jumlah demonstrasi atau unjuk rasa di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah unjuk rasa	7	-	-	4	2

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Karo, 2025

2.1.5.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan.

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Karo menggambarkan kondisi dan kemampuan daerah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Skor IDSD dapat dijadikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian daerah Kabupaten Karo. Skor IDSD Kabupaten Karo merupakan gambaran keberhasilan daerah Kabupaten Karo untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. IDSD Kabupaten Karo ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah Kabupaten Karo yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dapat dikatakan meningkat walaupun sedikit berfluktuasi dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut di atas adalah komponen lingkungan pendukung dan pasar. Komponen lingkungan pendukung ditentukan oleh pilar institusi yang dipengaruhi oleh kemananan, modal, sosial, *check and balance*, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan pemerintah; Pilar infrastruktur yang dipengaruhi oleh infrastruktur transportasi dan infrastruktur utilitas; Pilar adopsi TIK dipengaruhi oleh pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, Pelanggan internet *fixed-broadband* dan pengguna internet; Pilar stabilitas ekonomi makro ditentukan oleh indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, dan nilai investasi. Komponen Pasar ditentukan oleh Pilar pasar produk yang dipengaruhi oleh persaingan domestik menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara fair dan kompetitif.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sejak tahun 2021 sampai 2024, skor IDSD Kabupaten Karo berdasarkan komponen seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66
IDSD Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 Berdasarkan Komponen

Tahun	Skor IDSD (skala 5)	KOMPONEN			
		Lingkungan pendukung	SDM	Pasar	Ekosistem Inovasi
2024	3,58	4,09	4,11	2,92	3,34
2023	3,38	3,60	3,98	2,78	3,53
2022	2,93	2,83	3,77	2,55	3,08
2021	3,04	3,05	3,25	3,25	2,60

Sumber: Laporan IDSD BRIN Tahun 2021-2024

Skor IDSD Kabupaten Karo paling tinggi pada Tahun 2024, skor ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan yang akan diambil ke depan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Karo. Skor IDSD ini ditentukan dari penilaian 4 komponen dan 12 pilar yaitu:

1. Komponen lingkungan pendukung terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu:
 - a. Pilar institusi yang ditentukan oleh kemananan, modal, social, check and balance, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan pemerintah dengan skor 4,44.
 - b. Pilar infrastruktur yang ditentukan oleh infrastruktur transportasi dan infrastruktur utilitas dengan skor 3,85.
 - c. Pilar adopsi TIK ditentukan oleh pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, Pelanggan internet fixed-broadband dan pengguna internet dengan skor 4,44.
 - d. Pilar stabilitas ekonomi makro ditentukan oleh indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, dan nilai investasi dengan skor 3,61.
2. Komponen SDM terdiri dari 2 (dua) pilar yaitu:
 - a. Pilar kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dengan skor 3,94.
 - b. Pilar keterampilan ditentukan oleh tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan, erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dengan skor 4,27.
3. Komponen pasar terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu:
 - a. Pilar pasar produk dengan skor 2,89 ditentukan oleh persaingan domestik menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara fair dan kompetitif. Berbagai praktek monopoli dan oligarki ekonomi serta adanya hambatan- hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke pasar produk dan jasa tertentu menciptakan inefisiensi pasar. kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar.
 - b. Pilar pasar tenaga kerja dengan skor 2,47 ditentukan oleh fleksibilitas, meritokrasi dan insentif. Fleksibilitas tenaga kerja dan layaknnya upah merupakan faktor penentu pasar tenaga kerja. Pasar

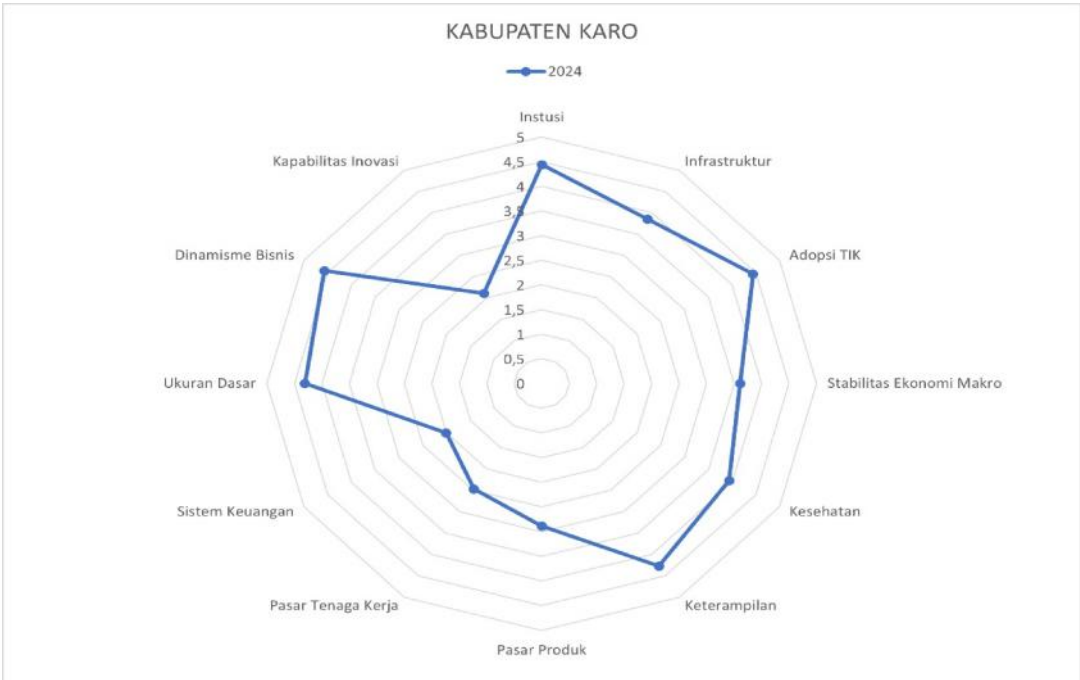
tenaga kerja yang efisien akan mempertemukan kepentingan pelaku bisnis dan tenaga kerja. Dari sisi permintaan (*demand side*), pelaku bisnis dan investor sangat mempertimbangkan tingkat keterampilan dan upah tenaga kerja yang akan menjadi biaya dalam proses produksi. Di sisi penyediaan (*supply side*), tenaga kerja mempertimbangkan upah yang akan diterima, termasuk jaminan sosial pekerja lainnya, dalam memutuskan untuk bekerja. Kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif memberi kemudahan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kapabilitasnya dan masuk ke pasar tenaga kerja.

- c. Pilar sistem keuangan dengan skor 2,01 ditentukan oleh kedalaman dan stabilitas. Sistem keuangan terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan, dan sejumlah prosedur dan peraturan yang menjamin terlaksananya simpan pinjam secara baik (Gunadi et al., 2013). Sistem keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta memediasi lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran. Sistem keuangan yang mampu memediasi sumber daya keuangan secara efisien dan memitigasi risiko krisis keuangan dengan penuh kehati-hatian akan memfasilitasi pelaku usaha untuk lebih produktif dan ekspansif.
 - d. Pilar ukuran pasar dengan skor 4,31 ditentukan oleh PDRB harga konstan tahun 2010 dan rasio impor terhadap PDRB harga berlaku. Ukuran pasar ini mempengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan pelaku bisnis untuk mengeksploitasi skala ekonomi. Ukuran pasar menguatkan struktur industri sehingga meningkatkan nilai tambah. Ukuran pasar berpotensi meningkatkan produktivitas bisnis dengan mengeksploitasi skala ekonomi.
4. Komponen ekosistem inovasi terdiri dari 2 (dua) pilar yaitu:
- a. Pilar dinamisme bisnis dengan skor 4,57 ditentukan oleh biaya untuk memulai usaha dan waktu untuk memulai usaha. Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (*market*) di suatu wilayah. Di satu sisi, semua daerah tentunya mengharapkan kedatangan investasi baru dan perusahaan yang inovatif ke wilayahnya. Di sisi lain, daerah juga menginginkan perusahaan yang tidak efisien bisa dengan mudah untuk keluar agar tidak membebani wilayahnya. Secara administratif, mudahnya pelayanan dan rendahnya hambatan untuk memulai bisnis, serta kejelasan hukum mengenai kepailitan akan memudahkan perusahaan untuk keluar-masuk pasar. Daerah yang mampu menciptakan dinamisme bisnis yang positif, yaitu daerah yang mendatangkan investasi dan pelaku usaha yang inovatif serta melepas perusahaan yang tidak efisien keluar dari pasar, akan menjadikan daerah tersebut jauh lebih kompetitif dan produktif. Daerah yang mampu menciptakan dinamisme bisnis yang positif akan menjadikan daerah tersebut kompetitif dan produktif.

- b. Pilar kapabilitas inovasi dengan skor 2,11 ditentukan oleh keberagaman tenaga kerja, status pengembangan kluster, kekayaan intelektual dan kolaborasi, riset dan komersialisasi. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru.

Berdasarkan analisa skor IDSD Kabupaten Karo Tahun 2024 tersebut di atas, maka masih perlu beberapa kebijakan yang harus dan mendesak dilaksanakan dalam rangka meningkatkan IDSD Kabupaten Karo di tahun yang akan datang. Adapun kebijakan tersebut terkait 4 (empat) pilar, yaitu: pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, kapabilitas inovasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2
Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kab. Karo Tahun 2024 per Pilar



2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi perangkat daerah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Evaluasi kinerja dan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo sampai Triwulan IV Tahun 2024 yang terdiri dari realisasi capaian pembangunan daerah, realisasi capaian program, kegiatan dan keuangan serta rekapitulasi rata-rata capaian kinerja program, kegiatan dan keuangan.

2.2.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan

Indikator kinerja makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Karo terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan manusia dan Rasio Gini. Indikator makro selain menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Kabupaten Karo, juga sebagai indikator pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi dan nasional.

Tabel 2.67
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2024

No	Indikator	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1	Pertumbuhan ekonomi	4,90-5,10	4,22
2	Indeks Gini	0,233	0,214
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,00-2,50	2,4
4	Persentase Penduduk Miskin	7,37	7,37
5	Indeks Pembangunan Manusia	77,00	77,49

Capaian indikator makro Kabupaten Karo tahun 2024 menunjukkan hasil yang beragam, dengan kombinasi antara keberhasilan pada beberapa aspek pembangunan manusia dan tantangan pada sisi pertumbuhan ekonomi. Secara umum, kondisi makroekonomi daerah mencerminkan upaya pembangunan yang cukup konsisten, namun tetap memerlukan perhatian strategis untuk mencapai target pembangunan secara menyeluruh.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, capaian Kabupaten Karo berada pada angka 4,22 persen, masih di bawah target yang ditetapkan dalam rentang 4,90–5,10 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi daerah belum optimal, kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan investasi, perlambatan sektor unggulan, serta tantangan struktural pascapandemi. Untuk itu, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pariwisata, serta mendorong peran sektor swasta menjadi kunci penting ke depan.

Namun demikian, indikator ketimpangan pendapatan menunjukkan tren yang positif. Indeks Gini tahun 2024 tercatat sebesar 0,214, lebih rendah dari target 0,233. Ini mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata di masyarakat. Keberhasilan ini perlu dijaga dan ditingkatkan melalui kebijakan inklusif yang menyasar kelompok masyarakat berpendapatan rendah, agar pertumbuhan yang ada dapat dinikmati secara adil.

Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 2,4 persen, masih dalam kisaran target yaitu 2,00–2,50 persen. Ini menunjukkan bahwa situasi ketenagakerjaan relatif terkendali. Namun, mengingat capaian pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, perlu dilakukan antisipasi agar pengangguran tidak meningkat, khususnya di kalangan angkatan kerja muda dan lulusan baru.

Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 7,37 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun tidak mengalami

peningkatan, stagnasi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan kemiskinan perlu diperkuat melalui program pemberdayaan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Sementara itu, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, yakni 77,49, melebihi target sebesar 77,00. Hal ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Peningkatan IPM ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.2.2. Realisasi Capaian Indikator IKU Kepala Daerah

Pada tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan sejumlah indikator mencerminkan keberhasilan signifikan, sementara sebagian lainnya masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Dari total 45 indikator yang diukur, sebanyak 19 indikator berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kinerja positif pemerintah daerah dalam berbagai sektor strategis seperti pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pengelolaan lingkungan, konektivitas wilayah, serta pengembangan pariwisata dan investasi. Beberapa indikator yang menunjukkan performa luar biasa antara lain adalah Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman yang mencapai 88,5 dari target 70, Indeks Profesionalisme ASN sebesar 75,69 dari target 65, harapan lama sekolah 13,48 tahun dari target 12,88 tahun, dan Angka Harapan Hidup sebesar 72,44 tahun yang melampaui target 72,15 tahun. Selain itu, sektor ekonomi juga menunjukkan pertumbuhan yang sehat, seperti capaian nilai investasi yang melebihi target (Rp7,16 triliun dari Rp6,51 triliun), jumlah pelaku ekonomi kreatif, serta peningkatan signifikan dalam kunjungan dan lama tinggal wisatawan.

Namun, capaian ini juga disertai dengan tantangan yang cukup besar, ditunjukkan oleh 23 indikator yang belum memenuhi target. Beberapa indikator yang cukup mencolok antara lain adalah rendahnya persentase pencari kerja yang dilatih, yakni hanya 17% dari target 80%, jumlah wirausaha baru yang hanya mencapai 25 dari target 50, serta tingkat penyelesaian kawasan kumuh dan pelengkapan PSU yang masih jauh dari target. Indeks Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca) juga mencatat nilai yang cukup rendah, yakni 56,15 dari target 73. Di sektor birokrasi dan kelembagaan, nilai AKIP hanya mencapai 60,41 dari target 67, sementara rata-rata lama sekolah masih berada di angka 10,12 tahun dari target 10,43 tahun. Selain itu, beberapa indikator infrastruktur seperti proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik, gedung pemerintahan yang layak, dan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota juga belum memenuhi target, yang menunjukkan perlunya penguatan pada sektor pelayanan dasar dan penataan ruang.

Secara umum, capaian IKU Kepala Daerah tahun 2024 menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam sejumlah bidang prioritas, namun juga mengindikasikan perlunya langkah-langkah percepatan dan perbaikan, khususnya pada aspek-aspek yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat dan efisiensi pemerintahan. Untuk itu,

pemerintah daerah perlu memfokuskan intervensi dan alokasi anggaran pada indikator-indikator yang masih tertinggal, terutama pada sektor ketenagakerjaan, perumahan rakyat, pendidikan, serta penguatan birokrasi. Penguatan sinergi antarperangkat daerah juga menjadi penting agar perencanaan dan pelaksanaan program lebih terarah dan berbasis capaian. Di sisi lain, sektor-sektor yang telah menunjukkan kinerja baik seperti pariwisata dan investasi perlu terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Evaluasi menyeluruh terhadap indikator yang stagnan juga perlu dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan berbasis data. Dengan pendekatan yang lebih strategis dan terintegrasi, diharapkan kinerja kepala daerah pada tahun-tahun mendatang dapat meningkat secara lebih merata dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024
1	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (<i>Ombudsman</i>)	Nilai	70	88,5
2	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	67	60,41
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP
4	Indeks Profesionalisme ASN	poin	65	75,69
5	Skor LPPD	poin	3,08	-
6	Indeks SPBE	indeks	2,7	3,04
7	Rata-rata lama sekolah	tahun	10,43	10.12
8	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,88	13.48
9	Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (<i>Alibaca</i>)	Indeks	73	56,15
10	Angka Harapan Hidup	tahun	72,15	72,44
11	Indeks Pembangunan Gender	%	96,45	96,36
12	Persentase Penegakan PERDA	%	100	81.82
13	Persentase PMKS yang tertangani	%	57,69	57.69
14	Persentase Peningkatan PDRB (<i>ADHB</i>)	persen	5	9,3
15	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	pelaku	1.200	1563
16	BUMD/Perusda	BUMD	1	1
17	Skor pola pangan harapan (%)	persen	90,5	92
18	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1.101.000	1434797
19	Lama Kunjungan Wisatawan	hari	1,5	2.5
20	Jumlah benda dan situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	cagar budaya	20	11
21	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	11	15
22	Jumlah wirausaha baru	wirausaha	50	25
23	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	persen	80	17

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024
24	Nilai Investasi	triliun	6,51	7.16
25	Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	110.825.754.862	105,417,387,536
26	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	66	63.9
27	Persentase rurnah tinggal bersanitasi layak	%	75,08	74.68
28	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	68,706	68,706
29	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	51,11	55.21
30	Persentase drainase dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)	%	63	63.69
31	Gedung pemerintahan yang layak dan baik	%	66	61.5
32	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100
33	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni	%	100	100
34	Persentasi luas kawasan kumuh yang ditangani	%	8060	25,09
35	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	%	98,7	62.5
36	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Lokasi	2	0
37	Rasio konektivitas kabupaten	%	95	97
38	Kinerja lalu lintas kabupaten	rasio	0,28	0.31
39	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	indeks	54,01	60.91
40	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	indeks	87,01	93.37
41	Hasil pengukuran tutupan lahan	indeks	58,48	52.47
42	Luasan RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan	%	27	25
43	Ketaatan terhadap RTRW	%	77	73
44	Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan)	%	77	78.03
45	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	indeks	0,54	0.48

2.2.3. Realisasi Capaian Indikator Kunci Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil yang cukup bervariasi di berbagai aspek pembangunan. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, wilayah ini berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,22 persen, sesuai dengan target 4,20–4,60%, disertai peningkatan signifikan pada PDRB per kapita yang mencapai sekitar Rp67,7 juta. Indeks Gini yang rendah (0,214) menunjukkan distribusi pendapatan relatif merata, dan IPM meningkat menjadi 77,49, melampaui target 76,2. Meskipun demikian, angka kemiskinan justru mengalami peningkatan tipis, dan prevalensi balita gizi kurang masih di atas target, walaupun kasus gizi buruk hampir sepenuhnya tertangani (0,01%). Tingkat partisipasi angkatan kerja cukup tinggi (-84%), namun disertai dengan sedikit peningkatan pengangguran dan penurunan rasio pekerja aktif. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada pada angka 84,78, sedikit di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun indikator makro memperlihatkan tren positif, masih ada pekerjaan rumah besar dalam penguatan perlindungan sosial dan intervensi bagi kelompok rentan.

Dalam aspek daya saing, meskipun sejumlah data penting seperti konsumsi non-pangan dan aktivitas ekspor-impor belum tersedia, indikator lain menunjukkan kemajuan. Rasio ketergantungan ekonomi menurun menjadi 45,03, dan jumlah izin usaha meningkat tajam, mencerminkan perbaikan dalam iklim berusaha dan potensi pertumbuhan UMKM. Di sisi pelayanan umum, pendidikan dasar menunjukkan kinerja yang baik: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), angka putus sekolah, dan angka kelulusan sebagian besar telah menyentuh atau mendekati target. Namun, kualitas pendidikan masih harus ditingkatkan, terutama dengan rendahnya proporsi guru bersertifikasi S1/D-IV yang hanya sekitar 50%, serta masih banyaknya gedung sekolah dalam kondisi kurang layak. Di sektor kesehatan, capaian penurunan angka kematian ibu dan anak cukup signifikan. Namun, cakupan layanan dasar seperti imunisasi, diagnosa komplikasi, dan pelayanan kesehatan ibu dan balita masih belum merata. Skrining hipertensi dan penanganan neonatal juga belum mencapai target, menandakan perluasan layanan preventif dan promotif perlu diperkuat di tingkat komunitas.

Aspek infrastruktur dan pemeliharaan ruang memberikan hasil yang beragam. Capaian akses sanitasi dan irigasi telah memenuhi target, dan penanganan sampah menunjukkan hasil yang baik. Namun, infrastruktur fisik seperti panjang jalan mantap, drainase, dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) masih belum memadai dan membutuhkan perhatian serius. Di sektor permukiman, meskipun hampir 99% rumah dinilai layak huni, penanganan kawasan kumuh masih kurang efektif, dan belum ada lokasi baru yang dimanfaatkan sesuai izin pemanfaatan tanah. Untuk ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, respons terhadap bencana dan penegakan Perda menunjukkan kemajuan, namun keterbatasan personel Linmas serta infrastruktur pemadam kebakaran menjadi hambatan dalam penanganan darurat yang cepat dan efektif.

Layanan non-dasar seperti ketenagakerjaan dan pemberdayaan perempuan menunjukkan kemajuan pada pendaftaran pencari kerja dan cakupan Jamsostek, namun capaian pelatihan kerja, dukungan terhadap kewirausahaan, dan peningkatan proporsi lulusan pendidikan tinggi masih tergolong rendah. Di sektor pangan, meskipun pemenuhan energi dan protein masyarakat melebihi standar, cadangan pangan daerah masih sangat terbatas. Di sisi lain, sektor pertanian dan perikanan mengalami

pertumbuhan produksi dengan kontribusi aktif dari kelompok tani dan nelayan, namun belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan nilai ekspor atau pemberdayaan pedagang kecil secara luas.

Administrasi kependudukan sudah cukup baik, dengan cakupan identitas kependudukan hampir tuntas. Namun, penerbitan akta kelahiran dan pernikahan masih belum ideal, menyisakan pekerjaan rumah pada sistem pencatatan sipil. Pemberdayaan desa menunjukkan adanya infrastruktur dasar yang cukup memadai, tetapi sarana kesejahteraan sosial seperti perawat desa belum tersedia secara merata. Dalam pengendalian penduduk, indikator fertilitas dan pertumbuhan alami menunjukkan tren membaik, namun capaian penggunaan kontrasepsi dan pemenuhan unmet need masih di bawah target. Di sektor transportasi dan digitalisasi, indeks SPBE melampaui target, namun akses internet dan kepemilikan komputer di tingkat rumah tangga masih rendah, menunjukkan ketimpangan transformasi digital antar wilayah. Pada sektor koperasi, UKM, dan investasi, peningkatan jumlah investor nasional dan nilai investasi cukup menggembirakan, namun belum dibarengi dengan peningkatan daya serap tenaga kerja atau akses permodalan yang kuat untuk buruh dan pelaku informal. Di sektor pemuda dan olahraga, perkembangan kewirausahaan muda cukup menonjol, meskipun partisipasi atlet muda dan organisasi pemuda masih minim.

Secara keseluruhan, kinerja perangkat daerah pada tahun 2024 patut diapresiasi terutama di bidang ekonomi makro, pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan digitalisasi birokrasi. Namun, tantangan nyata masih ditemukan dalam sektor pelatihan kerja, penguatan kualitas SDM dan infrastruktur fisik, cakupan layanan kesehatan lanjutan, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan penanganan pemukiman kumuh. Oleh karena itu, untuk perencanaan tahun berikutnya, direkomendasikan beberapa langkah strategis: pertama, memperkuat program pelatihan vokasi dan kewirausahaan berbasis kebutuhan industri lokal; kedua, mempercepat sertifikasi guru dan rehabilitasi sarana pendidikan; ketiga, memperluas cakupan imunisasi dan layanan kesehatan ibu-anak secara sistemik; keempat, mempermudah penerbitan dokumen sipil melalui sistem digital terintegrasi; kelima, meningkatkan kapasitas sarana dan personel Linmas serta pemadam kebakaran; keenam, membangun sistem cadangan pangan daerah melalui gudang pangan desa dan program distribusi bahan pokok; ketujuh, memperluas program KB, edukasi keluarga, dan intervensi terhadap unmet need. Terakhir, penajaman perencanaan berbasis data serta alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran dan berbasis hasil (result-based budgeting) menjadi kunci untuk memperluas keberhasilan pembangunan secara merata di seluruh sektor layanan publik dan wilayah administratif.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2024	
			Target	Capaian TW IV
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB	%	4,20-4,60	4.22
2	PDRB per kapita	ADHB	57.022.174	67,690,000
		ADHK	36.577.484	N/A
3	Indeks Gini	indeks	0,233	0,214
4	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	92,16	92,63
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	76,2	77,49
6	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9,99	10,12
7	Angka harapan hidup	Tahun	72,15	72.44
8	Persentase balita gizi buruk	%	2	0,01
9	Prevalensi balita gizi kurang	%	2	2,98
10	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	50,2	36
11	Angka partisipasi angkatan kerja	%	83,95	84.13
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	83,95	84.13
13	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,45	2.40
14	Rasio penduduk yang bekerja	%	98,32	97.6
15	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	0,06	0,06
16	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	83,95	97.6
17	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	25.6	47.69
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	89	84.78
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	7,99	7.31
20	Opini BPK	opini	WTP	WTP
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	90,5	92
22	Penguatan Cadangan Pangan	ton	100	14,15
23	Penanganan daerah rawan pangan	persen	0,06	0
24	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	%	51	51
25	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100
26	Produksi sektor pertanian	Ton	13.559.204	15,224,150
27	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	5,72	5,72
28	Produksi sektor perkebunan	Ton	1.525.783	23.050
29	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100
30	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	15,45	1.41
31	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	11,18	11.36
32	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	persen	3,82	3.82
33	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	persen	35,61	29.27
34	Pertumbuhan Industri	persen	3,92	3,92
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	ribu	1.680.507	N/A
2	Nilai tukar petani	N/A	N/A	N/A

RKPD 2026					
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2024		
			Target	Capaian TW IV	
3	Persentase pengeluaran konsumsi nonpangan perkapita	%	38,4	N/A	
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	persen	29,66	N/A	
5	Rasio ketergantungan	rasio	47,57	45.03	
6	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	izin	1200	2353	
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Layanan Urusan Wajib Dasar					
1 Pendidikan					
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	25	25	
1.2.	Angka Partisipasi Kasar				
1.2.1.	Angka partisipasi kasar SD	%	104	101,85	
1.2.2.	Angka partisipasi kasar SMP	%	97	108,52	
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan				
1.3.1	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	%	18	18	
1.3.2	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	%	18	18	
1.4.	Angka Partisipasi Murni				
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	94,85	
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	91,98	85,7	
1.5.	Angka partisipasi sekolah	%			
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	97,8	99,34	
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	93,5	99,54	
1.6.	Angka Putus Sekolah:				
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,01	0,02	
1.7.	Angka Kelulusan:				
1.7.1.	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	%	100	100	
1.7.2.	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	%	100	100	
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):				
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	95,5	85	
1.9.	Fasilitas Pendidikan:				
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	98	60.80	
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	85	75.64	
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	52,04	52.00	
1.11.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	675	650.00	
1.12.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	17	17.00	
1.13.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	98	100.00	
1.14.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	100	99.83	
1.15.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,75		
1.16.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100	50	
2 Kesehatan					
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Rasio	6,5	4.00	

		RKPD 2026		
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2024	
			Target	Capaian TW IV
2.2.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Rasio	9	4.70
2.3.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Rasio	5	3.40
2.4.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Rasio	86	75.90
2.5.	Rasio posyandu per 1000 balita	Rasio	9,3	9.30
2.6.	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk	Rasio	0,04	0.04
2.7.	Rasio Poliklinik per 1.000 penduduk	Rasio	0,11	0.00
2.8.	Rasio Pustu per 1.000 Penduduk	Rasio	0,5	0.50
2.9.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	Rasio	0,01	0.01
2.10.	Rasio Dokter Umum per 1000 penduduk	Rasio	0,27	0.29
2.11.	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	Rasio	13,05	8.68
2.12.	Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk	Rasio	0,08	0.09
2.13.	Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk	Rasio	0,5	0.47
2.14.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	75.48
2.15.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	67.60
2.16.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	96	96.00
2.17.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	92.60
2.18.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	90	tidak ada kasus
2.19.	NonPolio AFP rate per 100.000 penduduk	rasio	2	tidak ada kasus
2.20.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	10	70.90
2.21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	75	273.00
2.22.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	190	6.00
2.23.	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	4	70.90
2.24.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	75	93.87
2.25.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90	100.00
2.26.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100.00
2.27.	Cakupan penderita diare yang ditangani	%	78	0.06
2.28.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,5	73.90
2.29.	Cakupan kunjungan bayi	%	100	92.60
2.30.	Cakupan puskesmas	%	117,65	111.80
2.31.	Cakupan pembantu puskesmas	%	80,3	78.80
2.32.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100	77.70
2.33.	Cakupan pelayanan nifas	%	100	69.30
2.34.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	40	9.49
2.35.	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	55.60
2.36.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	86.00
2.37.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	92.36

RKPD 2026				
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2024	
			Target	Capaian TW IV
2.38.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	80	80.00
2.39.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100.00
2.40.	Persentase balita stunting	%	25	8.70
2.41.	Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar	%	100	79.10
2.42.	Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar	%	100	67.30
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	69.10
2.44.	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar	%	100	55.60
2.45.	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	%	100	92.36
2.46.	Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	41.52
2.47.	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	100	87.36
2.48.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	35.03
2.49.	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	61.00
2.50.	Persentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	51.38
2.51.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	99.90
2.52.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	53.08
2.53.	Cakupan Vaksinasi Covid-19	%	80	0
2.54.	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	%	90	94.50
2.55.	Persentase Posyandu aktif	%	100	96.51
2.56.	Persentase sarana Puskesmas sesuai standar	%	84,21	78.95
2.57.	Persentase Puskesmas dengan kelengkapan alat kesehatan sesuai standar	%	68,42	68.42
2.58.	Persentase sarana puskesmas pembantu sesuai standar	%	73,81	73.58
2.59.	Cakupan masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	76,25	96.03
2.60.	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	100	100.00
2.61.	Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100.00
2.62.	Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas	%	93	95.00
2.63.	Persentase Puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	79	78.95
2.64.	Persentase Sarana Rumah Sakit sesuai standar	%	90	90.00
2.65.	Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar	%	95	73.58
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1.	Pekerjaan Umum:			

		RKPD 2026		
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2024	
			Target	Capaian TW IV
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	66	63.90
3.1.2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	74,68	74.68
3.1.3.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	63	63.69
3.1.4.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	51,11	55.21
3.1.5.	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	68,706	68.71
3.1.6.	Persentase penanganan sampah	%	77	84.00
3.2.	Penataan Ruang:			
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	27	25.00
3.2.2.	Ketaatan terhadap RTRW	%	77	73.00
3.2.3.	Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi	Orang	50	0.00
3.2.4.	Gedung Pemerintahan yang layak dan baik	%	66	61.50
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
4.1.	Rasio rumah layak huni	%	100	98.91
4.2.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	%	64,52	46.79
4.3.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	98,7	98.70
4.4.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100.00
4.5.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni	%	100	100
4.6.	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	lokasi	2	0
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,521	64.76
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	2,48	80.00
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	0,51	41.18
5.4.	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	1,8	91.43
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	74,38	81.82
5.2.	Bencana			
5.2.1.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	13.514	11,816.00
5.2.2.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	9.219	5,666.00
5.2.3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	19.956	23,713.00
	Indeks Kapasitas Daerah	indeks	0,54	11,816.00
6	Sosial			
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	58	58,00
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	58	58,00

		RKPD 2026		
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2024	
			Target	Capaian TW IV
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	63,72	57,69
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	24	0,00
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	0,00
6.6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	0,00
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100,00
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	0,00
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	18,74	0,00
6.10.	Persentase keakuratan data program perlindungan jaminan sosial	%	78,13	58,59
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja			
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0	0
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	2
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	68	71
1.4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	94	87,69
1.5.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0
1.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	60	0
1.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	50	11
1.8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	20	5.56
1.9.	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	15	13,31
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3,76	3.60
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	30	30.00
2.3.	Rasio KDRT	%	0,01	0.01
2.4.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	0	0.00
2.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	98,67	
2.6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100.00
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu	%	100	100

		RKPD 2026		
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2024	
			Target	Capaian TW IV
	tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit			
2.8.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	75	100
2.9.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	80	100
2.10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	50	100
2.11.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100
2.12.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100
2.13.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	70	100
3 Pangan				
3.1.	Ketersediaan pangan utama	Persen	44,04	100
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/kap/hari	Energi : 2.400	2430
		gr/hari	Protein =63	68
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (PSAT)	%	100	100
4 Pertanahan				
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	Ha	1,3	0.00
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	kasus	1	1.00
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	lokasi	2	2.00
5 Lingkungan Hidup				
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada		0
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	ada	ada	Tidak Ada
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada	ada	1
5.4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	indeks	54,01	60.91
5.5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	indeks	87,01	93.37
5.6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	58,48	52.47
5.7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	104
5.8.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	orang	8	0
5.9.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	kali	13	13
5.10.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada
5.11.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100
5.12.	Timbulan sampah yang ditangani	%	84	78.03

		RKPD 2026		
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2024	
			Target	Capaian TW IV
5.13.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	ton	70	78
5.14.	Persentase cakupan area pelayanan	%	35	41
5.15.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	84	78.03
5.16.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	nilai	75	0
5.17.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	n/a	n/a	0
5.18.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	0
5.19.	Jumlah rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3	jumlah izin	10	3
6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	100	99.99
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	100	99.15
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	100	60.03
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	sudah
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100	99.51
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	80	62.18
6.8.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	60	60.00
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	73,9	70
7.2.	Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	0,15	0,15
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan pkk	%	100	100
7.4.	Persentase LPM Berprestasi	%	0,2	0,2
7.5.	Persentase PKK Aktif	%	100	100
7.6.	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100
7.7.	Persentase LSM aktif	%	80	80
8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		1,05	0,82
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)		2,21	2,35
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	51,95	81,82
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		63	63,64
8.5.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kelompok	7	7
8.6.	Rata-rata jumlah anak per keluarga		3	2,35
8.7.	Ratio Akseptor KB	%	69,09	53,04
8.8.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	66,36	46,7
8.9.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	17,23	22,9
8.10.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	44,2	41,86
8.11.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	46,67	53,04

			RKPD 2026	
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2024	
			Target	Capaian TW IV
8.12.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	orang	800	800
8.13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	orang	700	580
8.14.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	orang	552	458
8.15.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	orang	538	461
8.16.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	33
8.17.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	orang	150	150
8.18.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	269
8.19.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100
8.20.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	80	80
8.21.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	orang	2.098	1816
8.22.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	orang	950	690
9 Perhubungan				
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	5.458.610	4,095,356
9.2.	Rasio ijin trayek	%	36,855	0.036855
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum dan barang	unit	5.346	945.00
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	buah	4	4.00
9.5.	Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten)	%	95	100.00
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	70	13.00
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	4	4.00
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,0366	366.00
9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	5.458.610	4,095,356
9.10.	Rasio konektivitas kabupaten	%	95	97.00
9.11.	Kinerja lalu lintas kabupaten	rasio	0,77	0.32
10 Komunikasi dan Informatika				
10.1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	86,99	85.50
10.2.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	78	60.64
10.3.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	78	48.49
10.4.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	17	15.78
10.5.	Indeks SPBE	indeks	2,7	3,04
11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah				
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	64,51	51,00

		RKPD 2026		
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2024	
			Target	Capaian TW IV
11.2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	93	93
11.3.	Persentase BPR/LKM aktif	n/a	n/a	Tidak ada data
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99	95
12 Penanaman Modal				
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	84	96
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. (dalam triliun)	6,51	7,16
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	persen	78,2	75,3
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	2,19	18,52
13 Kepemudaan dan Olah Raga				
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	47	33,3
13.2.	Persentase wirausaha muda	%	15,5	47
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	%	69	56
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	55	N/A
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	13	7
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	atlet	450	238
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	18	12
14 Statistik				
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	ada	Tidak
14.2.	Buku "Kabupaten Karo Dalam Angka"	ada/tidak	ada	Ada
14.3.	Buku "PDRB"	ada/tidak	ada	Tidak
15 Persandian				
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	10	25
16 Kebudayaan				
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	11	15
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	20	11
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	26	27
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	-	0
17 Perpustakaan				
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	11	n/a
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	rasio	0,23	299
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	rasio	1,118	0,16
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	orang	47000	128.208
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buku	9200	10.892
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	1,318	0,61
18 Kearsipan				
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	83,3	78,8
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	3	1
Layanan Urusan Pilihan				
1 Pariwisata				
1.1.	Kunjungan wisata	Orang	1.101.000	1.434.797
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	1.5	2,5
1.3.	PAD sektor pariwisata	Persentase	50	81,44

		RKPD 2026		
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2024	
			Target	Capaian TW IV
2	Pertanian			
2.1.	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB (%)	%	51	51
2.2.	Kontribusi sektor perkebunan Tahunan terhadap PDRB (%)	%	5,72	5,72
2.3.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100
2.4.	Produktivitas padi per hektar	Kw/Ha	56,39	60,61
2.5.	Produktivitas palawija per hektar	Kw/Ha	72,08	68,45
2.6.	Cakupan bina kelompok petani	%	7,1	12.25
2.7.	Produksi sektor pertanian	Ton	13.559.204	15,224,150
2.8.	Produksi sektor perkebunan	Ton	1.525.783	2,357,580
4	Energi dan Sumber Daya Mineral			
4,4	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi	pengusaha	50	1
5	Perdagangan			
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	miliar	80	682.67
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		75	13
6	Perindustrian			
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	33,33	33.33
8	Kelautan dan Perikanan			
8.1.	Produksi perikanan	%	85	172,82
8.2.	Konsumsi ikan	%	96,8	97.97
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	100	100
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	72,23	145.00
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	72,23	145.00
8.6.	Cakupan bina kelompok Pembudidaya Ikan	%	22	100.00
Penunjang Urusan				
1	Perencanaan Pembangunan			
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada
1.4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100
2	Keuangan			
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	-	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA	%	10,741	2.43
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	10,741	2.43
2.4.	Persentase program yang tidak terlaksana	%	0	0
2.5.	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0
2.6.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	30,99
2.7.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	18,74
2.9.	Proporsi Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah	%	66,74	66,71
2.10.	Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah	%	13,44	14,71
2.11.	Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap total Belanja Daerah	%	44,98	42,12

			RKPD 2026	
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2024	
			Target	Capaian TW IV
2.12.	Proporsi Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Daerah	%	0,14	0,19
2.13.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,37	0,65
2.14.	Penetapan APBD	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			
3.1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	11	1.10
3.2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	8,36	0.42
3.3.	Persentase keterisian jabatan	%	100	90,6
3.4.	Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur	ASN	17	11
4	Penelitian dan Pengembangan			
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100
	Penerapan SIDA:			
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100
5	Pengawasan			
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	90	83,42
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0
6	Sekretariat Dewan			
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA/TIDAK	ADA	ADA
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA/TIDAK	ADA	ADA
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA/TIDAK	ADA	ADA

2.2.4. Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Keuangan

Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Karo Triwulan IV Tahun 2024 adalah untuk memastikan dan menilai capaian target kinerja program, kegiatan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Karo dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah sampai dengan periode pelaksanaan Tahun Anggaran 2024.

Realisasi capaian program, kegiatan dan keuangan masing- masing perangkat daerah di Kabupaten Karo tercantum di Lampiran I Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Karo Triwulan IV Tahun 2024.

Tabel 2.70
Rekapitulasi Capaian Program, Kegiatan dan Keuangan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2022+2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN	150.568.382.597.406	716.304.210.004	484.403.012.710	466.936.389.029	96,39
2	DINAS KESEHATAN	871.399.588.986		172.498.369.625	157.845.726.303	91,5
3	RSUD KABUPATEN KARO	57.003.093.329	111.233.492.312	49.554.756.812	49.126.446.061	99,14
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	389.790.037.244.775	250.215.947.862	167.279.026.631	158.222.157.122	94,59
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTAHANAN	8.806.796.306	29.059.042.628	8.692.882.859	7.414.542.131	85,29
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	66.475.968.372	32.209.837.639	14.021.063.609	13.841.386.484	98,72
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	31.001.926.000	30.767.420.793	9.119.234.448	8.417.516.794	92,31
8	DINAS SOSIAL	22.472.685.700	18.657.358.709	4.344.240.412	4.234.505.278	97,47
9	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	23.663.603.548	9.911.609.941	4.694.946.514	4.543.895.992	96,78
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.900.595.241	9.519.289.737	10.726.272.420	8.170.951.824	76,18

RKPD 2026

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2022+2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	43.189.099.240	16.607.678.783	7.374.879.093	6.986.069.305	94,73
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	147.813.509.970	48.199.440.453	25.832.838.738	24.963.361.803	96,63
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	32.781.205.637	9.690.416.094	4.806.082.490	4.354.665.699	90,61
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52.991.859.877	8.466.119.957	8.625.590.311	8.183.320.087	94,87
15	DINAS PERHUBUNGAN	43.676.656.177	39.226.389.405	22.790.982.587	21.646.328.213	94,98
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	41.259.575.570	15.606.876.143	7.479.292.902	7.200.711.075	96,28
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	37.658.588.677	11.237.829.981	5.381.741.373	5.120.773.196	95,15
18	DINAS KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	39.712.843.711	51.623.646.553	14.227.665.259	13.643.983.137	95,90
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		5.837.769.256	5.829.535.881	5.555.548.716	95,30
20	DINAS PERTANIAN	129.633.170.927	64.491.856.972	25.454.876.990	23.776.698.180	93,41
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	80.682.975.036	32.379.683.439	13.866.662.700	10.689.456.758	77,09
22	SEKRETARIAT DAERAH	141.345.459.910	60.210.768.258	29.751.884.650	28.347.817.491	95,28
23	SEKRETARIAT DPRD	131.768.766.911	77.668.151.404	50.439.001.905	47.373.524.376	93,92
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	38.967.485.345	16.553.332.960	9.294.747.784	8.956.809.407	96,36
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14.546.786.480.359	577.585.333.242	304.864.044.867	300.631.397.308	98,61
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	30.887.431.681	21.037.325.775	10.615.365.801	7.654.000.042	72,10
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA	38.330.374.725	6.860.605.931	6.483.154.213	6.298.211.420	97,15
28	INSPEKTORAT DAERAH	35.788.719.371	17.195.924.844	8.953.041.559	8.622.485.374	96,31
29	KECAMATAN BARUSJAHE	14.546.503.145	5.390.120.640	2.754.168.321	2.697.145.413	97,93

RKPD 2026

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2022+2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)
30	KECAMATAN BERASTAGI	6.010.095.422.556	12.681.406.739	8.904.274.503	8.112.756.518	91,11
31	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	10.242.009.625	3.909.636.412	2.111.917.382	2.042.698.154	96,72
32	KECAMATAN JUHAR	19.087.580.196	1.238.973.843	2.962.891.866	2.835.353.730	95,70
33	KECAMATAN KABANJAHE	75.689.066.445	18.260.691.276	10.862.331.553	10.517.800.504	96,83
34	KECAMATAN KUTABULUH	17.024.701.440	5.608.112.680	2.373.795.220	2.249.532.171	94,77
35	KECAMATAN LAUBALENG	12.511.770.125	4.366.199.798	2.283.849.829	2.094.593.914	91,71
36	KECAMATAN MARDINDING	12.160.122.614	4.393.207.622	2.076.591.405	1.944.266.464	93,63
37	KECAMATAN MERDEKA	15.870.273.059	3.661.879.126	2.401.492.586	2.322.928.466	96,73
38	KECAMATAN MEREK	14.723.550.075	4.707.617.940	2.929.861.853	2.347.139.008	80,11
39	KECAMATAN MUNTE	17.927.437.993	4.438.643.362	2.296.325.700	2.204.664.192	96,008
40	KECAMATAN NAMANTERAN	17.927.437.993	4.438.643.362	2.521.242.761	2.341.027.807	92,85
41	KECAMATAN PAYUNG	10.653.337.788	3.651.380.460	2.177.302.073	2.043.675.436	93,86
42	KEC. SIMPANG EMPAT	23.137.301.689	5.568.152.192	3.171.609.557	3.027.363.297	95,45
43	KECAMATAN TIGA PANAHAH	18.290.326.555	6.210.391.357	3.015.658.972	2.902.005.557	96,23
44	KECAMATAN TIGA BINANGA	31.984.962.415	6.225.076.839	3.588.088.305	3.459.069.562	96,40
45	KECAMATAN TIGANDERKET	14.928.347.955	8.038.804.584	2.704.641.911	2.585.989.653	95,61
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	53.406.345.930	27.206.181.021	41.849.615.320	41.464.934.392	99,08
	RATA-RATA CAPAIAN			1.588.390.854.030	1.515.951.622.843	95,44

Pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Karo selama tahun 2024 menunjukkan kinerja yang secara umum cukup baik dan mendekati target perencanaan. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran perangkat daerah mencapai 95,44 persen. Capaian ini mencerminkan tingkat efektivitas yang relatif tinggi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Sejumlah perangkat daerah berhasil merealisasikan kinerja dan anggarannya di atas 98 persen, menunjukkan pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran. Di antaranya adalah RSUD Kabupaten Karo (99,14%), Satpol PP (98,72%), Badan Keuangan dan Aset Daerah (98,61%), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (99,08%). Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa perangkat-perangkat tersebut memiliki perencanaan yang baik, pelaksanaan yang optimal, serta pengawasan internal yang efektif.

Namun demikian, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang capaian kinerjanya belum optimal dan berada di bawah 85 persen, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (76,18%), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (77,09%), dan Badan Pendapatan Daerah (72,10%). Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena dapat berdampak pada keberlanjutan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah. Rendahnya capaian tersebut dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain kendala teknis di lapangan, keterlambatan pelaksanaan, kurangnya koordinasi lintas sektor, atau kapasitas kelembagaan yang masih perlu diperkuat.

Jika ditinjau dari hubungan antara alokasi anggaran dan capaian kinerja, tampak bahwa besarnya anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat capaian. Beberapa perangkat daerah dengan anggaran besar belum tentu menunjukkan kinerja terbaik. Secara keseluruhan, data capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan daerah telah berjalan cukup konsisten dengan perencanaan strategis dan tahunan, namun tetap memerlukan perbaikan di sektor-sektor tertentu. Pemerintah Kabupaten Karo diharapkan terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas perangkat daerah, khususnya yang memiliki tingkat capaian rendah.

Di samping itu, Perangkat Daerah yang menunjukkan capaian tinggi dapat dijadikan *role model* dalam hal manajemen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan..

2.3. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan didapatkan dari hasil analisis gambaran umum daerah dengan memperhatikan aspek pembangunan secara menyeluruh meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan periode perencanaan sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang telah diamanatkan. Untuk memudahkan pengelompokan permasalahan dan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan maka penyajian permasalahan pembangunan diurutkan berdasarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah yang menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah merupakan suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.1.1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat belum mencapai standar optimal

Permasalahan SDM dan dan kesejahteraan masyarakat dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kesehatan yang belum merata dan inklusif, pendidikan yang belum berkualitas, merata dan inklusif serta kesejahteraan masyarakat yang belum terlindungi seutuhnya. Penyelesaian permasalahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, resilien, unggul, dan berdaya saing. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada masing-

masing bidang pembangunan. Permasalahan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat belum mencapai standar optimal meliputi 1) Pelayanan kesehatan yang belum merata dan inklusif, 2) Pendidikan yang belum berkualitas, merata dan inklusif, 3) Kesejahteraan masyarakat yang belum terlindungi seutuhnya dan inklusif.

2.3.1.2. Kinerja produktivitas ekonomi belum optimal

Rendahnya produktivitas tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam memperluas kelas pendapatan menengah, karena sebagian besar angkatan kerja berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor bernilai tambah rendah. Hal tersebut terjadi juga di sektor pertanian, bahkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah pada sektor pertanian relatif tinggi. Selain itu, sektor pertanian masih memiliki tantangan untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi. Lambatnya regenerasi petani serta degradasi kualitas lahan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dihadapkan pada pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang belum berkualitas karena SDM, dukungan fasilitas, serta sarana dan prasarana yang terbatas. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan sektor ekonomi, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dorongan terhadap inovasi dan investasi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Permasalahan produktivitas ekonomi belum optimal meliputi 1) IPTEK, inovasi dan produktivitas ekonomi yang belum optimal, 2) Penerapan ekonomi hijau yang belum optimal, 3) Transformasi digital yang belum berjalan, 4) Ekonomi domestik dan global yang belum terintegrasi, 5) Kawasan perdesaan dan perkotaan belum optimal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

2.3.1.3. Sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum secara optimal

Sistem tata kelola pemerintahan merupakan konsep penting dalam pembangunan sebagai elemen krusial dalam menentukan strategi pembangunan daerah. Ruang lingkup tata kelola pemerintahan meliputi wilayah politik, administrasi, dan hukum. Tata kelola tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, namun juga terkait dengan bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi. Transformasi tata kelola diperlukan untuk merespon munculnya kecenderungan besar (*global megatrends*) dan adanya perubahan lingkungan strategis di level global maupun nasional, terutama terkait dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, transformasi tata kelola menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dan sektoral.

Tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang berintegrasi, adaptif, efektif dan efisien terkait belum maksimalnya kinerja birokrasi, politik dan hukum. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dilakukan melalui reformasi birokrasi yaitu upaya untuk mengubah system

penyelenggaraan pemerintah agar lebih efektif dan efisien. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Karo sudah mencapai kategori B dengan nilai 68,51, tetapi masih ada beberapa faktor yang belum maksimal pelaksanaannya.

Adapun tantangan tata kelola dari sisi pengawasan yaitu Maturitas SPIP masih level 2, karena belum adanya pelaksanaan komitmen dengan baik dari seluruh jajaran organisasi mulai dari pimpinan sampai pegawai, hal ini dikarenakan kinerja perangkat daerah belum berorientasi outcome, belum memenuhi kriteria SMART dan belum mendukung target yang tepat. Begitu juga Kapabilitas APIP masih Level 3 karena belum sepenuhnya Perangkat Daerah telah menjadi mitra strategis dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah.

Permasalahan terkait peningkatan kualitas ASN tergambar melalui Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Karo yang masih kategori sedang (75,69), hal ini disebabkan antara lain terkait kualifikasi ASN masih diposisi rata-rata sesuai persyaratan jabatan, untuk kompetensi belum semua pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan kompetensi minimal 20 JP per Tahun. Selanjutnya masalah persentase belanja pegawai melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakibatkan oleh Persentase Perangkat Daerah belum tepat fungsi dan tepat ukuran, Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi jabatan (*The Right Man on The Right Place*).

Permasalahan lainnya terkait Penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah antara lain digambarkan dengan skor evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Karo masih berada pada kategori sedang, batas wilayah antar Kecamatan dan antar kelurahan/desa belum dilakukan penegasan batas antar wilayah.

Kabupaten Karo mengalami tantangan dalam upaya peningkatan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), yang saat ini menduduki kategori predikat 'baik' dengan nilai 5,48. Tetapi masih perlu dioptimalkan untuk peningkatan infrastruktur, di mana alokasi anggaran saat ini lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari ketimbang untuk investasi berkelanjutan yang dapat membawa manfaat jangka panjang. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk lebih fokus pada pengembangan infrastruktur teknologi yang modern dan efisien, yang akan mendukung penggunaan teknologi yang lebih up-to-date dan efektif.

Selanjutnya, peningkatan kompetensi SDM juga menjadi prioritas utama, mengingat terdapat kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pegawai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Program pelatihan yang ada saat ini perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan kondisi operasional yang dinamis, memastikan bahwa pegawai terus termotivasi dan dapat mempertahankan kestabilan kerja yang efektif. Ini menunjukkan pentingnya investasi berkelanjutan dalam pengembangan SDM yang tidak hanya teknis, tapi juga motivasional.

Koordinasi antar pemangku kepentingan juga perlu ditingkatkan. Saat ini, terdapat kebutuhan untuk memperkuat platform komunikasi yang akan memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antar departemen dan

dengan penyedia layanan. Ini akan membantu mengeliminasi redundansi dan memperjelas proses pembuatan kebijakan, mengindikasikan sebuah peluang untuk memperbaiki alur kerja dan efisiensi operasional yang berkesinambungan.

Berdasarkan hasil analisis Pareto dan diagram scatter, menjadi jelas bahwa infrastruktur merupakan area kunci yang memerlukan perhatian dan investasi lebih lanjut untuk menghasilkan peningkatan paling signifikan dalam kinerja dan kepuasan layanan. Investasi ini tidak hanya akan memperbaiki kondisi fisik layanan tetapi juga akan memfasilitasi peningkatan dalam pengelolaan SDM dan efektivitas koordinasi. Keputusan berbasis data ini dapat membantu Kabupaten Karo mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, menargetkan area-area yang paling mempengaruhi kinerja mereka dalam SPBE, dan mengarahkan strategi pembangunan mereka untuk masa depan.

2.3.1.4. Stabilitas, ketenteraman, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, dan pemenuhan HAM belum mencapai kondisi yang ideal

Dalam rangka menjamin stabilitas, ketenteraman, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, dan pemenuhan HAM melalui pemerintahan yang efektif dan responsif maka arah kebijakan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis. Dalam bidang hukum, kelembagaan dan praktik penegakan hukum belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM, rendahnya kepatutan hukum masyarakat karena minimnya literasi dan pemberdayaan, serta akses terhadap keadilan yang terbatas.

Tantangan dalam mencapai kondisi ideal terkait stabilitas, ketenteraman, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Beberapa permasalahan yang mungkin terjadi di bidang-bidang ini termasuk ketidakstabilan politik, konflik internal, atau perbedaan ideologi dapat mengganggu stabilitas, krisis ekonomi atau ketidakadilan ekonomi dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Tingkat kejahatan yang tinggi atau kekerasan dapat mengancam ketenteraman masyarakat. Kelemahan dalam penegakan hukum atau korupsi dapat merusak ketertiban umum. Kurangnya pendidikan tentang kebangsaan dan identitas nasional dapat menyebabkan kurangnya rasa kebangsaan dan solidaritas. Terkait pemenuhan HAM tergambar dari belum optimalnya pelayanan terhadap disabilitas, dan masih terjadinya pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak (terjadinya pelecehan seksual, KDRT dan perdagangan anak).

Masih rendahnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Karo tergambar dari masih tingginya tingkat pelanggaran K3 (ketenteraman, ketertiban dan keindahan). Selanjutnya, pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tertangani juga masih rendah, dimana berdasarkan data dari Satpol PP Kabupaten Karo pada tahun 2023 sebesar 73.97 dan tahun 2024 sebesar 80%. Salah satu penyebabnya adalah karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo yang saat ini hanya berjumlah 5 orang. Kurangnya pemahaman masyarakat dan badan hukum

terhadap pentingnya ketaatan terhadap Perda dan Perkada juga masih rendah sehingga stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Karo juga masih rendah.

Peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman, ketertiban umum sangat dibutuhkan. Peran serta masyarakat pada tingkat Desa dan Kelurahan pada tahun 2022 sebesar 12,45% dan tahun 2023 sebesar 63,49 persen, hal ini disebabkan karena masih kurangnya tingkat kesadaran dan jiwa sukarelawan masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum lingkungannya.

Permasalahan lainnya dalam hal layanan proteksi ancaman bencana kebakaran yaitu masih rendahnya persentase luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) layanan proteksi ancaman bencana kebakaran masih mencapai 41,17%, hal ini disebabkan Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran belum merata di semua wilayah kecamatan dan di wilayah rentan kebakaran, sehingga jangkauan layanan bencana kebakaran belum maksimal dan masih banyaknya lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK (*unprotected area*) masih dibentuk di 10 Kecamatan.

Kabupaten Karo merupakan wilayah baru yang menjadi basis perhitungan IHK 2024. Secara historis data inflasi Kabupaten Karo baru tersaji mulai awal tahun 2024. Pada April 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Karo sebesar 4,78 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,58. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, Pada Mei 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Karo sebesar 5,37 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,05. Inflasi y-on-y, Pada Juni 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Karo sebesar 3,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,50.

Selama triwulan II sebagian besar harga-harga komoditas bahan pokok stabil. Harga komoditas yang sedikit mengalami kenaikan adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, daging sapi, daging ayam ras, telur, gula, minyak goreng, ikan kembung dan tepung terigu kenaikan harga dikarenakan hari besar keagamaan nasional. Untuk harga komoditas yang lain terjadi kenaikan dan penurunan tapi tidak begitu signifikan.

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di kabupaten karo antara lain in-efisiensi struktur pasar komoditas pangan, produksi pangan yang tidak merata, rantai pasok tidak efisien, petani tidak memiliki daya tawar dan akses terhadap pasar, akses distribusi yaitu infrastruktur pendukung yang masih terbatas, pembangunan infrastruktur masih terkendala, kesenjangan informasi kurangnya akses informasi terkait pangan dan masih belum meratanya akses informasi dan infrastruktur di daerah, kapasitas produksi terbatas, teknologi produksi terbatas, manajemen pola tanam belum terkelola.

2.3.1.5. Ketahanan sosial, budaya, ekologi dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal

Dalam proses pembangunan diperlukan keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Seiring dengan meningkatnya populasi, penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya alam akan menjadi tantangan kedepan. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah mengurangi fungsi lingkungan hutan. Isu pengelolaan sampah juga perlu diwaspadai, mengingat daya tampung tempat pemrosesan akhir (TPA) diprediksi akan penuh di masa yang akan datang.

Dampak perubahan iklim berpotensi meningkatkan kerugian ekonomi, kerentanan masyarakat, dan intensitas bencana lingkungan, terutama di sektor air, laut dan pesisir, pertanian, serta kesehatan. Ancaman kelangkaan air muncul dari rendahnya efisiensi pengelolaan dan daya rusak sumber daya air. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang buruk juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit menular dan masalah pertumbuhan anak.

Permasalahan Ketahanan sosial, budaya, ekologi dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal meliputi 1) Pelestarian kebudayaan yang belum optimal, 2) Kualitas keluarga yang belum optimal, ketidaksetaraan gender dan masyarakat yang belum inklusif, 3) Degradasi lingkungan hidup, 4) Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan yang belum optimal dan 5) Rendahnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

2.3.1.6. Pembangunan kewilayahan yang belum merata dan berkeadilan

Kabupaten Karo menghadapi tantangan dalam mengkoordinasikan pembangunan di 269 desa dan kelurahan. Koordinasi yang efektif memerlukan sistem manajemen yang memadai dan koordinasi yang jelas antara berbagai tingkat pemerintahan dan sektor. Pentingnya struktur manajemen yang terorganisir dan komunikasi yang efektif dalam memastikan pembangunan yang merata menjadi perhatian. Desa-desa dan kelurahan yang belum mendapatkan perhatian yang cukup dapat tertinggal dalam hal infrastruktur dasar dan layanan publik.

Meningkatkan perekonomian di setiap wilayah merupakan tantangan karena ketidakmerataan kesempatan ekonomi. Beberapa wilayah mengalami keterbatasan akses ke sumber daya ekonomi dan investasi. Hal ini dipengaruhi oleh ketergantungan antara wilayah pusat dan perifer, di mana sumber daya lebih terkonsentrasi di wilayah pusat seperti Kabanjahe

dan Berastagi. Sumber daya ekonomi, peluang usaha, dan investasi cenderung terkonsentrasi di wilayah pusat, menyebabkan wilayah perifer memiliki sedikit kesempatan untuk berkembang. Akibatnya, terjadi kesenjangan ekonomi antara wilayah yang memiliki akses lebih baik dengan wilayah yang kurang terfasilitasi.

Kesenjangan antar wilayah, terutama antara wilayah yang jauh dari pusat kota seperti Kabanjahe dan Berastagi, menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan. Kebijakan pembangunan yang perlu lebih adil dan inklusif adalah kunci untuk mengatasi ketimpangan ini. Wilayah perkotaan sering kali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sementara daerah pinggiran memerlukan perhatian lebih. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di kota-kota besar mengakibatkan wilayah yang jauh dari pusat kota memerlukan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan adil. Sehubungan dengan kesenjangan tersebut, peningkatan kualitas jalan, peningkatan system drainase dan juga fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan seperti lampu penerangan jalan harus ditingkatkan ke daerahdaerah yang tertinggal.

Ketersediaan infrastruktur yang tidak merata merupakan faktor yang memerlukan perhatian untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Alokasi anggaran yang proporsional dan prioritas pembangunan yang merata dapat membantu mengatasi ketidakmerataan ini. Infrastruktur yang belum memadai di beberapa wilayah memerlukan peningkatan agar akses terhadap layanan dan fasilitas penting dapat terwujud. Jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik di seluruh daerah akan mengakselerasi perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur yang merata sangat penting untuk memastikan bahwa semua wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Wilayah perkotaan di Kabupaten Karo memiliki peluang ekonomi yang lebih baik dibandingkan wilayah pedesaan, terutama dalam hal ketersediaan lapangan kerja. Konsentrasi industri dan bisnis di wilayah perkotaan serta perlunya pengembangan sektor ekonomi di wilayah pedesaan menjadi perhatian untuk mengatasi ketidakmerataan ini. Kebijakan ekonomi yang lebih merata dapat menguntungkan seluruh wilayah, mencegah migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, dan memastikan bahwa wilayah pedesaan juga berkembang dengan baik. Pengembangan sektor ekonomi di wilayah pedesaan perlu ditingkatkan untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha yang lebih merata.

2.3.1.7. Pembangunan sarana dan prasarana yang belum optimal

Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Karo merupakan fondasi penting dalam mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan ini. Masih banyak daerah di Kabupaten Karo yang belum memiliki akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana penting seperti pendidikan, kesehatan, jalan, sanitasi, air minum, listrik, telekomunikasi, pengelolaan sampah, dan perumahan. Beberapa kebijakan pemerataan yang ada masih perlu ditingkatkan, dan anggaran serta sumber daya manusia yang ada masih memerlukan optimalisasi. Selain

itu, infrastruktur yang sudah ada kadang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Distribusi infrastruktur yang belum merata seringkali disebabkan oleh kebijakan yang memerlukan penyesuaian agar lebih mendukung daerah rural dan mengurangi fokus pembangunan yang terlalu terkonsentrasi di perkotaan. Kurangnya infrastruktur dasar di daerah terpencil juga memerlukan perencanaan yang lebih berbasis data yang akurat.

Anggaran yang tersedia memerlukan penyesuaian agar mencukupi untuk membangun dan merawat infrastruktur yang ada. Hal ini disebabkan oleh pendapatan daerah yang dapat lebih ditingkatkan, serta masih adanya ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran juga terus ditingkatkan untuk menghindari pemborosan dan penggunaan yang tidak optimal. Keterbatasan anggaran sering kali disebabkan oleh basis pajak lokal yang perlu diperkuat dan rendahnya partisipasi sektor swasta dalam investasi infrastruktur. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik adalah salah satu upaya penting yang sedang dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas alokasi anggaran bagi infrastruktur.

Proses memperoleh lahan untuk pembangunan juga memerlukan perhatian khusus, karena harga lahan yang tinggi dan adanya konflik lahan dengan masyarakat dapat menjadi tantangan. Komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat setempat sedang diupayakan untuk mengatasi konflik lahan. Proses administrasi yang rumit dan memerlukan transparansi lebih lanjut juga sedang disederhanakan untuk mempercepat akuisisi lahan bagi pembangunan infrastruktur.

Penerapan teknologi dan inovasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur terus diupayakan agar lebih optimal. Pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi baru sedang ditingkatkan melalui berbagai program pelatihan, dan upaya untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan serta biaya implementasi teknologi yang tinggi sedang diintensifkan. Investasi dalam teknologi modern diharapkan dapat mengurangi biaya pemeliharaan infrastruktur. Pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerapan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur juga mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Praktik pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan regulasi lingkungan yang ketat sedang diterapkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur terus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.

Lembaga yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur terus berupaya meningkatkan koordinasi antar lembaga, kompetensi sumber daya manusia, dan efisiensi struktur organisasi. Koordinasi yang lebih efektif antar lembaga sangat penting untuk keberhasilan proyek infrastruktur. Pelatihan dan pengembangan kapasitas institusional menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga yang bertanggung jawab atas infrastruktur.

2.3.1.8. Pembangunan yang berkesinambungan belum dilaksanakan secara optimal

Kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sarana dan prasarana yang memadai merupakan tulang punggung bagi pengoptimalan PAD. Di Kabupaten Karo, terbatasnya anggaran untuk pembangunan dan perawatan sarana prasarana, serta proses pengadaan yang masih memerlukan perbaikan, menjadi tantangan utama. Inefisiensi birokrasi juga turut memengaruhi kondisi ini. Akibatnya, infrastruktur yang seharusnya mendukung pengumpulan PAD tidak dapat berfungsi dengan optimal, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengelolaan PAD yang efektif memerlukan petugas yang kompeten dan terlatih. Namun, di Kabupaten Karo, terdapat kekurangan dalam hal pelatihan dan pengembangan SDM, rekrutmen yang perlu lebih disesuaikan dengan kebutuhan, serta motivasi dan insentif bagi petugas yang masih perlu ditingkatkan. Kualitas dan kuantitas petugas yang perlu ditingkatkan menyebabkan pengelolaan PAD belum maksimal.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak di Kabupaten Karo masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pajak, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta pengawasan dan penegakan hukum yang perlu diperkuat. Rendahnya kesadaran ini berdampak langsung pada rendahnya penerimaan PAD dari sektor pajak.

Penegakan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi di Kabupaten Karo masih perlu dioptimalkan. Tantangan seperti sanksi yang belum cukup tegas, koordinasi antar instansi terkait yang perlu ditingkatkan, serta sumber daya untuk penegakan hukum yang terbatas menjadi beberapa hambatan. Desentralisasi yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas di tingkat lokal dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam penegakan peraturan, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pajak dan retribusi.

Proses legislasi yang lambat, kurangnya pemahaman pembuat kebijakan terhadap kebutuhan daerah, serta regulasi yang perlu diperbarui menjadi kendala utama dalam pengelolaan pajak dan retribusi di Kabupaten Karo. Regulasi yang belum memadai menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi.

Kurangnya media komunikasi yang efektif, strategi sosialisasi yang perlu disesuaikan, serta dana untuk kampanye informasi yang terbatas menjadi faktor penghambat dalam penyebarluasan informasi tentang peraturan dan regulasi pajak serta retribusi daerah. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Kurangnya informasi membuat masyarakat tidak sepenuhnya memahami kewajiban pajak dan retribusi mereka, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan.

Komunikasi yang perlu ditingkatkan antara instansi, tidak adanya forum rutin untuk koordinasi, serta perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan menyebabkan koordinasi dalam pengelolaan PAD

di Kabupaten Karo menjadi kurang optimal. Koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Tanpa koordinasi yang baik, upaya pengelolaan PAD menjadi kurang efisien dan tidak terarah.

Birokrasi yang perlu ditingkatkan efisiensinya di Kabupaten Karo memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Struktur pemerintahan yang kompleks, perlunya sistem pengawasan yang lebih baik, serta peningkatan akuntabilitas di tingkat lokal menjadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Peningkatan efisiensi birokrasi akan membantu mengoptimalkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan PAD dan kemandirian daerah.

Manajemen keuangan daerah yang perlu ditingkatkan di Kabupaten Karo ditandai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan pengetahuan di bidang manajemen keuangan, pelatihan yang lebih intensif, serta pemahaman yang lebih baik tentang anggaran, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset. Peningkatan kapasitas dalam manajemen keuangan daerah akan mendukung otonomi dan efisiensi fiskal.

Desentralisasi yang belum sepenuhnya optimal di Kabupaten Karo menyebabkan ketergantungan yang berkelanjutan pada pemerintah pusat. Desentralisasi yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas di tingkat lokal menyebabkan inefisiensi dan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan sumber daya manusia dan finansial yang memadai di daerah akan memperbaiki kondisi ini.

Infrastruktur teknologi informasi yang perlu ditingkatkan di Kabupaten Karo menghambat efisiensi operasional dan pengelolaan data yang penting untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk mendukung pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang lebih baik. Peningkatan infrastruktur TIK akan mendukung banyak inisiatif untuk meningkatkan PAD dan kemandirian daerah.

Pengelolaan sumber daya alam yang perlu dioptimalkan di Kabupaten Karo disebabkan oleh perlunya aturan yang lebih jelas, pengawasan yang lebih baik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pengelolaan sumber daya alam yang baik memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan aturan yang jelas untuk memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dan optimal. Pengelolaan yang lebih baik akan berdampak positif pada penerimaan daerah dari sektor sumber daya alam.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran Solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah

A. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar**a. Urusan Pemerintahan Bidang pendidikan**

- ❖ Masih adanya bangunan dalam kondisi kurang baik pada jenjang sekolah SD, SMP. Hal ini disebabkan perawatan dan pemeliharaan yang kurang memadai serta sarana prasarana yang telah memiliki masa pakai lama.
- ❖ Belum terpenuhinya sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas (terutama penguasaan terhadap Teknologi Informasi dan Komputer dalam pembelajaran).
- ❖ Masih belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah pada Kabupaten Karo, masih rendahnya manajemen kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, mulai lunturnya loyalitas serta integritas dalam menjalankan profesinya sehingga mempengaruhi mutu kinerja dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, dan belum optimalnya mutu dan prestasi siswa, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- ❖ Kurangnya Dokter Spesialis (Spesialis Mata, Anestesi, dan Rehapmedik, Patologoklinik dan Radiologi)
- ❖ Belum tercapainya target Indikator Standar Pelayanan Minimum pada pelayanan RSUD
- ❖ Masih kurangnya kelengkapan prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas sesuai standar
- ❖ Pelaksanaan program/kegiatan dan manajemen administrasi di Puskesmas belum optimal sehingga perlu pembinaan dan pendampingan.
- ❖ Rendahnya tingkat kunjungan ke Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).
- ❖ Kurangnya pengetahuan dan keterampilan kader Posbindu di desa dalam melaksanakan penyuluhan pada masyarakat
- ❖ Masih terdapat sarana Puskesmas Pembantu dan rumah dinas tenaga kesehatan dalam keadaan rusak
- ❖ Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, hal ini ditandai dengan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular
- ❖ Belum tercapainya target Indikator Standar Pelayanan Minimum pada pelayanan RSUD;
- ❖ Belum optimalnya pelayanan KB yang menyebabkan sulitnya menekan peserta *Unmet Need*. Berdasarkan data pada tahun 2015 *Unmet Need* di Kabupaten Karo sebesar 10,42% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 17,89% walaupun ada peningkatan tetapi capaian tersebut masih rendah.
- ❖ Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan perbaikan gizi, hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kematian balita.

- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
- ❖ Persentasi jaringan jalan dalam kondisi baik dan jembatan dalam kondisi baik yang cenderung stagnan serta ketersebarannya yang belum merata;
 - ❖ Akses air minum belum mencapai 100%;
 - ❖ Akses sanitasi belum mencapai dari 100%;
 - ❖ Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang;
 - ❖ Perlunya peningkatan luas wilayah irigasi yang dipelihara;
 - ❖ Masih banyak saluran drainase tidak berfungsi secara optimal;
 - ❖ Masih banyak gedung milik Pemerintah yang belum memadai;
 - ❖ Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang;
 - ❖ Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal;
 - ❖ Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau;
- d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**
- ❖ Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman kumuh;
 - ❖ Masih adanya rumah tidak layak huni;
- e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
- ❖ Kesadaran masyarakat dan kurangnya kepedulian masyarakat akan bencana masih rendah;
 - ❖ SDM Penanggulangan bencana masih kurang dan belum terlatih;
 - ❖ Sarana prasarana layanan Pusdalops dan Pusdatin belum memadai;
 - ❖ Ketersediaan rambu-rambu dan plank informasi rawan bencana dalam rangka mitigasi belum memadai;
 - ❖ Gladi/simulasi lapangan kesiapsiagaan bencana belum merata dilaksanakan di 17 Kecamatan;
 - ❖ Masa berlaku KRB sampai dengan 2022 dan RPB sampai dengan 2023;
 - ❖ Dokumen regulasi penanggulangan bencana belum lengkap (RPKB dan Renkon bencana lain selain erupsi Gunung);
 - ❖ Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan serta sarana dan prasarana moblisiasi terkait evakuasi, pemulangan, tempat penyimpanan belum memadai;
 - ❖ Kurang optimalnya koordinasi antar instansi dan penguatan kelembagaan bencana terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - ❖ Sarana dan prasarana Satpol PP dan pemadam kebakaran belum sesuai standar;
 - ❖ Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Karo yang masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan Perda masih rendah, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya;

- ❖ Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Karo sangat rendah sekali dimana pada tahun 2019 persentasenya hanya 0,65% dan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) hanya 0,46%, hal ini diakibatkan oleh kurangnya kendaraan operasional serta fasilitas sarana dan prasarana penunjang pemadam kebakaran serta belum adanya pos pemadam di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Karo;
- ❖ Terbatasnya pagu anggaran, sehingga untuk menangani kejadian bencana yang terjadi secara tiba-tiba tidak dapat ditangani maksimal.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- ❖ Dinas Sosial masih membutuhkan Pegawai, dikarenakan jumlah pegawai yang ada belum mencukupi untuk mendukung semua tupoksi Dinas Sosial Kab. Karo;
- ❖ Dibutuhkan penambahan anggaran guna pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabanjahe;
- ❖ Dibutuhkan Kendaraan Operasional guna mendukung penanganan PMKS (ODGJ dan Orang terlantar);
- ❖ Belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, lansia dan anak terlantar;
- ❖ Bantuan Sosial masih belum tepat sasaran sehingga masih dibutuhkan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan;
- ❖ Kegiatan KUBE belum semua usulan terpenuhi di karenakan keterbatasan anggaran;
- ❖ Belum tersedianya Rumah Singgah untuk orang terlantar.

B. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja

- ❖ Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- ❖ Kualitas dan Daya Saing Calon Tenaga Kerja Belum Sesuai Kebutuhan Pasar;
- ❖ Sarana Prasarana Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Belum Sesuai dengan Perkembangan Kebutuhan Pasar Kerja;
- ❖ Sistem Informasi Ketenagakerjaan Belum Merata;

b. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- ❖ Masih adanya perkawinan anak di bawah umur dan perundungan terhadap anak;
- ❖ Tingginya partisipasi angkatan kerja perempuan sedangkan lapangan kerja terbatas; dan
- ❖ Pemberdayaan perempuan masih menjadi perhatian karena meningkatnya rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- ❖ Cadangan Pangan belum memenuhi Standar/Arahan Kementerian Pertanian sebesar 110 Ton;

- ❖ Dari hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Karo pada Tahun 2021 masih ada beberapa Kecamatan dan Desa yang Rentan Rawan Pangan;
 - ❖ Belum adanya Intervensi untuk Daerah Rawan Pangan
 - ❖ Masih banyak petani yang melakukan pemakaian pestisida yang berlebihan;
 - ❖ Banyak petani belum mengetahui pentingnya registrasi pangan segar asal tumbuhan;
 - ❖ Masih banyak masyarakat yang belum mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dikonsumsi.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**
- ❖ Sertifikasi tanah pemerintah daerah dan tanah hak milik masih rendah;
 - ❖ Masih ada kasus tanah pemerintah daerah yang perlu diselesaikan.
- e. Bidang Lingkungan Hidup**
- ❖ Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup (masih terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki Ijin Lingkungan);
 - ❖ Kurangnya sarana dan prasarana persampahan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik;
 - ❖ Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan dan ketersediaan TPA yang belum memadai di Kabupaten Karo;
 - ❖ Kualitas dan kuantitas petugas laboratorium masih kurang;
 - ❖ Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang belum lengkap;
 - ❖ Kualitas lingkungan yang cenderung mengalami degradasi;
 - ❖ Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan dan belum tersedianya TPA;
 - ❖ Penanganan air limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan secara terpadu;
 - ❖ Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 - ❖ Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;
 - ❖ Belum tersedianya data lahan yang memenuhi syarat untuk RTH;
 - ❖ Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- ❖ Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan.

- ❖ Kurangnya ketersediaan peralatan perekaman dan pencetakan KTP-Elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA) dan blangko Kartu Identitas Anak (KIA).
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
 - ❖ Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan regulasi, mekanisme dan kebijakan yang masih rendah, hal ini menyebabkan pengalihan potensi desa menjadi tidak maksimal, kurang berkembangnya lembaga ekonomi di desa (BUMDes, SPP, dll)
 - ❖ Rendahnya semangat perubahan Aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat serta minimnya inovasi menuju desa mandiri (Desa masih tergantung terhadap DD dan ADD)
- h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
 - ❖ Kurangnya tenaga penyuluh KB lapangan (hanya 7 orang tenaga yang tersedia untuk cakupan 17 kecamatan/269 desa)
 - ❖ Desa-desa yang menjadi daerah cakupan sasaran program kampung merupakan desa dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan masih memiliki infrastruktur jalan dan sarana prasarana umum yang sangat tidak memadai
 - ❖ Adanya peningkatan cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) setiap tahunnya, pada tahun 2017 sebesar 10,42%, tahun 2018 meningkat menjadi 15% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 17,89%.
- i. Bidang Perhubungan**
 - ❖ Belum tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan Sarana prasarananya
 - ❖ Belum tersedianya Terminal Type C
 - ❖ Masih terdapat kemacetan di beberapa lokasi
 - ❖ Belum terpenuhinya Perbaikan, Perawatan dan Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)
 - ❖ Belum terlaksananya meterisasi LPJU
- j. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**
 - ❖ Belum optimalnya penggunaan Teknologi informasi Komunikasi (TIK), Kurangnya Sumber daya yang memadai untuk mendukung Penyelenggaraan SPBE, Kurangnya Pemerataan fasilitas akses informasi publik, belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kurangnya ruang informasi publik untuk akses informasi bagi masyarakat.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.**
 - ❖ Belum optimalnya kualitas SDM pengurus koperasi dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;
 - ❖ Belum optimalnya akses pasar bagi produk-produk UKM;
 - ❖ Belum optimalnya kemitraan pelaku Usaha Mikro dengan dunia usaha;
 - ❖ Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar.
 - ❖ Banyak produk yang belum memenuhi legalitas izin usaha;

- ❖ Koperasi yang ada masih bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam.
- 1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal**
 - ❖ Belum tersedianya regulasi pendukung untuk kemudahan berusaha bagi investor;
 - ❖ Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan perlunya koordinasi dengan stakeholder;
 - ❖ Belum tersedianya data dan peta potensi investasi yang memiliki kajian studi;
 - ❖ Belum optimalnya pemenuhan komitmen, pemahaman dan minat masyarakat/stakeholder terhadap perizinan;
 - ❖ Belum optimalnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya;
 - ❖ Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**
 - ❖ Belum optimalnya pembinaan olahraga, kepramukaan dan kepemudaan;
 - ❖ Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga;
 - ❖ Belum optimalnya prestasi olahraga;
 - ❖ Belum optimalnya pembinaan atlet;
 - ❖ Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan;
 - ❖ Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga keolahragaan;
 - ❖ Adanya perbedaan kepentingan dikalangan pemuda millennial yang lebih mementingkan kegiatan politik dibandingkan kegiatan kepemudaan seperti bakti sosial, karang taruna, dll.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**
 - ❖ Belum ada sistem integrasi data statistik sektoral daerah, belum optimalnya ketersediaan data statistik untuk perencanaan pembangunan daerah, kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik sektoral.
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**
 - ❖ Kurangnya sumber daya di bidang pengelolaan persandian daerah.
- p. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan**
 - ❖ Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi;
 - ❖ Terbatasnya ruang publik untuk tempat berkreatifitas dan berekspresi;
 - ❖ Rendahnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam pelestarian nilai dan budaya Karo;
 - ❖ Belum optimalnya pelestarian cagar budaya;
 - ❖ Minimnya pemahaman dan kecintaan anak-anak dan kaum muda pada budaya lokal, terutama pada sejarah lokal;
 - ❖ Belum optimalnya pembinaan pengelolaan kesenian.
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**
 - ❖ Target Pustakawan yang dilatih belum tercapai, kondisi saat ini belum ada aparatur yang menjadi pustakawan sehingga pengelolaan dan pelayanan perpustakaan tidak maksimal;

- ❖ Gedung perpustakaan belum memenuhi standar perpustakaan nasional dan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- ❖ Menurunnya persentase jumlah kunjungan terhadap populasi yang harus dilayani yang bisa dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung minat baca masyarakat.
- ❖ Kurangnya minat baca masyarakat akibat sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dan pengelolaan perpustakaan yang belum maksimal serta tidak terkelolanya arsip secara baku dan rendahnya SDM.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- ❖ Tidak ada penambahan sarana dan prasarana tahun 2019, sehingga kondisi sarana dan prasarana arsip saat ini belum memenuhi standar.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- ❖ Rendahnya produksi dan produktivitas ikan yang disebabkan oleh budidaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal;
- ❖ Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- ❖ Kurangnya SDM Tenaga Penyuluh Perikanan;
- ❖ Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional BBI Lokal;
- ❖ Kurangnya pengetahuan dan keterampilan Pembudidaya Ikan dalam berbudidaya ikan;
- ❖ Kurangnya ketersediaan ikan di perairan daratan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- ❖ Belum optimalnya citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata;
- ❖ Belum optimalnya peningkatan SDM pariwisata yang berkualitas dan profesional;
- ❖ City Branding Kabupaten Karo sebagai daerah pariwisata belum gencar dipromosikan secara internasional;
- ❖ Event-event pariwisata berskala internasional membutuhkan dana yang cukup besar sedangkan APBD Kabupaten Karo sangat terbatas;
- ❖ Kreativitas, Inovasi dan Kompetensi Daya Saing ODTW masih kurang;
- ❖ Kemampuan kelompok sadar wisata masyarakat belum optimal dan memerlukan dukungan untuk pengembangannya menuju taraf internasional;
- ❖ Kolaborasi dan Sinergitas stakeholder dalam pengembangan pariwisata belum optimal;
- ❖ Sarana dan Prasarana Objek Wisata kurang memadai;
- ❖ Pemasaran Pariwisata yang belum memadai;
- ❖ Belum optimalnya Pengembangan industri ekonomi kreatif.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- ❖ Berkurangnya rata-rata luas kepemilikan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan;

- ❖ Rendahnya kualitas SDM dan teknologi petani dan penangkar;
 - ❖ Kurangnya pengetahuan petani dalam pelaksanaan SOP pertanian dan belum optimalnya mekanisasi pertanian;
 - ❖ Pertanian yang masih sangat dipengaruhi oleh musim;
 - ❖ Belum optimalnya infrastruktur pertanian/ permasalahan jenis, jumlah, dan akses input pertanian;
 - ❖ Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian;
 - ❖ Masih rendahnya diseminasi teknologi pertanian dan penyuluhan pertanian;
 - ❖ Masih rendahnya aksesibilitas petani terhadap informasi pasar dan kelembagaan pembiayaan pertanian;
 - ❖ Keterbatasan SDM penyuluh baik kuantitatif maupun kualitatif dan sarana pendukung;
 - ❖ Ketersediaan sarana dan prasarana peternakan belum optimal;
 - ❖ Belum optimalnya pemanfaatan kawasan penggembalaan umum;
 - ❖ Keterjangkauan petani terhadap pupuk anorganik;
 - ❖ Kenaikan harga pupuk kimia yang mengakibatkan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa;
 - ❖ Lahan Usaha Tani (LUT) relokasi Tahap III belum dapat diselesaikan karena adanya kendala lapangan dengan masyarakat sekitar yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka;
 - ❖ Belum terselesaikannya LUT mengakibatkan adanya permintaan sewa rumah sewa lahan dari masyarakat yang direlokasi Tahap III di Siosar sampai mereka dapat menempati rumah dan mengelola lahan usaha tani;
 - ❖ Perumahan dan Fasum-fasosnya terbengkalai karena masyarakat tidak bersedia menempati rumahnya sebelum LUT selesai dan diserahterimakan;
 - ❖ Berlarutnya penyelesaian LUT menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kab. Karo dan memicu terjadi aksi masyarakat (demo) terus menerus.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**
- ❖ Di beberapa daerah terpencil masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN;
 - ❖ Potensi energi baru dan terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**
- ❖ Daya Saing Komoditi/Produk Pertanian di Pasar Nasional dan Global Masih Rendah;
 - ❖ Kurangnya Promosi Komoditi/Produk Unggulan di tingkat Nasional dan Internasional;
 - ❖ Perlindungan konsumen belum optimal
 - ❖ Kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional kurang memadai;

- ❖ Belum adanya peraturan daerah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
- ❖ Belum optimalnya pembinaan terhadap pedagang yang berada di lingkungan pasar.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- ❖ Belum optimalnya fasilitas dan pengelolaan sentra IKM Kabupaten Karo;
- ❖ Belum optimalnya kualitas produk IKM yang kreatif dan inovatif;
- ❖ Masih rendahnya pertumbuhan industri di Kabupaten Karo.

D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

a) Sekretariat Daerah

- ❖ Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo masih rendah dan nilai penerapan Standar Pelayanan Publik masih rendah.
- ❖ Nilai hasil evaluasi SAKIP masih rendah sehingga perlu diperbaiki secara menyeluruh (perencanaan, indikator kinerja, perjanjian kinerja, proses bisnis, cascading, dll)
- ❖ Program pembangunan yang dilaksanakan baik fisik maupun nonfisik belum termonitoring dengan baik.
- ❖ Rendahnya nilai evaluasi Lakip Kabupaten Karo.
- ❖ Masih belum lengkapnya data nama jalan di Kabupaten Karo.
- ❖ Belum semua desa/kelurahan/kecamatan yang memiliki batas baku dan masih banyak desa yang tidak memiliki dokumen terkait batas desanya.
- ❖ Minimnya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki POKJA (Kelompok Kerja) Pengadaan Barang dan Jasa.
- ❖ Beberapa unsur rupa bumi di Kab. Karo belum memiliki nama yang jelas.

b) Sekretariat DPRD

- ❖ Pelayanan Administrasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD belum optimal.

E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Bidang Perencanaan

- ❖ Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah;
- ❖ Belum optimalnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
- ❖ Adanya perbedaan persepsi dan kemampuan SDM antara PD dan Bappedalitbang pelaksanaan peran dan fungsi perencanaan antara Bappedalitbang dan Perangkat Daerah;
- ❖ Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- ❖ Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam merumuskan tindak lanjut atau perencanaan ke depan.

b. Bidang Keuangan

- ❖ Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap ketentuan dan regulasi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD;
- ❖ Masih diperlukan pengembangan dokumen pendukung penganggaran dan pelaksanaan APBD;
- ❖ Banyak aset daerah yang dokumen pendukung (alas hak) sehingga proses sertifikat terhambat;
- ❖ Potensi Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal;
- ❖ Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan Pendapatan Asli Daerah belum memadai termasuk petugas pajak;
- ❖ Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Daerah.

c. Bidang Urusan Kepegawaian

- ❖ Belum tersedianya Rencana Induk Kepegawaian sehingga menyulitkan pemetaan kebutuhan ASN dari beberapa aspek seperti kebutuhan pengembangan karir, kebutuhan diklat, kebutuhan jumlah ASN dll;
- ❖ Masih kurangnya kompetensi PNS terkait Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sehingga diperlukan Penambahan Pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan dibidang tugas yang terkait dengan pekerjaan PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional;
- ❖ Kebijakan dan Sistem Informasi Kepegawaian dari pemerintah pusat masih sering berubah sehingga tidak sinkron dengan perencanaan Kepegawaian di daerah.

d. Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

- ❖ Masih minimnya presentasi pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Tahun 2019 ASN yang mengikuti Diklat sebesar 24,49%, sedangkan tahun 2022 tidak ada yang mengikuti diklat struktural karena anggaran yang terbatas dan Kabupaten Karo belum memenuhi standar dalam hal akreditasi sebagai lembaga penyelenggara Diklat;
- ❖ Pelaksanaan Diklat kepemimpinan dan Prajabatan masih tergantung terhadap pihak/lembaga lainnya seperti BPSDM Propinsi, Lembaga Administrasi Negara dll;
- ❖ Belum sepenuhnya syarat minimal diklat 20 jam/tahun terpenuhi oleh setiap Aparatur Sipil.

e. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

- ❖ Masih rendahnya dukungan PD dan Pengambil kebijakan dalam pengembangan penelitian dan pengembangan

F. Unsur Pengawas**a) Inspektorat Daerah**

- ❖ Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan di lapangan
- ❖ Ketersediaan SDM auditor belum proposional baik dari jumlah personil maupun kualifikasi jenjang auditor
- ❖ Kapabilitas APIP masih Level 2

G. Unsur Pemerintahan Umum**a. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ❖ Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
- ❖ SDM Pengurus Ormas, LSM dan OKP masih perlu untuk ditingkatkan.
- ❖ Masih ditemukannya beberapa kasus terkait dengan penyakit masyarakat (PEKAT).
- ❖ Kesadaran Politik masyarakat dan pemahaman pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya masih rendah.
- ❖ Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
- ❖ Masih rendahnya peran partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Utara, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah.

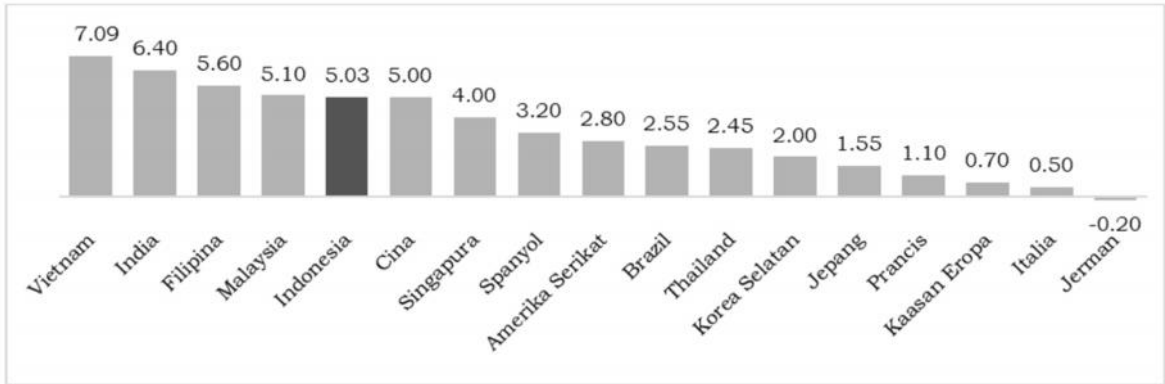
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan perekonomian Kabupaten Karo disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional, regional, maupun provinsi. Perekonomian Kabupaten Karo diproyeksikan tumbuh lebih tinggi dari tahun 2026. RKPD Kabupaten Karo tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 dalam mencapai visi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yaitu “*Mewujudkan Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, Karo Unggul dan Karo Sejahtera Menuju Indonesia Emas*” dengan arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan dengan mengimplementasikan program prioritas nasional dan provinsi serta sebagai payung untuk untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan tumbuh 5,03 persen pada tahun 2024, meski sedikit melambat dibanding tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Capaian ini mencerminkan ketangguhan ekonomi Indonesia serta kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding beberapa negara seperti Tiongkok, Brasil, dan Thailand. Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi, *Gross National Income* (GNI) per kapita diperkirakan meningkat dari US\$4.810 pada tahun 2023 menjadi US\$4.930 pada tahun 2024, sehingga mempertahankan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (*upper middle-income country*).

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan beberapa Negara lain
Tahun 2024 (persen)



Sumber: BPS dan CEIC, Maret 2025

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 relatif kuat di tengah gejolak global. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar tumbuh 4,94 persen, meningkat dari 4,82 persen pada tahun 2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh tinggi sebesar 12,48 persen, didorong oleh penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Secara keseluruhan, konsumsi masyarakat tumbuh 5,11 persen pada tahun 2024. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 6,61 persen seiring meningkatnya belanja negara untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan program bantuan sosial

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tahun 2024 mencapai 4,61 persen. Pertumbuhan investasi ini didorong oleh peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp1.714,24 triliun atau tumbuh hingga 20,80 persen. Pertumbuhan tinggi PMA sebesar 21,00 persen didorong oleh peningkatan kinerja investasi hilirisasi utamanya untuk subsektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Sementara itu, pertumbuhan tinggi PMDN sebesar 20,60 persen didorong oleh peningkatan investasi untuk subsektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi.

Pada tahun 2024, kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB meningkat 0,43 persen menjadi 22,18 persen, didorong oleh pertumbuhan ekspor barang dan jasa sebesar 6,51 persen. Ekspor barang tumbuh 2,29 persen, terutama pada kelompok barang logam mulia dan perhiasan/permata, nikel dan barang daripadanya, alas kaki, karet dan barang dari karet, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, dan berbagai produk kimia. Sementara itu, ekspor jasa mengalami peningkatan seiring bertambahnya kunjungan wisatawan mancanegara.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor kembali mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2024. Tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi meliputi sektor jasa lainnya (9,80 persen); transportasi dan pergudangan (8,69 persen); serta penyediaan akomodasi dan makan minum (8,56 persen). Pertumbuhan sektor jasa lainnya didorong oleh peningkatan aktivitas rekreasi serta berbagai *event* olahraga dan hiburan. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh seiring peningkatan mobilitas, jumlah penumpang, dan volume barang. Sementara itu, sektor akomodasi dan makan minum didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat serta aktivitas pemerintah dan swasta. Adapun sektor pertanian, yang memberikan kontribusi sebesar 12,61 persen terhadap perekonomian Indonesia, tetap tumbuh positif sebesar 0,67 persen.

Sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan 4,43 persen pada tahun 2024. Subsektor industri logam dasar mencatat pertumbuhan kuat sebesar 13,34 persen, didorong oleh program hilirisasi nikel yang meningkatkan ekspor baja tahan karat. Sejumlah proyek industri strategis yang telah selesai konstruksi, seperti smelter di NTB, smelter di Gresik, dan proyek *Smelter Grade Alumina*

Refinery (SGAR) Fase 1 di Mempawah, diharapkan dapat memperkuat industri logam dasar nasional. Industri makanan dan minuman, yang berperan dominan, tumbuh 5,90 persen seiring meningkatnya permintaan domestik untuk konsumsi dan bahan baku industri serta permintaan luar negeri. Sementara itu, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 6,16 persen, didorong oleh ekspor barang logam komponen elektronik dan peralatan listrik.

Optimisme pelaku industri pun tetap tinggi, tecermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang mencapai 52,93 pada akhir tahun 2024, menandakan sektor industri masih dalam fase ekspansi. Namun, beberapa subsektor mengalami perlambatan, seperti industri alat angkutan serta industri tekstil dan pakaian jadi, akibat penurunan daya beli masyarakat dan membanjirnya impor produk tekstil murah.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi turut diikuti oleh perkembangan pariwisata dan industri pendukungnya. Pada tahun 2024, rasio PDB pariwisata diproyeksikan mencapai 4,04 persen, dengan devisa pariwisata mencapai sebesar US\$16,71 miliar. Capaian ini terutama didorong oleh pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara yang hampir mencapai tingkat prapandemi serta lonjakan wisatawan nusantara yang telah melampaui tingkat sebelum pandemi. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur destinasi pariwisata, penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, seperti *World Water Forum 2024*, *Aqua Bike Jetski World Championship 2024*, *Bali Internasional Airshow 2024*, *Moto GP Mandalika*, dan konser musik internasional, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ini. Faktor lain yang mendukung adalah pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, peningkatan frekuensi penerbangan langsung ke Indonesia, terutama dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mendorong pertumbuhan pariwisata domestik.

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Provinsi Sumatera Utara

Wilayah Sumatera menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi terbesar Indonesia dan KBI, yakni tumbuh sebesar 4,45 persen, melambat dari tahun 2023 yang mampu tumbuh 4,69 persen. Perekonomian Wilayah Sumatera ditopang oleh kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Sektor industri pengolahan tumbuh 4,87 persen, lebih tinggi dari tahun 2023 yang tumbuh 3,13 persen didorong masih tingginya harga dan permintaan komoditas global untuk komoditas kelapa sawit. Selain itu, sektor perdagangan juga mampu tumbuh 5,24 persen seiring dengan masih tingginya permintaan domestik yang tecermin juga pada konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,72 persen. Kinerja sektor pertanian juga terjaga dengan tumbuh sebesar 2,23 persen seiring dengan peningkatan produksi tanaman hortikultura (durian, jeruk, salak, dan cabe) yang tumbuh 0,81 persen, produksi perkebunan yang tumbuh 3,47 persen, serta produksi peternakan yang tumbuh 3,21 persen.

Arah kebijakan ekonomi makro daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Sumatera Utara yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini serta tantangan dan peluang yang dihadapi daerah, baik dalam skala nasional maupun global.

Pentingnya kebijakan ekonomi makro daerah didasarkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan kebijakan nasional serta dinamika ekonomi global dengan mempertimbangkan tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan dampak perubahan iklim, Sumatera Utara perlu menerapkan strategi diversifikasi ekonomi serta penguatan struktur industri dan jasa berbasis inovasi dan keberlanjutan.

Lebih lanjut, arah kebijakan ekonomi makro ini juga menekankan sinergi antara berbagai faktor pendorong pertumbuhan, seperti investasi, kualitas sumber daya manusia, stabilitas makroekonomi, tata kelola pemerintahan, serta infrastruktur berkualitas. Selain itu, pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, termasuk pemanfaatan potensi Danau Toba dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, menjadi kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi Sumatera Utara. Selanjutnya, kebijakan ekonomi makro Sumatera Utara Tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat transformasi struktural ekonomi daerah, memperkuat stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing sektor unggulan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengadopsi prinsip *Blue Economy* dan *Green Economy*. Selain itu, arah kebijakan ini juga harus selaras dengan strategi pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya untuk membangun masyarakat Sumatera Utara yang tangguh.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024, perekonomian daerah ini menunjukkan tren yang positif dengan kontribusi utama dari sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, ketimpangan infrastruktur, serta ketergantungan pada sektor primer masih menjadi faktor yang perlu diatasi. Sektor unggulan seperti Industri Pengolahan dan Perdagangan memiliki kontribusi besar terhadap PDRB, namun pertumbuhan sektor-sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk peningkatan nilai tambah dan efisiensi rantai pasok. Sektor Pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata tetap menjadi pilar utama ekonomi daerah. Khususnya, industri berbasis agribisnis dan produk olahan pertanian akan diperkuat melalui kemitraan dengan sektor swasta dan peningkatan akses pasar internasional.

Disisi lain, sektor dengan pertumbuhan paling rendah, seperti pengadaan air dan pengelolaan sampah, menunjukkan perlunya penguatan kebijakan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap

perekonomian daerah. Sektor jasa keuangan, transportasi, dan teknologi informasi masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Investasi dalam infrastruktur digital dan konektivitas logistik akan menjadi penting untuk mempercepat pertumbuhan sektor-sektor ini.

Transformasi ekonomi Sumatera Utara memperhitungkan perkembangan teknologi, perubahan iklim, serta dinamika perdagangan global agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan. Sejalan dengan pembahasan tersebut, berikut arah kebijakan ekonomi makro Sumatera Utara Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Transformasi Ekonomi dan Integrasi dengan Kebijakan Nasional. Sejalan dengan kebijakan nasional yang berfokus pada transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, digitalisasi, dan keberlanjutan, Sumatera Utara akan memperkuat sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Upaya hilirisasi di KEK Sei Mangkei akan terus didorong guna meningkatkan nilai tambah ekspor dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
2. Penguatan *Blue* dan *Green Economy*. Implementasi ekonomi biru dan hijau akan menjadi prioritas untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan. Sektor perikanan, kehutanan, dan pariwisata berbasis ekowisata, khususnya di kawasan Danau Toba, akan dikembangkan melalui kebijakan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mendorong investasi pada energi terbarukan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam guna mengurangi jejak karbon industri.
3. Peningkatan Kualitas SDM dan Ketenagakerjaan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri akan diperluas. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan akan diperkuat guna menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
4. Stabilitas Makroekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan. Stabilitas harga dan inflasi yang terkendali akan tetap menjadi fokus utama dalam menjaga daya beli masyarakat. Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk digitalisasi layanan publik, akan diperkuat guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
5. Pengembangan Infrastruktur berkualitas menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dan peningkatan jalan, pelabuhan, serta transportasi publik akan terus dilakukan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan industri. KEK Sei Mangkei dan beberapa Kawasan Industri akan dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri berorientasi ekspor.
6. Penataan Sosial Budaya dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dalam mendukung sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang menyeimbangkan pelestarian budaya dan

ekologi dengan peningkatan daya tarik wisata akan diterapkan. Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas akan terus dikembangkan dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Arah kebijakan ekonomi makro Sumatera Utara tahun 2026 diarahkan pada penguatan sektor unggulan, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi daerah serta beradaptasi terhadap tantangan global, Sumatera Utara terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakatnya.

3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Kabupaten Karo

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Karo yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia perkembangannya sangat dinamis menyesuaikan dengan apa yang terjadi baik di daerah, regional maupun nasional bahkan internasional.

Arah kebijakan ekonomi daerah mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

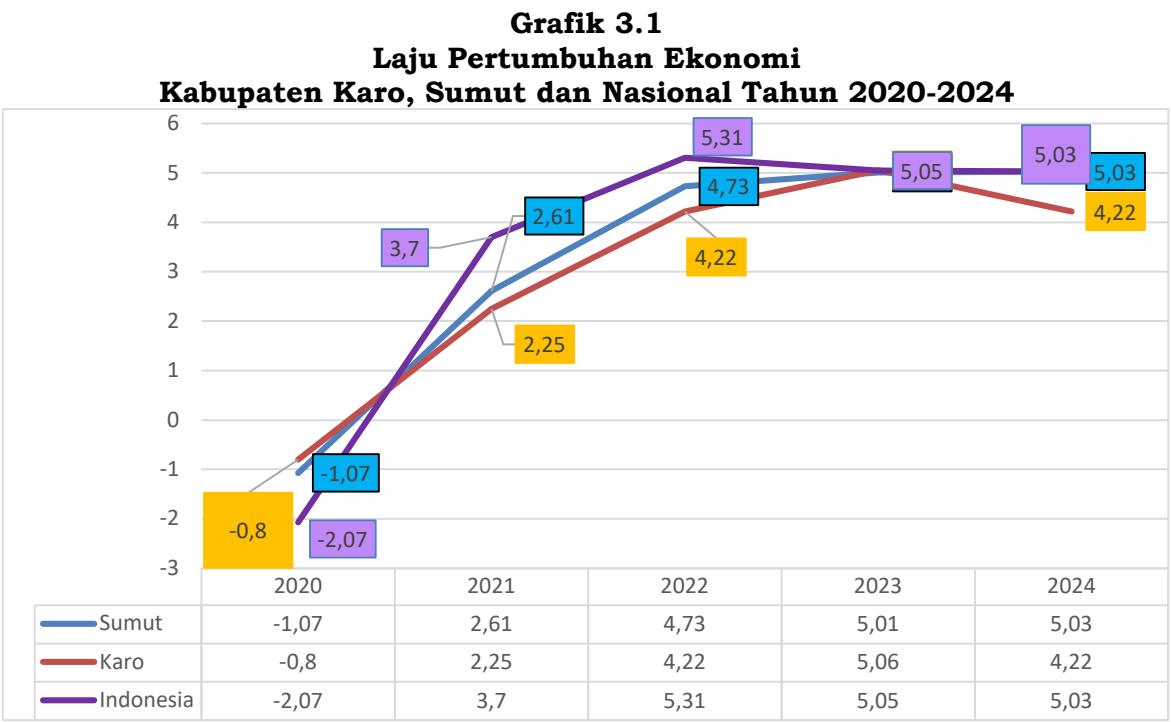
Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Karo pada tahun 2020-2024 digambarkan melalui kesejahteraan ekonomi masyarakat mengacu pada tingkat kemakmuran dan kualitas hidup yang dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Karo. Aspek ini mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, serta mencapai kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat:

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif. Perlambatan yang sangat dominan terjadi pada tahun 2020, Laju pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga minus 0.80 persen. Hal ini akibat *pandemi Covid-19* sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang terkontraksi. Pada tahun 2021 kembali mengalami akselerasi hingga tahun 2024 menjadi 4,22 persen.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo memiliki pola pertumbuhan yang mirip namun pada periode tahun 2021 hingga tahun

2024 cenderung lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi Sumut dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



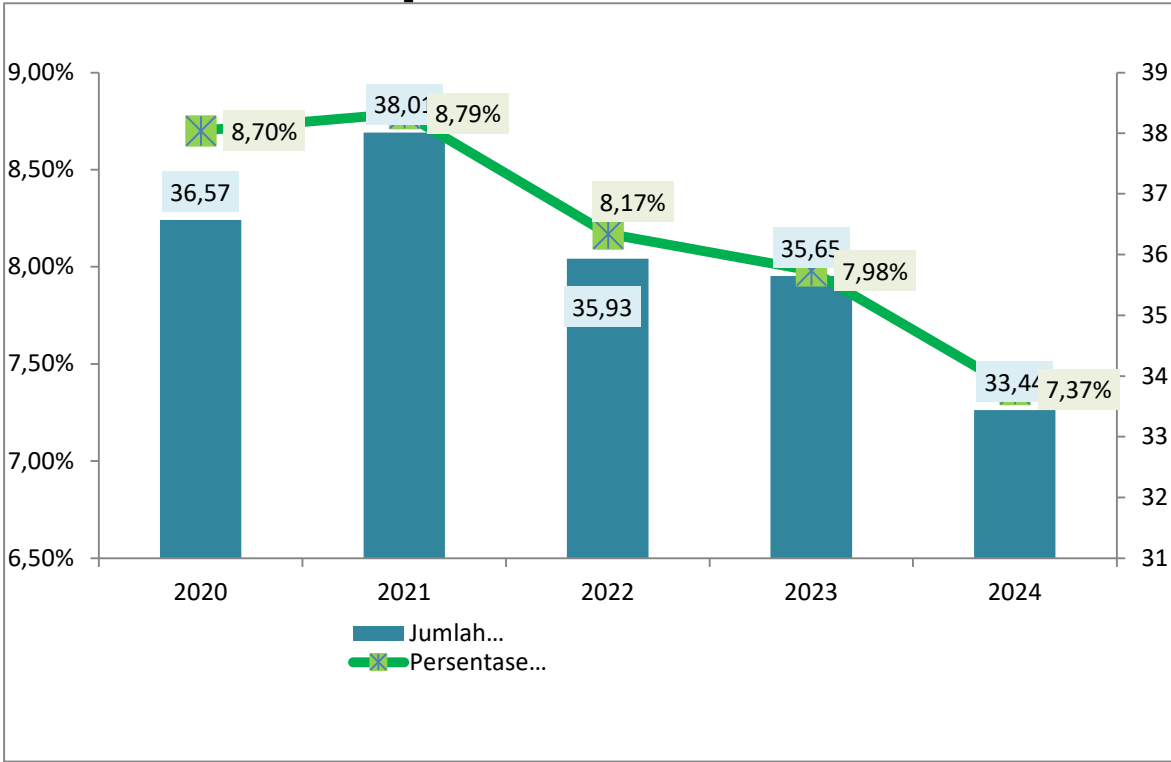
Berdasarkan kondisi diatas, maka dapat dinyatakan bahwa Masyarakat Kabupaten Karo mengalami peningkatan kesejahteraan walaupun pertumbuhan tahun 2024 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2023 pertumbuhan mencapai 5,06 persen, sedangkan pada tahun 2024 hanya tumbuh sebesar 4,22 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan Pembangunan di suatu wilayah, untuk itu pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin berakselerasi dengan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya lokal.

B. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Karo dari tahun 2020-2024 berlangsung fluktuatif. Secara *trend* dalam periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan nilai positif dimana persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dari tahun 2020 sebesar 8,70 persen berangsur-angsur menurun menjadi 7,37 persen di tahun 2024.

Peningkatan persentase kemiskinan terjadi akibat dampak bencana erupsi Gunung Sinabung yang merusak lahan dan tanaman pertanian sehingga produksi pertanian menjadi menurun yang berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat serta dampak *Covid-19*. Sedangkan penurunan kemiskinan pada tahun 2024 didukung dari program pengurangan beban pengeluaran masyarakat misalnya program bantuan langsung tunai (BLT), pemberian bantuan pangan, pemberian bantuan jaminan kesehatan dan lain sebagainya.

Grafik 3.2
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Garis kemiskinan adalah jumlah minimum pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Garis kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2024 adalah Rp656.812 per kapita per bulan, berdasarkan garis kemiskinan tersebut didapatkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karo sekitar 7,37 persen dari penduduk Kabupaten Karo.

C. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan. Perkembangan produk domestik regional bruto perkapita per tahun Kabupaten Karo ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
PDRB perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Perkapita ADHB (juta rupiah)	51,96	53,35	57,76	62,76	67,69
PDRB Perkapita ADHK (juta rupiah)	35,21	35,65	36,67	37,94	39,02

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2025

PDRB perkapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2020 sampai 2024 cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa

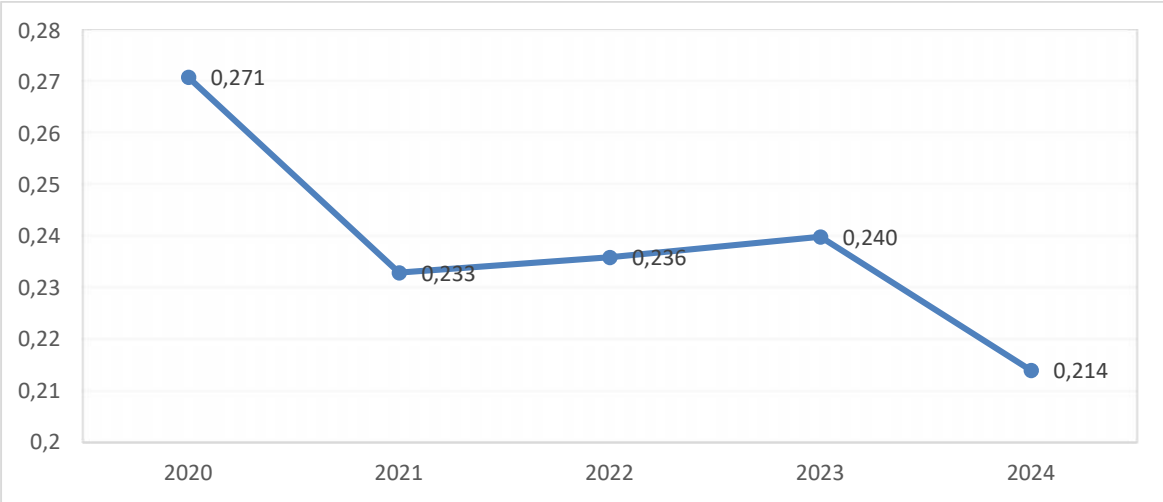
secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Karo yang dibarengi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

D. Indeks Gini

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Koefisien Gini Kabupaten pada periode tahun 2020 sampai 2024 fluktuatif setiap tahunnya. Akan tetapi, secara umum dapat disimpulkan dari periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan hasil yang positif yaitu penurunan dari angka 0,271 tahun 2020 menjadi 0,214 tahun 2024.

Nilai Rasio Gini Kabupaten Karo tersebut dapat diartikan berada pada kategori rendah atau semakin merata. Pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal.

Grafik 3.3
Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS

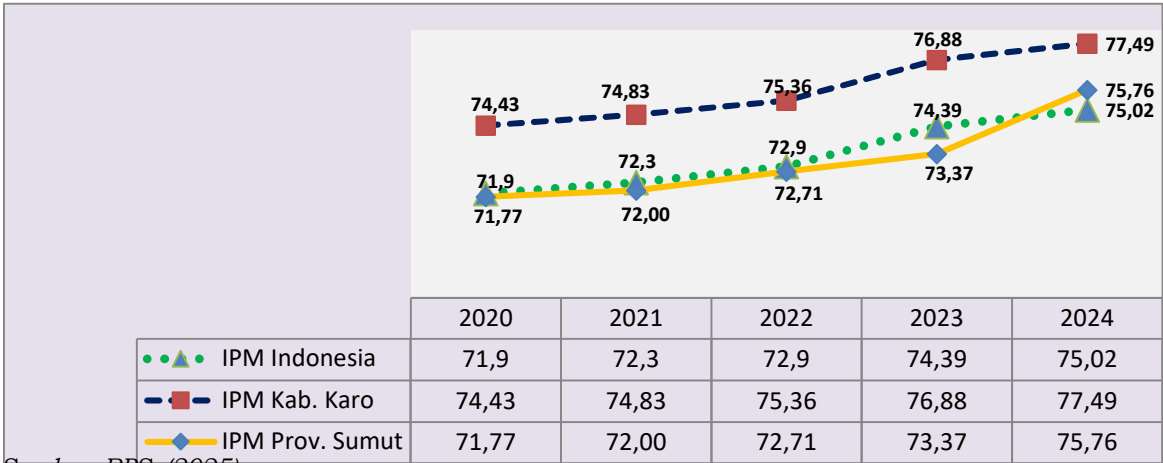
E. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karo tetap konsisten mengalami peningkatan setiap tahun dari 74,43 pada 2020 menjadi 77,49 pada 2024. Peningkatan yang stabil ini menunjukkan perbaikan yang terus-menerus dalam berbagai aspek pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 75,76 poin dan Nasional sebesar 75,02 poin tahun 2024. Selama tahun 2022-2024 IPM Kabupaten Karo rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen per tahun.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-

kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo tahun 2024 mencapai 77,49 tahun. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Karo berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”.

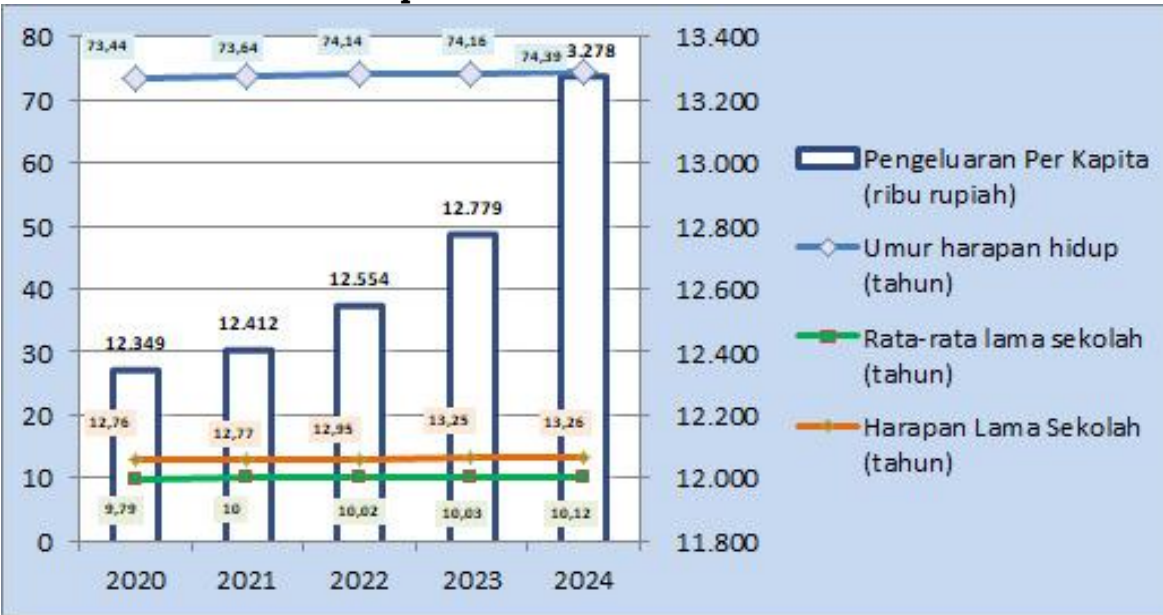
Grafik 3.4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, (2025)

Terdapat 4 (empat) indikator yang mendukung IPM di Kabupaten Karo mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Seperti dilihat pada grafik selama 5 (lima) tahun indikator Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,52 poin. Indikator Harapan Lama sekolah sebesar 0,10 dan Rata-rata Lama Sekolah rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 0,10 poin. Sedangkan pada indikator Pengeluaran per Kapita berfluktuasi dengan rata-rata 161 setiap tahunnya. Pada indikator pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan.

Grafik 3.5
Perkembangan Dimensi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

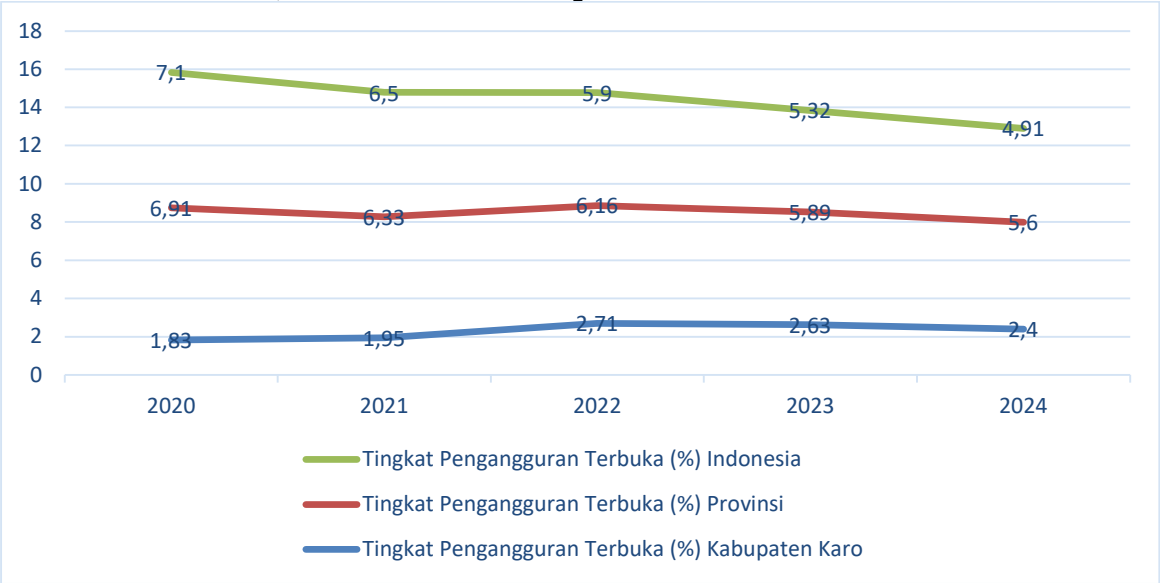


Sumber: BPS, 2024

F. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo termasuk pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara.

Grafik 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka
Nasional, Provinsi dan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Grafik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Karo memiliki TPT yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia. Selain itu Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo merupakan pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Jika dilihat dari sektor pekerjaan, dominan penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian hal ini sejalan dengan kontribusi sektor pertanian memiliki peran dominan terhadap perekonomian daerah, sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun masih ada yang bekerja sebagai pekerja keluarga. Angkatan kerja yang bekerja masih dominan memiliki pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Dasar.

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kualitas tenaga kerja belum sesuai dengan dengan permintaan pasar (keterbatasan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja, kurangnya akses terhadap pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha, kurangnya keahlian dan kompetensi digital), sistem perlindungan tenaga kerja yang belum optimal, sarana dan prasarana ketenagakerjaan masih kurang, belum optimalnya iklim ketenagakerjaan termasuk penerapan upah minimum serta informasi pasar kerja, pengangguran terselubung akibat migrasi masuk, belum optimalnya penciptaan wirausaha baru. Hal tersebut dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang belum optimal. Produktivitas tenaga kerja yang rendah menjadi hambatan utama dalam mencapai pertumbuhan

ekonomi yang baik serta berkelanjutan. Untuk itu peningkatan kompetensi tenaga kerja harus terus ditingkatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja. Dengan peningkatan kompetensi ini diharapkan tenaga kerja juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat memberi peluang kerja bagi tenaga kerja lainnya sehingga akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi yang lebih baik.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026

Target indikator makro ekonomi regional Kabupaten Karo yang ingin dicapai pada tahun 2026 sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi internasional, nasional, regional dan internal Kabupaten Karo. Sesuai target pembangunan yang dimuat dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029, maka pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target indikator sasaran dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Produksi dan produktivitas yang berkualitas sektor pertanian dan perikanan serta sektor lainnya yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal, arah kebijakan yaitu:
 - a. Penguatan sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi dan implementasi IPTEKIN yang ramah lingkungan. Arah kebijakan ini bertujuan untuk transformasi pengelolaan dari tradisional ke modern menggunakan teknologi baru secara berkelanjutan antara lain meliputi akselerasi *smart farming* dan digitalisasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sektor pertanian dan perikanan dan penguatan kelembagaan, intensifikasi melalui pemanfaatan IPTEKIN meliputi antara lain pengelolaan media tanam, input pertanian yang intensif berbasis IPTEKIN yang ramah lingkungan, infrastruktur yang efisien dan modern, dll, implementasi teknologi pasca panen (pergudangan, *solar dryer*, *cornsheller*, *Agro-industry* dll), modernisasi budidaya perikanan, peningkatan distribusi/akses pasar domestik/global.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana yang unggul serta infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta sektor lainnya yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal, Arah kebijakan bertujuan antara lain Penyediaan bibit/benih dan varietas unggul, pengembangan pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, penguatan alat dan mesin pertanian, *Demonstration Plot* (Demplot) dan sekolah lapang, pembangunan/pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, sistem drainase jalan usaha tani, jembatan/jalan penghubung ke sentra produksi pertanian dan perikanan, fasilitas/sarana pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia sektor pertanian dan perikanan baik kapasitas individu maupun kelembagaan serta terus Mendukung keberlanjutan usaha tani dan adopsi teknologi melalui regenerasi petani, arah kebijakan bertujuan antara lain peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan pembudi daya ikan, Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan ekonomi petani dan perikanan mencakup model korporasi berbasis koperasi, BUMDes Agro atau *holding* usaha tani dan perikanan, regenerasi sumber daya manusia pertanian dan perikanan.
 - d. Peningkatan Pengembangan pertanian dan perikanan yang berkelanjutan serta meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan sektor pendukung, arah kebijakan bertujuan antara lain untuk Penerapan Integrated *Eco Farming*, penguatan kolaborasinya dengan dunia usaha, bank, akademisi, lembaga riset, asuransi pertanian dan asuransi perikanan, Pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan mendukung ekonomi hijau.
- 2) Penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan sumber daya manusia, dengan arah kebijakan:
- a. Penguatan ekonomi desa dan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Tujuan arah kebijakan ini mendorong kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi potensi lokal, membangun ekosistem kewirausahaan berbasis komunitas dan sumber daya lokal. Diharapkan hal ini berdampak bertambahnya unit usaha produktif yang dikelola warga desa, meningkatnya pendapatan wirausaha desa dan tumbuhnya produk unggulan desa.
 - b. Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan responsif. Tujuan arah kebijakan ini mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, terbuka, dan akuntabel, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, mendorong pelayanan publik desa yang cepat, tepat, dan berpihak pada kebutuhan warga dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan korupsi di tingkat desa.
 - c. Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas desa. Tujuan arah kebijakan ini meningkatkan konektivitas dan mobilitas warga desa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan wilayah antara desa dan kota, mempercepat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi logistik dan mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif di pedesaan.
- 3) Pengembangan UMKM, koperasi, kewirausahaan, industri kreatif melalui pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing, arah kebijakan yaitu:
- a. Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda dan perempuan yang inklusif dan berkelanjutan, Penguatan kapasitas kewirausahaan melalui akses modal, pelatihan, dan pendampingan usaha

- b. Peningkatan produktivitas dan daya saing usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM dan koperasi secara menyeluruh melalui strategi pendampingan intensif, peningkatan inovasi, perluasan jaringan usaha, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan akses terhadap pasar dan pembiayaan, memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah melalui pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh, mulai dari proses produksi, pemasaran, hingga pengelolaan usaha.
 - c. Meningkatkan Pemasaran berbasis teknologi dan Mengembangkan pola kemitraan pelaku UMKM dan Koperasi dengan pelaku usaha besar dan stakeholders terkait, Arah kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sinergi antara industri besar, startup, dan UMKM dalam rangka memperkuat rantai nilai dan mendorong inovasi usaha
 - d. Penguatan peran dan daya saing pelaku ekonomi kreatif, arah kebijakan bertujuan antara lain Penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas, akses, kolaborasi dan perlindungan hukum terhadap karya dan pelaku ekonomi kreatif.
- 4) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan arah kebijakan mencakup antara lain meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran, pengendalian belanja serta evaluasi kinerja keuangan daerah, Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah, penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, pengembangan sistem informasi keuangan daerah. Melalui arah kebijakan tersebut diharapkan Kabupaten Karo terus memperoleh Opini Badan Pemeriksa Keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel, selain itu tingkat serapan APBD dapat direalisasikan secara efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka implementasi sistem anggaran berbasis kinerja, aset daerah dapat terkelola dengan baik dan dimanfaatkan dengan aktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.
- 5) Peningkatan pendapatan daerah dengan arah kebijakan mencakup antara lain mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, Inovasi dalam peningkatan pendapatan alternatif, memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, penguatan sistem pemungutan pajak, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD. Kebijakan tersebut tentunya didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Arah kebijakan peningkatan pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah secara mandiri dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat serta dapat mendukung belanja pembangunan yang lebih berkualitas.

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karo tahun 2026 tetap memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian global dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut dan sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 maka kebijakan pembangunan Kabupaten Karo tahun 2026 diarahkan tetap mengoptimalkan pembangunan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 2) Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal;
- 3) Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat;
- 4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- 5) Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
- 6) Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata;
- 7) Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan;
- 8) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- 9) Peningkatan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah; dan
- 10) Perwujudan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Karo tahun 2026 secara berkelanjutan diupayakan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas SDM; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah; meningkatkan nilai ekspor perdagangan; meningkatkan jumlah investasi dengan memberikan daya tarik investasi; mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, meningkatkan penanganan sektor kesehatan, Pendidikan /pelayanan dasar serta meningkatkan peran digitalisasi terhadap sektor ekonomi. Kebijakan tersebut direncanakan untuk mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi sesuai dengan keunggulan dan potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Karo..

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah serta didasarkan pada kondisi perekonomian daerah dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang dilakukan dalam pemantapan ekonomi antara lain:

1. Melanjutkan sinergisitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekonomi lokal yang potensial yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan ketimpangan.;
2. Terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan/mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial dan strategis;
3. Menyediakan infrastruktur secara merata, memadai dan berkualitas untuk menunjang pemerataan pertumbuhan wilayah dan distribusi ekonomi daerah termasuk di wilayah yang strategis;
4. Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
6. Meningkatkan pertumbuhan nilai tambah yang bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan bibit unggul, teknologi tepat guna, meningkatkan aktivitas pasca panen melalui upaya mendorong dan pengembangan industri-industri mikro, kecil dan menengah serta UMKM pengolah hasil pertanian;
7. Mendorong peran lapangan usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya dengan upaya mendorong peningkatan nilai tambah;
8. Melakukan inovasi dan pemanfaatan ilmu teknologi pada aktivitas perekonomian dan pelayanan publik; dan
9. Melanjutkan reformasi birokrasi pelayanan publik serta penguatan regulasi yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan perekonomian daerah.

Selain hal tersebut dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Toba dan sekitarnya dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo, Sebagai salah satu kabupaten di Kawasan Danau Toba dan Mebidangro, diharapkan mengambil peran dalam pengembangan Kawasan tersebut hampir sama dengan daerah lainnya. Dukungan pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pembangunan Kabupaten Karo terus didorong dan diupayakan sehingga dapat mengoptimalkan nilai ekonomi dan dampak positif terhadap masyarakat, bisnis dan daerah.

Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada perekonomian Kabupaten Karo, maka dengan mencermati capaian pada tahun 2024 dan proyeksi indikator makro Kabupaten Karo Tahun 2026 pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029, selanjutnya diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi Kabupaten Karo tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tren Capaian dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,22	5,00-5,50
2	PDRB per kapita	Rp Juta	67,69	73,64
3	Kontribusi PDRB Provinsi	persen	2,52	2,53
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,37	6,00-5,00
5	Rasio Gini	Rasio	0,214	0,212-0,210
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,49	80,00-80,20
7	Penurunan Emisi GRK	(ton CO2eq)	N/A	149.351,20
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	72,21	79,40
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2,4	2,33-1,86

Sumber: Hasil Fasilitasi RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu mewujudkan pemerataan pembangunan, memberikan pelayanan publik, menggerakkan aktifitas perekonomian dan menstimulasi peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya. Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan dan pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal) merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi.

Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud telah diatur menurut kewenangan yang diserahkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih pendanaan dan menjamin ketersediaan pendanaan suatu urusan pemerintahan khususnya yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah.

Mengedepankan hal tersebut, melalui Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Pemerintah telah meletakkan dasar-dasar penyempurnaan dan penguatan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan bernegara diantaranya melalui sinergi kebijakan fiskal nasional. Sinergi kebijakan fiskal nasional merupakan proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyerasikan, dan/atau menyesuaikan kebijakan fiskal antara Pemerintah dengan

Pemerintahan Daerah di dalam pengelolaan dan pengaturan pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara dan Daerah untuk menjalankan fungsi alokasi dan distribusi dalam rangka menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah diantaranya melalui penyelarasan tahap perencanaan dan penganggaran dengan dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). KEM-PPKF berisi skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah dalam perumusan perencanaan dan panganggaran.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dengan kata lain, keuangan daerah sebagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud diwujudkan dalam APBD setiap tahunnya. Untuk itu, arah kebijakan keuangan daerah yang didalamnya meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, disusun guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan setiap dana yang ada dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran dan memperhatikan azas pemerataan dan keadilan. Menyikapi hal tersebut, secara umum kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karo untuk 2026 diarahkan pada:

- a. Meningkatkan penerimaan daerah dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial dan strategis; dan
- b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran belanja daerah yang berkualitas yang dapat ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Pendapatan daerah yang akan membentuk tingkat kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pendanaan pembangunan dan aktivitasnya.

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum penerimaannya. Proyeksi pendapatan tahun anggaran 2026 disusun merujuk pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 dengan *baseline* proyeksi pendapatan tahun 2025 dengan mempertimbangkan tren realisasi

tahun tahun sebelumnya. Dalam penentuan proyeksi, kebijakan perencanaan pendapatan daerah dilakukan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan berdasarkan analisis realisasi tahun-tahun sebelumnya dan asumsi penentuan proyeksi PAD menurut rincian objek pendapatan disusun berdasarkan instrument yang memuat potensi, tarif, maupun analisa pertumbuhan dari masing-masing SKPD pengelola PAD;
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa, diproyeksikan sebesar alokasi Tahun Anggaran 2025. Khusus untuk perencanaan penganggaran DAK FISIK dirujuk berdasarkan rencana/usulan dengan memperhatikan tren penganggaran tahun sebelumnya. Selanjutnya penyesuaian TKDD defenitif setelah ditetapkannya informasi resmi besaran TKDD dari Kementerian Keuangan;
3. Transfer antar daerah, diproyeksikan sebesar alokasi Tahun Anggaran 2025 dan dilakukan penyesuaian setelah ditetapkannya APBD Provinsi Sumatera Utara;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksi mengalami peningkatan dengan asumsi pertumbuhan rata rata berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan akan disesuaikan berdasarkan ketentuan formulasi potensi penerimaan Dana Kapitasi JKN menurut jumlah kepesertaan pada FKTP.

Untuk optimalisasi pencapaiannya maka arah kebijakan pendapatan pada tahun 2026 pada dokumen ini adalah:

- 1) Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang.
- 2) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, inovasi dalam peningkatan pendapatan alternatif, memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, penguatan sistem pemungutan pajak, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai Peraturan Daerah terkait PAD.
- 3) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah pada perangkat daerah penghasil.
- 5) Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam perolehan dana transfer pemerintah pusat dan dana desa;

- 7) Percepatan pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran serta pemenuhan persyaratan pengajuan penyaluran dana transfer
- 8) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam perolehan dana transfer bagi hasil dan bantuan keuangan serta perolehan Opsen Pajak;
- 9) Keterlibatan secara aktif seluruh potensi sumberdaya manusia, dalam optimalisasi sumber-sumber keuangan daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik. Sumber-sumber keuangan dimaksud selain berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga swadaya masyarakat serta kerjasama sinergis dengan dunia swasta.

Berkaitan dengan arah kebijakan pendapatan daerah dimaksud, kebijakan umum transfer ke daerah sebagaimana yang dituang dalam KEM – PPKF dalam rangka penguatan Transfer ke daerah (TKD) berbasis kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan;
2. Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*;
3. Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan;
4. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.

Selanjutnya, strategi penguatan pendapatan daerah yang diarahkan dalam dalam KEM – PPKF yakni : Pertama, optimalisasi pemungutan PDRD khususnya melalui PKB, opsen PKB dan PBB-P2; Kedua, penguatan tata kelola perpajakan daerah melalui modernisasi administrasi perpajakan daerah, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah; Ketiga, sinergi pemungutan PDRD antar pemerintah daerah; Keempat, penguatan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah; Kelima, penetapan target pertumbuhan PDRD harus berbasis data potensi penerimaan PDRD dan selaras dengan kondisi makroekonomi daerah; dan Keenam, pemetaan potensi PDRD yang belum dioptimalkan.

Berdasarkan kebijakan proyeksi pendapatan sebagaimana dijelaskan diatas, Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2026 digambarkan sebagaimana tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2023 s.d Tahun 2027

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Anggaran Tahun 2025	Proyeksi/Target pada Tahun 2026	Proyeksi/Target pada Tahun 2027
4	PENDAPATAN DAERAH	1.426.392.533.987	1.445.665.730.282	1.463.451.165.376	1.452.958.237.612	1.495.096.784.990
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103.440.404.582	105.349.287.215	156.000.124.450	160.516.348.318	165.882.448.380
4.1.01	Pajak Daerah	58.674.293.730	61.540.045.940	101.353.011.918	108.253.011.918	111.779.805.532
4.1.02	Retribusi Daerah	12.718.576.707	33.697.123.306	40.250.280.000	43.093.336.400	43.534.702.848
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.528.115.366	2.624.980.943	5.000.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.519.418.780	7.487.137.026	9.396.832.532	5.670.000.000	5.567.940.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.307.290.443.055	1.323.732.110.577	1.290.395.908.055	1.273.686.799.055	1.310.185.422.054
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.216.931.473.033	1.257.891.004.053	1.239.525.087.000	1.222.815.978.000	1.257.625.689.740
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.007.447.897.033	1.039.760.510.053	1.035.152.572.000	1.025.152.572.000	1.057.926.350.658
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.843.932.163	25.748.210.000	23.882.085.000	23.882.085.000	24.763.333.937
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	713.665.458.000	752.945.824.000	766.475.108.000	766.475.108.000	784.487.273.038
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	100.719.686.844	101.278.750.464	60.150.079.000	50.150.079.000	62.147.061.623
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	165.218.820.026	159.787.725.589	184.645.300.000	184.645.300.000	186.528.682.060
4.2.01.05	Dana Desa	203.762.583.000	205.413.540.000	197.663.406.000	197.663.406.000	199.699.339.082
4.2.01.06	Insentif Fiskal	5.720.993.000	12.716.954.000	6.709.109.000	0	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.358.970.022	65.841.106.524	50.870.821.055	50.870.821.055	52.559.732.314
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	82.346.029.911	65.841.106.524	50.870.821.055	50.870.821.055	52.559.732.314
4.2.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.012.940.111	0	0	0	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.661.686.350	16.584.332.490	17.055.132.871	18.755.090.239	19.028.914.556
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.661.686.350	16.584.332.490	17.055.132.871	18.755.090.239	19.028.914.556
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.661.686.350	16.584.332.490	17.055.132.871	18.755.090.239	19.028.914.556

Sumber: RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dengan memperhatikan pendapatan daerah yang terbatas harus diarahkan kepada Prioritas Pembangunan Daerah yang telah digariskan pada dokumen RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

dengan tetap memperhatikan isu strategis dan permasalahan terkini. Arah kebijakan belanja daerah dioptimalkan dengan langkah :

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) dengan mengedepankan relevansi untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Karo yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib nonpelayanan dasar dan urusan pilihan serta unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 3) Mendanai 19 (sembilan belas) prioritas pembangunan daerah dan 9 (sembilan) program strategis daerah atau Program Hasil Terbaik Cepat/PHTC yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029;
- 4) Pendanaan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan usulan musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah melalui penelaahan dan perhitungan kapasitas riil keuangan daerah;
- 5) Pemenuhan kewajiban daerah untuk mendanai program dan kegiatan yang bersifat "*mandatory*" atau yang telah ditentukan dan diwajibkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional.
- 6) Belanja daerah disinkronisasikan dan diharmonisasikan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan/strategis nasional, pokok-pokok kebijakan fiskal nasional, maupun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.
- 7) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif berdasarkan kebutuhan riil.
- 8) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah yang disusun secara agregat membentuk pagu anggaran program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan. Memperhatikan penjabaran untuk tahun berkenaan dari RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029, dan estimasi kebutuhan belanja yang relevan untuk mencapai target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan, maka gambaran rencana/estimasi belanja Kabupaten Karo seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2023 s.d Tahun 2027

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Anggaran Tahun 2025	Proyeksi/Target pada Tahun 2026	Proyeksi/Target pada Tahun 2027
5	BELANJA DAERAH	1.431.501.392.744	1.524.844.149.888	1.481.239.644.849	1.444.715.181.212	1.489.708.784.990
5.1	BELANJA OPERASI	934.206.103.692	1.017.870.013.586	1.026.035.696.869	999.000.412.135	1.014.691.731.098
5.1.01	Belanja Pegawai	577.278.319.838	622.939.163.784	654.688.170.632	647.124.818.354	626.452.464.425
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.529.158.087	343.502.153.763	348.501.733.491	330.329.801.035	366.325.040.871
5.1.05	Belanja Hibah	43.398.625.767	51.428.696.039	22.845.792.746	21.545.792.746	21.914.225.802
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		-			
5.2	BELANJA MODAL	214.008.503.256	214.619.621.202	163.653.626.876	153.859.424.773	178.077.482.361
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	193.476.000	3.464.550.812	3.464.550.812	3.351.128.353
5.4	BELANJA TRANSFER	283.286.785.796	292.161.039.100	288.085.770.292	288.390.793.492	293.588.443.178

Sumber: Ranhir RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029
*Rincian belanja bersifat proyeksi, karena belanja pada dokumen RKPD ini belum berbasis rincian

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman dan Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pada kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam KUA ini, pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp8.243.056.400 untuk penyertaan modal pada BUMD. Adapun penyertaan modal dimaksud direncanakan untuk tambahan modal pada PT Bank Sumut sebesar Rp1.122.420.000,00. Selain itu penyertaan modal juga direncanakan untuk dukungan penguatan PDAM Tirta Malem. Untuk lebih rinci proyeksi pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2023 s.d Tahun 2027

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Anggaran Tahun 2025	Proyeksi/Target pada Tahun 2026	Proyeksi/Target pada Tahun 2027
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	102.027.755.584	96.777.470.943	17.788.479.473	0	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	102.027.755.584	96.777.470.943	17.788.479.473	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	2.800.000.000	0	8.243.056.400	5.388.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	2.800.000.000	0	8.243.056.400	5.388.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	102.027.755.584	93.977.470.943	17.788.479.473	-8.243.056.400	-5.388.000.000

Sumber: Rambah RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Indikator-indikator kinerja beserta target setiap program, kegiatan dan subkegiatan dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur walaupun masih **bersifat indikatif**. Penyusunan RKPD ini mengacu pada kondisi pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2024 serta perkiraan pada tahun 2025 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Visi Pembangunan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Visi kepala dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan daerah atau kondisi yang ingin dicapai pada masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita yang ingin diraih di masa depan. Terdapat tujuan yang dilengkapi dengan target-target yang akan dicapai. Dalam RPJMD Kabupaten Karo ini, visi yang disajikan sesuai dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tertulis pada persyaratan ketika mendaftar di KPU. Perumusan visi ini juga dengan memperhatikan capaian pembangunan 5 (lima) tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo (RPJPD) Tahun 2005-2025. Hal ini sangat penting untuk terciptanya pembangunan Kabupaten Karo yang berkelanjutan dan tepat pada pemecahan permasalahan yang ada.

Merujuk pada pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Serta

merujuk pada pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Berpedoman kepada hal tersebut, maka visi pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 adalah:

“MEWUJUDKAN KARO BERIMAN, KARO BERBUDAYA, KARO MODERN, KARO UNGGUL DAN KARO SEJAHTERA MENUJU INDONESIA EMAS”

Visi pembangunan daerah di atas telah mempedomani visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 yaitu *“Kabupaten Karo Mejuah-juah, Maju dan Berkelanjutan”* dimana periode RPJMD ini adalah periode pertama pada RPJPD tersebut. Periode pertama (tahun 2025-2029) pembangunan Kabupaten Karo berfokus pada penguatan pondasi transformasi.

Pada tahap ini, pembangunan akan diarahkan penguatan pondasi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan ketahanan sosial budaya serta ekologi. Dalam upaya mewujudkan transformasi, pemerintah akan melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam program pemerintah untuk meningkatkan pondasi pembangunan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dimulai dari jenjang paling bawah hingga ke atas. Demikian pula dengan kesehatan, pemerintah akan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Transformasi ekonomi juga tercipta dengan dorongan peningkatan IPTEKIN dan peningkatan produktivitas ekonomi melalui pemanfaatan sektor-sektor unggulan, peningkatan nilai tambah/hilirisasi, peningkatan sektor industri maupun peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam penguatan pondasi transformasi, pemerintah juga akan berbenah dengan meningkatkan manajemen ASN untuk membangun karakter pemerintahan yang profesional serta infrastruktur sistem pelayanan publik dengan harapan akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, bersih, transparan, dan akuntabel.

Penjelasan atas muatan visi pembangunan Kabupaten Karo selama 5 (lima) tahun tersebut adalah :

- ✓ **Karo Beriman** merupakan komitmen mendalam dari Pemerintah Kabupaten Karo untuk menjadikan nilai-nilai spiritualitas sebagai landasan utama dalam membentuk karakter masyarakat yang berintegritas, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral universal. Dalam konteks ini, spiritualitas bukan hanya sekedar keyakinan pribadi, tetapi sebagai pedoman kolektif dalam kehidupan

sehari-hari, yang mengarahkan interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan tata kelola pemerintahan. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang penuh kedamaian, saling menghargai, dan berbasis pada etika yang kokoh. Visi ini mendukung prinsip-prinsip yang terkandung dalam RPJMN yang mengutamakan penguatan Ideologi Pancasila sebagai pilar dalam pembentukan masyarakat yang berintegritas dan mampu mengelola keberagaman untuk keberlanjutan pembangunan nasional.

- ✓ **Karo Berbudaya** adalah tekad Pemerintah Kabupaten Karo untuk memelihara dan mengembangkan budaya lokal sebagai identitas yang memperkuat ikatan sosial dan rasa bangga masyarakat. Warisan budaya yang meliputi tradisi, adat istiadat, serta seni lokal tidak hanya dipandang sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai sumber potensi kreatif yang dapat memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan pemanfaatan budaya sebagai landasan pembangunan, Kabupaten Karo berupaya membentuk masyarakat yang inovatif, adaptif, dan bangga akan warisan leluhur. Visi ini sejalan dengan RPJMN yang menjadikan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian budaya sebagai prioritas, untuk menciptakan masyarakat yang tangguh, kreatif, dan mampu bersaing dalam kancah nasional maupun internasional.
- ✓ **Karo Modern** menggambarkan visi Pemerintah Kabupaten Karo untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah yang adaptif terhadap perubahan zaman dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam setiap dimensi pembangunan. Modernisasi yang dijalankan dalam aspek pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur berbasis teknologi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Transformasi digital ini memastikan pemerataan manfaat teknologi di seluruh lapisan masyarakat, menjadikan setiap individu sebagai bagian dari masyarakat yang berdaya dan berkembang. Visi ini mendukung RPJMN yang menekankan pentingnya konektivitas dan digitalisasi sebagai sarana untuk mempercepat proses modernisasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
- ✓ **Karo Unggul** adalah inisiatif Pemerintah Kabupaten Karo untuk memaksimalkan potensi daerah dengan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM. Dalam upaya ini, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta kebijakan yang berbasis pada peningkatan produktivitas menjadi prioritas utama. Tujuan dari visi ini adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, inovatif, dan kompetitif, siap menghadapi tantangan global. Visi ini juga sejalan dengan RPJMN yang mengutamakan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

- ✓ **Karo Sejahtera** adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Karo untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, keadilan sosial, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi akan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, pelestarian lingkungan, serta mitigasi risiko bencana, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Visi ini mendukung RPJMN yang mengedepankan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan sebagai pilar utama untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan ketahanan sosial, guna menciptakan masyarakat yang sejahtera, berwawasan lingkungan, serta berdaya tahan dalam menghadapi tantangan masa depan.
- ✓ **Menuju Indonesia Emas** menggambarkan Kabupaten Karo tidak hanya berkembang sebagai entitas lokal yang adaptif dan kompetitif, tetapi juga berperan sebagai katalis yang mendukung terciptanya ekosistem pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia memiliki cita-cita besar untuk menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dan Kabupaten Karo berkomitmen untuk menjadi bagian integral dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Setiap keunggulan daerah akan menjadi simpul kekuatan yang memperkuat fondasi bangsa, dengan mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat sektor unggulan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga berkontribusi pada kemajuan Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.

Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 yang mengusung Mewujudkan Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, Karo Unggul, dan Karo Sejahtera merupakan langkah konkret yang mendukung pencapaian visi jangka panjang RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045, yaitu *Karo Mejuah-juah, Maju, dan Berkelanjutan*. Melalui berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat aspek spiritual, budaya, teknologi, dan ekonomi, RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 menyiapkan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman, sehingga mendukung tercapainya keseimbangan dan kemajuan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 berperan penting sebagai landasan bagi kemajuan Kabupaten Karo dengan mengedepankan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan, berdaya saing tinggi, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan komitmen ini, RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 memastikan bahwa tujuan jangka menengah akan memperkuat fondasi yang kokoh untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, menjadikan Kabupaten Karo sebagai wilayah yang *mejuah-juah*, majudan berkelanjutan.

4.1.2. Misi Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah **“MEWUJUDKAN KARO BERIMAN, KARO BERBUDAYA, KARO MODERN,**

KARO UNGGUL DAN KARO SEJAHTERA MENUJU INDONESIA EMAS”

dengan memperhatikan capaian pembangunan periode sebelumnya peluang dan tantangan di masa mendatang, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan roda pemerintahan yang profesional, bersih, efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik;
2. Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing melalui adanya sekolah unggulan dan rumah pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik;
6. Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, mendorong kewirausahaan, industri kreatif serta sentra produksi memanfaatkan potensi pertanian, dan pariwisata;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital mempercepat pembangunan daerah; dan
9. Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke Daerah untuk mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia Emas.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi dan misi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam pencapaian visi dan misi harus dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai strategi dan arah kebijakan yang didukung oleh program pembangunan yang jelas dan terukur, sehingga setiap program yang dijalankan saling mendukung untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran dengan target terukur.

Dari 9 (sembilan) misi pembangunan Kabupaten Karo tersebut, dirumuskan ke dalam 10 (sepuluh) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan ini menekankan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan, yaitu bagaimana pemerintahan diselenggarakan agar berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan profesional. Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Tujuan akhir dari peningkatan tata kelola ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang dipercaya masyarakat, yang mampu melayani dengan baik dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan antara lain penerapan e-government untuk pelayanan administrasi publik, sistem pengaduan masyarakat online yang transparan, reformasi birokrasi dengan sistem merit dalam perekrutan ASN serta peningkatan kapasitas dan pelatihan pegawai negeri secara berkelanjutan.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dicapai dengan sasaran pembangunan berikut:

- 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- 2) Meningkatnya layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tujuan 2: Terwujudnya masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal.

Tujuan ini berfokus pada pembangunan karakter dan jati diri bangsa dengan menyeimbangkan antara nilai-nilai keagamaan, toleransi antarumat, dan warisan budaya. Masyarakat yang religius dan berbudaya akan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan berkeadaban. Masyarakat yang religius menunjukkan masyarakat yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup yang didorong melalui pendidikan agama, kegiatan keagamaan, dan penguatan peran lembaga keagamaan serta mendorong sikap jujur, adil, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat yang berbudaya menunjukkan masyarakat yang mencintai, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Budaya dijadikan kekuatan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan daya saing global. Pelestarian budaya dan kearifan lokal dengan menjaga dan mengembangkan identitas lokal seperti bahasa daerah, seni tradisional, upacara adat, serta sistem nilai

lokal. Kearifan lokal juga bisa menjadi solusi dalam menghadapi masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi secara kontekstual.

Terwujudnya masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal dicapai dengan sasaran pembangunan terwujudnya masyarakat yang berbudaya, modern dan religius.

Tujuan 3: Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat.

Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan sistem layanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan medis secara optimal, dengan akses yang mudah, biaya yang terjangkau, dan koordinasi yang baik antar fasilitas dan program kesehatan, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang sehat secara fisik dan mental, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang tinggi dapat dicapai melalui peningkatan mutu layanan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah, perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS, penerapan sistem rekam medis digital terintegrasi antar fasilitas kesehatan dan program promotif dan preventif seperti Posyandu, imunisasi, cek kesehatan gratis. Hal ini juga berdampak pada peningkatan produktivitas nasional dan pengurangan beban negara terhadap biaya kesehatan jangka panjang serta terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat.

Untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat dicapai dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup.

Tujuan 4: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tujuan ini berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, yaitu pertanian dan pariwisata, dengan pendekatan yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional, maupun internasional dengan menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memperoleh penghasilan yang lebih baik, memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan serta terciptanya lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta pengurangan angka kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan atau daerah dengan potensi pariwisata dan pertanian.

Tujuan pembangunan ini juga tidak terlepas dari pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian dan pariwisata. Pengembangan sektor pertanian dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian melalui teknologi, bibit unggul, penguatan SDM petani/pelatihan petani, dan infrastruktur irigasi, mengembangkan hilirisasi produk pertanian, seperti pengolahan hasil panen menjadi produk jadi serta

mendorong akses pasar yang lebih luas bagi petani, termasuk digitalisasi pasar (e-commerce produk pertanian) dan pembentukan/peningkatan peran BUMD/BUMDes maupun koperasi, dan lain lain. Pengembangan Sektor Pariwisata dengan mengembangkan potensi wisata alam, budaya, dan buatan yang dimiliki daerah secara profesional, meningkatkan kualitas destinasi wisata, infrastruktur pendukung (akses jalan, sanitasi, akomodasi), serta kapasitas SDM pariwisata serta memajukan ekowisata dan wisata berbasis komunitas agar masyarakat lokal menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton.

Selain itu, tujuan pembangunan ini juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata harus mampu berdaya saing dan berkelanjutan. Produk dan layanan di sektor pertanian dan pariwisata mampu bersaing dari segi kualitas, harga, dan inovasi serta peningkatan branding, promosi, serta sertifikasi yang mendukung reputasi sektor tersebut. Pengelolaan sumber daya dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan dicapai dengan sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk berbasis sumber daya lokal
- 2) Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau
- 3) Penguatan stabilitas ekonomi daerah.

Tujuan 5: Terwujudnya SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Tujuan pembangunan ini menitikberatkan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Karo yang berkualitas, memiliki keterampilan, etos kerja, dan karakter yang baik. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDM Kabupaten Karo yang Unggul dimaknai dengan masyarakat Karo memiliki kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan zaman yang didorong melalui akses pendidikan yang merata, berkualitas, dan berorientasi pada teknologi dan inovasi termasuk pula penguatan nilai-nilai lokal (kearifan budaya Karo) yang membentuk karakter SDM yang berintegritas, disiplin, dan bermoral. Kabupaten Karo juga mampu bersaing di pasar kerja regional, nasional, maupun global didukung dengan pelatihan vokasi, pengembangan kewirausahaan, dan penguasaan teknologi informasi. Masyarakat memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi, seperti industri kreatif, pertanian modern, dan digitalisasi. Sehingga masyarakat menikmati pelayanan dasar yang layak, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata serta lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung kehidupan sosial yang harmonis.

Untuk mewujudkan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat dicapai dengan sasaran:

- a) Meningkatnya kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda;
- b) Terwujudnya kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni; dan
- c) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa.

Tujuan 6 : Meningkatnya lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata.

Tujuan pembangunan yang berbunyi "Meningkatnya lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata" menunjukkan arah pembangunan ekonomi yang berfokus pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan pengangguran, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan, dengan menggali potensi ekonomi daerah seperti pertanian dan pariwisata, melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), IKM (Industri Kecil dan Menengah), Kewirausahaan dan Industri kreatif.

Tujuan pembangunan ini pada akhirnya akhirnya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, IKM, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata dicapai dengan sasaran meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja.

Tujuan 7 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dan strategis dan menjamin kualitas dan keandalan layanan infrastruktur (jalan, air bersih, listrik, internet, transportasi, dsb) dan memastikan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan prinsip keadilan dan kelestarian lingkungan. Infrastruktur yang baik menjadi pondasi penting bagi mobilitas, konektivitas, pelayanan publik, dan investasi.

Untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan dicapai dengan sasaran:

1. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman; dan
3. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau.

Tujuan 8 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Tujuan pembangunan yang berbunyi “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana” menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam, sekaligus membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Tujuan ini mencakup dua aspek utama pembangunan berkelanjutan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan agar tetap sehat, lestari, dan mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Masyarakat berketahanan bencana dengan peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam mencegah, merespons, dan memulihkan diri dari bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran hutan, dan erupsi gunung api.

Dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dicapai dengan sasaran:

- a) Terwujudnya kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan
- b) Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana

Tujuan 9 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah.

Tujuan pembangunan ini menekankan pentingnya transformasi digital dalam proses pembangunan, baik di bidang pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, ekonomi, maupun kehidupan masyarakat secara luas dengan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat utama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan pembangunan daerah dan pengembangan inovasi digital lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu tujuan ini juga mempercepat pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan melalui pendekatan berbasis digital.

Untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah dicapai Meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Tujuan 10 : Terwujudnya kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi.

Tujuan pembangunan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat agar arah pembangunan saling mendukung dan mencapai tujuan bersama. Pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian yang menyatu (terintegrasi) dalam kerangka besar pembangunan nasional dan provinsi. Setiap program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan daerah harus sejalan

dengan prioritas nasional dan provinsi, agar tercipta efisiensi, keselarasan, dan dampak yang lebih luas. Dengan kata lain, pembangunan daerah diarahkan untuk menjadi kontributor aktif dalam mewujudkan visi Indonesia dan provinsi kedepan.

Untuk mewujudkan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi dicapai dengan sasaran peningkatan kontribusi kinerja terhadap target nasional dan provinsi.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasarnya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intensifikasi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema “**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional. Untuk menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas

- nasional sebagai berikut:
- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
 - 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
 - 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
 - 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
 - 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
 - 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
 - 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Gambar 4.1
Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam menyusun RKPD tahun 2026 mengacu pada Tema RKP Tahun 2026 yaitu **“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”**. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing provinsi yang menjadi acuan Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Untuk Kabupaten/Kota 9 (sembilan) sasaran makro pembangunan nasional per masing-masing Kabupaten/Kota akan ditarget tersendiri.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah- langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Win*), disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat Nasional

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan istem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkn pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasisan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkanpembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sumber: Hasil Fasilitasi RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas Presiden dan 8 program hasil terbaik cepat, diidentifikasi beberapa Kegiatan

Prioritas Utama. Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RKP Tahun 2026. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya.

Tabel 4.2
Kegiatan Prioritas Utama Nasional

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
Prioritas Nasional 1	1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S)
Prioritas Nasional 2	2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema <i>spend to invest</i>
	3	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah
	4	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan
	5	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan
	6	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya
	7	Pembangunan pangan akuatik (<i>blue food</i>)
	8	Pembangunan pangan hewani
	9	Pembangunan pangan lokal dan nabati
	10	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
	11	Peningkatan penyediaan energi
	12	Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi
	13	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan
	14	Konservasi sumberdaya air
	15	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
	16	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS
	17	Pengembangan terpadu pesisir utara jawa
	18	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital
	19	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya
	20	Pengelolaan susut dan sisa pangan
	21	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
	22	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau
	23	Peningkatan kualitas ekosistem gambut
	24	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
	25	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
	26	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut
Prioritas Nasional 3	27	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya
	28	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital
	29	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas BorobudurYogyakarta-Prambanan
	30	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena
	31	Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba
	32	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
	33	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim
	34	Pengembangan koperasi sektor produksi
Prioritas Nasional 4	35	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini
	36	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas
	37	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
	38	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
	39	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, inservice training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
	40	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
	41	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
	42	Penurunan kematian ibu dan anak
	43	Pencegahan dan penurunan stunting
	44	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
	45	Penuntasan TBC
	46	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
	47	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
	48	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis
	49	Investasi pelayanan kesehatan primer
	50	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses
	51	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
	52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya
	53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi
	54	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
Prioritas Nasional 5	55	Pengembangan hilirisasi Nikel
	56	Pengembangan hilirisasi Tembaga
	57	Pengembangan hilirisasi Bauksit
	58	Pengembangan hilirisasi Timah
	59	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit
	60	Pengembangan hilirisasi Kelapa
	61	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut
	62	Pengembangan hilirisasi Kimia
	63	Pengembangan industri semikonduktor
	64	Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil
	65	Penguatan industri logam dasar, besi dan baja
	66	Pengembangan industri dirgantara
	67	Pengembangan KEK Sei Mangkei
	68	Pengembangan KIT Batang
	69	Pengembangan KI Weda bay
Prioritas Nasional 6	70	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
	71	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif
	72	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif
	73	Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara
	74	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
	75	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
Prioritas Nasional 7	76	Pencegahan tindak pidana korupsi
	77	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep <i>total reward</i> berbasis kinerja ASN
	78	Transformasi digital layanan publik prioritas
	79	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan
	80	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak
Prioritas Nasional 8	81	Penguatan karakter dan jati diri bangsa
	82	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
	83	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan lau

Sumber: Permendagri Nomor 10 Tahun 2025

Selain kegiatan prioritas utama, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 juga perlu memperhatikan Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama.

Proyek Strategis Nasional di rancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya program prioritas presiden Presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan nasional dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Daftar Proyek Strategis Nasional. PSN merupakan proyek yang memiliki nilai strategis tinggi dalam meningkatkan daya saing nasional, mempercepat pemerataan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang di pedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah PSN yang dilaksanakan tahun 2026, Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota wajib:

1. Mengintegrasikan pelaksanaan PSN yang berlokasi di wilayahnya ke dalam dokumen RKPD Tahun 2026 sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah.
2. Memastikan sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan daerah yang mendukung penyelesaian PSN.

3. Memberikan dukungan fasilitatif, seperti penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyelesaian permasalahan sosial, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder dalam rangka kelancaran pelaksanaan PSN.
4. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan PSN secara berkala kepada kementerian/lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah juga diharapkan mengoptimalkan peran PSN dalam mendorong penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan wilayah berbasis keunggulan lokal, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan PSN harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2026 harus memuat strategi dan langkah-langkah konkret dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

Selain itu arah kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai upaya pencapaian visi dan agenda prioritas pembangunan nasional, yang mencakup upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan berdaulat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan Program Strategis Nasional (ProSN), yang ditetapkan Presiden sebagai program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, serta berdampak luas terhadap pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Selanjutnya, hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2025 menjadi dasar penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah. Kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mengintegrasikan kebijakan sektoral, penguatan peran daerah dalam mendukung astas cita dan ProSN, serta mengarahkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar sejalan dengan tujuan strategis nasional dan pencapaian target pembangunan jangka menengah secara menyeluruh.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Selain itu penetapan target kinerja visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah RKPD tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dan mengacu pada RKP Tahun 2026.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut: Visi yang ingin dicapai yaitu **“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”**.

Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah;

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan; dan

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut di atas maka ditetapkan 6 (enam) Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Win*), yaitu:

1) Penyediaan SDM Unggul yang Siap Bekerja

Pemerintah memiliki peran kunci dalam membangun sumber daya manusia unggul dan siap kerja. Salah satu langkah besar yang diambil adalah memberikan akses dan jaminan keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat Sumatera Utara ke jenjang SMA/SMK.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian kurikulum SMA/SMK untuk memastikan pembelajaran yang lebih aplikatif dan relevan agar diperoleh peningkatan keterampilan teknis dan *soft skills* yang lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui jurusan – jurusan unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar kerja. Kehadiran Pemerintah diperlukan untuk melakukan kerjasama dengan sektor swasta melalui program magang, praktik kerja dan kepastian memperoleh jaminan pekerjaan khususnya pada siswa/I yang mempunyai prestasi. Selain berorientasi kepada pasar kerja, penyesuaian kurikulum juga perlu diimbangi dengan orientasi kepada pengembangan kreativitas dalam berwirausaha. Hal ini penting dalam menumbuhkan perekonomian, sehingga siswa juga perlu dibekali dengan kemampuan dasar untuk berkreasi dan berkomunikasi.

Akses beasiswa perlu diberikan kepada siswa SMA/SMK dan SLB yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan 13 tahun. Setiap sekolah juga diharapkan dapat mencetak atlet-atlet

unggul melalui pengembangan program olahraga andalan yang dirancang untuk meraih prestasi di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Prestasi olahraga ini dimulai dari pencarian bakat sejak dini, disertai dengan latihan intensif dan berkelanjutan. Pemerintah mendukung penuh dengan menyediakan pelatih berprestasi, menyelenggarakan kompetisi secara berkala, membangun karakter dan mental juara dalam rangka mendukung sumber daya manusia Sumatera Utara yang tangguh. Selain olahraga, dukungan untuk pengembangan seni, kreativitas, dan stimulan dalam berwirausaha dari siswa juga menjadi fokus. Pengembangan seni dan kreativitas dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pentas seni budaya dan kreasi, baik dalam bentuk pertunjukan seni budaya dan kreasi siswa berkolaborasi dengan pelaku seni lokal secara rutin, maupun dalam bentuk ajang kompetisi.

2) Peningkatan kualitas layanan, akses dan jaminan Kesehatan Gratis Bagi Seluruh Penduduk Sumatera Utara dalam rangka peningkatan Usia Harapan Hidup

Peningkatan kualitas layanan kesehatan akan diwujudkan melalui peningkatan kelas Rumah Sakit, ketersediaan Dokter Spesialis dan layanan kesehatan unggulan serta kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan.

Jaminan Kesehatan *Universal* (UHC) adalah sistem yang memastikan setiap orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus mengkhawatirkan biaya. UHC sangat penting untuk memberikan jaminan akses yang setara bagi semua orang, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga bisa mengurangi beban hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Lebih dari itu, UHC berperan besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Masyarakat yang sehat cenderung lebih produktif, sehingga mereka bisa bekerja lebih efisien dan memberikan kontribusi lebih besar pada perekonomian daerah. Dengan mengurangi beban penyakit dan meningkatkan produktivitas, UHC mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, UHC juga memperkuat kesiapan Sumatera Utara dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan, dengan sistem kesehatan yang lebih kokoh dan responsif terhadap wabah atau pandemi, sekaligus sebagai upaya peningkatan usia harapan hidup.

3) Peningkatan Produktivitas Pangan dan Kesejahteraan Petani

Peningkatan produktivitas pangan bisa dicapai melalui ketersediaan pupuk, bibit, teknologi pertanian dan infrastruktur yang berkualitas. Disamping itu, akses terhadap pembiayaan dan kredit dengan bunga rendah serta program asuransi pertanian membantu petani menjaga stabilitas penghasilan petani. Namun, produktivitas pangan juga harus diimbangi dengan sistem distribusi yang baik dan harga jual yang stabil. Selain petani, peningkatan kesejahteraan nelayan juga dilakukan melalui kebijakan yang meliputi akses teknologi perikanan modern, penguatan infrastruktur, pembiayaan, perlindungan sosial, dan diversifikasi pendapatan. Kebijakan ini sejalan dengan konsep ekonomi

biru yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan teknologi efisien dan ramah lingkungan, serta perlindungan ekosistem laut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan penghasilan nelayan sebagai upaya mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan pesisir, menciptakan peluang ekonomi baru dan ketahanan pangan nasional.

4) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Responsif, Lincah dan Memahami Kebutuhan

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan birokrasi yang cepat tanggap, fleksibel, adaptif terhadap regulasi, teknologi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan solusi dan layanan pembangunan yang tepat, segera, serta inovatif. Tata kelola yang mampu merespon secara cepat keluhan masyarakat, dan melakukan tindakan-tindakan efektif agar kebutuhan masyarakat atas layanan tidak terkendala. Peran efektivitas birokrasi sangat penting dalam mewujudkan keseluruhan misi provinsi, dengan memberikan kadar pengaruh yang sesuai dengan kebutuhan di tahun berjalan, demi percepatan penguatan SDM; ekonomi yang berdaya saing dan merata; infrastruktur yang berkualitas, estetik dan ramah lingkungan; serta penguatan ketahanan sosial dan budaya.

5) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Terhubung dan Ramah Lingkungan

Pemerintah Sumatera Utara terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang merata, terhubung, dan berkelanjutan melalui pendekatan yang menyeluruh dan strategis. Langkah ini tak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, jaringan listrik, rumah layak huni, sanitasi dan ketersediaan air bersih tetapi juga memastikan bahwa semua wilayah, termasuk daerah terpencil dan pedesaan dapat terhubung untuk memastikan kelancaran transportasi dan distribusi barang maupun jasa di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Infrastruktur kemantapan jalan, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas utama untuk memberikan jaminan pemerataan pembangunan. Melalui fokus prioritas pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menghubungkan wilayah perkotaan, pedesaan hingga daerah tertinggal serta memperlancar mobilitas barang dan manusia dari sentra-sentra produksi seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil menuju pasar-pasar besar dan pusat distribusi sehingga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Komitmen terhadap infrastruktur yang ramah lingkungan dan estetik serta mengadopsi teknologi hijau dan prinsip keberlanjutan melalui pemanfaatan teknologi hemat energi dan energi terbarukan. Gedung hijau dan sistem transportasi ramah lingkungan juga ditekankan untuk mengurangi jejak karbon dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

6) Meningkatkan Peran Desa dan Keterlibatan Masyarakat Untuk Menghasilkan Kemajuan Daerah

Meningkatkan peran desa dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi kata kunci untuk menciptakan kemajuan di seluruh daerah. Salah satu strategi efektif adalah mengembangkan potensi unggulan desa dan pariwisata yang berbasis pada kekayaan budaya dan kearifan lokal. Dengan mengenali dan memaksimalkan produk unggulan desa, seperti pertanian berbasis keunggulan lokal, kerajinan tangan yang unik, dan kuliner khas, desa dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ini tidak hanya meningkatkan ekonomi desa tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal.

Melalui pembentukan *role model* pengembangan desa diharapkan mampu menularkan praktik baik bagi desa-desa lainnya di wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya Pemerintah juga hadir memberikan pendampingan dan pelatihan dalam produksi, pemasaran, dan manajemen bisnis yang diberikan kepada masyarakat desa akan meningkatkan kualitas dan daya saing produk, baik di pasar lokal maupun internasional dan memperluas, hal ini juga meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal dengan lebih efektif. Pemberian insentif pada desa-desa yang memiliki kinerja baik diharapkan memacu setiap desa dapat melakukan percepatan pengembangan pembangunan pada wilayah masing-masing.

Di sisi lain, pengembangan desa wisata berbasis budaya, kearifan lokal dan alam dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang kuat. Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk peningkatan infrastruktur, pelatihan masyarakat dan promosi pariwisata, desa diharapkan dapat menarik wisatawan yang mencari pengalaman otentik. Tentunya hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan membuka peluang bisnis bagi usaha lokal seperti *homestay*, pemandu wisata, dan kuliner khas. Dengan pemasaran yang tepat dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal, kemajuan pembangunan di daerah dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa merusak aset alami dan budaya yang menjadi daya tarik utama serta melahirkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Antisipasi perihal pungutan liar di lokasi-lokasi wisata juga menjadi konsentrasi, agar segenap potensi wisata dan rangkaian kerja dari pemangku kepentingan dalam menggali potensi tersebut dapat berkembang menjadi nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Pencapaian Visi Misi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dilaksanakan dalam rangka mendukung Trisula Program Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu: Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang akan dilakukan dengan strategi pengembangan wilayah, pertumbuhan dan pemerataan, serta kolaborasi pembangunan daerah.

Selain itu pencapaian Visi Misi ini juga didukung dengan pelaksanaan 17 (tujuh belas) Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Program Prioritas Pembangunan
RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Program Prioritas
1.	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal <u>Bentuk Intervensi:</u>)/ Pembangunan dan Penyelenggaraan SMA/SMK Unggulan)/ Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Kurikulum Bermuatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE”)/ Pengembangan Minat Bakat Siswa melalui Event Lomba dan Pergelaran Seni, Budaya dan Olahraga Unggulan Daerah antar SMA/SMK dan MA)/ Penguatan Pengembangan Pusat Pelatihan dan Keterampilan serta Kerjasama Rekrutmen Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha - Dunia Industri
2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi <u>Bentuk Intervensi:</u>)/ Inkubasi Usaha untuk Perempuan dan Pemuda)/ Dukungan terhadap Pengembangan Prestasi Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas khususnya pada Bidang Seni, Budaya dan Olahraga)/ Pengembangan Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif
3	Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu <u>Bentuk Intervensi:</u>)/ Sistem Informasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Ketersediaan Dokter dan Layanan Pengaduan Kesehatan)/ Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis)/ Penuntasan Kasus TBC)/ Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Sentra Pelayanan Kesehatan dan RSUD Kab/Kota dengan Layanan Unggulan)/ Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi)/ Bapak Asuh dalam penurunan Gizi Buruk dan Prevelensi Stunting)/ Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSYAT))/ Pengembangan RS Haji Medan menuju RS berstandar Internasional
4	Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran <u>Bentuk Intervensi:</u>)/ MARIPRO (Masyarakat Rentan Produktif)
5	Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah <u>Bentuk Intervensi:</u>)/ INDHIRA (Industrialisasi dan Hilirisasi Sumatera Utara))/ SEMESTA (Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara))/ Reformasi, Efisiensi dan Penyesuaian Model Bisnis serta Tata Kelola BUMD)/ Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang stabil
6	Pengembangan ekonomi Hijau dan Biru <u>Bentuk Intervensi:</u>)/ Pengembangan Ekonomi Hijau)/ Pengembangan Ekonomi Biru
7	Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal <u>Bentuk Intervensi:</u>)/ Peningkatan Produktivitas Pangan)/ Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal) <u>Bentuk Intervensi:</u>)/ Pengembangan Ekosistem dan Destinasi Kepariwisata Holistik - 6A (Attraction, Accesibilities, Amenities, Available Package, Activities, Ancillary Service))/ Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya, Kearifan Lokal dan Alam
9	Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi <u>Bentuk Intervensi:</u>)/ Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis Digital
10	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan <u>Bentuk Intervensi:</u>)/ Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Program Prioritas
11	Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat <u>Bentuk Intervensi:</u> J Digitalisasi Layanan Publik
12	Infrastruktur Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Dan Irigasi Yang Langsung Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal <u>Bentuk Intervensi:</u> J Program PIJAR (Peningkatan Infrastruktur Jalan JembAtan dan IRigasi) J Pengembangan Kawasan Deli Sports City melalui Kerjasama Pembangunan Kawasan Ekonomi Produktif
13	Pengembangan Sistem Logistik Dan Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Daya Saing <u>Bentuk Intervensi:</u> J Peta Jalan Sentra Produksi Pertanian Sumatera Utara dalam rangka mendukung Sistem Logistik dan Transportasi untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Memperluas Akses Pasar bagi Produsen Lokal, termasuk Petani dan Pengusaha kecil. J Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan Kereta Commuter J Subsidi Transportasi untuk Pertanian Pakan dan Pangan J Dukungan Pengembangan Sistem Transportasi Daerah Terpencil dan Pedesaan
14	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana <u>Bentuk Intervensi:</u> J Konservasi Sumber Daya Alam J Pengurangan Emisi Karbon
15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa <u>Bentuk Intervensi:</u> J Program Membangun Desa Produktif Terpadu
16	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun <u>Bentuk Intervensi:</u> J Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran dan Empati)
17	Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib <u>Bentuk Intervensi:</u> J SUMUT BERSATU (Bersama, Aman, Tertib dan Unggul)

Sumber: Hasil Fasilitasi RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2026

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Suatu pritoritas pembangunan tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah dengan tahun rencana serta dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan aktual secara global, nasional maupun provinsi.

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan yang tidak lain merupakan kesepakatan dari seluruh pelaku pembangunan, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab isu strategis dan dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Untuk maksud tersebut maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan agar dapat memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Karo. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah

satu input bagi pengambilan kebijakan, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2026, kebijakan pembangunan provinsi tahun 2026, amanat standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dan dokumen perencanaan strategis lainnya.

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka perlu ditetapkan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan pemasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2024, perkiraan tahun 2025 dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi tahun 2026 dan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka tema pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2026 adalah ***“Implementasi dan Konsolidasi Program Strategis Daerah Menuju Kabupaten Karo yang Unggul dan Sejahtera”*** dengan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya dan merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 yaitu:

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 2) Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal;
- 3) Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatkannya kesehatan masyarakat;
- 4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- 5) Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatkannya kualitas hidup masyarakat;
- 6) Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata;
- 7) Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan;
- 8) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- 9) Peningkatan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah; dan
- 10) Perwujudan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi.

Dengan 9 (sembilan) Program Strategis Daerah atau Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mewujudkan ekosistem pendidikan unggul;
- 2) Transformasi Kabupaten Karo menjadi sentra pelayanan kesehatan unggul dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan layanan pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berbasis data;

- 4) Pelestarian Budaya Karo dengan mewujudkan identitas, martabat, dan pembangunan berwawasan budaya;
- 5) Transformasi Pertanian Kabupaten Karo dengan mewujudkan *Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming* menuju swasembada dan kedaulatan pangan;
- 6) Mengakselerasi keunggulan ekonomi Karo dengan penguatan UMKM, Hilirisasi Industri, dan modernisasi pusat perdagangan berbasis potensi lokal;
- 7) Pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan dengan mewujudkan *The Paradise of Karo Highland*;
- 8) Peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan dengan mewujudkan ruang hidup yang aman, tertata, dan produktif di Kabupaten Karo; dan
- 9) Percepatan Pembangunan Daerah 3T (Termiskin, Tertinggal, Terluar): Jalan menuju Pemerataan dan Inklusi.

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka perlu ditetapkan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah.

Strategi yang dilakukan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2026 tersebut adalah:

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 3) Mendorong Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil
- 4) Peningkatan pendapatan daerah
- 5) Penguatan pemerintahan yang dinamis dan responsif
- 6) Peningkatan manajemen kepegawaian ASN
- 7) Pembangunan spritualitas dan toleransi antar umat beragama
- 8) Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan sosial dan ekonomi dan lingkungan
- 9) Pengembangan Nilai dan warisan budaya daerah
- 10) Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif
- 11) Optimalisasi pelayanan kesehatan dengan peningkatan kualitas sistem, tenaga kesehatan dan sarana prasaran kesehatan
- 12) Peningkatan Produksi dan produktivitas yang berkualitas sektor pertanian dan perikanan serta sektor lainnya yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal
- 13) Meningkatkan produktivitas sektor industri pengolahan/ hilirisasi produk, perdagangan yang padat karya berorientasi ekspor dan berkelanjutan
- 14) Meningkatkan daya saing sektor pariwisata
- 15) Penguatan Kemandirian Pangan
- 16) Peningkatan ketersediaan air baku untuk irigasi
- 17) Tingkat inflasi yang rendah dan stabil
- 18) Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan yang berkelanjutan
- 19) Peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan.
- 20) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga
- 21) Penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusi
- 22) Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
- 23) Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dan terampil

- 24) Peningkatan ideologi dan wawasan kebangsaan serta kebebasan berdemokrasi
- 25) Optimalisasi penguatan peran olahraga dan pemuda
- 26) Penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan sumber daya manusia.
- 27) Mendorong pertumbuhan penanaman modal
- 28) Pengembangan UMKM, koperasi, kewirausahaan, industri kreatif melalui pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing.

Lebih lanjut, prioritas pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka menjawab isu strategis kabupaten karo tahun 2026 dan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperbanyak program inovatif khususnya sektor pariwisata dan pertanian, mengoptimalkan potensi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan percepatan pemulihan kondisi ekonomi. Oleh karenanya prioritas pembangunan tersebut juga difokuskan pada peningkatan penanganan kesehatan, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas dan ke daerah wisata, pembangunan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pembangunan berwawasan lingkungan, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Prioritas pembangunan yang harus dicapai pada tahun akhir 2026 dilakukan melalui kerangka ekonomi makro, yaitu:

Tabel 4.4

Sasaran Utama/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2026

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,22	5,00-5,50
2	PDRB per kapita	Rp Juta	67,69	73,64
3	Kontribusi PDRB Provinsi	persen	2,52	2,53
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,37	6,00-5,00
5	Rasio Gini	Rasio	0,214	0,212-0,210
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,49	80,00-80,20
7	Penurunan Emisi GRK	(ton CO2eq)	N/A	149.351,20
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	72,21	79,40
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2,4	2,33-1,86

Sumber: Hasil Fasilitasi RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026

Sasaran Utama/Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Karo pada tahun 2026 tersebut juga diselaraskan dengan sasaran utama pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.5

Penyelarasan Sasaran Utama/Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN	Tahun 2026	Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2026	Kabupaten Karo	Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,6 – 6,2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,70-6,20	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,00-5,50
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	83,2 – 85,7	PDRB per Kapita (Rp juta)	86,78	PDRB per Kapita (Rp juta)	73,64

No	RPJMN	Tahun 2026	Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2026	Kabupaten Karo	Tahun 2026
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,23	Kontribusi PDRB Kab/kota (%)	2,53
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,60 – 5,60	Tingkat Kemiskinan (%)	5,93-6,55	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00-5,00
5	Rasio Gini	0,284–0,290	Rasio Gini	0,301-0,303	Rasio Gini	0,212-0,210
6	Indeks Modal Manusia	0,55	Indeks Modal Manusia	0,53-0,55	Indeks Pembangunan Manusia	80,00-80,20
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00 – 2,77	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1-2,77	Penurunan Emisi GRK (ton Co2 eq)	149.351,20
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,4
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,06 – 5,59	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,06 -5,59	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,33-1,86

Seperti telah di jelaskan pada bab sebelumnya yaitu situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah maka usaha-usaha yang dilakukan dalam peningkatan daya saing dan pemantapan ekonomi akan terus dilakukan.

Penjelasan tentang program dan target capaian untuk setiap indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Keterkaitan Prioritas, Sasaran, Indikator dan Program Prioritas Kabupaten Karo Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Belanja Riset (% APBD)	0,07	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
		Indeks Inovasi Daerah	64	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
		Indeks Reformasi Hukum	87,6	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat
		Indeks Integritas Nasional	78	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (% PDRB)	0,0196	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
				7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan
				1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial
1.2 Meningkatnya layanan publik berbasis digital dan keamanan informasi	Indeks Pelayanan Publik		89	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan
				2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
					2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.3	Meningkatnya kapasitas dan profesionalis me Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks Profesionalitas ASN	75,8	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	2.1	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	97	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
			Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	45	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
					2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
					2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
					2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk	3.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	75,90	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
			Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	21,29	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
meningkatkan kesehatan masyarakat			Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>)	90	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	90	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	98		
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	4.1	Meningkatnya Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal			3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
					3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
					3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
					3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
					3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian
					3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
					3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian
					3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
					2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat					3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
					3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4.2	Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Udermourishment</i>)	6,08	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Kapasitas Air Baku	2	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
					3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
					2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
					2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
					2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
					3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
					3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	4.3	Penguatan stabilitas ekonomi daerah	Tingkat Inflasi	3±1	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	5.1	Meningkatnya kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD	72,67	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada	61,11	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
			asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD			
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP	71,34	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP	67,88	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	11- 12	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
			Harapan lama sekolah	14,2	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
			Proporsi Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualitas pendidikan tinggi (%)	18,5		
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	71		
	5.2	Terwujudnya kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni	Indeks Pembangunan Keluarga	59,65	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,38	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah	85,21	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase gangguan dan ketertiban yang dapat diselesaikan	83,29	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pembinaan Ormas dan jumlah konflik SARA	103/0	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	37,5	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	11-15%	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase Capaian pelaksanaan aksi HAM	93,5	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan
			Persentase prestasi olahraga	21	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase organisasi pemuda yang aktif	37	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
					1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial
					2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
					2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
					1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
					2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri	5,4	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan
					2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata					1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
					1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
					1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
	6.1	Meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	30-31	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM
			Rasio kewirausahaan daerah	4,15	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM
			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	1,95	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM
					2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM
					2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM
					2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM
					2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM
					2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM
					2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM
					2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM
					2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM
Peningkatan ketersediaan dan	7.1	Terwujudnya ketersediaan	Panjang jalan dalam kondisi baik	66	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan		infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan	Akses sanitasi aman	76,48	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	43,9	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Irigasi dalam kondisi baik	57	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Drainase dalam kondisi baik	65	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Gedung pemerintah dalam kondisi baik	63	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Ketaatan terhadap RTRW	75	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	7.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Rasio Rumah Layak Huni	98,93	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	0,24	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	100	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
			Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	10	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
					1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
	7.3	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Rasio konektivitas kabupaten	0,32	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Kinerja lalu lintas kabupaten	1	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
					2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Dinas Perhubungan
					2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Dinas Perhubungan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	8.1	Terwujudnya kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan	Timbulan Sampah yang ditangani (%)	77	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
			Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	78,09	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase cakupan area pelayanan persampahan (%)	41	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
			Konsumsi listrik per Kapita	559	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
					2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
					2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
					3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
					2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
					1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja
					1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah	9.1	Meningkatnya kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,1	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,81	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
		komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah			2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
Perwujudan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi	10.1	Peningkatan kontribusi kinerja terhadap target nasional dan provinsi	Tingkat pencapaian indikator makro bersama (shared development indicators) pusat-daerah	97	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Tingkat sinkronisasi program prioritas daerah terhadap program prioritas provinsi dan nasional	100	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

*Memperhatikan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Untuk melihat keterkaitan antara Prioritas RKP Nasional tahun 2026, Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 dan Prioritas RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026 yang disertai dengan sinkronisasi sasaran pembangunan dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Karo
dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN

Asta Cita/Prioritas Nasional		Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara		Misi Pembangunan Kabupaten Karo	
Astacita 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Misi 2	Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal;
Astacita 2	Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Misi 4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata;
				Misi 7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Astacita 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim dan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1	Optimalisasi Kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Misi 6	Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, mendorong Kewirausahaan, Industri Kreatif serta Sentra Produksi memanfaatkan potensi Pertanian, dan Pariwisata
				Misi 7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Astacita 4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Misi 3	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi
				Misi 5	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Intelektual, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing melalui adanya Sekolah Unggulan dan Rumah Pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik
Astacita 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Misi 4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata;
Astacita 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Misi 4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata;
				Misi 5	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Intelektual, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing melalui adanya Sekolah Unggulan dan Rumah Pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik
Astacita 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Misi 1	Mewujudkan roda pemerintahan yang profesional, bersih, efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik;
				Misi 8	Meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital

Asta Cita/Prioritas Nasional		Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara		Misi Pembangunan Kabupaten Karo	
Astacita 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1	Optimalisasi Kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan		mempercepat pembangunan daerah
				Misi 9	Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke Daerah untuk mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia Emas
				Misi 2	Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal;
				Misi 7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas

Sumber: Bappedalitbang Karo, 2025

4.3. Program Strategis Daerah

Dalam periode perencanaan tahun 2025-2029 ini terdapat beberapa program strategis daerah yang direncanakan agar pada akhir periode terdapat perubahan Kabupaten Karo ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Program strategis daerah tersebut adalah:

1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan Mewujudkan Ekosistem Pendidikan Unggul

Merupakan inisiatif strategis Kabupaten Karo dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul melalui penyediaan sekolah dan kelas unggulan serta beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi. Program ini juga mengambil peluang kawasan strategis Kabupaten Karo yang menjadi sentral dan jalur lintasan berbagai Kabupaten/Kota Sumatera Utara dan sebagian wilayah Aceh.

Tujuan Program

Tujuan mewujudkan ekosistem pendidikan unggul adalah:

- Menciptakan siswa-siswa unggul berprestasi memberikan pembelajaran dan sarana prasana berkualitas kepada siswa-siswa berprestasi
- Meningkatkan siswa-siswa SMP melanjut ke SMA unggulan meningkatnya jumlah siswa dari Kabupaten Karo masuk SMA unggulan seperti SMA Taruna Nusantara, SMA DEL dll.
- Mewujudkan Kabupaten Karo sebagai kawasan strategis pusat pendidikan unggulan skala nasional
- Mencetak generasi unggul skala *top leader* dengan nilai-nilai kepemimpinan yang berkualitas dan berkarakter, wawasan kebangsaan, dan kebudayaan serta memiliki daya saing nasional dan internasional.

Strategi Pembiayaan

Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo:

- Dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dan melalui APBN.
- Kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui skema CSR dan kemitraan yayasan.

Ruang Lingkup Program

- Transformasi Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama melalui pendirian sekolah unggulan atau kelas unggulan melalui kolaborasi

sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas profesional dan kurikulum yang mendorong kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital.

- Memfasilitasi siswa berprestasi seleksi dan masuk ke SMA unggulan
- Pemberian beasiswa pendidikan terhadap siswa miskin berprestasi
- Meningkatkan prestasi peserta didik melalui pembelajaran yang efektif, penguatan karakter dan motivasi, pemanfaatan teknologi, lingkungan belajar yang kondusif serta penguatan parenting
- Penguatan Guru Masa Depan: Adaptif, Digital, pembinaan akademik intensif, dan Transformatif
- Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui fokus pendekatan berbasis komunitas dan pedagogi holistik

Dampak yang diharapkan

- Meningkatnya SDM yang bermutu dan berdaya saing menuju Indonesia Emas
- Meningkatnya generasi-generasi unggul yang menjadi calon pemimpin berpengaruh yang berkarakter, karismatik serta visioner.

2) Transformasi Kabupaten Karo Menjadi Sentra Pelayanan Kesehatan Unggul dan Berkelanjutan:

Merupakan inisiatif strategis Kabupaten Karo dalam mewujudkan transformasi Kesehatan yang unggul melalui pembangunan layanan dasar kesehatan yang inklusi dan merata serta pembangunan Rumah Sakit Umum yang berlokasi di Desa Rumah Kabanjahe/Lingga. Program ini juga mengambil peluang kawasan strategis Kabupaten Karo yang menjadi sentral dan jalur lintasan berbagai Kabupaten/Kota Sumatera Utara dan sebagian wilayah Aceh.

Tujuan Program

Tujuan pusat kesehatan layanan unggul adalah

- Menyediakan infrastruktur kesehatan yang unggul berbasis medical tourism.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang unggul dan prima, melalui peningkatan kenyamanan pelayanan kesehatan dan mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat.
- Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke serta kesehatan ibu dan anak

Strategi Pembiayaan

- Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo
- Dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sarana pelayanan dasar serta alat kesehatan, dan pembangunan rumah sakit melalui APBN.
- Kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui skema CSR dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- Optimalisasi Dana Desa dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan integrasi layanan primer yaitu layanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan paliatif pada semua siklus hidup.

Ruang Lingkup Program

- Meningkatkan layanan dasar kesehatan melalui peningkatan layanan yang unggul di puskesmas, pembangunan fasilitas kesehatan, standarisasi sarana dan prasarana puskesmas, pemberdayaan kader kesehatan dan kader posyandu serta masyarakat tingkat desa/kelurahan untuk menekan angka kesakitan masyarakat.
- Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah lengkap berkualitas Tipe B pembangunan rumah sakit umum dilahan yang baru, dengan konsep rumah sakit regional yang memiliki Center of Excellent berbasis Medical Tourism.
- Integrasi kesehatan tradisional melalui klinik herbal berbasis bukti ilmiah dan pembangunan “Karo Healing Village”

Dampak yang diharapkan

Kabupaten Karo menjadi pusat kesehatan di kawasan, sehingga selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karo.

3) Mewujudkan Layanan Pemerintahan yang Responsif, Inklusif, dan Berbasis Data:

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Karo untuk menciptakan pelayanan publik yang unggul dan prima, melalui program digitalisasi pelayanan publik dan penerapan “one day service”.

Tujuan Program

Tujuan pusat kesehatan layanan unggul adalah

- Minimalisir Antrean di kantor pemerintahan, karena sebagian besar layanan sudah tersedia secara online
- Penyediaan Internet gratis di ruang publik memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan digital setiap saat.
- Masyarakat mendapat Pelayanan yang lebih cepat dan mudah melalui Digitalisasi Pelayanan Publik dan penerapan "One Day Service".

Strategi Pembiayaan

- Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo
- Kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui skema CSR.
- Skema *co-financing* BTS mikro bersama operator seluler, Pemda, dan desa.
- Pemanfaatan CSR perusahaan dan BUMDes dalam penyediaan akses *WiFi* publik desa.

Ruang Lingkup Program

Dampak yang diharapkan:

- Penguatan arsitektur digital pemerintah daerah melalui pembangunan super app layanan publik yang mengintegrasikan seluruh layanan lintas Perangkat daerah secara terpadu;
- Penerapan *One Day Service* (ODS) melalui *Redesign* proses bisnis pelayanan dasar seperti KTP, KK, akta kelahiran, perizinan dengan pendekatan *Business Process Reengineering* (BPR) dan automasi *system*
- Penyediaan Layanan Terintegrasi Lintas Instansi melalui Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan sistem *front-office* terpadu dan

back-end lintas lembaga dan Penyediaan *Government Collaborative Platform* (GCP)

- Desentralisasi dan digitalisasi layanan adminduk melalui pendirian unit pelayanan adminduk kecamatan, pelayanan dukcapil digital dan keliling dan penggunaan *e-form*/unggah dokumen *online*
- Penguatan infrastruktur jaringan wilayah secara bertahap melalui kolaborasi dengan kementerian terkait dan operator seluler dan penguatan jaringan fiber optik daerah
- Penguatan inklusi dan literasi digital
- Perlindungan data dan keamanan siber
- Mendorong transparansi dan *Open Government*.

Dampak yang diharapkan

Tersedianya pelayanan publik prima dan unggul yang responsif cepat berbasis digital.

4) Pelestarian Budaya Karo: Mewujudkan Identitas, Martabat, dan Pembangunan Berwawasan Budaya

Kabupaten Karo memiliki kekayaan budaya yang unik, mulai dari sistem sosial dan adat, bahasa, hingga warisan kuliner dan arsitektur tradisional. Namun, arus modernisasi dan globalisasi kerap kali menggerus eksistensi budaya lokal. Untuk menjaga kesinambungan identitas masyarakat Karo, diperlukan kebijakan pelestarian budaya yang sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada pembangunan yang berbasis budaya.

Beberapa tantangan yang timbul dalam pelestarian budaya antara lain, Pengetahuan dan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap adat dan budaya Karo mulai menurun; Nama kelembagaan pemerintahan desa masih menggunakan nomenklatur nasional seperti “desa” dan “kepala desa”, belum mencerminkan identitas budaya Karo seperti “kuta” dan “pengulu”. Fasilitas publik dan kantor pemerintahan masih minim nuansa budaya lokal dalam desain dan arsitektur; Peran lembaga adat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa belum optimal; Kegiatan pelestarian budaya (upacara adat, pertunjukan seni, pelatihan tenun, kuliner tradisional) belum terintegrasi dalam program pembangunan desa.

Tujuan Program

- Desa memiliki struktur pemerintahan dan kelembagaan adat (Kuta–Pengulu); kantor desa dan fasilitas publik menggunakan desain budaya Karo.
- Terbentuknya desa wisata berbasis budaya edukatif.
- Dokumen budaya terdigitalisasi dan terakses publik.
- UMKM/Ekonomi Kreatif berbasis budaya tumbuh dan berkembang.

Dampak yang diharapkan dari Program

Pelestarian budaya yaitu masyarakat memahami dan melestarikan budaya Karo.

Ruang Lingkup Program

- Penguatan tata kelola desa berbasis budaya antara lain mengembalikan struktur pemerintahan desa sesuai adat Karo (desa menjadi kuta, kepala

desa menjadi pengulu); Mendorong peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah mengenai nomenklatur lokal; Menyusun regulasi pelibatan lembaga adat dalam musyawarah desa dan penyusunan RPJMDes; Pendataan dan Pengusulan WBTb menjadi WBTbi, Penguatan pemanfaatan/pelestarian aksara Karo, pakaian adat, dan lain lain.

- Revitalisasi budaya melalui pendidikan dan komunitas melalui integrasi muatan lokal budaya Karo ke dalam kurikulum PAUD dan SD, pelatihan tari, musik tradisional, dan kuliner lokal bagi generasi muda melalui sanggar budaya dan desa wisata. Digitalisasi arsip budaya dan penulisan sejarah lokal berbasis komunitas.
- Penataan Fasilitas dan Arsitektur Berbasis Kearifan Lokal. Desain kantor desa, balai desa, dan fasilitas publik dengan sentuhan arsitektur Karo; Mewajibkan unsur ornamen budaya lokal dalam pembangunan fasilitas pemerintah baru.
- Ekonomi Budaya dan Daya Tarik Wisata; Mendukung produk UMKM/IKM/ekonomi kreatif berbasis budaya: tenun, ukiran, kuliner, dan pertunjukan adat, Mengembangkan kalender event budaya tahunan untuk menarik wisatawan dan memperkuat kebanggaan lokal.
- Kolaborasi Multisektor dan Pendanaan Inovatif dengan mendorong pelibatan Perangkat Daerah terkait, CSR, dana desa, APBD, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN hingga kerjasama internasional untuk program budaya, bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

5) Transformasi Pertanian Kabupaten Karo: Mewujudkan *Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming* Menuju Swasembada dan Kedaulatan Pangan

Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Karo, hal ini tergambar dari kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang menyumbang 53,04% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024. Lapangan usaha ini mampu menyerap angkatan kerja yang bekerja sebanyak 60,09%. Namun, kontribusi besar ini belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani dan daya saing sektor pertanian. Laju pertumbuhan sektor ini sangat fluktuatif, tahun 2024 hanya sebesar 2,54% menurun dari kondisi sebelumnya, tertinggal dibandingkan sektor lainnya, dan menunjukkan adanya stagnasi struktural.

Berbagai permasalahan mengemuka seperti 1. Penyusutan kualitas Sumber Daya Alam (semakin rendahnya tingkat kesuburan tanah), Hal ini terjadi karena pemanfaatan lahan yang tidak tepat karena Pemanfaatan tanah dan air secara terus menerus serta penggunaan pupuk kimia yang tidak sesuai dan tidak menerapkan metode pertanian berkelanjutan menyebabkan penurunan kualitas SDA; 2. Terbatasnya Adopsi Teknologi Modern maupun penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN), Penggunaan alat mesin pertanian, sistem irigasi cerdas, dan teknologi berbasis data (*precision farming*) masih sangat terbatas; 3. Sumber Daya Manusia Pertanian yang terbatas dan minimnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian, tingkat pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan petugas dan petani belum mendukung

dalam penerapan teknologi pertanian modern, sehingga adaptasi terhadap teknologi baru dan adopsi inovasi berjalan lambat dan membatasi transformasi sektor pertanian, Jumlah penyuluh ideal adalah satu orang untuk satu desa, kenyataan satu penyuluh sampai melayani tiga desa sehingga tidak semua memperoleh pendampingan, selain itu Sektor pertanian seringkali dianggap kurang menjanjikan, berpenghasilan rendah, dan kurang bergengsi oleh generasi muda; 4. Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagian besar belum membentuk Kelembagaan Ekonomi Petani KEP merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing petani, memperkuat posisi tawar mereka, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; 5. Sarana dan Prasarana/ Infrastruktur yang Belum Merata, Infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan usaha tani, *cold storage*, pengolahan hasil panen dan logistik pemasaran belum tersebar merata, sarana seperti pupuk, benih/bibit unggul bersertifikat, alsintan, belum tersedia secara baik menjadi penghambat dalam mempercepat distribusi barang, penghambat proses pertanaman dan menekan biaya produksi; 6. Potensi Sektor Pertanian yang Belum Terkelola Optimal, Kabupaten Karo memiliki peluang untuk menjadi sentra produksi hortikultura organik, agroindustri berbasis olahan, dan agrowisata berbasis komunitas bertaraf nasional dan internasional jika dikelola dengan lebih baik; 7. Keterbatasan Akses Pasar, Akses pasar terbatas, menghambat penjualan produk pertanian dengan harga menguntungkan; 8. Panjangnya rantai pemasaran akibat kurangnya kerjasama pemasaran baik petani dan kelompok tani serta para pelaku bisnis mulai dari daerah produsen sampai dengan daerah konsumen; 9. Minimnya pengelolaan pasca panen (GHP), sarana pengolahan (GMP), dan kesesuaian sarana transportasi (GDP), GHP, GMP, dan GDP yang tidak memadai dapat menyebabkan penurunan kualitas produk, termasuk penurunan nilai gizi, kerusakan fisik, dan kontaminasi mikroba yang mengakibatkan penurunan permintaan terutama tujuan ekspor; 10. Bencana pertanian, merugikan sektor pertanian, seperti banjir, kekeringan, atau hama penyakit; 11. pertanian tersekat-sekat oleh batasan administratif Pembangunan pertanian dan basis sumberdaya alam harus serentak dan komprehensif serta melibatkan pendukung penting seperti sektor infrastruktur, pembiayaan, perdagangan, pemasaran, penyuluhan, pengembangan sumber daya manusia, dll; 12. Tingginya biaya sarana produksi (pupuk dan pestisida); 13. Tingginya gangguan hama dan penyakit (OPT penting), gangguan hama dan penyakit tanaman membuat pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak maksimal dan berdampak terhadap penurunan hasil panen bahkan berakibat gagal panen; dan 14. Pertanian yang dipengaruhi musim dan perubahan iklim global yang mengakibatkan anomali cuaca dan fluktuasi harga, Sistem pertanian yang hasil dan prosesnya sangat bergantung pada perubahan musim, terutama musim hujan dan kemarau selain itu Perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan hama dan penyakit, serta menyebabkan fluktuasi siklus hidup OPT yang tidak menentu.

Di sisi lain, potensi lokal Kabupaten Karo sangat besar seperti tanah vulkanik yang subur, keanekaragaman hayati, posisi geografis strategis, serta kekayaan budaya yang kuat. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan melakukan transformasi menyeluruh melalui penerapan *Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming* untuk mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan daerah.

Tujuan Program

- Pertumbuhan PDRB sektor pertanian
- 17 kecamatan mengadopsi teknologi smart farming pada tahun 2030
- 17 Kecamatan menerapkan pola sistem pertanian terpadu pada tahun 2030
- Ekspor hasil pertanian meningkat setiap tahun dengan minimal dua produk unggulan terdaftar sebagai produk indikasi geografis.
- Bertumbuh desa Wisata tematik Agrowisata berbasis pertanian dan budaya Karo
- Optimalisasi pemanfaatan lahan penggembalaan umum

Dampak yang diharapkan

Peningkatan Kesejahteraan dan kualitas hidup petani.

Ruang Lingkup Program

Konsolidasi Lahan dan Pembentukan *Corporate Farming*, Transformasi harus dimulai dari penetapan Lokasi dan penguatan kelembagaan petani melalui model korporasi petani berbasis koperasi, BUMDes Agro, atau holding usaha tani. Petani mengelola lahan secara kolektif, sehingga tercapai skala ekonomi yang lebih efisien, memungkinkan penggunaan alat modern dan adopsi teknologi canggih secara lebih masif. Kemitraan antara korporasi petani dengan perusahaan agribisnis nasional atau multinasional harus difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mempercepat alih teknologi, pembiayaan, hilirisasi dan akses pasar.

Penerapan *Integrated Eco Farming*, Sistem pertanian yang berkelanjutan harus dibangun melalui model Integrated Farming yang memadukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan skala desa. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber energi terbarukan (biogas), kompos, dan pakan ternak menjadi bagian integral. Selain itu, penerapan agroforestry berbasis tanaman pangan dan tanaman keras (kopi, alpukat, kayu manis) harus diperluas untuk memperkuat ketahanan ekosistem dan meningkatkan diversifikasi pendapatan petani. Penerapan *Integrated Eco Farming* akan dilakukan pada beberapa kecamatan yang potensial untuk komoditas pangan, perkebunan dan hortikultura, salah satu lokus *penerapan Integrated Eco Farming* adalah dua kawasan yaitu Kawasan Persawahan Paya Lah-Lah dan penggembalaan Mbal-Mbal Nodi. Integrasi antara kedua Kawasan ini akan diperkuat melalui Pengolahan limbah pertanian dan peternakan secara sirkular, untuk menghasilkan pakan, energi, dan pupuk; Pengembangan *agroforestry* terpadu berbasis tanaman keras bernilai tinggi seperti kemiri yang memperkuat konservasi tanah dan keberlanjutan ekonomi petani, Konektivitas logistik dan kelembagaan petani melalui koperasi modern dan digitalisasi rantai pasok dari hulu ke hilir.

Akselerasi *Smart Farming* dan Digitalisasi, Adopsi *Smart Farming* berbasis *Internet of Things (IoT)*, *drone*, *big data analytics*, dan kecerdasan buatan (AI) harus menjadi tulang punggung modernisasi pertanian Karo. Penggunaan sensor tanah, sistem irigasi otomatis, drone untuk pemetaan lahan dan pemantauan tanaman, serta aplikasi digital untuk penyuluhan, pemasaran, dan pembiayaan tani menjadi bagian dari ekosistem pertanian baru. Pemerintah daerah perlu mengembangkan Platform Digital Pertanian Karo untuk mempertemukan petani, penyuluh, pembeli, lembaga pembiayaan, dan pasar ekspor.

Pengembangan *Agro-Industry* dan Diversifikasi Ekspor

Mendorong investasi dalam industri pengolahan hasil pertanian antara lain kentang, sayuran/buah beku, minuman herbal, sari buah dan produk organik premium sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah termasuk pengembangan pertanaman komoditi hingga pengolahan/hilirisasi di kawasan yang potensial. Kabupaten Karo harus menetapkan strategi branding produk lokal berbasis indikasi geografis (IG) untuk komoditas unggulan seperti “Jeruk Karo”, “Kopi Karo”, “Kentang Karo” dan “Wortel Karo”, dan komoditi lainnya, memperluas jangkauan pasar ekspor, serta meningkatkan posisi tawar petani. Pengembangan Desa wisata berbasis Agro-Wisata Tematik juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pertanian dan pariwisata.

Strategi Pembiayaan

Transformasi ini tentu memerlukan strategi pembiayaan yang inovatif, terdiversifikasi, dan berkelanjutan. Pendekatan pembiayaan yang dilakukan melalui APBD Kabupaten Karo, APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara, Skema *Public-Private Partnership* (PPP), CSR, Dana Hibah Internasional, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan *Agri-Fintech*, Skema *Green Financing* serta sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan dan tidak mengikat. Program strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah dan berbagai pihak/sector yang terkait. Beberapa daerah yang terus didorong dalam pelaksanaan program strategis antara lain Komoditi Hortikultura di Liang Melas Datas (Jeruk), Kecamatan Namanteran dan Kecamatan Barusjahe (Kentang), Kecamatan Payung (Bawang Merah), Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Merek dan kecamatan Namanteran (Cabai), Komoditi Pangan di Kecamatan Laubaleng, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Munte, Kecamatan Juhar (Padi dan Jagung); Komoditi Perkebunan di Kecamatan Barusjahe, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Merek, Kecamatan Munte, Kecamatan Juhar, Kecamatan Tigabinanga (Kopi dan Kakao); Peternakan di Kawasan Penggembalaan Umum Nodi Kecamatan Lau Baleng serta daerah lain yang potensial untuk dikembangkan.

Keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029 dan PHTC nasional serta Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kabupaten Karo merupakan salah satu lokasi prioritas untuk kawasan swasembada pangan, air dan energi. Sejalan hal

tersebut Pemerintah Propinsi Sumatera Utara juga telah menjadikan Kabupaten Karo sebagai Lokasi prioritas untuk pangan

Untuk itu dalam pengembangan kawasan tersebut dilaksanakan melalui beberapa indikasi intervensi antara lain ketersediaan infrastruktur esensial dan sarana prasarana yang mendukung mekanisasi pertanian mulai dari produksi, distribusi, hilirisasi/nilai tambah hingga pemasaran secara holistik dan terintegrasi; Ekstensifikasi pertanian dan Intensifikasi pertanian untuk Peningkatan daya guna Lahan pertanian; Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewan (termasuk pengembangan kawasan peternakan -Lahan Penggembalaan Nodi); Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura, perkebunan dan pangan; Pembangunan dan pengelolaan irigasi primer, sekunder dan tersier maupun tampungan air lainnya, serta penyediaan air Berkelanjutan (termasuk Paya Lahlah Lau baleng-Mardinding, Parit Lompatan Kecamatan Juhar-Tigabinanga); Penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan dapat membantu menjaga kualitas lingkungan (tanah, air, dan keanekaragaman hayati), pengurangan emisi serta dampak perubahan iklim; Peningkatan SDM Pertanian berbasis IPTEKIN dan perluasan akses pasar; peningkatan ketersediaan bibit/benih unggul sektor pertanian.

6) Mengakselerasi Keunggulan Ekonomi Karo: Penguatan UMKM, Hilirisasi Industri, dan Modernisasi Pusat Perdagangan Berbasis Potensi Lokal.

Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi ekonomi besar berbasis pertanian, pariwisata, dan perdagangan. Posisi geografis Kabupaten Karo sebagai jalur utama dari dan ke Medan (antar provinsi) serta perlintasan antar kabupaten menjadikan wilayah ini sebagai simpul penting dalam konektivitas kawasan. Namun demikian, tantangan struktural seperti lemahnya industrialisasi pascapanen, rendahnya adopsi teknologi, keterbatasan akses pembiayaan, serta belum optimalnya integrasi antara sektor pariwisata dan UMKM, menghambat potensi Kabupaten Karo. Untuk itu, dibutuhkan intervensi strategis yang sistematis dan berbasis bukti, guna mempercepat transformasi ekonomi lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pariwisata masih mendominasi PDRB Kabupaten Karo sebesar 53,04 persen pada tahun 2024, sementara kontribusi sektor industri pengolahan hanya sekitar 3,73 persen, menunjukkan belum maksimalnya hilirisasi hasil pertanian. Rendahnya kewirausahaan dan aktivitas UMKM, produk unggulan daerah yang belum diolah secara maksimal, sistem distribusi dan pemasaran yang belum Modern, serta potensi geografis yang belum dimanfaatkan.

Tujuan Program

- Terbentuknya BUMD dan BUMDesa/Koperasi berbasis penguatan ekonomi lokal
- 300 UMKM Naik kelas
- Produk lokal Karo mulai menembus pasar nasional dan ekspor.

- Peningkatan kunjungan wisatawan ke Pasar Berastagi pasca revitalisasi
- Meningkatkan ketersediaan pasar sebagai Pusat Ekonomi Tradisional-Modern

Dampak yang diharapkan

Melalui optimalisasi tersebut dampak yang diharapkan akan meningkatkan kewirausahaan dan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah mewujudkan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Ruang lingkup Program

- Revitalisasi Pusat Pasar Berastagi sebagai Pusat Ekonomi Tradisional-Modern melalui Revitalisasi sarana prasarana pasar dengan Konsep experiential market, Pembangunan Pasar Tematik Pariwisata Berastagi, Perencanaan Pasar Induk, Pembangunan Pasar Kabanjahe
- Penerapan *Industrial Collaborative-Oriented Educational Design* (ICOED) untuk Transformasi Keterampilan melalui identifikasi profil pekerjaan baru, analisis gap keterampilan, penyusunan program upskilling-reskilling, dan rekomendasi pelatihan upgrading skills
- Pengembangan Sentra UMKM Perlindungan Berbasis Agrowisata dan Kuliner melalui penempatan Sentra UMKM di titik strategis perlindungan utama. Konsep agrowisata, kuliner lokal, dan produk kreatif dikembangkan untuk memperkuat nilai tambah ekonomi lokal.
- Hilirisasi Produk Pertanian melalui Industri Pengolahan Kecil-Menengah melalui pengolahan produk hortikultura menjadi produk bernilai tambah (ekspor) berbasis komunitas seperti hilirisasi produk unggulan buah-buahan dan sayur-sayuran menjadi produk bernilai tambah (olahan beku, makanan kemasan, minuman premium, tepung, dll) berbasis industrialisasi komunitas seperti Kopi, kentang, cocoa, jagung dll. Beberapa Lokasi antara lain Kawasan Liang Melas Datas yang potensial untuk pertanaman jeruk sehingga dapat dikembangkan hilirisasi komoditi jeruk menjadi olahan beku, minuman kemasan, manisan, tepung, kosmetik, dll, begitu juga Kecamatan Namanteran dan Kecamatan Barusjahe yang potensial untuk pertanaman Kentang sehingga berpotensi mendukung hilirisasi kentang seperti tepung kentang, makanan ringan, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Merek, dan Kecamatan Namanteran yang potensial untuk pertanaman cabai sehingga mendukung hilirisasi Cabai seperti tepung cabai, pasta cabai, minyak cabai dll, Komoditi Pangan di Kecamatan Laubaleng, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Munte, Kecamatan Juhar untuk Padi dan Jagung mendukung hilirisasi seperti tepung, makanan ringan, pakan ternak, dll; Komoditi Perkebunan di Kecamatan Barusjahe, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Merek, Kecamatan Munte, Kecamatan Juhar, Kecamatan Tigabinanga untuk Kopi dan Kakao potensi hilirisasi seperti minuman kemasan, kosmetik, makanan, farmasi, dll serta daerah lain yang potensial untuk dikembangkan.
- Digitalisasi Ekonomi Lokal melalui Transformasi UMKM Go Digital dengan Mendorong UMKM masuk ke platform digital untuk pemasaran, pembayaran, dan pengelolaan usaha, disertai pelatihan digitalisasi skala massal.

- Penguatan Ekosistem Kelembagaan melalui BUMD aneka usaha, BUMDesa Bersama dan Koperasi Modern maupun Koperasi Merah Putih BUMD, BUMDesa dan koperasi didorong mengelola sektor produktif seperti pengelolaan sektor perdagangan.
- Fasilitasi Sertifikasi Produk dan Akses Pembiayaan Inklusif Produk lokal difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi mutu (SNI, Halal, BPOM) dan akses ke pembiayaan lembaga keuangan untuk mendorong kelayakan pasar produk
- Industri, pusat UMKM, *cold storage*, pengemasan, dan distribusi logistik/ Pengembangan Branding Daerah melalui Strategi *City Branding dan Festival* Ekonomi Lokal, Strategi *city branding* diterapkan untuk meningkatkan *positioning* Kabupaten Karo sebagai pusat agrowisata dan industri kreatif di Sumatera Utara, melalui event tahunan dan promosi digital nasional.

7) Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan: Mewujudkan *The Paradise of Karo Highland*

Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi yang luar biasa yang tidak kalah menariknya dengan daerah wisata lainnya yang ada di Indonesia. Pariwisata Kabupaten Karo memiliki prospek yang sangat strategis bagi daerah dan menjadi sektor penting yang dapat diandalkan ke depan untuk menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup masyarakat untuk mengenal alam dan budaya ke beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Karo.

Kabupaten Karo juga berada pada posisi strategis dalam pengembangan pariwisata yaitu letak geografis yang strategis, Kabupaten Karo merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) serta salah satu wilayah pada Geopark Kaldera Toba, Kabupaten Karo juga sebagai perlintasan Kota Medan dengan Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir dan beberapa kabupaten/kota Provinsi NAD sehingga posisinya menjadi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi dan daerah tujuan wisata. Kabupaten Karo memiliki banyak potensi wisata antara lain wisata alam, wisata religi dan budaya, wisata kuliner dan wisata Sejarah dan memiliki potensi alam dengan udara pegunungan yang sejuk dan asri. Sektor pariwisata diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan daya tarik obyek wisata yang meliputi keindahan dan kekayaan alam flora, daya tarik tradisi yang mengandung seni dan budaya serta adat istiadat. Semua itu ditunjang jasa dan sarana pariwisata seperti biro perjalanan, penyediaan akomodasi serta pembangunan dan pembenahan fasilitas wisata.

Melihat potensi tersebut seharusnya Kabupaten Karo mampu menjadi episentrum pariwisata alam dan budaya di Sumatera Utara. Namun demikian, kontribusi sektor pariwisata yang digambarkan oleh sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karo hingga 2024 masih relatif rendah di bawah 10

persen, Hal ini menunjukkan adanya gap besar antara potensi dan realisasi.

Sektor pariwisata Karo menghadapi berbagai tantangan seperti : Potensi Alam yang Belum Terkelola Maksimal, keterbatasan 6A di Destinasi Wisata (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, Aktivitas, *Ancillary* dan *Available Packages*), kapasitas pengelolaan penerapan pariwisata berkelanjutan belum optimal, Belum Optimalnya Pengembangan Industri Pariwisata, Belum optimalnya peran Masyarakat sadar wisata dan pelaku pariwisata (Pemandu Wisata, Pokdarwis, Pengelola Desa Wisata dan Destinasi Wisata) dalam menerapkan Sapta Pesona, kemitraan, kolaborasi maupun sinergitas *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata belum optimal.

Menyadari tantangan tersebut, diperlukan sebuah terobosan besar dalam bentuk strategi terpadu, inovatif, dan berbasis keberlanjutan untuk membangkitkan pariwisata Karo, menjadikannya lebih kompetitif di tingkat regional bahkan nasional.

Tujuan Program

- Penguatan 6A (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, Aktivitas, *Ancillary* dan *Available Packages*) Pariwisata/Daya tarik wisata, Fasilitas penunjang pariwisata, Aksesibilitas, Akomodasi, Aktivitas, Layanan tambahan secara kolaboratif, partisipatif dan berkelanjutan;
- Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya, kearifan lokal dan Alam
- Pengembangan daya Tarik pariwisata Urban Tourism;
- Peningkatan kualitas SDM dan Pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Pengembangan Ekosistem Pariwisata Berbasis Digital;
- Peningkatan Promosi dan pemasaran pariwisata serta Ekonomi Kreatif;
- Peningkatan kemitraan, Kolaborasi dan sinergitas *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata.

Ruang Lingkup Program

Penguatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar potensi pariwisata Karo dapat dimaksimalkan. Pembangunan dan Revitalisasi Dermaga Tongging Sebagai pintu masuk utama menuju Kawasan Danau Toba dan destinasi wisata lainnya, Dermaga Tongging perlu dibangun menjadi dermaga modern yang dapat menampung kapal wisata dengan kapasitas besar dan mobil angkutan yang ingin melanjutkan perjalanan ke pulau Samosir.

Perbaikan jalan akses wisata seperti jalan menuju Tongging, Kawasan Sipisopiso, Gundaling, Lau Kawar, Kawasan Berastagi, Kawasan permandian air panas Semangat Gunung-Doulu, kawasan Gunung Sibayak, kawasan Gunung Sinabung, kawasan Liang Melas Datas dan Berastagi serta Kawasan lainnya harus menjadi prioritas serta jalan penghubung antar kabupaten maupun provinsi; Pengembangan infrastruktur pendukung seperti toilet bersih, tempat parkir, dan penerangan jalan umum di area-area wisata. Akses wifi gratis dan signal telekomunikasi yang lebih baik juga perlu diperhatikan untuk memfasilitasi kebutuhan digitalisasi wisatawan.

Diversifikasi atraksi wisata, Agar wisatawan betah berlama-lama di Kabupaten Karo dan mendatangkan lebih banyak wisatawan, perlu

dilakukan diversifikasi atraksi wisata yang tidak hanya bergantung pada objek alam yang sudah ada. Beberapa inisiatif yang dapat diterapkan antara lain pengembangan wisata buatan seperti Kereta gantung (*Cable car*) ataupun *Gondola*, spot foto, jembatan kaca, taman, dll. Pengembangan *Sport Tourism* dan *Adventure Tourism* seperti paralayang di Bukit Gajah Bobok dan Sipiso-piso dan potensi *vulcanology tourism* maupun *Lavatour* di Gunung berapi seperti Area Gunung Sinabung-Lau Kawar, Liang Melas Datas, Kawasan Sipiso-piso-Tongging, Kawasan Berastagi-Gundaling dan Gunung Sibayak, Kawasan Pemandian air panas dan lain-lain. Musik dan festival budaya seperti Festival Musik Danau Toba di Kabupaten Karo, yang menggabungkan musik tradisional dengan elemen modern.

Wisata kesehatan Tradisional seperti pengembangan wisata kesehatan berbasis herbal Karo, Keberagaman tanaman obat di kawasan ini dapat dikembangkan menjadi wisata terapi herbal yang semakin diminati wisatawan yang mencari alternatif pengobatan alami dan relaksasi. Wisata kesehatan berbasis herbal Karo yang menggabungkan terapi alami dengan pengalaman wisata, seperti pijat tradisional, aromaterapi, atau spa herbal, bisa menjadi daya tarik yang menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman relaksasi dan penyembuhan alami. Inovasi ini dapat menjadi pilihan baru bagi wisatawan yang mencari alternatif kesehatan yang lebih alami, sesuai dengan tren *wellness tourism* yang semakin berkembang.

Agrowisata dan edukasi pertanian seperti kopi arabika, markisa, *strawberry* dan jeruk, sangat mendukung pengembangan agrowisata. Dengan mengembangkan *farm tour* atau tur kebun, wisatawan dapat belajar tentang proses produksi, serta menikmati produk lokal yang khas. Konsep agrowisata berbasis kopi atau jeruk juga akan menarik wisatawan untuk menikmati pengalaman wisata yang edukatif. Selain itu ekowisata, wisata edukasi lingkungan dan Konservasi, wisata berbasis geopark, wisata kuliner, wisata budaya terus dikembangkan.

Revitalisasi dan penguatan budaya lokal sebagai daya tarik wisata perlu menjadi perhatian, kekayaan budaya Karo harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun internasional, Beberapa langkah yang perlu dilakukan Revitalisasi Rumah Adat Siwaluh Jabu, Promosi Aksara Karo, Pengembangan Festival Budaya Karo, pengemasan wisata budaya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) di sektor pariwisata yang difokuskan pada penguatan kapasitas pelaku wisata melalui pelatihan *hospitality*, bahasa asing, dan *digital marketing*, serta sertifikasi bertahap standar CHSE pada destinasi dan akomodasi. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan vokasi termasuk SMK pariwisata juga didorong untuk menciptakan tenaga kerja lokal yang profesional, sekaligus menjamin layanan pariwisata yang aman, bersih, dan berdaya saing tinggi.

Pengembangan ekosistem pariwisata berbasis digital agar pariwisata Kabupaten Karo dapat berdaya saing Pemerintah Kabupaten Karo perlu membangun platform digital wisata berbasis AI yang menyediakan informasi lengkap tentang destinasi, atraksi, event, serta pemesanan akomodasi berbasis komunitas. *Smart tourism platform* ini akan

mempermudah wisatawan dalam merencanakan perjalanan, serta mendukung pengelolaan destinasi berbasis data.

Kolaborasi Antar Stakeholder melalui *Public-Private-Community Partnership (PPCP)*, Untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting. Melalui model *Public-Private-Community Partnership (PPCP)*, semua pihak dapat terlibat dalam pengelolaan, promosi, dan pengembangan destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten Karo dapat menginisiasi *Karo Tourism Consortium*, yang menghimpun pelaku usaha, akademisi, dan komunitas lokal untuk bersama-sama mengembangkan sektor pariwisata.

City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan, hal ini dapat dilakukan dengan mempercantik ruang publik seperti taman, trotoar dan bangunan bersejarah, pengembangan seni jalanan (mural, patung, seni lainnya) untuk mempercantik lingkungan kota, penerangan kota yang artistik menciptakan suasana malam yang menarik, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda yang aman dan nyaman, dll.

Dampak yang diharapkan

Peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan.

Strategi Pembiayaan

APBD Kabupaten Karo, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN, kolaborasi/sinergitas dengan pendanaan non pemerintah (Dunia usaha, Akademisi, NGO/LSM, masyarakat).

Program strategis tersebut dilaksanakan dengan melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah dan berbagai pihak/sector yang terkait seperti akademisi, dunia usaha, komunitas, media, Pemerintah dan Masyarakat untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan saling mendukung sesuai peran masing-masing. Pengembangan pariwisata antara lain dilaksanakan di Kawasan strategis Gajah Bobok-Tongging antara lain Gunung sipiso-piso, Air Terjun Sipiso-piso, Tongging, Sibolangit, Gajah bobok, daya Tarik budaya, dll; Kawasan Strategis Barus-Sibayak antara lain kawasan Gunung Sibayak, Bukit Gundaling, Kawasan permandian air panas Semangat Gunung-Doulu, Taman mejuah-juah Berastagi, dll; Kawasan Strategis Sinabung antara lain Gunung Sinabung, Danau Lau Kawar serta pengembangan potensi gunung api yang ada di Kabupaten Karo dan lain-lain; Kawasan Liang Melas, Kawasan Namokarang-Siosar, Kawasan Liang Dahar-Titan Arum, dan Kawasan Berastagi serta Kawasan strategis pariwisata lainnya yang siap untuk dikembangkan.

Keterkaitan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan PHTC Nasional maupun Provinsi

Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kabupaten Karo merupakan salah satu lokasi prioritas untuk Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif unggulan di Danau toba/Merek, Kabupaten Karo juga merupakan bagian dari Geopark

Kaldera Toba, selanjutnya sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan Provinsi Sumatera Utara yaitu KARDAPAK (Karo Dairi Pakpak Bharat), hal ini tentu akan berdampak terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Karo.

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, kedepan diperkirakan prospek pengembangan pariwisata akan semakin cerah. Hal ini yang terus mendorong pemerintah daerah untuk menggalakkan pembangunan di sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata akan berdampak sangat luas dan signifikan dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus berfungsi menjaga kelestarian kekayaan alam dan hayati.

8) Peningkatan Infrastruktur dan Penataan Kawasan: Mewujudkan Ruang Hidup yang Aman, Tertata, dan Produktif di Kabupaten Karo

Kawasan perkotaan Kabanjahe dan Berastagi merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo. Selain wilayah perkotaan, 5 (lima) tahun kedepan ibukota kecamatan juga diharapkan dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang cepat harus dibarengi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, perhubungan, ruang terbuka hijau dan perumahan menjadi kebutuhan yang mutlak.

Tujuan Program

Tujuan peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan adalah

- Meningkatkan konektivitas antarwilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, mempercepat distribusi barang dan jasa menuju perkotaan Kabanjahe dan Berastagi, serta menghubungkan sentra produksi dengan pasar.
- Menyediakan hunian layak yang dilengkapi dengan akses air bersih, sanitasi dan perumahan yang memadai, serta infrastruktur lingkungan yang mendukung seperti ruang terbuka hijau dan sarana prasarana persampahan.
- Melalui peningkatan dan penataan kawasan tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan ruang hidup yang aman, Tertata, dan Produktif di Kabupaten Karo

Strategi Pembiayaan

- Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo
- Dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dan Perumahan melalui APBN.
- Kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui skema CSR dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- Optimalisasi Dana Desa dan partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya sebagai bentuk kolaborasi pembangunan berbasis komunitas.

Ruang Lingkup Program

- Meningkatkan Aksesibilitas Ekonomi dan Konektivitas Wilayah melalui Peningkatan kemandirian jalan dan jembatan pada koridor penghubung pertanian, wisata, dan pusat logistik dan Perluasan jalan strategis

menuju wilayah dengan potensi ekonomi yang belum tergarap secara optimal. Selanjutnya pembangunan jalur kereta api jalur Siantar-Pematang Raya-Merek-Kabanjahe-Berastagi dan peningkatan Dermaga Tongging akan dikoordinasikan dengan Pemerintah atasan untuk mempercepat pelaksanaannya.

- Pemeliharaan Infrastruktur Penunjang dan Adaptif melalui Penataan sistem drainase terpadu di kawasan padat penduduk untuk mengurangi genangan dan kerusakan jalan serta Pemanfaatan teknologi konstruksi yang sesuai karakteristik geografis wilayah Karo.
- Peningkatan Infrastruktur Dasar Masyarakat melalui 1 Pengembangan sistem air minum yang memenuhi standar kuantitas, kontinuitas, dan kualitas (3K), Pembangunan rumah layak huni dan bersanitasi sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Penataan kawasan permukiman kumuh dan pengembangan infrastruktur lingkungan perkotaan yang ramah masyarakat, Optimalisasi lahan kosong untuk proyek infrastruktur.

Dampak yang diharapkan

- Meningkatnya aksesibilitas ekonomi dan konektivitas wilayah melalui peningkatan kemantapan jalan dan jembatan, pembangunan jalur kereta api dan peningkatan dermaga Tongging.
- Terpeliharanya Infrastruktur Penunjang melalui Penataan sistem drainase terpadu di kawasan padat penduduk untuk mengurangi genangan dan kerusakan jalan serta Pemanfaatan teknologi konstruksi yang sesuai karakteristik geografis wilayah Karo
- Meningkatnya Infrastruktur Dasar Masyarakat melalui Pengembangan sistem air minum yang memenuhi standar kuantitas, kontinuitas, dan kualitas (3K), Pembangunan rumah layak huni dan bersanitasi sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Penataan kawasan permukiman kumuh dan pengembangan infrastruktur lingkungan perkotaan yang ramah masyarakat.

9) Percepatan Pembangunan Daerah 3T (Termiskin, Tertinggal, Terluar): Jalan Menuju Pemerataan dan Inklusi

Kriteria penentuan lokus pembangunan untuk daerah 3T (Termiskin, Tertinggal dan Terluar) di Kabupaten Karo diantaranya sebagai berikut:

- ↳ Termiskin: diperoleh dari data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
- ↳ Tertinggal: merupakan daerah-daerah yang minim fasilitas infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta permukiman
- ↳ Terluar: merupakan daerah/kecamatan terluar di Kabupaten Karo seperti kecamatan Mardinding, Lau Baleng, Juhar dan Kuta Buluh.

Beberapa permasalahan daerah 3T dimaksud antara lain:

- Aksesibilitas menuju desa masih sangat rendah akibat jalan yang rusak dan transportasi yang sangat minim
- Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi dan rumah layak huni belum optimal
- Ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan masih belum baik

- Jaringan telekomunikasi belum tersedia

Tujuan Program

Tujuan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah

- Meningkatkan aksesibilitas menuju desa melalui peningkatan jalan dan peningkatan konektivitas
- Menyediakan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi hunian layak, pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi.

Strategi Pembiayaan

- Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo
- Dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dan Perumahan melalui APBN.
- Kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui skema CSR dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- Optimalisasi Dana Desa dan partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya sebagai bentuk kolaborasi pembangunan berbasis komunitas.

Ruang Lingkup Program

- Meningkatkan Aksesibilitas Ekonomi dan Konektivitas Wilayah melalui Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
- Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat melalui Pengembangan sistem air minum yang memenuhi standar kuantitas, kontinuitas, dan kualitas (3K), Pembangunan rumah layak huni dan bersanitasi sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi.

Dampak yang diharapkan

- Meningkatnya aksesibilitas ekonomi dan konektivitas wilayah melalui Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
- Tersedianya infrastruktur dasar masyarakat melalui Pengembangan sistem air minum yang memenuhi standar kuantitas, kontinuitas, dan kualitas (3K), Pembangunan rumah layak huni dan bersanitasi sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi.

Tabel 4.8
Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RKPD Kabupaten Karo dengan RKP
dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun pelaksanaan 2026

No	RPJMN		RPJMD Provinsi		RPJMD KABUPATEN KARO	
	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,68	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,68	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,5
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:			
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	109	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	109	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	75,9
	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,5	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,5	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,9
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	252	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	252	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	
					a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90
					b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98
5	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:			
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	- Literasi membaca	6,06 –12,12	- Literasi membaca	6,06 –12,12	- Literasi membaca	72,67
	- Numerasi	00,00 – 3,03	- Numerasi	00,00 – 3,03	- Numerasi	61,11
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	- Literasi membaca	35,99–38,49	- Literasi membaca	35,99–38,49	- Literasi membaca	71,34

No	RPJMN		RPJMD Provinsi		RPJMD KABUPATEN KARO	
	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026
	- Numerasi	33,70–36,20	- Numerasi	33,70–36,20	- Numerasi	67,88
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,45	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,45	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11- 12
	d) Harapan Lama Sekolah	13,36	d) Harapan Lama Sekolah	13,36	d) Harapan Lama Sekolah	14
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,49	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,49	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	17
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	68,5	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	68,5		
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	Tingkat Kemiskinan (%)	6,9
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34,99	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34,99	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	32,82
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			
11	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	21,18-21,20	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	21,18-21,20	Kontribusi industri pengolahan	3,88
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan PErikanan	3,33	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan PErikanan	3,33	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,94
12	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata			
	a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (juta Rupiah)	2.538.675,84	a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (juta Rupiah)	2.538.675,84	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,6
	b. Pendapatan dari Wisatawan Nusantara (miliar Rupiah)	2.179,51	b. Pendapatan dari Wisatawan Nusantara (miliar Rupiah)	2.179,51	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	1.577.400
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	7,40-8,00	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	7,40-8,00	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki HAKI (Pelaku Usaha)	200
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,15	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,15	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	1,95
	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,18	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,18	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	4,15
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,12	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,12	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,95

No	RPJMN		RPJMD Provinsi		RPJMD KABUPATEN KARO	
	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026
	d. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	3,26	d. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	3,26		
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	
	a. <i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i> (%)	4,44 - 4,96	a. <i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i> (%)	4,44 - 4,96	a. <i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i> (%)	2,095
	b. <i>Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal</i>	37,95	b. <i>Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal</i>	37,95		
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,40 - 59,31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,40 - 59,31		
17	Tingkat Penguasaan IPTEK		Tingkat Penguasaan IPTEK		Tingkat Penguasaan IPTEK	
	<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>		<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,1
					Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,81
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	71,01	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	71,01		
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20		
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,8
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1		
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30-31
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	Net Ekspor (Milyar)	1794,11
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	2,53
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	98,92
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri	5,4

No	RPJMN		RPJMD Provinsi		RPJMD KABUPATEN KARO	
	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026
24	Indeks Materi Hukum	70	Indeks Materi Hukum	70	Proksi di Daerah Indeks Reformasi Hukum (IRH)	87,4
	Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)		Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)			
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,09
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	Indeks Pelayanan Publik	3,57	Indeks Pelayanan Publik	8,5
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks Integritas Nasional	78
28	<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>		<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>			
	<i>Usulan Proksi:</i>		<i>Usulan Proksi:</i>			
	<i>a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah</i>	70	<i>a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah</i>	70	<i>a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah</i>	83,62
	<i>b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM</i>	60	<i>b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM</i>	60	<i>b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM</i>	93,4
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	68	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	68	Persentase gangguan dan ketertiban yang dapat diselesaikan	83,29
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82,12 – 85,66	Indeks Demokrasi Indonesia	82,12 – 85,66	Pembinaan Ormas dan jumlah konflik SARA	103/0
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,45-11,40	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,45-11,40	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (% PDRB)	0,0196
32	Tingkat Inflasi (%)	2,50 ± 1,00	Tingkat Inflasi (%)	2,50 ± 1,00	Tingkat Inflasi (%)	3±1
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77		
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13		
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03		
	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7		
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	Inklusi Keuangan (%)	97,52		

No	RPJMN		RPJMD Provinsi		RPJMD KABUPATEN KARO	
	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026
35	<i>Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah</i>		<i>Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah</i>			
	<i>Usulan Proksi:</i>		<i>Usulan Proksi:</i>			
	<i>Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)</i>		<i>Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)</i>			
36	<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)</i>		<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)</i>			
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	45,00
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,14	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,14	Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	0,97
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	59,9
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,421	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,421	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,4
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,47	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,47		
42	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup			
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,67	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,67	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,23
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	17	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	17	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	75,58
	c. Pengelolaan Sampah		c. Pengelolaan Sampah			
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	28 (17 terdaur ulang)	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	28 (17 terdaur ulang)	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	77
					- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	78,06
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
	a. Ketahanan Energi		a. Ketahanan Energi			
	- Indeks Ketahanan Energi	6,82	- Indeks Ketahanan Energi	6,82	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	529

No	RPJMN		RPJMD Provinsi		RPJMD KABUPATEN KARO	
	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026	INDIKATOR UTAMA PEMABNGUNAN	2026
	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,55	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,55	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,09
	c. Indeks Ketahanan Air Nasional	3,5	c. Indeks Ketahanan Air Nasional	3,5		
	Kapasitas Tampunguan Air (m3/kapita)		Kapasitas Tampunguan Air (m3/kapita)			
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,24	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,24	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,9
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	103
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Penurunan Emisi GRK	149351,2
	a. Kumulatif	19,07	a. Kumulatif	19,07		
	b. Tahunan	27,35	b. Tahunan	27,35		

Tabel 4.9
Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama dalam RKP dengan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026		
			Program	Kegiatan	Subkegiatan
Prioritas Nasional 1					
Prioritas Nasional 2	1	Pembangunan pangan akuatik (<i>blue food</i>)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pembangunan pangan hewani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
	3	Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
	4	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir			

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026		
			Program	Kegiatan	Subkegiatan
	5	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau			
	6	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
					Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
					Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/ Kabupaten/Kota atau di TPA/TPST Regional
					Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
					Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
Prioritas Nasional 3	7	Percepatan Pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
			Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026		
			Program	Kegiatan	Subkegiatan
Prioritas Nasional 4	8	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	9	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat
	10	Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kabupaten/ Kota dan pengembangan Pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Prioritas Nasional 5	11	Pengembangan KEK Sei Mangke			
Prioritas Nasional 6	12	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
Prioritas Nasional 7					
Prioritas Nasional 8					

4.4. Inovasi Daerah Kabupaten Karo

Dalam rangka meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Karo maka Pemerintah Kabupaten Karo menetapkan kebijakan inovasi daerah tersebut di bawah ini:

- 1. Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.

IID Kabupaten Karo dengan ditetapkan regulasi inovasi daerah tersebut di atas, terus meningkat. Adapun peningkatan IID Kabupaten Karo dari tahun 2020-2024, seperti disajikan di tabel di bawah ini.

Tabel 4.10
Predikat Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 - 2024

Tahun	SKOR/ INDEKS	PREDIKAT	PERINGKAT KAB/KOTA SE- SUMUT	PERINGKAT KAB SE- INDONESIA
2020	3.319 (skor)	SANGAT INOVATIF	3	49
2021	53,24 (Indeks)	INOVATIF	3	67
2022	53,69 (Indeks)	INOVATIF	2	107
2023	55,96 (Indeks)	INOVATIF	2	61
2024	62,02 (Indeks)	SANGAT INOVATIF	1	63

Jumlah usulan dan penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 meningkat. Jumlah yang diusulkan setiap tahun lebih sedikit karena jumlah yang diterapkan dihitung mulai dari 2 (dua) tahun terakhir sampai tahun berjalan. Berikut data penyelenggaraan inovasi daerah Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11
Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi Daerah yang
Diterapkan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penerapan SIDA					
1.1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	60	59	46	46	46
1.2	Jumlah total perangkat daerah	60	59	46	46	46
2	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan*	43	27	43	71	111
2.2	Jumlah inovasi yang diusulkan	21	22	49	62	49
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	205	123	88	115	227

Sumber: Bappedalitbang Kab. Karo, 2025
* Jumlah inovasi yang diusulkan ke IGA/Siindahkaka mulai 2 tahun terakhir sampai tahun berjalan

Bappedalitbang Kabupaten Karo juga menyediakan Ruang Diskusi Rutin Inovasi *Learning Organization Innovation Based* sejak tahun 2021 sebagai media yang dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi setiap jam dan hari kerja untuk berdiskusi terkait kendala dan permasalahan pelaksanaan dan penerapan inovasi pada instansinya. Tahun 2025, Ruang

Diskusi Rutin Inovasi *Learning Organization Innovation Based* dikembangkan menjadi RUDII/MO/RO dimana ruang diskusi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu RUDII (Ruang Diskusi Inovasi) via WhatsApp, RUDIIMO (Ruang Diskusi Inovasi Mingguan *Online*) dan RUDIIRO (Ruang Diskusi Inovasi Rutin *Offline*). Inovasi ini dibuat dalam rangka menyelaraskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi. Disamping itu, ada pertemuan-pertemuan rutin inovasi, *workshop* dan desk inovasi untuk fasilitator inovasi instansi.

Jumlah inovasi daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah Kabupaten Karo melalui SK Bupati Karo lebih banyak jumlahnya daripada yang ditetapkan penerapannya melalui Peraturan Bupati Karo. Jumlah Inovasi yang diusulkan ke IGA Kemendagri lebih sedikit lagi karena tingkat kematangan inovasi yang diterapkan rendah. Banyak inovasi yang tidak dilaksanakan dengan komitmen tinggi, belajar dan kerja keras sehingga tingkat kematangan inovasi rendah dan tidak layak diusulkan ke IGA Kemendagri.

Dalam rangka meningkatkan komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan tingkat kematangan inovasi yang diusulkan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karo menetapkan Peraturan Bupati Karo 01 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, yang memuat “pengurangan TPP akan dikenakan kepada seluruh ASN pada perangkat daerah tersebut apabila tidak memenuhi pelaporan kinerja berupa ayat 2 (b) Laporan Inovasi Perangkat Daerah setiap triwulan dan akhir tahun”. Hasil penerapan Peraturan bupati ini, pada tahun 2025 jumlah Perangkat Daerah/UPT PD yang melaksanakan inovasi meningkat seperti tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12

Jumlah usulan Inovasi Perangkat Daerah Siindahkaka Tahun 2022-2026

TAHUN	JUMLAH USULAN	STATUS	JUMLAH PD/UPT PD
2022	22	PENERAPAN	20
2023	51	PENERAPAN	42
2024	54	PENERAPAN	54
2025	62	PELAKSANAAN	62
2026	54	PERENCANAAN (INISIATIF)	54

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo melalui instansi pemerintah dalam hal ini Perangkat Daerah/UPT PD (Puskesmas) sudah merencanakan Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 sebanyak 49 inovasi dari 49 Perangkat Daerah/UPT PD (Puskesmas) yang terdiri dari 24 inovasi dari 24 Perangkat Daerah bukan kecamatan, 14 inovasi dari 14 Kecamatan dan 11 inovasi dari 11 Puskesmas. Jumlah Perangkat Daerah/UPT Perangkat Daerah Kabupaten Karo yang berinovasi pada Tahun 2026 masih belum sesuai dengan Perda dan Perbup, tetap diharapkan kepada 16 Perangkat Daerah/UPT Perangkat Daerah segera

merencanakan inovasi tahun 2026 agar sub kegiatan yang menjadi induknya dapat dipastikan sudah dianggarkan.

Perencanaan 49 inovasi daerah tahun 2026 sudah dianggarkan tahun 2026 dan akan dilaksanakan dengan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang sudah dimuat pada Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 lampiran II Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026. Rencana inovasi tersebut, dilaksanakan untuk mengatasi beberapa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Karo yang sudah dimuat pada Bab II Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026. Pelaksanaan dan penerapan inovasi daerah pada tahun 2026 ini akan menentukan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karo pada tahun 2027 dan 2028. Diharapkan Kabupaten Karo dapat meningkatkan indeks inovasi daerahnya. Komitmen, kerja keras, serta kemauan untuk selalu mau belajar dan menjadi lebih baik menjadi kunci berhasilnya pelaksanaan dan penerapan inovasi daerah pada tahun 2026.

Tabel 4.13
Inovasi Daerah Kab. Karo Pelaksanaan dan Penerapan Tahun 2026
Pada Aplikasi Siindahkaka (Sistem Informasi Daerah Kab. Karo)

No	Nama PD/UPT PD	Judul Inovasi
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	5LMan (La Murde; La Merap; La Melket; La Melantar; La Malas; Beriman)
2	Rumah Sakit Umum Daerah	KOTE KEKE (Komunikasi Telemedicine Kedokteran Kandungan Antara Rumah Sakit Dengan PUSKESMAS)
3	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	OTA NGOGE (Optimalisasi Pelayanan Perpustakaan)
4	Dinas Pertanian	Pemanfaatan Sisa Panen Wortel menjadi Keripik Enak dan Bergizi
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MPP DIGITAL KARO
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	MELAM (MELAYANI LANSIA AGAR MANDIRI)
7	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	DIGITALISASI ARSIP BUDAYA
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	PELAKU (Pelayanan Penataan Lingkungan)
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	K-POP (PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT SECARA ONLINE)
10	Inspektorat	SIAMAN (Aplikasi Bebas Temuan) v.2 Tahun 2026
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	“SIPEDASIKUTA” Sipesikap Desa Arah Aplikasi Kinerja Unggul Tertata
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	GOMECO
13	Dinas Lingkungan Hidup	KUTAKU (Kelengi Ingan Tading, Uraki Sampah, Tata Lingkungan Alu Tulus, Kiniersadaan Ras Ukur Meriah)
14	Dinas Kesehatan	“PELADUNIK” (PENGELOLAAN LAPORAN DAN ADMINISTRASI ELEKTRONIK)
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	SAPO PANGAN (STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN MELALUI KIOS PANGAN)

No	Nama PD/UPT PD	Judul Inovasi
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SENTABI (SINERGI NIAGA TATA BARANG BERSIH DAN RAPI)
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PADA SISTEM JARINGAN DRAINASE KOTA KABANJAHE DAN BERASTAGI
18	Satuan Polisi Pamong Praja	S. MILALA
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	CAKEP (CETAK KEMBALI KARTU KELUARGA - MELALUI PERMOHONAN SECARA ONLINE)
20	Dinas Sosial	LANDEKAH
21	Dinas Pendidikan	E-ELAI ((Efektif, Lancar, Akuntabel, dan ter-Integrasi))
22	Dinas Perhubungan	SMAPAKA (Smart Parkir Kabanjahe)
23	Badan Pendapatan Daerah	Optimalisasi PBB P2 melalui Upgrade SIP PBB P2 menjadi E-PBB P2
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PERIK (PELAPORAN KONFILIK) TAHUN 2026
25	Sekretariat Daerah	Lasuanmas (Laporan Survey Kepuasan Masyarakat)
26	Kecamatan Kabanjahe	KABANJAHE TEMANTA (Tentram, Aman dan Taat Administrasi)
27	Kecamatan Payung	Taman Tematik 2026
28	Kecamatan Tigapanah	RUKO WARIS (Ruang Koordinasi Ahli Waris)
29	Kecamatan Simpang Empat	LADURU KETAPANG (Lahan Tidur Untuk Ketahanan Pangan)
30	Kecamatan Merek	BINA DESA
31	Kecamatan Naman Teran	DESA DIGITAL
32	Kecamatan Juhar	Juhar Si Bela (Juhar Siaga Bencana Alam) Inovasi 2026
33	Kecamatan Mardingding	TOKEH MARDINGDING (Tanaman Obat Kesehatan Mardingding)
34	Kecamatan Dolat Rayat	DOLAR BESTI (Dolat Rayat Bebas Stunting)
35	Kecamatan Lau Baleng	BUDAK KP (BUDIDAYA IKAN JAGA KETAHANAN PANGAN) 2026
36	Kecamatan Barusjahe	Pantun Ceria (Pelayanan dengan Sopan Santun, Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, Akuntabel)
37	Kecamatan Munte	Ke-PAJAK (Kejar Pajak)
38	Kecamatan Berastagi	BERALIH (Berastagi Ramah Lingkungan)
39	Kecamatan Merdeka	KLINIK APBDes MERDEKA (KLIPER) (2026)
40	Puskesmas Barusjahe	JEMBOL DANSA
41	Puskesmas Tigabinanga	SIPESIKAP (Aplikasi Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu)
42	Puskesmas Kabanjahe	MELIAS (Melayani Lansia Agar Sehat)
43	Puskesmas Payung	ARONTA (Aplikasi Rapor Kesehatan Anakta)
44	Puskesmas Tigapanah	ULALUPA (Undangan dan Informasi Elektronik kegiatan Luar Gedung Puskesmas Tigapanah)
45	Puskesmas Merek	TEKAN SIMANIS (Deteksi Tangani Hipertensi dan Kencing Manis) Tahun 2026
46	Puskesmas Merdeka	Kepul Sajiku (Keluarga Peduli Sehat Jiwaku)
47	Puskesmas Dolatrayat	PAPARASI EKSLUSIF
48	Puskesmas Singa	“PEVITA CETING” (Pemberian Vitamin Cegah Stanting)
49	Puskesmas Korpri	SI SEHAT IBU (AKSI PEDULI KESEHATAN BALITA GIZI BURUK)

Sumber: SiIndahKaKa

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan prioritas daerah merupakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Terkait dengan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut dalam pengimplementasiannya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengkondisikan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini terkait dengan fungsi pemerintah yakni stabilisasi, distribusi dan alokasi. Dengan demikian akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mampu membuat dan menyusun program dan kegiatan berdasarkan perkiraan jumlah dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dalam menentukan program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan kapasitas riil, terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dapat dilihat melalui hasil musrenbang RKPD maupun yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai berikut:

- a) **Prioritas I.** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
- b) **Prioritas II.** dialokasikan untuk membiayai kebutuhan belanja mendukung keselarasan prioritas nasional dan prioritas pembangunan daerah;
- c) **Prioritas III.** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan merupakan program prioritas diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Utara dan nasional. Dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026 ini, dilakukan melalui pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*topdown*).

Dalam perencanaan dan pendanaan daerah, hasil evaluasi pengukuran kinerja penting dalam proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi perangkat daerah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam periode RPJMD.

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Karo terlampir di Lampiran II Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 ini.

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			399.243.319.690,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			399.243.319.690,00	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	309.073.398.837,36	DINAS PENDIDIKAN
2	1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan	74,33%	89.740.470.852,64	DINAS PENDIDIKAN
3	1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Terwujudnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang adaptif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik	100%	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4	1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja guru serta tenaga kependidikan	100%	130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5	1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Peningkatan persentase lembaga PAUD & Pendidikan nonformal yang memiliki izin operasional resmi dan terakreditasi	100%	199.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			171.801.756.948,00	DINAS KESEHATAN
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			171.801.756.948,00	DINAS KESEHATAN
6	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	100.131.823.190,00	DINAS KESEHATAN
7	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	69.562.660.758,00	DINAS KESEHATAN
8	1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	1.370.000.000,00	DINAS KESEHATAN
9	1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	222.273.000,00	DINAS KESEHATAN
10	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	515.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			53.386.222.462,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			53.386.222.462,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
11	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Indeks	52.853.749.950,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
12	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Indikator SPM Rumah Sakit/ Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar/ Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar	95/95/100 %/%/%	532.472.512,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			97.469.259.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			97.469.259.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
13	1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	9.602.470.062,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
14	1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	56%	13.695.398.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
15	1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	74,80%	4.459.323.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
16	1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	64.5 %	7.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
17	1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	63%	1.357.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
18	1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	25%	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
19	1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	64%	60.405.068.188,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
20	1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	74%	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.772.474.984,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			8.772.474.984,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
21	1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi	100 % 81 Indeks	4.372.617.456,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
22	1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara korban Bencana dan yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah undefined	100 % 3,0 Persen undefined undefined	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
23	1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	25%	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
24	1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan	100 % 15,19 % undefined undefined	3.949.857.528,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
25	2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1 Kasus 70 %	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
26	2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	3 Ha 66,60 %	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.045.254.514,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15.045.254.514,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
27	1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	99,49 %	14.338.883.514,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
28	1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	64,28 % 73,54 %	656.371.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
29	1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	84,05 % 88,25 %	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.610.320.288,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.610.320.288,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
30	1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	15,15 %	5.300.758.555,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
31	1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	21,35 %	1.309.561.733,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.275.171.472,00	DINAS SOSIAL
	1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.275.171.472,00	DINAS SOSIAL
32	1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	4.214.381.762,00	DINAS SOSIAL
33	1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	65,38 % 65,38 %	270.000.000,00	DINAS SOSIAL
34	1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	65,38 % 65,38 %	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
35	1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	65,38%	310.789.710,00	DINAS SOSIAL
36	1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial	97,66%	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
37	1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	110.000.000,00	DINAS SOSIAL
38	1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.189.169.709,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			5.860.379.513,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
39	2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	96,6 persen	4.690.379.513,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
40	2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase Tenga Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi	16 PERSEN	950.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
41	2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	20 PERSEN	40.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
42	2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	37 persen	180.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			2.328.790.196,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
43	2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-	85.802.145,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
44	2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	11 Unit Usaha	85.802.145,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
45	2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	85.802.142,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
46	2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	425 Orang	1.142.241.040,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
47	2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	63 Kelompok Masyarakat	209.142.724,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
48	2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	70 Unit Usaha	590.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
49	2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Wirausaha yang terfasilitasi	3,2 persen	130.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.627.266.721,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			5.901.334.470,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
50	2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100 Persen	5.350.334.470,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
51	2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	96,42 Persen	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
52	2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terselenggaranya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	85%	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
53	2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	INDEKS KETIMPANGAN GENDER	0,421 Persen	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
54	2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Pengelolaan Data Gender dan Anak	5 Persen	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
55	2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	65,54 Persen	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
56	2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapat layanan komprehensif dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	66,4 Persen	96.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			3.725.932.251,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
57	2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,15 Persen	322.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
58	2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet Need) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	19,61 Persen 57,1 Persen	2.203.822.251,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
59	2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Kelompok yang mengikuti Kegiatan Ketahanan	100 Persen	1.199.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.777.952.980,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			8.777.952.980,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
60	2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Nilai	7.737.952.980,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
61	2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	92,5 Nilai	670.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
62	2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	1%	220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
63	2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	95%	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.945.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.945.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
64	3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	42 Ton	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
65	3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	713 Ton	1.415.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
66	3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Hasil Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	14 Ton	330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			28.907.803.074,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			28.907.803.074,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
67	2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	11.308.797.825,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
68	2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	undefined undefined	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
69	2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79.40 Indeks	740.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
70	2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peningkatan Pengelolaan RTH	1 Lokasi	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
71	2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	1 Orang	45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
72	2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat terkait 3R dan Bank Sampah	2 Dokumen	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
73	2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	50 Entitas	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
74	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlesaikannya Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	2 Pengaduan	70.230.107,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
75	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani	77%	16.543.775.142,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.761.404.422,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.761.404.422,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
76	2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	4.593.810.634,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
77	2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk (%) / Kepemilikan Kartu Indentitas Anak (%)	99,3/65 %	644.159.474,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
78	2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi Berakta Kelahiran (%) / Rasio Pasangan Berakta Nikah (%)	99/65 %	149.105.534,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
79	2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah sudah/belum	329.640.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
80	2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi	Ada Ada/Tidak Ada	44.688.680,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.430.116.311,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			10.430.116.311,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
81	2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.200.808.811,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
82	2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu Jumlah Lembaga Ekonomi Desa	100 % 259 Lembaga	4.609.307.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
83	2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	620.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.590.364.745,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			21.590.364.745,00	DINAS PERHUBUNGAN
84	2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.225.653.686,00	DINAS PERHUBUNGAN
85	2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten / Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	97/0,2 Rasio/Indeks	14.349.711.059,00	DINAS PERHUBUNGAN
86	2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.854.370.440,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.517.770.184,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
87	2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	4.218.647.105,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
88	2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks SPBE	3,10 Indeks	1.207.303.659,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
89	2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	3,10 Indeks	3.091.819.420,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			286.600.256,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
90	2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	2,81 indeks	286.600.256,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
91	2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks SPBE	3,10 Indeks	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.531.922.531,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.531.922.531,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
92	2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	90 persen	4.466.042.981,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
93	2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total terhadap target Investasi	2.09 persen	230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
94	2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	3 persen	271.880.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
95	2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Peningkatan Perizinan dan Non Perizinan	4,5 persen	253.944.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
96	2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100 persen	270.055.550,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
97	2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan data dan informasi Penanaman Modal	100 persen	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			3.150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
98	2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan	7%	800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
99	2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet binaan yang memenangkan kejuaraan	50%	2.350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
100	2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	30%	400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
101	2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan dikembangkan	10%	250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
102	2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan, Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	45%	650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			21.544.084.890,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			21.544.084.890,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										PARIWISATA
103	3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	8.782.061.155,14	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
104	3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	5%	7.209.066.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
105	3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	50%	4.079.957.734,86	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
106	3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	3%	550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
107	3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	24%	923.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.396.938.150,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.246.938.150,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
108	2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	4.834.360.629,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
109	2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Nilai IPLM	69,30%	392.577.521,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
110	2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1 Koleksi	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
111	2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	67,30%	80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
112	2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	67,90%	70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			29.527.296.444,00	DINAS PERTANIAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			29.527.296.444,00	DINAS PERTANIAN
113	3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Tertib Kesekretariatan pada Dinas Pertanian	87,64%	19.791.000.794,00	DINAS PERTANIAN
114	3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1851172 Ton	6.543.776.500,00	DINAS PERTANIAN
115	3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1851172 Ton	2.050.000.000,00	DINAS PERTANIAN
116	3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan veteriner	70%	458.793.600,00	DINAS PERTANIAN
117	3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	140 Ha	196.424.796,00	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
118	3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	12,95%	487.300.754,00	DINAS PERTANIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			15.158.200.614,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
119	3	29	5			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi	20%	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			13.532.098.614,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
120	3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 indeks	8.770.098.614,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
121	3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah siup yang diterbitkan Jumlah siup yang diterbitkan	1250 1250 Siup	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
122	3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang terkelola dengan baik	58,82%	3.910.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
123	3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
124	3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan nilai ekspor	7499 miliar	658.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
125	3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur sarana perdagangan yang ditera dan tera ulang	100%	144.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.611.102.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
126	3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase pertumbuhan industri/ikm	4,12%	1.536.102.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
127	3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			32.604.023.266,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH			32.604.023.266,00	SEKRETARIAT DAERAH
128	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	100%	28.508.073.266,00	SEKRETARIAT DAERAH
129	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skor E-PPD Persentase Fasilitasi Kebijakan Daerah Terkait Kesejahteraan Rakyat Indeks Reformasi Hukum	2,85 Skor 73 % 87,6 Indeks	3.154.908.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
130	4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Fasilitasi Kebijakan Daerah Terkait Perekonomian dan Pembangunan	38 Indeks 82 %	941.042.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			57.957.169.391,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2				SEKRETARIAT DPRD			57.957.169.391,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
131	4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	29.475.209.391,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
132	4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada Ada/ Tidak	28.481.960.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	X					NON URUSAN			1.894.778.204,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.894.778.204,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
133	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	1.894.778.204,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			10.197.657.407,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1				PERENCANAAN			9.646.290.921,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
134	5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100 Persen	6.667.141.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
135	5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	100%	1.427.700.533,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
136	5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	100%	1.551.449.016,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			551.366.486,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
137	5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	100 Persen	551.366.486,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			300.914.706.853,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2				KEUANGAN			300.914.706.853,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
138	5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	7.087.737.982,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
139	5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru Yang Dialokasikan melalui TKD, 2. Persentase alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, 3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4.	100%	292.908.007.502,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Persentase Penurunan SILPA, 5. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu			
140	5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	100%	918.961.369,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			12.824.702.634,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2				KEUANGAN			12.824.702.634,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
141	5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 Indeks	8.373.018.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
142	5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	101353011918 Rp	4.451.684.484,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.013.287.795,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3				KEPEGAWAIAN			5.743.287.795,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
143	5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Laporan Penunjang Perangkat Daerah	100 persen	4.718.528.110,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
144	5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterisian Jabatan/Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Jumlah Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin aparatur Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah,dan Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	100/17/15 %/%/ASN 15 ASN 17 jam 36 dan 323 jabatan 5600 orang	1.024.759.685,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			270.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
145	5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	16,72 % 17 % 17/ 16,72 %/%	270.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			10.014.543.499,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1				INSPEKTORAT DAERAH			10.014.543.499,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
146	6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100 persen	7.369.066.189,00	INSPEKTORAT DAERAH
147	6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpanan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	83.3 persen	1.617.904.130,00	INSPEKTORAT DAERAH
148	6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpanan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	83.7 persen	1.027.573.180,00	INSPEKTORAT DAERAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			6.940.654.725,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1				KECAMATAN			6.940.654.725,00	KECAMATAN KABANJAHE
149	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Perangkat Daerah	100 Persen	6.847.096.686,00	KECAMATAN KABANJAHE
150	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	91 Indeks	42.439.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
151	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	17.100.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
152	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	95%	2.850.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
153	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	28.729.039,00	KECAMATAN KABANJAHE
154	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100 Persen	2.440.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1				KECAMATAN			800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
155	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1				KECAMATAN			800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
156	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1				KECAMATAN			800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
157	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1				KECAMATAN			800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
158	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	7	1				KECAMATAN			800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
159	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			5.542.080.686,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1				KECAMATAN			5.542.080.686,00	KECAMATAN BERASTAGI
160	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100 Persen	5.416.883.236,00	KECAMATAN BERASTAGI
161	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,20 Indeks	57.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
162	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di tingkat Kecamatan	100 Persen	5.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
163	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	63.197.450,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1				KECAMATAN			800.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
164	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1				KECAMATAN			800.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
165	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1				KECAMATAN			800.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
166	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1				KECAMATAN			800.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
167	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.807.503.412,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1				KECAMATAN			2.807.503.412,00	KECAMATAN BARUSJAHE
168	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	2.703.399.439,00	KECAMATAN BARUSJAHE
169	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	3,58 Indeks	51.046.230,00	KECAMATAN BARUSJAHE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
170	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	85%	3.877.943,00	KECAMATAN BARUSJAHE
171	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibbum yang dapat diselesaikan	80%	7.560.000,00	KECAMATAN BARUSJAHE
172	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Wawasan Kebangsaan	75%	30.892.850,00	KECAMATAN BARUSJAHE
173	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-Rata Capaian Peningkatan Kapasitas Apartur Desa dan Fasilitasi Tata Kelola Desa	80%	10.726.950,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.990.100.773,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1				KECAMATAN			2.990.100.773,00	KECAMATAN TIGA PANAH
174	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	2.784.953.527,00	KECAMATAN TIGA PANAH
175	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,71 Indeks	110.924.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
176	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	11 kegiatan	16.000.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
177	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Keetertiban Umum Masyarakat di tingkat Kecamatan	100%	16.623.246,00	KECAMATAN TIGA PANAH
178	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan idiologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	50.000.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
179	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi	29 Pemerintahan Desa	11.600.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.965.618.099,00	KECAMATAN MEREK
	7	1				KECAMATAN			2.965.618.099,00	KECAMATAN MEREK
180	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	2.783.218.099,00	KECAMATAN MEREK
181	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	109.050.000,00	KECAMATAN MEREK
182	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	8.000.000,00	KECAMATAN MEREK
183	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	15.350.000,00	KECAMATAN MEREK
184	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	50.000.000,00	KECAMATAN MEREK
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.459.147.815,00	KECAMATAN MUNTE
	7	1				KECAMATAN			2.459.147.815,00	KECAMATAN MUNTE
185	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	2.201.848.102,00	KECAMATAN MUNTE
186	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	151.000.000,00	KECAMATAN MUNTE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
187	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	16.150.000,00	KECAMATAN MUNTE
188	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	18.684.000,00	KECAMATAN MUNTE
189	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaa	100%	61.315.713,00	KECAMATAN MUNTE
190	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100%	10.150.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.844.009.512,00	KECAMATAN JUHAR
	7	1				KECAMATAN			2.844.009.512,00	KECAMATAN JUHAR
191	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100 persen	2.718.154.206,00	KECAMATAN JUHAR
192	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Indeks	99.034.340,00	KECAMATAN JUHAR
193	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	6.053.140,00	KECAMATAN JUHAR
194	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 persen	20.767.826,00	KECAMATAN JUHAR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.734.090.165,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1				KECAMATAN			2.734.090.165,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
195	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat	100%	2.604.601.572,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
196	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks	69.883.420,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
197	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	20.600.000,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
198	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	39.005.173,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	X					NON URUSAN			2.807.870,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.807.870,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
199	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat	100%	2.807.870,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1				KECAMATAN			800.000.000,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
200	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	800.000.000,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.394.569.918,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1				KECAMATAN			2.394.569.918,00	KECAMATAN LAU BALENG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
201	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat	100%	2.267.555.083,00	KECAMATAN LAU BALENG
202	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	87,10 Indeks	68.489.130,00	KECAMATAN LAU BALENG
203	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	9.683.580,00	KECAMATAN LAU BALENG
204	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	5.000.000,00	KECAMATAN LAU BALENG
205	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	40.764.125,00	KECAMATAN LAU BALENG
206	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100%	3.078.000,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.289.163.085,00	KECAMATAN MARDINDING
	7	1				KECAMATAN			2.289.163.085,00	KECAMATAN MARDINDING
207	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	89 Persen	2.140.020.105,00	KECAMATAN MARDINDING
208	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks	100.047.280,00	KECAMATAN MARDINDING
209	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100 Persen	4.800.000,00	KECAMATAN MARDINDING
210	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	41.575.700,00	KECAMATAN MARDINDING
211	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100 Persen	2.720.000,00	KECAMATAN MARDINDING
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.064.261.731,00	KECAMATAN PAYUNG
	7	1				KECAMATAN			2.064.261.731,00	KECAMATAN PAYUNG
212	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	100%	1.941.812.387,00	KECAMATAN PAYUNG
213	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	tingkat indeks kepuasan masyarakat	84,3 indeks	57.599.940,00	KECAMATAN PAYUNG
214	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	23.987.100,00	KECAMATAN PAYUNG
215	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	11.980.000,00	KECAMATAN PAYUNG
216	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	20.882.304,00	KECAMATAN PAYUNG
217	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100%	8.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.105.528.506,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1				KECAMATAN			3.105.528.506,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
218	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan	100 Persen	2.941.629.256,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
219	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	3.8 Indeks	106.600.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
220	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	4.299.250,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
221	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	53.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.385.056.221,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1				KECAMATAN			2.385.056.221,00	KECAMATAN KUTABULUH
222	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	2.206.100.621,00	KECAMATAN KUTABULUH
223	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	95 Indeks	121.925.900,00	KECAMATAN KUTABULUH
224	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	7.570.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
225	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	5.917.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
226	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	35.982.700,00	KECAMATAN KUTABULUH
227	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100%	7.560.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.143.058.511,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1				KECAMATAN			2.143.058.511,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
228	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat	100%	2.044.337.783,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
229	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks	59.465.420,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
230	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	14.979.600,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
231	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	24.275.708,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.308.528.196,00	KECAMATAN MERDEKA
	7	1				KECAMATAN			2.308.528.196,00	KECAMATAN MERDEKA
232	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	2.177.455.409,80	KECAMATAN MERDEKA
233	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks	62.647.820,00	KECAMATAN MERDEKA
234	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	17.174.610,00	KECAMATAN MERDEKA
235	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	13.209.824,00	KECAMATAN MERDEKA
236	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	34.541.232,20	KECAMATAN MERDEKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
237	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100%	3.499.300,00	KECAMATAN MERDEKA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.595.732.299,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1				KECAMATAN			2.595.732.299,00	KECAMATAN NAMANTERAN
238	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	100%	2.471.043.033,00	KECAMATAN NAMANTERAN
239	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	87,98%	55.590.856,00	KECAMATAN NAMANTERAN
240	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	8.843.635,00	KECAMATAN NAMANTERAN
241	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	15.254.775,00	KECAMATAN NAMANTERAN
242	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	45.000.000,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.696.474.456,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1				KECAMATAN			2.696.474.456,00	KECAMATAN TIGANDERKET
243	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja kecamatan	100%	2.498.324.456,00	KECAMATAN TIGANDERKET
244	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 Indeks	54.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
245	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	29.700.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
246	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	16.850.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
247	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	55.200.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
248	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100%	42.400.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			9.380.255.544,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			9.380.255.544,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
249	8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	5.034.489.094,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
250	8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	11 Kegiatan	1.086.774.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
251	8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	80%	1.111.707.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
252	8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	80%	27.489.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
253	8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan	36 Dokumen	1.825.262.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan			
254	8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	80%	294.534.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 5.2
Dukungan Program, Kegiatan dan Subkegiatan terhadap Program Strategis Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026

No	Program Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	
1	Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mewujudkan ekosistem pendidikan unggul;	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan ruang kelas	1.500.000.000,00
				Rehabilitasi sedang/berat sarana/prasarana	400.000.000
				Pengadaan mebel sekolah	500.000.000
				Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	300.000.000
				Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	1.080.000.000
				Pembangunan laboratorium sekolah dasar	300.000.000
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	190.000.000
				Perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik	500.000.000
				Pengadaan perlengkapan peserta didik	500.000.000
				Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik	200.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan ruang kelas smp 1 kabanjahe (2 ruang)	1.500.000.000
				Rehap Ruang kelas smp 1 kabanjahe (2 ruang)	500.000.000
				Pembangunan ruang kepala sekolah	500.000.000,00
				Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	500.000.000,00
				Pembangunan perpustakaan sekolah	300.000.000,00
				Pembangunan laboratorium	300.000.000
				Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	500.000.000
2	Transformasi Kabupaten Karo menjadi sentra pelayanan kesehatan unggul dan berkelanjutan;	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	4.000.000.000
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	850.000.000

No	Program Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	
			Kota		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.450.000.000
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.520.000.000
3	Mewujudkan layanan pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berbasis data;	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	527.698.740
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	68.250.000
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	64.875.000
4	Pelestarian Budaya Karo dengan mewujudkan identitas, martabat, dan pembangunan berwawasan budaya;	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	224.609.000,00
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	25.391.000,00
				Penetapan Cagar Budaya	100.000.000,00
				Pengembangan Cagar Budaya	100.000.000,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	450.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	150.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	250.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27.489.000,00

No	Program Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	248.080.000,00
5	Transformasi Pertanian Kabupaten Karo dengan mewujudkan Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming menuju swasembada dan kedaulatan pangan;	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	30.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	85.802.145,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	85.802.142,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	883.102.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	203.000.000,00
			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Citra Produk Ekspor	60.000.000,00

No	Program Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	
6	Mengakselerasi keunggulan ekonomi Karo dengan penguatan UMKM, Hilirisasi Industri, dan modernisasi pusat perdagangan berbasis potensi lokal;	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	590.000.000,00
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	80.000.000,00
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10.000.000,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100.000.000,00
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	40.000.000,00
				Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	40.000.000,00
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	50.000.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100.000.000,00
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	553.000.000,00
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	883.102.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.730.000.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	30.000.000,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00

No	Program Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	470.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	200.000.000
		PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000,00
		PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten Kota	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis ANDALALIN	55.000.000,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	75.000.000,00
7	Pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan dengan mewujudkan The Paradise of Karo Highland;	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.109.066.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	250.000.000,00
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	349.999.999,86
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	3.179.957.735,00
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	300.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	198.000.000,00
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	425.000.000,00

No	Program Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Perlindungan Cagar Budaya	450.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.113.276.500,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	160.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	400.000.000,00
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000,00
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	500.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	180.000.000,00
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.730.000.000,00

No	Program Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	553.000.000,00
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	883.102.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	288.802.074,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	50.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	300.000.000,00
			Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	80.000.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	30.000.000,00

No	Program Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	4.409.323.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	2.450.000.000,00
				Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.200.000.000,00
				Penataan bangunan dan lingkungan di Daerah Kabupaten/ Kota	600.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	500.000.000,00
				Pemeliharaan Rutin Jalan	4.050.393.471,00
				Pembangunan Jalan	17.132.063.700,00
				Rehabilitasi Jalan	550.000.000,00
				Rekonstruksi Jalan	37.372.611.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	803.280.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	470.000.000,00
8	Peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan dengan mewujudkan ruang hidup yang aman, tertata, dan produktif di Kabupaten Karo;	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	7.300.000.000,00
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.239.398.000,00
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.156.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	4.409.323.000,00
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan	50.000.000,00

No	Program Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	2.450.000.000,00
				Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.200.000.000,00
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.500.000.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.357.000.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	500.000.000,00
				Pemeliharaan Rutin Jalan	4.050.393.471,00
				Pembangunan Jalan	17.132.063.708,00
				Rehabilitasi Jalan	550.000.000,00
				Penggantian Jembatan	-
				Rehabilitasi Jembatan	500.000.000,00
				Rekonstruksi Jalan	37.372.611.009,00
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	300.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	50.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	50.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000,00

No	Program Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	50.000.000,00
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	100.000.000,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	300.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100.000.000,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100.000.000,00
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	3.749.857.528,00
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
				Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	11.811.711.059,00
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	50.000.000,00
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.100.000.000,00

No	Program Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	
				Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000,00
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15.000.000,00
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000,00
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	38.000.000,00
				Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	400.000.000,00
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12.000.000,00
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	55.000.000,00
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	15.000.000,00
				Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	11.000.000,00
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	11.000.000,00
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	35.000.000,00
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum	25.000.000,00

No	Program Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	
				Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	6.000.000,00
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000,00
			Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00
9	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Jalan Menuju Pemerataan dan Inklusi).	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	500.000.000,00
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	37.554.000.000,00
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.500.000.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	500.000.000,00
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	500.000.000,00
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	500.000.000,00
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	23.119.900.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	3.936.055.000,00
				Pembangunan Puskesmas	8.425.000.000,00

No	Program Strategis Daerah	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Subkegiatan	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	850.000.000,00
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.450.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	500.000.000,00
				Pemeliharaan Rutin Jalan	4.050.393.471,00
				Pembangunan Jalan	17.132.063.708,00
				Rehabilitasi Jalan	550.000.000,00
				Penggantian Jembatan	-
				Rehabilitasi Jembatan	500.000.000,00
				Rekonstruksi Jalan	37.372.611.009,00
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	300.000.000,00

Tabel 5.3

Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun pelaksanaan 2026

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026		
	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1.	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal			
	Bentuk Intervensi:			
	· Pembangunan dan Penyelenggaraan SMA/SMK Unggulan			
	· Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Kurikulum Bermuatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE”			
	· Pengembangan Minat Bakat Siswa melalui Event Lomba dan Pergelaran Seni, Budaya dan Olahraga Unggulan Daerah antar SMA/SMK dan MA			
	· Penguatan Pengembangan Pusat Pelatihan dan Keterampilan serta Kerjasama Rekrutmen Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha - Dunia Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
	Bentuk Intervensi:			
	· Inkubasi Usaha untuk Perempuan dan Pemuda	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026		
	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Subkegiatan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
				Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
	Dukungan terhadap Pengembangan Prestasi Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas khususnya pada Bidang Seni, Budaya dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota,Tahun Anggaran 2025
	Pengembangan Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
3	Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu			
	Bentuk Intervensi:			
	Sistem Informasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Ketersediaan Dokter dan Layanan Pengaduan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026		
	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Subkegiatan
	· Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	· Penuntasan Kasus TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis
	· Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Sentra Pelayanan Kesehatan dan RSUD Kab/Kota dengan Layanan Unggulan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
	· Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi			
	· Bapak Asuh dalam penurunan Gizi Buruk dan Prevelensi Stunting	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
	· Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSYAT)	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
	· Pengembangan RS Haji Medan menuju RS berstandar Internasional			
4	Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran			
	Bentuk Intervensi:			
	· MARIPRO (Masyarakat Rentan Produktif)			

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026		
	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Subkegiatan
5	Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah			
	Bentuk Intervensi:			
	· INDHIRA (Industrialisasi dan Hilirisasi Sumatera Utara)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	· SEMESTA (Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara)			
	· Reformasi, Efisiensi dan Penyesuaian Model Bisnis serta Tata Kelola BUMD			
6	· Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang stabil			
	Pengembangan ekonomi Hijau dan Biru			
	Bentuk Intervensi:			
	· Pengembangan Ekonomi Hijau			
7	· Pengembangan Ekonomi Biru			
	Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	Bentuk Intervensi:			
	· Peningkatan Produktivitas Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
	· Peningkatan Kesejahteraan Petani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026		
	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Subkegiatan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
	Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal)			

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026		
	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Subkegiatan
	Bentuk Intervensi:			
	Pengembangan Ekosistem dan Destinasi Kepariwisata Holistik - 6A (Attraction, Accesibilities, Amenities, Available Package, Activities, Ancillary Service)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
	Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya, Kearifan Lokal dan Alam	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026		
	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Subkegiatan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
				Pelindungan Cagar Budaya
				Pengembangan Cagar Budaya
9	Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi			
	Bentuk Intervensi:			
	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis Digital	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
				Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
10	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan			
	Bentuk Intervensi:			

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026		
	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Subkegiatan
	· Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
11	Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat			
	Bentuk Intervensi:			
	· Digitalisasi Layanan Publik			
12	Infrastruktur Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Dan Irigasi Yang Langsung Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal			
	Bentuk Intervensi:			
	· Program PIJAR (Peningkatan Infrastruktur Jalan JembAtan dan IRigasi)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
				Pemeliharaan Rutin Jalan
				Pembangunan Jalan
				Rehabilitasi Jalan

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026		
	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Subkegiatan
				Penggantian Jembatan
				Rehabilitasi Jembatan
				Rekonstruksi Jalan
				Pemeliharaan Rutin Jembatan
	· Pengembangan Kawasan Deli Sports City melalui Kerjasama Pembangunan Kawasan Ekonomi Produktif			
13	Pengembangan Sistem Logistik Dan Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Daya Saing			
	Bentuk Intervensi:			
	· Peta Jalan Sentra Produksi Pertanian Sumatera Utara dalam rangka mendukung Sistem Logistik dan Transportasi untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Memperluas Akses Pasar bagi Produsen Lokal, termasuk Petani dan Pengusaha kecil.			
	· Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan Kereta Commuter			
	· Subsidi Transportasi untuk Pertanian Pakan dan Pangan			
	· Dukungan Pengembangan Sistem Transportasi Daerah Terpencil dan Pedesaan			
14	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana			
	Bentuk Intervensi:			
	· Konservasi Sumber Daya Alam			
	· Pengurangan Emisi Karbon	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa			
	Bentuk Intervensi:			
	· Program Membangun Desa Produktif Terpadu			

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD 2026		
	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Subkegiatan
16	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun			
	Bentuk Intervensi:			
	· Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran dan Empati)	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
17	Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib			
	Bentuk Intervensi:			
	· SUMUT BERSATU (Bersama, Aman, Tertib dan Unggul)			

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci pada akhir tahun perencanaan.

Adapun indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan disajikan pada tabel 6.1 dan 6.2 di bawah ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo Tahun 2026

No	Indikator	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target 2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	68,51	Indeks	69,2
2	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	Indeks	3,7
3	Indeks Inovasi Daerah	62,02	Indeks	64
4	Indeks Integritas Nasional	76,07	Indeks	78
5	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Opini	WTP
6	Nilai SAKIP Kabupaten Karo	B	Nilai	BB
7	Indeks Pelayanan Publik	88,5	Indeks	89
8	Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks	
9	Indeks Profesionalitas ASN	75,69	Indeks	75,8
10	Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	0,95	Persen	0,97
11	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	37,93	Persen	45,00
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,44	Tahun	73,5
13	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	75,90	Jiwa/100.000 kelahiran hidup	75,90
14	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	23,45	Persen	21,29
15	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,22	Persen	5,00-5,50
16	Tingkat Kemiskinan	7,37	Persen	6,00-5,50
17	Rasio Gini	0,214	Rasio	0,212-0,210
18	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	2,52	persen	2,53
19	PDRB perkapita (Rp Juta)	67,69	Rp Juta	73,64
20	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,54	Persen	2,94
21	Kontribusi industri pengolahan	3,82	Persen	3,88
22	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,59	Persen	2,62
23	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Udernourishment</i>)	6,1	Persen	6,08
24	Tingkat Inflasi	N/A	Persen	3±1
25	Indeks Pembangunan Manusia	77,49	Indeks	80,00-80,20
26	Indeks Modal Manusia	N/A	Indeks	0,54
27	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD	68,5	Persen	72,67
28	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum	59,32	Persen	61,11

	pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD			
29	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP	67,25	Persen	71,34
30	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP	65,89	Persen	67,88
31	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	10,12	Tahun	11- 12
32	Harapan lama sekolah	13,26	Tahun	14,2
33	Indeks Pembangunan Keluarga	58	Indeks	59,65
34	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,291	Indeks	0,38
35	Persentase gangguan dan ketertiban yang dapat diselesaikan	80	Persen	83,29
36	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	0,1	Persen	11-15
37	Persentase prestasi olahraga	19	Persen	21
38	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri	2,3	Persen	5,4
39	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4	Persen	2,33-1,86
40	Rasio kewirausahaan daerah	3,78	Rasio	4,15
41	Indeks Daya Saing Infrastruktur	N/A	Indeks	3,2
42	Rasio Rumah Layak Huni	98,91	Persen	98,93
43	Persentasi luas kawasan kumuh yang ditangani	0,22	Persen	0,24
44	Rasio konektivitas kabupaten	0,32	Persen	0,32
45	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,97	Persen	1
46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,21	Indeks	79,40
47	Indeks Risiko Bencana	103,81	Indeks	102,5
48	Indeks Ketahanan Daerah	0,48	Indeks	0,51
49	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,04	Indeks	3,1
50	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,71	Indeks	2,81
51	Tingkat pencapaian indikator makro bersama (<i>shared development indicators</i>) pusat-daerah	96	Persen	97
52	Tingkat sinkronisasi program prioritas daerah terhadap program prioritas provinsi dan nasional	100	Persen	100

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Karo, 2025 (diolah)

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Satuan	Target 2026	Perangkat Daerah
1	2	3	4	6	11
1	Indeks Ketahanan Pangan	82	Indeks	82,3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	6,13	Persen	6,11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	535,8	(kWh perkapita)	559	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	39,5	Persen	43,9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,21	Indeks	79,4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Akses sanitasi aman	74,68	Persen	76,48	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	78,03	%	78,09	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Satuan	Target 2026	Perangkat Daerah
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	N/A	Persen	189.631,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	Indeks Risiko Bencana	103,81	Indeks	102,5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10	Indeks Ketahanan Daerah	0,48	Indeks	0,51	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,35	Persen	1,273	BADAN PUSAT STATISTIK
12	Rasio Penduduk	47,420	Persen	47,194	BADAN PUSAT STATISTIK
13	Kepadatan Penduduk	193,25	Orang/km2	198,267	BADAN PUSAT STATISTIK
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,22	Persen	5,00-5,50	BADAN PUSAT STATISTIK
2	Tingkat Kemiskinan	7,37	Persen	6,00-5,50	BADAN PUSAT STATISTIK
3	PDRB Per Kapita	67,69	Rp Juta	73,64	BADAN PUSAT STATISTIK
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4	persen	2,33-1,83	BADAN PUSAT STATISTIK
5	Indeks Gini	0,212-0,210	Rasio	0,210	BADAN PUSAT STATISTIK
6	Indeks Pembangunan Manusia	80,00-80,20	Indeks	78,1	BADAN PUSAT STATISTIK
7	Usia Harapan Hidup	72,44	Tahun	73,5	DINAS KESEHATAN
8	Indeks Keluarga Sehat	0,25	Indeks	0,46	DINAS KESEHATAN
9	Prevalensi Stunting	16	Persen	8,5	DINAS KESEHATAN
10	Rata-Rata Lama Sekolah	10,12	Tahun	10,22	DINAS PENDIDIKAN
11	Harapan Lama Sekolah	13,26	Tahun	13,30	DINAS PENDIDIKAN
12	Angka Literasi/Numerasi:				
12.1	Literasi SD dan SMP	67,87	Persen	75,20	DINAS PENDIDIKAN
12.2	Numerasi SD dan SMP	62,60	Persen	74,23	DINAS PENDIDIKAN
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	68,08	Indeks	73,80	DINAS PENDIDIKAN
14	Indeks Literasi Digital	39,99	Indeks	41,19	DINAS PENDIDIKAN
15	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	29,29	Persen	37,5	DINAS KESEHATAN
16	Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	0,95	Persen	0,97	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
17	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	37,93	Persen	86,21	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA SERTA PARIWISATA
18	Indeks Perlindungan Anak		Indeks	64,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
19	Indeks Pembangunan Keluarga	58	Indeks	61,3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
20	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,291	Indeks	0,421	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
21	Persentase organisasi pemuda yang aktif	33,3	Persen	53	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA SERTA PARIWISATA
1	Angka Ketergantungan		Persen	47,194	BADAN PUSAT STATISTIK
2	Kontribusi industri pengolahan	3,82	Persen	3,88	DINAS PERTANIAN
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	0,258	Rasio	0,262	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA SERTA PARIWISATA
4	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki HAKI (Pelaku Usaha)	27	Pelaku Usaha	200	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA SERTA PARIWISATA
5	Rasio kewirausahaan daerah	3,78	Rasio	4,15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	84,13	Persen		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	Indeks Inovasi Daerah	62,02	Indeks	64	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,54	Persen	2,94	DINAS PERTANIAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Satuan	Target 2026	Perangkat Daerah
9	Penurunan Emisi GRK	N/A	ton CO2 Eq2	149.351,20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
10	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,71	Indeks	2,81	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto	31-33	persen	30-31	BADAN PUSAT STATISTIK
12	Net Ekspor (Milyar)	682,67	miliar	743,02	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13	Indeks Daya Saing Infrastruktur	N/A	Indeks	3,2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
14	Rasio Rumah Layak Huni	98,91	Persen	98,93	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
15	Persentase Desa Mandiri	2,3	Persen	5,4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,0194	Persen	0,0196	BADAN PUSAT STATISTIK
17	Tingkat Inflasi	N/A	Persen	3±1	BADAN PUSAT STATISTIK
1	Indeks Reformasi Hukum	87,22	Indeks	87,6	SEKRETARIAT DAERAH
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,04	indeks	3,1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	Indeks Pelayanan Publik	88,5	Indeks	89	SEKRETARIAT DAERAH
4	Indeks Integritas Nasional	76,07	Indeks	78	SEKRETARIAT DAERAH
5	Persentase Penegakan Perda	81,82	Persen	85,21	SATPOL PP
6	Persentase Capaian pelaksanaan aksi HAM	93,33	Persen	93,5	SEKRETARIAT DAERAH
7	Indeks Demokrasi Indonesia		Indeks		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	Indeks Rasa Aman		Indeks		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	60,50	Indeks	63,56	SATPOL PP
8	Indeks Daya Saing Daerah	N/A	Indeks	3,7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	INDIKATOR KINERJA KUNCI				
1	Pendidikan				DINAS PENDIDIKAN
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :				DINAS PENDIDIKAN
2	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	37,96	%	42,89	DINAS PENDIDIKAN
3	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D IV	N/A	%	65	DINAS PENDIDIKAN
4	Angka Partisipasi Kasar :				DINAS PENDIDIKAN
4.1	Angka partisipasi kasar SD	107,21	%	100	DINAS PENDIDIKAN
4.2	Angka partisipasi kasar SMP	96,96	%	98	DINAS PENDIDIKAN
5	Angka Partisipasi Murni :				DINAS PENDIDIKAN
5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,85	%	96,75	DINAS PENDIDIKAN
5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	85,70	%	92,50	DINAS PENDIDIKAN
6	Angka Partisipasi Sekolah :				DINAS PENDIDIKAN
6.1	Angka partisipasi sekolah usia (APS) Usia 5-6 tahun	57,17	%	63,53	DINAS PENDIDIKAN
6.2	Angka partisipasi sekolah (APS) Usia 7-12 tahun	98,38	%	98,61	
6.3	Angka partisipasi sekolah (APS) Usia 13-15 tahun	99,41	%	100	DINAS PENDIDIKAN
6.4	Angka partisipasi sekolah (APS) Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	3,94	%	7,84	DINAS PENDIDIKAN
7	Kemampuan Literasi :				
7.1	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	58,86	%	63,86	DINAS PENDIDIKAN
7.2	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	68,72	%	70,92	DINAS PENDIDIKAN
8	Kemampuan Numerasi :				
8.1	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	53,26	%	59,06	DINAS PENDIDIKAN
8.2	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	62,05	%	65,05	DINAS PENDIDIKAN
9	Kualitas Pembelajaran :				
9.1	Kualitas Pembelajaran SD	68,50	%	72,97	DINAS PENDIDIKAN
9.2	Kualitas Pembelajaran SMP	67,25	%	76,79	DINAS PENDIDIKAN
10	Iklim Keamanan :				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Satuan	Target 2026	Perangkat Daerah
10.1	Iklim Keamanan SD	72,67	nilai	74,47	DINAS PENDIDIKAN
10.2	Iklim Keamanan SMP	86,35	nilai	71,35	DINAS PENDIDIKAN
11	Iklim Kebinekaan :				
11.1	Iklim Kebinekaan SD	69,88	nilai	71,88	DINAS PENDIDIKAN
11.2	Iklim Kebinekaan SMP	70,88	nilai	72,88	DINAS PENDIDIKAN
12	Iklim Inkusivitas :				
12.1	Iklim Inklusivitas SD	57,98	nilai	62,98	DINAS PENDIDIKAN
12.2	Iklim Inklusivitas SMP	56,6	nilai	61,4	DINAS PENDIDIKAN
2	Kesehatan				DINAS KESEHATAN
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	20	kasus	18	DINAS KESEHATAN
2.2.	Angka Kematian Balita	22	kasus	23	DINAS KESEHATAN
2.3.	Angka Kematian Neonatal	20	kasus	18	DINAS KESEHATAN
2.4.	Angka Kematian Ibu	6	kasus	4	DINAS KESEHATAN
2.5.	Rasio posyandu per 1000 balita	9,30	Rasio	9,3	DINAS KESEHATAN
2.6.	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk	0,04	Rasio	0,04	DINAS KESEHATAN
2.7.	Rasio Poliklinik per 1.000 penduduk	0,00	Rasio		DINAS KESEHATAN
2.8.	Rasio Pustu per 1.000 Penduduk	0,50	Rasio	0,5	DINAS KESEHATAN
2.9.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,01	Rasio	0,01	DINAS KESEHATAN
2.10.	Rasio Dokter Umum per 1000 penduduk	0,29	Rasio	0,29	DINAS KESEHATAN
2.11.	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	8,68	Rasio	8,68	DINAS KESEHATAN
2.12.	Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk	0,09	Rasio	0,09	DINAS KESEHATAN
2.13.	Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk	0,47	Rasio	0,47	DINAS KESEHATAN
2.14.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	75,48	%	75,5	DINAS KESEHATAN
2.15.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	67,60	%	75	DINAS KESEHATAN
2.16.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	96,00	%	100	DINAS KESEHATAN
2.17.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100,00	%	100	DINAS KESEHATAN
2.18.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	92,60	%	100	DINAS KESEHATAN
2.19.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di bawah umur 15 Tahun	tidak ada kasus	Orang	2	DINAS KESEHATAN
2.20.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	tidak ada kasus	%	100	DINAS KESEHATAN
2.21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	70,90	%	90	DINAS KESEHATAN
2.22.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	273,00	rasio		DINAS KESEHATAN
2.21.	Tingkat Insiden tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		rasio	170	DINAS KESEHATAN
2.22.	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	93,00	%	90	DINAS KESEHATAN
2.23.	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	6,00	rasio	6	DINAS KESEHATAN
2.24.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	70,90	%	80	DINAS KESEHATAN
2.25.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	93,87	%	90	DINAS KESEHATAN
2.26.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	%	100	DINAS KESEHATAN
2.27.	Cakupan penderita diare yang ditangani	100,00	%	100	DINAS KESEHATAN
2.28.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,06	%	0,06	DINAS KESEHATAN
2.29.	Cakupan kunjungan bayi	73,90	%	80	DINAS KESEHATAN
2.30.	Cakupan puskesmas	111,80	%	111,8	DINAS KESEHATAN
2.31.	Cakupan pembantu puskesmas	78,80	%	78,8	DINAS KESEHATAN
2.32.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	77,70	%	80	DINAS KESEHATAN
2.33.	Cakupan pelayanan nifas	69,30	%	70	DINAS KESEHATAN
2.34.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	9,49	%	10	DINAS KESEHATAN
2.35.	Cakupan pelayanan anak balita	55,60	%	75	DINAS KESEHATAN
2.36.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	86,00	%	90	DINAS KESEHATAN
2.37.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	92,36	%	100	DINAS KESEHATAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Satuan	Target 2026	Perangkat Daerah
2.38.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	80,00	%	80	DINAS KESEHATAN
2.39.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,00	%	100	DINAS KESEHATAN
2.40.	Persentase balita stunting	8,70	%	8,5	DINAS KESEHATAN
2.41.	Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar	79,10	%	80	DINAS KESEHATAN
2.42.	Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar	67,30	%	70	DINAS KESEHATAN
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	69,10	%	70	DINAS KESEHATAN
2.44.	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar	55,60	%	75	DINAS KESEHATAN
2.45.	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	92,36	%	100	DINAS KESEHATAN
2.46.	Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	41,52	%	65	DINAS KESEHATAN
2.47.	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	87,36	%	88	DINAS KESEHATAN
2.48.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35,03	%	60	DINAS KESEHATAN
2.49.	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	61,00	%	75	DINAS KESEHATAN
2.50.	Persentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	51,38	%	70	DINAS KESEHATAN
2.51.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,90	%	100	DINAS KESEHATAN
2.52.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	53,08	%	75	DINAS KESEHATAN
2.54.	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	94,50	%	100	DINAS KESEHATAN
2.55.	Persentase Posyandu aktif	96,51	%	97	DINAS KESEHATAN
2.56.	Persentase sarana Puskesmas sesuai standar	78,95	%	84,21	DINAS KESEHATAN
2.57.	Persentase Puskesmas dengan kelengkapan alat kesehatan sesuai standar	68,42	%		DINAS KESEHATAN
2.57.	Persentase Kelengkapan Alat Kesehatan di Puskesmas		%	38	DINAS KESEHATAN
2.58.	Persentase sarana puskesmas pembantu sesuai standar	73,58	%	71,70	DINAS KESEHATAN
2.59.	Cakupan masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95	%	98,7	DINAS KESEHATAN
2.60.	Persentase Puskesmas terakreditasi	100,00	%	100	DINAS KESEHATAN
2.61.	Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	100,00	%	100	DINAS KESEHATAN
2.62.	Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas	95,00	%	95	DINAS KESEHATAN
2.63.	Persentase Puskesmas yang memiliki 15 jenis tenaga kesehatan			84,21	DINAS KESEHATAN
2.64.	Saka Bakti Husada Pramuka	0,00	Pangkalan	4	DINAS KESEHATAN
2.64.	Persentase Sarana Rumah Sakit sesuai standar	90,00	%		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.65.	Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar		%		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.	Pekerjaan Umum:				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	63,90	%	66	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	74,68	%	76,48	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.3.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	63,69	%	65	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.4.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	55,21	%	57	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.5.	Persentase penduduk berakses air minum layak	68,706	%	68,71	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.6.	Persentase penanganan sampah	84,00	%	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.2.	Penataan Ruang				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	25,00	%	26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Satuan	Target 2026	Perangkat Daerah
3.2.2.	Ketaatan terhadap RTRW	73,00	%	75	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.2.3.	Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi	0,00	Orang	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.2.4.	Gedung Pemerintahan yang layak dan baik	61,50	%	63	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.1.	Rasio rumah layak huni	98,91	%	98,93	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.2.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	0,20	%	0,24	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.3.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100,00	%	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.4.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00	%	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.5.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni	100,00	%	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.6.	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	10,00	lokasi	10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
5.1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				SATPOL PP & BPBD
5.1.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	12,50	%	12,5	SATPOL PP
5.1.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	80,00	%	83,29	SATPOL PP
5.1.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	41,18	%	47,06	SATPOL PP
5.1.4	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	91,43	%	91,83	SATPOL PP
5.1.5	Persentase Penegakan PERDA	81,82	%	85,21	SATPOL PP
5.2.	Bencana				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.2.1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	11.816	Orang	12.091	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.2.2	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5.666	Orang	6.686	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.2.3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	23.713	Orang	24.057	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Indeks Kapasitas Daerah	0,48	indeks	0,51	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	Sosial				DINAS SOSIAL
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	58,00	%	59,00	DINAS SOSIAL
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	58,00	%	58,00	DINAS SOSIAL
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	57,69	%	57,69	DINAS SOSIAL
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0,00	%	0,00	DINAS SOSIAL
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	0,00	%	0,00	DINAS SOSIAL
6.6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0,00	%	0,00	DINAS SOSIAL
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00	%	100,00	DINAS SOSIAL
6.8.	Persentase keakuratan data program perlindungan jaminan sosial	58,59	%	58,59	DINAS SOSIAL
1	Tenaga Kerja				DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	1,00	%	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN,

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Satuan	Target 2026	Perangkat Daerah
					KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	1,00	%	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	71,00	%	72,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	85,9	%	85,96	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.5.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0,00	%	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0,00	%	17	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	11,00	%	11,02	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	5,56	%	5,58	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.9.	Rasio lulusan S1/S2/S3	13,31	%	13,80	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,60	%	3,60	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	30,00	%	30,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.3.	Rasio KDRT	0,01	%	0,01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.4.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0,00	%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	100,00	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.8.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.9.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Satuan	Target 2026	Perangkat Daerah
2.11.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.12.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.13.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3	Pangan				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.1	Ketersediaan energi dan protein perkapita	2.430,00	Kkal/kap/hari	2494	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		63,00	gr/hari	65	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (PSAT)	100,00	%	100	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4	Pertanahan				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	146,61	Ha	145	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	1,00	kasus	2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	10,00	lokasi	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
5	Lingkungan Hidup				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	-	ada	ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	ada	ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	1,00	ada	ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	60,91	indeks	82,49	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	93,37	indeks	81,5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	52,47	indeks	70,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	104,00	%	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.8.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0,00	orang	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.9.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat terkait 3R dan Bank Sampah	13,00	kali	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.10.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.11.	Terlesaikannya Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100,00	%	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.12.	Timbulan sampah yang ditangani	78,03	%	77	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.13.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	78,00	ton	78,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.14.	Persentase cakupan area pelayanan	41,00	%	41,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,99	%	99,3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	99,15	%	99	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	60,03	%	65	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	Ada/Tidak Ada	Ada	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	Sudah/Belum	Sudah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Satuan	Target 2026	Perangkat Daerah
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,51	%	99,30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	62,18	%	65	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.8.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	60,00	%	65	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	70	%	71	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.2.	Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,15	kelompok	17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan pkk	100,00	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.4.	Persentase LPM Berprestasi	0,20	%	11,7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.5.	Persentase PKK Aktif	100,00	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.6.	Persentase Posyandu Aktif	100,00	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.7.	Persentase LSM aktif	80,00	%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,35	%	1,25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,19	kelahiran	2,16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	81,82	%	88	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	63,64	%	70	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.5.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	7,00	Kelompok	7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.6.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,19	anak	2,1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.7.	Ratio Akseptor KB	53,04	%	55,74	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.8.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	46,70	%	50,04	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.9.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	22,90	%	19,61	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.10.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	41,86	%	43,55	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.11.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	53,04	%	52,06	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.12.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	800,00	orang	805	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Satuan	Target 2026	Perangkat Daerah
8.13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	580,00	orang	600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.14.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	458,00	orang	460	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.15.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	461,00	orang	465	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.16.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100,00	%	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.17.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	150,00	orang	155	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.18.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.19.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100,00	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.20.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	80,00	%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.21.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	1.816,00	orang	1820	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.22.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	690,00	orang	695	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.23.	ASFR (15-19)	25,6	Kelahiran per 1000	25,6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.24.	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (demand satisfied)	67,1	%	68,4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
9	Perhubungan				DINAS PERHUBUNGAN
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	#####	orang	4.131.394,00	DINAS PERHUBUNGAN
9.2.	Rasio ijin trayek	760,46	%	63,53x	DINAS PERHUBUNGAN
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum dan barang	945,00	unit	1025	DINAS PERHUBUNGAN
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4,00	buah	4	DINAS PERHUBUNGAN
9.5.	Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten)	100,00	%	81,30%	DINAS PERHUBUNGAN
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	13,00	%	37	DINAS PERHUBUNGAN
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	12,00	%	24%	DINAS PERHUBUNGAN
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	366,00	rasio	72	DINAS PERHUBUNGAN
9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	4.095.356	orang	4.131.394	DINAS PERHUBUNGAN
9.10.	Rasio konektivitas kabupaten	97,00	%	95	DINAS PERHUBUNGAN
9.11.	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,32	rasio	0.32	DINAS PERHUBUNGAN
10	Komunikasi dan Informatika				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	85,50	%	85.60	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.2.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	60,64	%	60,74	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Satuan	Target 2026	Perangkat Daerah
10.3.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	48,49	%	48,59	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.4.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	15,78	%	15,88	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.5.	Indeks SPBE	3,04	indeks	3,1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah				DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
11.1.	Persentase koperasi aktif	51,00	%	54	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	95,00	%	96	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
12	Penanaman Modal				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	96,00	investor	103	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	7,16	Rp. (dalam triliun)	7,51	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	75,30	persen	72,40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	18,52	persen	5,7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	Kepemudaan dan Olah Raga				DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	33,30	%	37	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
13.2.	Persentase wirausaha muda	47,00	%	57	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	56,00	%	51	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	N/A	%	113	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	7,00	%	17	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	220,00	atlet	245	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	12,00	Cabor	14	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
14	Statistik				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	ada/tidak	ada	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14.2.	Buku "Kabupaten Karo Dalam Angka"	Ada	ada/tidak	ada	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14.3.	Buku "PDRB"	Tidak	ada/tidak	ada	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	Persandian				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	25,00	%	35	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	Kebudayaan				DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	15,00	Kali	1	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	11,00	Cagar Budaya	1	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	27,00	Karya Budaya	3	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Satuan	Target 2026	Perangkat Daerah
17	Perpustakaan				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,3	%	0,09	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,3	rasio	0,438	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,107	rasio	1,111	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	128.208,00	orang	33000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	10.892,00	buku	9200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0,82	%	0,856	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
18	Kearsipan				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	78,8	%	67,9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1,00	Kegiatan	2 Kegiatan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
1	Pariwisata				DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
1.1.	Kunjungan wisata	1.434.797	Orang	1.656.270	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
1.2.	Lama kunjungan Wisata	2,5	Hari	2,5	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
1.3.	PAD sektor pariwisata	81,44	Persentase	85	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
2	Pertanian				DINAS PERTANIAN
2.4.	Produktivitas padi per hektar	60,71	Kw/Ha	61,01	DINAS PERTANIAN
2.5.	Produktivitas palawija per hektar (Jagung)	68,73	Kw/Ha	69,07	DINAS PERTANIAN
2.6.	Cakupan bina kelompok petani	12,25	%	12,95	DINAS PERTANIAN
2.7.	Produksi sektor pertanian Unggulan	1.841.951	Ton	1.851.172	DINAS PERTANIAN
4	Energi dan Sumber Daya Mineral				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4,4	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi	1,00	pengusaha	3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5	Perdagangan				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.1.	Net Ekspor	682,67	miliar	743,02	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	13,00	persen	13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6	Perindustrian				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	33,33	persen	33,33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	Kelautan dan Perikanan				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8.1.	Produksi perikanan Budidaya	1.199,00	Ton	713	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8.2.	Konsumsi ikan	61,00	Kg/Kap/Tahun	62	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8.3.	Produksi perikanan kelompok nelayan	30	Ton	38,5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8.4.	Produksi Benih Ikan	600.000,00	Ekor	85.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8.5.	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	5,00	Ton	16 Ton	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8.6.	Cakupan bina kelompok Pembudidaya Ikan	20,00	Kelompok	20 Kelompok	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
1	Perencanaan Pembangunan				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Dokumen	Ada	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Satuan	Target 2026	Perangkat Daerah
1.4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	%	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100	%	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	Keuangan				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		opini	WTP	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.2.	Persentase SILPA	2,43	%	2,68	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	2,43	%	2,68	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.4.	Persentase program yang tidak terlaksana	0	%	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.5.	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	0	%	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.6.	Persentase belanja pendidikan (20%)	30,99	%	34,17	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.7.	Persentase belanja kesehatan (10%)	18,74	%	20,66	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.9.	Proporsi Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah	66,71	%	73,55	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.10.	Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah	14,71	%	16,22	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.11.	Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap total Belanja Daerah	42,12	%	46,44	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.12.	Proporsi Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Daerah	0,19	%	0,21	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.13.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,65	%	0,72	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.14.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.1.	Nilai IP ASN (Indeks Profesionalisme ASN)	1,10	%	75,8	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.2.	Persentase Keterisian Jabatan Struktural	0,42	%	91	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.3.	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang diproses	90,60	%	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.4.	Nilai IP ASN (Indeks Profesionalisme ASN) dari dimensi kompetensi	11,00	indeks	20,2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4	Penelitian dan Pengembangan				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	%	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	%	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penerapan SIDA:				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	%	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100	%	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	Pengawasan				INSPEKTORAT
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	83,42	%	83,75	INSPEKTORAT
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	0,00	%	0,048	INSPEKTORAT
6	Sekretariat Dewan				SEKRETARIAT DPRD
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA	ADA/TIDAK	ADA	SEKRETARIAT DPRD
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam	ADA	ADA/TIDAK	ADA	SEKRETARIAT DPRD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Satuan	Target 2026	Perangkat Daerah
	Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)				
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA	ADA/TIDAK	ADA	SEKRETARIAT DPRD

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Karo, 2025 (diolah)

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 ini berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2029. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Karo sebagai pedoman menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan:

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. RKPD tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. RKPD telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diverifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah serta rencana kerja program/kegiatan telah tertuang kedalam aplikasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya.
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan/program-program pembangunan. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, BAPPEDA berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2026 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2026 serta prioritas dan pagu indikatif PD Tahun 2026.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan didukung stabilitas keamanan yang semakin mantap.

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING



LAMPIRAN I

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN KARO SAMPAI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN I
LAPORAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2024
KABUPATEN KARO

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2022-2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Triwulan I	Realisasi Kinerja pada Triwulan II	Realisasi Kinerja pada Triwulan III	Realisasi Kinerja pada Triwulan IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggungjawab						
3				4	5		K	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100%	15=7+13	16=15/8*100%	17					
1							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	1			DINAS PENDIDIKAN				150.568.382.597.406	716.304.210.004	484.403.012.710	41.156.427.682	77.563.899.233	121.570.336.680	226.645.725.434	466.936.389.029	96,39	1.183.240.599.033	103,16	0,79	DISDIK				
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	150.538.382.597.406	98	527.563.482.848	95	304.091.157.328	41.156.427.682	77.013.393.688	92.474.428.975	111.816.458.930	322.460.709.275	0,00	106,04	98,00	850.024.192.123	103,16	0,56	DISDIK
1	1	1	202	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	5	625.000.000	52.808.090				-		0		0,00		52.808.090	0,00	8,45	DISDIK		
1	1	1	202	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan SKPD				52.808.090						0							DISDIK		
1	1	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		976	1.476.817.853.375	526.020.305.173	302.949.043.328	41.022.762.334	76.864.676.118	1500	92.459.626.975	111.515.227.345	321.862.292.772	0,00	106,24	0,00	847.882.597.945	0,00	57,41	DISDIK	
1	1	1	202	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan			524.853.405.173	302.572.483.328	40.994.052.334	76.783.856.118	3	92.402.436.975	111.415.317.370	321.595.662.797	-	106,29					DISDIK	
1	1	1	202	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	orang/bulan			1.166.900.000	376.560.000	28.710.000	80.820.000	21	57.190.000	99.909.975	18	266.629.975	-	70,81				DISDIK	
1	1	1	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			60	1.702.993.685	534.195.260	80.000.000	16.837.895				19.171.435	36.009.330	0,00	45,01	0,00	570.204.590	0,00	33,48	DISDIK	
1	1	1	205	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atributnya	setel			136.884.000						-	0						DISDIK		
1	1	1	205	5 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen			321.035.635	80.000.000	16.837.895			3.000	19.171.435	3.000	36.009.330	-	45,01				DISDIK	
1	1	1	205	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang/kali			76.275.625						-	0						DISDIK		
1	1	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	60	245.297.891.405.847	956.174.325	288.554.000	47.348.997	42.457.900	5.244.000	106.788.246	201.839.143	0,00	69,95	0,00	1.158.013.468	0,00	0,00		DISDIK	
1	1	1	206	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	paket			15.728.790	10.000.000	4.977.550			1	2.974.510	1	7.952.060	-	79,52				DISDIK	
1	1	1	206	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	paket			200.833.190	50.000.000	12.490.745	12.505.700	735	11.980.170	1	36.976.615	-	73,95					DISDIK	
1	1	1	206	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	paket			204.442.433	30.000.000	7.499.040	7.498.300	353	1.749.930	1	22.491.270	-	74,97					DISDIK	
1	1	1	206	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	jenis			277.863.842	50.000.000	9.913.450			3	39.267.570	2	49.181.020	-	98,36				DISDIK	
1	1	1	206	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	buah			4.680.000	1.440.000					-	0	-	0					DISDIK	
1	1	1	206	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan minum	laporan			74.151.000	10.000.000			1	5.244.000	1	2.501.000	1	7.745.000	-	0				DISDIK
1	1	1	206	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	orang/kali			178.475.070	137.114.000	12.468.212	22.453.900	42		50	42.571.066	50	77.493.178	-	56,52				DISDIK
1	1	1	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		29	275.000.000	318.782.000							0	0,00	0,00	318.782.000	0,00	115,92		DISDIK	
1	1	1	207	5 Pengadaan Mebel	Mebel	buah			198.782.000	-	-	-	-	-	-	0							DISDIK	
-	-	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					120.000.000	-	-	-	-	-	-	0							DISDIK	
1	1	1	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		70	22.988.700.000	8.415.114.553	735.140.000	109.676.351	97.944.552	9.558.000	169.520.970	386.699.873	0,00	52,60	0,00	8.801.814.426	0,00	38,29		DISDIK	
1	1	1	208	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon Internet Air dan Listrik	bulan			129.061.553	73.800.000	18.431.351	13.899.552	3	23.838.120	12	56.169.023	-	76,11					DISDIK	
1	1	1	208	3 Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit			59.283.000	20.000.000			37	9.558.000	3	10.328.000	12	19.886.000	-	0				DISDIK
1	1	1	208	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pegawai tidak tetap	orang/bulan			8.226.770.000	641.340.000	91.245.000	84.045.000	69		773	135.354.850	773	310.644.850	-	48,44				DISDIK
1	1	1	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		224	521.300.000	311.290.213	38.420.000	5.350.000	8.315.118		5.750.934	19.416.052	0,00	50,54	0,00	330.706.265	0,00	63,44		DISDIK	
1	1	1	209	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinasoperasional atau lapangan	unit			102.826.213	38.420.000			8.315.118	1	5.750.934	1	14.066.052	-	36,61				DISDIK	
1	1	1	209	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit			19.964.000						-	0							DISDIK	
1	1	1	209	9 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit			188.500.000	157.457.675.806					-	0	-	0					DISDIK	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tersusunnya Nercac Pendidikan Daerah		7.433	468.957.283.335	178.546.557.595	158.683.404.206	472.366.760	29.095.907.705	114.544.251.114	144.112.525.579	0,00	90,82	0,00	322.659.083.174	0,00	68,80		DISDIK		
1	1	2	201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		9.071	196.845.348.096	102.564.064.516	99.403.779.620	376.478.390	22.096.801.782	69.192.108.654	91.665.388.826	0,00	92,22	0,00	194.229.453.342	0,00	98,67		DISDIK		
1	1	2	201	2 Pemambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru	ruang			2.166.117.451					2	-	0						DISDIK		
1	1	2	201	3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	ruang			1.301.470.569	667.830.000			156.239.231	2	501.301.758	2	657.540.989	-	98,46				DISDIK	
1	1	2	201	4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ruang			387.462.000	5.012.800.000	1.995.000	1.102.810.548	29	3.828.312.440	29	4.933.117.988	-	98,41					DISDIK	
1	1	2	201	5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah	ruang			649.325.725	1.680.000.000	25.199.820	477.780.644	7	1.218.998.217	7	1.721.978.681	-	102,50					DISDIK	
1	1	2	201	6 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah	ruang			17.835.751.244	15.164.585.400	20.690.000	3.708.246.507	82	12.162.797.293	82	15.891.733.800	-	104,80					DISDIK	
1	1	2	201	8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang Kelas yang direhab	ruang			9.207.316.069					1.676.300.527	-	1.676.300.527	-						DISDIK	
1	1	2	201	9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab	ruang			732.183.745	3.685.817.650				46.325.000	22	3.352.104.870	22	3.398.429.870	-	0				DISDIK
1	1	2	201	10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan sekolah	Ruang Unit Kesehatan sekolah yang Direhab	Ruang			162.993.540					-	-	0							DISDIK	
1	1	2	201	11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang direhab	ruang			1.610.000.000		14.549.660		412.437.300	12	1.523.944.910	12	1.950.931.870	-	121,18					

3					4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15B*100%		17		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	1	2	201	38	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		326.599.800		1.765.787.220					285	1.713.795.915		285	1.713.795.915		285	1.713.795.915		-	97,06				DISDIK		
1	1	2	201	40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		199.999.815								-		0											DISDIK		
1	1	2	201	45	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah buku teks dan non teks	buku		570.098.350							21	558.591.080		21	558.591.080										DISDIK		
1	1	2	201	46	Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik	paket		1.931.000.000				1.899.268.000		19	17.579.830		19	1.916.847.830				99,27									
1	1	2	201	50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				166.600.000						285	162.609.770		285	162.609.770													
1	1	2	201	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				9.004.946.000				23.227.500		22	7.350.011.367		22	9.049.539.394				100,50									
1	1	2	202		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		9.161	245.823.200.000		61.376.428.082		50.726.934.000		81.713.370		6.822.756.213		38.359.612.930		0	45.264.082.513		0,00	89,23		0,00	106.640.510.595		0,00	43,38	DISDIK
1	1	2	202	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	unit sekolah baru	unit									-	-		-		0									DISDIK		
1	1	2	202	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	ruang kelas baru	ruang		1.172.743.522							-	-		-		0									DISDIK		
1	1	2	202	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	ruang guru/kepala sekolah/TU	ruang		618.826.153		1.182.310.000		9.249.930		3	887.599.320		3	1.166.863.596		-	98,69									DISDIK	
1	1	2	202	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ruang unit kesehatan sekolah	ruang		1.388.964.615		2.624.139.000		6.749.915		10	2.274.175.346		10	3.028.347.107		-	115,40									DISDIK	
1	1	2	202	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah	ruang		385.269.510							-	-		-		0									DISDIK		
1	1	2	202	6	Pembangunan Laboratorium	Laboratorium	ruang		1.798.812.053		2.309.260.000		13.349.880		4	1.741.026.624		4	2.282.561.636		-	98,84									DISDIK	
1	1	2	202	12	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	saranaprasarana dan utilitas sekolah	unit		5.524.707.379		4.496.550.000		24.413.475		16	3.995.096.190		16	5.253.056.554		-	116,82									DISDIK	
1	1	2	202	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	ruang kelas sekolah yang direhab	ruang		2.568.625.799		6.667.670.000		21.041.950		10	5.227.623.740		10	6.597.759.394		-	98,95									DISDIK	
1	1	2	202	15	RehabilitasiSedang/Berat Ruang Guru Sekolah	ruang guru sekolah yang direhab	ruang		684.055.000						2	682.909.765		2	682.909.765			0,00									DISDIK	
1	1	2	202	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang direhab	ruang		358.934.700		535.390.000		95.590.440		2	533.052.940		2	533.052.940		-	99,56									DISDIK	
1	1	2	202	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Laboratorium yang direhab	ruang		335.644.770		257.330.000		43.135.000		1	209.615.000		1	252.750.000		-	98,22									DISDIK	
1	1	2	202	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	SaranaPrasarana dan Utilitas sekolah yang direhab	unit		2.145.566.296		718.375.000		248.465.000		7	912.060.000		7	1.160.525.000		-	161,55									DISDIK	
1	1	2	202	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel sekolah	66 Sekolah		3.835.036.000		1.020.000.000		6.908.220		20	998.591.780		20	1.005.500.000		-	98,58									DISDIK	
1	1	2	202	27	Pengadaan Perengkapan Sekolah	Perengkapan sekolah	paket		150.673.120							-	-		-		0										DISDIK	
1	1	2	202	28	Pengadaan Perengkapan Siswa	Perengkapan Siswa	Orang		1.034.999.730							-	-		-		0										DISDIK	
1	1	2	202	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	orang/kali		1.529.999.860		750.000.000					749.719.675		985		-	985	749.719.675		-	99,96						DISDIK	
1	1	2	202	34	Perengkapan Belajar Peserta Didik	Perengkapan Belajar Peserta Didik	paket				375.000.000					368.266.000		19		-	19	368.266.000		-	98,20						DISDIK	
1	1	2	202	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa	paket		682.866.655		846.600.000		293.344.000		-	518.444.890		19	811.788.890		-	95,89									DISDIK	
1	1	2	202	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peserta Didik mengikuti Proses Belajar dan Ujian	orang/kali		139.779.580							-	28.732.850		68	28.732.850											DISDIK	
1	1	2	202	37	Penyapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyapan dan Tindak Lanjut evaluasi satuan pendidikan Sekolah menengah pertama	orang/kali		39.999.865							-	-		-		0										DISDIK	
1	1	2	202	38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa mengikuti Pembinaan MinatBakat dan Kreativitas siswa	orang/kali		521.566.984		650.000.000		102.559.170		1.540	386.971.892		1.540	489.531.062		-	75,31									DISDIK	
1	1	2	202	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dilatih	orang		202.140.823							-	-		0												DISDIK	
1	1	2	202	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menerima pengembangan Karir	orang		1.423.165.223		1.016.200.000		304	489.895.155		371	480.188.740		675	970.083.895		-	95,46								DISDIK	
1	1	2	202	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	sekolah menengah pertama yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	orang/kali		621.146.695		1.050.000.000		46.374.000		69	908.536.839		69	954.910.839		-	90,94										DISDIK
1	1	2	202	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	sekolah menengah pertama pengelola dana BOS sekolah menengah pertama dan BOS Daerah (BOSDA)	sekolah		33.632.432.049		24.099.755.000		68	17.001.068.621		68	17.001.068.621		68	17.001.068.621		-	0								DISDIK	
1	1	2	202	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	sekolah menengah pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	sekolah		39.917.525		20.000.000		68	9.000.000		68	9.000.000		68	9.000.000		-	0								DISDIK	
1	1	2	202	44	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU				314.400.000				56.845.606		1	222.704.967		1	279.550.573			88,92									DISDIK	
1	1	2	202	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				279.899.850							-	-		0												DISDIK	
1	1	2	202	51	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				181.481.340		1.020.000.000		64.421.375		68	951.708.516		68	1.016.129.891		-	99,62									DISDIK	
1	1	2	202	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				320.696.986							-	-		0												DISDIK	
1	1	2	202	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				70.000.000				40.288.435		68	28.732.850		68	69.021.285			98,60									DISDIK	
1	1	2	202	59	Pembangunan Ruang Kelas Baru				19.900.000							-	19.900.000		1	19.900.000												DISDIK
1	1	2	202	64	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				684.055.000				95.590.440		-	437.462.500		2	533.052.940			77,93										DISDIK
1	1	2	203		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		525	21.288.735.239		13.709.289.650		7.408.800.586		33.324.645		14.175.000		176.349.710			6.609.219.160		0,00	92,23		0,00	20.542.358.165		0,00	96,49	DISDIK
1	1	2	203	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	ruang		150.000.000							-		0	-	0,00											DISDIK	
1	1	2	203	2	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	paket		2.205.261.053		3.840.800.586		147.700.000			3.725.672.350		29	3.873.372.350		-	100,85									DISDIK	
1	1	2	203	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang direhab	ruang		2.294.375.000		182.200.000					182.200.000		1	182.200.000		-	100,00									DISDIK	
1	1	2	203	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhab	paket		961.399.274							-		0	-	0,00											DISDIK	
1	1	2	203	5	Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD	paket		520.389.000							-		0	-	0,00											DISDIK	
1	1	2	203	9	Pengadaan Perengkapan PAUD	perengkapan PAUD yang Tersedia	paket		581.772.000							-		0	-	0,00											DISDIK	
1	1	2	203	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	paket		181.399.225							-		0	-	0,00											DISDIK	
1	1	2	203	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan PAUD Pengelola Dana BOP PAUD	sekolah		4.813.635.223		2.971.500.000					2.678.846.810		152	2.678.846.810		-	90,15									DISDIK	
1	1	2	203	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan PAUD mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	sekolah		115.565.850		70.000.000		33.324.645		14.175.000		22.500.000		160	99.999.645		-	100,00								DISDIK	
1	1	2	204		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		625	5.000.000.000		896.775.347		1.143.890.000		15.499.675		-		383.310.370			398.810.045		0,00	34,86		0,00	1.295.585.392		0,00	25,91	DISDIK
1	1	2	204	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Peserta didik mengikuti proses belajar nonformal/ kesetaraan	tahun		171.186.647							37.555.035		1	37.555.035		-	0,00										DISDIK
1	1	2	204	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan																										

4					5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13B*100%	15=7+13	16=15B*100%	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	1	2	204	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	SekolahNonformal/Kesetaraan Pengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	sekolah		613.621.650		303.890.000				303.700.300	4	303.700.300	-	99,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

				4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	02	02	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				133.713.825			-	140.649.900		122.503.920	0	263.153.820	0	196,8	0	263.153.820	0	0			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	%	100	161.976.751.087	49.329.977.433		9.074.802.600	-	9.574.881.762		15.076.062.402	0	33.725.746.764	0	68,37	0	33.725.746.764	0	20,8214	DINKES	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		652.921.000			300	12.400.000		373.082.000		179.622.000	300	565.104.000	0	86,55	300	565.104.000	0	0	DINKES
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		245.892.000			-	138.401.000		75.280.000	0	213.681.000	0	86,90	0	213.681.000	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		105.878.440			-	0		-	0	0	0	0	0	0	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		11.100.000			600	5.400.000		22.870.000		-	600	28.270.000	0	254,68	600	28.270.000	0	0	DINKES
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		633.150.000			-	379.091.446		170.000.000	0	549.091.446	0	86,72	0	549.091.446	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		36.760.000			600	5.400.000		0	-	600	5.400.000	0	14,69	600	5.400.000	0	0	DINKES	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		8.280.000			-	0		5.400.000	0	5.400.000	0	65,22	0	5.400.000	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		5.400.000			500	5.400.000		0	-	500	5.400.000	0	100	500	5.400.000	0	0	DINKES	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		261.894.000			500	5.400.000		0		250.261.400	500	255.661.400	0	97,62	500	255.661.400	0	0	DINKES
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang		12.800.000			-	5.400.000		7.400.000	0	12.800.000	0	100	0	12.800.000	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang		1.169.774.300			-	294.350.000		227.797.980	0	522.147.980	0	44,64	0	522.147.980	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang		243.350.000			-	147.500.000		89.800.000	0	237.300.000	0	97,51	0	237.300.000	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen					-	0		-	0	0	0	0	0	0	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		4.864.332.644		6	93.200.000		2.933.098.100		768.542.400	6	3.794.840.500	0	78,01	6	3.794.840.500	0	0	DINKES	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen		979.350.000			-	511.840.000		358.340.000	0	870.180.000	0	88,85	0	870.180.000	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		217.526.610			-	100.307.700		207.849.900	0	308.157.600	0	141,66	0	308.157.600	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri	Dokumen					-	0		-	0	0	0	0	0	0	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		632.847.000			-	268.341.000		180.330.000	0	448.671.000	0	70,90	0	448.671.000	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen		3.735.950.995			-	1.250.034.000		1.147.286.500	0	2.397.320.500	0	64,17	0	2.397.320.500	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		30.363.327.030		4	8.939.502.600		468.832.000		9.619.346.001	4	19.027.680.601	0	62,67	4	19.027.680.601	0	0	DINKES	
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	orang		16.200.000			-	0		16.200.000	0	16.200.000	0	100	0	16.200.000	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				50.430.000			-			100.000	0	100.000	0	0,2	0	100.000	0	0			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		2.676.529.654			-	1.400.848.016		1.033.891.721	0	2.434.739.737	0	90,97	0	2.434.739.737	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	Dokumen		24.150.000			-	9.615.000		-	0	9.615.000	0	39,81	0	9.615.000	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit								-	0	0	0	0	0	0	0	0	DINKES		
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				37.000.000			-	300.000		2.800.000	0	3.100.000	0	8,38	0	3.100.000	0	0			
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				7.900.000			-	600.000		600.000	0	1.200.000	0	15,19	0	1.200.000	0	0			
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				18.219.000			-	11.786.000		11.786.000	0	11.786.000	0	64,69	0	11.786.000	0	0			
1	02	02	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				266.299.000			-	185.057.000		99.924.000	0	284.981.000	0	107,02	0	284.981.000	0	0			
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				1.587.715.760			-	1.012.014.500		572.744.500	0	1.584.759.000	0	99,81	0	1.584.759.000	0	0			
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	%	100	3.401.913.460	95.731.800		10.640.000	-	14.866.276		17.493.400	0	42.999.676	0	44,92	0	42.999.676	0	1,2640	DINKES	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen					-	0		-	0	0	0	0	0	0	0	0	DINKES		
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen		95.731.800		6	10.640.000		14.866.276		17.493.400	6	42.999.676	0	44,92	6	42.999.676	0	0	DINKES	
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit		6.480.000			-	1.500.000		2.700.000	0	4.200.000	0	64,81	0	4.200.000	0	0	DINKES		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit		10.800.000		6	5.400.000		0		5.400.000	6	10.800.000	0	100	6	10.800.000	0	0	DINKES	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar	%	973	9.603.147.850	1.331.291.275		9.467.670	-	556.456.240		987.022.270	0	1.552.946.180	0	116,65	0	1.552.946.180	0	16,1712	DINKES	

				4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	02	03	2.01	Pemberian Inis Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIK	%	973		87.432.000		10.800.000		3.899.670	-	3.600.000		4.199.670	0	11.699.340	0	108,33	0	11.699.340	0	13,3811	DINKES				
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen				10.800.000		6	3.899.670		3.600.000		4.199.670	6	11.699.340	0	108,33	6	11.699.340	0	0	DINKES			
1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					308.053.380				4.428.000	-	81.797.000		91.548.260	0	177.773.260	0	57,71	0	177.773.260	0	0					
1	02	03	2.02	02	Pembiayaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				308.053.380				4.428.000		81.797.000		91.548.260	0	177.773.260	0	57,71	0	177.773.260	0	0					
1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	5,0215E+14		1.179.665.850		1.012.437.895		1.140.000	-	471.059.240		891.274.340	0	1.363.473.580	0	134,67	0	1.363.473.580	0	115,5813	DINKES				
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dittingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dittingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang				1.012.437.895		2	1.140.000		471.059.240		891.274.340	2	1.363.473.580	0	134,67	2	1.363.473.580	0	0	DINKES			
1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasi an memenuhi persyaratan / Persentase makanan memenuhi persyaratan	%	95 / 66		1.003.330.589		370.331.000			-	-	37.642.000		177.923.800	0	215.565.800	0	58,21	0	215.565.800	0	21,4850	DINKES			
1	02	04	2.01	Pemberian Inis Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana kefarmasian yang diawasi	%	95		119.372.859		63.730.000			-	-	144.000		42.137.000	0	42.281.000	0	66,34	0	42.281.000	0	35,4193	DINKES			
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen				63.730.000			-		144.000		42.137.000	0	42.281.000	0	66,34	0	42.281.000	0	0	DINKES			
1	02	04	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Inis Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana Industri Rumah Tangga yang memproduksi makanan minuman yang diawasi	%	95		205.138.250		85.387.000			-	-	-		38.905.600	0	38.905.600	0	45,56	0	38.905.600	0	18,9656	DINKES			
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Inis Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Inis Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen				85.387.000			-	0		38.905.600	0	38.905.600	0	45,56	0	38.905.600	0	0	DINKES				
1	02	04	2.06	Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase post market produk makanan minuman Industri Rumah Tangga yang diawasi	%	14		197.092.000		221.214.000			-	-	37.498.000		96.881.200	0	134.379.200	0	60,75	0	134.379.200	0	68,1810	DINKES			
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit				221.214.000			-		37.498.000		96.881.200	0	134.379.200	0	60,75	0	134.379.200	0	0	DINKES			
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1.000 balita	Rasio	10		2.488.012.775		328.201.000			-	-	194.496.000		178.944.000	0	373.440.000	0	113,78	0	373.440.000	0	15,0096	DINKES			
1	02	05	2.01	Advokasi Pemberdayaan Komitran Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Desa siaga aktif	%	70		80.000.000		36.700.000			-	-	36.700.000		36.700.000	0	73.400.000	0	200	0	73.400.000	0	91,7500	DINKES			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Komitran dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan Advokasi Komitran dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen				36.700.000				36.700.000		36.700.000	0	73.400.000	0	200	0	73.400.000	0	0	DINKES				
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu aktif	%	100		2.408.012.775		291.501.000			-	-	157.796.000		142.244.000	0	300.040.000	0	102,93	0	300.040.000	0	12,4601	DINKES			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen				291.501.000				157.796.000		142.244.000	0	300.040.000	0	102,93	0	300.040.000	0	0	DINKES				
1	2			RSUD KABUPATEN KARO					57.003.093.329		111.233.492.312		49.554.756.812		7.808.564.839		13.256.077.818		12.003.806.615		16.057.996.789		49.126.446.061		99,14		160.359.938.373		281,32	RSUD
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89		50.588.136.147		107.369.490.576		48.856.316.812	0	7.791.099.294		13.256.077.818		11.990.275.845		15.404.672.081	0	48.442.125.038	0,00	99,15	0,00	155.811.615.614	0,00	308,00	RSUD
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Administrasi Keuangan RSUD	Persen	100		23.258.249.633	100	43.411.661.864	100	23.048.372.064	25	3.344.960.948	25	7.352.377.074	25	4.417.783.080	25	7.594.149.801	100	22.709.270.903	100,00	98,53	200,00	66.120.932.767	2,00	284,29	RSUD
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	219			219	22.848.680.814	55	3.344.960.948	55	7.248.587.056	54	4.417.783.080	55	7.498.315.064	219	22.509.646.148	100,00	98,52				RSUD		
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	36			36	199.691.250,00			18	103.790.018		-	18	95.834.737	36	199.624.755	100,00	99,97				RSUD		
1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Administrasi Kepegawaian RSUD	Persen	100		484.000.000					-								0,00	-	0,00	0,00		RSUD			
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Administrasi Umum RSUD	Persen	100		50.000.000	100,00	49.999.150			-							100,00	49.999.150	1,00	100,00			RSUD			
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada RSUD	Persen	100		3.664.359.998	100,00	7.117.220.171	100	3.602.710.000	25	828.038.698	25	953.366.401	25	64.646.309	25	1.690.772.104	100	3.536.823.512	100,00	98,17	200,00	10.654.043.683	2,00	290,75	RSUD
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	120			120	428.400.000,00	30	102.533.698	30	99.447.151	30	64.646.309	30	126.083.378	120	392.710.536	100,00	91,67				RSUD		
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60			60	3.174.310.000,00	15	725.505.000	15	853.919.250		-	30	1.564.688.726	60	3.144.112.976	100,00	99,05				RSUD		
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada RSUD	Persen	100		55.271.141	100,00	64.240.138	100	55.271.141	25	17.004.916	25	28.643.789		30	700.000	80	46.348.705	80,00	83,86	180,00	110.588.843	1,80	200,08	RSUD	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5			5	55.271.141,00			2	17.004.916	2	28.643.789	1	700.000	5	46.348.705	100,00	83,86				RSUD		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Pelayannya BLUD	unit kerja	1		23.076.255.375	100,00	56.726.369.253	1	22.149.963.607	0,25	3.618.099.648	0,25	4.933.329.427	0,25	7.479.202.667	0,25	6.119.050.176	1	22.149.681.918	100,00	100,00	101,00	78.876.051.171	101,00	341,81	RSUD
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	1			1	22.149.963.607,00	0,25	3.618.099.648	0,25	4.933.329.427	0,25	7.479.202.667	0,25	6.119.050.176	1	22.149.681.918	100,00	100,00				RSUD		

					4	5			6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17							
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kelengkapan Sarana Rumah Sakit sesuai standar	Persen	90		6.414.957.182	85	3.864.001.736	90	698.440.000	0	17.465.545					13.530.770		653.324.708	0	684.321.023	0,00	97,98	85,00	4.548.322.759	0,94	70,90	RSUD						
						Persentase kelengkapan Prasarana Rumah Sakit sesuai standar	Persen	95			95		95		0								0		0,00		95,00				RSUD							
						Persentase Capaian Kepuasan Pasien atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum	Persen	93			85		93		0								0		0,00		85,00				RSUD							
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persen	100		6.114.957.182	100,00	3.131.600.250	100	209.000.000									100	196.790.000	100	196.790.000	100,00	94,16	200,00	3.328.390.250	2,00	54,43	RSUD					
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat medis yang sesuai standar	Unit	11					11	209.000.000,00									11	196.790.000	11	196.790.000	94,16	94,16				RSUD						
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100		300.000.000	100,00	732.401.486	100	489.440.000	25,00	17.465.545				25				13.530.770	50	456.534.708	100	487.531.023	99,61	99,61	200,00	1.219.932.509	2,00	406,64	RSUD			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	300					300	489.440.000,00	75	17.465.545				75				13.530.770	150	456.534.708	300	487.531.023	99,61	99,61								
-	-	-			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Indeks	83				471.607.201																0,00	471.607.201	0,00	0,00	RSUD						
-	-	-			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SOM Kesehatan	Persen	100				471.607.201																0,00	471.607.201	0,00	0,00	RSUD						
1	3				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					389.790.037.244.775		250.215.947.862		167.279.026.631		6.550.861.660												158.222.157.122		94,59		408.438.104.984		0,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					389.790.037.244.775		250.215.947.862		167.279.026.631		6.550.861.660												158.222.157.122		94,59		408.438.104.984		0,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	3	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95		93.792.176.930	826,0	19.473.571.180	89	10.135.588.035		1.984.855.913		2.271.023.338							0	9.758.536.545	0,00	96,28	826,00	29.232.107.725	8,69	31,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	3	001	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	60		34.248.068.430	24	12.794.691.009	12	6.457.642.463	3	1.207.475.893	3	1.507.844.262	3						3	1.791.295.626	3	1.788.049.388	12	6.294.665.169	100,00	97,48	36,00	19.089.356.178	0,60	55,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Bulan				1.540	11.684.991.009	742	6.189.380.663	159	1.201.366.393	212	1.408.514.262	212						159	1.685.139.388	742	6.026.525.669	100,00	97,37				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	001	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	Dokumen				24	1.109.700.000	12	268.261.800	3	6.109.500	3	99.330.000	3						3	59.790.000	3	102.910.000	12	268.139.500	100,00	99,95				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	001	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12		250.000.000		59.200.000														0		0,00	0,000	0,00		59.200.000	0,00	23,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	3	001	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stell				82	59.200.000														0		0,00	0,000	0,00				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	001	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60		6.917.508.500	24	2.350.821.438	12	1.394.130.852	3	300.332.019	3	198.118.530	3							3	333.443.023	3	452.106.368	12	1.283.999.940	100,00	92,10	36,00	3.634.821.378	0,60	52,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	001	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis				6	24.551.700	3	9.351.155	2	3.208.000	0							1		3	9.316.000	100,00	99,62						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	3	001	206	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis				84	883.106.600	42	414.868.310	20	179.678.500	3	18.220.600	9						32	409.699.750	76,19	98,75							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	3	001	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Jenis				54	72.796.050	27	31.456.264	7	6.942.900	7	6.865.200	8								22	31.394.000	81,48	99,80						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	001	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis				4	85.135.500	2	39.574.800			1	11.571.500	1								2	39.502.800	100,00	99,82						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	001	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Orang/bulan				1.649	1.285.231.588	1100	898.880.323	320	110.502.619	180	161.461.236	300							225	259.560.423	262.563.118	1.025	794.087.390	93,18	88,34				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	001	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintah Daerah	Unit	37		3.020.000.000	3	574.182.600														0		0,00	0,000	3,00		574.182.600	0,08	19,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	3	001	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit				1	520.182.600														0		0,00	0,000						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				2	54.000.000														0		0,00	0,000						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	3	001	208		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60		46.106.600.000	24	2.001.778.165	12	1.037.942.720	3	227.626.093	3	184.858.702	3							12	275.071.808	12	943.668.894	100,00	90,92	36,00	2.945.447.059	0,60	6,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	001	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon Internet air dan Listrik	Laporan				24	113.080.265	12	61.500.000	3	13.159.093	3	13.468.702	3							3	9.942.291	3	12.199.808	12	48.769.894	100,00	79,30				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan				24	66.460.000	12	38.300.000	3	2.442.000	3	5.500.000	3									27.250.000	12	37.892.000	100,00	98,93				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	001	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor	Laporan				24	1.822.237.900	12	938.142.720	3	212.025.000	3	165.890.000	3									243.470.000	3	235.622.000	12	857.007.000	100,00	91,35				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	001	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	36		3.250.000.000	36	1.692.897.968	34	1.245.872.000	6	249.421.908	13	380.201.844	5							9	85.342.000	9	521.236.790	33	1.236.202.542	97,06	99,22	69,00	2.929.100.510	1,92	90,13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	001	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit				30	166.494.168	15	75.270.000	2	7.865.500	8	21.974.094	3							2	26.645.540	15	68.836.634	100,00	91,45					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	001	209	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Unit				37	1.526.403.800	19	1.170.602.000	4	241.556.408	5	358.227.750	2							7	72.990.500	7	494.591.250	18	1.167.365.908	94,74	99,72				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	5.211,00		62.932.563.070	5.295	23.582.372.462	51,11	20.192.140.000	0	543.873.000	0	324.994.500										55	17.567.425.993	108,02	87,00	5.350,21	41.149.798.455	102,67	65,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	03	02	201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (PWS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	5.211,00		800.000.000																0		0,00	0,000	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	002	202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	5.211,00		62.132.563.070	5.295,00	23.582.372.462	51,11	20.192.140.000	0	543.873.000		324.994.500								55	17.567.425.993	108,02	87,00	5.350,21	41.149.798.455	1,03	66,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	002	202	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen				4	390.150.500	1	200.000.000											1	199.727.800	1	199.727.800	100,00	99,86						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	002	202	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Bendung Irigasi	Bendung				2	823.668.603	1	2.000.000.000											1	1.948.655.373	1	1.948.655.373	100,00	97,43						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	002	202	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	KM				84,00	17.010.530.419	4,5	15.636.140.000						1,6								8.871.547.217	4	13.063.177.820	84,44	83,54				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	002	202	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi Yang dipelihara dan Jumlah Honorarium Non PNS Lainnya Petugas Lapangan Bidang Pemeliharaan Irigasi Seluruh Indonesia	KM				108,00	5.358.022.940	8	2.356.000.000	2	543.873.000	2	324.994.500	2										425.124.000	8	2.355.865.000	100,00	99,99				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	003			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	%	68,7093		14.800.000.000	7.																											

				4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	3	003	201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk berakses air minum	%	68,7093	14.800.000.000	7.459,00	10.218.333.914	68,706	16.834.644.000	-	3.970.699.684	11.568.118.554	0	15.538.818.238	0,00	92,30	7.459,00	25.757.152.152	108,56	174,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	3	003	201	01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen		4	297.835.000	4	678.564.000		57.534.375	3	578.739.625	4	636.274.000	100,00	93,77				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	03	03	201	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR				5	525.000.000		130.250.000	5	390.750.000	5	521.000.000	100,00	99,24				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	3	003	201	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rehabilitasi SPAM Kawasan Perdesaan	m'		10	3.173.008.917						0		0,00	0,00					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	03	03	201	18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Optimalisasi SPAM Bukan Perpipaan	Unit			50	14.284.385.000			1	3.283.470.309	44	9.756.378.929	45	13.039.849.238	90,00	91,29			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	03	03	201	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Sambungan Rumah	SR		1.525	6.747.489.997	525	1.346.695.000			-	499.445.000	525	842.250.000	525	1.341.695.000	100,00	99,63			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penanganan Sampah	%	7586	2.400.000.000							0		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	03	04	201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	2.400.000.000							0		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	3	005			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersantasi	%	7658	12.850.000.000	7.464,00	8.513.819.599	7508	4.577.641.605	0	78.391.150	-	1.069.625.000		3.367.744.000	0	4.515.760.150	0,00	98,65	7.464,00	13.029.579.749	0,97	101,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	005	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tinggal bersantasi	%	7658	12.850.000.000	7.464,00	8.513.819.599	7508	4.577.641.605	0	78.391.150	-	1.069.625.000		3.367.744.000	0	4.515.760.150	0,00	98,65	7.464,00	13.029.579.749	0,97	101,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	05	201	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Peningkatan SDM terkait Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Kelompok		15	239.822.300	6	99.483.605	6	78.391.150			6	78.391.150	100,00	78,80						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	005	201	12	Pembangunan/Prnyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala	Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga		750	8.273.997.299	400	4.478.158.000			100	1.069.625.000	300	3.367.744.000	400	4.437.369.000	100,00	99,09				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	006			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembangunan aliran air tidak terhambat	%	65	22.939.937.995	637,0	19.181.774.762	63	15.141.072.288		449.799.250		5.664.586.429		6.226.163.179	0	12.790.455.258	0,00	84,48	637,00	31.972.230.020	9,80	139,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	006	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalamTersedianya Saluran Drainase yang Terpelihara	%	65	22.939.937.995	637,0	19.181.774.762	63	15.141.072.288		449.799.250		5.664.586.429		6.226.163.179	0	12.790.455.258	0,00	84,48	637,00	31.972.230.020	9,80	139,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	006	201	01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Dokumen		6	970.094.800	3	482.500.000			1	134.232.300	2	338.208.700	3	472.441.000	100,00	97,92				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	006	201	005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-gorong Perkotaan	M		4.040	8.416.191.500	1500	3.896.920.288			600	1.512.115.000	700	872.119.999	1.300	2.384.234.999	86,67	61,18				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	006	201	006	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Tersedianya Saluran Drainase yang Optimal	M		2.100	4.271.531.727	1800	4.679.520.000			850	2.130.819.999	750	2.129.980.000	1.600	4.260.799.999	88,89	91,05				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	006	201	007	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Tersedianya Saluran Drainase yang baik	M		1.050	1.779.307.500	1550	3.900.000.000			0	987.600.000	1450	2.503.870.000	1.450	3.491.470.000	93,55	89,52				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	006	201	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Tersedianya Saluran Drainase yang Terpelihara	M		11.000	3.148.219.235	8000	2.182.132.000	4500	449.799.250	2300	449.906.400	400	899.819.130	800	381.984.480	8.000	2.181.509.260	100,00	99,97			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	06	201	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M		300	596.430.000							0		0,00	0,000						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	%	65	8.575.105.449	615,0	13.754.910.178	63	5.013.000.000		-		1.462.552.984		3.495.673.627	0	4.958.226.611	0,00	98,91	615,00	18.713.136.789	9,46	218,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	08	201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Yang dilakukan Pembangunan dan Rehabilitasi pada tahun anggaran tersebut	Unit/Dokumen	26	8.575.105.449	36	13.754.910.178	63	5.013.000.000		-		1.462.552.984		3.495.673.627	0	4.958.226.611	0,00	98,91	36,00	18.713.136.789	1,38	218,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	008	201	02	Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor	Unit/Dokumen		17	9.221.521.195	4	4.613.000.000			1	1.273.754.080	3	3.287.309.519	4	4.561.063.599	100,00	98,87					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	3	008	201	12	Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Bangunan Gedung yang Optimal	Unit		19	4.533.388.983						0		0,00	0,00							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	03	08	201	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit			2	400.000.000			0	188.798.904	2	208.364.108	2	397.163.012	100,00	99,29					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	009			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	25	3.300.000.000	25	4.547.695.800	27	3.058.063.011	0	161.114.000		440.916.535		443.994.000	25	2.003.392.111	25	3.049.416.646	92,59	99,72	50,00	7.597.112.446	2,00	230,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	009	201		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Yang dilakukan Penataan dan Pembangunan di Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran tersebut	Kawasan	2	3.300.000.000	2,00	4.547.695.800	27	3.058.063.011	0	161.114.000		440.916.535		443.994.000	25	2.003.392.111	25	3.049.416.646	92,59	99,72	27,00	7.597.112.446	13,50	230,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	009	201	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Taman Kawasan Perkotaan	Kawasan		2	3.163.261.100	2	3.058.063.011		161.114.000		440.916.535		443.994.000	2	2.003.392.111	2	3.049.416.646	100,00	99,72				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	009	201	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Perkotaan	Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan	Kawasan		2	1.384.434.700						0		0,00	0,00								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	3	010			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	70	163.200.253.800.775	6.304,00	148.326.594.220	66	91.872.927.772		3.304.451.650		3.973.279.475		30.312.407.921		52.075.469.388	0	89.665.608.434	0,00	97,60	6.304,00	237.992.202.654	90,06	0,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	010	201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan Yang dilakukan pembangunan dan Peningkatan pada tahun anggaran tersebut	KM	10128	163.200.253.800.775	981,00	148.326.594.220	66	91.872.927.772		3.304.451.650		3.973.279.475		30.312.407.921		52.075.469.388	0	89.665.608.434	0,00	97,60	981,00	237.992.202.654	0,10	0,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	010	201	01	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana teknis Kebijakan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen		2	435.927.858	1	200.000.000			98.975.000	1	98.578.000	1	197.553.000	100,00	98,78						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	3	010	201	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	M²		300	664.362.997						0		0,00	0,00							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	010	201	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen			1	75.000.000					0		0,00	0,00								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	3	010	201	05	Pembangunan Jalan	Jalan dibangun / ditingkatkan	KM	41	58.478.546.351	24	22.063.1.																			

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17			
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	3	011	201	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Orang	100		650.000.000								0		-	0,00	0,00	0,00	-	0,00					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	012		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	%	79		4.350.000.000	72	2.616.875.747	77	453.949.920		28.376.697		100.019.350		52.640.100	72	196.873.100	72	377.909.247	93,51	83,25	144,00	2.994.784.994	1,82	68,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	012	201	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota pada tahun anggaran tersebut	Dokumen	9		1.250.000.000	1	61.605.000	1	42.549.425				41.475.150			0	41.475.150	0,00	97,48	1,00	103.080.150	0,11	8,25			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	012	201	004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang	Dokumen			1	61.605.000	1	42.549.425			1	41.475.150			1	41.475.150	100,00	97,48							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	012	202	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran tersebut	Dokumen	3		2.000.000.000	2	1.799.333.000							0	-	0,00	0,00	2,00	1.799.333.000	0,67	89,97					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	012	202	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	RTRR Kabupaten/Kota	Dokumen				2	1.799.333.000							0	-	0,00	0,00								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	12	203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran tersebut	Dokumen	3		150.000.000										0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	012	204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran tersebut	Dokumen	12		950.000.000	2	755.937.747	1	411.400.495	1	28.376.697	1	58.544.200	3	52.640.100		196.873.100	5	336.434.097	500,00	81,78	7,00	1.092.371.844	0,58	114,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	012	204	004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Bulan			2	755.937.747	1	411.400.495		28.376.697		58.544.200		52.640.100	1	196.873.100	1	336.434.097	100,00	81,78					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	04			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTAHANAN					8.806.796.306		29.059.042.628		8.692.882.859		369.210.089		1.260.764.676		1.993.643.305		3.790.924.061		7.414.542.131		85,29		36.473.584.759		414,15	Perkim	
1	04	01		PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,00		3.355.225.000	89	8.004.233.675	89	4.180.214.115	22	369.210.089	22	1.230.060.676	22	1.215.280.993	22	1.242.531.608	89	4.057.083.366	100,00	97,05	178,00	12.061.317.044	2,00	359,48	Perkim	
1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24,00		2.628.225.000	170	6.735.753.365	89	3.656.243.999	22	369.210.089	22	1.142.803.076	22	1.143.510.281	22,25	890.931.044	89	3.546.454.490	0,00	97,00	258,52	10.282.207.855	10,77	391,22	Perkim	
1	04	01	2.02	01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan	115		2.000.000.000	23	5.814.054.865	23	3.267.420.034	23,00	369.210.089	33,00	1.020.943.576	33,00	1.035.835.281	23	754.818.444	112	3.180.807.390	243,48	97,35				Perkim	
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12		628.225.000	48	921.698.500	12	388.823.965	4,00	121.859.500	4,00	107.675.000		136.112.600	8	365.647.100	33,33	94,04					Perkim		
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan	32		40.000.000	45	49.728.000	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	45,00	49.728.000	140,63	124,32	Perkim			
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepegawaian	paket			40.000.000	45	49.728.000	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00					Perkim			
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	unit	658		385.000.000	90	678.195.510	658	400.086.660	0,00	120	55.188.900	110	61.600.062	12	281.086.631	242	397.875.593	18,24	99,45	331,94	1.076.071.103	50,45	279,50	Perkim	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	5		-	4	4.938.752	-	-	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00					Perkim		
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	33		6.000.000	32	275.357.050	33	103.423.590	-	10,00	19.308.300	10,00	6.610.000	13	77.213.800	33	103.132.100	30,30	99,72				Perkim		
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	paket	23		12.000.000	72	25.729.052	23	39.891.550	-	10,00	5.484.600	0,00	-	13	32.926.300	23	38.410.900	43,48	96,29				Perkim		
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	paket	2		5.000.000	13	44.059.100	2	3.755.000	-	-	-	-	2	3.365.000	2	3.365.000	0,00	89,61					Perkim		
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	dokumen			8.000.000	204	8.640.000	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00					Perkim			
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	600		300.000.000	486	319.471.556	600	253.016.520	-	100,00	30.396.000	100,00	54.990.062	400	167.581.531	600	252.967.593	16,67	99,98				Perkim		
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	27		102.000.000	142	77.220.650	27	42.930.000	13	16.223.900	13	6.330.650		14.505.233	26	37.059.783	48,15	86,33	167,83	114.280.433	621,60	112,04	Perkim		
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	laporan	12		28.000.000	47	42.316.450	12	28.000.000	-	5,00	6.933.900	5,00	6.330.650	12	8.865.233	22	22.129.783	41,67	79,03				Perkim		
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	15		84.000.000	50	34.904.200	15	14.930.000	-	8,00	9.290.000	8,00	-	15	5.640.000	31	14.930.000	53,33	100,00				Perkim		
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	6		200.000.000	131	463.336.153	5	80.953.456	-	1,00	15.844.800	1,00	3.840.000		56.008.700	2	75.693.500	20,00	93,50	133,00	539.029.653	2.216,67	269,51	Perkim	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	5		200.000.000	20	138.436.153	5	80.953.456	-	1,00	15.844.800	1,00	3.840.000	3	56.008.700	5	75.693.500	20,00	93,50				Perkim		
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1		-	1	324.900.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,000						Perkim			
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase	100		950.000.000	100,00	-	100	98.456.334	25,00	-	25,00	-	25	97.597.134	100	97.597.134	0,00	0,000	200,00	97.597.134	200,00	10,27	Perkim		
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase	5		950.000.000	100,00	-	100	98.456.334	25,00	-	25,00	-	25	97.597.134	100	97.597.134	0,00	0,000	200,00	97.597.134	4.000,00	10,27	Perkim		
-	-	-	-	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	unit rumah	2		50.000.000	-	-	2	98.456.334	-	-	-	-	1	97.597.134	1	97.597.134	0,00	0,000					Perkim		
-	-	-	-	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	unit rumah	3		900.000.000	-	-	3	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	0,000					Perkim		
1	04	05			Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU (prasana sarana dan utilitas umum)	Persentase	99		3.601.571.306	87	20.053.275.410	99	4.264.272.150	14,00	-	20,00	30.704.000	25,00	770.493.462	40	2.447.330.857	99	3.248.528.319	0,00	76,18	186,00	23.301.803.729	187,88	646,99	Perkim
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU (prasana sarana dan utilitas umum)	Persentase	13,00		3.601.571.306	87	20.053.275.410	99	4.264.272.150	14,00	-	20,00	30.704.000	25,00	770.493.462	40	2.447.330.857	99	3.248.528.319	1,01						

					4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perikara Perumahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perikara Perumahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	400.000.000	29	218.616.540	1	41.726.050	-	0,00	-	0,00	-	1	20.427.500	1	20.427.500	0,00	0,000						Perkim	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	berita acara	2	100.000.000	0		0	25.000.000	-	0,00	-	0,00	-	1	10.766.100	1	10.766.100	0,00	0,000						Perkim	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	TERLAKSANANYA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase	100,00	400.000.000	12	782.917.000	100,00	83.214.210	25,00	-	25,00	-	25,00	7.868.850	25	69.008.800	100	76.877.650	0,00	0,000	112,00	859.794.650	112	214,95	Perkim	
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peraturan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persentase	100,00	400.000.000	12	782.917.000	100,00	83.214.210	25,00	-	25,00	-	25,00	7.868.850	25	69.008.800	100	76.877.650	0,00	0,000	112,00	859.794.650	112	214,95	Perkim	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	400.000.000	12	782.917.000	1	83.214.210	-	0,00	-	1,00	7.868.850	1	69.008.800	2	76.877.650	0,00	0,000						Perkim	
01	05				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Skor Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dari Inspektorat	70	B	66.475.968.372	69,35	32.209.837.639	69,47	14.021.063.609	-	2.086.622.062	-	4.061.122.138	-	3.373.843.062	71,08	3.931.057.865	71,08	13.841.386.484	102,32	98,72	71,08	46.051.224.123	101,54	69,27	SATPOL-PP	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00	Indeks					89,00			79,00				79,00			88,76		79,00		83,16					
					Indeks Penyelenggaraan Transbumihimas	75,00	Indeks			62,46		63,87		-	45,85		-		-			45,85		71,79		45,85		61,13			
01	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00	Indeks	64.264.872.720		27.726.577.883	89,00	12.697.336.874		1.864.465.022	79,00	3.805.186.288		2.969.990.640	81,06	3.929.557.865	81,06	12.569.199.815	91,08	98,99	81,06	40.295.777.698	85,33	62,70	SATPOL-PP	
1	05	01	2.04	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5	Paket	302.550.000	1	450.246.000	0	-						-	-	0,00	0,00	1	450.246.000	20,00	148,82	SATPOL-PP				
1	05	01	2.06		Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Satpol PP	680	Paket	564.399.232	261	829.918.955	105	168.797.345	46	54.718.422	40	84.096.663	16	23.867.000	3	5.850.000	105	168.532.085	100,00	99,84	366	998.451.040	53,82	176,91	SATPOL-PP	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	77.650.000	4	78.574.960	1	14.987.290	0	-	1	14.987.290	0	-			1	14.987.290	100,00	100,00					SATPOL-PP	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	173.939.232	4	128.599.794	2	24.999.075	0	-	1	23.039.075	1	1.960.000			2	24.999.075	100,00	100,00					SATPOL-PP	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	4.000.000	4	111.753.739	1	4.997.140	0	-	1	4.997.140	0	-			1	4.997.140	100,00	100,00					SATPOL-PP	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	15.000.000	4	61.444.620	1	4.999.840	0	-	1	4.999.840	0	-			1	4.999.840	100,00	100,00					SATPOL-PP	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40	Dokumen	3.000.000	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-			-	-	-	-					SATPOL-PP
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	Laporan	290.810.000	245	449.545.842	100	118.814.000	46	54.718.422	36	36.073.318	15	21.907.000	3	5.850.000	100	118.548.740	100,00	99,78					SATPOL-PP	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket penyelenggaraan pengadaan BMD penunjang urusan Satpol PP	52	Paket	1.185.000.000	53	1.132.657.626	7	9.519.535	0	-	7	9.519.535	0	-	-	-	7	9.519.535	100,00	100,00	60	1.142.177.161	115,38	96,39	SATPOL-PP	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13	Unit	1.120.000.000	2	1.019.300.600	0	-						-	-	0,00	-								SATPOL-PP	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29	unit	45.000.000	50	104.257.026	7	9.519.535			7	9.519.535					7	9.519.535	100,00	100,00					SATPOL-PP	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	10.000.000	1	9.100.000	0	-						-	-	0,00	-								SATPOL-PP	
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	unit	10.000.000																					SATPOL-PP	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Satpol PP	180	Laporan	35.784.100.000	72	15.339.265.717	50	7.770.679.000	7	1.240.564.520	13	1.911.287.070	12	1.957.635.630	18	2.620.163.410	50	7.729.650.630	100,00	99,47	122	23.068.916.347	67,78	64,47	SATPOL-PP	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0	buah														-								SATPOL-PP	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	80.000.000	24	49.958.717	36	52.295.000	5	7.088.520	10	13.601.070	8	11.853.630	13	13.111.410	36	45.654.630	100,00	87,30					SATPOL-PP	
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Laporan	49.000.000	24	54.460.000	2	9.980.000	0	-	0	-	0	-	2	9.980.000	2	9.980.000	100,00	100,00					SATPOL-PP	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	35.655.100.000	24	15.234.847.000	12	7.708.404.000	2	1.233.476.000	3	1.897.686.000	4	1.945.782.000	3	2.597.072.000	12	7.674.016.000	100,00	99,55					SATPOL-PP	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang Dipelihara	1677		2.995.000.000	662	2.079.404.160	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	-	662	2.079.404.160	39,48	69,43	SATPOL-PP	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Lain-lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Lain-lainnya	1675	unit	2.678.325.000	660	1.762.729.160										0	-	0,00	0,00						SATPOL-PP	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	2	unit	316.675.000	2	316.675.000										-	-	0,00	-						SATPOL-PP	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMAN dan KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengkatan Perda dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	75,00	%	2.179.195.652	73,97	3.633.440.220	74,38	1.113.726.735	82,69	222.157.040	80,85	254.435.850		204.927.400			386.641.357	80,85	1.068.161.647	108,70	95,91	107,80	4.701.601.867	107,80	215,75	SATPOL-PP
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen, unit sarpras dan laporan penyelenggaraan penanganan gangguan ketertaman dan ketertiban umum serta Jumlah SDM Satpol PP dan Satlumas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam menyelenggarakan penanganan gangguan ketertaman dan ketertiban umum	3698		1.994.695.652	2375	3.291.490.165	584	905.186.198	100	212.257.240	152	234.107.000	102	184.065.000	230	254.526.670	584	884.955.910	100,00	97,77	2959	4.176.446.075	80,02	209,38	SATPOL-PP	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	0	-	4	19.999.830	1	6.580.370	1	2.250.000	1	9.600.000	1	1.500.000	4	19.930.370	100,00	99,65					SATPOL-PP	
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	0	Dokumen	-	0	-	4	28.672.410	2	23.755.370	1	3.150.000	0	-	1	1.650.000	4	28.555.370	100,00	99,59					SATPOL-PP	
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1700	Orang	166.437.500	1.873	299.538.780	79	14.530.932	0	-	0	-	0	-	79	12.875.920	79	12.875.920	100,00	88,61					SATPOL-PP	

				4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17									
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keterseraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Keterseraman dan Keterlibatan Umum yang Tersedia	1188	unit	-	1.328.945.652	-	396	741.983.626	97	181.921.500	106	198.632.000	87	162.090.000	106	184.063.250	396	726.706.750	100,00	97,94		SATPOL-PP				
1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan penyelenggaraan penegakan Perda Kab. Karo dan Peraturan Bupati Karo	472			184.500.000	175	341.950.055	53	204.540.922	16	9.899.800	7	19.800.235	18	20.862.400	12	128.643.687	53	179.206.122	100,00	87,61	228	521.156.177	48,31	282,47	SATPOL-PP
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegaka Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/	38	Laporan	-	71.000.000	16	166.609.240	4	77.766.275	0	-	1	15.735.835	1	450.000	2	50.640.440	4	66.826.275	100,00	85,93		SATPOL-PP			
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	79	Laporan	-	78.000.000	11	63.346.415	23	114.774.647	3	3.899.800	6	4.064.400	4	14.412.400	10	78.003.247	23	100.379.847	100,00	87,46		SATPOL-PP			
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	355	Laporan	-	35.500.000	148	111.994.400	26	12.000.000	13	6.000.000	0	-	13	6.000.000			26	12.000.000	100,00	100,00		SATPOL-PP			
1	5	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	0	Laporan	-	-	2	3.999.615	0	-	1	528.615	0	-	1	3.471.000	2	3.999.615	100,00	100,00	2	3.999.615	0,00	0,00	SATPOL-PP		
1	5	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Hukum	0	Laporan	-	-	2	3.999.615	0	-	1	528.615	0	-	1	3.471.000	2	3.999.615	100,00	100,00				SATPOL-PP			
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota	65	%		32.200.000	41	849.819.536	51	210.000.000	41,18	-	41,18	1.500.000		198.925.022		3.600.000	41,18	204.025.022	80,75	97,15	63,35	1.053.844.558	63,35	3272,81	SATPOL PP
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah/Kota	Jumlah sarana dan prasarana, dokumen serta laporan penyelenggaraan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran Kab. Karo yang diadakan	363			32.200.000	147	679.022.856	60	110.000.000	0	-	5	1.500.000	43	104.750.157	12	3.600.000	60	109.850.157	100,00	99,86	207	788.873.013	57,02	2449,92	SATPOL-PP
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	25	75.000.000			25	75.000.000			25	75.000.000			25	75.000.000	100,00	100,00		SATPOL-PP				
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			-	25	7.500.000			5	1.500.000	8	2.400.000	12		25	7.500.000	100,00	100,00				SATPOL-PP				
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	353	Unit	-	32.200.000	147	679.022.856	10	27.500.000			10	27.350.157			10	27.350.157	100,00	99,46		SATPOL-PP					
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang diberdayakan dalam pencegahan kebakaran	2844			-	1.185	170.796.680	360	100.000.000	0	-	0	-	360	94.174.865	0	-	360	94.174.865	100,00	94,17	1545	264.971.545	54,32	0,00	SATPOL-PP
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	2844	Orang	-	1.185	170.796.680	360	100.000.000	0	-	0	-	360	94.174.865			360	94.174.865	100,00	94,17		SATPOL-PP				
1	5				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					31.001.926.000		30.767.420.793		9.119.234.448		509.843.622		1.743.507.474		1.197.945.279		4.966.220.419		8.417.516.794	97,06	92,31	39.184.937.587	83,16	126,40	BPBD	
1	5	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95			23.784.550.000	81,50	9.812.771.802	82	5.039.578.803	81,50	509.843.622	81,50	1.743.507.474	81,50	1.114.721.029	82,0	1.497.968.299	82,00	4.866.040.424	100,00	45,29	82,00	14.678.812.226	86,32	61,72	BPBD
1	5	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		15.583.900.020	40	7.080.142.310	100	3.888.591.125	25	396.829.492	25	1.449.012.750	25	827.876.777		1.084.300.976	75,00	3.758.019.995	50,00	47,30	55,00	10.838.162.305	55,00	69,55	BPBD
1	5	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan		62	6.812.242.310	29	3.813.341.125	29	387.349.492	29	1.434.792.750	29	813.656.777	29	1.048.690.976	29,00	3.684.489.995	50,00	47,61	91,00	10.496.732.305			BPBD	
1	5	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		24	267.900.000	12	75.250.000	3	9.480.000	3	14.220.000	3	14.220.000	3	35.610.000	12,00	73.530.000	50,00	31,50	36,00	341.430.000			BPBD	
1	5	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100		275.120.000	10,00	41.664.000	0	-	0	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	41.664.000	10,00	15,14	BPBD			
1	5	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket		62	41.664.000	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00				BPBD				
1	5	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		2.695.280.000	40	1.060.513.808	100	449.586.878	25	25.171.700	25	109.300.953	25	127.005.480	25	173.707.664	100,00	435.185.797	50,00	33,63	60,00	1.485.699.305	60,00	55,12	BPBD
1	5	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		8	9.635.300	4	3.997.410	4	-	0	2.020.000	4	1.861.000	0	-	8,00	3.881.000	49,30	50,53	16,00	13.516.300			BPBD	
1	5	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		82	104.333.450	40	52.353.580	33	13.320.000	11	5.932.800	37	17.777.500	36	14.061.000	33,00	51.091.300	61,63	36,77	115,00	155.424.750			BPBD	
1	5	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		36	17.172.200	13	9.544.238	9	2.255.400	11	1.083.600	13	4.438.750	13	1.110.500	11,00	8.888.250	67,81	39,61	47,00	26.060.450			BPBD	
1	5	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		10	87.524.250	5	43.600.650	3	434.400	4	8.019.600	5	19.337.600	3	12.876.150	4,00	40.667.750	43,26	19,39	14,00	128.192.000			BPBD	
1	5	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		1200	7.200.000	257	1.799.000	65	540.000	65	-	65	900.000	62	180.000	257,00	1.620.000	50,58	30,02	1.457,00	8.820.000			BPBD	
1	5	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan		24	159.947.000	12	51.024.000	3	7.083.000	3	-	3	6.597.000	3	28.353.000	12,00	42.033.000	50,00	8,38	36,00	201.980.000			BPBD	
1	5	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		24	664.701.308	12	287.268.000	3	1.538.900	3	92.244.953	3	76.093.630	3	117.127.014	12,00	287.004.497	50,00	45,69	36,00	951.705.805			BPBD	
1																															

4				5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15B*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	5	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan		24	950.227.492	12	481.504.800	3	80.668.968	3	119.473.967	3	118.319.553	3	157.124.553	12,00	475.587.041	50,00	41,47	36,00	1.425.814.533			BPBD	
1	5	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.726.500.000	33,33	543.434.912	100	196.600.000	25,00	2.742.500	25,00	61.420.494	25,00	37.076.376	25	78.277.481	100,00	179.516.851	50,00	39,33	53,33	722.951.763	53,33	41,87	BPBD
1	5	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit		26	375.964.912	9	187.350.000	6	2.742.500	6	61.420.494	4	37.076.376	9	69.627.481	6,00	170.866.851	37,50	41,70	32,00	546.831.763			BPBD	
1	5	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		26	17.785.000	12	9.250.000	3	0	2	-	7		2	8.650.000	14,00	8.650.000	41,67	0,00	40,00	26.435.000			BPBD	
1	5	001	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit		1	149.685.000	0		0	0	-													BPBD		
1	5	003			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatkan kapasitas daerah menghadapi bencana	Indeks	0,60	7.217.376.000	0,49	20.954.648.991	0,51	4.079.655.645	0,45	-	0,45	-	0,45	83.224.250	0,48	3.468.252.120	0,48	3.551.476.370	94,12	0,00	0,48	24.506.125.361	80,00	339,54	BPBD
1	5	003	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	%	100	1.010.000.000	30,00	229.884.261	100	100.009.720	5	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00	0,00	31,00	229.884.261	31,00	22,76	BPBD	
1	5	003	2.01	003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilengkapi	Dokumen		1	68.156.000	1	100.009.720	0	-							0,00	-	5,00	0,00	1,00	68.156.000			BPBD	
1	5	003	2.01	004	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang		1490	161.728.261	0		0	-															BPBD	
1	5	003	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		%	100	4.731.560.000	23,33	15.196.284.238	100	89.995.970	-	25	-	25,00	56.188.150	25,00	25.413.190	75,00	81.601.340	25,00	0,00	38,33	15.277.885.578	38,33	3,23	BPBD	
1	5	003	2.02	006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan		2	125.703.700	1	14.999.670	0		0	0	0	1	9.874.000	1	600.000	1,00	10.474.000	0,00	0,00	3,00	136.177.700			BPBD
1	5	003	2.02	007	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Jenis		2	14.397.380.213	0	-	0	-	0	-	-												BPBD	
1	5	003	2.02	008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang		30	48.002.370	0	0	0	-	0	-	-												BPBD	
1	5	003	2.02	010	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang		799	188.090.100	0	0	0	-	0	-	-												BPBD	
1	5	003	2.02	015	Penyediaan peralatan perlindungan diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit		10	78.000.000	0	0	0	-	0	-	-												BPBD	
1	5	003	2.02	016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang		217	336.068.405	35	49.999.700	0		0	68	0	46.314.150	-	68,00	46.314.150	194,29	0,00	285,00	382.382.555				BPBD	
1	5	003	2.02	017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Laporan		1	23.039.450	1	24.996.600	0		0	0	0	1	24.813.190	1,00	24.813.190	0,00	0,00	2,00	47.852.640				BPBD	
1	5	003	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	805.000.000	30,0	3.709.626.400	0	3.087.484.665	0	-	50	-	25	17.872.600	25	3.037.225.510	100,00	3.055.098.110	0,00	0,00	50,00	6.764.724.510	50,00	8,40	BPBD
1	5	003	2.03	003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian	Orang		1130	3.625.960.100	689	3.068.677.685	0		0	1	0	0	4.500.000	695	3.033.543.510	696,00	3.038.043.510	10,00		1.826,00	6.664.003.610			BPBD
1	5	003	2.03	009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang		79	35.766.300	35	18.806.980	19		0	19	0	40	13.372.600	199	3.682.000	277,00	17.054.600	380,00	356,00	52.820.900				BPBD
1	5	003	2.03	011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan		1	47.900.000	0		0	0	-	0	-	-											BPBD	
1	5	003	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kegiatan	%	100	670.816.000	6,15	1.818.854.092	0	802.165.290	-	-	-	12,5	9.163.500	63	405.613.420	75,00	414.776.920	0,00	0,00	21,15	2.233.631.012	21,15	3,33	BPBD	
1	5	003	2.03	002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen		0	0	1	9.999.550	0		0	0	0	1	9.846.440	1,00	9.846.440	0,00		1,00	9.846.440				BPBD	
1	5	003	2.03	003	Kejasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen		2	65.891.750	0	0	0	-	0	-	-				0	-	0,00						BPBD	
1	5	003	2.03	006	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JTUP PASMA) Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Dokumen		1	1.752.962.342	0	0	0	-	0	-	-				0	-	0,00						BPBD	
1	5	003	2.03	010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	Kegiatan		0	0	1	792.165.740	0		0	0	-	1	9.163.500	1	395.766.980	1	404.930.480	0,00	0,00	1,00	404.930.480	0,00	0,00	BPBD
1	2	01			DINAS SOSIAL				22.472.685.700		18.657.358.709		4.344.240.412		549.048.860		1.075.416.417		1.350.926.924		1.259.113.077	0,00	4.234.505.278	0,00	97,474	0,00	22.891.863.987	101,87		DINSOS
1	2	01			PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	16.447.970.000	72	12.632.643.009		3.660.443.593	145	467.056.473		988.637.082		1.096.397.418		1.030.414.182	145,00	3.582.505.155	0,00	97,871	217,00	16.215.148.164	228,42	98,58	DINSOS
1	2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	13.632.893.009	8125	13.632.893.009		3.165.328.463	27	386.188.434		865.816.352	27	979.474.198	27	868.899.909	27,00	3.100.378.893	0,00	97,948	8.152,00	16.733.271.902	8.152,00	122,74	DINSOS
1	2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bin		16	2.588.928.625	20	3.078.328.463	19	368.378.434	19	844.826.352	19	956.204.198	19	846.389.909	19,00	3.015.798.893	190,00	97,969						DINSOS
1	2	01	2.02	03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen		31	137.650.000	8	87.000.000	8	17.810.000		20.990.000	8	23.270.000	8	22.510.000	8,00	84.580.000	100,00	97,218						DINSOS
1	2	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	117.600.000	8125	117.600.000		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,000	8.125,00	117.600.000	8.125,00	100,00			DINSOS
1	2	01	2.05	02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	palet		35	23.520.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,000							DINSOS
1	2	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.064.299.791	8125	1.064.299.791		182.824.720	110	17.446.400		58.362.287		56.968.470		48.957.640	110,00	181.734.797	0,00	99,404	8.235,00	1.246.034.588	8.235,00	117,08	DINSOS
1	2	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	palet		4	4.500.000	4	3.489.163	0		1	1.738.990	-	-	3	1.387.310	4,00	3.126.300	100,00	89,600						DINSOS
1	2	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	palet		4	25.508.235	4	23.840.285	0		1	7.932.015	1	2.022.350	2	13.840.270	4,00	23.794.635	100,00	99,809						DINSOS
1	2	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	palet		4	5.191.800	4	7.419.700	0	</																

3					4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13*100%	15=7+13	16=15*100%	17											
1	2	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	DINSOS										
1	2	07	2.01		Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	%	100	624.627.000	100	624.627.000	4	128.925.400	2	32.402.740	-	-	2	31.157.400	65.130.540	4,00	128.690.680	100,00	99,818	99,00	753.317.680	104,21	120,60	DINSOS	
1	2	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam			10	124.925.400	4	128.925.400	2	32.402.740	-	-	2	31.157.400	65.130.540	4,00	128.690.680	100,00	99,818					DINSOS	
					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MEKEGANG				23.663.603.548	15.682	9.911.609.941		4.694.946.514		346.807.714	15.682	1.691.525.433	170	1.016.887.730	0,00	1.488.675.115		4.543.895.992		96,78	14.455.505.933		61,09	DISNAKERUKUM	
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	18.501.238.206	86	6.874.385.049	89	3.604.044.406		346.807.714		1.534.475.433	58	724.752.190	0,00	1.094.440.400	58,00	3.700.475.737		51,66	144,00	10.574.860.786	151,58	57,16	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	14.084.238.606	100	5.317.395.040	100	2.975.056.238		318.499.441		1.363.130.066	24	584.316.333	0,00	805.359.948	24,00	3.068.305.788	0,00	55,26	124,00	8.385.700.828	124,00	59,54	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	100	13.204.163.606	47	5.006.645.040	19	2.901.016.238	19	315.499.441		1.349.510.066	19	566.156.333		763.599.948	19,00	2.994.765.788	100,00	103,23	66	8.001.410.828	66,00	60,60	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	880.075.000	168	310.750.000	12	74.040.000	0	-		13.620.000	5	18.160.000		41.760.000	12,00	73.540.000	100,00	99,32	180	384.290.000	300,00	43,67	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	211.680.000	-	22.500.000	100	-	-	-	-	0	0	0,00	-	-		0,00			22.500.000	0,00	10,63	DISNAKERUKUM	
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepegawaian	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepegawaian	Stel	9	211.680.000	30	22.500.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DISNAKERUKUM	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.849.519.600	100	659.825.355	100	286.832.168	-	-		74.426.553	23	75.674.140	0,00	136.544.446	90	286.645.139	0,00	25,95	190,00	946.470.494	190,00	51,17	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	23.000.000	60	9.602.240	10	5.995.440	0	-		1.498.280	3	1.498.280		2.998.880	6,00	5.995.440	60,00	100,00	66	15.597.680	1320,00	67,82	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	114.000.000	42	61.560.240	42	48.661.640	0	-		12.163.580		12.163.210		24.334.850	42,00	48.661.640	100,00	100,00	84	110.221.880	560,00	96,69	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	41.500.000	40	13.298.699	22	8.998.699	0	-		2.248.130		2.248.890		4.483.868	22,00	8.980.888	100,00	99,80	62	22.279.587	620,00	53,69	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Jenis	15	215.000.000	70	38.003.443	-	0	0	-	-	-	-	-	0,00		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	70	38.003.443	466,67	17,68	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.06	05	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	63.500.000	14	29.262.753	9	18.730.843	0	-		4.524.763		4.524.560		9.681.340	8,00	18.730.663	88,89	100,00	22	47.993.416	146,67	75,58	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1.392.519.600	102	508.097.980	12	204.445.546	0	-		53.991.800	20	55.239.200		95.045.508	12,00	204.276.508	100,00	99,92	114	712.374.488	190,00	51,16	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	560.000.000	100	193.419.000	100	25.136.000	-	-		-	-	0,00	24.779.000	1,00	24.779.000				101,00	218.198.000	101,00	38,96	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit	16	240.000.000	21	47.009.500	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-		0,00	0,00	21	47.009.500	131,25	19,59	DISNAKERUKUM	
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	320.000.000	12	146.409.500	0	25.136.000	0	-		-	0	-	-	24.779.000	1,00	24.779.000	#DIV/0!	98,58	13	171.188.500	81,25	53,50	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.008.800.000	100	371.595.854	100	205.380.000	5	31.308.273		76.211.814	6	45.006.717	0,00	58.723.653	24	211.250.457	24,00	102,86	124,00	582.846.311	124,00	57,78	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	101.000.000	24	30.919.154	12	23.820.000	3	3.578.273		6.886.814	3	3.411.717		3.263.653	12,00	17.140.457	100,00	71,96	36	48.059.611	60,00	47,58	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	907.800.000	156	340.676.700	12	181.560.000	2	27.730.000		69.325.000	3	41.595.000		55.460.000	12,00	194.110.000	100,00	106,91	168	534.786.700	280,00	58,91	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	787.000.000	100	309.649.800	100	111.640.000	-	-		20.707.000	5	19.755.000	0,00	69.033.353	41	109.495.353	100	294,88	141,00	419.145.153	141,00	53,26	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	165.000.000	3	76.838.600	1	38.420.000	0	-		7.152.000		25.944.954	1,00	37.146.954	100,00	96,69	4	113.985.554	80,00	69,08	DISNAKERUKUM		
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lain-lain	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	25	255.000.000	10	96.501.200	5	48.270.000	0	-		7.875.000		7.875.000		31.648.399	5,00	47.398.399	100,00	98,19	15	143.899.599	60,00	56,43	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	117.000.000	16	36.310.000	35	24.950.000	0	-		5.680.000	5	7.830.000		11.440.000	35,00	24.950.000	100,00	100,00	51	61.260.000	102,00	52,36	DISNAKERUKUM
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Disediakan	Unit	5	250.000.000	2	100.000.000	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	2	100.000.000	40,00	40,00	DISNAKERUKUM
2	7	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih	%	20	890.000.000	1485,00	637.981.494	15	140.000.000	-	-		139.300.000	0	-	0,00	-	32	139.300.000	0,00	99,50	1.517,00	777.281.494	7.585,00	87,33	DISNAKERUKUM
2	7	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	%	100	890.000.000	100	637.981.494	100	140.000.000	-	-		139.300.000	0	-	0,00	-	32	139.300.000	#NAME?	#NAME?	132,00	777.281.494	132,00	87,33	DISNAKERUKUM
2	7	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	288	770.000.000	164	637.981.494	32	140.000.000	0	-		139.300.000	-	-	32,00	139.300.000	#NAME?	#NAME?	196	777.281.494	68,06	100,95	DISNAKERUKUM		
2	7	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	%	100	-	100,00	55.800.000	100	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	55.800.000	100,00	#DIV/0!	DISNAKERUKUM	
2	7	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Online (Kerja Hub)	Orang	90	130.000.000	300	55800000	0	0	0	-	-	0	-	0,00	-	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	300	55.800.000	333,33	42,92	DISNAKERUKUM	
2	7	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	%	65	500.000.000	1354,00	117.560.200	55	78.700.000	-	-		17.750.000	0	-	0,00	-	2	76.150.000	100,00	96,48	1.356,00	193.710.200	2.086,15	38,74	DISNAKERUKUM
2	7	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Beroperasi dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	%	100	150.000.000	100	10.977.245	100	18.500.000	-	-		17.750.000	0	-	0,00	-	1	17.750.000	100,00	95,95		28.727.245	101,00	19,15	DISNAKERUKUM
2	7	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Saran HI (PP/PKB Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	5	150.000.000	1	10.977.245	1	18.500.000	0	-		17.750.000	-	-	1,00	17.750.000	100,00	95,95	2	28.727.245	40,00	19,15	DISNAKERUKUM		
2	7	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	%	100	350.000.000	100	106.582.955	100	60.200.000	-	-		-	0	-	0,00	-	1	58.400.000	100,00	97	101,00	164.982.955	101,00	47,14	DISNAKERUKUM
2	7	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	5	350.000.000	2	106.582.955	1	60.200.000	0	-		-	-	58.400.000	1,00	58.400.000	100,00	97,01	3	164.982.955	60,00	47,14	DISNAKERUKUM		
2	17	02			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Yang Legal	%	45	180.000.000	0	-	29	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISNAKERUKUM	
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	180.000.000	0	-	100	-	-	-	-	0	-	0,00	-	10	-			10,00	-	10,00	0,00	DISNAKERUKUM	
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi Yang Patuh	Koperasi	30	750.000.000	28,00	103.753.826	20	15.550.000	-	-		-	0	-	0,00	-	10	12.825.340	100,00	82,48	38	116.579.166	126,67	15,54	DISNAKERUKUM

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15B*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	750.000.000	100	103.753.826	100	15.550.000	-	-	0	-	0,00	12.825.340	10	12.825.340	100,00	82,48	110,00	116.579.166	110,00	15,54	DISNAKERUKUM			
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Ketaatan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang - undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Unit Usaha	100	750.000.000	83	103.753.826	10	15.550.000	0	-	-	-	12.825.340	10,00	12.825.340	100,00	82,48	93	116.579.166	93,00	15,54	DISNAKERUKUM				
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian	Koperasi Aktif	%	6516	870802000	5226	1057840104	6451	636.581.810	-	-	112	217.271.540	0,00	323.009.375	132	540.280.915	100,00	84,87	5.358,00	1.598.121.019	82,23	183,52	DISNAKERUKUM		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	%	100	870802000	100	1057840104	100	636.581.810	-	-	112	217.271.540	0,00	323.009.375	132	540.280.915	100,00	84,87	232,00	1.598.121.019	232,00	183,52	DISNAKERUKUM		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkeroperasian	Orang	390	870.802.000	340	1.057.840.104	132	636.581.810	0	-	112	217.271.540		323.009.375	132,00	540.280.915	100,00	84,87	472	1.598.121.019	121,03	183,52	DISNAKERUKUM		
2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatnya Pendaftarannya	%	46	250.000.000	282,00	222.331.773	38	-	-	-	0	-	0,00	-	-	-	»DIV/0!		282,00	222.331.773	613,04	88,93	DISNAKERUKUM		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	%	100	250.000.000	100	222.331.773	100	-	-	-	0	-	0,00	-	-	»DIV/0!	»VALUE!	100,00	222.331.773	100,00	88,93	DISNAKERUKUM			
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Pemataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	70	250.000.000	90	222.331.773		0	-	-	-	-	»DIV/0!	»VALUE!		90	»VALUE!		128,57	»VALUE!	DISNAKERUKUM				
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Yang Bermitra	%	1,00	530.000.000	28,00	160.648.395	28,000	220.070.298	-	-	0	74.864.000	0,00	-	20	74.864.000	»DIV/0!	»DIV/0!	48,00	235.512.395	4.800	44,44	DISNAKERUKUM		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemudahan Kemitraan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemudahan Kemitraan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	%	100	530.000.000	100	160.648.395	100	220.070.298	-	-	0	74.864.000	0,00	-	20	74.864.000	»DIV/0!	»DIV/0!	120,00	235.512.395	120	44,44	DISNAKERUKUM		
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	230	530.000.000	125	160.648.395	20	74.864.000	0	-	-	74.864.000		-	20,00	74.864.000	100,00	100,00	145	235.512.395	63	44	DISNAKERUKUM		
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	180	300.000.000	35	41.141.235		0	-	-	-	-	»DIV/0!	»DIV/0!		35	41.141.235	19	14			DISNAKERUKUM			
2	17	07	2.01	15	Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan								145.206.298																	
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas	%	36	2.004.563.342	31,00	681.309.100	31	-	-	-	0	-	0,00	-	-	-	0,00	»DIV/0!	31,00	681.309.100	77,36	33,99	DISNAKERUKUM		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	%	100	2.004.563.342	100	681.309.100	100	-	-	-	0	-	0,00	-	-	-	0,00	»DIV/0!	100,00	681.309.100	77,36	33,99	DISNAKERUKUM		
																2.867.327.769														
2	08				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		100	15.900.595.241	100	9.519.289.737	0	10.726.272.420	100	541.001.156	86	1.445.316.811		2.828.145.069	0	3.356.488.788	76	8.170.951.824	100,00	76,18	176	17.690.241.647	176,00	111,26	DP3AP2KB	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	89	5.188.817.757	86	4.970.630.917	89	5.188.817.757	86	541.001.156	86	1.445.316.811	86	1.677.605.555	86	1.226.550.914	86	4.890.474.436	96,09	94,25	172	9.861.105.353	192,72	190,05	DP3AP2KB
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4.447.028.342	100	4.170.932.552	100	4.447.028.342	100	489.186.046	100	1.412.778.358		1.311.399.372	100	1.021.879.251	100	4.235.243.027	100,00	95,24	200	8.406.175.579	200,00	189,03	DP3AP2KB
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	39	4.235.588.342	37	3.962.712.552	37	4.235.588.342	37	489.186.046	37	1.403.718.358	39	1.232.689.372	39	972.759.251	37	4.098.353.027	100,00	96,76	74	8.061.065.579	189,74	190,32	DP3AP2KB
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Pemata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	100	211.440.000	12	208.220.000	12	211.440.000		12	9.060.000	12	78.710.000	12	49.120.000	12	136.890.000	100,00	64,74	24	345.110.000	24,00	163,22	DP3AP2KB	
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	356.673.095	100	426.407.858	100	356.673.095	100	19.690.110		10.025.098		215.448.286	100	85.936.843	200	331.100.337	200,00	92,83	300	757.508.195	300,00	212,38	DP3AP2KB
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	Paket	4	2.747.920	4	2.706.000	4	2.747.920		-	-	4	2.720.000	0	-	4	2.720.000	100,00	98,98	8	5.426.000	200,00	197,46	DP3AP2KB	
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	110.230.135	1	173.793.000	1	110.230.135		1	58.297.000	1	44.419.000	1	102.716.000	100,00	93,18	2	276.509.000	200,00	250,85	DP3AP2KB			
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	dokumen	1	11.149.460	1	16.567.350	1	11.149.460		1	5.517.400	1	4.929.300	1	10.446.700	100,00	93,70	2	27.014.050	200,00	242,29	DP3AP2KB			
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan yang di sediakan	Laporan	12	1.560.000	12	1.458.000	12	1.560.000		12	777.000	12	777.000	12	1.554.000	100,00	99,62	24	3.012.000	200,00	193,08	DP3AP2KB			
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	230.985.580	120	231.883.508	120	230.985.580	120	19.690.110	20	10.025.098	12	148.136.886	12	35.811.543	12	213.663.637	10,00	92,50	132	445.547.145	110,00	192,89	DP3AP2KB
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	236.400.000	100	245.737.810	100	236.400.000	100	32.125.000		21.665.445		94.190.445	100	67.885.618	100	215.866.508	100,00	91,31	200	461.604.318	200,00	195,26	DP3AP2KB
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	25.800.000	12	16.694.810	12	25.800.000		10	3.755.445	12	3.755.445	12	12.350.618	12	19.861.508	100,00	76,98	24	36.556.318	200,00	141,69	DP3AP2KB	
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1	210.600.000	1	229.043.000	1	210.600.000	1	32.125.000		17.910.000	12	90.435.000	12	55.535.000	1	196.005.000	100,00	93,07	2	425.048.000	200,00	201,83	DP3AP2KB
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	148.716.320	100	127.552.697	100	148.716.320		-	847.910		56.567.452	100	50.849.202	100	108.264.564	100,00	72,80	200	235.817.261	200,00	158,57	DP3AP2KB	
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya	unit	6	140.196.320	6	127.552.697	6	140.196.320		2	847.910	6	55.197.452	6	47.639.202	6	103.684.564	100,00	73,96	12	231.237.261	200,00	164,94	DP3AP2KB	
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1	8.520.000	1	8.520.000	1	8.520.000		-	-	6	1.370.000	6	3.210.000	1	4.580.000	100,00	53,76	2	13.100.000	200,00	153,76	DP3AP2KB	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	%	9635	101.463.885	9635																				

				4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17					
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perangkat Daerah	7	31.186.355	7	56.484.000	7	31.186.355		42	28.757.500	42	-	42	28.757.500	600,00	92,21	49	85.241.500	700,00	273,33	DP3AP2KB	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	42.243.845	100	36.197.500	100	42.243.845	0	0	39.182.700	100	0	100	39.182.700	100,00	92,75	200	75.380.200	200,00	178,44	DP3AP2KB	
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	dokumen	1	42.243.845	1	36.197.500	1	42.243.845,00		1	39.182.700	1	-	1	39.182.700	100,00	92,75	2	75.380.200	200,00	178,44	DP3AP2KB	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	%	100	93.490.000	100	120.810.000	100	93.490.000	-	-	43.341.500		32.900.000	100	76.241.500	100,00	81,55	200	197.051.500	200,00	210,77	DP3AP2KB	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	100	33.490.000	100	75.429.000	100	33.490.000	-	-	29.891.500	100	-	100	29.891.500	100,00	89,26	200	105.320.500	200,00	314,48	DP3AP2KB	
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	33.490.000	1	75.429.000	1	33.490.000		1	29.891.500	1	-	1	29.891.500	100,00	89,26	2	105.320.500	200,00	314,48	DP3AP2KB	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	60.000.000		45.381.000	100	60.000.000	-	-	13.450.000	100	32.900.000	150	46.350.000	150,00	77,25	150	91.731.000	150,00	152,89	DP3AP2KB	
2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	60.000.000	100	45.381.000	100	60.000.000		50	13.450.000	50	32.900.000	100	46.350.000	100,00	77,25	200	91.731.000	200,00	152,89	DP3AP2KB	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	%	1	94.934.440	1	122.621.650	0,01	94.934.440	-	-	31.611.500	0,01	51.450.300	0,01	83.061.800	0,01	87,49	1	205.683.450	101,00	216,66	DP3AP2KB	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kestaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/Kota	%	100	39.073.645	100	37.305.000	100	39.073.645	-	-	31.611.500	100	-	100	31.611.500	100,00	80,90	200	68.916.500	200,00	176,38	DP3AP2KB	
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	2	39.073.645	2	37.305.000	2	39.073.645		1	31.611.500	1	-	2	31.611.500	100,00	80,90	4	68.916.500	200,00	176,38	DP3AP2KB	
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	55.860.795	100	85.316.650	100	55.860.795	-	-	47	-	100	51.450.300	147	51.450.300	147,00	92,10	247	136.766.950	247,00	244,84	DP3AP2KB
-	-	-	-	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1	34.510.795	1	34.000.000	1	34.510.795		46	-	30.526.000	1	30.526.000	100,00	88,45	2	64.526.000	200,00	186,97	DP3AP2KB		
2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	21.350.000	1	85.316.650	1	21.350.000		1	-	20.924.300	1	20.924.300	100,00	98,01	2	106.240.950	200,00	497,62	DP3AP2KB		
2	08	07			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	PATBM/ desa	36	58.950.000	36	188.380.800	36	58.950.000	-	-	150	37.571.400	36	53.221.000	186	90.792.400	516,67	154,02	222	279.173.200	616,67	473,58	DP3AP2KB
2	08	07	2.01		Pelembahgan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	58.950.000	100	188.380.800	100	58.950.000	-	-	150	37.571.400	100	-	250	37.571.400	250,00	63,73	350	225.952.200	350,00	383,29	DP3AP2KB
2	08	07	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembahgan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	58.950.000	1	50.000.000	150	58.950.000		150	37.571.400	150	-	150	37.571.400	100,00	63,73	151	87.571.400	151.000,00	148,55	DP3AP2KB	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	anak	10	62.167.200	10	37.717.500	10	62.167.200	-		10	53.221.000	100	53.221.000	1.000,00	85,61	110	90.938.500	1.100,00	146,28	DP3AP2KB		
2	08	06	2.02	0002	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	anak	10	62.167.200	10	37.717.500	10	62.167.200		10	53.221.000	10	53.221.000	100,00	85,61	20	90.938.500	200,00	146,28	DP3AP2KB			
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	%	80	62.167.200	80	37.717.500	80	62.167.200	-	-	-	80	45.888.000	80	45.888.000	100,00	73,81	110	83.605.500	137,50	134,48	DP3AP2KB	
2	08	06	2.02		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	anak	10	62.167.200	10	37.717.500	10	62.167.200	-		10	45.888.000	100	45.888.000	1.000,00	73,81	110	83.605.500	1.100,00	134,48	DP3AP2KB		
2	08	06	2.02	02	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	anak	10	62.167.200	10	37.717.500	10	62.167.200		10	45.888.000	10	45.888.000	100,00	73,81	20	83.605.500	200,00	134,48	DP3AP2KB			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	%	100	245.462.799	100	248.288.020	100	245.462.799	-	-	12	2.790.000	100	140.042.334	112	142.832.334	112,00	58,19	212	391.120.354	212,00	159,34	DP3AP2KB
2	14	02	-		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	%	100	71.462.799	100	55.111.000	100	71.462.799	-	-	-	100	59.619.200	100	59.619.200	100,00	83,43	200	114.730.200	200,00	160,55	DP3AP2KB	
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen		1	-	1								0,00	#DIV/0!	1	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	DP3AP2KB	
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Laporan	2	30.000.000	2	17.000.000	2	30.000.000			2	24.951.000	2	24.951.000	100,00	83,17	4	41.951.000	200,00	139,84	DP3AP2KB		

				4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17							
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	174.000.000	100	193.177.020	100	174.000.000	-	-	12	2.790.000	100	80.423.134	100	83.213.134	100,00	47,82	200	276.390.154	200,00	158,84	DP3AP2KB	
2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan	dokumen	1	51.600.000	1	161.400.000	1	51.600.000			-	1		1	0	100,00	0,00		2	161.400.000	200,00	312,79	DP3AP2KB	
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Laporan	12	122.400.000	12	31.777.020	12	122.400.000			12	2.790.000	12	80.423.134	0	83.213.134	0,00	67,98	12	114.990.154	100,00	93,95	DP3AP2KB
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKB) setiap Desa/Kelurahan	%	14	2.122.550.000	14	3.113.407.250	14	3.002.192.000	-	-	-	1.821	980.555.614	14	1.149.970.240	1.835	2.091.343.240	13.107,14	69,66	1.849	5.204.750.490	13.207,14	245,21	DP3AP2KB
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Loka	%	100	1.279.800.000	58	1.221.687.000	64	1.279.800.000	-	-	-	66	646.957.614	100	814.518.240	166	1.282.893.240	259,38	100,24	224	2.504.580.240	224,00	195,70	DP3AP2KB
																				#DIV/0!	#DIV/0!	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBHPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBHPK	Laporan	2	80.000.000	2	80.000.000	4	80.000.000			2	7.720.000	2	55.340.000	4	63.060.000	100,00	78,83	6	143.060.000	300,00	178,83	DP3AP2KB	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBHPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangsa kencana (pmbangunan keluarga kpendudukan dan keluarga kpend																							

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17			
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	14	04	2.01	0020	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (ader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PKKS, PTK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	1053		500.000.000	1053	100.000.000	1053	500.000.000	-			1053		227.900.000	1.053	227.900.000	100,00	45,58	2.106	327.900.000	200,00	65,58		DP3AP2KB		
					PANGAN																									DKPP	
2	9				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				43.189.099.240		16.607.678.783		7.374.879.093	0,00	672.423.486		2.207.152.867		2.028.085.387		2.078.407.595		6.986.069.305		94,73		23.593.748.088		54,63	DKPP	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	37.162.550.990	88	6.489.799.329	89	6.090.966.260		648.282.486		1.835.764.401		1.697.458.665	83	1.714.160.299	83	5.895.665.821	93,26	39,963	171,00	12.385.465.150	180,00	33,33	DKPP	
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	60	32.147.407.074	100	5.668.882.143	100	5.895.702.407	3	615.519.356	3	1.707.841.304	3	1.561.397.646	3	1.533.158.869	12	5.417.917.175	42,00	40,578	112,00	11.086.799.318	186,67	34,49	DKPP	
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12	5.455.098.168	3	615.519.356	3	1.674.292.304	3	1.527.997.646	3	1.466.873.519	12	5.284.682.825	50,00	40,999					DKPP	
2	9	1	2.02	3	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	bulan					12	140.604.239	0	-	3	33.549.000	3	33.400.000	6	66.285.350	12	133.234.350							DKPP	
2	9	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Unit	2	35.000.000	100	35.000.000	-	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-		100,00	35.000.000	5.000,00	100,00			DKPP	
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	60	386.706.280	100	71.670.000	-	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-		100,00	71.670.000	166,67	18,53			DKPP	
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	2.423.433.061	100	315.107.186	100	189.915.871	0	-	5	79.408.078	4	48.827.868	3	56.203.260	12	184.439.206	5,00		112,00	499.546.392	186,67	20,61	DKPP	
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jenis					1	2.000.000	0	-	1	1.981.700	0	-	0	-	1	1.981.700	100,00	0,00					DKPP	
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis					45	24.422.025	0	-	12	6.806.100	14	16.067.800	19	882.000	45	23.755.900	26,67	0,00					DKPP	
2	9	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Jenis					6	9.635.709	0	-	6	9.614.250	0	-	6	9.614.250	100,00	0,00							DKPP	
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	jenis					1	28.194.196	0	-	1	7.047.790	1	7.047.790	1	13.917.460	3	28.013.040	100,00	0,00					DKPP	
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas	bulan					12	125.663.941	0	-	5	53.958.238	3	25.712.278	4	41.403.800	12	121.074.316	41,67	0,00					DKPP	
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	50	208.376.905	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-		0,00	-	0,00	0,00			DKPP	
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	1.250.627.700	100	279.140.000	12	225.350.112	3	32.763.100	3	48.515.019	3	87.233.151	3	47.158.994	12	215.670.264	350,00	36,067	112,00	494.810.264	186,67	39,56	DKPP	
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa TeleponInternetair dan Listrik/Tagihan Listrik	bulan					12	41.210.112	3	4.693.100	3	6.410.019	3	10.798.151	3	9.698.994	12	31.600.264	50,00	26,943	3,00				DKPP	
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	unit					12	15.660.000	-	-		4	6.260.000	8	9.390.000	12	15.650.000	0,00	0,000	0,00					DKPP	
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Honorarium Tidak Tetap	bulan					12	168.480.000	3	28.070.000	2	42.105.000	4	70.175.000	3	28.070.000	12	168.420.000	41,67	41,652	3,00					DKPP
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	60	711.000.000	3	120.000.000	12	79.997.870	-	-	0	-	-	12	77.639.176	12	77.639.176	0,00	0,000	15,00	197.639.176	25,00	27,80			DKPP
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Eksekutif	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Unit					1	38.420.000	-	-		1	38.400.453	1	38.400.453										DKPP	
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jajangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas/operasional atau jajangan	unit					11	41.577.870	-	-		11	39.238.723	11	39.238.723										DKPP	
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kemandirian pangan	%	100	7.166.921.825	20	4.293.190.750	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-		20,00	4.293.190.750	20,00	59,90				DKPP	
2	9	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	%	100	5.103.023.850	20	4.293.190.750	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-		20,00	4.293.190.750	20,00	84,13				DKPP	
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan	%	100	5.355.153.520	20	1.071.030.704	20	349.541.383	-	10	178.380.656		10	123.937.430	20	302.318.086	5,00	1,260	40,00	1.373.348.790	40,00	25,65				DKPP
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah ketersediaan pangan	%	100	1.010.000.000	20	107.361.648	20	36.831.542	-	10	4.524.270		20	34.752.270	0	39.276.540	0,00	12,284	20,00	146.638.188	20,00	14,52				DKPP
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	dokumen					1	36.831.542	-	1	4.524.270		0	30.228.000	1	34.752.270	0,00	12,284							DKPP	
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan masyarakat	Dokumen	15	250.000.000	0	0	1	214.000.000	-	1	167.376.386		0	-	1	167.376.386	100,00	78,213	1,00	167.376.386	6,67	66,95				DKPP
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan	ton	100		58,5	0	14,15	214.000.000	-	14,15	167.376.386		0	-	14	167.376.386	100,00	78,213							DKPP	
2	9	3	2.03	1	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Persen	100	1.090.250.000	1	140.000.000	20	98.709.841	-	5	6.480.000		15	89.185.160	20	95.665.160	5,00	5,991	21,00	235.665.160	21,00	21,62				DKPP
2	9	3	2.04	-	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah survey data	dokumen			1	70.000.000	1	45.157.841	-	1	6.480.000		1	36.466.110	1	42.946.110	100,00	14,350								DKPP
2	9	3	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pameran B2SA kecamatan	kali			17	70.000.000	17	53.552.000	-	-			17	52.719.050	17	52.719.050										DKPP
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan daerah rentan Pangan	%	100	3.937.998.760	20		-	-	-	-	0	-	0	-	0	-		20,00	-	20,00	0,00					DKPP
2	9	4	2.01</																												

				4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15G*100%		17				
3	25	2				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
3	25	2	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bibit Ikan dan alat tangkap		Ekor dan Unit		125.000	387.916.000	50.000	38432305			50.000	35.488.310	0	-		50000	35.488.310	0,00							DKPP			
3	25	2	2.02		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap			195	100.000.000	7	75.000.000			-		35.901.500	0	-	2	8.654.500	5	44.556.000	0,00	0,000								
3	25	2	2.02	1	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	195		100.000.000	7	75.000.000			-						0		0,00	0,000	7,00	75.000.000	3,59	75,00		DKPP			
3	25	2	2.02	2	Pengembangan kapasitas Nelayan kecil	Jumlah Sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	Unit		4	25.000.000	5	44.822.830			-	3	35.901.500	0	-	2	8.654.500	5	44.556.000	0,00	80,10						DKPP		
3	25	4	-	-	Penelitian ilmiah untuk pendanaan pembiayaan dan kemitraan	Jumlah Sosialisasi Kemitraan Usaha	Kali		269	3.372.492.000					-				0		-										DKPP		
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%	448.18		3.372.492.000	-	26.047.500	100	700.175.925	-	25	85.503.100	40	291.713.522	173,74	221.885.366	173,74	599.101.988	0,00	0,00	#VALUE!	625.149.488	#VALUE!	18,54		DKPP		
3	25	4	2.01		Penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah Surat Rekomendasi	Rekomendasi	12		26.047.500	48	26.047.500			-		0	-	0		-				48,00	26.047.500	400,00	100,00			DKPP		
3	25	4	2.02	-	Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lokasi dan /atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana Semi Intensif dan Intensif serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Surat Rekomendasi	Rekomendasi				1089	1.686.444.500			-			0		-											DKPP		
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	Ton	2004.21		1.686.444.500	49	1.470.389.500	677	479.894.055		-	2.400.000	16	218.588.922	63	176.135.266	79	397.124.188	0,00	0,00	128,00	1.867.513.688	#VALUE!	110,74		DKPP		
3	25	4	2.02	2	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana usaha perikanan budidaya	Unit				20	53.139.000	15	256.261.455		-		13	201.489.822	1	22.852.750	1	224.342.572	0,00	0,00						DKPP		
3	25	4	2.02	3	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil.	Jumlah sosialisasi Kelembagaan pembudidayaan Ikan Kecil	Kali				160	162.916.000			-			0	-												DKPP		
3	25	4	2.04	-	Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.	Jumlah pembudidayaan ikan yang dilatih	Orang		4212500	1.660.000.000	20	223.632.600			-	2	2.400.000	3	17.099.100	62	153.282.516	62	172.781.616	0,00	10,16							DKPP	
3	25	3	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi bibit ikan	ekor	4.212.500		1.660.000.000	48	27.500.000	747.452	220.281.870		-	120.000	83.103.100	160800	73.124.600	124.126	45.750.100	404.926	201.977.800	0,00	0,00	404.974,00	229.477.800	9,61	13,82		DKPP	
3	25	3	2.04	2	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi perikanan budidaya	Laporan				1	27.500.000			-			0	-												DKPP		
3	25	3	2.04	3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	unit		4212500	1.350.000.000					-			0		-											DKPP		
3	25	3	2.04	4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Sarana Pembudidayaan Ikan	Ekor				747.452	180.000.000	747.452	189.812.230		-	120.000	63.457.500	114.000	63.457.600	124.126	45.750.100	358.126	172.665.200	0,00	38,50					DKPP		
3	25	3	2.04	5	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Alat Pemeliharaan Kesehatan Ikan	Unit		20	75.000.000	2	30.469.640			-	1	19.645.600	2	9.667.000	2	-	2	29.312.600	0,00	64,48							DKPP	
3	25	5	-	-	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Pembudidayaan Ikan	Kali				82.500.000			-																	DKPP		
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Perikanan	Dokumen	100		82.500.000	48	82.500.000			-			0	-							48,00	82.500.000	48,00	100,00			DKPP	
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Laporan Pengawasan	Laporan	48		82.500.000	60	41.250.000		0			0	-							60,00	41.250.000	125,00	50,00			DKPP		
3	25	5	2.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Data dan Informasi Pengawasan Perikanan Budidaya	data		100	658.250.000		0																			DKPP		
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	100		658.250.000	48	35.000.000	20	39.892.390		-	0	-	2	38.913.200		2	38.913.200	0,00	0,00	50,00	73.913.200	50,00	11,23			DKPP	
3	25	6	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Surat Rekomendasi	Rekomendasi	48		35.000.000	60	35.000.000			-			0	-						60,00	35.000.000	125,00	100,00			DKPP		
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Data ikan konsumsi yang masuk dan keluar dari Kab. Karo	Laporan		48	45.000.000					-																	DKPP	
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Sosialisasi dan Pertemuan	Kali	48		45.000.000	48	45.000.000			-			0	-						48,00	45.000.000	100,00	100,00			DKPP		
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Prasyarat atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha yang menerima bimbingan	Orang		18	578.250.000					-																	DKPP	
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyaluran Bahan Baku dan Sosialisasi	Unit	18		578.250.000	9	224.708.000	2	39.892.390		-	0	-	2	38.913.200	0	-	2	38.913.200	0,00	0,00	11,00	263.621.200	61,11	45,59		DKPP	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Alat pengolahan ikan	Unit		9	224.708.000	2		39.892.390		-	0	-	2	38.913.200	0	-	2	38.913.200	0,00	0,00							DKPP	
2	11				DINAS LINGKUNGAN HIDUP					147.813.509.970		48.199.440.453		25.832.838.738		2.896.566.655		4.144.209.911		7.829.152.092		10.093.433.145		24.963.361.803		96,63		73.162.802.286		49,50	DLH		
2	11	01			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95		65.137.424.342	80	22.436.747.705	86	10.706.339.573		953.950.433	82	2.272.668.655	84	3.271.745.331	86	3.499.801.285	86	9.998.165.704	100	93,385	166,00	32.434.913.409	174,74	49,79		DLH	
2	11	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Persen	100		23.325.978.987	25	7.543.539.231	100	3.737.311.959		391.878.810	25	1.156.568.400	25	971.784.522	25	975.738.591	100	3.495.970.323	100	93,542	125,00	11.039.509.554	125,00	47,33		DLH	
2	11	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	160			32	3.588.451.959	24	391.878.810		24	1.102.868.400	24	928.824.522	24	943.518.591	24	3.367.090.323	112,50								DLH	
2	11	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		148.860.000			12		-	2	53.700.000	5	42.960.000	5		12	128.880.000	16,67								DLH	
2	11	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100		150.750.000	100	70.030.000	0	0		-			0			0	0	0,00	0,000	100,00		70.030.000	100,00	46,45		DLH	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100		1.523.307.743	100	664.532.385	100	322.659.800		0	20	45.705.336		52.164.877		218.400.624	20	316.270.837	23,00	22,763	120,00		980.803.222	120,00	64,39		DLH
2	11	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Paket	225			43	50.673.684	0		-	19	18.382.500		0	24	32.033.600	43	50.416.100	44,19	45,486							DLH	
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	Paket	100			20	4.386.000	0		-			20	4.379.500		20	4.379.500	0,00	0,000								DLH	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	Paket	115			6	65.596.500	0		-			1	5.917.500	5	56.360.600	6	62.278.100	0,00	0,000							DLH	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60			12	202.003.616	0		-	1	27.322.836	2	41.867.877	9	130.006.424	12	199.197.137	33,33									

				4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17									
2	11	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2	11	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor					2000000																					
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	100	2.042.323.927	25	817.876.428	25	409.960.000	4	67.671.423	8	59.241.702		123.367.521		132.765.369	12	383.046.015	36,00	31,740	37,00	1.200.922.443	37,00	58,80	DLH	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Air	Rekening	60				24	62.200.000	6	12.211.423	6	6.311.702	6	17.507.521	6	12.105.369	24	48.136.015	41,67	41,245				DLH		
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	60			2	15.000.000	0	-		0	2	14.800.000	2	14.800.000	0,00	0,000							DLH		
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan/penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	60			12	332.760.000	2	55.460.000	2,00	52.930.000		105.860.000		105.860.000	4	320.110.000	33,33	31,152					DLH		
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	100	37.945.563.715	100	13.340.769.661	100	6.234.407.814	10	494.400.200	15	1.011.153.217	35	2.124.428.411	40	2.172.896.701	100	5.802.878.529	198,00	23,508	200,00	19.143.648.190	200,00	50,45	DLH	
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana	unit	2		-	0			-		0		0	0	0,00	0,000								DLH		
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen RPPLH dan KLHS	Dokumen	4	690.000.000	1	90.159.750	1	237.630.060		0		0	1	229.830.373	1	229.830.373	0,00	0,000	2,00	319.990.123	50,00	46,38			DLH	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLIHS RPJPD/RPJM	Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLIHS RPJPD/RPJM	Dokumen						237630060				1	229.830.373		229.830.373											
2	11	03	201	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen Laporan	1			1	1.500.000					1	1.500.000	1	1.500.000										DLH	
2	11	03	201	0004	Koordinasi, Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan	1			1	120.000.000					1	119.130.400	1	119.130.400										DLH	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan kualitas lingkungan dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (KPLHD)	dokumen	10			0	0	0	0	-		0		0	0	0,00	0,000								DLH	
2	11	03	202	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup	Jumlah Titik Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Titik	200			76	1.889.787																		DLH	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Jenis Keaneekaragaman Hayati di RTH	Luas/Ha	1	196.753.570	135	43.000.540	1	18.700.000		0		4.107.600	1,3	14.320.200	1,3	18.427.800	0,00	0,000	#VALUE!	61.428.340	#VALUE!	31,22			DLH	
2	11	05	201		Penyimpanan Sementara Limbah B3	tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rekomendasi	100	275.000.000	0	0	0	0	0	-		0					0,00	0,00		0	0,00	0,00			DLH	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Iain Lingkungan dan/atau Iain PPLH	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Iain Lingkungan dan/atau Iain PPLH	Dokumen	40		0	0	1	35.000.000	0	-		0	1	23.850.000	1	23.850.000	0,00	0,000							DLH	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Peningkatan PendidikanPelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Orang	40	40.000.000	100	290.000.874	0	0	0	-		0					100,00	290.000.874	250,00	725,00					DLH	
2	11	08	201		Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan PendidikanPelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Orang	100	40.000.000	100	290.000.874	0	0	0	-		0					100,00	290.000.874	100,00	725,00					DLH	
2	11	08	201	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dokumen	8		0	0	0	0	0	0	-		0												DLH	
2	11	09	201	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembahe Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	jumlah sekolah yang dibina	Entitas	250			50	81.328.700	0	-		0	50	75.533.622	50	75.533.622	0,00	0,000								DLH	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase kasus pengaduan lingkungan hidup	Dokumen	100	122.000.000		0	0	0	0	0		0					0,00	0	0,00	0,00					DLH	
2	11	10	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sankei Administrasi Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Monitoring dan evaluasi	Perkara	12		0	0	0	0	0	-		0													DLH	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Persen	79	78.601.271.058	79	24.731.031.836	84	14.630.450.618	22	1.942.616.222	12	1.871.541.256	20	4.553.299.161	30	6.129.467.265	84	14.496.923.904	40,48	25,962	163,00	39.227.955.740	206,33	49,91		DLH
2	11	11	201	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan Pendauran Uang dan Pemanfaatan Kembali	jumlah bank sampah dan Pusat Daur Ulang	Laporan	4		0	0	1	0	0	-		0														DLH
2	11	11	201	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Sarana dan Prasarana	Dokumen	20		0	0	0	0	0	-		0														DLH
2	11	11	201	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	dokumen	dokumen	4		0	0	0	0	0	-		0														DLH
2	11	11	201	5	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi aerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota								1.500.000																	DLH	
2	11	11	201	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	unit	124		100	0	16	3.024.944.000	2	120.000.000		3	754.500.000	11	2.048.691.000	16	2.923.191.000	1,67	3,990						DLH	
2	12				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				32.781.205.637		9.690.416.094		4.806.082.490	79	379.650.365	181	1.215.148.048	158	1.455.254.941		1.304.612.345		4.354.665.699	90,61		14.045.081.793	42,84			Disdukcapti	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	29.754.517.583		8.163.360.614	85	3.822.128.686	73	358.487.165	181	1.204.948.048	145	807.140.891		1.120.618.845	399	3.491.194.949	0,00	10,01	399,00	11.654.555.563	420,00	39,17		Disdukcapti
2	12	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	60	239.122.970	14	15.351.200	0	-		-		-		-		-		14,00	15.351.200	23,33	6,42				Disdukcapti	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	60	17.747.619.004		5.242.127.138	12	3.002.254.651	6	251.307.804	6	1.015.758.708	10	610.167.860		823.340.860	22	2.700.575.232	50,00	44,39	22,00	7.942.702.370	36,67	44,75		Disdukcapti
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60			12	2.910.609.940	3	245.127.804	3	1.011.988.708	3	571.547.860	3	782.490.860	12	2.611.155.232	50,00	45,50						Disdukcapti	
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Penaguan/Verifikasi Keuangan	Honorarium Pengelola Keuangan	Orang/Bulan	21	91.644.711		6.180.000	3	3.770.000	3	3.770.000	7	38.620.000	4	40.850.000	17	89.420.000	35,29	10,86							Disdukcapti	
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	60	1.170.410.096	24	67.991.600	0	-		-		-		-		-		24,00	67.991.600	40,00	5,81				Disdukcapti	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	5.553.782.657	24	1.456.373.808	12	234.724.405	8	12.516.300	86	53.700.029	49	53.059.970		93.151.254	143	212.427.553	50,00	48,25	167,00	1.668.801.361	278,33	30,05		Disdukcapti
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Buah	500			100	24.301.310		-	41	4.284.500		-		13.318.000	41	17.602.500	41,00	99,61						Disdu	

3					4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13*100%	15=7+13	16=15*100%	17												
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon Air dan Listrik	Bulan	60		12	17.180.000	3	3.334.011	3	3.334.011	3	3.334.011	12	13.336.044	50,00	38,81			Disdukcapil							
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	40		8	21.600.000			3	2.800.000		-	5	16.940.000	8	19.740.000	37,50	32,56		Disdukcapil						
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Instrumen Pegawai Tidak Tetap/Pelayanan Administrasi Kependudukan	Orang/ Bulan/Kegiatan	1510		324	463.379.630	54	77.210.000	81	115.815.000	81	115.815.000	81	154.420.000	297	463.260.000	41,67	40,13		Disdukcapil						
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	37	435.630.000	10	159.247.492	5	82.990.000	2	14.119.050	2	13.540.300	2	24.764.050		29.432.720	6	81.856.120	40,00	33,33	16,00	241.103.612	43,24	55,35		Disdukcapil
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	25		5	82.990.000	2	14.119.050	2	13.540.300	2	24.764.050	2	29.432.720	8	81.856.120	80,00	33,33							Disdukcapil	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%/Pelayanan Kartu Identitas Anak	%	100/80	1.369.105.960		954.305.900	98/60	841.248.475	6	21.163.200	-	-	12	571.940.300		145.575.100	18	738.678.600	0,00	2,68	18,00	1.692.984.500	0,00	123,66		Disdukcapil
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bulan	60	1.369.105.960	12	954.305.900	12	841.248.475	6	21.163.200	-	-	12	571.940.300		145.575.100	18	738.678.600	25,00	2,68	30,00	1.692.984.500	50,00	123,66		Disdukcapil
2	12	02	2.01	02	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jenis	16		12	763.098.475	3	1.438.200			6	551.840.300	3	107.250.100	12	660.528.600	25,00	0,19								Disdukcapil
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan	8		12	78.150.000	3	19.725.000			6	20.100.000	3	38.325.000	12	78.150.000	25,00	49,25								Disdukcapil
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio bayi berakte kelahiran (%/Rasio pasangan berakte nikah (%)	%	100/100	210.000.000		277.588.480	98/65	70.632.654	-		10.200.000		50.213.000		7.800.000	0	68.213.000	0,00	16,19	0,00	345.801.480	0,00	164,67		Disdukcapil	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Bulan	8	210.000.000	8	54.002.000	4	70.632.654	-		13	10.200.000	9	50.213.000		7.800.000	22	68.213.000	0,00	0,00	30,00	122.215.000	375,00	58,20		Disdukcapil
2	12	03	2.01	02	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Berakta/Beasiswa	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Jenis	9		12	31.482.654			-		6	29.063.000	3	-	9	29.063.000	0,00	0,00							Disdukcapil	
2	12	03	2.01	04	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kegiatan	8		12	39.150.000			-	13	10.200.000	3	21.150.000	3	7.800.000	19	39.150.000	108,33	32,38							Disdukcapil
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Bulan			3	223.586.480	0	-	-	-	-	-	-	-					3,00	223.586.480	0,00	0,00		Disdukcapil		
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	1.130.000.000		228.465.500	Sudah	25.506.845	-	-	-	-	sudah	21.078.400	0	21.078.400	0,00	0,00	0,00	249.543.900	0,00	22,08		Disdukcapil		
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Bulan	48	90.000.000	8	228.465.500	12	25.506.845	-	-	-	-	-	21.078.400	0	21.078.400	0,00	0,00	8,00	249.543.900	16,67	277,27		Disdukcapil		
2	12	04	2.01	01	Pengolahan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	Laporan Data Kependudukan	Dokumen	48		12	25.506.845			-	-	-	3	21.078.400		21.078.400										Disdukcapil	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bulan	60	1.040.000.000	0	0			-	-	-	-	-						0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		Disdukcapil
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi	Ada	Ada	317.582.040		66.695.600	Ada	46.565.830	-	-	-	1	25.960.750	ada	9.540.000	0	35.500.750	0,00	0,00	0,00	102.196.350	0,00	32,18		Disdukcapil	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Profil Kependudukan	Bulan	60	317.582.040	2	66.695.600	1	46.565.830	-	-	-	1	25.960.750		9.540.000	1	35.500.750	0,00	0,00	3,00	102.196.350	5,00	32,18		Disdukcapil	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data perkembangan dan Proyek Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Profil Perkembangan Kependudukan	Dokumen	5			1	46.565.830			-	1	25.960.750		9.540.000	1	35.500.750	0,00	0,00							Disdukcapil	
2	13				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				52.991.859.877		8.466.119.957		8.625.590.311	14	1.068.000.048	23	1.975.362.057	16	2.220.005.890	38	2.919.952.092	92	8.183.320.087		94,87		16.649.440.044		31,42		DPMD
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	22.563.620.803		8.466.119.957		4.609.673.537	12	513.135.928	5	1.466.520.723	16	1.194.324.604	10	1.303.508.309	42	4.477.489.564	0,00	43,69	41,75	12.943.609.521	43,95	57,36		DPMD
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan	%	100	20.192.898.850	100,00	7.157.343.817	77	4.063.086.749	37	458.226.178	10	1.386.619.523	15	1.003.962.274	14	1.129.293.273	76	3.978.101.248	30,52	45,55	176,00	11.135.445.065	176,00	55,15		DPMD
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	27		27	3.921.126.749	27	425.286.178	0	1.364.659.523	0	960.042.274	0	1.096.353.273	27	3.846.341.248	100,00	45,80							DPMD	
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	50		10	141.960.000	10	32.940.000			10	21.960.000	15	43.920.000	14	32.940.000	49	131.760.000	40,00	38,67						DPMD
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	806.719.353	100	575.615.211	66	236.082.087	1	5.100.000	-	-	43	100.320.609	17	94.505.361	61	199.925.970	1,52	3,11	161,00	775.541.181	161,00	96,14		DPMD
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1	2.250.080			0	-	1	2.242.900		-	1	2.242.900									DPMD	
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			1	42.705.590			0	-	1	19.855.700		22.404.200	1	42.259.900									DPMD	
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	13.205.552					0	-	1	6.475.500		6.709.800	1	13.185.300									DPMD	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	29.690.865					0	-		-	1	25.059.620	1	25.059.620									DPMD	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12		12	5.352.000			0	-	-	-	12	2.450.000	12	2.450.000									DPMD	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50		6	142.878.000		5.100.000	0	-	40	71.746.509	4	37.881.741	50	114.728.250	12,00	5,67							DPMD	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.098.002.600	100	428.523.068	26	226.673.701	8	49.809.750	4	49.876.000	5	65.925.200	9	59.122.150	26	224.733.100	15,38	44,17	126,00	653.256.168	126,00	59,49		DPMD
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		4	19.200.000		4.419.750	2	4.486.000	2,00	4.419.750	4	4.419.750	12	17.745.250	50,00	46,38								
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2		0	13.000.000		-	0	-	1	5.680.000	1	7.000.000	2	12.680.000	0,00	0,00							DPMD	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		4	194.473.701		45.390.000	2	45.390.000	2	55.825.450	4	47.702.400	12	194.307.850	50,00	46,68							DPMD	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	466.000.000	100	304.637.861	4	83.831.000		4	30.025.200	0	24.116.521	0	20.587.525	4	74.729.246			104,00	379.367.107	104,00	81,41		DPMD	
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinan	unit		466.000.000			4	83.831.000		4	30.025.200	0	24.116.521		20.587.525	4	74.729.246								DPMD	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	PERSENTASE DESA YANG MENTAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU	%	100	27.830.639.074			100	2.859.400.137	1	523.600.920	60	437.891.480	31	809.907.203	59	861.955.303	150	2.633.354.906	25,00	25,48	149,67	2.633.354.906	149,67	9,46		DPMD
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100	27.226.639.074	100	10.719.034.693	100	2.859.400.137	1	523.600.920	60	437.891.480	31	809.907.203	59	861.955.303	150	2.633.354.906	60,17	25,48	249,67	13.352.389.599	249,67	49,04		
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	12		12	2.274.971.952	3	523.600.920	3	350.007.800	3	718.019.840	3	544.426.720	12	2.136.055.280	50,00	25,71								
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	490			62.902.225	0		-	150	27.645.750	109	16.687.500	259	47.783.250	30,61	43,95									
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	260			182.693.710	0		-	200	51.837.930	60	50.187.760		74.048.059	260	176.073.749	76,92	49,90							DPMD

4					5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Orang			231	168.800.000	0		0	-		-		-	231	131.562.780	231	131.562.780	0,00	0,00					DPMD	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Dokumen			20	112.412.450	0		5	8.400.000	11	25.012.103	4	58.361.280	20	91.773.383	25,00	9,70							DPMD	
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan kapasitas	Orang			115	57.619.800	0		0	-		-		-	116	46.656.460	116	46.656.460	0,00	0,00					DPMD	
2	13	05			POGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE TERBENTUKNYA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	%	100	1.525.000.000		1.156.516.637	2	31.263.200	6	70.949.854	2	215.774.083	45	754.488.480	55	1.072.475.617	0,00	11,58	55,25	1.072.475.617	55,25	70,33			DPMD	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	%	100	1.825.000.000	100	2.139.444.582	59	1.156.516.637	2	31.263.200	6	70.949.854	2	215.774.083	45	531.718.172	55	849.705.309	11,02	11,58	155,25	2.989.149.891	155,25	196,01		DPMD
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga			9	553.266.175	0		3.757.700	-	-	7	149.136.330	2	219.602.308	9	372.496.338	0,00	0,75							DPMD
2	13	05	2.01	05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen			9	49.999.930	0		13.611.900	7	31.280.000	2,00	4.200.000		9	49.091.900	77,78	89,78							DPMD	
-	-	-	-	06	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					10	2.608.000	0		-	-	-	-	-		0	-	0,00	0,00								
-	-	-	-	07	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					17	30.000.000	0			17	22.202.400	0,00	-			3.168.000	17	25.370.400	100,00	74,01						
2	13	05	2.01	09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen			14	520.642.532	2		13.893.600	6	17.467.454	2	62.437.753	4	308.947.864	14	402.746.671	57,14	11,64							DPMD
2	15				DINAS PERHUBUNGAN		0	43.676.656.177		39.226.389.405		22.790.982.587		3.572.035.805		5.345.028.733		5.442.559.466		7.286.704.209		21.646.328.213		94,98		60.872.717.618		139,37		DISHUB	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		0	43.676.656.177										0	-	0,00	0,00									DISHUB	
					DINAS PERHUBUNGAN			43.676.656.177		39.226.389.405		22.790.982.587		3.572.035.805	39	5.345.028.733		5.442.559.466		7.286.704.209	39	21.646.328.213	0,00	39,92	39,00	60.872.717.618	2,00	139,37		DISHUB	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	indeks	A	37.557.897.802	B	33.286.596.104	A	19.148.648.192	0	3.395.189.381	14	4.578.112.498		4.903.466.363		5.865.149.217	B	18.741.917.459	0,00	41,04	B	52.028.513.563	3,00	138,53		DISHUB
2	15	1	2.01		Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	30	73.174.470	2	13.995.000	3	7.500.000				7.479.971	0	7.479.971	0,00	0,00	2,00	21.474.971	4,00	29,35					DISHUB	
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen			2	13.995.000	3	7.500.000			3,00		7.479.971	3	7.479.971	0,00	0,00								DISHUB	
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	60	32.276.622.444	24	10.363.323.396	12	5.359.377.385	4	623.751.022	4	1.637.013.265	4,00	1.480.230.117	4	1.513.997.661	16	5.254.992.065	66,67	39,82	40,00	15.618.315.461	8,00	48,39		DISHUB
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB		1107	9.999.363.396	612	5.200.065.415	129	597.831.022	258,00	1.598.133.265	129,00	1.441.350.117		1.458.881.616	516	5.096.196.020	63,24	39,80						DISHUB	
2	15	1	2.02	3	Pelaksanaan Penastutasahan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penastutasahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen		331	363.960.000	12	159.311.970	3	25.920.000	2,00	38.880.000	3,00	38.880.000		55.116.045	8	158.796.045	41,67	40,67						DISHUB	
2	15	1	2.04		Administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	dokumen	60	2.800.000														0,00	-	14,00	0,00				DISHUB	
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	282	160.500.000	92	153.377.500												92,00	153.377.500	16,00	95,56				DISHUB	
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		92	153.377.500																				DISHUB	
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	1.242.309.128	24	567.468.933	12	299.327.050	3	18.443.200	3	51.638.566	3,00	72.153.540	3	136.511.059	12	278.746.365	50,00	23,41	36,00	846.215.298	19,00	68,12		DISHUB
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		2	4.399.982	5	2.000.000			5,00	1.999.890		5	1.999.890	0,00	0,00									DISHUB	
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		23	93.482.820	45	32.000.000			21,00	15.501.750	24	16.496.310	45	31.998.060	0,00	0,00								DISHUB	
2	15	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		18	27.285.500	30	15.000.000			15,00	9.209.900	15	5.783.540	30	14.993.440	0,00	0,00								DISHUB	
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2	110.530.800	6	58.000.000			0,00	-	6	57.888.750	6	57.888.750	0,00	0,00								DISHUB	
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen		23	5.076.000	24	3.500.000		6,00	900.000	6,00	900.000	12	1.500.000	24	3.300.000	25,00	25,71							DISHUB	
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		257	326.693.831	230	188.827.050	57	18.443.200	75,00	50.738.566	40,00	44.542.000	58	54.842.459	230	168.566.225	57,39	36,64						DISHUB	
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit/Jenis	18	323.000.000	7	138.537.000	5	1.604.496.877	0	3.183.400	-	-		500.712.400		1.078.995.387	0	1.582.891.187	0,00	0,20	7,00	1.721.428.187	26,00	532,95		DISHUB
2	15	1	2.07	6	Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		7	138.537.000	3	46.060.200			3,00	45.530.000		3	45.530.000	0,00	0,00									DISHUB	
2	15	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		2	1.558.436.677				3.183.400		1,00	455.182.400	1	1.078.995.387	2	1.537.361.187	0,00	0,20								
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	2.852.491.760	24	21.631.802.670	12	11.481.164.800	3	2.749.811.759	3	2.812.323.667	3,00	2.821.618.354	3	2.915.272.920	12	11.299.026.700	133,33	48,38	36,00	32.930.829.370	31,00	1.154,46		DISHUB
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		24	20.277.648.478	36	10.715.000.000	9	2.628.971.759																	

				4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
					Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Indeks	77	-	77		77			1.394.773.239								DISHUB								
2	15	2	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen	2	115.000.000	0		30.000.000			5.029.719	0	5.029.719	0,00	0,00	0,00	5.029.719	42,00	4,37	DISHUB							
2	15	2	2.01	4	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	dokumen			1	30.000.000			5.029.719	0	5.029.719	0,00	0,00													
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jenis	14	234.954.889	8	2.040.364.467	3	1.567.495.007	0	45.992.984	1	193.400.019	295.707.395	468.639.795	1	1.003.740.193	33,33	26,67	9,00	3.044.104.660	46,00	1.295,61	DISHUB			
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit			20	125.285.652			750.000		20	123.437.652	20	124.187.652	0,00	0,60						DISHUB				
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit			51	1.472.832.235																DISHUB				
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	unit			20	40.000.000				20,00	39.999.900		20	39.999.900	0,00	0,00						DISHUB				
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	unit			133	567.532.232	150	1.402.209.355	37	45.992.984	45,00	192.650.019	20,00	255.707.495	345.202.143	102	839.552.641	54,67	32,59				DISHUB			
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Gedung Terminal C	unit	2	243.721.988	0		2	30.931.468	-	-	1,00	15.321.600	1	15.573.468	2	30.895.068	0,00	0,00	2,00	30.895.068	51,00	12,68	DISHUB		
2	15	2	2.03	7	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	unit			1	15.931.468				1,00	15.321.600		609.868	1	15.931.468	0,00	0,00									
2	15	2	2.03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang direhabilitasi dan terpelihara	unit			1	15.000.000						14.963.600	0	14.963.600	0,00	0,00										
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	dokumen	2	545.697.546	1	154.904.893	1	82.000.000	0	2.550.000	-	4.800.000		67.949.510	3.350.245	0	78.649.755	0,00	8,96	1,00	233.554.648	59,00	42,80	DISHUB		
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan/Kabupaten/Kota	Laporan			4	154.904.893	1	82.000.000	0	2.550.000		4.800.000	1,00	67.949.510	3.350.245	1	78.649.755	0,00	8,96				DISHUB			
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	50	1.103.162.000	100	1.172.260.559	50	94.457.920	0	-	15	33.410.000	10,00	14.530.000	25	43.347.126	50	91.287.126	2,00	27,61	150,00	1.263.547.685	62,00	114,54	DISHUB
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	unit			1	1.148.034.449																	DISHUB			
2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan			2	24.226.110	3	81.457.920		1,00	33.410.000	1,00	10.780.000	1	34.847.390	3	79.037.390	33,33	30,94				DISHUB			
2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan			2	13.000.000					3.750.000		8.499.736	0	12.249.736	0,00	0,00						DISHUB			
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan rambu-rambu	%	69	2.965.813.470	69	2.378.518.272	69	1.703.450.000	0	117.133.440	6	531.706.216		135.169.000	781.614.183	6	1.565.622.839	8,70	40,21	75,00	3.944.141.111	72,00	132,99	DISHUB	
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Laporan			2	264.976.860																	DISHUB			
2	15	2	2.06	2	Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	unit			6	527.551.286																	DISHUB			
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi/Kabupaten	laporan			12	1.574.695.971	6	1.401.850.000	1	117.133.440	2,00	512.326.216	1,00	121.666.000	2	629.568.094	6	1.380.693.750	50,00	44,58				DISHUB		
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	laporan			2	11.294.155																	DISHUB			
2	15	3	2.06	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan			4	53.400.000			1,00	3.480.000	1,00	12.303.000	2	22.398.628	4	38.181.628	25,00	6,52								
2	15	4	2.06	16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen			30	233.200.000			2,00	1.200.000	2,00	1.200.000	26	129.347.845	30	131.747.845	6,67	0,90								
2	15	5	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan			1	15.000.000			1,00	14.700.000		299.616	1	14.999.616	100,00	98,00										
2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	dokumen	4	15.000.000	1	7.533.555	0						0	-	0,00	0,00	1,00	7.533.555	80,00	50,22			DISHUB			
2	15	2	2.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	dokumen			1	7.533.555																	DISHUB			
2	15	3	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	kali	45	467.000.000	4	23.381.560	11	37.000.000		-	1	3.600.000		31.949.895	1	35.549.895	9,09	9,73	5,00	58.931.455	82,00	12,62		DISHUB		
2	15	2	2.08	3	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan			4	23.381.560	2	12.000.000				10.800.000	0	10.800.000	0,00	0,00							DISHUB			
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan			3	15.000.000			1,00	3.600.000		2	11.399.895	3	14.999.895	33,33	24,00						DISHUB			
2	15	2	2.08	7	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan			6	10.000.000					9.750.000	0	9.750.000	0,00	0,00											
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kali	3	118.000.000	1	118.857.420	1	42.000.000	1	4.500.000	-	-		5.215.840	32.243.000	1	41.958.840	100,00	10,71	2,00	160.816.260	88,00	136,28		DISHUB	
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan			2	118.857.420							0	-	0,00	0,00							DISHUB			
2	15	2	2.09	3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit			19	42.000.000	3	4.500.000		3,00	5.215.840	13	32.243.000	19	41.958.840	5,26	10,71									
2	15	2	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	70.000.000									-			0,00	-	92,00	0,00				DISHUB			
2	15	2	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	0	100.000.000	1	43.972.575							-	0	-	0,00	0,00	1,00	43.972.575	95,00	43,97		DISHUB			
2	15	2	2.12	1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	dokumen			1	43.972.575						0	-	0,00	0,00								DISHUB			
2	15	2	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	50.000.000	0	-										0,00			95,00				DISHUB			

				4	5					6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17					
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
2	15	2	2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1		16.000.000	0	-	1	16.000.000	1	6.670.000	-	-	8.225.808	1	14.895.808	100,00	41,69	1,00		95,00	DISHUB				
2	15	2	2.14	2	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan						1	8.000.000	1	5.320.000			1.775.808	1	7.095.808	100,00	66,50				DISHUB				
2	15	2	2.14	3	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	unit						1	8.000.000	0	1.350.000			1	6.450.000	1	7.800.000	0,00	16,88							
2	15	2	2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kali	1		6.000.000													0,00	-	105,00	0,00	DISHUB				
2	15	2	2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelubuhan Selama 24 Jam untuk Pelubuhan Pengumpan Lokal	dokumen	8		28.000.000			1	10.000.000		-	-	1,00	5.199.758	4.800.000	1	9.999.758	0,00	0,00	1,00	9.999.758	107,00	35,71	DISHUB		
2	15	2	2.16	3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan						1	10.000.000			1,00	5.199.758	4.800.000	1	9.999.758	0,00	0,00				DISHUB				
2	15	3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	97		40.408.482	0		97	29.000.000	0				26.781.753	0	26.781.753	0,00	0,00	0,00	26.781.753	0,00	66,28	DISHUB			
2	15	3	2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelubuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelubuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	dokumen	3		10.000.000													0,00	-	0,00	0,00	DISHUB				
2	15	3	2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	dokumen	3		13.408.482			1	14.000.000		-	-	-	1	13.587.000	1	13.587.000	0,00	0,00	1,00	13.587.000	33,33	101,33	DISHUB		
2	15	3	2.08	1	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen						1	14.000.000				1	13.587.000	1	13.587.000	0,00	0,00				DISHUB				
2	15	3	2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	3		17.000.000			1	15.000.000		-	-	1	13.194.753	1	13.194.753	0,00	0,00	1,00	13.194.753	33,33	77,62	DISHUB			
2	15	3	2.09	2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen						1	15.000.000				1	13.194.753	1	13.194.753	0,00	0,00				DISHUB				
2	16			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					41.259.575.570		15.606.876.143		7.479.292.902		606.717.478		1.422.439.988		1.979.594.280		3.191.959.329		7.200.711.075		96,28	22.807.587.218		55,28	Dinas Kominfo	
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40.763.025.570		15.309.095.566		7.292.882.627		595.878.278		1.413.135.588		1.943.126.230		3.066.360.329		7.018.500.425		96,24	0,00	22.327.595.991		54,77	Dinas Kominfo
2	16	01		PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95		26.617.735.000	85,00	10.065.643.589	89	5.259.365.697	85,00	411.846.778		1.269.732.788		1.596.446.630		1.710.251.153	85	4.988.277.349	95,51	94,85	170,00	15.053.920.938	178,95	56,56	Dinas Kominfo
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	60		15.931.546.860	24	5.535.501.742	12	2.907.653.457	3	318.476.263	3	889.017.735	3	618.377.369		1.011.275.430	9	2.837.146.797	75,00	97,58	33,00	8.372.648.539	55,00	52,55	Dinas Kominfo
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				504	5.213.940.642	280	2.792.574.197	70	289.527.063	70	869.877.735	70	599.237.369	70	963.425.370	280	2.722.067.537	100,00	97,48				Dinas Kominfo	
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyetoran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen			24	321.561.100	12	115.079.260	3	28.949.200	3	19.140.000	3	19.140.000	3	47.850.060	12	115.079.260	100,00	100,00				Dinas Kominfo	
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	60		102.000.000	44	33.000.000													44,00	33.000.000	73,33	32,35	Dinas Kominfo		
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket			44	33.000.000																Dinas Kominfo			
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60		828.257.805	24	757.968.122	12	400.554.965	3	78.676.413	3	43.123.400	3	78.187.057		9	199.986.870	75,00	49,93	33,00	957.954.992	55,00	115,66	Dinas Kominfo	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadatkan	paket			59	96.573.400	30	109.160.165	30	68.746.700				40.000.000	30	108.746.700	100,00	99,62				Dinas Kominfo			
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diadatkan	paket			6	93.435.800	3	51.729.800			1	4.319.150	2	47.394.900	3	51.714.050	100,00	99,97				Dinas Kominfo			
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadatkan	dokumen			2.160	10.800.000	1080	6.426.000		270	1.323.000	270	1.323.000	540	3.780.000	1.080	6.426.000	100,00	100,00				Dinas Kominfo		
-	-	-	-	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	laporan			17	39.476.000	7	30.035.000		1	850.000	5	18.015.000	1	11.166.000	7	30.031.000	100,00	99,99				Dinas Kominfo		
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			400	517.682.922	200	203.204.000	10	9.929.713	50	40.950.400	50	54.529.907	90	97.547.850	200	202.957.870	100,00	99,88				Dinas Kominfo	
2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1		40.000.000	1	35.900.000													1,00	35.900.000	100,00	89,75	Dinas Kominfo		
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadatkan	Unit			1	35.900.000																Dinas Kominfo			
2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	60		9.577.930.335	6	3.599.640.325	12	1.875.567.275	3	459.102	3	337.591.653	3	887.327.204	3	650.176.653	12	1.875.554.612	100,00	100,00	18,00	5.475.194.937	30,00	57,16	Dinas Kominfo
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadatkan	laporan			24	2.894.002.775	12	1.551.000.000	2	235.102	2	205.366.653	4	804.492.204	4	540.896.653	12	1.550.990.612	100,00	100,00				Dinas Kominfo	
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadatkan	laporan			10	5.000.000	10	7.000.000			5	3.500.000	5	3.500.000	10	7.000.000	100,00	100,00				Dinas Kominfo			
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadatkan	laporan			24	700.637.550	12	317.567.275		224.000	4	132.225.000	4	79.335.000	4	105.780.000	12	317.564.000	100,00	100,00				Dinas Kominfo	
2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1		138.000.000	1	103.633.400	1	75.590.000	1	14.235.000		12.555.000		48.799.070	1	75.589.070	100,00	100,00	2,00	179.222.470	200,00	129,87	Dinas Kominfo		
2	16	01	2.09	02	Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	unit			1	103.633.400	1	75.590.000	1	14.235.000		12.555.000		48.799.070	1	75.589.070	100,00	100,00				Dinas Kominfo			
2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks SPBE	indeks	3		3.039.229.912	252,00	1.746.691.855	25	907.808.700	2,57	39.293.000		40.518.000		153.175.000		673.492.158	2,57	906.478.158	10,28	99,85	254,57	2.653.170.013	8.485,67	87,30	Dinas Kominfo
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	60		3.039.229.912	24	1.746.691.855	12	907.808.700	3	39.293.000	3	40.518.000	3	153.175.000	3	673.492.158	12	906.478.158	100,00	99,85	36,00	2.653.170.013	60,00	87,30	Dinas Kominfo

				4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15B*100%		17	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			300	655.933.000	150	165.708.460	50	23.648.000			100	141.560.000	150	165.208.000	100,00	99,70							Dinas Kominfo	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen		500	606.665.005	250	301.620.540	50	15.445.000	60	20.100.000	50	74.325.000	90	191.184.158	250	301.054.158	100,00	99,81					Dinas Kominfo	
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan		30	17.554.000	30	27.052.700	1	200.000	2	600.000	3	900.000	24	25.200.000	30	26.900.000	100,00	99,44					Dinas Kominfo	
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang		14	38.140.650										0	-							Dinas Kominfo		
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	dokumen		1	16.668.200										0	-							Dinas Kominfo		
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan komunikasi komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat Media dan Komunitas dalam Mendemonstrasikan Informasi	dokumen		8.000	411.731.000	8000	413.427.000			2000	19.818.000	3000	77.950.000	3.000	315.548.000	8.000	413.316.000	100,00	99,97					Dinas Kominfo	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	indeks	3	11.106.060.658	2,52	3.496.760.122	2,5	1.125.708.230	2,57	144.738.500	102.884.800	193.504.600	682.617.018	2,57	1.123.744.918	102,80	99,83	5,09	4.620.505.040	169,67	41,60		Dinas Kominfo		
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	60	2.591.089.051	780.015.000	12	93.229.050	3	5.060.500	3	1.440.000	49.973.500	36.460.000	6	92.934.000	50,00	99,68	6,00	872.949.000	10,00	33,69		Dinas Kominfo		
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	domain		1	60.500	1	60.500	1	60.500					1	60.500	100,00	100,00						Dinas Kominfo		
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		1	6.500.000	1	6.444.800	1	5.000.000		1.440.000			1	6.440.000	100,00	99,93						Dinas Kominfo		
2	16	03	2.01	03	Pengelolaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit		20	773.454.500	10	86.723.750				10	49.973.500		36.460.000	10	86.433.500	100,00	99,67					Dinas Kominfo		
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	60	8.514.971.607	24	2.716.745.122	12	1.032.479.180	3	139.678.000	3	101.444.800	3	143.531.100	3	646.187.018	12	1.030.810.918	100,00	99,84	36,00	3.747.556.040	60,00	44,01	Dinas Kominfo
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen		1	46.082.820	1	46.652.050	0			6.731.400	1	3.420.000		36.499.710	1	46.651.110	100,00	100,00					Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	dokumen		1	49.970.000	1	49.973.500	1	49.765.000					1	49.765.000	100,00	99,58						Dinas Kominfo		
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	dokumen		2	20.766.200	2	20.990.500	2	20.970.000					2	20.970.000	100,00	99,90						Dinas Kominfo		
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit		1	196.000.000	1	96.059.815	0	59.800	1	40.000.000		24.000.000		32.000.000	1	96.059.800	100,00	100,00					Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	layanan		1	96.000.000	1	96.059.815		59.800	1	40.000.000		24.000.000		32.000.000	1	96.059.800	100,00	100,00					Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	dokumen		2	1.454.368.000	2	219.999.500		37.500.000			1	40.082.700	1	142.300.000	2	219.882.700	100,00	99,95					Dinas Kominfo	
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen		1	101.575.500	1	35.000.000				1	35.000.000			1	35.000.000	100,00	100,00						Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	dokumen		1	732.714.702	1	448.471.010		31.323.400	1	14.713.400		17.028.400		384.084.348	1	447.149.548	100,00	99,71					Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	12	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen		1	19.267.900	1	19.272.990						1	19.272.960	1	19.272.960	100,00	100,00						Dinas Kominfo	
2	20	002			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Indeks SPBE	indeks	3	261.550.000	2,52	171.994.900	2,5	114.981.970	2,57	10.839.200	9.304.400	11.215.000	80.704.300	3	112.062.900	102,80	97,46	2,57	284.057.800	#DIV/0!	108,61		Dinas Kominfo		
2	20	2	201		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks SPBE	indeks	3	261.550.000	2,52	171.994.900	2,5	114.981.970	2,57	10.839.200	9.304.400	11.215.000	80.704.300	3	112.062.900	102,80	97,46	5,09	284.057.800	169,67	108,61		Dinas Kominfo		
2	20	2	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	bulan	60	261.550.000	252	171.994.900	2,5	114.981.970	2,57	10.839.200	9.304.400	11.215.000	80.704.300	3	112.062.900	102,80	97,46	254,57	284.057.800	424,28	108,61		Dinas Kominfo		
2	20	2	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen		1	95.192.600	19	44.995.260		10.839.200		9.304.400		5.800.000	19	17.050.000	19	42.993.600	100,00	95,55					Dinas Kominfo	
2	20	2	201	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	orang		14	76.802.300	100	19.999.110					100	19.252.850	100	19.252.850	100,00	96,27						Dinas Kominfo		
2	20	2	201	03	Membangun metadata statistik sektoral yang Dihimpun	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen		-	-	1	49.987.600					1	5.415.000		44.401.450	1	49.816.450	100,00	99,66					Dinas Kominfo	
2	21	002			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Indeks SPBE	indeks	3	235.000.000	252	125.785.677	2,5	71.428.305	2,57	25.253.050	2,57	25.253.050	44.894.700	3	70.147.750	102,80	98,21						Dinas Kominfo		
2	21	002	201		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	bulan	60	235.000.000	252	125.785.677	2,5	71.428.305	2,57	25.253.050	44.894.700	3	70.147.750	102,80	98,21	254,57	195.933.427	8.485,67	83,38			Dinas Kominfo			
2	21	2	201	01	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan		2	125.785.677	3	71.428.305				1	25.253.050	2	44.894.700	3	70.147.750	100,00	98,21						Dinas Kominfo	
2	18				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	31.327.242.677	8564	9.351.228.869	89,00	4.224.988.373	91,62	533.619.244	89,00	1.264.094.054	87,54	1.086.107.483	86,20	1.247.237.233	86,20	4.131.058.014	10.294,38	37,91	89,00	13.482.286.883	93,68	43,04	DPMPTSP
2	18	01	2.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	31.327.242.677	8564	9.351.228.869	89,00	4.224.988.373	91,62	533.619.244	89,00	1.264.094.054	87,54	1.086.107.483	86,20	1.247.237.233	86,20	4.131.058.014	10.294,38	37,91	89,00	13.482.286.883	93,68	43,04	DPMPTSP
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	21.175.508.206	100	6.898.543.899	100	3.184.283.260	11,29	359.649.450	33,91	1.079.837.593	24,67	785.473.878	27,48	874.944.813	97,35	3.099.905.734	50,00	36,90	197,35	9.998.449.633	197,35	47,22	DPMPTSP
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		25	3.110.483.260	26	350.169.450	25	1.065.617.593	25	760.143.878	25	850.354.813	25	3.026.285.734	200,00	36,99							DPMPTSP	
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	dokumen		12	73.800.000	2	9.480.000	3	14.220.000	3	25.330.000	4	24.590.000	12	73.620.000	41,67	32,11							DPMPTSP	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	842.568.000	100	80.352.000										0,00	0,00	100,00		80.352.000	100,00	9,54		DPMPTSP	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2.399.298.971	100	859.329.848	100	434.076.613	22,44	97.401.944	21,35	67.972.761	29,90	129.803.600	31,54	136.889.834	105	432.068.139	46,35	51,94	205,23	1.291.397.987	205,23	53,82	DPMPTSP
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	palet		67	5.129.750	67	5.128.350						67	5.128.350	100,00	99,97							DPMPTSP		
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	palet		46	50.224.913	40	24.103.750				46	26.084.950		50.188.700	86,96	47,99							DPMPTSP		
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	palet		23	16.109.140																				

3				4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	3.805.310.500	100	1.038.530.000	100	453.165.000	25	70.286.250	23,57	114.053.700	33,37	151.211.500	24,90	112.828.586	107	448.380.036	48,57	38,10	206,84	1.486.910.036	206,84	39,07	DPMPTSP				
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon Internet Air dan Listrik	laporan				12	26.160.000	2	2.896.250	3	10.438.700	3	4.311.500	4	7.523.586	12	25.170.036	41,67	44,21						DFMPTSP				
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan Kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	laporan				16	11.280.000				10	7.060.000	6	4.220.000	16	11.280.000	0,00	0,00							DFMPTSP				
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor	laporan				12	415.725.000	3	67.390.000	3	103.615.000	4	139.840.000	3	101.085.000	13	411.930.000	50,00	38,91							DFMPTSP			
2	18	01	2.09	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	684.557.000	100	76.751.372	100,00	38.420.000	8,18	6.281.600	5,80	2.230.000	51,06	19.618.505	26,74	10.274.000	92	38.404.105	1.639,80	22,15	191,79	115.155.477	191,79	16,82	DFMPTSP			
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Usaha	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan Usaha	unit				1	38.420.000	1	6.281.600	1	2.230.000	1	19.618.505	1	10.274.000	1	38.404.105	200,00	22,15							DFMPTSP			
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN	Investor	91	1.807.852.000	84	325.803.626	94	41.055.950		93	4.800.000	95	6.769.400	96	23.851.200	96	35.420.600	0,00	8,92	180,00		361.224.226	197,80	19,98			DFMPTSP		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	%	100	100	700.000.000	100	134.209.576						0			0,00	0,00	100,00		134.209.576	100,00	19,17				DFMPTSP			
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang Disusun	%	100	100	1.107.852.000	100	191.594.050	100	41.055.950		8,92	4.800.000	16,49	6.769.400	58,09	23.851.200	84	35.420.600	0,00	0,00	183,50	227.014.650	183,50	20,49			DFMPTSP		
2	18	02	2.02	04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						1	41.055.950				4.800.000		6.769.400	1	23.851.200	1	35.420.600	0,00	8,92										
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN	investor	91	1.153.500.000	93	220.556.308	84	152.662.050	94	4.767.000	93	81.337.300	95	29.556.832	96	15.017.450	96	130.678.582	0,00	19,35	189,00		351.234.890	207,69	30,45			DFMPTSP	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	%	100	100	1.153.500.000	100	220.556.308	100	152.662.050	107,00	4.767.000	18,28	81.337.300	19,36	29.556.832	9,84	15.017.450	154	130.678.582	125,28	19,35	254,48	351.234.890	254,48	30,45			DFMPTSP	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	dokumen						77.618.000		1	69.633.300		255.000			1	69.888.300	0,00	68,97								DFMPTSP		
2	18	03	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota							75.044.050				4.767.000		11.704.000	1	29.301.832	1	15.017.450	2	60.790.282	0,00	0,00						DFMPTSP		
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	izin	1600	1.183.500.000		303.297.900	1.400	164.050.000	784	4.050.000	239	12.150.000	788	101.700.000	542	45.930.000	2.353	163.830.000	73,07	9,88	2.353,00	467.127.900	147,06	39,47			DFMPTSP		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintas Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintas Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	1.183.500.000	100	303.297.900	100	164.050.000	247,00	4.050.000	7,41	12.150.000	61,99	101.700.000	28,00	45.930.000	344	163.830.000	254,41	9,88	444,40	467.127.900	444,40	39,47			DFMPTSP	
2	18	04	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						1	2.500.000				1	2.280.000	1	2.280.000		2.280.000	0,00	0,00									DFMPTSP		
2	18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						1.400	114.000.000				1.811	85.500.000	542	28.500.000	2.353	114.000.000	0,00	0,00									DFMPTSP		
2	18	04	2.01	08	Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko						525	47.550.000	45	4.050.000	135	12.150.000	180	16.200.000	165	15.150.000	525	47.550.000	0,00	40,45								DFMPTSP		
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN	investor	91	1.456.622.000		854.243.278		798.985.000		95	337.414.750	96	322.371.250	96	659.786.000	96	659.786.000	0,00	0,00	96,00		1.514.029.278	105,49	103,94			DFMPTSP		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	1.456.622.000		854.243.278		798.985.000		42,23	337.414.750	40,35	322.371.250	83	659.786.000	0,00	0,00	82,58		1.514.029.278	82,58	103,94			DFMPTSP			
2	18	05	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya						65	119.847.000				30	35.910.000	35	54.670.000	65	90.580.000	0,00	0,00									DFMPTSP		
2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						312	439.443.000				350	237.464.750	250	179.729.250	600	417.194.000	0,00	0,00									DFMPTSP		
2	18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal						125	239.695.000				60	64.040.000	71	87.972.000	131	152.012.000	0,00	0,00										DFMPTSP	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	izin	1600	729.872.000		182.700.000								0			0,00	0,00	0,00		182.700.000	0,00	25,03			DFMPTSP			
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dikolea	%	100	100	729.872.000		182.700.000							0			0,00	0,00	0,00		182.700.000	0,00	25,03			DFMPTSP			
																			0			0,00	0,00											
2	22				DINAS KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA						39.712.843.711		51.623.646.553		14.227.665.259		783.966.764		2.406.812.143		4.394.957.173		6.058.247.057	-	13.643.983.137	95,90		65.267.629.690	164,35		Disubporapar			
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	34	526.007.341	21	562.466.132	26	62.539.215	21		2		-		4	58.593.837	27	58.593.837	169,23	0,00	48,00		621.059.969	141,18	118,07			Disubporapar	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	451.007.341	100	562.466.132	100	62.539.215	0	-	-	-	-	100	58.593.837	100	58.593.837	0,00	0,00	200,00		621.059.969	200,00	137,71			Disubporapar	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Orang				80	62.539.215	0			-	-	-	80	58.593.837	80	58.593.837	0,00	0,00									Disubporapar	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	75.000.000	-	0							-		-			0,00	-	0,00		0,00	0,00				Disubporapar	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kali	13	532.121.835	22	768.630.023	11	109.450.790	8		5	7.600.000	-	33.658.439	2	37.230.000	15	78.488.439	118,18	8,17	37,00		847.118.462	284,62	159,20			Disubporapar	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	532.121.835	100	768.630.023	100	109.450.790	0	-	25	7.600.000	50	33.658.439	25	37.230.000	100	78.488.439	25,00	8,17	200,00		847.118.462	200,00	159,20			Disubporapar
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang				90	109.450.790	0			-	-	7.600.000	104	33.658.439		37.230.000	104	78.488.439	0,00	8,17							Disubporapar	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Cagar Budaya	25	598.950.000	9	692.680.083	20	70.000.000	9		-	-	2.700.000		2	67.100.000	11	69.800.000	45,00	3,86	20,00		762.480.083	80,00	127,30			Disubporapar	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Kabupaten/Kota	%	100	100	453.750.000	100	366.936.973	100	70.000.000	25	2.700.000	-	-	75	67.100.000	100	69.800.000	25,00	3,86	200,00		436.736.973	200,00	96,25			Disubporapar		
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek				5	70.000.000				-	2.700.000	-	-	5	67.100.000	5	69.800.000	0,00	3,86								Disubporapar	
2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%	100	100	145.200.000		325.743.110							-		-		0,00	0,00	100,00		325.743.110	100,00	224,34			Disubporapar		
3	26	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	9.857.129.230	78	17.152.006.935	89	7.359.135.909	0		783.966.764	-	2.086.782.058	-	1.889.664.734	80	2.271.502.019	80	7.031.915.575	0,00	39,31	158,00		24.183.922.510	166,32	245,34			Disubporapar
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	%	100	100	6.634.081.394	100	11.931.946.040	100	5.521.304.067	25	604.031.234	25	1.610.320.526	25	1.446.243.343	25	1.636.977.991	100	5.297.573.094	50,00	40,14	200,00		17.229.519.134	200,00	259,71			Disubporapar
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang																											

				4	5			6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15B*100%		17						
3	26	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	Rp. 1.489.560.091	Rp. 100	Rp. 2.052.117.151	Rp. 100	Rp. 443.155.550	Rp. 25	Rp. 66.176.157	Rp. 25	Rp. 116.618.931	Rp. 25	Rp. 86.653.273	Rp. 25	Rp. 143.154.863	Rp. 100	Rp. 412.603.224	Rp. 50,00	Rp. 46,42	Rp. 200,00	Rp. 2.464.720.375	Rp. 200,00	Rp. 165,47	Diabudporapar
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					38	73.132.331	0	-	16	45.611.135	-	-	16	26.453.700	32	72.064.835							Diabudporapar
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					8	5.445.000	0	-	-	-	-	-	8	5.436.660	8	5.436.660							Diabudporapar
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					5	45.397.300	1	1.086.450	2	7.386.450	2	14.066.950	-	8.160.350	5	30.700.200	60,00	18,42					Diabudporapar
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen					1	4.988.000	0	-	-	-	-	1	4.320.000	1	4.320.000	0,00	0,00						Diabudporapar
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					1	314.192.919	0	65.089.707	-	63.621.346	-	72.586.323	1	98.784.153	1	300.081.529	0,00	48,72					Diabudporapar
3	26	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	165.709.500	100	112.500.000															100,00	112.500.000	100,00	67,89	Diabudporapar
3	26	01	2.08	Penyediaan Jasa Peningjangan Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Peningjangan Untuk Peningkatan Pelayanan	%	100	1.429.869.342	100	2.283.001.316	100	1.145.308.900	25	106.259.373	25	352.342.601	25	266.872.118	25	356.422.054	100	1.081.896.146	50,00	41,28	200,00	3.364.897.462	200,00	235,33	Diabudporapar
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan					3	108.698.900	0	19.219.373	-	11.942.601	-	17.752.118	3	14.082.054	3	62.996.146	0,00	41,55					Diabudporapar
3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1	24.950.000	0	-	0	12.240.000	-	-	1	12.710.000	1	24.950.000							Diabudporapar
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1	1.011.660.000	0	87.040.000	-	328.160.000	-	249.120.000	1	329.630.000	1	993.950.000	0,00	41,07					Diabudporapar
3	26	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningjangan Urusan Pemerintahan Daerah	Terseleenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	130.438.000	100	730.010.800	100	249.367.392	25	7.500.000	25	7.500.000	25	89.896.000	25	134.947.111	100	239.843.111	50,00	5,32	200,00	969.853.911	200,00	743,54	Diabudporapar
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Angkutan Dinas Operasional atau Perizinannya	Unit					8	218.812.392	0	-	-	-	3	82.396.000	5	126.892.111	8	209.288.111	0,00						Diabudporapar
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					7	30.555.000	2	7.500.000	2	7.500.000	1	7.500.000	2	8.055.000	7	30.555.000	57,14	38,16					Diabudporapar
3	26	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peningjangan Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Peningjangan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	7.470.903	100	42.431.628														100,00	42.431.628	100,00	567,96	Diabudporapar	
3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1306500	22.496.465.026	1280978	16.981.319.709	1.101.000	2.113.866.000	196158	466.928	-	288.029	514.089.000	483.682	1.550.629.320	1.434.797	2.064.718.320	60,23	0,00	#####	19.046.038.029	207,87	84,66	Diabudporapar	
3	26	02	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	%	100	519.090.000	-	-														0,00	-	0,00	0,00	Diabudporapar	
3	26	02	2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	%	100	179.510.000	-	-														0,00	-	0,00	0,00	Diabudporapar	
3	26	02	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	%	100	21.797.865.026	100	16.981.319.709	100	2.113.866.000	0	-	-	25	514.089.000	75	1.550.629.320		2.064.718.320			100,00	19.046.038.029	100,00	87,38	Diabudporapar	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	unit					2	2.113.866.000	0	-	-	-	514.089.000	2	1.550.629.320		2.064.718.320							Diabudporapar	
3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1306500	1.961.869.279	1.280.978	6.934.634.643	1.101.000	1.363.365.000	196.158	466.928	243.504.690	288.029	845.586.250	483.682	246.788.500	1.434.797	1.335.879.440	60,23	18,52	#####	8.270.514.083	207,87	421,56	Diabudporapar	
3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	%	100	1.961.869.279	100	6.934.634.643	100	1.363.365.000	0	-	25	243.504.690	50	845.586.250	25	246.788.500	100	1.335.879.440			200,00	8.270.514.083	200,00	421,56	Diabudporapar
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan					5	1.363.365.000	0	-	1	243.504.690	4	845.586.250	-	246.788.500	5	1.335.879.440							Diabudporapar
3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata Yang Tersertifikasi	Orang	195	2.200.000.000	330	3.506.833.615	160	1.293.000.000	0	-	-	30.000.000	-	678.364.100	280	552.397.260	280	1.260.761.360			610,00	4.767.594.975	312,82	216,71	Diabudporapar
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	%	100	1.800.000.000	100	3.407.190.865	100	1.123.000.000	0	-	25	30.000.000	50	652.070.100	25	408.691.260	100	1.090.761.360			200,00	4.497.952.225	200,00	249,89	Diabudporapar
3	26	05	2.01	9	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Orang					360	1.123.000.000	0	-	50	30.000.000	230	652.070.100	550	408.691.260	830	1.090.761.360	97,13	97,13				
3	26	05	2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100	400.000.000	100	99.642.750	100	170.000.000	0	-	-	50	26.294.000	50	143.706.000	100	170.000.000			200,00	269.642.750	200,00	67,41		
3	26	05	2.02	01	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang					100	170.000.000	0	-	-	200	26.294.000	130	143.706.000	330	170.000.000							
2	19	02		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	53	514.201.000	100	531.230.363	47	150.000.000	0	-	-	-	33.025.100	33,3%	103.778.450	0	136.803.550			100,33	668.033.913	189,31	129,92	Diabudporapar	
2	19	02	2.01	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirasaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirasaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	%	100	509.701.000	100	433.505.000	100	150.000.000	0	-	-	50	33.025.100	50	103.778.450	100	136.803.550			200,00	570.308.550	200,00	111,89	Diabudporapar	
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda Advokasi Akses Pengembangan diri Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda Advokasi Akses Pengembangan diri Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang					30	150.000.000	0	-	-	30	33.025.100		103.778.450	30	136.803.550							Diabudporapar
2	19	02	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	4.500.000	100	97.725.363									-	-			100,00	97.725.363	100,00	2.171,67	Diabudporapar		
2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang Olahraga	22	862.100.000,00	16	4.493.845.050	18	1.706.308.345	0	-	-	36.225.395	12	400.569.550	-	1.170.227.671	12	1.607.022.616	94,18	94,18	28,00	6.100.867.666	127,27	707,68	Diabudporapar
2	19	03	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	98.500.000	100	1.299.176.000	100	50.000.000	0	-	-	100	50.000.000	-	-	100	50.000.000			200,00	1.349.176.000	200,00	1.369,72	Diabudporapar	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	unit					1	50.000.000	0	-	-	1	50.000.000	-	-	1	50.000.000							Diabudporapar
2	19	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	273.000.000	100	594.964.110	100	76.308.345	0	-	-	50	58.696.600	50	16.250.500	100	74.947.100			200,00	669.911.210	200,00	245,39	Diabudporapar	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pelan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pelan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen					1	76.308.345	0	-	-	1	58.696.600	-	16.250.500	1	74.947.100							Diabudporapar
2	19	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	%	100	273.000.000	100	2.026.593.745	100	1.430.000.000	0	-	-	-	50	291.872.950	50	1.093.977.171	100	1.385.850.121			200,00	3.412.443.866	200,00	1.249,98	Diabudporapar

				4	5			6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17							
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	org				200	1.430.000.000	0	-	-	132	291.872.950	106	1.093.977.171	238	1.385.850.121			Disbudporapar							
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	%	100	190.000.000	100	573.111.195	100	150.000.000	0	-	25	36.225.395	-	-	75	60.000.000	100	96.225.395	64,15	64,15	200,00	669.336.590	200,00	352,28	Disbudporapar
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	%	100	27.600.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Disbudporapar	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	70	164.000.000	100	240.588.233												100,00	240.588.233	142,86	146,70	Disbudporapar			
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%	100	164.000.000	100	240.588.233												100,00	240.588.233	100,00	146,70	Disbudporapar			
2	23				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				97	5.837.769.256	97,83	5.829.535.881	8,1	469.583.315	28,9	1.682.772.348	21,0	1.224.084.939	37,38	2.179.108.114	95	5.555.548.716	97,39	95,30	192,73	11.393.317.972			DPA	
2	23	01			PROGRAM PENUNJAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks	95	31.432.419.791	95	4.600.510.237	85	4.743.419.536	14	553.343.315	23	1.465.668.196	23	1.150.614.714	25	1.654.070.157	85	4.823.696.382	100,00	101,69	180,00	9.424.206.619	189,47	29,98	DPA	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Bulan	60	14.478.019.791	12	3.929.880.534	12	4.111.876.610	3	448.607.477	3	1.410.414.310	3	1.182.872.040	3	1.391.807.048	12	4.433.700.875	100,00	107,83	24,00	8.363.581.409	40,00	57,77	DPA
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan	60	14.088.019.791	37	3.835.120.534	37	4.047.036.610	37	440.487.477	31	1.394.174.310	31	1.174.752.040	31	1.375.687.048	130	4.385.100.875	351,35	108,35	167,00	8.220.221.409	278,33	58,35	DPA
2	23	01	2.02	02	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	360	390.000.000	99	94.760.000	12	64.840.000	2,00	8.120.000	4,00	16.240.000	2	8.120.000	4	16.120.000	12	48.600.000	100,00	74,95	111,00	143.360.000	30,83	36,76	DPA
2	23	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	60	77.000.000	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-	-	0	-	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	DPA	
2	23	02	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	936.400.000	12	135.890.297	12	176.745.294	3	20.975.838	3	36.890.820	3	94.936.407	3	78.001.190	12	230.804.255	100,00	130,59	24,00	366.694.552	40,00	39,16	DPA
2	23	02	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	80	4.000.000	1	909.000	1	948.600	0,00	-	0	-	0	-	1	944.190	1	944.190	100,00	99,54	2,00	1.853.190	2,50	46,33	DPA
2	23	02	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	250	205.000.000	2	55.662.950	2	60.746.514	2,00	20.975.838	2,00	5.938.000	2	33.668.015	0	-	6	60.581.853	300,00	99,73	8,00	116.244.803	3,20	56,70	DPA
2	23	02	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	17.000.000	1	4.704.920	1	14.765.180	0,00	-	1,00	7.764.820	1	6.999.640	0	-	2	14.764.460	200,00	100,00	3,00	19.469.380	300,00	114,53	DPA
2	23	02	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1.500	20.400.000	2.650	4.370.000	24	4.900.000	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	2.650,00	4.370.000	176,67	21,42	DPA	
2	23	02	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dokumen	1.250	620.000.000	105	70.243.427	100	95.385.000	0,00	-	20,00	23.188.000	30	54.268.752	50	72.197.000	100	149.653.752	100,00	156,89	205,00	219.897.179	16,40	35,47	DPA
2	23	02	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	150	12.463.000.000	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-	0	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPA
2	23	02	2.08		Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	60	1.985.000.000	12	385.954.530	12	362.290.000	3	83.760.000	3,00	-	3,00	90.757.578	3,00	127.542.879	12	302.060.457	100,00	83,38	24,00	688.014.987	40,00	34,66	DPA
2	23	02	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disediakan	Laporan	60	294.000.000	12	47.510.530	24	49.000.000	0,00	-	4,00	6.352.422	1	1.147.578	19	35.685.129	24	43.185.129	100,00	88,13	36,00	90.695.659	60,00	30,85	DPA
2	23	02	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	145	16.000.000	30	11.064.000	6	62.010.000	0,00	-	3,00	6.000.000	2	5.850.000	1	49.977.750	6	61.827.750	100,00	99,71	36,00	72.891.750	24,83	455,57	DPA
2	23	02	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1.140	1.675.000.000	238	327.380.000	25	251.280.000	25,00	83.760.000	25,00	41.880.000	25	83.760.000	25	41.880.000	100	251.280.000	400,00	100,00	338,00	578.660.000	29,65	34,55	DPA
2	23	02	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	60	3.478.000.000	12	149.220.000	12	92.507.632	0	-	4	18.363.066	4	15.746.250	4	56.719.040	12	90.828.356	100,00	98,18	24,00	240.048.356	40,00	6,90	DPA
2	23	02	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan yang diwakilkan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak, dan Perizinanya	unit	40	2.474.000.000	8	149.220.000	8	92.507.632	0,00	-	8,00	18.363.066	8	15.746.250	8	56.719.040	24	90.828.356	300,00	98,18	32,00	240.048.356	80,00	9,70	DPA
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	persen	100		97	1.188.185.218	100	971.167.100	0	-	0	-	100	150.000.000		669.293.876	100	819.293.876	100,00	84,36	197,44	2.007.479.094	197,44	#DIV/0!	DPA
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	3.522.889.000	99	588.204.526	100	565.245.463	0	-	0,00	-	26,53	150.000.000	72,91	412.170.300	99	562.170.300	99,44	99,46	198,38	1.150.374.826	198,38	32,65	DPA
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	60		3	33.000.000		0	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	3,00	33.000.000	5,00	0,00	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	perpustakaan	5	58.000.000	1	54.243.585	1	146.543.000	0,00	-	0,00	-	0	-	1	146.542.690	1	146.542.690	100,00	100,00	2,00	200.786.275	40,00	346,18	DPA
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	10	9.000.000	1	199.999.508	1	54.001.447	0,00	-	0,00	-	0	-	1	50.926.775	1	50.926.775	100,00	94,31	2,00	250.926.283	20,00	2.788,07	DPA
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	10	20.000.000	1	46.353.638	0	0	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1,00	46.353.638	10,00	231,77	DPA
2</																														

				4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13*100%	15=7+13	16=15*100%	17														
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
2	23	02	2.04	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	Eksemplar	5	20.000.000	0	0	0	0,00	0,00	-	0	-	0,00	0,00	DPA												
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Perentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	87	260.000.000	40	19.006.774	83,33	64.952.270	100	34.933.056	100	12.871.730	0	14.998.495	DPA												
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	%	100	132.000.000	30	9.503.387	100	29.953.460	0	-	500	12.871.730	0	-	DPA												
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	Berkas	10.000	62.000.000	0	0	250	14.998.530	0,00	-	0,00	-	14.998.495	0	14.998.497	DPA											
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusunan	Berkas	1.000	58.000.000	0	0	600	14.954.930	0,00	-	500,00	12.871.730	0	-	DPA												
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Laporan	10	12.000.000	10	9.503.387	0	0	0,00	-	0,00	-	0	-	DPA												
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	%		0	0	0	0	0,00	34.933.056	0,00	-	0	-	34.933.056	DPA												
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Pengguna	10	62.000.000	0	0	1	34.998.810	1,00	34.933.056	0,00	-	0	1	34.933.056	DPA											
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	10	66.000.000	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-	0	-	0,00	DPA											
2	24	02	2.04	01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	%	100	148.000.000	0	0	100	49.996.975	0,00	-	0,00	-	0	26.346.805	DPA												
2	24	02	2.04	02	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	arsip	5.000	66.000.000	0	0	500	34.998.810	0,00	-	0,00	-	400	26.346.805	DPA												
2	24	02	2.05	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	arsip	250	8.000.000	0	0	50	0	0,00	-	0	-	0	-	0,00	DPA											
2	24	02	2.06	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	6.100	8.000.000	0	0	1.100	0	0,00	-	0,00	-	0	-	0,00	DPA											
2	24	02	2.07	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip statis yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan	arsip	330	8.000.000	0	0	50	0	0,00	-	0,00	-	0	-	0,00	DPA											
2	24	02	2.08	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip statis yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan	arsip	60	8.000.000	0	0	12	0	0,00	-	0,00	-	0	-	0,00	DPA											
2	24	03	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	%	100	17.500.000	0	0	4	0	0,00	-	0,00	-	0	-	0,00	DPA											
2	24	03	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	SOP	10	7.500.000	0	0	2	0	0,00	-	0,00	-	0	-	0,00	DPA											
3	27				DINAS PERTANIAN				129.633.170.927		64.491.856.972		25.454.876.990		2.151.204.096		5.788.789.565		4.971.641.802		10.865.062.717	-	23.776.698.180		93,41		88.268.555.152		68,09	DISTAN		
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87	97.064.167.127		37.375.200.325		18.649.313.621		2.151.204.096		5.738.978.065		4.620.602.132		5.202.096.925	-	17.712.881.218		0,00	94,98	0,00	55.088.081.543	0,00	56,75	DISTAN	
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	91.862.860.367		34.755.924.040		16.212.329.909		1.979.341.061		4.938.178.289		3.936.496.129		4.588.972.156	-	15.442.987.635		0,00	95,25	0,00	50.198.911.675	0,00	54,65	DISTAN	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan					146	16.022.609.909		1.972.461.061		4.860.668.289		3.913.886.129		4.525.182.156	188	15.272.197.635		128,77		95,32			DISTAN		
3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	Dokumen					1	189.720.000		6.880.000		77.510.000		22.610.000		63.790.000	1	170.790.000		100,00	90,02				DISTAN		
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	217	420.130.000	199	148.946.127		-		-		-	-	-	-	0,00	0,00	199,00		148.946.127	91,71	35,45			DISTAN		
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Orang Kali	60	2.155.252.960		1.301.433.169		581.903.592		11.400.000		153.125.950		198.864.993		192.661.104	-	556.052.047		0,00	95,56	0,00	1.857.485.216	0,00	86,18		DISTAN
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket					8	32.684.780				14.152.500		10.781.500		7.488.000	8	32.422.000		100,00	99,20				DISTAN		
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket					28	106.705.465				48.311.000		8.936.000		47.364.000	28	104.611.000		100,00	98,04				DISTAN		
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Paket					28	10.382.247				10.292.000		-		28	10.292.000		100,00	99,13					DISTAN		
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Paket					28	30.938.990				28.649.450		2.104.000		-	28	30.753.450		100,00	99,40				DISTAN		
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Koordinasi	Laporan					2	401.192.110		11.400.000		51.721.000		177.043.493		137.809.104	2	377.973.597		100,00	94,21				DISTAN		
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	4	350.000.000	8	223.063.670		-		-		-	-	-	-	-	0,00	0,00	8,00		223.063.670	200,00	63,73			DISTAN	
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan dan Orang	12 dan 19	1.653.260.000	576	724.087.946		1.744.100.000		160.463.035		625.388.682		471.619.810		375.948.994	-	1.633.420.521		0,00	93,65	576,00	2.357.508.467	142,60			DISTAN
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tralpon Internet Air dan Listrik/ Tagihan Listrik	Laporan					288	90.000.000		18.653.035		23.648.682		21.364.810		21.153.994	288	84.820.521		100,00	94,25					DISTAN	
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan					12	1.654.100.000		141.810.000		601.740.000		450.255.000		354.795.000	12	1.548.600.000		100,00	93,62					DISTAN	
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Unit	125	495.953.800	109	221.745.373		110.980.120		-		22.285.144		13.621.200		44.514.671	-	80.421.015		0,00	72,46	109,00	302.166.388	87,20	60,93		DISTAN
3	27	1	2.09	2	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Baya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pemerintahan daerah	Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Unit					16	96.290.120				15.285.144		13.621.200		37.514.671	36	66.421.015		225,00	68,98				DISTAN		
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit					15	14.690.000				7.000.000		-		15	14.000.000		100,00	95,30					DISTAN		
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	Produktivitas Komoditi	Kuintal/ha	91.59	1257799880		8.563.689.456		2.391.475.507		-		170.101.670		-		2.170.471.570	-	2.340.573.240		0,00	97,87	0,00	10.904.262.696		86,70		DISTAN
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana diawasi	Jumlah sarana di kecamatan yang diawasi	Kecamatan	17	2.525.999.960	10	3.360.364.432		1.538.118.500				160.653.520		1.342.628.410		-	1.503.281.930	0,00	97,74	10,00	4.863.646.362	58,82	192,54			DISTAN	
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Produksi / Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Penerima Sarana Produksi / Perkebunan	Laporan					3	1.538.118.500				160.653.520		1.342.628.410		4	1.503.281.930		133,33	97,74					DISTAN		
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Bibit Tanaman	Jenis		7.047.453.989	24	4.310.384.484		853.357.007				9.448.150		827.843.160		-	837.291.310		0,00	98,12	24,00	5.147.675.794	#DIV/0!	73,04		DISTAN	
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Komoditi Kelompok Tani Peternak/ Produsen Benih dan Ternak yang Memiliki IB	Dokumen					201	12.971.000				-		-		1	-		0,50	0,00					DISTAN		
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah komoditi unit kelompok tani Penerima Benih/Bibit Unggul Tanaman Perkebunan dan	D																									

			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
3	27	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Produktivitas Komoditi	Kuintal/ha	91.59	12.006.299.840		15.485.785.206		3.834.648.000		0	49.747.000		3.140.296.768	-	3.190.043.768	0,00	83,19	#VALUE!	18.675.828.974		155,55		DISTAN				
3	27	3	2.01	Pengembangan Prasarana	Jumlah Prasarana pendukung	Kegiatan	15	274.999.840	5	337.909.150		386.779.000			49.747.000		283.250.908	-	332.997.908	0,00	86,10	#VALUE!	670.907.058	#VALUE!	243,97		DISTAN				
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Lainnya	Pameran Hasil					1	386.779.000			49.747.000		283.250.908	3	332.997.908	300,00	86,10						DISTAN				
3	27	3	2.02	Pembangunan Prasarana	Jumlah Prasarana yang Dibangun	Unit	32	11.631.300.000		15.061.746.556		3.447.869.000			0		2.857.045.860	-	2.857.045.860	0,00	82,86	#VALUE!	17.918.792.416	#VALUE!	154,06		DISTAN				
3	27	3	2.02	4	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani	Unit				9	1.977.869.000			0	8	1689174935	9	1.689.174.935	100,00	85,40						DISTAN				
3	27	3	2.02	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit				3	945.000.000			0	2	643.376.695	2	643.376.695	66,67	68,08										
3	27	3	2.04		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya	Prasarana Lainnya	Unit				1	525.000.000			0	1	524494230	1	524.494.230	100,00	99,90						DISTAN				
3	27	3	2.04	2	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Luas lahan pengembalaan umum	Ha dan kegiatan	10 dan 8	100.000.000	635	86.129.500	-				0	-		-	0,00	0,00	#VALUE!	86.129.500			86,13		DISTAN			
3	27	3		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Jumlah HPR yang di vakasi	%	70	3.838.999.960		1.453.589.197		300.584.862		49.811.500		119.700.000		99.803.800	-	269.315.300	0,00	89,60	#VALUE!	1.722.904.497	#VALUE!	44,88		DISTAN			
3	27	3	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan	Jumlah jenis hewan yang divaksin dan diobati	Jenis	5	3.213.999.760		1.381.614.797		300.584.862		49.811.500		119.700.000		99.803.800	-	269.315.300	0,00	89,60	#VALUE!	1.650.930.097	#VALUE!	51,37		DISTAN		
3	27	3	2.01	3	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hewan yang Divaksin dan Diobati	Laporan				1	300.584.862			49.811.500		119.700.000		99.803.800	1	269.315.300	100,00	89,60					DISTAN			
3	27	3	2.02		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan dan Alat Laboratorium yang Didakan	Unit	6	150.000.000			0											0,00	-	0,00	0,00		DISTAN			
3	27	3	2.02	3	Penerapan dan Pengawasan Perisyratan Toksik Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Unit	115	375.000.200	1	71.974.400	0												1,00	71.974.400	0,87	19,19		DISTAN		
3	27	3	2.02	5	Penerapan dan Pengawasan Perisyratan Toksik Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pakan Ternak dan Tempat Minum Ternak yang Didakan	Unit	1	100.000.000			0	0											0,00	-	0,00	0.0000		DISTAN		
3	27	3		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCAHA	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulungan OPT	Persentase	100	1.210.554.120		377.390.895														0,00	377.390.895	0,00	31,18		DISTAN		
3	27	3	2.04		Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Kabupaten/ Kota	Luas Pertanaman yang dikedalikan OPT nya	Ha	875	1.210.554.120	850	377.390.895													850,00	377.390.895	97,14	31,18		DISTAN		
3	27	3		PROGRAM PERIZINAN USAHA	Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan	Rekomenda si	320	200.000.000																0,00	-	0,00	0.0000		DISTAN		
3	27	4	2.01		Penerbitan Izin Usaha yang Kegiatan usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan yang Dikeluarkan	Rekomenda si	240	120.000.000															0,00	-	0,00	0,00		DISTAN		
3	27	4	2.03		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan	Rekomenda si	8	40.000.000															0,00	-	0,00	0.0000		DISTAN		
3	27	4	2.03	1	Izin Usaha Pengecer (Toko Retail Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Jumlah unit usaha yang diawasi	%	100	40.000.000			0												0,00	-	0,00	0.0000		DISTAN		
3	27	4	2.03	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Usaha					0																		DISTAN		
3	27	7		PROGRAM PENYULUHAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persentase	7.45	2.735.450.000		1.236.639.893		278.855.000		0	11.491.000		252.393.654		263.884.654	0,00	94,63	0,00	1.500.524.547			54,85		DISTAN			
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan	Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani yang mengikuti Pelatihan	Orang dan Poktan	131 dan 25	2.735.450.000	84	1.236.639.893		278.855.000			11.491.000		252.393.654		263.884.654	0,00	94,63	84,00	1.500.524.547			54,85		DISTAN		
3	27	4	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Pelatihan	Unit				2	78.000.000				1.800.000		65.476.900	2	67.276.900	100,00	86,25						DISTAN			
3	27	4	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan	Unit				4	200.855.000				9.691.000		186.916.754	4	196.607.754	100,00	97,89						DISTAN			
3	29			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				80.682.975.036		32.379.683.439		13.866.662.700		880.552.842		2.201.137.706		3.052.607.262		4.555.158.948	0	10.689.456.758	0,00	77,09	0,00	43.069.140.197	0,00	0,5338		DISPERINDAG	
3	29	5		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi	persen	20	699.112.804																0,00	-	0,00	0.0000		DISPERINDAG		
3	29	5	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persen	100	699.112.804															0,00	-	0,00	0.0000		DISPERINDAG		
3	01	01		SEKRETARIAT			100	64.257.734.315		14.785.715.192		7.783.176.590		880.552.842			2.219.486.158		2.039.074.622	0	5.139.113.622	0,00	11,720	0,00	19.924.828.814	0,00	31,01		DISPERINDAG		
3	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	95	64.257.734.315	86	14.785.715.192	89	7.783.176.590	89	880.552.842		2.089.886.327		2.219.486.158	89	2.039.074.622	178	7.228.999.949	100,00	39,536	264,00	22.014.715.141	2,78	0,3426		DISPERINDAG	
3	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	persen	100	51.025.549.111	100	10.729.302.699	100	5.754.254.506	100	649.560.542		1.519.012.766		1.722.477.608	100	1.475.260.194	100	5.366.311.110	100,00	39,051	200,00	16.095.613.809	2,00	0,3154		DISPERINDAG
3	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	100			52	5.605.375.041	52	649.560.542	52	1.454.572.766	52	1.722.477.608	52	1.397.480.729	52	5.224.091.645	200,00	38,934					DISPERINDAG		
3	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100			-	1	148.879.465	1	-	1	64.440.000	0	-	1	77.779.465	1	142.219.465	200,00	43,283					DISPERINDAG	
3	1	01	2.05		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	92.820.000		-						-			100				100,00	-	1,00	0.0000		DISPERINDAG		
3	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	545.649.418	100	96.096.000						-			100				200,00	96.096.000	2,00	0,1761		DISPERINDAG		
3	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	3.240.273.341	100	1.213.967.919	100	511.280.209	0	-	216.059.320		162.368.757	100	38.733.780	100	417.161.857	0,00	48,851	200,00	1.631.129.776	2,00	0,5034		DISPERINDAG	
3	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100		100		1	79.992.249		-	1	34.583.780	1	28.443.415	1	16.893.240	1	79.920.435	100,00	43,234					DISPERINDAG	
3	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100		100		1	9.999.000		-	1	2.175.420	1	3.148.000	1	4.674.060	1	9.997.480	100,00	21,756					DISPERINDAG	
3	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100		100		1	79.998.960		-	1	43.700.120	1	19.131.980	1	17.166.480	1	79.998.580	100,0							

				4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=138*100%		15=7+13		16=156*100%		17	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100			12	1.351.747.875	3	222.540.000	3	328.750.000	9	326.220.000	12	436.287.875	12	1.313.797.875	50,00	40,783					DISPERINDAG	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	538.590.000	100	150.925.950	100	94.994.000		-	17.674.000		-	100	77.268.664	100	94.942.664	0,00	18,605	200,00	245.868.614	2,00	0,0000		DISPERINDAG
5	01	01	2.09	.	Penyediaan Jasa pemerintahan nusa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya			100			-	8	89.994.000		8	17.674.000		-	8	72.268.664	8	89.942.664	0,00	19,639					DISPERINDAG	
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang Diservice	Unit	100			10	5.000.000		-	0		0	-	10	5.000.000	5	5.000.000	0,00	0,000					DISPERINDAG	
3	30				URUSAN BIDANG PERDAGANGAN					7.198.829.197		7.753.762.483		1.811.350.560		-		638.466.915		1.047.047.141	0	1.796.765.435	0,00	6,904	0,00	9.550.527.918	#DIV/0!	1,3267		DISPERINDAG
3	30	02			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah SIUP yang diterbitkan	siup	1250	144.601.000	500	-					-	1250		1.250					1.750,00	-	1,40	0,0000		DISPERINDAG	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persen	100	26.191.000		-				-	100		100		100			100,00	-	1,00	0,0000		DISPERINDAG		
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	persen	100	47.410.000		-						100		100		100			100,00	-	1,00	0,0000		DISPERINDAG	
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persen	100	71.000.000		-					100		100		100			100,00	-	1,00	0,0000		DISPERINDAG		
3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Terkelola dengan Baik	persen	5882	3.474.974.400	412	6.479.435.980	471	1.481.098.315		-		581.098.315	5882	888.646.000	5.882	1.469.744.315	0,00	0,000	6.294,00	7.949.180.295	1,07	2,2876		DISPERINDAG	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	100	3.089.974.400	100	6.308.435.980	100	1.481.098.315	0	-		581.098.315	100	888.646.000	100	1.469.744.315	0,00	0,000	200,00	7.778.180.295	2,00	2,5172		DISPERINDAG	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	100			1	1.481.098.315	0	-	1	581.098.315	1	888.646.000	1	1.469.744.315	0,00	0,000							DISPERINDAG	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persen	100	385.000.000	100	171.000.000				-	0		0		0			100,00	171.000.000	1,00	0,4442		DISPERINDAG		
3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan Nilai Ekspor	persen	7499	1.853.000.000	5699	893.916.798	6199	284.749.575	0	-	111.251.379		35.080.000	7499	135.218.871	7.499	281.550.250	0,00	39,070	13.198,00	1.175.467.048	1,76	0,6344		DISPERINDAG
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.853.000.000	100	893.916.798	100	284.749.575		-	111.251.379		35.080.000	100	135.218.871	100	281.550.250	0,00	39,070	200,00	1.175.467.048	2,00	0,6344		DISPERINDAG
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	100			20	179.196.910	0	-	20	82.676.850	0	-	20	93.745.141	20	176.421.991	100,00	46,137					DISPERINDAG	
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	100			20	105.552.665	0	-	20	28.574.529	20	35.080.000	20	41.473.730	20	105.128.259	100,00	27,071					DISPERINDAG	
3	30	06			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur sarana perdagangan yang di tera dan tera ulang	persen	100	742.167.000	837	380.409.705	100	45.502.670				22.288.600	100		23.182.270	100	45.470.870	0,00	0,000	937,00	425.880.575	9,37	0,5738		DISPERINDAG
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	Persen	100	742.167.000	100	380.409.705	100	45.502.670		-	22.288.600	100		23.182.270	100	45.470.870	0,00	0,000	200,00	425.880.575	2,00	0,5738		DISPERINDAG	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur Alat Takar Alat Timbang dan Alat Perlingkapan Ditera Ulang	Unit	100			50	23.214.070	0	-	0	-	20		23.182.270	20	23.182.270	0,00	0,000						DISPERINDAG	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	100			50	22.288.600	0	-	20	22.288.600	0		20		22.288.600	0,00	0,000						DISPERINDAG	
3	30	07			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Pengawasan Barang Beredar	produk	9	984.086.797															0,00	-	0,00	0,0000		DISPERINDAG	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	100	984.086.797															0,00	-	0,00	0,0000		DISPERINDAG	
3	31				PERINDUSTRIAN			8.527.298.720		9.840.205.764		4.272.135.550		-		194.654.189		1.469.037.185	0	1.663.691.374	0,00	0,000	0,00	11.503.897.138	0,00	1,3491		DISPERINDAG		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri/IKM	persen	412	7.422.298.720	379	9.840.205.764	393	4.272.135.550				194.654.189	412	1.469.037.185	412	1.663.691.374	0,00	0,000	791,00	11.503.897.138	1,92	1,5499		DISPERINDAG	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persen	100	7.422.298.720	100	9.840.205.764	100	4.272.135.550		-	194.654.189	100	1.469.037.185	100	1.663.691.374	0,00	0,000	200,00	11.503.897.138	2,00	1,5499		DISPERINDAG		
3	31	02	2.01	04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	100			1	2.207.068.510	0	-	0	-	1	29.580.000	1	29.580.000	0,00	0,000							DISPERINDAG	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	100			1	2.065.067.040	0	-	1	194.654.189	1	1.439.457.185	2	1.634.111.374	0,00	0,000							DISPERINDAG	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri/ IKM yang berizin	persen	921	85.000.000															0,00	-	0,00	0,0000		DISPERINDAG	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persen	100	85.000.000															0,00	-	0,00	0,0000		DISPERINDAG	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang masuk kedalam Sistem Informasi Industri Nasional	persen	100	1.020.000.000															0,00	-	0,00	0,0000		DISPERINDAG	

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPIK Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatanPenyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPIK Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100		1.020.000.000															0,00	-	0,00	0,0000	DISPERINDAG	
4	1			SEKRETARIAT DAERAH			141.345.459.910		60.210.768.258		29.751.884.680		2.523.848.060		6.196.661.898		7.767.544.743		11.859.762.790	0	28.347.817.491		95,28%		88.558.585.749		62.65	SETDA	
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	126.560.439.929	89	55.935.694.850	89	26.929.344.820	0	2.377.022.860		5.718.655.498		7.581.590.503	85,25	10.302.637.528	85	25.979.906.389	95,79	0,96	174.25	81.915.601.239	183.42	64.72	SETDA
4	1	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	60	59.805.378.095	24	23.701.987.038	12	12.610.986.809	3	1.252.616.402	3	3.583.087.791	3	3.854.296.480	3	3.485.372.594	12	12.175.373.267	100,00	0,97	36,00	35.877.360.305	60,00	59,99	SETDA
4	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Orang / Bulan	470		156	22.861.689.268	78	12.272.336.809	78	1.205.336.402	78	3.488.527.791	78	3.800.677.680	78	3.356.342.594	312	11.850.884.467	400,00	0,97		34.712.573.735		SETDA
4	1	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	Dokumen	60		24	840.297.770	12	338.650.000	3	47.280.000	3	94.560.000	3	53.618.800	12	129.030.000	21	324.488.800	33,33	0,96		1.164.786.570		SETDA
4	1	1	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	601.000.000		397.736.750										0	-	#DIV/0!	0,00		397.736.750	0,00	66,18	SETDA	
4	1	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	682		2	358.266.000									0	-	#DIV/0!			358.266.000			SETDA	
4	1	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Didlat	Orang	40		5	39.470.750									0	-	#DIV/0!			39.470.750			SETDA	
4	1	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	60	15.583.958.263		8.127.494.322	35	4.779.445.287	5	460.932.735		642.513.986		1.536.817.498		1.927.376.305	5	4.567.640.524	14,29	0,96	5,00	12.695.134.846	8,33	81,46	SETDA
4	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Paket	9		4	309.132.336	1200	120.000.000	-	0		350	62.859.600	800	57.007.000	1.150	119.866.600	95,83	1,00		428.998.936		SETDA	
4	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	168		72	1.394.100.180	36	340.193.109	-	0		12	97.100.100	24	57.007.000	36	154.107.100	100,00	0,45		1.548.207.280		SETDA	
4	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Paket	68		24	666.790.000	12	8.077.400	-	0		0		-	0	0	0	0,00	0,00		666.790.000		SETDA	
4	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	56		24	400.914.200	12	100.704.050	-	0		4	50.703.870	8	49.789.740	12	100.493.610	100,00	1,00		501.407.810		SETDA	
4	1	1	206	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum	Laporan	8345		4000	2.175.384.000	2000	1.719.568.900	248	184.360.000	500	341.104.940	1200	389.949.844	300	792.429.200	2.248	1.707.843.984	112,40	0,99		3.883.227.984		SETDA
4	1	1	206	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penjajanan Dinas	Laporan	3346		1600	3.181.173.006	800	2.490.901.828	84	276.572.735	100	301.409.046	566	936.204.084		780.172.865	750	2.294.358.730	93,75	0,92		5.475.532.336		SETDA
4	1	1	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	211	18.837.083.348		8.682.808.012	40	882.797.550	-	-		69.838.800				743.729.000	0	813.567.800	0,00	0,92	0,00	9.496.375.812	0,00	50,41	SETDA
4	1	1	207	5	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mebel	Unit	32		12	2.404.800.000									0	-	#DIV/0!			2.404.800.000			SETDA	
4	1	1	207	5	Pengadaan Mebel	Mebel	Unit	74		22	1.487.275.000									0	-	#DIV/0!			1.487.275.000			SETDA	
4	1	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin	Unit	55		24	922.777.012									0	-	#DIV/0!			922.777.012			SETDA	
4	1	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	50		12	1.463.156.000	5	8.882.797.550		0		2	69.838.800	10	743.729.000	12	813.567.800	240,00	0,09		2.276.723.800		SETDA	
4	1	1	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	48	10.562.687.125		4.710.331.332	48	2.425.264.529	6	483.635.820	6	504.831.834		547.620.695		860.041.464	12	2.396.129.813	25,00	0,99	12,00	7.106.461.145	25,00	67,28	SETDA
4	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Laporan	60		24	45.460.000	5	50.000.000		0		2	17.173.000	10	14.024.000	12	31.197.000	240,00	0,62		76.657.000		SETDA	
4	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Telponan Internet Air dan Listrik	Bulan	60		24	1.987.668.052	12	1.143.300.000	3	303.135.820	3	234.081.834	3	223.852.695	6	380.127.464	15	1.141.197.813	125,00	1,00		3.128.865.865		SETDA
4	1	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	60		22	328.923.280	20	159.039.529		0		8	37.860.000	12	58.875.492	20	96.735.492	100,00	0,61		425.658.772		SETDA	
4	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	Laporan	60		24	2.348.280.000	12	1.072.925.000	3	180.500.000	3	270.750.000	3	268.735.000	3	352.940.000	12	1.072.925.000	100,00	1,00		3.421.205.000		SETDA
4	1	1	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	50	5.731.734.260		5.911.678.540	10	3.154.190.408	3	54.060.619		415.991.728		921.671.973		1.757.421.180	3	3.149.145.500	30,00	1,00	3,00	9.060.824.040	6,00	158,08	SETDA
4	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Dinas Kendaraan Jabatan	Unit	24		10	669.600.060	4	252.600.000	1	6.989.602	4	71.003.585	2	110.098.124	4	64.508.689	11	252.600.000	275,00	1,00		922.200.060		SETDA
4	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit	52		20	1.898.093.112	24	1.141.445.200	2	5.471.017	12	282.588.143	6	351.916.549	4	501.049.491	24	1.141.025.200	100,00	1,00		3.039.118.312		SETDA
4	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	60		20	306.359.740	20	255.592.000	-	0		8	95.846.000	12	158.822.500	20	254.668.500	100,00	1,00		561.028.240		SETDA	
4	1	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	44		12	3.037.625.628	20	1.504.553.208	2	41.600.000	1	62.400.000	2	363.811.300	15	1.033.040.500	20	1.500.851.800	100,00	1,00		4.538.477.428		SETDA
4	1	1	211	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang / Bulan	2	3.951.112.910		1.360.527.524	2	756.074.849	2	125.777.284	2	122.330.989		172.644.989		311.500.545	4	732.253.807	200,00	0,97	4,00	2.092.781.331	200,00	52,97	SETDA
4	1	1	211	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan	Orang / Bulan	2		4	1.152.819.524	2	652.074.849	2	125.777.284	2	122.330.989	2	68.790.989	2	311.500.545	8	628.399.807	400,00	0,96		1.781.219.331		SETDA
4	1	1	211	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	Paket	60		24	207.708.000	2	104.000.000	-	0		2	103.854.000	0	-	2	103.854.000	100,00	1,00		311.562.000		SETDA	
4	1	1	212	Facilitasi Kerumah Tanggan Sekretaris Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Wakil Daerah dan Sekretaris Daerah	Paket	180	9.515.519.800		2.619.609.488	36	1.942.500.000	-	-		412.600.000		413.000.000		1.033.549.510	0	1.859.149.510	0,00	0,96	0,00	4.478.758.998	0,00	47,07	SETDA
4	1	1	212	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Paket	60		24	967.269.620	12	912.500.000	-	6	225.000.000	3	225.000.000	3	462.056.430	12	912.056.430	100,00	1,00		1.879.326.050		SETDA	
4	1	1	212	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paket	60		24	779.375.870	12	730.000.000	-	6	180.000.000	3	180.000.000	3	368.973.580	12	728.973.580	100,00	1,00		1.508.349.450		SETDA	
4	1	1	212	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Paket	60		24	872.963.998	12	300.000.000	-	6	7.600.000	3	8.000.000	3	218.119.500	12	218.119.500	100,00	0,73		1.091.083.498		SETDA	
4	1	1	213	Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	Dokumen	36	1.250.681.588		570.627.608	7	242.445.388	-	-		37.299.170		58.420.068		101.230.730	0	196.949.968	0,00	0,81	0,00	767.577.576	0,00	61,37	SETDA
4	1	1	213	1	Pengabdian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	12		24	160.166.488	2	65.997.320	-	1	20.899.500	0	16.315.618	1	14.060.450	2	51.275.568	100,00	0,78		211.442.056		SETDA		
4	1	1	213	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	10		24	147.189.900	2	70.989.720	-	0		0		2	49.366.480	2	49.366.480	100,00	0,70		196.556.380		SETDA		
4	1	1	213	4	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	9		24	187.887.760	2	68.287.218	-	0		1	42.104.450	1	18.324.120	2	60.428.570	100,00	0,88		248.316.330		SETDA		
4	1	1	213	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	5		22	75.383.460	1	37.171.130	-	0		16.399.670	0	19.479.680	1	35.879.350	100,00	0,97		111.262.810		SETDA			
4	1	1	214	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Laporan	100	785.574.540		417.331.800	87	135.640.000	-	0		-		7.280.000		82.416.200	0	7.2							

3					4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15G*100%		17					
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
4	1	2	202		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Laporan	31	870.000.000		477.039.042	6	98.954.300			0			11.444.240		58.742.200	0		70.186.440	0,00	0,71	0,00		547.225.482	0,00	62,90	SETDA			
4	1	2	202	1	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Monitoring dan Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Bidang Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Laporan	24		24	184.390.372	1	28.516.850			0		1	11.444.240	0		1		11.444.240	100,00	0,40			195.834.612			SETDA			
4	1	2	202	2	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Monitoring dan Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Laporan	24		24	162.709.870	12	33.086.250			0	0			2	30.603.950	2		30.603.950	16,67	0,92			193.313.820			SETDA			
4	1	2	202	3	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Monitoring dan Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Laporan	24		24	129.938.800	1	37.351.200			0	0			5	28.138.250	5		28.138.250	500,00	0,75			158.077.050			SETDA			
4	1	2	203		Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Dokumen	3270	4.364.573.538		441.423.030	654	316.667.900	153		172	65.848.200	219		372	245.074.500	916		310.922.700	140,06	0,98	916,00		752.345.730	28,01	17,24	SETDA			
4	1	2	203	1	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Keputusan Proppemperda	Dokumen	3020		1766	165.250.000	604	122.636.000	150		161		201		343	122.418.500	855		122.418.500	141,56	1,00			287.668.500			SETDA			
4	1	2	203	2	Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara	Perkara	32		10	226.175.980	7	81.770.600	0		0		4		3	80.806.000	7		80.806.000	100,00	0,99			306.981.980			SETDA			
4	1	2	203	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Dokumentasi Produk Hukum	Dokumen	250		100	49.997.050	50	112.261.300	3		11	65.848.200	14		26	41.850.000	54		107.698.200	108,00	0,96			157.695.250			SETDA			
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Paket Tender dengan Jumlah Perumahan Tender	Paket	220	4.504.315.530		1.924.749.902	30	1.656.569.630				309.925.200				1.094.689.564	0		1.473.033.364	0,00	0,89	0,00		3.397.783.266	0,00	75,43	SETDA			
4	1	3	201		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Laporan	13	898.401.300		407.434.800	3	241.663.000				15.115.200				14.060.064	0		176.910.264	0,00	0,73	0,00		584.345.064	0,00	65,04	SETDA			
4	1	3	201	1	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Kab. Karo	Monitoring dan Pengawasan BUMD dan BLUD Kab. Karo	Dokumen	5		2	35.240.000	1	90.124.000			0	15.115.200	1			38.524.200	0		33.976.718	100,00	0,97			122.856.118			SETDA			
4	1	3	201	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian Inflasi dan Inklusi Keuangan Daerah Kab. Karo terlaksana	Laporan	13		8	234.689.000	3	93.700.000					2			15.844.000	0		63.130.176	66,67	0,84			313.663.176			SETDA			
4	1	3	201	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1			16.974.000	0										0			0,00	#DIV/0!			16.974.000			SETDA			
4	1	3	201	5	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terbentuknya BUMD Kab. Karo	Dokumen	5		2	120.531.800	1	57.839.000					1			8.482.000	1		1.837.970	200,00	0,18			130.851.770			SETDA			
4	1	3	202		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Laporan	581	368.450.000		259.868.500	120	97.346.000								5.624.600	112		86.681.500	112		92.306.100	93,33	0,95	112,00		352.174.600	19,28	95,58	SETDA
4	1	3	202	1	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Program Pembangunan	Dokumen	5		2	28.777.600	1	11.770.000					1			5.624.600	1		3.000.000	2		8.624.600	200,00	0,73			37.402.200			SETDA
4	1	3	202	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5		2	68.631.380	1	19.576.000					1				1		17.684.800	2		200,00	0,90			86.316.180			SETDA	
4	1	3	202	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Monitoring Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	550		220	162.459.520	110	66.000.000					110				110		65.996.700	220		200,00	1,00			228.456.220			SETDA	
4	1	3	203		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	230	2.826.391.220		1.202.754.602	190	1.226.613.630											832.043.000	0		1.126.853.000	0,00	0,92	0,00		2.329.607.602	0,00	82,42	SETDA
4	1	3	203	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paket Pengadaan	Dokumen	920		306	1.565.580.000	200	1.145.279.630			59	294.810.000	0			159		768.240.000	218		1.063.050.000	109,00	0,93			2.628.630.000			SETDA	
4	1	3	203	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Paket Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	5		2	115.934.822	1	64.330.000					0					46.800.000	0		46.800.000	0,00	0,73			162.734.822			SETDA	
4	1	3	203	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	860		400	33.619.780	200	17.004.000					0					17.003.000	0		17.003.000	0,00	1,00			50.622.780			SETDA	
4	1	3	204		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen	11	411.073.000		54.692.000	2	90.947.000								15.059.000			61.905.000	0		76.964.000	0,00	0,85	0,00		131.656.000	0,00	32,03	SETDA
4	1	3	204	1	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kebutuhan Kelautan dan Perikanan	Monitoring dan Pengawasan Hasil Pertanian Kelautan dan Perikanan Kab.Karo	Dokumen	5		2	18.190.000	1	45.950.000					1			4.327.000	0		34.901.000	39,228.000	100,00	0,85			57.418.000			SETDA		
4	1	3	204	2	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Monitoring dan Pengawasan hasil Pertambangan dan lingkungan Hidup	Dokumen	5		2	17.890.000	1	44.997.000					1					27.004.000	1		37.736.000	100,00	0,84			55.626.000			SETDA	
4	1	3	204	3	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Monitoring dan Pengawasan Hasil Energi dan Air	Laporan	1			18.612.000	0													0		0,00	#DIV/0!			18.612.000				
4	02				SEKRETARIAT DPRD				131.768.766.911		77.668.151.404		50.439.001.905		8.305.857.328		12.624.602.535		4.206.692.521		22.236.371.992		47.373.524.376		93,92			125.041.675.780		94,89	Set. DPRD				
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	130.938.636.073	86	47.771.476.563	86	25.701.611.635	86	4.285.570.855		5.505.684.858		4.206.692.521		9.755.457.072	86		23.753.405.306	100,00	39,267	172,00		71.524.881.869	181,05	43,96	Set. DPRD			
4	02	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	199.000.000	0	-		-		-		-		-		0		-	0,00	0,000	0,00		-	0,00	0,00	Set. DPRD				
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	16.575.319.465	100	5.948.511.913	100	3.244.075.727	25	403.261.018		1.028.060.891	25	403.261.018		1.280.829.854	50		3.115.412.781	25,00	44,130	150,00		9.063.924.694	125,00	44,52	Set. DPRD			
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bula			48	5.579.391.913	24	3.090.269.802,00	24	382.081.018	24	981.620.891	24	382.081.018	24		24		1.233.409.854	96		2.979.192.781	200,00	44,139			Set. DPRD			
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			24	369.120.000	12	153.805.925,00	3	21.180.000	3	46.440.000	3	21.180.000	3				47.420.000	12		136.220.000	50,00	43,964			Set. DPRD			
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	127.000.000	0	0	0	-	-	-		-		-		0		-	0,00	0,000	0,00		-	0,00	0,00	Set. DPRD				
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	2.373.348.000	100	456.293.005	100	322.550.000	13	55.000.000		120.000.000		55.000.000					82.754.062	13		312.754.062	12,50	41,981	112,50		769.047.067	112,50	26,60	Set. DPRD
4	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit			0	-	1	9.000.000	-			-		-		-		0		0,00	0,000						Set. DPRD			
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			71	456.293.005	24	313.550.000,00	11	55.000.000	20	120.000.000	11	55.000.000	6				82.754.062	48		312.754.062	129,17	42,907			Set. DPRD			
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	8.373.962.960	100	5.923.758.356	100	2.003.432.490	4	108.455.334		288.997.684		29.577.000		1.404.727.333	4		1.831.787.351	3,57	20,401	103,57		7.755.515.707	103,57	75,49	Set. DPRD			
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/Kantor yang disediakan	Paket			10	47.884.636	1	29.956.600,00	-			-		-		1		27.176.300	1		27.176.300	0,00	0,000				Set. DPRD			
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket			17	1.517.183.215	1	428.191.827,00	-			-		-		1		403.721.000	1		403.721.000	0,00	0,000				Set. DPRD			
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket			10	1.274.583.099	1	439.033.965,00	-		1	21.584.000	-		1			398.333.300	2		419.917.300	100,00	4,720				Set. DPRD			
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket			15	43.851.365	1	45.156.523,00	-		1	2.159.500	-		1			26.033.200	2		28.192.700	100,00	5,509				Set. DPRD			
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			13	40.392.000	1	32.400.000,00	-		6	4.806.000	-		1			14.580.000	7		19.386.000	600,00	14,833				Set. DPRD			
4	02	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			29	436.921.000	12	287.914.000,00	-		6	50.326.																		

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17			
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		5.357.089.318	100	434.218.020	100	236.374.200	-	-	-	-	197.100.000	0	197.100.000	0,00	0,000	100,00	631.318.020	100,00	8,11		Set. DPRD			
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		Unit		0		0	19	236.374.200,00	-	-	-	197.100.000	0	197.100.000	0,00	0,000						Set. DPRD			
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		Unit		35	434.218.020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Set. DPRD			
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		5.162.800.000	100	2.320.850.411	100	1.326.485.000	8	202.615.389		235.206.765		202.615.389		446.400.321	8	1.086.837.864	8,33	33,041	108,33	3.407.688.275	108,33	53,43	Set. DPRD
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		Laporan		24	253.376.411	12	174.480.000,00	3	33.375.389	3	35.906.765	3	33.375.389	3	33.401.321	12	136.058.864	50,00	39,708			Set. DPRD			
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Laporan		37	86.214.000	12	100.590.000,00	0	-	-	-	1	21.779.000	1	21.779.000	0,00	0,000				Set. DPRD				
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		Laporan		24	1.981.260.000	12	1.051.415.000,00	3	169.240.000		199.300.000	3	169.240.000	3	391.220.000	9	929.000.000	25,00	35,099			Set. DPRD			
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		3.955.522.200	100	1.841.803.052	100	745.687.300	8	53.706.977		91.435.711		53.706.977		400.361.082	8	599.210.747	8,33	23,245	108,33	2.441.013.799	108,33	50,23	Set. DPRD
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dinas Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit		27	624.396.146	6	369.250.000,00	6	53.706.977	6	88.480.711	6	53.706.977	6	85.658.326	24	281.552.991	200,00	38,507			Set. DPRD			
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perawatan Dinas Operasional atau Lainannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan atau Lainannya		Unit		4	30.439.026			0	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,000				Set. DPRD			
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi		Unit		5	1.186.967.880	10	376.437.300,00	0	-	1	2.955.000	-	-	1	314.702.756	2	317.657.756	10,00	1,16			Set. DPRD			
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100		87.859.352.250	100	28.425.576.376	100	16.220.665.918	8	3.462.532.137		3.428.207.307		3.462.532.137		4.794.580.920	8	15.147.852.501	8,33	42,52	108	43.573.428.877	108,33	40,20	Set. DPRD
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD		Orang/Bulan		70	27.535.963.576	40	15.558.665.918,00	35	3.462.532.137	35	3.428.207.307	35	3.462.532.137	40	4.284.088.920	145	14.637.360.501	175,00	44,29			Set. DPRD			
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Paksiain Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Paksiain Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		Paket		2	692.307.000	1	422.000.000,00	0	-	-	-	1	420.492.000	1	420.492.000	0,00	0,00				Set. DPRD				
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		Orang		13	197.305.800	40	240.000.000	0	-	-	-	15	90.000.000	15	90.000.000	0,00	0,00				Set. DPRD				
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Layanan Administrasi DPRD	%	100		955.241.880	100	2.420.465.430	100	1.602.341.000	0	-		313.776.500	-	-		1.148.703.500	0	1.462.480.000	0,00	38,74	100	3.882.945.430	100,00	286,24	Set. DPRD
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Dokumen				1	198.341.000,00	0	-	-	-	-	1	171.033.500	1	171.033.500	0,00	0,00				Set. DPRD			
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		Paket		2	2.420.465.430	1	1.404.000.000,00	0	-	4	313.776.500	-	-	5	977.670.000	9	1.291.446.500	400,00	49,81			Set. DPRD			
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1.Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota 2.Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RKPD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKTPT) 3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA/TIDAK	ADA		478.609.982.272	ADA	29.896.674.841	ADA	24.737.390.270	ADA	4.020.286.473		7.118.917.677				12.480.914.920	100	23.620.119.070	0,00	54,28	#VALUE!	53.516.793.911	0,00	8,57	Set. DPRD
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100		10.486.686.597	100	7.290.836.079	100	4.384.885.000	-	-		1.995.347.249	-	-		2.298.924.322	0	4.294.271.571	0,00	44,01	100,00	11.585.107.650	100,00	88,55	Set. DPRD
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Dokumen		3	28.169.000	2	24.330.000	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,000					Set. DPRD				
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Dokumen		26	7.239.667.079	200	4.341.027.000,00	-	100	1.995.347.249	-	-	250	2.298.924.322	350	4.294.271.571	50,00	45,965			Set. DPRD				
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan		Dokumen				1		-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,000					Set. DPRD				
4	02	02	2.01	04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau naskah Akademik yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau naskah Akademik yang difasilitasi		Dokumen		1	23.000.000	6		-	-	-	-	0	-	0	0,00	0,000				Set. DPRD					
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata tertib DPRD yang disusun		Dokumen		0		0	19.528.000,00	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,000					Set. DPRD				
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100		5.713.094.742	100	417.908.000	100	293.270.000	-	-		-	-		181.834.000	0	181.834.000	0,00	0,000	100,00	599.742.000	100,00	7,31	Set. DPRD	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		Dokumen		4	99.740.000	1	67.070.000,00	-	-	-	-	1	40.543.000	1	40.543.000	0,00	0,000				Set. DPRD				
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Dokumen		2	48.747.000	1	66.370.000,00	-	-	-	1	41.584.000	1	41.584.000	0,00	0,000				Set. DPRD					
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		Dokumen		2	94.676.000	1	52.680.000,00	-	-	-	1	33.518.000	1	33.518.000	0,00	0,000				Set. DPRD					
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD		Dokumen		2	83.812.000	1	43.300.000,00	-	-	-	1	35.723.000	1	35.723.000	0,00	0,000				Set. DPRD					
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		Dokumen		0	-	1	10.450.000	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,000				Set. DPRD					
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Dokumen		3	90.933.000	1	53.400.000	-	-	-	1	30.466.000	1	30.466.000	0,00	0,000				Set. DPRD					
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100		5.753.018.831	100	112.318.000	100	243.177.500	-	-		-	-		117.277.000	0	117.277.000	0,00	0,000	100,00	229.595.000	100,00	1,95	Set. DPRD	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Laporan		1	7.936.000	1	35.578.000	-	-	-	-	1	27.882.000	1	27.882.000	0,00	0,000				Set. DPRD				
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Laporan		1	8.556.000	1	27.512.000	-	-	-	-	1	17.732.000	1	17.732.000	0,00	0,000				Set. DPRD				

				4	5			6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17							
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	3.224.000	1	45.120.000	-	-	-	1	21.373.000	1	21.373.000	0,00	0,000			Set. DPRD							
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkonomian	Laporan	2	30.442.000	1	34.702.500	-	-	-	1	-	1	-	0,00	0,000			Set. DPRD							
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	5.456.000	1	34.825.000	-	-	-	1	11.818.000	1	11.818.000	0,00	0,000			Set. DPRD							
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	7.865.000	1	18.280.000	-	-	-	1	10.148.000	1	10.148.000	0,00	0,000			Set. DPRD							
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	0	-	1	18.640.000	-	-	-	1	-	1	-	0,00	0,000			Set. DPRD							
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	2	48.839.000	1	28.520.000	-	-	-	1	28.324.000	1	28.324.000	0,00	0,000			Set. DPRD							
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	5.449.948.000	100	1.873.944.759	100	1.365.829.700	-	295.560.000	-	754.040.498	0	1.049.600.498	0,00	16,413	100,00	2.923.545.257	100,00	39,81	Set. DPRD				
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	56	1.103.548.292	200	948.986.000,00	-	-	12	135.560.000	-	596.320.498	12	731.880.498	6,00	13,990			Set. DPRD						
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD							
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	0	-	8	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD							
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	28	764.000.000	8	384.070.000,00	-	-	6	160.000.000	-	6	144.000.000	12	304.000.000	75,00	41,659			Set. DPRD					
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD							
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	5.065.000	1	17.650.000,00	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD							
4	02	02	2.04	08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyerahan Produk Hukum Daerah Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	12	1.331.467	12	15.123.700,00	-	-	-	-	1	13.720.000	1	13.720.000	0,00	0,000									
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	6.422.463.000	100	675.321.000	100	271.358.400	30	207.749.000	12.825.000	-	29.050.000	30	249.624.000	30,00	46,245	130,00	924.945.000	130,00	13,95	Set. DPRD			
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	77.175.000	180	45.017.800,00	-	-	12	12.825.000	-	120	26.600.000	132	39.425.000	6,67	12,598					Set. DPRD			
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	1	3.906.000	2	18.142.000,00	-	-	-	-	1	2.450.000	1	2.450.000	0,00	0,000			Set. DPRD						
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Renc	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Renc	Dokumen	4	594.240.000	1	208.198.600,00	1	207.749.000	-	-	-	1	207.749.000	100,00	58,189						Set. DPRD				
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	100	2.116.310.902	0	-	100	9.560.000	-	-	-	6.867.000	0	6.867.000	0,00	0,000	0,00	6.867.000	0,00	0,00		Set. DPRD			
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	0	-	1	9.560.000	-	-	-	-	1	6.867.000	1	6.867.000	0,00	0,000					Set. DPRD				
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan kasananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	%	100	81.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00			Set. DPRD			
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	%	100	13.743.115.967	100	19.526.347.003	100	18.169.309.670	-	3.812.537.473	4.815.185.428	-	-	9.092.922.100	0	17.720.645.001	0,00	65,529	100,00	37.246.992.004	100,00	204,86	Set. DPRD		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	600	19.458.815.003	300	17.547.876.020,00	100	3.812.537.473	100	4.544.794.490	-	320	8.795.149.453	520	17.152.481.416	66,67	66,620					Set. DPRD			
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang	Laporan	0	-	1	12.810.000,00	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,000							Set. DPRD			
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen hasil Forum Pelaksanaan Tugas Badan	Dokumen	3	56.323.000	12	49.337.650,00	-	-	-	-	-	1	20.772.000	1	20.772.000	0,00	0,000					Set. DPRD			
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	3	11.209.000	12	559.286.000,00	-	-	15	270.390.938	-	11	277.000.647	26	547.391.585	125,00	48,346					Set. DPRD			
5	01				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		100	38.967.485.345		16.553.332.960	100	9.294.747.784		1.199.484.691		3.497.222.401		2.270.580.836	-	1.989.521.479		8.956.809.407	96,36	25.510.142.367		65,47	BAPPEDALITBANG			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	83,1	26.445.410.000		10.436.415.055	83,1	5.943.812.578	0,00	689.734.479		2.857.082.043		1.472.337.566	-	748.723.067	0	5.767.877.155	0,00	97,04	0,00	16.204.292.210	0,00	0,61	BAPPEDALITBANG
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	21.435.057.820	100	8.490.679.276	100	4.872.326.680	506.603.401	2.660.319.621	1.241.833.363		400.090.829	0	4.808.847.214	0,00	98,70	100,00	13.299.526.490	1,00	0,62		BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan			31	4.723.332.080	31,00	473.333.401	31	2.660.313.275	31	1.165.743.363	31	360.462.575	124	4.659.852.614	400,00	98,66	124,00	4.659.852.614			BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen			12	148.994.600	3,00	33.270.000	3	6.346	3	76.090.000	3	39.628.254	12	148.994.600	100,00	100,00	12,00	148.994.600			BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	%	100	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			BAPPEDALITBANG			
5	01	01	2.05	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang			0	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			BAPPEDALITBANG			
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	3.060.352.180	100	1.329.459.476	100	817.224.345	156.924.787	169.709.322	25,00	195.427.508		193.444.980	25	715.506.597	25,00	87,55	125,00	2.044.966.073	10,42	0,67	BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	Paket			1	1.915.850	1,00	1.915.850	-	-	-	1	1.915.850	100,00	100,00	1,00	1.915.850					BAPPEDALITBANG			
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			6	63.151.270	1,00	17.363.415	1	8.430.910	2,00	10.890.195	2	26.246.750	6	62.931.270	100,00	99,65	6,00	62.931.270			BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket			4	10.852.138	2,00	4.120.758	1	3.340.100	1	2.667.880		723.400	4	10.852.138	100,00	100,00	4,00	10.852.138			BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket			5	32.732.800	1,00	6.556.285	1	9.198.525	1	1.596.239		13.205.004	3	30.556.053	60,00	93,35	3,00	30.556.053			BAPPEDALIT		

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		laporan		10	14.280.000	0,00	-	1	2.120.000	4	4.600.000	5	4.280.000	10	11.000.000	100,00	77,03	10,00					RAPPEDALITBANG	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		laporan	24	75.300.000	8,00	12.550.000	8	18.825.000	8	18.825.000	8	25.100.000	32	75.300.000	133,33	100,00	32,00						RAPPEDALITBANG	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	435.636.450	100	193.818.094	100	47.138.660	25,00	10.640.590	25	2.146.500	25,00	8.680.495	-	21.876.458	75	43.344.043	75,00	91,95	175,00	237.162.137	1,75	0,54	RAPPEDALITBANG
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Taksi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diperihara dan dibayarkan pajaknya	unit	3	42.120.000	2,00	10.640.590	1	2.146.500	0,0	8.680.495		17.411.158	3	38.878.743	100,00	92,30	3,00	38.878.743	0,00	0,00				RAPPEDALITBANG	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperihara/	unit	1	5.018.660						1	4.465.300	1	4.465.300	100,00	88,97	1,00	4.465.300	100,00	#DIV/0!					RAPPEDALITBANG	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	%	100	7.166.921.825	100	2.144.206.960	100	1.396.183.259	0,00	340.102.316	134.060.824	317.088.310	530.620.251	0	1.321.871.701	0,00	94,68	100,00	3.466.078.661	1,00	0,48			RAPPEDALITBANG	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	%	100	5.103.023.850	100	1.593.075.627	100	1.161.835.136		292.262.836	80.393.624	273.881.160	-	448.368.704	0	1.094.906.324	0,00	94,24	100,00	2.687.981.951	1,00	0,53			RAPPEDALITBANG
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	berita acara			1	25.008.945	1,00	14.258.945	0,25	2.500.000	0,00	6.400.000		-	1	23.158.945	125,00	92,60	1,25					RAPPEDALITBANG	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum SKPD/Lintas SKPD	berita acara			1	26.617.840	1,00	17.684.990	0,25	4.365.700	0,00	4.200.000		(632.850)	1	25.617.840	125,00	96,24	1,25					RAPPEDALITBANG	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	berita acara			1	123.891.345	1,00	87.061.345	0,25		0,00	-		-	1	87.061.345	125,00	70,27	1,25					RAPPEDALITBANG	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen			4	986.317.006	1,00	173.257.556	1	73.527.924	2,00	263.281.160		449.001.554	4	959.068.194	100,00	97,24	4,00					RAPPEDALITBANG	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	1.045.954.575	100	382.905.171	100	188.915.418		29.104.530	46.700.000	37.424.700	69.038.500	0	182.267.730	0,00	96,48	100,00	565.172.901	1,00	0,54			RAPPEDALITBANG	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumbu anggaran utama untuk untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan	dokumen			1	188.915.418	0,25	29.104.530	0,25	46.700.000	0,25	37.424.700	0,25	69.038.500	1	182.267.730	100,00	96,48	1,00					RAPPEDALITBANG	
5	01	02	2.03		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	1.017.943.400	100	168.226.162	100	45.432.705		18.734.950	6.967.200	5.782.450	1	13.213.047	1	44.697.647	1,00	98,38	101,00	212.923.809	1,01	0,21			RAPPEDALITBANG
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	laporan			4	45.432.705	1,00	18.734.950	1	6.967.200	1,00	5.782.450	1	13.213.047	4	44.697.647	100,00	98,38						RAPPEDALITBANG	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	%	100	5.355.153.520	100	2.717.779.692	100	1.403.385.461	0,00	118.974.851	349.780.613	333.000.437	553.068.511	0	1.354.824.412	0,00	96,54	100,00	4.072.604.104	1,00	0,76			RAPPEDALITBANG	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	1.010.000.000	100	971.491.041	100	538.537.850	25,00	40.882.156	25	100.779.693	25	107.372.875	8	251.881.456	83	500.916.180	83,00	93,01	183,00	1.472.407.221	1,83	1,46	RAPPEDALITBANG
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			4	60.300.000	1,00	2.199.900	1	13.637.993	1	15.151.400	1	18.654.832	4	49.644.125	100,00	82,33	4,00					RAPPEDALITBANG	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pemerintahan	Laporan			7	76.410.000	1,00	8.614.700	1	20.654.500	2	5.245.000	3	34.230.031	7	68.744.231	100,00	89,97	7,00					RAPPEDALITBANG	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			4	90.855.850	1,00	17.519.955	1	18.170.400	1,00	16.371.600	1	22.239.865	4	74.301.820	100,00	81,78	4,00					RAPPEDALITBANG	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	Laporan			7	310.972.000	1,00	12.547.601	1	48.316.800	2,00	70.604.875	3	176.756.728	7	308.226.004	100,00	99,12	7,00					RAPPEDALITBANG	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	3.004.903.520	100	1.078.511.889	100	543.511.166	25,00	35.841.460	25	161.999.580	25	132.657.595	7	204.839.390	82	535.338.025	82,00	98,50	182,00	1.613.849.914	1,82	0,54	RAPPEDALITBANG
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			4	235.810.497	1,00	5.649.800	1	46.374.615	2	16.876.700		159.598.145	4	228.499.260	100,00	96,90	4,00					RAPPEDALITBANG	
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan			6	15.000.000	1,00	1.490.000	0	0	5	-	13.022.800	6	14.512.800	100,00	96,75	6,00					RAPPEDALITBANG		
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	laporan			6	150.000.000	2,00	22.305.800	1	78.461.425	2	49.734.840	1	(634.255)	6	149.867.810	100,00	99,91	6,00					RAPPEDALITBANG	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			4	66.069.850	1,00	4.231.260	1	17.936.740	2	21.150.738		22.609.700	4	65.928.438	100,00	99,79	4,00					RAPPEDALITBANG	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan			3	20.300.000	1,00	2.099.485	0,5	6.300.000	1	11.700.000		168.000	3	20.267.485	83,33	99,84	2,50					RAPPEDALITBANG	
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	laporan			4	56.330.819	1,00	65.115	1	12.926.800	1,00	33.195.317	1	10.075.000	4	56.262.232	100,00	99,88	4,00					RAPPEDALITBANG	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	1.340.250.000	100	667.776.762		321.336.445		42.251.235	87.001.340	92.969.967	96.347.665	0	318.570.207	0,00	99,14	100,00	986.346.969	1,00	0,74			RAPPEDALITBANG	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			4	105.836.445	1,00	12.233.335	1	29.891.975	1	41.766.998	1	21.717.475	4	105.609.783	100,00	99,79	4,00					RAPPEDALITBANG	
5	01	05	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan SKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan			3	130.000.000	1,00	28.551.320	0,5	24.057.174	0,5	16.430.000	1	59.761.840	3	128.800.334	100,00	99,08	3,00					RAPPEDALITBANG	
5	01	05	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen			4	43.000.000	1,00	1.466.580	1	10.124.735	1	20.638.800	1	9.994.050	4	42.224.165	100,00	98,20	4,00					RAPPEDALITBANG	

				4	5		6		7	8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15B*100%		17			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
5	01	05	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	lapran				3	42.500.000	0,00		0,5	22.927.436	1	14.134.169	1	4.874.300	3	41.935.925	83,33	98,67	2,50					RAPPEDALITBANG	
					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																								RAPPEDALITBANG		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN															0		0,00	0,00						RAPPEDALITBANG		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Days Saing Daerah	indeks	175		3.937.998.760	100	1.254.931.253	35	551.366.486	0,00	50.673.045		156.298.921		148.154.523	-	157.109.650	0	512.236.139	0,00	92,90	100,00	1.767.167.392	0,57	0,45	RAPPEDALITBANG
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	100		682.681.400	100	456.872.174	100	162.263.581		9.944.320		37.781.180		58.278.600		42.206.950	0	148.211.050	0,00	91,34	100,00	605.083.224	1,00	0,89	RAPPEDALITBANG
05	02	2.01	2.01	05	Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	laporan			-		-		-		-		-		0		0,00	0,00						RAPPEDALITBANG		
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkrola dengan baik	laporan				6	162.263.581	1,00	9.944.320	1	37.781.180	2	58.278.600	2	42.206.950	6	148.211.050	100,00	91,34						RAPPEDALITBANG	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kebijakan	Kebijakan	21		150.000.000	100	132.073.155		-	0,00					0		-	0,00	0,00	100,00	132.073.155	4,76	0,88	RAPPEDALITBANG		
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%	100		1.630.317.360	100	665.985.924	100	389.102.905		40.728.725		118.517.741		89.875.923		114.902.700	0	364.025.089	0,00	93,55	100,00	1.030.011.013	1,00	0,63	RAPPEDALITBANG
5	05	02	2.04	01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan dan perckayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen						2	389.102.905	1,00	40.728.725	0,5	118.517.741	0	89.875.923	0,5	114.902.700	2	364.025.089	100,00	93,55				RAPPEDALITBANG	
5	02				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					14.546.786.480.389		577.585.333.242		304.864.044.867		638.479.237		179.257.490.787		82.956.658.244		37.778.769.040		300.631.397.308		98,61		878.216.730.550		6,04	IKAD
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95		341.993.114.259	87	9.447.729.815	89	5.625.768.477	0	531.302.232	89	1.771.624.332	89	1.238.596.506		1.778.434.874	178	5.319.957.944	100,00	43,47	265,00	14.767.687.759	2,79	0,04	IKAD
5	02	01	2.01		Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah	Bulan	12		128.690.000	12	23.307.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0,00	0,00	12,00	23.307.000	1,00	0,18	IKAD		
6	02	01	2.01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	pertemuan				5	23.307.000	-	-	-	-	-	-	-	0		0,00	0,00						IKAD		
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12		269.662.044.531	12	7.417.690.352	12	4.306.395.488	3	404.248.759	12	1.506.714.115	12	1.067.677.779		1.244.229.018	27	4.222.869.671	125,00	45,58	39,00	11.640.560.023	3,25	0,04	IKAD
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN	Bulan				26	6.666.740.352	28	4.015.875.488	28	404.248.759	3	1.388.064.115	3	996.847.779		1.149.189.018	34	3.938.349.671	110,71	47,84				IKAD	
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengola Keuangan yang Dibayar	13 orang				140	748.950.000	12	290.520.000	-	4	118.650.000	3	70.830.000		95.040.000	7	284.520.000	25,00	16,46				IKAD		
5	02	01	2.05		Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12		289.000.000	12	49.528.000	12	-	-	12	-	-	-	-	12		100,00	0,00	24,00	49.528.000	2,00	0,17	IKAD		
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaiat Dinas beserta Atributnya	Stel				82	49.528.000	-	-	-	-	-	-	-	0		0,00	0,00						IKAD		
5	02	01	2.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Daerah	Bulan	12		31.379.569.728	12	1.245.703.948	12	846.212.989	3	86.117.112	12	141.290.740	12	76.961.930		366.782.728	27	671.152.510	125,00	33,58	39,00	1.916.856.458	3,25	0,06	IKAD
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket				1	6.561.357	1	6.570.105,00		1	6.546.520	-	-	-	1		6.546.520	100,00	99,64					IKAD	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit				79	159.791.036	6	302.784.865,00	2	42.866.970	3	63.555.000		12.727.654		178.586.001	5	297.735.625	83,33	87,66				IKAD	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	jenis				11	156.637.689	4	25.517.690,00	2	17.204.570	1	8.302.420	-	-	-	3		25.506.990	75,00	99,96				IKAD	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah Barang Cetak dan Pengabdian	jenis				9	120.133.799	1	41.651.516,00	-	-	-	-	2		24.031.270		16.983.520	2	41.014.790	0,00	0,00				IKAD
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	ok				562	442.580.067	316	469.688.813,00	22	26.045.572	43	62.886.800	43	40.203.006		171.213.207	108	300.348.585	26,00	13,72				IKAD	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5		175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			IKAD	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12		3.090.230.000	12	501.690.769	12	315.500.000	3	34.221.511	12	91.731.012	12	73.450.674		109.123.448	27	308.826.645	125,00	36,82	39,00	810.217.414	3,25	0,26	IKAD
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Jasa Komunikasi yang Dibayarkan	bulan				24	27.249.669	12	19.200.000	3	3.961.511	3	3.841.012	2	2.560.674		5.123.448	8	15.486.645	41,67	33,97				IKAD	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperbaiki	unit				6	9.321.100	3	12.740.000	-	-	-	-	-		9.480.000	3	9.480.000	0,00	0,00				IKAD		
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	orang				312	465.120.000	168	283.560.000	28	30.260.000	40	87.890.000	36	70.890.000		94.520.000	104	283.560.000	38,10	38,67				IKAD	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	10		412.230.000	4	209.809.746	4	157.660.000	1	6.714.850	4	31.888.465	-	20.506.123		58.299.680	5	117.409.118	125,00	35,40	9,00	327.218.864	0,90	0,79	IKAD
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan peritinan kendaraan dinas operasional atau lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Pejabat yang Dipelihara	unit					209.809.746	4	157.660.000	1	6.714.850	1	31.888.465	-	20.506.123		58.299.680	2	117.409.118	50,00	35,40				IKAD	
5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP Opini BPK	0		1.418.034.187.195	-	566.176.088.610	0	298.141.633.180	0	98.472.505	0	177.431.104.735	-	81.626.113.618		35.340.156.825	0	294.495.847.683	0,00	60,82	0,00	860.671.936.293	#DIV/0!	0,61	IKAD
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Derah	Dokumen	10		10.350.580.090	-	2.992.277.018	0	2.002.826.134	0	71.571.500	0	84.030.980		204.880.411		1.140.831.331	0	1.501.314.222	0,00	6,52	0,00	4.493.591.240	0,00	0,43	IKAD
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen				4	326.579.715	2	205.957.679	-	-	-	-	-	2		149.819.175	2	170.241.265	0,00	0,00				IKAD	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen				4	309.802.290	2	202.567.900	-	-	-	-	-	2		158.811.975	2	175.074.184	0,00	0,00				IKAD	
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen				48	109.360.000	46	80.360.000	-	-	-	-	-	-	0		0,00	0,00					IKAD		
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen				48	362.000.000	46	353.160.000	0	57.900.000	-	8.550.000	-	61.825.000	46	61.139.000	46	189.414.000	0,00	21,37				IKAD	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tetang Penjabaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	peraturan				3	895.659.441	2	556.359.475	0	4.238.500	-	54.920.480	-	35.040.512	2	353.728.451	2	447.927.943	0,00	10,68				IKAD	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tetang Penjabaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	peraturan				3	901.340.822	2	509.824.600	0	9.433.000		20.560.500	-	10.970.600	2	409.647.730	2	450.611.830	0,00	2,32				IKAD	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	peraturan				6	13.024.750	4	14.381.480	-	-	-	-	-	4		-	4	-	0,00	0,00				IKAD	
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota	OPD				226	74.510.000	60	80.215.000	-	-	-	112	60.360.000	-	7.685.000	112	68.045.000	0,00	0,00					IKAD	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Perbendaharaan Daerah	OPD	59		2.366.931.050	46	422.908.922	46	367.423.346	0	16.255.530	46	32.767.066	46	20.588.395		86.383.671	92	155.994.662	100,00	12,52	138,00	578.903.584	2,34	0,24	IKAD
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah yang Dikel																									

3					4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13*100%	15=7+13	16=15*100%	17													
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan		44.229.200	131		160	115.392.120	-	-	-	5.166.000	0	5.166.000	0,00													
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Laporan	10	5.610.521.955	4	778.476.226	2	570.382.468	0	10.645.475	2	74.237.109	2	83.499.692	315.641.423	4	484.023.699	100,00	12,70	8,00	1.262.499.925	0,80	0,23		IKAD		
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembayaan Pendapatan -LO dan Belan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembayaan Pendapatan -LO dan Belan	Dokumen			1	38.526.620	2	69.166.848	0	10.645.475	-	39.855.399	-	-	2	-	2	50.500.874	0,00	54,99					IKAD		
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran yang Dikoordinasikan	Jumlah Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran yang Dikoordinasikan	Laporan			4	64.047.680	2	82.760.192	-	-	-	30.444.850	-	19.462.888	2	24.091.292	2	73.999.030	0,00	36,79					IKAD		
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Dikonsolidasikan	Laporan			12	386.263.145	48	153.477.765	-	-	-	3.936.860	-	10.192.585	47	105.788.000	47	119.917.445	0,00	2,57						IKAD	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten yang Disusun	Peraturan			12	248.239.731	2	181.151.399	-	-	-	-	-	53.844.219	2	120.870.160	2	174.714.379	0,00	0,00						IKAD	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan	Orang			222	41.399.050	60	83.826.264	-	-	-	-	-	-	60	64.891.971	60	64.891.971	0,00	0,00						IKAD	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan keuangan BKAD sebagai SKPD	Jenis	15	1.399.706.154.100	6	561.982.426.444	3	295.201.001.302	-	-	3	177.240.069.580	3	81.317.145.120		33.797.300.400	6	292.354.515.100	100,00	61,36	12,00	854.336.941.544	0,80	0,61		IKAD	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	Jumlah bantuan Keuagan yang Disalurkan	Desa			271	535.513.903.587	518	281.809.241.000	-	-	218	174.006.891.580	183	77.465.149.620	117	30.336.809.900	518	281.808.851.100	84,17	63,23						IKAD	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan mendesak yang Dibidola	Kegiatan			1	10.970.155.806	4	3.039.572.202	-	-	-	-	-	-	4	193.476.000	4	193.476.000	0,00	0,00							IKAD
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dana Bagi Hasil Kabupaten yang Dibidola	Desa			530	15.498.367.051	518	10.352.188.000	-	-	218	3.233.178.000	183	3.851.995.500	117	3.267.014.500	518	10.352.188.000	84,17	31,23							IKAD
5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP Opini BPK	0	2.445.149.415	-	1.961.514.817	0	1.096.643.240	0	8.704.500	0	54.761.720	-	91.948.120		660.177.341	0	815.591.681	0,00	7,91	0,00	2.777.106.498	#DIV/0!	1,14		IKAD	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	OPD	59	2.445.149.415	46	1.961.514.817	46	1.096.643.240	0	8.704.500	46	54.761.720	46	91.948.120		660.177.341	92	815.591.681	100,00	7,91	138,00	2.777.106.498	2,34	1,14		IKAD	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Jumlah Standar Harga yang Terusun	dokumen			4	135.010.815	4	151.382.178	-	-	-	10.436.185	-	31.328.600	4	72.248.520	4	114.013.305	0,00	12,38						IKAD	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang bersertifikat	Dokumen			55	914.463.534	200	420.965.940	0	8.704.500	-	35.728.065	-	51.271.520	40	268.657.634	40	364.361.719	0,00	17,21							IKAD
5	02	03	2.01	0006	inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terinventarisir	Laporan			1	348.376.830	1	229.953.565	-	-	-	-	-	-	1	206.304.703	1	206.304.703	0,00	0,00							IKAD
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	laporan			4	428.881.450	2	216.682.262	-	-	-	8.597.470	-	9.348.000	2	76.860.010	2	94.805.480	0,00	11,83							IKAD
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan	Orang			60	134.782.188	60	77.659.295	-	-	-	-	-	-	60	36.106.474	60	36.106.474	0,00	0,00							IKAD
5	02				BADAN PENDAPATAN DAERAH			30.887.431.681		21.037.325.775		10.615.365.801		537.817.495		1.859.760.498		1.553.236.199		3.703.185.850		7.654.000.042		72,10		28.691.325.817		92,89		BAPENDA		
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indek	83	21.365.067.492		13.332.922.119		8.011.659.155		527.520.795		1.633.235.163		1.406.195.794		2.956.563.708	85,94	6.523.515.460	0,00	27,78						BAPENDA	
5	02	01	2.01		Perencanaan Pengangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	60	87.214.000	-	10.146.000										-	0,00	0,00	0,00	10.146.000	0,00	11,63				BAPENDA	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	60	15.189.018.532	24	9.721.880.132	12	6.767.947.152	3	436.765.484	3	1.345.179.808	3	1.173.735.979	3	2.470.086.425	12	5.425.767.696	25,00	26,57	36,00	15.147.647.828	60,00	99,73		BAPENDA	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12	6.618.097.152	3	436.765.484	3	1.291.829.808	3	1.132.041.979	3	2.325.012.425	12	5.185.649.696	75,00	26,36						BAPENDA	
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Orang					7	149.850.000	-	5	53.350.000	4	41.694.000	3	145.074.000	12	240.118.000	71,43	35,60							BAPENDA	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	60	265.700.000	12	53.050.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12,00	53.050.000	20,00	19,97		BAPENDA		
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	2.512.414.760	24	1.896.952.957	12	678.617.003	3	11.718.500	3	173.851.305	3	109.775.390	3	315.428.143	12	610.773.338	25,00	35,10	36,00	2.507.726.295	60,00	99,81		BAPENDA	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis					13	230.618.606	-	9	80.571.655	-	-	4	147.453.240	13	228.024.895	100,00	99,94							BAPENDA	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Jenis					3	115.180.397	-	2	81.331.650		11.310.000	1	11.330.670	3	103.972.320	66,67	70,61							BAPENDA	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ok					120	332.818.000	3	11.718.500	10	11.948.000	33	98.465.390	30	156.644.233	76	278.776.123	10,83	7,11						BAPENDA	
5	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		27	86.000.000	19	222.108.000		21.675.000	-	-						-	0,00	0,00	19,00	222.108.000	70,37	258,27				BAPENDA	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	2.710.360.000	24	1.193.830.855	12	464.130.000	3	69.282.670	3	100.077.050	3	98.693.825	3	146.643.650	12	414.697.195	25,00	36,49	36,00	1.608.528.050	60,00	59,35		BAPENDA	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					12	19.200.000	3	3.602.670	3	4.087.050	3	3.968.825	3	3.979.650	12	15.638.195	75,00	40,05						BAPENDA	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit					6	32.100.000	-	-	-	-	-	6	2.884.000	6	2.884.000	0,00	0,00							BAPENDA	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang					26	412.830.000	8	65.680.000	8	95.990.000	6	94.725.000		139.780.000		396.175.000	61,54	39,16						BAPENDA	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	334.360.000	2.567	234.954.175	12	79.290.000	3	9.754.141	3	14.127.000	3	23.990.600	3	24.405.490	12	72.277.231	25,00	30,12	2.579,00	307.231.406	4.298,33	91,89		BAPENDA	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Bea Perolehan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Bea Perolehan	Unit					4	79.290.000	1	9.754.141	1	14.127.000		23.990.600	1	24.405.490	3	72.277.231	50,00	30,12						BAPENDA	
5	02	01	2.09	009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit																0,00	0,00							BAPENDA	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	9.522.364.189	7.704.403.656	*****	2.603.706.646	*****	10.296.700	226.525.335	45.251.890.960	147.040.405	*****	746.622.142	*****	1.130.484.582	22,49	8,53									BAPENDA	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Rp.	278.223.581.030	9.522.364.189	*****	7.704.403.656	*****	2.603.706.646	*****	10.296.700	*****	226.525.335	45.251.														

				4	5			6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/100%		15=7+13		16=15/100%		17
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5	04	02	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis	%	100	205.000.000	0	0	100	238.506.200	0	-	0	-	0	-	120	185.196.374	120	185.196.374	120,00	77,65	120,00	185.196.374	1,20	90,34	BKPSDM	
5	04	2	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, liti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	orang	70	205.000.000	0	0	15	238.506.200	0	-	0	-	0	-	120	185.196.374	120	185.196.374	800,00	77,65	120,00	185.196.374	1,71	90,34	BKPSDM
5	04	02	2.02	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	100	12.289.443.000	105	1.906.056.201	100	705.211.640	0	17.074.829	0	80.187.000	26	329.199.955	113	253.180.806	139	679.642.590	139,00	96,37	244,00	2.585.698.791	2,44	21,04	BKPSDM	
5	4	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah jabatan pimpinan tinggi jabatan fungsional kepemimpinan dan prajabatan	laporan	524	12.289.443.000	820	1.101.276.201	86	705.211.640	0	17.074.829	0	80.187.000	26	329.199.955	113	253.180.806	139	679.642.590	161,63	96,37	959,00	1.780.918.791	1,83	14,49	BKPSDM
6	01			INSPEKTORAT DAERAH			9.321	35.788.719.371	1.229	17.195.924.844	489	8.953.041.559	49	974.441.083	81	2.679.594.030	173	2.321.048.443	169	2.647.401.818	472	8.622.485.374	96,58	96,31	1.701,28	25.818.410.218	18,25	72,1412	INSPEKTORAT	
6	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Administrasi Perkantoran		8.176	33.577.721.903	769	12.895.092.582	129	6.967.861.696	22	735.083.083	40	2.399.485.830	32	1.739.801.114	38	1.975.146.964	132	6.849.516.991	102,26	98,30	900,91	19.744.609.573	11,02	58,8027	INSPEKTORAT	
06	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		132	28.722.285.084	588	11.085.002.368	24	6.140.612.824	5	636.465.726	6	2.115.536.276	4	1.525.990.414	9	1.765.407.653	24	6.043.400.069	100,00	98,42	612,00	17.128.402.437	463,64	59,6345	INSPEKTORAT	
06	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	-	480	10.700.602.368	12	5.963.134.219	3	614.825.726	3	2.083.076.276	3	1.482.710.414	3	1.692.561.653	12	5.873.174.069	100,00	98,49	492,00	16.573.776.437			INSPEKTORAT	
06	01	01	2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	108	384.400.000	12	177.478.605	2	21.640.000	3	32.460.000	1	43.280.000	6	72.846.000	12	170.226.000	100,00	95,91	120,00	554.626.000			INSPEKTORAT	
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	449	777.461.000	50	544.973.094	20	206.906.000	0	-	13	126.337.238	7	80.027.000		-	20	206.364.238	100,00	99,74	70,00	751.337.332	15,58	96,6399	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	-	50	544.973.094	20	206.906.000	0	-	13	126.337.238	7	80.027.000	-	-	20	206.364.238	100,00	99,74	70,00	751.337.332			INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		7.046	1.201.333.480	101	632.445.924	45	389.927.781	8	67.983.423	12	86.976.800	12	91.002.875	13	143.806.458	45	389.769.556	100,00	99,96	146,00	1.222.215.480	2,07	101,7382	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	-	35	118.310.000	3	59.233.344	1	14.743.875		-	1	12.251.985	1	32.220.115	3	59.215.975	100,00	99,97	38,00	177.525.975			INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	-	37	129.677.000	3	38.041.040	1	8.537.970		-	1	7.796.190	1	21.687.764	3	38.021.924	100,00	99,95	40,00	167.698.924			INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	Paket	-	3	8.182.000	3	1.170.000		-		-	1	975.000	1	1.963.650	3	4.108.650	100,00	99,83	6,00	12.290.650			INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	-	2	3.600.000	12	1.799.000	3	450.000	2	300.000	4	600.000	3	449.000	12	1.799.000	100,00	100,00	14,00	5.399.000			INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	12	99.650.000	12	49.848.727		-	6	24.729.000	3	13.851.000	3	11.259.000	12	49.839.000	100,00	99,98	24,00	149.489.000			INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	12	473.026.924	12	236.890.000	2	43.081.578	4	61.947.800	2	55.528.700	4	76.226.929	12	236.785.007	100,00	99,96	24,00	709.811.931			INSPEKTORAT	
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	429	773.574.871	26	254.703.142	36	137.327.091	8	28.533.934	8	31.400.801	8	25.297.375	15	50.071.710	39	135.303.820	108,33	98,53	65,00	390.006.962	15,15	50,4162	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	-	2	38.807.034	12	20.160.000	2	3.055.331	4	6.100.801	2	3.053.400	3	6.097.800	11	18.307.332	91,67	90,81	13,00	57.114.366			INSPEKTORAT	
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	-	12	60.000.000	12	29.500.000	3	7.600.000		-		-	9	21.900.000	12	29.500.000	100,00	100,00	24,00	89.500.000			INSPEKTORAT	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	-	12	155.896.108	12	87.667.091	3	17.878.603	3	25.300.000	3	22.073.975	3	22.073.910	12	87.496.488	100,00	99,81	24,00	243.392.596			INSPEKTORAT	
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	120	2.103.067.468	4	177.968.054	4	93.088.000	1	2.100.000	1	39.234.715	1	17.483.450	1	15.861.143	4	74.679.308	97,86	80,22	7,91	252.647.362	6,60	12,0133	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	UNIT	-	4	177.968.054	4	93.088.000	1	2.100.000	1	39.234.715	1	17.483.450	1	15.861.143	4	74.679.308	97,86	80,22	7,91	252.647.362			INSPEKTORAT	
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan		529	6.442.132.193	312	3.642.698.942	168	1.492.747.896	27	239.358.000	31	246.437.500	53	486.364.329	55	457.733.158	166	1.429.892.987	99,03	95,79	478,37	5.072.591.929	90,43	78,7409	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Internal		515	5.389.808.893	278	3.026.848.142	132	1.168.090.896	19	162.333.300	23	160.344.100	37	372.268.409	51	410.316.758	130	1.105.262.567	98,77	94,62	408,37	4.132.110.709	79,30	76,6653	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LAPORAN	-	144	197.310.400	20	146.584.970	4	24.450.000	6	31.200.000	5	25.950.000	5	63.861.000	20	145.461.000	100,00	99,23	164,00	342.771.400			INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LAPORAN	-	53	767.071.600	50	340.143.600	5	21.300.000	9	52.200.000	8	80.400.000	28	182.566.000	50	336.466.000	100,00	98,92	103,00	1.103.537.600			INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Hasil Revisi Laporan Kinerja	LAPORAN	-	45	222.629.500	10	134.202.830	2	29.234.500	2	25.358.900	3	44.814.119	3	29.100.000	10	128.507.519	100,00	95,76	55,00	351.137.019			INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Hasil Revisi Laporan Keuangan	LAPORAN	-	6	52.500.000	3	36.150.000	1	12.600.000	1	7.800.000	1	5.250.000		10.500.000	3	36.150.000	100,00	100,00	9,00	88.650.000			INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Desa	LAPORAN	-	2	1.037.200.544	20	114.760.000	1	7.800.000	8	62.850.000	10	36.724.350	20	113.974.350	100,00	99,32	22,00	1.151.174.894			INSPEKTORAT			
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	KESEPAKATAN	-	5	321.328.298	5	169.023.465	1	26.876.500		-	3	85.478.540	1	48.445.408	5	160.800.448	100,00	95,13	10,00	482.128.746			INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	dokumen	-	23	428.807.800	24	227.226.031	5	40.072.300	4	37.185.200	9	67.525.750	4	39.120.000	22	183.903.250	93,21	80,93	45,37	612.711.050			INSPEKTORAT	
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		14	1.052.323.300	34	615.850.800	36	324.657.000	8	77.024.700	8	86.093.400	16	114.095.920	4	47.416.400	36	324.630.420	100,00	99,99	70,00	940.481.220	500,00	89,3719	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	laporan	-	22	154.874.000	24	135.060.000	6	37.518.900	4	25.016.700	13	44.435.600	1	28.079.000	24	135.050.200	100,00	99,99	46,00	299.924.200			INSPEKTORAT	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	LAPORAN	-	12	460.976.800	12	189.597.000	2	39.505.800	4	61.076.700	3	69.660.320	3	19.337.400	12	189.580.220	100,00	99,99	24,00	650.557.020			INSPEKTORAT	
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		1.024	3.251.416.147	148	658.133.320	192	492.431.967	0	-	10	33.670.700	88	94.883.000	76	214.521.696	174	343.075.396	90,63	69,67	322,00	1.001.208.716	31,45	30,7930	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		408	1.834.001.878	3	108.865.000	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	3,00	108.865.000	0,74	5,9359	INSPEKTORAT				
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	rekomendasi	-	3	108.865.000		-		-		-	-	0	0	0,00	0,00									

				4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
7	01			KECAMATAN BARUSIAHE				14.546.503.145		5.390.120.640	100,0	2.754.168.321		342.355.792		887.831.585		643.718.909		823.239.127	100,00	2.697.145.413		97,93		8.087.266.053		55,60	KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	13.472.297.660	84,00	5.153.427.840	87	2.639.232.241	0,00	315.577.792	0,00	876.555.585		587.399.409	88,94	802.697.127	88,94	2.582.229.913	102,23	97,84	172,94	7.735.657.753	182,04	57,42	KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	12.306.686.175	100,00	4.676.316.011	100	2.446.143.186	25,00	295.616.692	25,00	834.390.285	25,00	545.241.309	25	717.464.599	100	2.392.712.885	100,00	97,82	200,00	7.069.028.896	200,00	57,44	KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan			59,00	4.474.516.011	22	2.401.221.666	22	295.616.692	22,00	823.170.285	22	534.021.309	22	695.024.599	22	2.347.832.885	100,00	97,78				KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			24,00	201.800.000	12	44.921.520	0	-	3,00	11.220.000	3	11.220.000	6	22.440.000	12	44.880.000	100,00	99,91				KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	%	100	121.746.800	100,00	18.750.000										0	-	0,00	0,00	100,00	18.750.000	100,00	15,40	KECAMATAN BARUSIAHE		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket			25,00	18.750.000									0	-	0,00	0,00						KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	415.326.355	100,00	159.119.429	100	67.134.155	20,00	2.641.100	33,03	10.870.300	28,37	14.566.700	18,60	35.565.528	100	63.643.628	100,00	94,80	200,00	222.763.057	200,00	53,64	KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			40,00	3.268.400	17	1.177.150	0	-	17,00	1.176.900			17	1.176.900	100,00	99,98						KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			1.214,00	26.765.700	666	13.650.625	0	-	318,00	7.802.400	348	5.826.200		666	13.628.600	100,00	99,84					KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			405,00	8.357.300	115	2.644.330	115	2.641.100					115	2.641.100	100,00	99,88						KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			2.361,00	4.904.400	1780	2.482.900	0	-	310,00	1.891.000	1.470	514.500		1.780	2.405.500	100,00	96,88					KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan			0,00	0	0	0	0	-					0	-	0,00	0,00						KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			198,00	115.823.629	100	47.179.150	0	-		7	8.226.000	93	35.565.528	100	43.791.528	100,00	92,82					KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	111.423.655	200,00	117.750.000										0	-	0,00	0,00	200,00	117.750.000	200,00	105,68	KECAMATAN BARUSIAHE		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			8,00	36.300.000									0	-	0,00	0,00						KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			8,00	81.450.000									0	-	0,00	0,00						KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	261.551.500	100,00	121.391.300	100	92.484.900	5,56	12.550.000	52,78	24.245.000	19,44	20.791.400	22,22	34.817.000	100	92.403.400	100,00	99,91	200,00	213.794.700	200,00	81,74	KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12,00	27.471.300	12	15.712.400	0	-	4,00	4.000.000	4	1.966.400	4	9.717.000	12	15.683.400	100,00	99,82					KECAMATAN BARUSIAHE
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			3,00	4.040.000	1	1.420.000	0	-	1,00	1.420.000				1	1.420.000	100,00	100,00					KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan			24,00	89.880.000	12	75.352.500	2	12.550.000	3,00	18.825.000	3	18.825.000	4	25.100.000	12	75.300.000	100,00	99,93					KECAMATAN BARUSIAHE
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	255.563.175	100,00	60.101.100	100	33.470.000	25,00	4.770.000	25,00	7.050.000	25	6.800.000	25	14.850.000	100	33.470.000	100,00	100,00	200,00	93.571.100	200,00	36,61	KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan dan diwariskan Pihak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikelola	unit			2,00	60.101.100	1	33.470.000	1,00	4.770.000	1,00	7.050.000		6.800.000		14.850.000	1,00	33.470.000	100,00	100,00				KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	438.007.740	88,41	95.769.400	87	58.150.750	0	26.778.000		6.156.000		17.004.000	88,94	8.208.000	88,94	58.146.000	102,23	99,99	177,35	153.915.400	186,68	35,14	KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	189.107.740	100,00	39.225.400	100	33.526.750	75	20.622.000		25	12.900.000		25	12.900.000	100	33.522.000	100,00	99,99	200,00	72.747.400	200,00	38,47	KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Laporan			2,00	17.467.600	1	10.450.950	1	10.450.000				1	10.450.000	100,00	99,99							KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen			2,00	21.757.800	2	23.075.800	1	10.172.000			1	12.900.000		2	23.072.000	100,00	99,98						KECAMATAN BARUSIAHE
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100	120.900.000	100,00	56.544.000	100	24.624.000	25,00	6.156.000	25,00	6.156.000	25	4.104.000	25	8.208.000	100	24.624.000	100,00	100,00	200,00	81.168.000	200,00	67,14	KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			24,00	40.362.012	12	24.624.000	3	6.156.000	3,00	6.156.000	3	4.104.000	3	8.208.000	12	24.624.000	100,00	100,00					KECAMATAN BARUSIAHE
7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	68.000.000	0,00															0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	60.000.000	0,00															0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	29	151.704.000	10,00	36.939.000	1	12.334.950						1	12.334.000	1	12.334.000	100,00	99,992	11,00	49.273.000	37,93	32,48		KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	121.704.000	100,00	36.939.000	100	12.334.950	0	-			100	12.334.000	100	12.334.000	100,00	99,992	200,00	49.273.000	200,00	40,49			KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			4,00	36.939.000	1	12.334.950	0	-			1	12.334.000	1	12.334.000	100,00	99,992							KECAMATAN BARUSIAHE
7	01	03	2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	100	30.000.000	0,00	0	0													0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN BARUSIAHE	
7	01	04		PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Perda Perkada dan Kegiatan	Perda Perkada dan Kegiatan	8/8/13	141.704.000		14.300.000														0,00	14.300.000	0,00	10,09		KECAMATAN BARUSIAHE	

				4	5			6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15G*100%		17						
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	121.704.000	100,00	14.300.000								100,00	14.300.000	100,00	11,75	KECAMATAN BARUSJAJHE							
7	01	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		0,00	14.300.000														KECAMATAN BARUSJAJHE						
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	20.000.000	0,00	0								0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN BARUSJAJHE							
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan	5	162.589.190	2,00	58.645.000	1	34.210.380	0	-	1	34.195.500		1	34.195.500	100,00	99,957	3,00	92.840.500	60,00	57,10	KECAMATAN BARUSJAJHE			
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	%	100	162.589.190	100,00	58.645.000	100	34.210.380	0	-	100	34.195.500		1	34.195.500	1,00	99,957	101,00	92.840.500	101,00	57,10	KECAMATAN BARUSJAJHE			
7	01	05	2.01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Penguasaan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Penguasaan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Orang		300,00	58.645.000	250	34.210.380	0	-		250	34.195.500		1	34.195.500	0,40	99,957					KECAMATAN BARUSJAJHE			
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintah an Desa	95	180.200.555	38,00	31.039.400	19	10.240.000	0	-	19,00	5.120.000		19	10.240.000	100,00	100,00	57,00	41.279.400	60,00	22,91	KECAMATAN BARUSJAJHE			
7	01	06	2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	180.200.555	100,00	31.039.400	100	10.240.000	0	-	50,00	5.120.000		100	10.240.000	100,00	100,00	200,00	41.279.400	200,00	22,91	KECAMATAN BARUSJAJHE			
7	01	06	2.01	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Disubmisikan dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		38,00	14.820.000	38	5.120.000	0	-	38,00	5.120.000		38	5.120.000	100,00	100,00						KECAMATAN BARUSJAJHE			
7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		0,00	0	0	0	0	-		0	-	0,00	0,000								KECAMATAN BARUSJAJHE			
7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		38,00	16.219.400	38	5.120.000	0	-		38	5.120.000		38	5.120.000	100,00	100,00					KECAMATAN BARUSJAJHE			
7	01			KECAMATAN BERASTAGI			6.010.095.422.556		12.681.406.739	100	8.904.274.503	6,5	581.311.078	20,17	1.795.893.996	17,03	1.516.795.863	47,38	4.218.755.581	91,11	8.112.756.518	91,11	20.794.163.257		0,35	KECAMATAN BERASTAGI			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	3.982.378.546.128		8.523.508.674	89	5.465.391.824	0,01	557.765.518		1.788.193.996	0,036	1.444.459.613	28,68	1.567.676.912	28,73	5.358.096.039	32,29	98.037	28,73	13.881.604.713	30,25	0,35	KECAMATAN BERASTAGI
7	01	01	2.02	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	100	38.494.267.239	5888	7.484.587.454	100	4.653.106.809	11,48	534.255.668		1.454.031.938	27,72	1.289.803.497	27,72	1.289.803.497	67	4.567.894.600	66,92	98,169	5.954,92	12.052.482.054	5.954,92	31,31	KECAMATAN BERASTAGI
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		36	4.435.786.809	34	499.355.668	34	1.384.197.938	34	1.237.453.497	34	1.200.940.324	136	4.321.947.427	377,78	97,434						KECAMATAN BERASTAGI		
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen		12	217.320.000	3	34.900.000	3	69.834.000	3	52.350.000	3	52.350.000	12	209.434.000	100,00	96,371						KECAMATAN BERASTAGI		
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	100	127.300.000	46	34.500.000					-						46,00	34.500.000	0,46	0,27			KECAMATAN BERASTAGI		
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	100	51.342.188.728	4403	158.278.982	100	163.242.455	1,04	1.700.000	32,15	52.478.900		-	57,37	93.658.615	90,56	147.837.515	90,56	4.493,56	306.116.497	4.493,56	0,60	KECAMATAN BERASTAGI	
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket				10	5.813.090			10	5.813.090		10	5.813.090	100,00	100,000						KECAMATAN BERASTAGI			
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	paket			2750	66.276.705			1.759	37.073.150			29.203.555	1.759	66.276.705	63,96	100,000					KECAMATAN BERASTAGI			
7	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket		12	5.090.360			12	5.090.360			12	5.090.360	100,00	100,000							KECAMATAN BERASTAGI			
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket		4	4.502.300			4	4.502.300			4	4.502.300	100,00	100,000							KECAMATAN BERASTAGI			
7	01	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan		12	5.000.000	3	1.700.000				3	1.700.000	25,00	34,000								KECAMATAN BERASTAGI			
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		12	76.560.000					12	64.455.060		12	64.455.060	100,00	84,189						KECAMATAN BERASTAGI			
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	100	131.644.935	5039	255.723.626	100	17.862.560	0,00	-				99,09	17.700.000	99,09	99,090	5.138,09	273.423.626	5.138,09	207,70		KECAMATAN BERASTAGI		
7	01	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	paket				3	17.862.560					4	17.700.000			0,00	0,000					KECAMATAN BERASTAGI			
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	100	217.451.400	35	182.753.265	100	594.010.000	3,67	21.809.850	46,01	273.283.158	24,38	144.838.616	26,20	155.629.800	100	595.561.424	100,26	100,261	135,26	778.314.689	135,26	357,93	KECAMATAN BERASTAGI
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan		12	20.400.000	3	4.199.850	3	4.413.158	3	3.403.616		9	12.016.624	75,00	58,905							KECAMATAN BERASTAGI		
7	01	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan		4	7.870.000			2	3.610.000		4	4.174.800	6	7.784.800	150,00	98,917							KECAMATAN BERASTAGI		
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan		12	565.740.000	3	17.610.000	3	265.260.000	3	141.435.000	3	151.455.000	12	575.760.000	100,00	101,771						KECAMATAN BERASTAGI		
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	100	339.700.000	5739	322.519.100	100	37.170.000	0,00	-	22,60	8.400.000	26,41	9.817.500	29,28	10.885.000	78,30	29.102.500	78,30	78.296	5.817,30	351.621.600	5.817,30	103,51	KECAMATAN BERASTAGI
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perawatan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit		3	37.170.000			3	8.400.000	3	9.817.500	6	10.885.000	12,00	29.102.500	400,00	78,296						KECAMATAN BERASTAGI		
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	67.972.671.728		146.967.400	89	140.451.010	0,03	23.545.560	5,48	7.700.000		-	77,75	109.200.350	83,27	140.445.910	93,56	99,996	83,27	287.413.310	87,65	0,42	KECAMATAN BERASTAGI
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan	kegiatan	100	35.587.471.728	10	73.907.400	100	106.451.010	14,09	14.995.560		-		85,91	91.450.350	100	106.445.910	100,00	99,995	110,00	180.353.310	110,00	0,51	KECAMATAN BERASTAGI	
7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan				2	14.995.560	1	14.995.560			1	14.995.560	50,00	100,000	1,00						KECAMATAN BERASTAGI			
7	01	02	2.01	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen		2	91.455.450			2	91.455.450		2	91.450.350	2	91.450.350	100,00	99,994							KECAMATAN BERASTAGI		
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	urusan	100	228.852.000	10	68.060.000	100	34.000.000	25,15	8.550.000	22,65	7.700.000		-	52,21	17.750.000	100,00	34.000.000	100,00	100,000	110,00	102.060.000	110,00	44,60	KECAMATAN BERASTAGI
7	01	02	2.02	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan				12	34.000.000	3	8.550.000	3	7.700.000		6	17.750.000	12	34.000.000	100,00	100,000	12,00					KECAMATAN BERASTAGI	

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=138*100%		15=7+13		16=156*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89		139.920.000	86	107.076.000	89	42.437.600	29	11.320.200			30	14.940.800	32,64	16.176.600	91,64	42.437.600	102,97	100.000	177,64	149.513.600	199,60	106,86	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100		94.920.000	8.682,00	53.562.000	100	26.261.000	100	11.320.200			2	14.940.800		100,00	26.261.000	100,00	100.000	8.782,00	79.823.000	8.782,00	84,10	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan			2	18.300.000	1	11.320.200	1	11.320.200						1,00	11.320.200	100,00	100.000					KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen			2	35.262.000	2	14.940.800					2,00	14.940.800		2,00	14.940.800	100,00	100.000					KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100		25.000.000	7.661,00	53.514.000	100	16.176.600	-				100	16.176.600	100,00	16.176.600	100,00	100.000	7.761,00	69.690.600	7.761,00	278,76	KECAMATAN DOLAT RAKYAT		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			13	53.514.000	6	16.176.600					6	16.176.600	6,00	16.176.600	100,00	100.000						KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100		8.000.000												-		0,00		-	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100		12.000.000												-		0,00		-	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	105		45.000.000	1	8.600.000	6	14.979.600		-				6	14.979.600	6,00	14.979.600	100,00	100.000	7,00	23.579.600	6,67	52,40	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100		45.000.000	5.342,00	8.600.000	100	14.979.600		-				100	14.979.600	100,00	14.979.600	100,00	100.000	5.442,00	23.579.600	5.442,00	52,40	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			1	8.600.000	6	14.979.600					6	14.979.600	6,00	14.979.600	100,00	100.000						KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Penegakan Perda dan Perkada	Perda dan Perkada	14		72.602.175													-		0,00		-	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100		68.602.175													-		0,00		-	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100		4.000.000													-		0,00		-	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diseleenggarakan Kecamatan	Urusan	5		47.397.825	2	78.541.200	1	24.275.707		-				1	24.275.707		1,00	24.275.707	100,00	100.000	3,00	102.816.907	60,00	216,92	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	%	100		47.397.825	9.878,00	78.541.200	100	24.275.707		-				100	24.275.707	100,00	24.275.707	100,00	100.000	9.978,00	102.816.907	9.978,00	216,92	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang			200	78.541.200	275	24.275.707					275	24.275.707	275,00	24.275.707	100,00	100.000						KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintah an Desa	35		63.294.240													-		0,00		-	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
7	01	06	2.01	Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100		63.294.240														0,00		-	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
7	01			KECAMATAN JUHAR	Bulan	60		19.087.580.196	24	1.257.723.843	12	2.962.891.866	3	390.177.853	3	1.052.170.979	3	646.730.559	3	746.274.339	12	2.835.353.730		95,70		4.093.077.573		21,44	KECAMATAN JUHAR	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91		16.849.579.455		1.000.935.435	89	2.830.573.706	89,00	356.688.383		1.038.970.979		578.919.869		728.474.339	89	2.703.053.570	100,00	95,495	89,00	3.703.989.005	97,80	21,98	KECAMATAN JUHAR
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	60		14.738.233.900		469.110.000	12	2.597.258.246	3,00	338.739.856	3	956.621.867	3	823.692.120	3	687.454.335	12	2.476.508.178	100,00	95,351	12,00	2.945.618.178	20,00	19,99	KECAMATAN JUHAR
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan			26	243.930.000	26	2.552.358.356	26,00	327.519.856	26	945.401.867	26	512.472.120	26	646.234.335	104	2.431.628.178	400,00	95,270					KECAMATAN JUHAR
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			12	225.180.000	12	44.899.890	3,00	11.220.000	3,00	11.220.000	3	11.220.000	3	11.220.000	12	44.880.000	100,00	99,956					KECAMATAN JUHAR
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	73		121.440.000		18.750.000											0,00	0,000	0,00	18.750.000	0,00	15,44	KECAMATAN JUHAR		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket				18.750.000											0,00	0,000						KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60		1.016.651.635		325.083.696	12	95.925.570	3,00	12.098.535	3	33.638.070	3	16.860.390	3	29.422.000	12	92.018.995	100,00	95,927	12,00	417.102.691	20,00	41,03	KECAMATAN JUHAR
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				2.760.200	2	1.239.490			2	1.238.900				2	1.238.900	100,00	99,952					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				111.700.750	3	22.316.520	1,00	12.098.535	1	6.098.850	1	4.110.390		3	22.307.775	100,00	99,961					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket				36.090.396	2	3.381.380			1	3.380.140				1	3.380.140	50,00	99,963					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				11.549.350	2	4.920.180			1	4.920.180				1	4.920.180	50,00	100,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen				3.060.000											0,00	0,000						KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.06	09	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				159.923.000	400	64.068.000			120	18.000.000	85	12.750.000	132	29.422.000	337	60.172.000	84,25	93,919				KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	18		214.720.000														0,00		-	0,00	0,0000	KECAMATAN JUHAR		

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17			
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pemenuhng Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemenuhng Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60		257.211.840		123.590.063	12	103.919.890	3,00	5.849.992	3	40.343.542	3	30.007.359	3	24.856.084	12	101.056.977	100,00	97,245	12,00	224.647.040	20,00	87,3393	KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan					15.650.063	12	12.000.000	3,00	2.204.992	3	2.388.542	3	2.327.359	3	2.236.084	12	9.156.977	100,00	76,308					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan					2.880.000	1	1.420.000			1	1.420.000				1	1.420.000	100,00	100,000					KECAMATAN JUHAR		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan					105.060.000	12	90.499.890	3,00	3.645.000	3	36.535.000	3	27.680.000	3	22.620.000	12	90.480.000	100,00	99,978					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuhng Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pemenuhng Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara	unit	9		501.322.080		64.401.676	1	33.470.000		-	1	8.367.500	1	8.360.000	1	16.741.920	1	33.469.420	100,00	99,998	1,00	97.871.096	11,11	19,5226	KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Bea cukainya	unit				64.401.676	1	33.470.000			1	8.367.500	1	8.360.000	1	16.741.920	1	33.469.420	100,00	99,998					KECAMATAN JUHAR	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91		1.308.945.429		188.085.108		98.334.430	3,00	33.489.470					1	17.800.000	4	98.316.430	0,00	99,982	4,00	286.401.538	4,40	21,8803	KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan	Kegiatan	18		551.233.045		75.098.958		57.366.230	3,00	33.489.470		-	1	23.858.760		4	57.348.230	0,00	99,969	4,00	132.447.188	22,22	24,0274	KECAMATAN JUHAR		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan				29.985.670	2	20.388.140	2,00	20.370.140					2	20.370.140	100,00	99,912						KECAMATAN JUHAR		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen				45.113.288	2	36.978.090	1,00	13.119.330		1	23.858.760		2	36.978.090	100,00	100,000						KECAMATAN JUHAR		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Urusan	132		659.088.384		112.986.150		40.968.200		1	13.200.000	1	9.968.200	3	17.800.000	5	40.968.200	0,00	100,000	5,00	153.954.350	3,79	23,3587	KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan				112.986.150	5	40.968.200			1	13.200.000	1	9.968.200	3	17.800.000	5	40.968.200	100,00	100,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang di Koordinasikan pemeliharaannya	Unit		66.416.000															0,00	-	#DIV/0!	0,0000			KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Layanan Perizinan Non Perizinan dan Kewenangan Lainnya	Urusan	680		32.208.000														0,00	-	0,00	0,0000			KECAMATAN JUHAR	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	32		236.192.000															0,00	-	0,00	0,0000			KECAMATAN JUHAR	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	kegiatan	32		171.776.000														0,00	-	0,00	0,0000			KECAMATAN JUHAR	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Dokumen	8		53.680.000														0,00	-	0,00	0,0000			KECAMATAN JUHAR	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada	perda dan Perkada	17		285.995.760															0,00	-	0,00	0,0000			KECAMATAN JUHAR	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	9		277.943.760														0,00	-	0,00	0,0000			KECAMATAN JUHAR	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah perda dan perkada yang dikoordinasikan penerapan dan penagakannya	Perda dan Perkada	8		8.052.000														0,00	-	0,00	0,0000			KECAMATAN JUHAR	
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan	8		390.763.552		68.703.300		33.983.730			1	33.983.730				1	33.983.730	0,00	100,000	1,00	102.687.030	12,50	26,2786	KECAMATAN JUHAR		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penguasaan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Urusan	5		390.763.552		68.703.300		33.983.730						0		0,00	0,000	0,00		68.703.300	0,00	17,5818	KECAMATAN JUHAR		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	orang				68.703.300	520	33.983.730			1	33.983.730			1	33.983.730	0,19	100,000						KECAMATAN JUHAR		
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintah an Desa	100		16.104.000															0,00	-	0,00	0,0000			KECAMATAN JUHAR	
7	01	06	201		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang difasilitasi yang diberi Rekomendasi dan dikoordinasikan Pembinaan dan Pengawasannya	Pemerintah an Desa	100		16.104.000														0,00	-	0,00	0,0000			KECAMATAN JUHAR	
7	01				KECAMATAN KABANJAHE	Bulan			75.689.066.445		18.260.691.276	100	10.862.331.553	25,00	878.984.496	25,00	2.195.667.623	25,00	3.918.621.848	25	3.524.526.537	100	10.517.800.504		96,83		28.778.491.780		38,02	KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01			PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95		48.300.439.141	83	13.662.150.047	89	6.708.595.328	11,00	851.734.496	60,00	2.149.197.623	8,00	1.584.964.661	10	1.893.196.673	89	6.479.093.453	100,00	96,58	172,00	20.141.243.500	181,05	41,70	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		41.706.966.028	98	10.685.732.156	100	5.693.333.398	11,00	657.979.496	25,00	1.941.890.913	30,00	1.355.745.211	34	1.523.428.103	100	5.479.043.723	100,00	96,24	198,00	16.164.775.879	198,00	38,76	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	41		9.442.267.256	46	5.404.814.398	11,00	657.979.496	11,00	1.871.130.913	12	1.258.225.211	12	1.403.228.103	46	5.190.563.723	100,00	96,04						KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		1.331.790.000	12	288.519.000			3,00	70.760.000	4	97.520.000	8	120.200.000	12	288.480.000	100,00	99,99						KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100		223.248.000	100	38.250.000	100	9.179.400				100	6.125.400	100	6.125.400	100,00	66,73	200,00	44.375.400	200,00		19,88	KECAMATAN KABANJAHE		
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit				1	9.179.400						1	6.125.400	1	6.125.400	100,00	66,73						KECAMATAN KABANJAHE		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	51		38.250.000														0,00	0,000					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		8.892.331.975.888	96	445.028.155	100	180.102.930		55,00	69.956.710	5	7.540.000	36	90.918.640	96	168.415.350	96,00	93,51	192,00	613.443.505	192,00	0,01	KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4		6.540.950	4	3.479.640			0,00	-		4	3.476.800	4	3.476.800	100,00	99,92						KECAMATAN KABANJAHE		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	50		298.209.015	47	109.372.220			45,00	55.293.310	2	53.727.840	47	109.021.150	100,00	99,68							KECAMATAN KABANJAHE		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16		15.745.900	16	8.380.150			16,00	8.372.600			16	8.372.600	100,00	99,91							KECAMATAN KABANJAHE		

					4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17							
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket		4	17.125.300	4	9.196.920		3,00	6.290.800		1	2.906.000	4	9.196.800	100,00	100,00		KECAMATAN KABANJAHE						
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		285	107.407.000	218	49.674.000		0,00	-	16	7.540.000	173	30.808.000	189	38.348.000	86,70	77,20		KECAMATAN KABANJAHE					
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen														0,00	0,000		KECAMATAN KABANJAHE						
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	351.133.181	100	1.513.320.226											100,00	1.513.320.226	100,00	430,98	KECAMATAN KABANJAHE				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		8	27.570.000											0,00	0,000		KECAMATAN KABANJAHE						
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit														0,00	0,000		KECAMATAN KABANJAHE						
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	1.485.750.226											0,00	0,000		KECAMATAN KABANJAHE						
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4.266.077.054	97	829.967.050	100	790.589.000	24,00	193.755.000	20,00	129.170.000	30	213.579.450	25	250.563.000	99	787.067.450	99,00	99,55	196,00	1.617.034.500	196,00	37,90	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	32.997.050	12	12.000.000					7,00	4.959.450	5	3.558.000	12	8.517.450	100,00	70,98					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		5	7.680.000	5	3.530.000					5,00	3.530.000			5	3.530.000	100,00	100,00					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	789.600.000	12	775.059.000	3,00	193.755.000	2,00	129.170.000	3,00	205.090.000	4	247.005.000	12	775.020.000	100,00	99,99					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	863.781.680	66	149.852.460	100	44.570.000		15,00	8.180.000	15,00	8.100.000	65	28.286.930	95	44.566.930	95,00	99,99	161,00	194.419.390	161,00	22,51	KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bina Karya Pemeliharaan Pajak dan Perintisan Dinas Operasional atau Dinas Lainnya	Jumlah Kerosakan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan dibayarkan Pajak dan Dinas Lainnya	Unit		6	149.852.460	4	44.570.000			1,00	8.180.000	1,00	8.100.000	2	28.286.930	4	44.566.930	100,00	99,99					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	867.535.370	78	121.676.000	87	31.366.700	25,00	9.010.000			25,00	8.436.000	36	12.216.000	86	29.662.000	98,85	94,57	164,00	151.338.000	188,51	17,44	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	792.559.370	82	121.676.000	100	29.713.700	34,00	9.010.000			30	8.436.000	35	12.216.000	99	29.662.000	99,00	99,83	181,00	151.338.000	181,00	19,09	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	02	2.01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		12	30.442.000	12	13.908.000					4	6.840.000	8	7.068.000	12	13.908.000	100,00	100,00					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		2	91.234.000	2	15.805.700	1,00	9.010.000			0,4	1.596.000	0,6	5.148.000	2	15.754.000	100,00	99,67					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada/Kegiatan	Perda/Perkada/Kegiatan	8/8/13	78.965.424	0/0/1	5.175.000	0/1/2	7.520.000					0/1/2	7.520.000	0/1/2	7.520.000	100,00	100,00	0/1/2	12.695.000	0/1/2	16,08	KECAMATAN KABANJAHE		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	73.597.424	52	5.175.000	100	7.520.000					100	7.520.000	100	7.520.000	100,00	100,00	152,00	12.695.000	152,00	17,25	KECAMATAN KABANJAHE		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	5.175.000	1	7.520.000									0,00	0,000							KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	95	26.169.600.000	25	4.399.536.229	19	4.078.026.700	1,00	18.240.000	1,00	46.470.000	10,00	2.299.732.787	6	1.603.468.464	18	3.967.911.251	94,74	97,30	43,00	8.367.447.480	45,26	31,97	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	124.000.000	69	14.690.000	100	18.240.000	100,00	18.240.000				100	18.240.000	100,00	100,00	169,00	32.930.000	169,00	26,56	KECAMATAN KABANJAHE			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	14.690.000	1	18.240.000	1,00	18.240.000					1	18.240.000	100,00	100,00							KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	26.045.600.000	97	4.384.846.229	100	4.059.786.700		10,00	46.470.000	65,00	2.299.732.787	23	1.603.468.464	98	3.949.671.251	98,00	97,29	195,00	8.334.517.480	195,00	32,00	KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit		15	2.932.987.640	23	2.781.392.804					19,00	1.855.199.727	3	864.217.744	22	2.719.417.471	95,65	97,77					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas		20	1.451.858.589	20	1.278.393.896			1,00	46.470.000	8,00	444.533.060	11	739.250.720	20	1.230.253.780	100,00	96,23					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan	10	2.403.865.108.288	2	64.904.000	1	25.643.425					1	25.488.400			1	25.488.400	100,00	99,40	3,00	90.392.400	30,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasan Kepala Daerah	%	100	2.403.865.108.288	100	64.904.000	100	25.643.425					100	25.488.400			100	25.488.400	100,00	99,40	200,00	90.392.400	200,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Menantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Menantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Orang		200	64.904.000	180	25.643.425					180	25.488.400			180	25.488.400	100,00	99,40					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	Pemerintah an Desa	40	32.140.000	16	7.250.000	8	2.000.000						8	2.000.000	8	2.000.000	100,00	100,00	24,00	9.250.000	60,00	28,78	KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	06	201		Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintah an Desa	40	32.140.000	16	7.250.000	8	2.000.000						8	2.000.000	8	2.000.000	100,00	100,00	24,00	9.250.000	60,00	28,78	KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	06	201	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Wilayah Kecamatan	Laporan		8	7.250.000	8	2.000.000						8	2.000.000	8	2.000.000	100,00	100,00					KECAMATAN KABANJAHE		
7	01				KECAMATAN KUTABULUH				17.024.701.440		5.608.112.680		2.373.795.220		301.336.156		728.933.262		596.324.979		622.937.774		2.249.532.171	94,77		7.857.644.851		46,15	KECAMATAN KUTABULUH	

			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
7	1	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	86	15.914.110.719	86	5.377.299.680	89	2.234.942.920	89	271.870.156	89	712.408.262	89	528.748.679	89	597.652.774	356	2.110.679.871	400,00	94,440	442,00	7.487.979.551	513,95	47,05		KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	14.531.024.565	100	4.612.630.236	100	2.017.746.855	100	239.075.449	100	666.996.173	100	483.398.747	100	509.087.735	400	1.898.558.104	400,00	94,093	500,00	6.511.188.340	500,00	44,81		KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			17	1.975.347.855	17	230.525.449	17	657.896.173	16	469.278.747	15	498.497.735	65	1.856.198.104	382,35	93,968							KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	01	203	07	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			12	42.399.000	3	8.550.000	3	9.100.000	3	14.120.000	3	10.590.000	12	42.360.000	100,00	99,908							KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	116.865.087	100	47.920.500										0	-	0,00	0,000	100,00	47.920.500	100,00	41,00		KECAMATAN KUTABULUH		
7	1	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	442.696.323	100	253.795.350	100	76.737.065	100	15.150.000	100	18.473.800	100	18.450.000	100	24.565.330	400	76.639.130	400,00	99,872	500,00	330.434.480	500,00	74,64		KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1	1.405.600	0		1	1.402.500	-	-	-	1	1.402.500	100,00	99,779								KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			23	12.666.205	0		23	12.618.500	-	-	-	23	12.618.500	100,00	99,623								KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	1	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			12	5.350.940	0		10	4.452.800	-	-	2	875.000	12	5.327.800	100,00	99,568							KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			2	1.684.320	0		0	-	-	2	1.680.330	2	1.680.330	100,00	99,763								KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			313	55.630.000	101	15.150.000	0	-	123	18.450.000	141	22.010.000	365	55.610.000	116,61	99,964							KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	1	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	281.148.148	100	199.920.000	100	35.840.000	0	-	0	-	-	100	35.800.000	100	35.800.000	100,00	99,888	200,00	235.720.000	200,00	83,84		KECAMATAN KUTABULUH		
07	1	1	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1	35.840.000	0		0	-	-	-	1	35.800.000	1	35.800.000	100,00	99,888							KECAMATAN KUTABULUH	
07	01	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	286.482.000	100	91.615.576	100	60.049.000	100	11.294.707	100	16.463.289	100	15.727.642	100	11.639.039	400	55.124.677	400,00	91,799	500,00	146.740.253	500,00	51,22		KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	21.000.000	3	3.854.707	3	4.033.289	3	4.027.642	3	4.160.039	12	16.075.677	100,00	76,551								KECAMATAN KUTABULUH
7	1	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			2	9.250.000	0		1	4.990.000	1	4.260.000	-	2	9.250.000	100,00	100,000								KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	29.799.000	3	7.440.000	3	7.440.000	3	7.440.000	3	7.479.000	12	29.799.000	100,00	100,000								KECAMATAN KUTABULUH
07	01	01	208	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	255.894.596	100	171.418.018	100	44.570.000	100	6.350.000	100	10.475.000	100	11.172.290	100	16.560.670	400	44.557.960	400,00	99,973	500,00	215.975.978	500,00	84,40		KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	1	209	2	Penyediaan jasa pemeliharaan/mayor pemeliharaan/pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	Unit			4	44.570.000	1	6.350.000	1	10.475.000	1	11.172.290	1	16.560.670	4	44.557.960	100,00	99,973							KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	349.724.500	86	111.552.000	89	83.225.800	89	28.266.000	89	12.000.000	89	25.959.800	89	17.000.000	356	83.225.800	400,00	100,000	442,00	194.777.800	513,95	55,69		KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	2	201	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	183.064.000	100	48.252.000	100	35.225.800	100	20.266.000	0	-	100	14.959.800		-	200	35.225.800	200,00	100,000	300,00	83.477.800	300,00	45,60		KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	2	201	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan			2	15.120.000	1	15.120.000	0	-	-	-	-	1	15.120.000	50,00	100,000								KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	2	201	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	Dokumen			2	20.105.800	1	5.146.000	0	-	1	14.959.800		-	2	20.105.800	100,00	100,000							KECAMATAN KUTABULUH	
07	01	02	202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	124.900.000	100	63.300.000	100	48.000.000	100	8.000.000	100	12.000.000	100	11.000.000	100	17.000.000	400	48.000.000	400,00	100,000	500,00	111.300.000	500,00	89,11		KECAMATAN KUTABULUH	
07	01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan			12	48.000.000	3	8.000.000	3	12.000.000	3	11.000.000	3	17.000.000	12	48.000.000	100,00	100,000								KECAMATAN KUTABULUH
07	01	02	202	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	21.760.500	-											0	-	0,00	0,000	0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN KUTABULUH		
07	01	02	202	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	20.000.000	-											0	-	0,00	0,000	0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN KUTABULUH		
7	1	2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	86	220.000.000	86	23.045.000	89	4.800.000	89	1.200.000	89	1.200.000	89	1.200.000	89	1.200.000	356	4.800.000	400,00	100,000	442,00	27.845.000	513,95	12,66		KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	2	201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	20.000.000	100	23.045.000	100	4.800.000	100	1.200.000	100	1.200.000	100	1.200.000	100	1.200.000	400	4.800.000	400,00	100,000	500,00	27.845.000	500,00	139,23		KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			2	4.800.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	4	4.800.000	200,00	100,000								KECAMATAN KUTABULUH
7	1	3	205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	100	200.000.000												0	-	0,00	0,000	0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN KUTABULUH		
7	1	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	index Penegakan Perda/ Perkada	Perda dan Perkada	1	139.511.221	1	13.999.000	2	6.170.000	0	-	2	1.725.000	2	1.360.000	4	3.085.000	8	6.170.000	400,00	100,000	9,00	20.169.000	900,00	14,46		KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	04	201,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	139.511.221	100	13.999.000	100	6.170.000	0	-	100	1.725.000	100	1.360.000	100	3.085.000	300	6.170.000	300,00	100,000	400,00	20.169.000	400,00	14,46		KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	04	201,00	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah	Laporan			2	6.170.000	0		1	1.725.000	1	1.360.000	2	3.085.000	4	6.170.000	200,00	100,000								KECAMATAN KUTABULUH

				4	5			6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17						
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
7	1	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan pemerintahan Umum yang diseleenggarakan kecamatan	Urusan	5	354.175.000	1	69.217.000	1	35.056.500	0	-	0	1	35.056.500	-	1	35.056.500	100,00	100,000	2,00	104.273.500	40,00	29,44	KECAMATAN KUTABULUH		
7	1	05	201.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	%	100	354.175.000	100	69.217.000	100	35.056.500	0	-	0	100	35.056.500	-	100	35.056.500	100,00	100,000	200,00	104.273.500	200,00	29,44	KECAMATAN KUTABULUH		
	7	1	05	201.00	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan PancasilaPelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Warga yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		796	35.056.500	0	0	-	796	35.056.500		796	35.056.500	100,00	100,000					KECAMATAN KUTABULUH			
7	1	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pemerintahan Desa yang di Bina dan Di awasi	Pemerintah Desa	16	47.180.000	16	13.000.000	16	9.600.000	0	-	16	1.600.000	16	4.000.000	48	9.600.000	300,00	100,000	64,00	22.600.000	400,00	47,90	KECAMATAN KUTABULUH		
7	1	06	201.00	Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	47.180.000	100	13.000.000	100	9.600.000	0	-	100	1.600.000	100	4.000.000	300	9.600.000	300,00	100,000	400,00	22.600.000	400,00	47,90	KECAMATAN KUTABULUH		
	7	1	06	201.00	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan (Kecamatan Kutabuluh)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Kutabuluh)	Laporan		4	9.600.000	0		1	1.600.000	2	4.000.000	1	4.000.000	4	9.600.000	100,00	100,000				KECAMATAN KUTABULUH		
7	01			KECAMATAN LAUBALENG			100	12.511.770.125		4.366.199.798		2.283.849.829		264.803.268		671.711.629		418.653.551		739.425.466		2.094.593.914		91,71		6.460.793.712		51,64	KECAMATAN LAU BALENG
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	11.647.098.425	86	4.230.564.698	89	2.187.843.149	82	249.784.268	83,00	664.511.629	83	418.653.551	86,96	666.392.666	86,96	1.999.342.114	97,71	91,384	172,96	6.229.906.812	182,06	53,4889	KECAMATAN LAU BALENG
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	10.500.178.345	60	3.700.848.176	100	1.992.466.984	30	231.949.218	30,00	636.059.679	30	351.535.051	10	586.487.021	100	1.806.030.969	100,00	90,643	160,00	5.506.879.145	160,00	52,4456	KECAMATAN LAU BALENG
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		34,00	3.549.568.176	17	1.949.658.354	17	231.949.218	17,00	621.899.679	16	340.915.051	16	568.787.021	66	1.763.550.969	388,24	90,454				KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		24	151.280.000	12	42.808.630		4,00	14.160.000	4,00	10.620.000	4	17.700.000	12	42.480.000	100,00	99,232					KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	65.000.000	50	27.000.000									0	-	0,00	0,000	50,00	27.000.000	50,00	41,5385	KECAMATAN LAU BALENG		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakiaasn Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaasn Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		36	27.000.000									0	-	0,00	0,000						KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	396.220.080	70	181.930.977	100	87.157.165	0	15,00	4.231.500	60,00	35.987.600	25	46.691.900	100	86.911.000	100,00	99,718	170,00	268.841.977	170,00	67,8517	KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		40,00	4.834.667	5	2.394.590	0		10,00	1.898.000	5	496.500	15	2.394.500	300,00	99,996						KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		718,00	38.282.715	27	17.139.955	0	15,00	4.231.500	20,00	5.120.000	30	7.571.400	65	16.922.900	240,74	98,734					KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		225,00	12.891.000	11	3.344.730	0		10	3.327.600	0	-	10	3.327.600	90,91	99,488						KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3.924,00	6.774.800	3	2.703.890	0		5,00	2.692.000	0	-	5	2.692.000	166,67	99,560						KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen		608,00	119.147.795	270	61.574.000	0		153,00	22.950.000	250	38.624.000	403	61.574.000	149,26	100,000						KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	92.500.000	50	21.700.000									0	-	0,00	0,000	50,00	21.700.000	50,00	23,4595	KECAMATAN LAU BALENG		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	42.500.000										0	-	0,00	0,000						KECAMATAN LAU BALENG	
7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1	21.700.000									0	-	0,00	0,000						KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	375.100.000	85	155.534.405	100	73.749.000	40	12.975.050	45,00	16.930.450	10,00	23.840.900	5	19.279.800	100	73.026.200	100,00	99,020	185,00	228.560.605	185,00	60,9332	KECAMATAN LAU BALENG
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		24	26.164.405	12	12.000.000	3	2.955.050	3,00	1.900.450	3,00	3.800.900	3	2.829.800	12	11.486.200	100,00	95,718					KECAMATAN LAU BALENG
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		12,00	10.510.000	2	1.420.000	0			3	1.420.000	3	1.420.000	3	1.420.000	150,00	100,000						KECAMATAN LAU BALENG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		96	118.860.000	48	60.329.000	12	10.020.000	12,00	15.030.000	12,00	20.040.000	12	15.030.000	48	60.120.000	100,00	99,654					KECAMATAN LAU BALENG
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	218.100.000	50	192.251.140	100	34.470.000	40	4.860.000	40,00	7.290.000	1,00	13.933.945	82	33.373.945	82,00	96,820	132,00	225.625.085	132,00	103,4503	KECAMATAN LAU BALENG		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laksanakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dihayarkan.Biaya dan Perizinannya	unit		2	73.241.140	1	34.470.000	1	4.860.000	1,00	7.290.000	1,00	7.290.000	1	13.933.945	4	33.373.945	400,00	96,820					KECAMATAN LAU BALENG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit		1	119.010.000									0	-	0,00	0,000						KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	120.000.000	86	36.115.400	89	53.645.310	82	15.019.000	83,00	7.200.000		86,96	30.864.800	86,96	53.083.800	97,71	98,953	172,96	89.199.200	182,06	74,3327	KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	42.000.000	60	36.115.400	100	30.845.310	30	15.019.000			70	15.264.800	100	30.283.800	100,00	98,180	160,00	66.399.200	160,00	158,0933	KECAMATAN LAU BALENG		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		2	15.964.800	1	15.529.280	1	15.019.000					1	15.019.000	100,00	96,714						KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		2	20.150.600	2	15.316.030	0					2	15.264.800	2	15.264.800	100,00	99,666					KECAMATAN LAU BALENG	

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=138*100%		15=7+13		16=156*100%		17			
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100	10.000.000	65	57.360.000	100	22.800.000	0		40,00	7.200.000			40,00	15.600.000	80	22.800.000	80,00	100,000	145,00		80.160.000	145,00	801,6000	KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			24	57.360.000	12	22.800.000	0		4,00	7.200.000			8	15.600.000	12	22.800.000	100,00	100,000						KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	38.000.000												0	-	0,00	0,000	0,00		-	0,00	0,0000	KECAMATAN LAU BALENG		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	30.000.000												0	-	0,00	0,000	0,00		-	0,00	0,0000	KECAMATAN LAU BALENG		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan	29	130.000.000	2	17.452.100,00	1	12.286.160	0							1	12.194.000	1	12.194.000	100,00	99,250	3,00	29.646.100	10,34	22,8047	KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	90.000.000	40	17.452.100,00	100	12.286.160	0							100	12.194.000	100	12.194.000	100,00	99,250	140,00	29.646.100	140,00	32,9401	KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			1	17.452.100,00	1 Laporan	12.286.160	0							1	12.194.000	1	12.194.000	0,00	99,250						KECAMATAN LAU BALENG
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	80	40.000.000												0	-	0,00	0,000	0,00		-	0,00	0,0000	KECAMATAN LAU BALENG		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perda Perkada dan Kegiatan	8/8/3	355.171.700	1	24.300.000											0	-	0,00	0,000	1,00		24.300.000	0,00	6,8418	KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	323.171.700	365	24.300.000											0	-	0,00	0,000	365,00		24.300.000	365,00	7,5192	KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan			1	24.300.000											0	-	0,00	0,000							KECAMATAN LAU BALENG
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	32.000.000													0	-	0,00	0,000	0,00		-	0,00	0,0000	KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Urusan	5	59.500.000	2	54.477.600	1	30.075.210	0								500	29.974.000	500	29.974.000	50,000,00	99,663	502,00	84.451.600	10,040,00	141,9355	KECAMATAN LAU BALENG
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan Kepala Daerah	%	100	59.500.000	80	54.477.600	100	30.075.210	0								500	29.974.000	500	29.974.000	500,00	99,663	580,00	84.451.600	580,00	141,9355	KECAMATAN LAU BALENG
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelatarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang			1000	54.477.600	500	30.075.210	0								500	29.974.000	500	29.974.000	100,00	99,663					KECAMATAN LAU BALENG
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pemerintah an Desa	75	200.000.000	15	3.290.000											0	-	0,00	0,000	15,00		3.290.000	20,00	1,6450	KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	06	2.01		Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	200.000.000	207,5	3.290.000											0	-	0,00	0,000	207,50		3.290.000	207,50	1,6450	KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	06	2.01	03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen			15	3.290.000											0	-	0,00	0,000							KECAMATAN LAU BALENG
7	1				KECAMATAN MARDINDING			12.160.122.614	36	4.393.207.622	100	2.076.591.405		243.977.329		620.243.514		507.846.461		572.199.160	100	1.944.266.464		93,63		4.705.301.447		38,69	KECAMATAN MARDINDING		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	11.352.190.057	85	4.157.003.044	89	1.956.150.325	89	215.323.659	89	605.323.514	89	457.249.331	89	545.928.880	89	1.823.825.384	100,00	93,235	174,00		5.980.828.428	183,16	52,68	KECAMATAN MARDINDING
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	10.579.824.835	12	3.751.159.452	100	1.792.082.630	100	198.841.486	100	567.371.311	100	416.627.890	100	480.726.789	100	1.663.567.476	100,00	92,829	112,00		5.414.726.928	112,00	51,18	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	-	-	36	3.621.899.452	16	1.747.296.380	39	188.851.486	39	567.371.311	39	406.637.890	39	460.746.789	16	1.623.607.476	100,00	92,921							KECAMATAN MARDINDING
7	1	1	2.05	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-	24	129.260.000	12	44.786.250	4	9.990.000	0	-	4	9.990.000	4	19.980.000	12	39.960.000	100,00	89,224							KECAMATAN MARDINDING
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	55.900.000	28	15.669.640			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000	28,00		15.669.640	28,00	28,03	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.06	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	22	15.669.640			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000							KECAMATAN MARDINDING
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	353.345.222	52	183.794.785	100	74.200.695	0	-		16.874.165	29,44	21.842.200	0	34.659.330	100	73.375.695	100,00	98,888	152,00		257.170.480	152,00	72,78	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	6	2.207.873	5	1.215.590	0	-	5	1.215.590	0	-	0	-	5	1.215.590	100,00	100,000							KECAMATAN MARDINDING
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	50	42.653.763	36	18.010.625	0	-	6	7.654.295	0	-	30	10.356.330	36	18.010.625	100,00	100,000							KECAMATAN MARDINDING
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	26	4.021.049	18	2.004.280	0	-	18	2.004.280	0	-	0	-	18	2.004.280	100,00	100,000							KECAMATAN MARDINDING
7	1	1	2.07	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	4	4.452.250	3	2.342.200	0	-	0	-	3	2.342.200	0	-	3	2.342.200	100,00	100,000							KECAMATAN MARDINDING
7	1	1	2.07	8	Facilitasi Kunjungan Tamu		-	-	-	-	6	1.480.000	0	-	0	-	0	-	6	-	6	1.480.000	100,00	100,000							KECAMATAN MARDINDING
7	1	1	2.07	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	327	130.459.850	256	49.148.000	0	-	40	6.000.000	130	19.500.000	86	22.823.000	256	48.323.000	100,00	98,321							KECAMATAN MARDINDING

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	18.000.000	100	21.435.076			0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	100,00	21.435.076	100,00	119,08		KECAMATAN MARDINGING
7	1	1	2.07	3 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket			2	21.435.076				-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00					KECAMATAN MARDINGING	
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	277.620.000	38	104.438.015	100	55.397.000	13,06	7.232.173	25,59	14.177.038	12,00	12.534.241	100	19.468.761	100	53.412.213	100,00	96,42	138,00	157.850.228	138,00	56,86	KECAMATAN MARDINGING
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		14	14.558.015	12	9.000.000	3	2.272.173	3	4.207.038	1	1.299.241	4	4.488.761	12	12.267.213	100,00	136,30					KECAMATAN MARDINGING	
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			2	1.380.000	0			0		0	-	0	-	2								KECAMATAN MARDINGING	
7	1	1	2.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		24	89.880.000	12	45.017.000	3	4.960.000	8	9.970.000	3	11.235.000	10	14.980.000	12	41.145.000	100,00	91,40					KECAMATAN MARDINGING	
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	67.500.000	100	80.506.076	100	34.470.000	26,83	9.250.000	74,61	6.901.000	18,12	6.245.000	100	11.074.000	100	33.470.000	100,00	97,10	200,00	113.976.076	200,00	168,85	KECAMATAN MARDINGING
7	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Unit		2	80.506.076	1	34.470.000	1	9.250.000	1	6.901.000	1	6.245.000	1	11.074.000	1	33.470.000	100,00	97,10					KECAMATAN MARDINGING	
7	1	1	2.09	2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor								0	0		0	-	0	-	0	-	0	-						KECAMATAN MARDINGING	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	522.000.001	85	133.426.003	89	71.426.860	89	28.653.670	0	9.000.000	89	15.502.910	89	18.270.280	89	71.426.860	100,00	100,00	174,00	204.852.863	183,16	39,24	KECAMATAN MARDINGING
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	445.000.000	23	101.243.403	100	39.742.860	59,718	23.733.670	0	-	39,01	15.502.910	100	506.280	100	39.742.860	100,00	100,00	123,00	140.986.263	123,00	31,68	KECAMATAN MARDINGING
7	1	2	2.01	1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		4	19.704.600	2	12.306.470	2	12.306.470	0	-	0	-	0	-	2	12.306.470	100,00	100,000					KECAMATAN MARDINGING	
7	1	2	2.01	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		6	81.538.803	2	27.436.390	1	11.427.200	0	-	1	15.502.910	1	506.280	2	27.436.390	100,00	100,000					KECAMATAN MARDINGING	
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	57.000.001	56	32.182.600	100	31.684.000	100	4.920.000	100	9.000.000	0	-	100	17.764.000	100	31.684.000	100,00	100,000	156,00	63.866.600	156,00	112,0467	KECAMATAN MARDINGING
7	1	2	2.02	18 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		24	32.182.600	24	31.684.000	4	4.920.000	8	9.000.000	0	-	24	17.764.000	24	31.684.000	100,00	100,000					KECAMATAN MARDINGING	
7	1	2	2.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			8	10.000.000				0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000	0,00	-	0,00	0,0000		KECAMATAN MARDINGING
7	1	2	2.04	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			8	10.000.000				0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000	0	-	0	0		KECAMATAN MARDINGING
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dikoordinasikan	Kegiatan	-	53.932.544				0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000	0	-	0	0		KECAMATAN MARDINGING
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	53.932.544				0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000	0	-	0,00	0		KECAMATAN MARDINGING
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pengakan Perda dan Perkada	Perda dan Perkada	-	60.000.000	#####	24.049.465	2	2.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-	2.000.000	2	2.000.000	100,00		26.049.465		43,4158	KECAMATAN MARDINGING
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	50.000.000	48	24.049.465	2	2.000.000	0	0	0	-	0	-	1	2.000.000	2	2.000.000	100,00		50,00	26.049.465	50,00	52,0989	KECAMATAN MARDINGING
7	1	6	201	2 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		15	24.049.465	1	2.000.000	0	0	0	-	0	-	1	2.000.000	1	2.000.000							KECAMATAN MARDINGING	
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	5.000.000				0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000	0	-	0,00	0		KECAMATAN MARDINGING
7	1	4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			-	5.000.000				0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000	0	-	0	0		KECAMATAN MARDINGING
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Dieleenggarakan Kecamatan	Urusan	1	148.000.000	1	60.129.110	1	35.094.220	0	0	0	-	1	35.094.220	0	-	1	35.094.220			2,00	95.223.330	200,00	64,3401	KECAMATAN MARDINGING
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	%	100	148.000.000	41	60.129.110	100	35.094.220	0	0	0	-	100	35.094.220	0	-	100	35.094.220			141,00	95.223.330	141,00	64,3401	KECAMATAN MARDINGING
7	1	5	2.01	1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		900	60.129.110	510	35.094.220	0	0	0	-	510	35.094.220	0	-	510	35.094.220			1.410,00				KECAMATAN MARDINGING	
7	1	6		PROGRAM PEMBIANAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi	Pemerintah an Desa	12	24.000.012	12	18.600.000	12	11.920.000	0	4	5.920.000	0	-	12	6.000.000	12	11.920.000			24,00	30.520.000	200,00	127,1666		KECAMATAN MARDINGING
7	1	6	2.01	1 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		24	11.640.000	24	5.960.000	0	4	2.960.000	0	-	24	3.000.000	24	5.960.000								KECAMATAN MARDINGING	
7	1	6	2.01	2 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		24	6.960.000	12	5.960.000	0	4	2.960.000	0	-	12	3.000.000	12	5.960.000								KECAMATAN MARDINGING	
7	01			KECAMATAN MERDEKA				15.870.273.059		3.661.879.126	100	2.401.492.586	25	278.388.439	25,00	789.742.912	25	638.442.130	25	616.354.985	100	2.322.928.466		96,73	5.964.287.592		37,5815		KECAMATAN MERDEKA
7	01	01		PROGRAM PEMUNJANG URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	14.801.001.682	54,00	3.535.353.059	89	2.249.624.814	20	266.760.439	30	765.738.282	30	554.655.450	20	590.834.985	100	2.177.989.156	112,36	96,816	154,00	5.713.342.215	162,11	38,6011	KECAMATAN MERDEKA

3					4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	13.402.313.095	40,00	3.279.648.927	100	2.057.125.009	25	232.522.518	25	719.924.060	25	512.749.358	25	537.042.461	100	2.002.238.397	100,00	97,332	140,00	5.281.887.324	140,00	39,4103	KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan					12	2.006.605.379	3	232.522.518	3	698.624.430	3	507.049.358	3	525.642.461	12	1.963.838.767	100,00	97,869					KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12	50.519.630			6	21.299.630	3	5.700.000	3	11.400.000	12	38.399.630							KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	133.786.400	-	-											0			0,00	-	0,00	0,0000	KECAMATAN MERDEKA	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	540.126.238	40,00	159.082.394,00	100	78.912.025	25	17.310.345	25	14.097.470	50	17.400.000			100	48.807.815	100,00	61,851	140,00	207.890.209	140,00	38,4892	KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket					1	4.960.650			1	4.960.650					1	4.960.650	100,00	100,000					KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket					1	11.775.095	1	11.612.115							1	11.612.115	100,00	98,616					KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket					1	8.725.950	1	5.698.230	1	3.027.720					2	8.725.950	200,00	100,000					KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket					1	3.925.330			1	3.925.100					1	3.925.100	100,00	99,994					KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					1	2.184.000			1	2.184.000					1	2.184.000	100,00	100,000					KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					250	47.341.000					100	17.400.000	150	20.964.750	250	38.364.750	100,00	81,039					KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	10.000.000	-	-											0			0,00	-	0,00	0,0000	KECAMATAN MERDEKA	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	435.886.511	20,00	57.240.754,00	100	78.077.780	25	16.927.576	25	13.956.752	25	22.400.092	25		100	53.284.420	100,00	68,245	120,00	110.525.174	120,00	25,3564	KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	15.000.000	3	2.047.576		1.196.752	3	2.560.092	3	1.585.994	9	7.390.414	75,00	49,269					KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1	2.840.000			1	2.840.000			3		4	2.840.000	400,00	100,000					KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	60.237.780	3	14.880.000	2	9.920.000	4	19.840.000	3	15.597.780	12	60.237.780	100,00	100,000					KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	278.889.438	1,00	56.073.582,00	100	35.510.000			75	17.760.000	25	2.106.000			100	19.866.000	100,00	55,945	101,00	75.939.582	101,00	27,2293	KECAMATAN MERDEKA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	624.447.092	54,00	47.057.000,00	89	80.829.660	25	11.628.000	34	24.004.630	30	17.935.300			89	53.567.930	100,00	66,273	143,00	100.624.930	150,53	16,1142	KECAMATAN MERDEKA
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	301.833.588	20,00	21.677.000,00	100	39.789.660			50	15.112.630	50	17.935.300			100	33.047.930	100,00	83,057	120,00	54.724.930	120,00	18,1308	KECAMATAN MERDEKA
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Laporan					1	18.135.460			1	11.393.730					1	11.393.730	100,00	62,826					KECAMATAN MERDEKA
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen					2	21.654.200			1	3.718.900	1	17.935.300			2	21.654.200	100,00	100,000					KECAMATAN MERDEKA
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100	278.613.504	8,00	25.380.000,00	100	41.040.000	30	11.628.000	20	8.892.000			50	20.520.000	100	41.040.000	100,00	100,000	108,00	66.420.000	108,00	23,8395	KECAMATAN MERDEKA
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan					12	41.040.000	3	11.628.000	3	8.892.000			6	20.520.000	12	41.040.000	100,00	100,000					KECAMATAN MERDEKA
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dilimpahkan kepada Camat	%	100	28.000.000													0			0,00	-	0,00	0,0000	KECAMATAN MERDEKA	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	16.000.000													0			0,00	-	0,00	0,0000	KECAMATAN MERDEKA	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	24	84.000.000	2,00	12.174.867	6	19.034.177					6	19.026.890			6	19.026.890	100,00	99,962	8,00	31.201.757	33,33	37,1449	KECAMATAN MERDEKA
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	44.000.000	20,00	12.174.867	100	19.034.177					100	19.026.890			100	19.026.890	100,00	99,962	120,00	31.201.757	120,00	70,9131	KECAMATAN MERDEKA
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan					5	19.034.177					5	19.026.890			5	19.026.890	100,00	99,962					KECAMATAN MERDEKA
01	03	2.05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	100	40.000.000													0			0,00	-	0,00	0,0000	KECAMATAN MERDEKA	
7	01	04			PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan	8/8/24	80.000.000	2/2/6	6.820.000	2/2/6	9.491.030					2/2/2	9.491.030			2/2/2	9.491.030	96,23	100,000	25,00	16.311.030	50,00	20,39	KECAMATAN MERDEKA
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	56.000.000	20,00	6.820.000	100	9.491.030					100	9.491.030			100	9.491.030	100,00	100,000	120,00	16.311.030	120,00	29,1268	KECAMATAN MERDEKA
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan					1	9.491.030					1	9.491.030			1	9.491.030	100,00	100,000					KECAMATAN MERDEKA

4				5				6				7				8				9				10				11				12				13=9+10+11+12				14=13*100%				15=7+13				16=15*100%				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K			

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7	1	004	2.01		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	20.000.000	-	0	100						0	-	0,00	0,000	0,00	-	0,00	0,0000				KECAMATAN MEREK	
7	1	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Kegiatan	24	40.000.000	697,00	41.934.500	6	27.652.740					0	-	0,00	0,000	697,00	41.934.500	2.904,17	104,8363				KECAMATAN MEREK	
7	1	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	%	100	40.000.000	99,98	22.399.200	100	27.652.740					0	-	0,00	0,000	#VALUE!	22.399.200	#VALUE!	55,9980				KECAMATAN MEREK	
7	1	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		991,00	41.934.500	3 laporan	27.652.740,00					4.036.000	0	4.036.000	0,00	14,595								KECAMATAN MEREK	
7	1	006			PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Penegakan Perda Perkada dan Kegiatan	Perda/ Perkada/ Kegiatan	13	194.750.000												0,00	-	0,00	0,0000					KECAMATAN MEREK	
7	1	006	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	186.750.000												0,00	-	0,00	0,0000					KECAMATAN MEREK	
7	1	006	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	8.000.000												0,00	-	0,00	0,0000					KECAMATAN MEREK	
7	1	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan	Urusan	1.302	520.565.485	18.589,00	101.242.000	1	47.950.641					0	-	0,00	0,000	18.589,00	101.242.000	1.427,73	19,4485				KECAMATAN MEREK	
7	1	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	%	100	520.565.485	10.086,00	101.242.000	100	47.950.641					0	-	0,00	0,000	10.086,00	101.242.000	10.086,00	19,4485				KECAMATAN MEREK	
7	1	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menantapkan Perwujudan Pancasila/Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menantapkan Perwujudan Pancasila/Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang		25.086,00	101.242.000	250 orang	47.950.641					0	-	0,00	0,000									KECAMATAN MEREK	
7	1	001	2.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintah an Desa	152	20.000.000												0,00	-	0,00	0,0000					KECAMATAN MEREK	
7	1	001	2.05		Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	20.000.000												0,00	-	0,00	0,0000					KECAMATAN MEREK	
7	01				KECAMATAN MUNTE				17.927.437.993		4.438.643.362		2.296.325.700	281.229.312		697.091.965	597.303.254	0	629.039.661		2.204.664.192	0,00	96,008		6.643.307.554	37,06%			KECAMATAN MUNTE	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	16.368.802.859	864,00	4.218.643.141	8.771,00	2.179.726.455	864,00	252.848.362	692.491.965	580.676.254		596.076.661		2.122.093.242	0,00	97,356	864,00	6.340.736.383	909,47	38,7367		KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	100	14.332.016.747	864,00	3.829.605.236	8.771,00	2.013.557.196	40,00	238.648.585	17	632.549.078	17	551.175.264	17	541.500.991	91	1.963.873.918	1,04	97,533	955,00	5.793.479.154	955,00	40,4233	KECAMATAN MUNTE
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		43	3.655.767.136	20 orang/bulan	1.966.877.196	17,00	238.648.585	17,00	615.899.078	17,00	544.515.264	17,00	524.312.791	68	1.923.375.718	0,00	97,788					KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	dokumen		100	173.838.100	88 dokumen	46.680.000	9,00	-	16.650.000		6.660.000		17.188.200	9	40.498.200	0,00	86,757						KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	146.042.800	100,00	20.655.500						0	-	0,00	0,00	100,00	20.655.500	100,00	14,14					KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Paksaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paksaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket		40	20.655.500							0	-	0,00	0,00									KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	605.341.714	100,00	111.802.535	100%	63.079.259	67%	-	67%	38.808.100	67%	4.730.900	67%	19.200.000	3	62.739.000	266,67	99,46	102,67	174.541.535	102,67	28,83	KECAMATAN MUNTE
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket		35	4.136.543	15 paket	1.927.005	-			1.921.800			0	1.921.800	0,00	99,73							KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		86	41.443.695	33 paket	15.018.270	-	19,00	12.180.900	19,00	2.809.100	19,00		57	14.990.000	0,00	99,81						KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket		28	5.563.297	11 paket	4.119.084		9,00	4.108.950	9,00	-	9,00		27	4.108.950	0,00	99,75						KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket		5	8.583.420	2 paket	4.714.900		3,00	4.518.250	3,00	-	3,00		9	4.518.250	0,00	95,83						KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan		0	0	100 laporan	-					0	-	0,00	0,00									KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		762	128.691.950	457 laporan	37.300.000	0,00	-	120,00	18.000.000	0,00	-	0,00		0	37.200.000	0,00	99,73					KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	381.561.358	100,00	63.312.228						0	-	0,00	0,00	100,00	63.312.228	100,00	16,59					KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		7	20.548.428							0	-	0,00	0,00									KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	unit		0	42.763.800							0	-	0,00	0,00									KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	371.010.480	100,00	115.548.700	100%	67.580.000	30,00	12.039.777	6.554.787	16.740.090		19.780.000	30	55.114.654	3.000,00	81,55	130,00	170.663.354	130,00	46,00		KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		24	14.681.200	12 laporan	19.800.000	8,00	4.599.777	3,00	2.809.787	3,00	5.505.090	3,00	4.800.000	17	17.714.654	0,00	89,47					KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan		3	3.570.000	3 laporan	2.840.000		3,00	2.480.000	3,00	-	3,00		9	2.480.000	0,00	87,32						KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		71	97.205.000	36 laporan	44.940.000	9,00	7.440.000	1,00	3.745.000	1,00	11.235.000	1,00	14.980.000	12	37.400.000	0,00	83,22					KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	532.829.760	100,00	77.718.942	100%	35.510.000	40,00	2.160.000	14.580.000	8.030.000		15.595.670	40	40.365.670	4.000,00	113,67	140,00	118.084.612	140,00	22,16		KECAMATAN MUNTE	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		12	77.718.942	2 unit	35.510.000	1,00	2.160.000		14.580.000	8.030.000	15.595.670	1	40.365.670	0,00	113,67							KECAMATAN MUNTE	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	581.216.800	864,00	69.535.370	8.771,00	56.668.000	864,00	28.380.950	4.600.000	16.627.000		10.396.000	864	60.003.950	9,85	105,89	1.728,00	129.539.320	1.818,95	22,29		KECAMATAN MUNTE	

				4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15G*100%		17		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	195.529.440	100,00	23.285.370	100%	32.382.000	40,00	16.143.000		4.600.000		4.600.000		10.396.000	40	35.739.000	4.000,00	110,37	140,00		59.024.370	140,00	30,19	KECAMATAN MUNTE	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan			122	17.338.370	2	laporan		17.382.000	2,00	16.143.000				2	16.143.000	0,00	92,87							KECAMATAN MUNTE	
7	01	02	2.02	02	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen		1	5.947.000	1	dokumen		15.000.000	1,00	4.600.000	1,00	4.600.000	1,00	10.396.000	4	19.596.000	0,00	130,64						KECAMATAN MUNTE	
7	01	02	2.02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	294.687.360	100,00	46.250.000	100%	24.286.000	40,00	12.237.950				12.027.000	-	40	24.264.950	4.000,00	99,91	140,00		70.514.950	140,00	23,93	KECAMATAN MUNTE	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		23	46.250.000	12	laporan		24.286.000	3,00	12.237.950				12.027.000	3	24.264.950	0,00	99,91						KECAMATAN MUNTE	
7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	55.000.000												0	-	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00		KECAMATAN MUNTE	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	100	36.000.000												0	-	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00		KECAMATAN MUNTE	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	20	80.000.000			5	15.817.440		-		-		-		0	-	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00		KECAMATAN MUNTE	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	65.000.000			100%	15.817.440		-		-		15.789.000		0	15.789.000	0,00	99,82	0,00		15.789.000	0,00	24,29		KECAMATAN MUNTE	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga kemasyarak at				1	Lembaga Kemasyar akan		-						0	-	0,00	0,00							KECAMATAN MUNTE	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan				5	laporan		15.817.440				15.789.000		0	15.789.000	0,00	99,82							KECAMATAN MUNTE	
7	01	03	2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	100	20.000.000												0	-	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00		KECAMATAN MUNTE	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penegakan Perda dan Perkada	8/8/9	235.529.440		1,00	9.490.000	2/2/2	12.524.000		-		-		-		0	-	0,00	0,00	1,00		9.490.000	0,00	4,03		KECAMATAN MUNTE	
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	195.529.440	100,00	9.490.000	100%	12.524.000		-		-		-		0	-	0,00	0,00	100,00		9.490.000	100,00	4,85		KECAMATAN MUNTE	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan kepolisian negara RI TN dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan			2	19.638.000	1	laporan		12.524.000		12.237.950			0	12.237.950	0,00	97,72							KECAMATAN MUNTE	
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	%	100	40.000.000			100%	-		-		-		-		0	-	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00		KECAMATAN MUNTE	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan				1	laporan		-		-		-		0	-	0,00	0,00							KECAMATAN MUNTE	
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diseleenggarakan Kecamatan	Urusan	5	601.888.894	2,00	140.974.851	1	22.589.805		-		-				22.567.000	0	22.567.000	0,00	99,90	2,00		163.541.851	40,00	27,17		KECAMATAN MUNTE
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan Kepala Daerah	%	100	601.888.894	100,00	140.974.851	100%	22.589.805		-		-		-		22.567.000	0	22.567.000	0,00	99,90	100,00		163.541.851	100,00	27,17		KECAMATAN MUNTE
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan PancasilaPelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan PancasilaPelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang			600	140.974.851	300 orang		22.589.805					22.567.000	0	22.567.000	0,00	99,90							KECAMATAN MUNTE	
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintah an desa	56	60.000.000			12	9.000.000		-		-		-		0	-	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00		KECAMATAN MUNTE	
7	01	06	2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	60.000.000			100%	9.000.000	-	8.700.000	-	-		-		0		8.700.000	0,00	96,67	0,00		8.700.000	0,00	14,50		KECAMATAN MUNTE
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	laporan							6.000.000		5.700.000						5.700.000									
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	laporan				1	laporan		3.000.000		3.000.000				0		3.000.000	0,00	100,00						KECAMATAN MUNTE	
7	01			KECAMATAN NAMANTERAN		Unit	4	17.927.437.993		4.438.643.362		2.521.242.761		330.343.572		726.448.183		635.427.493		648.808.559		2.341.027.807		92,85		6.779.671.169		37,82		KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	16.368.802.859	864,00	4.218.643.141	8.771,0	2.357.359.608	864,00	301.455.096		726.448.183		568.697.533	8.771,0	620.451.059	9.635	2.217.051.871	109,85	94,048	10.499,00	6.435.695.012	11.051,58	39,32		KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	100	14.332.016.747	864,00	3.829.605.236	8.771,0	2.175.963.563	40,00	252.817.276	17	705.898.183		529.429.173	8.771,0	561.107.489	8.828	2.049.252.121	100,65	94,177	9.692,00	5.878.857.357	9.692,00	41,02		KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan			43	3.655.767.136	20 orang bulan		2.125.083.563	17,00	240.097.276	17,00	705.898.183		513.349.173	16,0	539.907.489	67	1.999.252.121	0,00	94,079				KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen			100	173.838.100	88 dokumen		50.880.000	9,00	12.720.000		4		4,0	21.200.000	17	50.000.000	0,00	98,270					KECAMATAN NAMANTERAN	

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100		146.042.800	100,00	20.655.500						-			0	-	0,00	0,00	100,00	20.655.500	100,00	14,14	KECAMATAN NAMANTERAN		
7	01	01	2.05	02 Pengadaan Paketan Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	palet		40	20.655.500						-					0	-	0,00	0,00						KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		605.341.714	100,00	111.802.535	1,0	83.648.551	67%	29.328.520	67%	12.750.000		18.000.000	1,0	16.550.000	2	76.628.520	233,33	91,61	102,33	188.431.055	102,33	31,13	KECAMATAN NAMANTERAN
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	palet		35	4.136.543	15 paket	2.111.600		15,00	2.111.600						15	2.111.600	0,00	100,00						KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	palet		86	41.443.695	33 paket	16.993.000		33,00	16.993.000						33	16.993.000	0,00	100,00						KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	palet		28	5.563.297	11 paket	3.023.920		28,00	3.023.920						28	3.023.920	0,00	100,00						KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	palet		5	8.583.420	2 paket	1.646.670									0	-	0,00	0,00						KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan		0	0	100 laporan	5.351.361									0	-	0,00	0,00						KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		762	128.691.950	457 laporan	54.522.000		48,00	7.200.000	85,00	12.750.000	120	18.000.000	457,0	16.550.000	710	54.500.000	0,00	99,96					KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		381.561.358	100,00	63.312.228						-			0	-	0,00	0,00	100,00	63.312.228	100,00	16,59	KECAMATAN NAMANTERAN		
7	01	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		7	20.548.428											0	-	0,00	0,00						KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	unit		0	42.763.800											0	-	0,00	0,00						KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		371.010.480	100,00	115.548.700	100,0	59.474.000	30,00	13.420.800		7.800.000		21.268.360	100,0	14.235.000	130	56.724.160	130,00	95,38	230,00	172.272.860	230,00	46,43	KECAMATAN NAMANTERAN
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		24	14.681.200	12 laporan	10.964.000		8,00	2.185.800	3,00	310.000	2	5.403.360	12,0	1.800.000	25	9.699.160	0,00	88,46						KECAMATAN NAMANTERAN
7	01	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan		3	3.570.000	3 laporan	3.570.000					1	885.000	3,0	1.200.000	4	2.085.000	0,00	58,40						KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		71	97.205.000	36 laporan	44.940.000		9,00	11.235.000	6,00	7.490.000	2	14.980.000	36,0	11.235.000	53	44.940.000	0,00	100,00						KECAMATAN NAMANTERAN
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		532.829.760	100,00	77.718.942	100,0	38.273.494	40,00	5.888.500				100,0	28.558.570	140	34.447.070	140,00	90,00	240,00	112.166.012	240,00	21,05	KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	unit		12	77.718.942	2 unit	38.273.494		1,00	5.888.500				2,0	28.558.570	3	34.447.070	0,00	90,00						KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95		581.216.800	864,00	69.535.370	8.771,0	58.960.064	864,00	28.888.476	-		12.430.300	8.771,0	13.354.500	9.635	54.673.276	109,85	92,73	10.499,00	124.208.646	11.051,58	21,37	KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100		195.529.440	100,00	23.285.370	100,0	26.590.856	40,00	17.840.476		6.220.300		100,0	13.354.500	140	37.415.276	140,00	140,71	240,00	60.700.646	240,00	31,04	KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	laporan		122	17.338.370	2 laporan	11.151.446		2,00	11.024.876						2	11.024.876	0,00	98,86						KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	02	2.02	02 Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen		1	5.947.000	1 dokumen	15.439.410		1,00	6.815.600			6.220.300	1,0	13.354.500	2	26.390.400	0,00	170,93						KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	02	2.02	02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100		294.687.360	100,00	46.250.000	100,0	32.369.208	40,00	11.048.000		6.210.000				40	17.258.000	40,00	53,32	140,00	63.508.000	140,00	21,55	KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	02	2.02	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		23	46.250.000	12 laporan	32.369.208		3,00	11.048.000		6.210.000				3	17.258.000	0,00	53,32						KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100		55.000.000											0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	100		36.000.000											0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	20		80.000.000			5,0	13.843.635		-		-		5,0	6.145.000	5	6.145.000	100,00	44,39	5,00	6.145.000	25,00	7,68	KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100		65.000.000			100,0	13.843.635		-		-		100,0	6.145.000	100	6.145.000	100,00	44,39	100,00	6.145.000	100,00	9,45	KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga kemasyarakatan					1 Lembaga kemasyarakatan		5.000.000						0	-	0,00	0,00						KECAMATAN NAMANTERAN		
7	01	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan					5 laporan		8.843.635						1,0	6.145.000	1	6.145.000	0,00	69,49					KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	03	2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	100		20.000.000											0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan	8/8/9		235.529.440	1,00	9.490.000	2/2/2	18.226.644		-		-		-	100,0	8.858.000	100	8.858.000	0,27	48,60	101,00	18.348.000	0,25	7,79	KECAMATAN NAMANTERAN
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketrantaman dan ketertiban umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketrantaman dan Ketertiban Umum	%	100		195.529.440	100,00	9.490.000	100,0	14.571.869		-		-		-	100,0	8.858.000	100	8.858.000	100,00	60,79	200,00	18.348.000	200,00	9,38	KECAMATAN NAMANTERAN
7	01	04	2.01	01 Sinergistas dengan kepolisian negara RI TNI dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergistas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan		2	19.638.000	1 laporan	14.571.869								100,0	8.858.000	100	8.858.000	0,00	60,79					KECAMATAN NAMANTERAN	

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	%	100		40.000.000		100,0		3.654.775		-		-		0		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN NAMANTERAN		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan				1 laporan			3.654.775					0		0,00	0,00						KECAMATAN NAMANTERAN			
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diseleenggarakan Kecamatan	Urusan	5		601.888.894	2,00	140.974.851	1,0	60.852.810		-		54.299.660	-	0		54.299.660	0,00	89,23	2,00	195.274.511	40,00	32,44	KECAMATAN NAMANTERAN		
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	%	100		601.888.894	100,00	140.974.851	100,0	60.852.810		-		54.299.660	-	0		54.299.660	0,00	89,23	100,00	195.274.511	100,00	32,44	KECAMATAN NAMANTERAN		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan PancasilaPelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pelastarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang		600		140.974.851	300 orang		60.852.810		270,0		54.299.660	270	0,00	89,23							KECAMATAN NAMANTERAN			
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintah an desa	56		60.000.000		12,0		12.000.000		-		-		0		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN NAMANTERAN		
7	01	06	2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100		60.000.000		100,0		12.000.000		-		-		0		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN NAMANTERAN		
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan	laporan					1 laporan			12.000.000				0		0,00	0,00						KECAMATAN NAMANTERAN			
7	01			KECAMATAN PAYUNG			100		10.653.337.788	34,27	3.651.380.460	100	2.177.302.073		267.137.634		516.699.059		568.291.257		691.547.486		2.043.675.436		93,86		5.695.055.896		53,46	KECAMATAN PAYUNG
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95		10.109.070.555	89	3.529.260.460	89,00	2.054.852.729	89,00	239.958.634	89,00	497.285.059		524.480.257		685.359.486	178	1.947.083.436	200,00	35,78	267,00	5.476.343.896	281,05	54,17	KECAMATAN PAYUNG
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terikasananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	60		9.045.963.102	24	3.119.853.268	12	1.867.875.713	12	220.670.769	12	445.653.494	12	495.852.392	12	606.717.760	48	1.768.894.415	200,00	35,68	72,00	4.888.747.683	120,00	54,04	KECAMATAN PAYUNG
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bula n		13	2.927.183.268	13	1.827.915.713	13	220.670.769	13	435.663.494	13	489.192.392	13	583.407.760	52	1.728.934.415	200,00	35,91					KECAMATAN PAYUNG		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		24	192.670.000	12	39.960.000	0	12	9.990.000	12	6.660.000	12	23.310.000	36	39.960.000	100,00	25,00						KECAMATAN PAYUNG		
7	01	02	2.03	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Terikasananya Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Bulan	60		75.000.000	24	14.487.800											24,00		14.487.800	40,00	19,32		KECAMATAN PAYUNG		
7	01	02	2.04	-	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		1	14.487.800																			KECAMATAN PAYUNG		
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terikasananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60		357.007.453	24	172.460.514	12	53.137.016	12	3.360.000	12	17.953.300	0	-		31.619.641	24	52.932.941	200,00	39,01	48,00	225.393.455	80,00	63,13	KECAMATAN PAYUNG
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		4	7.140.500	2	3.383.008	2	3.360.000	0	0	0	0	0	2	3.360.000	100,00	99,32						KECAMATAN PAYUNG		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket		8	22.271.500	4	9.799.530	0	0	4	9.788.300	0	0	0	0	4	9.788.300	100,00	99,89					KECAMATAN PAYUNG		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan		4	16.699.500	2	5.698.328	0	2	5.621.000	0	0	0	0	2	5.621.000	100,00	98,64						KECAMATAN PAYUNG		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2	5.910.600	1	2.612.150	0	1	2.544.000	0	0	0	0	1	2.544.000	100,00	97,39						KECAMATAN PAYUNG		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0,00	0,00					KECAMATAN PAYUNG		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		120	120.438.414	60	31.644.000	0	0	0	0	0	110	31.619.641	110	31.619.641	0,00	0,00						KECAMATAN PAYUNG		
7	01	03	2.05	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	13		64.000.000	1	30.865.659											1,00		30.865.659	7,69	48,23		KECAMATAN PAYUNG		
7	01	03	2.05	01	Pengadaan Mebel	Unit		1	30.865.659																			KECAMATAN PAYUNG		
7	01	01	2.08		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Bulan	48		441.260.000	24	120.349.369	12	100.370.000	3	15.927.865	3	25.065.265	3	22.282.865		28.518.365	9	91.794.360	50,00	40,84	33,00	212.143.729	68,75	48,08	KECAMATAN PAYUNG
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan		24	24.755.369	12	22.200.000	3	3.377.865	3	3.377.865	3	3.457.865	3	3.418.365	12	13.631.960	50,00	30,43					KECAMATAN PAYUNG		
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan		4	5.090.000	2	2.190.000	0	0	2	2.190.000	0	0	0	0	2	2.190.000	100,00	100,00					KECAMATAN PAYUNG		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan		24	90.504.000	12	75.980.000	3	12.550.000	3	19.497.400	3	18.825.000		25.100.000	9	75.972.400	50,00	42,18					KECAMATAN PAYUNG		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Di Pelihara	Unit	5		155.840.000	2	71.243.850	1	33.470.000	0	0	1	8.613.000	1	6.345.000	1	18.503.720	3	33.461.720	100,00	22,56	5,00	104.705.570	100,00	67,19	KECAMATAN PAYUNG
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Perizinannya	unit		2	71.243.850	1	33.470.000	0	0	1	8.613.000	1	6.345.000	1	18.503.720	3	33.461.720	100,00	22,56					KECAMATAN PAYUNG		
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95		211.463.376	89	37.064.000	89	57.599.940	89	27.179.000	89,00	14.314.000	89	8.748.000		6.188.000	267	56.429.000	200,00	80,73	356,00	93.493.000	374,74	44,21	KECAMATAN PAYUNG
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diseleenggarakan Di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	10		140.273.496	2	37.064.000	2	27.305.000	2	17.489.000	0	-	0	8.748.000		-	2	26.237.000	100,00	64,05	4,00	63.301.000	40,00	45,13	KECAMATAN PAYUNG
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		2	11.450.000	1	12.310.000	1	11.347.000	0	0	0	0	0	1	11.347.000	0,00	92,18						KECAMATAN PAYUNG		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		2	25.614.000	1	14.995.000	1	6.142.000	0	0	1	8.748.000	0	-	2	14.890.000	100,00	40,96					KECAMATAN PAYUNG		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Urusan	40		64.192.000	24	67.290.000	12	25.296.000	3	9.690.000	3	9.350.000	0	0	3	6.188.000	9	25.228.000	50,00	99,71	33,00	92.518.000	82,50	144,13	KECAMATAN PAYUNG
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		24	67.290.000	12	25.296.000	3	9.690.000	3	9.350.000	0	0	3	6.188.000	9	25.228.000	50,00	99,71						KECAMATAN PAYUNG	
7	-	-	-		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Unit	40		16.000.000													0,00	-	0,00	0,00			KECAMATAN PAYUNG		

4				5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah layanan perizinan non perizinan dan kewenangan lainnya.	Urusan	28	18.997.880			7	4.998.940			7,00	4.964.000	0		-		7	4.964.000	100,00	99,30	7,00	4.964.000	25,00	26,13		KECAMATAN PAYUNG	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan					7	4.998.940			7,00	4.964.000	0	0			7	4.964.000	100,00	99,30					KECAMATAN PAYUNG		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Persen	100	64.680.200			37,09	23.987.100			0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN PAYUNG	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dikoordinasikan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dikoordinasikan	Kegiatan	24	54.680.200			6	23.987.100			0	-	0	-			0	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00	0,00	5.000.000	0,00	9,14	KECAMATAN PAYUNG
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lemaba Kemasyarak atan					5	5.000.000			0	0	0	0	5	5.000.000	5	5.000.000	0,00	0,00					KECAMATAN PAYUNG		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan					2	18.987.100			0	0	0		0	2	18.890.000,00	2	18.890.000	0,00	0,00					KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	2.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Dokumen	36	10.000.000																0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN PAYUNG		
7	01	04			PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Perda Perkada dan Kegiatan	Perda Perkada dan Kegiatan	10/10/10	88.061.148	2/2/2/	9.880.000	2/2/2/	11.980.000			0	0	2/2/2/	11.917.000	-	2/2/2/	11.917.000	0,00	0,00		21.797.000	0,00	24,75		KECAMATAN PAYUNG		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan	44	78.061.148	6	9.880.000	6	11.980.000			0	0	6	11.917.000	-	6	11.917.000	0,00	0,00	12,00	21.797.000	27,27	27,92		KECAMATAN PAYUNG		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan			6	5.580.000	6	11.980.000			0	0	6	11.917.000	-	6	11.917.000	0,00	0,00						KECAMATAN PAYUNG		
7	01	04	2.01		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan			6	4.300.000					0	0													KECAMATAN PAYUNG		
7	01	04	2.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya	Perda dan Perkada	8	10.000.000																0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN PAYUNG		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Persen	100	122.404.509	100	65.656.000	17,06	20.882.304			0	0	17,06	20.596.000	0	-	17	20.596.000	0,00	0,00	117,06	86.252.000	117,06	70,46		KECAMATAN PAYUNG	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penguasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	urusan	24	122.404.509	6	65.656.000	1	20.882.304			0	0	1	20.596.000	0	-	1	20.596.000	0,00	0,00	7,00	86.252.000	29,17	70,46		KECAMATAN PAYUNG	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		300	65.656.000	150	20.882.304			0	0	150	20.596.000	0	-	150	20.596.000	0,00	0,00						KECAMATAN PAYUNG		
7	01	06			PROGRAM PEMERUNAAH DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintah an Desa	52	57.658.000	16	9.520.000	8	8.000.000			8	5.100.000	8,00	2.550.000	0	0	16	7.650.000	100,00	63,75	32,00	17.170.000	61,54	29,78		KECAMATAN PAYUNG	
7	01	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya	Pemerintah an Desa	52	57.658.000	16	9.520.000	8	8.000.000			8	5.100.000	8,00	2.550.000	0	0	16	7.650.000	100,00	63,75	32,00	17.170.000	61,54	29,78		KECAMATAN PAYUNG	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen			38	8.000.000					38	5.100.000	38,00	2.550.000	0	0	76	7.650.000	100,00	63,75					KECAMATAN PAYUNG		
7	01				KEC. SIMPANG EMPAT				23.137.301.689		5.568.182.192	991	3.171.609.557	124	390.829.913	350	1.068.979.850	201	666.683.826	316	900.869.708	991	3.027.363.297	95,45	8.595.515.489			37,15		KECAMATAN SIMPANG EMPAT		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	21.612.799.919	972	5.304.020.899	972	3.028.154.367	122	375.102.393	350	1.068.979.850	200,00	589.755.066	300	863.557.278	972	2.897.394.587	100,00	95,682	1.944,00	8.201.415.486	2.046,32	37,95		KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terikasananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	78	19.978.748.140	148	4.779.892.592	12	2.840.624.942	3	354.654.893		1.045.490.685		550.925.381	9	783.432.213	12	2.734.503.172	100,00	96,264	160,00	7.514.395.764	205,13	37,61		KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan					12	2.790.904.942	3	343.074.893		1.045.490.685		527.765.381	9	768.452.213	12	2.684.783.172	100,00	96,198					KECAMATAN SIMPANG EMPAT		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	honorarium Pengelola Keuangan	orang bulan					12	49.720.000	3	11.580.000				23.160.000	9	14.980.000	12	49.720.000	100,00	100,000					KECAMATAN SIMPANG EMPAT		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Terikasananya Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	bulan	201	137.940.000	24	42.987.800													24,00	42.987.800	11,94	31,16		KECAMATAN SIMPANG EMPAT			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terikasananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	95%	902.483.170	704	248.576.311	4.519	73.859.425			12.216.665	1.890.185	4.519	47.280.395	4.519	61.387.245	100,00	83,114	5.223,00	309.963.556	549.789,47	34,35		KECAMATAN SIMPANG EMPAT			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis					15	1.192.800			288.960			15	903.840	15	1.192.800	100,00	100,000					KECAMATAN SIMPANG EMPAT			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	buah	39	16.241.995				16.241.995			1.918.055	1.890.185	39	12.376.775	39	16.185.015	100,00	99,649						KECAMATAN SIMPANG EMPAT			
7	01	01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	jenis					3	2.098.660			521.170			3	1.399.810	3	1.920.980	100,00	91,534					KECAMATAN SIMPANG EMPAT			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis			4.252	3.164.450					788.480		4.252	2.375.970	4.252	3.164.450	100,00	100,000						KECAMATAN SIMPANG EMPAT			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	orang kali					210	51.161.520			8.700.000			210	30.224.000	210	38.924.000	100,00	76,081					KECAMATAN SIMPANG EMPAT			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	12	53.680.000	11	31.870.000													11,00	31.870.000	91,67	59,37		KECAMATAN SIMPANG EMPAT			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	2	283.868.315	28	99.072.400	12	80.200.000	3	12.550.000		8.910.000		26.450.000	9	20.290.000	12	68.200.000	100,00	85,037	40,00	167.272.400	2.000,00	58,93		KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa TeleponInternetAir dan Listrik	bulan					12	14.400.000			-	1.400.000	12	1.000.000	12	2.400.000	100,00	16,667						KECAMATAN SIMPANG EMPAT			
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit					2	5.680.000			1.420.000		-	2	4.260.000	2	5.680.000	100,00	100,000					KECAMATAN SIMPANG EMPAT			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai tidak Tetap	orang bulan					12	60.120.000	3	12.550.000		7.490.000		25.050.000	9	15.030.000	12	60.120.000	100,00	100,000					KECAMATAN SIMPANG EMPAT		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	2	256.080.293	2	68.091.996	3	33.470.000	1	7.897.500		2.362.500		10.489.500	2	12.554.670	3	33.304.170	100,00	99,505	5,00	101.396.166	250,00	39,60		KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jaminan	Jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jaminan	unit					3	33.470.00																			

				4	5			6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15B*100%		17								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan			1	14.977.100				1	14.977.100	1	14.977.100	100,00	100,000				KECAMATAN SIMPANG EMPAT							
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Urusan	47	348.266.880	9	93.740.007	12	45.600.000		30.400.000	12	15.200.000	12	45.600.000	100,00	100,000	21,00	139.340.007	44,68	40,01		KECAMATAN SIMPANG EMPAT				
7	01	02	2.02	01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kali			12	45.600.000				30.400.000	12	15.200.000	12	45.600.000	100,00	100,000						KECAMATAN SIMPANG EMPAT				
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang di Koordinasikan Pemeliharannya	unit	12	60.000.000													0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN SIMPANG EMPAT				
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Layanan Perizinan Non Perizinan dan Kewenangan Lainnya	urusan	40	28.000.000													0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN SIMPANG EMPAT				
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan	8/8/13	201.295.280	2	24.500.000	3	11.135.330			3	7.135.330	3	7.135.330	100,00	64,078	5,00	31.635.330	0,01	15,72		KECAMATAN SIMPANG EMPAT				
7	01	04	2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	8	161.295.280	2	24.500.000	3	11.135.330			3	7.135.330	3	7.135.330	100,00	64,078	5,00	31.635.330	62,50	19,61		KECAMATAN SIMPANG EMPAT				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan kepolisian negara RI TNI dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Sinergitas dengan kepolisian negara RI TNI dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	kegiatan					3	11.135.330			3	7.135.330	3	7.135.330	100,00	64,078						KECAMATAN SIMPANG EMPAT				
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang Dikoordinasikan Penerapan dan Pengesannya	Perda dan Perkada	64	40.000.000													0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN SIMPANG EMPAT				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang Doseleenggarakan Kecamatan	Urusan	4	486.554.244	550	100.064.856	1	55.974.760		1	46.528.760	-	1	46.528.760	100,00	83,125	551,00	146.593.616	13.775,00	30,13		KECAMATAN SIMPANG EMPAT				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Urusan	5	486.554.244	550	100.064.856	1	55.974.760		1	46.528.760		1	46.528.760	100,00	83,125	551,00	146.593.616	11.020,00	30,13		KECAMATAN SIMPANG EMPAT				
7	01	05	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	kali					1	55.974.760		1	46.528.760		1	46.528.760	100,00	83,125						KECAMATAN SIMPANG EMPAT				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemrintahan Desa yang Dibina dan Diawasi	Pemerintah an Desa	85	80.000.000													0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN SIMPANG EMPAT				
7	01	06	2.01		Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemrintahan Desa yang Dibina dan Diawasi	Pemerintah an Desa	107	80.000.000													0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN SIMPANG EMPAT				
7	01				KECAMATAN TIGA PANAH				18.290.326.555		6.210.391.357		3.015.658.972		300.699.857		662.901.149		1.020.923.105		917.481.446		2.902.005.557	96,23		9.112.396.914		49,82		KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	16.820.415.909	89	5.844.464.924	89	2.808.599.942	-	300.699.857	-	662.901.149		885.861.705		847.785.446	0	2.697.248.157	0,00	96,035	89,00	8.541.713.081	93,68	50,78		KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	15.616.561.900	100	5.249.262.234	100	2.616.655.426	100	300.699.857	100	662.901.149	3	823.704.905		721.268.361	203	2.508.574.272	203,00	95,869	303,00	7.757.836.506	303,00	49,68		KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	150	5.078.162.234	53	5.078.162.234	23	2.573.892.426	23	300.699.857	-	648.601.149	0	812.264.905	0	704.528.361	23	2.466.094.272	100,00	95,812					KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	48	171.100.000			12	42.763.000	3		3	14.300.000	3	11.440.000	3	16.740.000	12	42.480.000	100,00	99,338					KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	124.500.000	100	34.335.000													100,00	34.335.000	100,00	27,58		KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket			1	22.172.000																	KECAMATAN TIGA PANAH			
7	01	01	2.05	02	Belanja Pakiaian Olahraga	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	Paket			1	12.163.000																	KECAMATAN TIGA PANAH			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	412.627.725	100	196.819.479	100	91.494.516	-	-	-	62	31.759.750		59.569.315	62	91.329.065	62,00	99,819	162,00	288.148.544	162,00	69,83		KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			3	7.273.922	1	1.144.670				1	1.144.670	1	1.144.670	100,00	100,000						KECAMATAN TIGA PANAH			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			3	30.028.741	1	16.513.660	-	-	-	2	16.500.450		2	16.500.450	200,00	99,920					KECAMATAN TIGA PANAH			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			4	23.421.152	1	5.722.486	-	-	-	1	5.231.300		464.000	1	5.695.300	100,00	99,525					KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			2	5.657.000	2	3.493.000	-	-	-	1	1.328.000		2.165.000	1	3.493.000	50,00	100,000					KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan			6	1.494.000	6	1.494.000				4	1.494.000	6	1.494.000	100,00	100,000						KECAMATAN TIGA PANAH			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	748	128.944.664	233	63.126.700						58	8.700.000	292	54.301.645	350	63.001.645	150,21	99,802					KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	227.820.414	100	193.939.466												100,00	193.939.466	100,00	85,13		KECAMATAN TIGA PANAH			
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			10	90.947.716																	KECAMATAN TIGA PANAH			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			5	102.991.750																	KECAMATAN TIGA PANAH			
7	01	01	2.07	08	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			0		0								0	-	0,00	0,000					KECAMATAN TIGA PANAH			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	299.434.050	100	101.886.094	100	30.980.000	-	-	-	18	17.706.050		10.173.100	18	27.879.150	18,00	89,991	118,00	129.765.244	118,00	43,34		KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	14.786.094			12	11.500.000	-	-	-	-	9	6.321.050	3	2.078.100	12	8.399.150	100,00	73,036					KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			15	12.400.000	6	4.300.000				9	4.300.000	9	4.300.000	150,00	100,000						KECAMATAN TIGA PANAH			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	74.700.000	36	15.180.000			-	-	9	11.385.000		3.795.000	9	15.180.000	25,00	100,000						KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	139.471.820	100	68.222.651	100	69.470.000	-	-	-	1	12.691.000		56.774.670	1	69.465.670	1,00	99,994	101,00	137.688.321	101,00	98,72		KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			2	68.222.651	1	33.470.000			-	-	1	12.691.000		20.774.670	1	33.465.670	100,00	99,987				KECAMATAN TIGA PANAH		

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13*100%	15=7+13	16=15*100%	17																	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diusahakan/Diusahabihkan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diusahakan/Diusahabihkan	Unit	1	50.000.000	1	36000000								1	36.000.000	1	36.000.000	100,00	100,000						KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	604.032.877	89	167.759.400	89	84.651.000			-	-	12,00	74.805.000		9.815.000	12	84.620.000	13,48	99,963	101,00	252.379.400	106,32	41,78	KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemerintahan Yang Tidak Dilenggarakan Di Tingkat Kecamatan	%	100	291.472.877	100	76.619.400	100	43.660.000			-	-	3,00	42.805.000		855.000	3	43.660.000	3,00	100,000	103,00	120.279.400	103,00	41,27	KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		2	34.352.400	1	10.460.000			-	-	1	10.460.000		1	10.460.000	100,00	100,000	3,00	44.812.400	0,00				KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		3	42.267.000	2	33.200.000			-	-	2	32.345.000		855.000	2	33.200.000	100,00	100,000	5,00	75.467.000					KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Urusan	60	221.560.000	100	91.140.000	100	40.991.000			-	-	9,00	32.000.000		8.960.000	9	40.960.000	9,00	99,924	109,00	132.100.000	181,67	59,62	KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12	91.140.000	12	40.991.000			-	-	9	32.000.000	3	8.960.000	12	40.960.000	100,00	99,924							KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	55.000.000																0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen																							KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit																							KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	36.000.000																	0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		0	0										0	-	0,00	0,000								KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan		0	0										0	-	0,00	0,000								KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		0	0										0	-	0,00	0,000								KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	11	120.000.000	2	9.231.300	6	18.585.600					2	2.736.000		15.849.600	2	18.585.600	33,33	100,000	4,00	27.816.900	36,36	23,18	KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	80.000.000	100	9.231.300	100	18.585.600					2	2.736.000		15.849.600	2	18.585.600	2,00	100,000	102,00	27.816.900	102,00	34,77	KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan		0	0										0	-	0,00	0,000								KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		11	9.231.300	12	18.585.600					2	2.736.000	9	15.849.600	11	18.585.600	91,67	100,000							KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	100	40.000.000	0	0															0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen		0	0										0	-	0,00	0,000								KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN JUMUD	Jumlah Perda Perkada dan Kegiatan	Perda Perkada	10/10/2010	295.604.800	*****	46.704.790	*****	34.145.830							34.137.400	0	34.137.400	0,00	99,975		80.842.190		27,35	KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman Dan Ketertiban Umum	%	100	258.604.800	100	46.704.790	100	34.145.830							34.137.400	0	34.137.400	0,00	99,975	100,00	80.842.190	100,00	31,26	KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		2	46.704.790	1	34.145.830						1	34.137.400	1	34.137.400	100,00	99,975								KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		0	0	0	0							0	-	0,00	0,000									KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	37.000.000	0	0									0	-	0,00	0,000	0,00	-	0,00	0,00				KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		0	0									0	-	0,00	0,000									KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Dieleenggarakan Kecamatan	Urusan	100	348.772.969	1	133.130.943	1	59.758.600					350	57.520.400		350	57.520.400	35.000,00	96,255	351,00	190.651.343	351,00	54,66	KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	%	100	348.772.969	100	133.130.943	100	59.758.600					350	57.520.400		350	57.520.400	350,00	96,255	450,00	190.651.343	450,00	54,66	KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Orang		2	133.130.943	1	59.758.600					350	57.520.400		350	57.520.400	35.000,00	96,255							KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintah an Desa	26	101.500.000	29	9.100.000	29	9.918.000					58	9.894.000	58	9.894.000	0,00	0,998	87,00	18.994.000	334,62	18,71	KECAMATAN TIGA PANAH			

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
7	01	06	2.01	Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100		101.500.000	100	9.100.000	100	9.918.000					58	9.894.000	58	9.894.000	0,00	0,998	158,00	18.994.000	158,00	18,71	KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	06	2.01	01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		151	9.100.000		58	9.918.000				58	9.894.000	58	9.894.000	100,00	0,998							KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01				KECAMATAN TIGA BINANGA				31.984.962.415		6.225.076.839		3.588.088.305		247.700.808		846.177.614		761.149.846		1.604.041.294		3.459.069.562		96,40		9.684.146.401		30,28	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90		25.029.928.900	90	5.743.679.929	89	2.721.136.525	3	230.321.388	27	832.865.614	27	601.881.156	38	950.697.996	89	2.615.766.154	100,00	96,13	179,00	8.359.446.083	198,89	33,40	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	60		5.368.000	0	0													0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	780		22.804.148.543	384	5.105.181.909	12	2.415.580.660	3	223.752.067	27	735.251.857	27	514.726.657	38	837.529.807	12	2.311.260.388	100,00	95,68	396,00	7.416.442.297	50,77	32,52	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	01	2.02	01	Gaji dan Tunjangan ASN	orang bulan						23	2.307.041.585	3,00	223.752.067	3,00	697.971.857	3	499.396.657	14	781.899.807	23	2.203.020.388	100,00	95,49				KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen						42	108.539.075			24	15.330.000	24	55.630.000	42	108.240.000	100,00	99,72						KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan	160		193.248.000	48	36.000.000									0	-	0,00	0,00	48,00	36.000.000	30,00	18,63	KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	60		794.611.996	24	249.231.676	12	52.446.790	1	1.948.500	3	39.674.695	2	10.231.655		6	51.854.850	50,00	98,87	30,00	301.086.526	50,00	37,89	KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	paket						1	898.580		1,00	898.580			1	898.580	100,00	100,00						KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket						4	30.580.170		2,00	20.078.575	2	10.231.655		4	30.310.230	100,00	99,12						KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket						1	1.948.500	1,00	1.948.500				1	1.948.500	100,00	100,00						KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	paket						1	1.897.540		1,00	1.897.540			1	1.897.540	100,00	100,00						KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan						78	17.122.000		75,00	16.800.000			75	16.800.000	96,15	98,12						KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	58		80.520.000	15	16.500.000								0	-	0,00	0,00	15,00	16.500.000	25,86	20,49	KECAMATAN TIGA BINANGA			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	60		581.395.299	24	249.796.344	12	219.639.075	3	4.620.821	11	41.339.062	6	69.422.844	6	103.798.189	12	219.180.916	100,00	99,79	36,00	468.977.260	60,00	80,66	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan						12	30.000.000	3,00	4.620.821	3,00	8.599.062	3,00	6.782.844	3	9.838.189	12	29.840.916	100,00	99,47				KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan						2	1.420.000		2,00	1.420.000			2		1.420.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan						12	188.219.075		6,00	31.320.000	3	62.640.000	3	93.960.000	12	187.920.000	100,00	99,84					KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	102		570.637.061	4	86.970.000	2	33.470.000		2	16.600.000	1	7.500.000	1	9.370.000	2	33.470.000	100,00	100,00	6,00	120.440.000	5,88	21,11	KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	unit						2	33.470.000		2,00	16.600.000	1	7.500.000	1	9.370.000	2	33.470.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87		570.899.575	86	91.632.910	86	39.877.890	1	17.379.420	2	13.312.000	2	9.184.000		80	39.875.420	93,02	99,99	166,00	131.508.330	190,80	23,04	KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1.060		140.795.072	12	108.066.410	1	28.863.800	1	17.379.420	1	3.762.000	1	7.722.000		1	28.863.420	100,00	100,00	13,00	136.929.830	1,23	97,25	KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Laporan						1	17.379.420	1,00	17.379.420			1		17.379.420	100,00	100,00						KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen						2	11.484.380		1,00	3.762.000	1	7.722.000		2	11.484.000	100,00	100,00						KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	urusan	32		16.104.000	4	31.561.600	1	11.014.090		1	9.550.000	1	1.462.000		1	11.012.000	100,00	99,98	5,00	42.573.600	15,63	264,37	KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan						1	11.014.090		1,00	9.550.000	1	1.462.000		1	11.012.000	100,00	99,98						KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan SaranaPelayanan Umum	Unit	8		10.736.000		0								0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat	urusan	680		16.104.000		0								0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan	95		5.225.224.000	24	205.440.000	19	800.000.000			1	123.010.800	7	653.343.298	8	776.354.098	42,11	97,04	32,00	981.794.098	33,68	18,79	KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	Kegiatan	76		10.736.000		0					1	123.010.800	7	653.343.298	8	776.354.098	0,00	0,00	8,00	776.354.098	10,53	7.231,32	KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	70		5.214.488.000	14	840.806.618	19	800.000.000			1	123.010.800	7	653.343.298	8	776.354.098	42,11	97,04	22,00	1.617.160.716	31,43	31,01	KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	paket						1	711.332.340			1,00	123.010.800	1		571.063.598	1	694.074.398	100,00	97,57					KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	laporan						6	88.667.660				6	82.279.700	6	82.279.700	100,00	92,80						KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	04			PROGRAM KEBERKEMBANGAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Jumlah Perda, Perkada dan kegiatan		10/10/10	181.138.592	2/2/2	33.460.000													37.289,00	33.460.000	92,16	18,47	KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	100		175.770.592	12	33.460.000													12,00	33.460.000	12,00	19,04	KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Perda dan Perkada	8		5.368.000		0													0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Urusan	10		419.236.095	4	102.874.000																			

				4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%	15=7+13		16=15*100%		17									
				Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
7	01			KECAMATAN TIGANDERKET			14.928.347.955		8.038.804.584		2.704.641.911		374.662.347		895.524.344		602.033.055		713.769.907		2.585.989.653		95,61		10.624.794.237		71,17	KECAMATAN TIGANDERKET		
7	1	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	13.958.109.360	85,25	7.618.110.710	89	2.584.879.651	85,25	357.504.847	85,85	856.070.844	85,25	562.539.295	88,55	690.112.407	88,55	2.466.227.393	99,49	95,41	88,55	10.084.338.103	93,21	72,25	KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	01	102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Dokumen	300	12.881.214.685	120	6.918.478.443	60	2.387.378.367	15	316.566.716	15	783.212.137	15	519.823.411	15	649.533.510	60	2.269.135.774	100,00	95,05	180	9.187.614.217	60,00	71,33	KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan				6.662.915.343	21	2.332.258.367	5	302.946.716	5	783.212.137	5	491.943.411	6	635.913.510	21	2.214.015.774	100,00	94,93					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	01	102	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen				255.563.100	12	55.120.000	3	13.620.000	0	-	6	27.880.000	3	13.620.000	12	55.120.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	01	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan Persentase Absensi Pegawai	Dokumen	120	127.500.000	48	24.713.000														48	24.713.000	40,00	19,38	KECAMATAN TIGANDERKET		
7	1	1	105	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket				24.713.000																			KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	60	362.094.675	24	219.319.435	12	71.615.284	3	13.170.000	3	34.500.200	3,00	12.690.000	3	11.250.000	12	71.610.200	100,00	99,99	36	290.929.635	60,00	80,35	KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	106	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				5.870.040	10	2.200.000	0	-	10	2.200.000	0	-	0	-	10	2.200.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	106	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				42.268.770	20	14.823.400	2	2.220.000	18	12.603.400	0	-	0	-	20	14.823.400	100,00	100,00					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	106	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket				17.157.425	9	3.539.884	0	-	9	3.534.800	0	-	0	-	9	3.534.800	100,00	99,86					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	106	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				9.144.200	3	4.252.000	0	-	3	4.252.000	0	-	0	-	3	4.252.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	106	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Laporan				5.120.000	2	1.960.000	0	-	2	1.960.000	0	-	0	-	2	1.960.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	106	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				139.759.000	148	44.840.000	37	10.950.000	30	9.950.000	42	12.690.000	39	11.250.000	148	44.840.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	25	180.000.000	10	113.896.065														10	113.896.065	40,00	63,28	KECAMATAN TIGANDERKET		
7	1	1	107	5	Pengadaan Meubelair	Unit				41.034.265																			KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	107	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit				72.861.800																			KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Org/bln	60	277.300.000	24	210.234.427	12	95.886.000	3	20.828.131	3	29.178.507	3,00	23.085.884		22.388.897	9	95.481.419	75,00	99,58	33	305.715.846	55,00	110,25	KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	108	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan				42.030.377	24	14.500.000	6	1.683.131	6	4.633.507	6	4.260.884	6	3.517.897	24	14.095.419	100,00	97,21					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	108	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan				9.110.000	1	5.720.000	0	-	1	5.720.000	0	-	0	-	1	5.720.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	108	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				159.094.050	12	75.666.000	3	19.145.000	3	18.825.000	3	18.825.000	3	18.871.000	12	75.666.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	10	130.000.000	4	131.469.340	2	30.000.000	1	6.940.000	1	9.180.000	0	6.940.000		6.940.000	2	30.000.000	100,00	100,00	6	161.469.340	60,00	124,21	KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	1	109	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perizinannya	Unit	2			131.469.340	2	30.000.000	2	6.940.000	0	9.180.000	0	6.940.000	0	6.940.000	2	30.000.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	183.000.000	8.525,00	57.227.000	89	29.400.000	85,25	3.157.500	85,85	16.427.500	85,25	3.157.500	88,55	6.657.500	88,55	29.400.000	99,49	100,00	8.614	86.627.000	9.066,89	47,34	KECAMATAN TIGANDERKET
7	1	2	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	60	183.000.000	24	57.227.000	12	29.400.000	3	3.157.500	3	16.427.500	3	3.157.500	3	6.657.500	12	29.400.000	100,00	100,00	36	86.627.000	60,00	47,34	KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	2	201	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan				35.851.000	4	12.630.000	1	3.157.500	1	3.157.500	1	3.157.500	1	3.157.500	4	12.630.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	2	201	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen				43.296.000	2	16.770.000	0	-	2	13.270.000	0	-	1	3.500.000	3	16.770.000	150,00	100,00					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan	10	109.000.000	4	61.235.000	2	26.000.000	1	14.000.000	1	12.000.000	0	-	0	-	2	26.000.000	100,00	100,00	6	87.235.000	60,00	80,03	KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	LKD	170	91.000.000	68	61.235.000	34	26.000.000	17,00	14.000.000	17,00	12.000.000	0	-	0	-	34	26.000.000	100,00	100,00	102	87.235.000	60,00	95,86	KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	03	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lemaba Kemasyarakatan				21.210.000	34	14.000.000	34	14.000.000	0	-	0	-	0	-	34	14.000.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan				40.025.000	3	12.000.000	0	-	3	12.000.000	0	-	0	-	3	12.000.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kegiatan	1	18.000.000	0	0														0	-	0,00	0,00	KECAMATAN TIGANDERKET		
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perda/Perka da Kegiatan	10/10/5	166.000.000	4/4/2	179.836.064	2/2/1	11.026.000	0	-	2/2/1	11.026.000	0	-	0	-	2/2/1	11.026.000	100,00	100,00	6/6/3	190.862.064	97,78	114,98	KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	5	166.000.000	2	179.836.064	1	11.026.000	0,00	-	1	11.026.000	0	-	0	-	1	11.026.000	100,00	100,00	3	190.862.064	60,00	114,98	KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	04	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan				127.246.064	1	11.026.000	0	-	1	11.026.000	0	-	0	-	1	11.026.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGANDERKET	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan				52.590.000																			KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Urusan	10	362.238.595	4	107.017.810	2	36.336.260	0	-	0	-	2	36.336.260	0	-	2	36.336.260	100,00	100,00	6	143.354.070	60,00	39,57	KECAMATAN TIGANDERKET	
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	Kegiatan	10	362.238.595	4	107.017.810	2	36.336.260	0	-	0,00	-	2	36.336.260	0	-	2	36.336.260	100,00	100,00	6	143.354.070	60,00	39,57	KECAMATAN TIGANDERKET	

				4	5		6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17									
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
7	1	5	201	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	org		67.415.810	300	24.960.260	0		0		300	24.960.260	0		300	24.960.260	100,00	100,00						KECAMATAN TIGANDERKET		
7	1	05	201	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	org		5.900.000	170	11.376.000	0		0		170	11.376.000	0		170	11.376.000	100,00	100,00						KECAMATAN TIGANDERKET		
7	1	05	201	04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intru Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intru Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	org		33.702.000																			KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemdes	85	150.000.000	34	15.378.000	17	17.000.000	0	-	0	-	0	17	17.000.000	17	17.000.000	100,00	100,000	51,00	32.378.000	37,00	0,00	KECAMATAN TIGANDERKET		
7	1	06	201		Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilaksanakan	Kegiatan	15	150.000.000	6	15.378.000	3	17.000.000	0	0,00	-	0	-	3	17.000.000	3	17.000.000	100,00	100,000	9,00	32.378.000	37,00	0,00	KECAMATAN TIGANDERKET		
7	1	06	201	01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		5.340.000																			KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	06	201	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		6.638.000	1	17.000.000	0		0	-	0	-	1	17.000.000	1		0,00	0,00					KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	06	201	03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		7.634.000																			KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	06	201	05	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen		850.000																			KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	06	201	07	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen		850.000																			KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	06	201	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		850.000																			KECAMATAN TIGANDERKET			
					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				53.406.345.930		27.206.181.021																				
8	1				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				53.406.345.930		27.206.181.021		41.849.615.320		568.577.241		35.344.670.098		2.899.400.565		2.652.286.488		41.464.934.392		99,08		68.671.115.413		128,58	Bakesbangpol	
08	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	268		26.761.772.579	86	5.059.562.482	86	4.979.641.705	7	530.299.241	40	1.736.913.692	28	1.078.046.691	8	1.499.993.267	83	4.845.252.891	96,51	97,30	169	9.904.815.373	63,06	37,01	Bakesbangpol	
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	61	23.716.487.339	12	4.510.805.091	12	4.454.288.179	3	463.398.414	3	1.698.061.908		932.152.130	6	1.258.681.429	12	4.352.293.881	100,00	97,71	24	8.863.098.972	39,34	37,37	Bakesbangpol	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	0		32	4.317.605.091	42	4.282.784.581	35	453.298.414		1.653.761.908		900.872.130		1.173.001.429	35	4.180.933.881	83,33	97,62					Bakesbangpol	
8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen		1	193.200.000	12	171.503.598	1,00	10.100.000	5	44.300.000	3	31.280.000	3	85.680.000	12	171.360.000	100,00	99,92						Bakesbangpol	
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	paket	75	157.920.000	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		Bakesbangpol	
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	paket	113	2.177.065.240	47	327.807.068	60	342.029.928	5	34.177.071		11.580.200		91.525.954		191.095.350	5	328.378.575	8,33	96,01	52	656.185.643	46,02	30,14	Bakesbangpol	
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	paket		31	170.765.400	18	165.845.880,00	0,00	-	7	8.986.000	2	15.863.200	9	139.782.000	18	164.631.200	100,00	99,27						Bakesbangpol	
8	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga	paket		12	788.000	12	793.910,00	0,00	-	0	786.000	-	11	786.000	-	11	786.000	91,67	99,00						Bakesbangpol	
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket		2	10.569.200	2	10.053.410,00	0,00	-	0	-	1	4.850.000	1	5.100.000	2	9.950.000	100,00	98,97						Bakesbangpol	
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Undangan	dokemen		1	1.800.000	1	1.799.000	0,00	-	0	-	1	900.000		750.000	1	1.650.000	100,00	91,72						Bakesbangpol	
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	65	143.884.468	36	163.537.728	8,00	34.177.071	2	2.594.200	12	69.126.754	12	45.463.350	34	151.361.373	94,44	92,55							Bakesbangpol	
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	120.000.000	1	8.500.000	0	0,00	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0,00	0,00	1	8.500.000	20,00	7,08		Bakesbangpol	
8	1	1	2.07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit		120.000.000	1	8.500.000	0	-	0,00	0	0	-	0	0	-	0	0,00	0,00							Bakesbangpol	
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	10	342.700.000	4	124.742.823	16	133.803.598	3,00	25.663.756	1	17.133.584	7	39.170.107	4	33.185.488	15	115.152.935	93,75	86,06	19	239.895.758	190,00	70,00	Bakesbangpol	
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan		1	10.747.823	1	12.000.000	0,00	2.593.756	1	1.753.584		1.760.107		2.685.488	1	8.792.935	100,00	73,27						Bakesbangpol	
8	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan		2	14.125.000	3	14.200.000	0,00	-	0	-	1	6.650.000	2	7.430.000	3	14.080.000	100,00	99,15						Bakesbangpol	
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	laporan		1	99.870.000	12	107.603.598	2,00	23.070.000	2	15.380.000	4	30.760.000	4	23.070.000	12	92.280.000	100,00	85,76						Bakesbangpol	
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	4	247.600.000	4	87.707.500	4	49.520.000	1,00	7.060.000	1	10.138.000	1	15.198.500	1	17.031.000	4	49.427.500	100,00	99,81	8	137.135.000	200,00	55,39		Bakesbangpol
8	1	1	2.09	1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pejaknya	unit		4	87.707.500	4		1,00	7.060.000	1	10.138.000	1	15.198.500	1	17.031.000	4	49.427.500	100,00	0,00						Bakesbangpol	
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	Kegiatan	22	8.017.594.530	11	1.359.645.903	11	1.183.511.330	1,00	8.028.000	1	57.188.000	6	917.402.950	3	103.909.000	11	1.086.527.950	100,00	91,81	22	2.446.173.853	100,00	30,51	Bakesbangpol	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	22	8.017.594.530	11	1.359.645.903	11	1.183.511.330	1,00	8.028.000	1	57.188.000	6	917.402.950	3	103.909.000	11	1.086.527.950	100,00	91,81	22	2.446.173.853	100,00	30,51	Bakesbangpol	
8	1	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan yang disusun	dokumen		4	1.058.853.235	4	1.145.959.935	1,00	8.028.000	1	57.188.000	1	917.402.950	1	74.502.500	4	1.057.121.450	100,00	92,25						Bakesbangpol	
8	1	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dokumen		5	43.353.000	5	37.551.395	0,00	-	0	-	-	5	29.406.500	5	29.406.500	100,00	78,31							Bakesbangpol	
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pembinaan Partai Politik	orang	400	6.217.594.530	400	19.358.451.836	9	33.559.473.709	2,00	14.100.000	5	33.128.457.224	1	25.264.522	1	386.600.171	9	33.554.421.917	100,00	99,98	409	52.912.873.753	102,25	851,02	Bakesbangpol	

				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=138*100%		15=7+13		16=156*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitas kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitas kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	orang	400	6.217.594.530	400	19.358.451.836	9	33.559.473.709	2,00	14.100.000	5	33.128.457.224	1	25.264.522	1	386.600.171	9	33.554.421.917	100,00	99,98	409	52.912.873.753	102,25	851,02	Bakesbangpol
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta pemantauan situasi	orang	400		400	19.358.451.836	9	33.559.473.709	2,00	14.100.000	5	33.128.457.224	1	25.264.522	1	386.600.171	9	33.554.421.917	100,00	99,98					Bakesbangpol
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM yang aktif	%	80	474.790.880	0		0		0,00	-	0	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bakesbangpol	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	dokumen	12	474.790.880	0		0		0,00	-	0	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bakesbangpol	
8	1	4	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	dokumen	12		0	0	0	0,00	-	0	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00					Bakesbangpol		
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Pertemuan dan Sosialisasi	Kegiatan	172	9.498.593.411	32	1.428.520.800	36	1.756.889.443		13.880.000	6	358.861.182	18	721.669.402	9	520.658.550	33	1.615.069.134	91,67	91,93	65	3.043.589.934	37,79	32,04	Bakesbangpol
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi	Kegiatan	172	9.498.593.411	32	1.428.520.800	36	1.756.889.443		13.880.000	6	358.861.182	18	721.669.402	9	520.658.550	33	1.615.069.134	91,67	91,93	65	3.043.589.934	37,79	32,04	Bakesbangpol
8	1	5	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	Jumlah Dokumen Program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	Kegiatan	25		3	96.265.100	3	161.895.765	0,00	-	0	-	2	92.418.184	1	53.028.816	3	145.447.000	100,00	89,84				Bakesbangpol	
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Kegiatan	62		300	1.241.701.800	300	1.420.722.068	5	13.880.000	70	358.861.182	150	556.247.218	75	395.965.400	300	1.324.953.800	100,00	93,26				Bakesbangpol	
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Kegiatan	88		300	90.553.900	300	174.271.610	0,00	-	0	-	150	73.004.000	150	71.664.334	300	144.668.334	100,00	83,01				Bakesbangpol	
8	1	6			PROGRAM KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Pertemuan Forkopinda dan Forkopimcam	Kegiatan	20	2.436.000.000	0			370.099.133	1,00	2.270.000	1	63.250.000	1	157.017.000	1	141.125.500	4	363.662.500	0,00	98,26	4	363.662.500	20,00	14,93	Bakesbangpol
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kegiatan	20	2.436.000.000	4	0		370.099.133	1,00	2.270.000	1	63.250.000	1	157.017.000	1	141.125.500	4	363.662.500	0,00	98,26	8	363.662.500	40,00	14,93	Bakesbangpol
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Kegiatan	20	2.436.000.000	4	0	4	370.099.133	1,00	2.270.000	1	63.250.000	1	157.017.000	1	141.125.500	4	363.662.500	100,00	98,26				Bakesbangpol	



LAMPIRAN II

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. KARO
TAHUN 2026

No Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pendidikan			399.243.319.690							505.534.666.853	DINAS PENDIDIKAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			399.243.319.690							505.534.666.853	DINAS PENDIDIKAN
	1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			399.243.319.690							505.534.666.853	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	309.073.398.837						-	402.378.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	40.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	-	44.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan		44.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	307.369.320.326			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	-	400.400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											DINAS PENDIDIKAN
							0	3064 0	306.975.960.326	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan		400.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23 Dokumen	393.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan		400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	142.590.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	-	148.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan		78.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36 Dokumen	67.590.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan		70.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	524.205.541			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	-	571.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	18.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	117.008.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	130.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	65.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	150.798.781	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	160.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	18.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	171.398.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	180.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	480.462.970			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	545.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	55.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	80.462.970	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	90.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	439.980.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	590.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.800.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	336.180.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	480.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	76.840.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	76.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pendidikan	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
2	1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan	74,33%	89.740.470.853					-	102.644.666.853	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	49.650.500.853			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	53.451.500.853	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	400.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	400.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat		600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	4 Paket	400.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat		500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat		350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	300 Orang	1.080.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat		1.080.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1900 Orang	1.001.500.853	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat		1.001.500.853	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	278 Satuan Pendidikan	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat		250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	278 Satuan Pendidikan	37.554.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat		40.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	278 Orang	320.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat		350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar										DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		100 Orang	120.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		140.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		120 Konten Digital	190.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		100 Orang	180.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		240.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1 Dokumen	400.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		34 Komunitas	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		1 Kegiatan	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	45	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		5000 Buku	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		950.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	1.500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	110 Orang	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	278 Satuan Pendidikan	70.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	400.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	53	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	700.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	54	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1015 Peserta Didik	485.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.01	55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	34.910.100.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	43.345.200.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		330.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		4.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium											DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	400.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	400.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	800 Peserta Didik	610.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200 Peserta Didik	720.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		750.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	207 Orang	745.200.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		745.200.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	800 Orang	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		650.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	71 Satuan Pendidikan	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		230.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	39 Satuan Pendidikan	23.119.900.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		23.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	71 Orang	410.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	80 Orang	160.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		180.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital	190.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	90 Orang	180.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	15.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		230.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	68 Satuan Pendidikan	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		230.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	1.500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.650.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	160.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		180.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	61	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1200 Buku	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		130.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		230.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	400.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		440.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.02	67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	4.319.260.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD	-	4.827.566.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD											DINAS PENDIDIKAN

No Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	378 Peserta Didik	170.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		187.550.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	9 Orang	32.400.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		32.400.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	74 Orang	125.800.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		140.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		330.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	160 Satuan Pendidikan	2.980.560.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		3.278.616.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		110.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	22	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	23	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		55.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		55.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	29	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	6 Komunitas	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	34	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	800 Peserta didik	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		110.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	39	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		70.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	80.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		88.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		55.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.03	47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD											DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	100 Satuan Pendidikan	60.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan PAUD		66.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	860.610.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1.020.400.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	54 Peserta Didik	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		44.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9 Orang	32.400.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		32.400.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	35 Orang	59.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	4 Satuan Pendidikan	150.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		165.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4 Satuan Pendidikan	248.710.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		260.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	12 Orang	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		44.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	21	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		33.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	1	2	3	4	5			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	1	2	2.04	24	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5 Orang	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	25	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	26	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		11.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	30	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		12.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		11.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	80.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		88.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	42	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Orang	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	55.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	2	2.04	55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	55.000.000	DINAS PENDIDIKAN
3	1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Terwujudnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang adaptif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik	100%	100.000.000					-	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	100 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	3	2.01	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	100 Buku	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
4	1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja guru serta tenaga kependidikan	100%	130.000.000					-	180.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Pemerataan Guru	25%	130.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Guru Dinas Pendidikan	180.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Guru Dinas Pendidikan	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	80.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Guru Dinas Pendidikan	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
5	1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Peningkatan persentase lembaga PAUD & Pendidikan nonformal yang memiliki izin operasional resmi dan terakreditasi	100%	199.450.000					-	212.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	1	1	5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan Pendidikan Swasta/ Masyarakat yang memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD & Pendidikan Non Formal	163 satuan pendidikan	199.450.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	PAUD dan Pendidikan Nonformal di Kab Karo	-	212.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	5	2.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										DINAS PENDIDIKAN	
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	116.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	PAUD dan Pendidikan Nonformal di Kab Karo		122.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	1	5	2.02	3	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										DINAS PENDIDIKAN	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	83.450.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	PAUD dan Pendidikan Nonformal di Kab Karo		90.000.000	DINAS PENDIDIKAN
						Dinas Kesehatan			171.801.756.948							157.144.356.527	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			171.801.756.948							157.144.356.527	DINAS KESEHATAN
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			171.801.756.948							157.144.356.527	DINAS KESEHATAN
6	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	100.131.823.190					-		98.619.750.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	100%	134.578.162			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan	-	85.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	134.578.162	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan		85.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	98.312.245.028			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan	-	96.779.120.198	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1080 Orang/bulan	98.076.925.028	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan		96.118.760.198	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	235.320.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan		660.360.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	50.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan	-	705.600.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	50.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan		705.600.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	433.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan	-	245.529.802	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	20.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan		7.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan		80.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan		25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan		26.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan		7.150.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan		99.879.802	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	30.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan	-	30.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan		30.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	672.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan	-	630.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan		50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	580.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan	580.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53 Unit	500.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan	144.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	20.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan	92.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan	2.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	450.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai Dinas Kesehatan	50.000.000	DINAS KESEHATAN
7	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	69.562.660.758					-	55.651.758.900	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	24.298.779.133			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan, Masyarakat Kab Karo	16.386.513.133	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	3.936.055.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Rumah Kabanjahe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan, Masyarakat Kab Karo	5.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	8.425.000.000	Kab. Karo, Payung, Batukarang	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan, Masyarakat Kab Karo	0	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	850.000.000	Kab. Karo, Tigapanah, Tigapanah Kab. Karo, Merek, Merek Kab. Karo, Dolat Rayat, Dolat Rayat Kab. Karo, Merdeka, Merdeka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan, Masyarakat Kab Karo	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya										DINAS KESEHATAN

No Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	14 Unit	1.450.000.000	Kab. Karo, Merek, Nagara Kab. Karo, Merek, Pangambatan Kab. Karo, Juhar, Lau Lingga Kab. Karo, Juhar, Naga Kab. Karo, Juhar, Buluh Pancur Kab. Karo, Juhar, Kutagugung Kab. Karo, Juhar, Lau Kidupen Kab. Karo, Simpang Empat, Nangbelawan Kab. Karo, Simpang Empat, Unggajulu Kab. Karo, Simpang Empat, Bulanbaru Kab. Karo, Kutabuluh, Buah Raya Kab. Karo, Kutabuluh, Gunung Meriah Kab. Karo, Kutabuluh, Jinabun Kab. Karo, Kutabuluh, Negeri Jahe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan, Masyarakat Kab Karo		1.224.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan										DINAS KESEHATAN	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5 Unit	550.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I Kab. Karo, Munte, Munte Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan, Masyarakat Kab Karo	285.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										DINAS KESEHATAN	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	19 Unit	1.520.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan, Masyarakat Kab Karo	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										DINAS KESEHATAN	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	250 Unit	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan, Masyarakat Kab Karo	109.789.000	DINAS KESEHATAN	
	1	2	2	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										DINAS KESEHATAN	
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	38 Paket	7.160.831.133	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan, Masyarakat Kab Karo	7.160.831.133	DINAS KESEHATAN	
	1	2	2	2.01	24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga										DINAS KESEHATAN	
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	3800000 Keluarga	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat	Tenaga Kesehatan, Masyarakat Kab Karo	200.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1	2	2	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan										DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	228 Paket	106.893.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan, Masyarakat Kab Karo		106.893.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	45.128.881.625			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo	-	38.340.245.767	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7700 Orang	950.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo		950.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7631 Orang	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo		2.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7000 Orang	80.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo		80.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35161 Orang	850.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo		1.175.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54498 Orang	350.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo		675.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1600 Orang	135.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo		135.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42567 Orang	485.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo		485.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108520 Orang	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo		25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7770 Orang	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter		25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	605 Orang	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6867 Orang	300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter		300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11902 Orang	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter		200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	20 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter		50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	20 Dokumen	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter		80.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20 Dokumen	2.510.800.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter		3.510.800.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20 Dokumen	15.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter		15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20 Dokumen	140.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter		140.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20 Dokumen	534.905.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo	534.905.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	20 Dokumen	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo	25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo	25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	900 Orang	72.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo	72.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1.128.991.529	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo	1.168.991.529	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20 Dokumen	31.964.002.119	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo	20.037.749.238	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	250 Orang	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	5 Unit	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo	600.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	228 Dokumen	4.010.782.977	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo	5.500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya										DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo	50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)										DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	500 Laporan	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo		20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											DINAS KESEHATAN
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5000 Orang	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo		260.800.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											DINAS KESEHATAN
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	20.800.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo		30.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											DINAS KESEHATAN
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1250 Orang	20.800.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo		30.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak											DINAS KESEHATAN
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	20 Dokumen	20.800.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas dan Masyarakat Kab Karo		30.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	100.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan Kab Karo	-	100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	240 Dokumen	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan Kab Karo		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	100%	35.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Rumah Sakit di Kab Karo	-	825.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	5 Unit	15.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Rumah Sakit di Kab Karo		15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	50 Unit	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Rumah Sakit di Kab Karo		810.000.000	DINAS KESEHATAN
8	1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	1.370.000.000					-		2.126.650.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	2	3	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	100%	100.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit,Klinik swasta)	-	17.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	3	2.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	40 Dokumen	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit,Klinik swasta)		17.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	79%	750.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan Kab Karo	-	1.776.650.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	57 Orang	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan Kab Karo		1.641.600.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	19 Dokumen	650.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan Kab Karo		135.050.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15%	520.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan di kab Karo	-	332.500.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 Orang	520.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kesehatan di kab Karo		332.500.000	DINAS KESEHATAN
9	1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	222.273.000					-	231.197.627	DINAS KESEHATAN	
	1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	94%	30.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas,Masyarakat di Kab Karo	-	26.924.627	DINAS KESEHATAN
	1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	65 Dokumen	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Puskesmas,Masyarakat di Kab Karo		26.924.627	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	1	2	4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	94%	46.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Produsen P IRT dan Masyarakat	-	55.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										DINAS KESEHATAN	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 Dokumen	46.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Produsen P IRT dan Masyarakat		55.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	4	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	50%	97.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Produsen Makanan Jajanan	-	100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan										DINAS KESEHATAN	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	20 Dokumen	97.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Produsen Makanan Jajanan		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	4	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	75%	49.273.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Produsen dan Pedagang makanan jajanan	-	49.273.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan										DINAS KESEHATAN	
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	14 Unit	49.273.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Produsen dan Pedagang makanan jajanan		49.273.000	DINAS KESEHATAN
10	1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	515.000.000					-	515.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70 % 90 %	15.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	-	-	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat										DINAS KESEHATAN	
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	20 Dokumen	15.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	-		15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	500.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat	Tenaga Kesehatan, Kader kesehatan dan Masyarakat	-	500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20 Dokumen	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat	Tenaga Kesehatan, Kader kesehatan dan Masyarakat	500.000.000	DINAS KESEHATAN
						Rumah Sakit Umum Daerah			53.386.222.462						51.035.966.036	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			53.386.222.462						51.035.966.036	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			53.386.222.462						51.035.966.036	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
11	1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Indeks	52.853.749.950					-	50.606.966.036	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	25.419.512.559			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.976.249.633	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	219 Orang/bulan	25.223.683.809	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.943.249.633	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	195.828.750	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	211.085.264			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.085.264	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.131.250	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.131.250	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	171.954.014	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.954.014	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.430.755.986			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.664.359.998	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan	428.400.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.600.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	314 Laporan	3.002.355.986	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.282.759.998	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	55.271.141			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	- Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		55.271.141	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	55.271.141	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		55.271.141	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	23.737.125.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	- Terlaksananya Pelayanan BLUD		23.700.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	23.737.125.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Terlaksananya Pelayanan BLUD		23.700.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
12	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Indikator SPM Rumah Sakit/ Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar/ Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar	95/95/100 %/%/%	532.472.512					-		429.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	532.472.512			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pervujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat	- Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		429.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	253.472.512	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pervujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		150.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota											RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	279.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		279.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			97.469.259.250							95.450.729.556	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			97.469.259.250							95.450.729.556	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			97.469.259.250							95.450.729.556	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
13	1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	9.602.470.062					-		9.868.668.772	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Adminitiasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.204.340.773			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo	-	6.830.647.072	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	720 Orang/bulan	6.984.340.773	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo		6.298.892.072	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	220.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo		531.755.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	60.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo	-	60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	60.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo		60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	838.300.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo	-	1.092.701.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.300.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo		3.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo		331.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	27 Paket	18.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo		25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	27.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo		32.401.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	540.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo		700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	849.829.289			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo	-	985.320.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo		60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo		58.560.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	767.029.289	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo	866.760.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	650.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo	900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	50.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo	60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	18 Unit	600.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas PUTR Kab.Karo	840.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
14	1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	56%	13.695.398.000					-	17.442.140.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Saluran Irigasi yang dilakukan Peningkatan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan pada tahun anggaran tersebut	30.1 KM	13.695.398.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo	17.442.140.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	24 KM	7.300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo	550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.1 KM	3.239.398.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo	12.936.140.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 KM	3.156.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo	3.956.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
15	1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	74,80%	4.459.323.000					-	4.559.323.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi yang layak pada tahun anggaran tersebut	200 SR	4.459.323.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo	4.559.323.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	5	2.01	23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	1 M²/Hari	4.409.323.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo	4.409.323.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	5	2.01	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50 Orang	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
16	1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	64.5 %	7.150.000.000					-	4.758.265.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang dilakukan pembangunan,peningkatan dan Pemeliharaan Yang Terhubung Ke pembuangan akhir pada tahun anggaran tersebut	26 Sistem Drainase	7.150.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo	-	4.758.265.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	6	2.01	24	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2 Sistem Drainase Perkotaan	2.450.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		1.358.265.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	6	2.01	28	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	6	2.01	29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4 Sistem Drainase Perkotaan	2.200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		1.700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	6	2.01	31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	20 Sistem Drainase Perkotaan	1.500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
17	1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	63%	1.357.000.000					-	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Yang dilakukan Pembangunan dan Rehabilitasi pada tahun anggaran tersebut	2 Bangunan Gedung	1.357.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo	-	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	8	2.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.357.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
18	1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	25%	600.000.000					-	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Yang dilakukan Penataan dan Pembangunan di Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran tersebut	2 Kawasan	600.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo	-	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	9	2.01	11	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	600.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
19	1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	64%	60.405.068.188					-	56.272.332.784	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dan jembatan Yang dilakukan pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan pada tahun anggaran tersebut	38 KM	60.405.068.188			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo	-	56.272.332.784	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	3	10	2.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	10	2.01	51	Pemeliharaan Rutin Jalan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	12 KM	4.050.393.471	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		4.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	10	2.01	53	Pembangunan Jalan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	6 KM	17.132.063.708	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		8.321.101.848	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	10	2.01	55	Rehabilitasi Jalan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.2 KM	550.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		3.012.763.936	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	10	2.01	57	Penggantian Jembatan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	0 Meter	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	10	2.01	58	Rehabilitasi Jembatan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	30 Meter	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	10	2.01	59	Rekonstruksi Jalan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	14 KM	37.372.611.009	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		38.638.467.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	10	2.01	67	Pemeliharaan Rutin Jembatan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembatan	300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
20	1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	74%	200.000.000						-	950.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota pada tahun anggaran tersebut	1 Dokumen	50.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo	-	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	12	2.01	13	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	1	3	12	2.02				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran tersebut	1 Dokumen	50.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo	-	750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	12	2.02	5	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran tersebut	1 Dokumen	100.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo	-	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			9.122.474.984						10.951.531.936	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.772.474.984						10.491.531.936	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			8.772.474.984						10.491.531.936	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
21	1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi	100 % 81 Indeks	4.372.617.456					-	4.691.531.936	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capain Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	3.897.254.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Dinas Perkimtan	-	4.235.578.480	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.447.254.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Dinas Perkimtan		3.885.578.480	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	450.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Dinas Perkimtan		350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata capaian kinerja Sub. Kegiatan pada Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	50.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Perkimtan	-	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	50.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Perkimtan		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rata-rata capaian kinerja sub. kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	301.480.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Perkimtan	-	282.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Perkimtan		1.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket	80.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Perkimtan		60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	12.500.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Perkimtan		13.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.780.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Perkimtan		3.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 Dokumen	4.200.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Perkimtan		4.200.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	200.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Perkimtan		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata-rata capaian kinerja sub. kegiatan pada kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	42.930.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Perkimtan	-	43.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Perkimtan		28.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	14.930.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Perkimtan		15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata-rata capaian kinerja sub. kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	80.953.456			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Perkimtan	-	80.953.456	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	80.953.456	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Perkimtan		80.953.456	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
22	1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara korban Bencana dan yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah undefined	100 % 3,0 Persen undefined	150.000.000						-	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota Terlaksannnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 % 9,1 Persen	150.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo	-	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	2	2.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
23	1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Target 2026 25%	Pagu Indikatif (Rp) 300.000.000	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	25%	300.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo	-	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo		350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
24	1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan	100 % 15,19 % undefined undefined	3.949.857.528					-	5.350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	3.949.857.528			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	-	-	5.350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	-	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 Laporan	100.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	-	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1	4	5	2.01	12	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	50 Lokasi	3.749.857.528	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	-	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			350.000.000						460.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			350.000.000						460.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
25	2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1 Kasus 70 %	150.000.000					-	210.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 % 70 %	150.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo	-	210.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2	10	4	2.01	4	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2	10	4	2.01	5	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo	60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
26	2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	3 Ha 66,60 %	200.000.000					-	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Terselenggarannya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 % 66,60 %	200.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo	-	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
						Satuan Polisi Pamong Praja			15.045.254.514						18.796.685.986	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.045.254.514						18.796.685.986	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15.045.254.514						18.796.685.986	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
27	1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	99.49 %	14.338.883.514					-	15.500.493.726	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan Jumlah laporan keuangan yang disusun	75 Orang/Bulan 15 Laporan	7.476.444.486			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Satpol PP Kab. Karo	-	7.756.539.844	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	7.354.284.486	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Satpol PP Kab. Karo	7.622.163.844	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	122.160.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Satpol PP Kab. Karo	134.376.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan Non ASN yang menerima pakaian dinas sesuai standar dan peraturan	1 Orang	500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	-	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	1	5	1	2.06		Jumlah absensi kepegawaian yang diproses Jumlah kegiatan rapat yang didukung Jumlah pengajuan cuti yang diproses Jumlah surat yang diproses	Target 2026 378 Orang/bulan 10 Laporan 75 Orang 100 Surat	Pagu Indikatif (Rp) 270.159.028	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN dan Non ASN Satpol PP Kab. Karo	-	497.200.432	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN dan Non ASN Satpol PP Kab. Karo			38.153.170	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN dan Non ASN Satpol PP Kab. Karo			92.333.890	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN dan Non ASN Satpol PP Kab. Karo			38.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN dan Non ASN Satpol PP Kab. Karo			28.213.372	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	149.659.028	Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN dan Non ASN Satpol PP Kab. Karo			200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN dan Non ASN Satpol PP Kab. Karo			100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	5 Unit	15.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karo	-	30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	15.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karo			30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa yang disediakan	3 Jenis	6.576.780.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN dan Non ASN Satpol PP Kab. Karo	-	6.716.753.450	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.220.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN dan Non ASN Satpol PP Kab. Karo			57.529.450	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	20.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN dan Non ASN Satpol PP Kab. Karo			10.978.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.505.560.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN dan Non ASN Satpol PP Kab. Karo		6.648.246.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
28	1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	64,28 % 73,54 %	656.371.000						-	2.046.192.260	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani Jumlah kegiatan preventif yang dilakukan	20 Laporan 365 Laporan	631.371.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat umum, Pengguna jalan, Pedagang dan pelaku usaha, Anak-anak dan remaja, Kelompok rentan, Penghuni kos-kosan atau rumah sewa, dan Pengunjung tempat wisata	-	1.796.192.260	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat umum, Pengguna jalan, Pedagang dan pelaku usaha, Anak-anak dan remaja, Kelompok rentan, Penghuni kos-kosan atau rumah sewa, dan Pengunjung tempat wisata		100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat umum, Pengguna jalan, Pedagang dan pelaku usaha, Anak-anak dan remaja, Kelompok rentan, Penghuni kos-kosan atau rumah sewa, dan Pengunjung tempat wisata		108.024.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat umum, Pengguna jalan, Pedagang dan pelaku usaha, Anak-anak dan remaja, Kelompok rentan, Penghuni kos-kosan atau rumah sewa, dan Pengunjung tempat wisata		100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.01	14	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	5 Orang	500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat umum, Pengguna jalan, Pedagang dan pelaku usaha, Anak-anak dan remaja, Kelompok rentan, Penghuni kos-kosan atau rumah sewa, dan Pengunjung tempat wisata		200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan											SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	20 laporan	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat umum, Pengguna jalan, Pedagang dan pelaku usaha, Anak-anak dan remaja, Kelompok rentan, Penghuni kos-kosan atau rumah sewa, dan Pengunjung tempat wisata	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.01	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentrman dan Ketertiban Umum										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	27 Unit	545.871.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat umum, Pengguna jalan, Pedagang dan pelaku usaha, Anak-anak dan remaja, Kelompok rentan, Penghuni kos-kosan atau rumah sewa, dan Pengunjung tempat wisata	788.168.260	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan peraturan Jumlah pelanggaran yang ditemukan Jumlah teguran yang diberikan	9 Laporan 27 Laporan 27 Teguran	23.400.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Warga masyarakat, Pengusaha dan pedagang, Pemilik dan pengelola bangunan, Pengelola tempat-tempat umum, serta Instansi Pemerintah dan lembaga	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	15.350.000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Warga masyarakat, Pengusaha dan pedagang, Pemilik dan pengelola bangunan, Pengelola tempat-tempat umum, serta Instansi Pemerintah dan lembaga	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.02	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	3 Laporan	2.050.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Warga masyarakat, Pengusaha dan pedagang, Pemilik dan pengelola bangunan, Pengelola tempat-tempat umum, serta Instansi Pemerintah dan lembaga	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.02	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	6.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Warga masyarakat, Pengusaha dan pedagang, Pemilik dan pengelola bangunan, Pengelola tempat-tempat umum, serta Instansi Pemerintah dan lembaga	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	5 Orang	1.600.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	PPNS	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	2	2.03	6	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1.600.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	PPNS	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
29	1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	84,05 % 88,25 %	50.000.000					-	1.250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kebakaran dan non kebakaran yang diterima dan ditangani Jumlah peningkatan sarana dan prasarana	20 Laporan 3 Unit	49.500.000			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Masyarakat umum, Penghuni bangunan, Pengusahaan dan pemilik bangunan, Petugas keamanan dan keselamatan, serta Anak-anak dan lansia	-	1.150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Laporan	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Masyarakat umum, Penghuni bangunan, Pengusahaan dan pemilik bangunan, Petugas keamanan dan keselamatan, serta Anak anak dan lansia		100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	7.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Masyarakat umum, Penghuni bangunan, Pengusahaan dan pemilik bangunan, Petugas keamanan dan keselamatan, serta Anak anak dan lansia		50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	4	2.01	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 Unit	17.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Masyarakat umum, Penghuni bangunan, Pengusahaan dan pemilik bangunan, Petugas keamanan dan keselamatan, serta Anak anak dan lansia		1.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan sosialisasi/ edukasi pencegahan kebakaran dilaksanakan	1 Kegiatan	500.000			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Masyarakat umum di lingkungan rawan kebakaran, tokoh masyarakat dan pemuka adat, pengelola pasar tradisional dan pusat kegiatan ekonomi, pelajar dan guru, pengelola fasilitas umum dan sosial, kelompok UMKM, relawan desa dan karang taruna	-	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
							0	5 0	500.000		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Masyarakat umum di lingkungan rawan kebakaran, tokoh masyarakat dan pemuka adat, pengelola pasar tradisional dan pusat kegiatan ekonomi, pelajar dan guru, pengelola fasilitas umum dan sosial, kelompok UMKM, relawan desa dan karang taruna		100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah			6.610.320.288							6.227.508.555	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.610.320.288							6.227.508.555	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.610.320.288							6.227.508.555	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
30	1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	15.15 %	5.300.758.555					-		5.300.508.555	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20%	22.240.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo	-	22.240.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.240.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo		22.240.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.46 %	4.266.479.829			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo	-	4.266.479.829	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.184.619.829	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo		4.184.619.829	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	81.860.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pegawai BPBD Kab. Karo		81.860.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.00 %	51.240.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo	-	51.240.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	61 Paket	51.240.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo		51.240.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.00 %	348.143.026			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo	-	348.143.026	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.997.410	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo		3.997.410	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	52.344.200	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo		52.344.200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	9.454.766	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo		9.454.766	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	43.600.650	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo	43.600.650	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	46.390.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo	46.390.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	192.356.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo	192.356.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.75 %	13.483.700			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo	13.233.700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	12.233.700	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo	12.233.700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.250.000	Kab. Karo, Berastagi, R a y a	-	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai BPBD Kab. Karo	1.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.00 %	426.402.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Gedung Kantor dan PHL - BPBD Kab. Karo	426.402.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Gedung Kantor dan PHL BPBD Kab. Karo	21.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	405.402.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Gedung Kantor dan PHL BPBD Kab. Karo	405.402.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.84 %	172.770.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	172.770.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	157.480.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	157.480.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	15.290.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	15.290.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
31	1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	21.35 %	1.309.561.733					-	927.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	9.78 %	150.000.000			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga Negara yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	-	145.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.01	7	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	175 Orang	150.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga Negara yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana		145.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penyediaan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	32.91 %	651.000.000			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana	-	461.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	80 Unit	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana		40.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.02	18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	400 Orang	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana		100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.02	19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25 Keluarga	75.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana		30.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.02	20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	1.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana		1.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.02	21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.02	22	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	85.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana		100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.02	23	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	70.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana		50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.02	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	70.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana		90.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.02	27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	1	5	3	2.02	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	105 Kawasan	110.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penyediaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	14.67 %	196.750.000			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga Negara yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	111.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	60 Orang	79.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga Negara yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.03	9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60 Orang	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga Negara yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.03	12	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	67.750.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga Negara yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	1.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penyediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana diselesaikan	8.03 %	311.811.733			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga Negara yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	210.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.04	3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	35.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga Negara yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	30.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	41.811.733	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	Warga Negara yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	45.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	1 Kegiatan	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga Negara yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.04	14	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	35.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga Negara yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	35.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	5	3	2.04	15	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Warga Negara yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Dinas Sosial			5.275.171.472						433.603.673	DINAS SOSIAL
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.275.171.472						433.603.673	DINAS SOSIAL
	1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.275.171.472						433.603.673	DINAS SOSIAL
32	1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	4.214.381.762					-	369.924.702	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.293.871.762			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Sosial	-	277.443.702	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	3.156.221.762	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Sosial		263.678.702	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen Dokumen	137.650.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Sosial		13.765.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	45.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara	-	4.500.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		4.500.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	247.370.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara	-	25.237.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		1.000.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	38.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		3.800.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	16.500.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		1.650.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	19.900.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		1.990.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	450 Dokumen	2.970.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		297.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	15.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		1.500.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan	150.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		15.000.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	228.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara	-	22.800.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.07	5	Pengadaan Mebel										DINAS SOSIAL	

No Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	85.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		8.500.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											DINAS SOSIAL
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	143.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		14.300.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	220.440.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara	-	22.044.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											DINAS SOSIAL
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.760.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		2.976.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS SOSIAL
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.100.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		910.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											DINAS SOSIAL
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	181.580.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		18.158.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	179.700.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara	-	17.900.000	DINAS SOSIAL
	1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											DINAS SOSIAL
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	179.700.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara		17.900.000	DINAS SOSIAL
33	1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	65,38 %	270.000.000						-	0	DINAS SOSIAL
	1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	270.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat	-	0	DINAS SOSIAL
	1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											DINAS SOSIAL
							Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		0	DINAS SOSIAL
	1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											DINAS SOSIAL
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		0	DINAS SOSIAL
	1	6	2	2.03	13	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota											DINAS SOSIAL
							Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	92 Lembaga	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		0	DINAS SOSIAL
34	1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	65,38 % 65,38 %	20.000.000					-	2.000.000	DINAS SOSIAL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan emulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100 % 100 %	20.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat	-	2.000.000	DINAS SOSIAL
	1	6	3	2.01	3	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		2.000.000	DINAS SOSIAL
35	1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	65,38%	310.789.710					-		36.678.971	DINAS SOSIAL
	1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatanRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 % 100 %	250.789.710			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat	-	30.678.971	DINAS SOSIAL
	1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan											DINAS SOSIAL
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		200.000	DINAS SOSIAL
	1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang											DINAS SOSIAL
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	15.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		5.000.000	DINAS SOSIAL
	1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu											DINAS SOSIAL
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	75.789.710	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		11.578.971	DINAS SOSIAL
	1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga											DINAS SOSIAL
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		2.000.000	DINAS SOSIAL
	1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat											DINAS SOSIAL
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		5.000.000	DINAS SOSIAL
	1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan											DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	45.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		900.000	DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan											DINAS SOSIAL	
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		6.000.000	DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 % 100 %	60.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat	-	6.000.000	DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA											DINAS SOSIAL	
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		3.000.000	DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan											DINAS SOSIAL	
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		3.000.000	DINAS SOSIAL	
36	1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial	97,66%	100.000.000					-		0	DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	100.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat	-		0	DINAS SOSIAL
	1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											DINAS SOSIAL	
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	3000 Orang	70.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		0	DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat											DINAS SOSIAL	
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		0	DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.02	6	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga											DINAS SOSIAL	
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		0	DINAS SOSIAL	
37	1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	110.000.000					-		0	DINAS SOSIAL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 % 100 %	100.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat	-	0	DINAS SOSIAL
	1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		0	DINAS SOSIAL
	1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	80.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat		0	DINAS SOSIAL
	1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja pada subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 % 100 %	10.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Tagana	-	0	DINAS SOSIAL
	1	6	6	2.02	6	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	30 Orang	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Tagana		0	DINAS SOSIAL
38	1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	250.000.000					-	25.000.000	DINAS SOSIAL	
	1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	250.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Makam Pahlawan	-	25.000.000	DINAS SOSIAL
	1	6	7	2.01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Makam Pahlawan		0	DINAS SOSIAL
	1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										DINAS SOSIAL	
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4 Makam	200.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Makam Pahlawan	25.000.000	DINAS SOSIAL	
						Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			8.189.169.709						2.092.200.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.189.169.709						2.092.200.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			5.860.379.513						634.200.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
39	2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	96,6 persen	4.690.379.513					-	204.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	3.783.908.112			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara	-	0	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	3.583.908.112	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Sipil Negara			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	200.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan	Aparatur Sipil Negara			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	45.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan	Aparatur Sipil Negara	-		0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan	Aparatur Sipil Negara			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 persen	249.091.401			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan	Jumlah Dokumen Surat Pertanggung Jawaban	-		0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	14.091.401	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan	Jumlah Dokumen Surat Pertanggung Jawaban			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	50.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan	Jumlah Dokumen Surat Pertanggung Jawaban			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	25.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan	Jumlah Dokumen Surat Pertanggung Jawaban			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	20.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan	Jumlah Dokumen Surat Pertanggung Jawaban			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	140.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan	Jumlah Dokumen Surat Pertanggung Jawaban			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	150.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan	Aparatur Sipil Negara	-	60.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Aparatur Sipil Negara		60.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	207.380.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Aparatur Sipil Negara	-		0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Aparatur Sipil Negara			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	167.380.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Aparatur Sipil Negara			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	255.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Aparatur Sipil Negara	-	144.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	45.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Aparatur Sipil Negara			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	60.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Aparatur Sipil Negara		62.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	50.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Aparatur Sipil Negara		31.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Aparatur Sipil Negara		51.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
40	2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase Tenga Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi	16 PERSEN	950.000.000					-		250.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenga Kerja yang dilatih yang bersertifikat Kompetensi	64 Orang	900.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Perusahaan dan Pekerja	-	250.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Perusahaan dan Pekerja		250.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	64 Unit	400.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Perusahaan dan Pekerja			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	20.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Lembaga Pelatihan Swasta	-		0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Lembaga Pelatihan Swasta			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kerja	-		0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Tenaga Kerja			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
41	2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	20 PERSEN	40.000.000						-	55.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenga Kerja yang mendapatkan informasi Tenaga Kerja	300 Orang	40.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pencari Kerja	-	55.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	300 Orang	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pencari Kerja		55.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
42	2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	37 persen	180.000.000						-	125.200.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan yang disahkan	4,80 PERSEN	50.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Perusahaan dan Pekerja	-	35.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	4 Perusahaan	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Perusahaan dan Pekerja			DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Perusahaan dan Pekerja		35.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Perkara	130.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Perusahaan dan Pekerja	-	90.200.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	70.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Perusahaan dan Pekerja		65.200.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Perusahaan dan Pekerja		25.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Perusahaan dan Pekerja			DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			2.328.790.196							1.458.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
43	2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-	85.802.145						-		DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	85.802.145			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	Koperasi di wilayah kerja Pemkab. Karo	-		DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	11 Unit Usaha	85.802.145	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	Koperasi diwilayah kerja Pemkab. Karo			DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
44	2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	11 Unit Usaha	85.802.145						-	120.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang aktif	11 Unit Usaha	85.802.145			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	Koperasi diwilayah kerja Pemkab. Karo	-	120.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	3	2.01	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	85.802.145	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	Koperasi diwilayah kerja Pemkab. Karo		120.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
45	2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	85.802.142						-		DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	85.802.142			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	Koperasi diwilayah kerja Pemkab. Karo	-		DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	4	2.01	3	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	85.802.142	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	Koperasi diwilayah kerja Pemkab. Karo			DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
46	2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	425 Orang	1.142.241.040						-	690.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan	425 Orang	1.142.241.040			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	SDM Koperasi	-	690.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	192 Orang	1.142.241.040	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- PK2UKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	SDM Koperasi		690.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
47	2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	63 Kelompok Masyarakat	209.142.724						-	190.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga dan Kelompok masyarakat yang mendapat pendampingan	17 Kelompok Masyarakat	209.142.724			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	Masyarakat di Kabupaten Karo	-	190.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	6	2.01	3	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	17 Kelompok Masyarakat	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	Masyarakat di Kabupaten Karo			DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	6	2.01	5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	6 Unit Usaha	109.142.724	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	Masyarakat di Kabupaten Karo	190.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	6	2.01	9	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha	70.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	Masyarakat di Kabupaten Karo	0		DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
48	2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	70 Unit Usaha	590.000.000					-	338.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	70 Unit Usaha	590.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pengusaha UMKM di Kabupaten Karo	-	338.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pengusaha UMKM di Kabupaten Karo	152.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 Unit Usaha	80.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pengusaha UMKM di Kabupaten Karo	81.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pengusaha UMKM di Kabupaten Karo	0		DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50 Orang	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pengusaha UMKM di Kabupaten Karo			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	7	2.01	15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pengusaha UMKM di Kabupaten Karo	105.000.000		DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
49	2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Wirausaha yang terfasilitasi	3,2 persen	130.000.000						-	120.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jumlah wirausaha yang terfasilitasi	250 Unit Usaha	130.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pengusaha UMKM di Kabupaten Karo	-	120.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	8	2.01	2	Pengembangan Usaha Mikro											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	15 Unit Usaha	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pengusaha UMKM di Kabupaten Karo			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	8	2.01	3	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah yang Difasilitasi	15 Orang	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pengusaha UMKM di Kabupaten Karo			0 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	8	2.01	6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi											DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	20 Unit Usaha	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Pengusaha UMKM di Kabupaten Karo	120.000.000		DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB			9.627.266.721							9.400.174.479	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.627.266.721							9.400.174.479	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			5.901.334.470							5.709.794.479	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
50	2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100 Persen	5.350.334.470						-	5.392.794.479	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.640.714.125			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Pemkab Karo	-	4.652.714.125	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4.392.714.125	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Pemkab Karo		4.392.714.125	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							0	12 0	248.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	ASN Pemkab Karo		260.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	271.750.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	ASN Pemkab Karo	-	302.300.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.750.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	ASN Pemkab Karo		2.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	ASN Pemkab Karo		100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	ASN Pemkab Karo		17.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	ASN Pemkab Karo		2.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	170.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeakharakter	ASN Pemkab Karo		180.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	41.350.345			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeakharakter	ASN Pemkab Karo	-	41.350.354	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	41.350.345	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeakharakter	ASN Pemkab Karo		41.350.354	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	239.420.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeakharakter	ASN Pemkab Karo	-	239.430.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.420.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeakharakter	ASN Pemkab Karo		24.430.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	215.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeakharakter	ASN Pemkab Karo		215.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	157.100.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeakharakter	ASN Pemkab Karo	-	157.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	150.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkeakharakter	ASN Pemkab Karo		150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	7.100.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	ASN Pemkab Karo		7.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
51	2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	96,42 Persen	125.000.000					-		150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat Kabupaten	1 Kegiatan	60.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo	-	75.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	2	2.01	11	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	5 Lembaga	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	2	2.01	13	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	5 Lembaga	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	25.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo	-	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	2	2.02	9	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimteK atau pelatihan	25 Orang	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan	100 orang	40.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo	-	45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	2	2.03	7	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	5 Lembaga	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
52	2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terselenggaranya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	85%	50.000.000					-			0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	85 Persen	50.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Perempuan korban kekerasan	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	3	2.02	8	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	30 orang	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Perempuan korban kekerasan			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
53	2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	INDEKS KETIMPANGAN GENDER	0,421 Persen	80.000.000						-	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo	-	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	4	2.02	7	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10 Lembaga	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	4	2.02	8	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	40.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
54	2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Pengelolaan Data Gender dan Anak	5 Persen	40.000.000						-	45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Pengelolaan Data Gender dan Anak	5 Persen	40.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo	-	45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	5	2.01	3	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
55	2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	65,54 Persen	160.000.000						-		0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	6	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	60.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Anak - anak Kabupaten Karo	-		0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	6	2.01	4	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	60.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Anak - anak Kabupaten Karo			0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga yang melakukan pelembagaan PHA, serta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	63 Persen	100.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo	-		0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	6	2.02	5	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	450 Orang	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo			0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
56	2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapat layanan komprehensif dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	66,4 Persen	96.000.000						-	22.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak	1 Kegiatan	86.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Anak - anak Kabupaten Karo	-	11.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	7	2.01	6	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2 Dokumen	76.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Anak - anak Kabupaten Karo			0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	7	2.01	7	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan kTA tingkatKab/Kota	1 Kegiatan	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Anak - anak Kabupaten Karo		11.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Anak - anak Kabupaten Karo	-	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi dan kegiatan Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	1 Kegiatan	10.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter				11.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	8	7	2.02	13	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	30 Orang	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Anak - anak Kabupaten Karo			11.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			3.725.932.251								3.690.380.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
57	2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,15 Persen	322.750.000						-		331.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Kegiatan	55.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo	-		56.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	2	2.01	23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana												DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo			36.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	2	2.01	27	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal												DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	15 Satuan Pendidikan	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo			20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/Kota	1 Dokumen	267.750.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo	-		275.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga												DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	78.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo			80.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	28.350.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	2	2.02	23	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	1 Dokumen	161.400.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		165.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
58	2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet Need) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	19,61 Persen 57,1 Persen	2.203.822.251						-	2.139.020.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	752.220.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo	-	799.820.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13 Balai Laporan	517.400.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		550.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	99.820.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kab. Karo		99.820.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	35.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No						Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	35 Organisasi	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.02			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB yang diberdayakan	100 Persen	331.200.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo	-	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.02	2		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
								Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1 Unit	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.02	4		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
								Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	105 Orang	231.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PUS yang terpenuhi kebutuhan ber-KB nya	100 Persen	796.802.251			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo	-	755.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.03	1		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
								Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	21.200.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		21.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.03	3		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
								Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1923 Orang	713.200.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		720.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.03	6		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
								Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	50.162.251	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	12.240.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		14.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Sektor yang terlibat dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	8 sektor	323.600.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo	-	334.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.04	5	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah DASHAT di Kampung KB	4 Unit	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		11.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	3	2.04	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	50 Kampung	313.600.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		323.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
59	2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Kelompok yang mengikuti Kegiatan Ketahanan	100 Persen	1.199.360.000						-	1.220.360.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok yang mengikuti Kegiatan Ketahanan	100 Persen	1.199.360.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo	-	1.220.360.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	4	2.01	15	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	1 Kegiatan	30.000.000	Kab. Karo, Barusjahe, Barusjahe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	4	2.01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		11.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	14	4	2.01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	4	2.01	24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	480 Orang	576.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kab. Karo		576.360.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	4	2.01	26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	160 Kelompok	523.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		523.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14	4	2.01	28	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)											DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	1 Kelompok	10.000.000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kab. Karo		10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			10.722.952.980							10.782.870.808	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.777.952.980							8.891.870.808	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			8.777.952.980							8.891.870.808	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
60	2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Nilai	7.737.952.980						-	7.956.870.808	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Usulan RKA, DPA, Penatausahaan SP2D dan Penyusunan Laporan Keuangan	12 Bulan	6.423.432.980			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pervujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	-	6.623.370.808	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	6.282.828.741	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pervujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		6.473.370.808	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	140.604.239	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	150.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diamankan	2 unit	500.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	550.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	550.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	12 Bulan	50.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	55.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	55.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah adminitrasi umu yang dilaksanakan	12 Bulan	466.600.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	425.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	160.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	160.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	24.600.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	22.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	30.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	210.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	1 Paket	30.000.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	25.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		25.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan umum yang disediakan	12 Bulan	179.500.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	188.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		43.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		20.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		125.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	11 Unit	88.420.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	90.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.420.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		40.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		50.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
61	2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	92,5 Nilai	670.000.000						-	590.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Energi Ketersediaan Protein	2492 Kal/Kap/Hr 63 Gr/Kap/Hr	335.000.000				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	-	285.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	3	2.01	7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	85.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		60.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	9	3	2.01	8	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	65.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		45.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	3	2.01	16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		120.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	3	2.01	20	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	85.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		60.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cadangan Pangan Pemerintah yang tersedia dan terkelola	7 Ton	110.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	-	135.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	7 Ton	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		120.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	3	2.02	5	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	7 Ton	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		15.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan	92 Nilai	225.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	-	170.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	80.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal										DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	17 Laporan	150.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	90.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
62	2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	1%	220.000.000					-	190.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	1 dokumen	80.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	55.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan										DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	80.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	55.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerawanan Pangan tertangani	1%	140.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	135.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	4	2.02	4	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi										DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	70.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	75.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	4	2.02	5	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota										DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	60.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
63	2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	95%	150.000.000					-	155.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 unit	150.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	-	155.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	9	5	2.01	7	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	20 Dokumen	150.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		155.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.945.000.000							1.891.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.945.000.000							1.891.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
64	3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	42 Ton	200.000.000						-	150.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap	42 Ton	100.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	-	75.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	3	2.01	4	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	5 Unit	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		75.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	42 Ton	100.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	-	75.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		75.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
65	3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	713 Ton	1.415.000.000						-	1.371.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah produksi perikanan budidaya	713 Ton	830.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	-	750.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 Kelompok	600.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		550.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	230.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		200.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan	850.000 Ekor	585.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	-	621.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		55.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	4	2.04	9	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	500.000.000	Kab. Karo, Munte, Singamanik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		550.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	4	2.04	10	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5 Unit	35.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		16.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
66	3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Hasil Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	14 Ton	330.000.000						-	370.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	5 Ton	330.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo	-	370.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Ton	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		220.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	130.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		150.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
						Dinas Lingkungan Hidup			28.907.803.074							330.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			28.907.803.074							330.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			28.907.803.074							330.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
67	2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	11.308.797.825						-		0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas/Badan/Kecamatan	100%	4.215.597.825			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup	-		0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.055.220.825	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup		0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	160.377.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup		0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	100%	40.200.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket	40.200.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	343.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	60.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	8.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	70.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	205.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	195.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	60.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	135.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	415.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup			DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah	100%	6.100.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup	-		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	171 Unit	6.100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Lingkungan Hidup			0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
68	2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	undefined	40.000.000					-		40.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha	-	40.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota											DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha		40.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
69	2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79.40 Indeks	740.000.000					-		270.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	640.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	-	170.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut											DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	120.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo		120.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim											DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	470.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo			0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	3	2.01	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota											DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo		50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	-	-	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat											DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	-		100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
70	2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peningkatan Pengelolaan RTH	1 Lokasi	20.000.000					-		20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100%	20.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo	-	20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1,35 Ha	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo		20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
71	2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	1 Orang	45.000.000					-			0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen	45.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha	-		0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha			0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	6	2.01	7	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	15.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha			0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
72	2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat terkait 3R dan Bank Sampah	2 Dokumen	40.000.000					-			0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	2 Dokumen	40.000.000			Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo	-		0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo			0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
73	2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	50 Entitas	100.000.000					-			0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50 Entitas	100.000.000			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo	-		0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	50 Entitas	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo			0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
74	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	2 Pengaduan	70.230.107					-			0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan Kab/Kota sampai P-21	3 Perkara	70.230.107			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha	-		0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	3	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	3 Perkara	27.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha			0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	5	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Perkara	33.230.107	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha			0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	9	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	2 Pengaduan	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha			0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
75	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani	77%	16.543.775.142					-			0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Sampah	77 % 100 %	16.543.775.142			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo	-		0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo			0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan											DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	5 Dokumen	60.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 Unit	3.803.280.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	0 Ton	12.190.495.142	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	23	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	30	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Jumlah sampah yang terdaur ulang	1 Ton	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat Kab. Karo			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			5.761.404.422							6.175.370.313	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.761.404.422							6.175.370.313	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.761.404.422							6.175.370.313	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
76	2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	4.593.810.634						-	4.395.402.089	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.527.231.931			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	3.126.283.702	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.448.751.931	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		3.039.262.702	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	78.480.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		87.021.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	33.750.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	37.125.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	33.750.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		37.125.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	128.001.280			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	244.480.270	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	4.272.500	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		7.076.630	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	45.520.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		61.043.784	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	8.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		10.397.598	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25.548.780	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		34.703.658	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.160.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		2.376.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	42.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		128.882.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	246.737.423			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	163.976.117	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	201.737.423	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	0		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		69.531.807	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		94.444.310	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	523.060.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	611.182.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.220.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		18.942.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		63.316.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	324 Laporan	480.840.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		528.924.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	135.030.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	212.355.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	85.030.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		93.533.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		36.322.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		82.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
77	2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk (%) / Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	99,3/65 %	644.159.474						-	941.461.337	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	595.948.740			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	888.429.530	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	527.698.740	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		728.881.212	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	35 Laporan	68.250.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		159.548.318	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	48.210.734			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	53.031.807	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	2	2.03	1	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		27.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	2	2.03	3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	23.210.734	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		25.531.807	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
78	2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi Berakta Kelahiran (%) / Rasio Pasangan Berakta Nikah (%)	99/65 %	149.105.534						-	165.666.087	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	114.747.070			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	137.221.777	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	49.872.070	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		54.859.277	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 Layanan	64.875.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		82.362.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	34.358.464			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pervujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat	-	28.444.310	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	3	2.02	2	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	12 Laporan	25.858.464	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pervujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat		28.444.310	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	3	2.02	6	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil											DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	8.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat		0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
79	2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah sudah/belum	329.640.100					-	612.683.252	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	19.424.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	21.369.260	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	19.424.600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	21.369.260	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	295.215.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	591.313.992	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	500.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	26.503.500	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	35.530.792	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	4	2.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	18.712.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	55.783.200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	4	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	15.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	4	2.04	1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	15.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
80	2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi	Ada Ada/Tidak Ada	44.688.680					-	60.157.548	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penyusunan Profil Kependudukan	100%	44.688.680			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	60.157.548	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	44.688.680	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat	-	60.157.548	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			10.430.116.311						9.727.450.167	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.430.116.311						9.727.450.167	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			10.430.116.311						9.727.450.167	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
81	2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.200.808.811						-	4.889.667.849	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.704.311.049			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	4.171.847.849	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.562.351.049	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		4.029.887.849	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	141.960.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		141.960.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Dinas PMD	100%	30.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Umum Dinas PMD	100%	200.257.762			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	314.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		3.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	68.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		98.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		13.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.857.762	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.900.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		4.900.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		180.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas PMD	100%	214.020.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	231.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.200.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		19.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		22.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	174.820.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		190.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian KinerjaPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas PMD	100%	52.220.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	142.220.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	52.220.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	1	2.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		87.220.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
82	2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu Jumlah Lembaga Ekonomi Desa	100 % 259 Lembaga	4.609.307.500						-	4.237.782.318	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	4.609.307.500			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Aparatur Pemerintahan Desa	-	4.237.782.318	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12 Dokumen	3.340.507.500	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Aparatur Pemerintahan Desa		3.768.982.318	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Aparatur Pemerintahan Desa		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	259 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Aparatur Pemerintahan Desa		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	259 Dokumen	110.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Aparatur Pemerintahan Desa		110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	259 Orang	68.800.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Aparatur Pemerintahan Desa		68.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	25 Dokumen	90.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Aparatur Pemerintahan Desa		90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	18 Laporan	800.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Aparatur Pemerintahan Desa			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	259 Dokumen	50.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Aparatur Pemerintahan Desa		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	17 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Aparatur Pemerintahan Desa		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
83	2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	620.000.000					-		600.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	620.000.000			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan Desa	-	600.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga	170.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan Desa		150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan Desa		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan Desa		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	17 Laporan	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan Desa		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	17 Dokumen	300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan Desa		300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2					Dinas Perhubungan			21.590.364.745							23.499.647.774	DINAS PERHUBUNGAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.590.364.745							23.499.647.774	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			21.590.364.745							23.499.647.774	DINAS PERHUBUNGAN
84	2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.225.653.686					-		8.325.647.774	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	11 Dokumen	10.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	8.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	500 Dokumen	5.783.405.267			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	6.740.404.774	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	5.594.093.297	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.551.092.804	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	189.311.970	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		189.311.970	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Laporan	700.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Jumlah administrasi pelaporan pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	1.200.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	700.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)		1.200.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggarannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110 Paket	80.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	80.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	16 Dokumen	220.113.531			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.600.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	32.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	13.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	38.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.600.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	133.513.531	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggarannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	82.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	82.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggarannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	46 Laporan	729.434.888			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.943.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.943.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.943.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	9.491.888	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	680.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggarannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19 Unit	320.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	280.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
85	2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten / Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	97/0,2 Rasio/Indeks	14.349.711.059					-	15.157.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggarannya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	201 Unit	11.911.711.059			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Rambu, Guardrail, LPJU, marka, Rambu, RPPJ, Deliniator dan lain-lain	11.720.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Rambu, Guardrail, LPJU, marka, Rambu, RPPJ, Deliniator dan lain-lain	120.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	200 Unit	11.811.711.059	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Rambu, Guardrail, LPJU, marka, Rambu, RPPJ, Deliniator dan lain-lain	11.600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terselenggarannya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2 Unit	50.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Terminal, Bangunan Gedung, Sarana Prasarana Terminal yang tersedia	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Terminal, Bangunan Gedung, Sarana Prasarana Terminal yang tersedia	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terselenggarannya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 Dokumen	90.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Lahan Parkir, Sarana dan Prasarana Lahan Parkir yang tersedia	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Lahan Parkir, Sarana dan Prasarana Lahan Parkir yang tersedia	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota										DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	80.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Lahan Parkir, Sarana dan Prasarana Lahan Parkir yang tersedia		85.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Laporan	1.135.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Kendaraan yang dapat Memberikan Jaminan Keselamatan Secara Teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor, Terwujudnya Kelestarian Lingkungan dari Kemungkinan Pencemaran Udara	-	2.045.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1.100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Kendaraan yang dapat Memberikan Jaminan Keselamatan Secara Teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor, Terwujudnya Kelestarian Lingkungan dari Kemungkinan Pencemaran Udara		2.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 Laporan	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Kendaraan yang dapat Memberikan Jaminan Keselamatan Secara Teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor, Terwujudnya Kelestarian Lingkungan dari Kemungkinan Pencemaran Udara		25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	15.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Kendaraan yang dapat Memberikan Jaminan Keselamatan Secara Teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor, Terwujudnya Kelestarian Lingkungan dari Kemungkinan Pencemaran Udara		20.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	950.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Rekayasa Jalan yang disediakan untuk Memberikan Kondisi Lalu Lintas yang Aman dan Lancar	-	1.105.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota											DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Rekayasa Jalan yang disediakan untuk Memberikan Kondisi Lalu Lintas yang Aman dan Lancar		600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.06	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	38.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Rekyasa Jalan yang disediakan untuk Memberikan Kondisi Lalu Lintas yang Aman dan Lancar	40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.06	16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	4 Dokumen	400.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Rekyasa Jalan yang disediakan untuk Memberikan Kondisi Lalu Lintas yang Aman dan Lancar	450.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	12.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Rekyasa Jalan yang disediakan untuk Memberikan Kondisi Lalu Lintas yang Aman dan Lancar	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	55.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.07	6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	5 Laporan	55.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terselenggaranya Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas di Jalan	6 Laporan	37.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Persentase Keselamatan Pengguna Angkutan Umum di Jalan	43.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2 Laporan	15.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Persentase Keselamatan Pengguna Angkutan Umum di Jalan	18.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.08	6	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	2 Laporan	11.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Persentase Keselamatan Pengguna Angkutan Umum di Jalan	13.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.08	7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	11.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Persentase Keselamatan Pengguna Angkutan Umum di Jalan	12.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antarkota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	5 Laporan	40.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Data Angkutan Umum yang tersedia untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	44.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	35.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Data Angkutan Umum yang tersedia untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	17.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.09	3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	5.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Data Angkutan Umum yang tersedia untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	27.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	35.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Izin yang mengarah ke Tertatanya Perjalanan Trayek Angkutan Perkotaan	-	0 DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Izin yang mengarah ke Tertatanya Perjalanan Trayek Angkutan Perkotaan		0 DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.11	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Izin yang mengarah ke Tertatanya Perjalanan Trayek Angkutan Perkotaan		0 DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	35.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Izin yang mengarah ke Tertatanya Perjalanan Trayek Angkutan Pedesaan	-	0 DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.12	1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Izin yang mengarah ke Tertatanya Perjalanan Trayek Angkutan Pedesaan		0 DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.12	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Izin yang mengarah ke Tertatanya Perjalanan Trayek Angkutan Pedesaan		0 DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	6.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah izin trayek yang diterbitkan dalam lintas daerah Kabupaten/Kota	-	8.000.000 DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.14	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota										DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	6.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah izin trayek yang diterbitkan dalam lintas daerah Kabupaten/Kota	8.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	15	2	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	1 Laporan	5.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Tarif Angkutan Perkotaan dan Pedesaan		7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.16	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Tarif Angkutan Perkotaan dan Pedesaan		7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
86	2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	15.000.000					-		17.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	-	11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	3	2.01	1	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota		11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	3	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	5.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya	-	6.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	3	2.09	2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota											DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	Persentase Jumlah Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya		6.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						Dinas Komunikasi dan Informatika			8.854.370.440							10.990.979.339	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.854.370.440							10.990.979.339	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.517.770.184							10.590.979.339	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
87	2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	4.218.647.105					-		5.742.325.100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.430.098.125			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo	-	3.287.878.025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322 Orang/bulan	3.315.025.875	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo	3.172.805.775	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115.072.250		Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo	115.072.250	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	33.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo -	45.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	33.000.000		Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo	45.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	351.391.705			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo -	424.289.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	21.243.700		Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo	45.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	52.588.005		Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo	51.729.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1080 Dokumen	7.560.000		Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo	7.560.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	20.000.000		Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	328.567.275			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo	1.909.567.275	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo	1.586.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo	6.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	317.567.275	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Pegawai Dinas Kominfo	317.567.275	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	75.590.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Dinas Kominfo	75.590.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	75.590.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Dinas Kominfo	75.590.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
88	2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks SPBE	3.10 Indeks	1.207.303.659					-	1.359.654.239	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.207.303.659			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah	Seluruh lapisan masyarakat	1.359.654.239	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	2	2.01	14	Relasi Media										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	65 Laporan	218.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah	Seluruh lapisan masyarakat	238.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	2	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	36 Permohonan	301.620.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah	Seluruh lapisan masyarakat	400.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	16	2	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik											DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		5 Media	34.125.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah	Seluruh lapisan masyarakat		35.325.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	2	2.01	22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik											DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun		75 Dokumen	560.960.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah	Seluruh lapisan masyarakat		570.960.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	2	2.01	23	Penyusunan Konten											DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Konten Informasi Publik		1129 Konten	75.326.999	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah	Seluruh lapisan masyarakat		97.598.119	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	2	2.01	24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik											DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		15 Orang	17.271.120	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Peningkatan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah	Seluruh lapisan masyarakat		17.771.120	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
89	2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	3,10 Indeks	3.091.819.420						-	3.489.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.091.819.420			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat dan OPD	-	3.489.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	3	2.02	19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE											DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		1 Dokumen	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat dan OPD		70.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	3	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota											DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		65 Perangkat Daerah	450.248.420	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat dan OPD		500.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	3	2.02	32	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE											DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE		1 Aplikasi	332.571.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat dan OPD		400.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	3	2.02	36	Penyediaan Akses Internet											DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		55 Perangkat Daerah	1.879.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat dan OPD		2.379.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	3	2.02	37	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah											DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat dan OPD	70.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	3	2.02	38	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	130.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat dan OPD	70.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			286.600.256						300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
90	2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	2,81 indeks	286.600.256					-	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30%	286.600.256			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	2	2.01	19	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	30%	286.600.256	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			50.000.000						100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
91	2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks SPBE	3,10 Indeks	50.000.000					-	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	50.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	2	2.01	5	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik										DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			5.531.922.531						7.861.397.777	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.531.922.531						7.861.397.777	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.531.922.531						7.861.397.777	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
92	2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	90 persen	4.466.042.981					-	5.517.508.172	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 persen	3.335.954.841			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN dan PPPK	4.303.598.172	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.242.834.841	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN dan PPPK	4.210.478.172	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	18	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	93.120.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN dan PPPK		93.120.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	68.880.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL	-	70.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	68.880.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL		70.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	95 persen	452.098.140			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL	-	541.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	70 Paket	5.129.750	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL		6.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	52.559.882	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL		63.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	20.845.788	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL		21.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	49.977.720	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL		51.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	323.585.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL		400.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	136.560.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL	-	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL		50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	86.560.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL		50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	434.130.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL	-	464.490.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1		2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.160.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL		30.160.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1		2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	14.810.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL		14.810.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1		2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	389.160.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL		419.520.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	38.420.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL	-	38.420.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1		2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	38.420.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN, PPPK dan THL		38.420.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
93	2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total terhadap target Investasi	2.09 persen	230.000.000						-	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	2		2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1 dokumen	230.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder	-	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	2		2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota										DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder	0		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	2		2.02	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder		100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
94	2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	3 persen	271.880.000						-	400.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	3		2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peluang Investasi yang tersedia	2 dokumen	271.880.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder	-	400.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	191.880.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder		200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	3	2.01	3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	80.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder		200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
95	2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Peningkatan Perizinan dan Non Perizinan	4,5 persen	253.944.000						-	315.945.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal	2200 izin	253.944.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder	-	315.945.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	4	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.994.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder		30.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	4	2.01	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2200 Pelaku Usaha	114.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder		125.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	4	2.01	7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	60 Pelaku Usaha	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder		66.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	4	2.01	8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	750 Kegiatan Usaha	85.950.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder		94.545.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
96	2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100 persen	270.055.550						-	1.483.944.605	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan LKPM	60 perusahaan	270.055.550			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder	-	1.483.944.605	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	5	2.01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	22.440.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder		189.515.700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	18	5	2.01	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	165 Pelaku Usaha	164.367.550	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder		774.191.605	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	5	2.01	6	Pengawasan Penanaman Modal											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	83.248.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder		520.237.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
97	2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan data dan informasi Penanaman Modal	100 persen	40.000.000						-	44.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terbit	1 dokumen	40.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder	-	44.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	6	2.01	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelaku usaha dan Stakeholder		44.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata			25.994.084.890							24.132.801.363	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.450.000.000							4.744.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			3.150.000.000							2.967.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
98	2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan	7%	800.000.000						-	525.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	3 dokumen	800.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	pemuda/i	-	525.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	2	2.01	11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	30 Orang	235.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	pemuda/i		210.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	2	2.01	14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100 Orang	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	pemuda/i		105.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	2	2.01	15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

No Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang	315.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	pemuda/i		210.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
99	2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet binaan yang memenangkan kejuaraan	50%	2.350.000.000						-	2.442.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	atlet	-	105.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	3	2.01	5	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	150.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	atlet		105.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan tingkat Daerah kabupaten/Kota	1 Dokumen	650.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	atlet	-	787.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	3	2.02	4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	650.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	atlet		787.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3 Dokumen	1.450.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	atlet	-	1.440.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	3	2.03	6	Seleksi Atlet Daerah											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300 Orang	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	atlet		300.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	3	2.03	7	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga	240 Orang	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	atlet		300.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	3	2.03	9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	286 Orang	950.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	atlet		840.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	100.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	atlet	-	110.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	19	3	2.05	10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Lembaga	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	atlet		110.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.300.000.000							1.777.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
100	2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	30%	400.000.000						-	722.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	22	2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	400.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	masyarakat budaya	-	722.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	224.609.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	masyarakat budaya		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	22	2	2.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	110 Orang	150.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	masyarakat budaya		420.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	22	2	2.01	3	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	1 Dokumen	25.391.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	masyarakat budaya		27.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
101	2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan dikembangkan	10%	250.000.000						-	262.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	pelaku seni	-	262.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	110 Orang	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	pelaku seni		262.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
102	2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan, Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	45%	650.000.000						-	792.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	2	22	5	2.01				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	masyarakat	-	157.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	masyarakat		157.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	550.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	masyarakat	-	635.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	450.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	masyarakat		525.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	9 Objek	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	masyarakat		110.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			21.544.084.890						19.388.301.363	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			21.544.084.890						19.388.301.363	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
103	3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	8.782.061.155					-	9.276.164.212	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.527.323.666			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	-	5.803.689.849	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	5.350.323.666	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		5.617.839.849	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	177.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		185.850.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	45.750.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	-	48.037.500	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	26	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	61 Paket	45.750.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		48.037.500	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	659.988.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	-	692.987.400	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		262.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		15.750.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	40.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		42.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.988.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		5.237.400	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		367.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	555.824.289			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	-	608.615.503	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		550.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	55.824.289	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		58.615.503	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.111.610.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	-	1.167.190.500	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	75.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		78.750.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.950.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		26.197.500	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.011.660.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		1.062.243.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	881.565.200			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	-	955.643.460	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	242.565.200	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		254.693.460	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	39.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		40.950.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	600.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		660.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
104	3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	5%	7.209.066.000						-	4.474.519.300	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata daerah yang dikelola	100%	7.209.066.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	wisatawan	-	4.474.519.300	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	2	2.03	1	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Lokasi	150.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	wisatawan		165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	wisatawan		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	6.109.066.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	wisatawan		3.264.519.300	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	wisatawan		330.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	2	2.03	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Lokasi	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	wisatawan		220.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	2	2.03	8	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	wisatawan		220.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
105	3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	50%	4.079.957.735					-		4.025.117.851	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	50%	4.079.957.735			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	wisatawan	-	4.025.117.851	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri											DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saling dan berkelanjutan	wisatawan	275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	350.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saling dan berkelanjutan	wisatawan	385.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	3	2.01	6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	3.179.957.735	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saling dan berkelanjutan	wisatawan	3.260.117.851	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	3	2.01	7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saling dan berkelanjutan	wisatawan	105.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
106	3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	3%	550.000.000					-	605.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	4	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pertumbuhan sektor ekonomi kreatif	3%	550.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saling dan berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekraf	-	605.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	4	2.02	3	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saling dan berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekraf	55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	4	2.02	9	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
							Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saling dan berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekraf	55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	3	26	4	2.02	12	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	2 Lembaga	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekraf	110.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	4	2.02	16	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekraf	165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	4	2.02	22	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	40 Produk	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekraf	220.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
107	3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	24%	923.000.000					-	1.007.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 Dokumen	823.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekraf	897.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekraf	220.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	5	2.01	9	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	200 Orang	198.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekraf	210.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	5	2.01	10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	300 Orang	425.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekraf	467.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	5	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	100.000.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	pelaku ekraf	110.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	5	2.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200 Orang	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	pelaku ekraf	110.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26	5	2.02	7	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif										DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	35 Orang	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	pelaku ekraf			DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
						Dinas Perpustakaan dan Arsip			5.396.938.150							6.078.234.310	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.396.938.150							6.078.234.310	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.246.938.150							5.868.234.310	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
108	2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	4.834.360.629					-		5.018.234.310	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.172.286.610			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo	-	4.311.224.510	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.047.036.610	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo		4.166.224.510	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	125.250.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo		145.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo	-	36.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo		36.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	163.204.020			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo	-	173.580.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo		2.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.624.020	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo		63.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.680.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo	7.680.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.900.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo	5.900.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo	95.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	44.589.999			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo	65.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.07	5	Pengadaan Mebel										DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	44.589.999	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo	65.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	309.280.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo	336.929.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo	52.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo	13.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	251.280.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo	271.129.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	95.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo	95.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	95.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo	95.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
109	2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Nilai IPLM	69,30%	392.577.521						-	825.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) / Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	69,30%	332.577.521			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat	-	700.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40 Perpustakaan	45.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat		50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	2	2.01	11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	20 Perpustakaan	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat		130.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	2	2.01	12	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	3 Layanan	37.577.520	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat		130.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	2	2.01	13	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat		25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	2	2.01	16	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	60.000.001	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat		130.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	2	2.01	17	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat		55.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	2	2.01	18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	140.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat		180.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	60.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat	-	125.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	2	2.02	9	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	15 Orang	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat		50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	2	2.02	10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat											DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	10 Lokus	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat	75.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
110	2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1 Koleksi	20.000.000					-	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	100%	20.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	3	2.01	4	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan										DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	3 Eksemplar	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			150.000.000						210.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
111	2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	67,30%	80.000.000					-	110.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100%	30.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	SKPD Kab Karo	40.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota										DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	SKPD Kab Karo	40.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	100%	50.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	SKPD Kab Karo	70.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN										DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	92 Pengguna	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	SKPD Kab Karo	70.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
112	2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	67,90%	70.000.000					-	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	3	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100%	70.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	SKPD Kab Karo	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	3	2.01	3	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun										DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1000 Berkas	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	SKPD Kab Karo	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24	3	2.01	4	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun										DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1500 Arsip	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	SKPD Kab Karo	70.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Dinas Pertanian			29.527.296.444						29.027.296.444	DINAS PERTANIAN	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			29.527.296.444						29.027.296.444	DINAS PERTANIAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			29.527.296.444						29.027.296.444	DINAS PERTANIAN	
113	3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Tertib Kesekretariatan pada Dinas Pertanian	87,64%	19.791.000.794					-	19.791.000.794	DINAS PERTANIAN	
	3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan SP2D Tersusunnya Laporan Keuangan Terverifikasinya usulan RKA, RKAP, DPA, DPPA	200 Berkas 4 Laporan 4 Berkas	17.294.893.659			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo	-	17.294.893.659	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										DINAS PERTANIAN	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	146 Orang/bulan	17.105.173.659	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		17.105.173.659	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										DINAS PERTANIAN	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	189.720.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		189.720.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	183 Paket	137.250.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo	-	137.250.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										DINAS PERTANIAN	
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo	0	DINAS PERTANIAN	
	3	27	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										DINAS PERTANIAN	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	183 Paket	137.250.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		137.250.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terdistribusi, terkelola, terpelihara, teramankan dan tercatatnya barang inventaris serta barang milik daerah Terkelolanya administrasi umum perangkat daerah yang meliputi, administrasi surat menyurat, kehumasan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan 6 Jenis 2 Kegiatan	417.467.015			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo	-	417.467.015	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										DINAS PERTANIAN	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	22.684.780	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		22.684.780	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										DINAS PERTANIAN	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	201.845.036	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		201.845.036	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										DINAS PERTANIAN	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	10.382.247	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		10.382.247	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										DINAS PERTANIAN	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	25.766.992	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		25.766.992	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										DINAS PERTANIAN	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	156.787.960	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		156.787.960	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Jenis	0			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo	-	0	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											DINAS PERTANIAN
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		0	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.760.100.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo	-	1.760.100.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											DINAS PERTANIAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan	106.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		106.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											DINAS PERTANIAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.654.100.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		1.654.100.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	2 Jenis	181.290.120			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo	-	181.290.120	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											DINAS PERTANIAN
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	96.290.120	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		96.290.120	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											DINAS PERTANIAN
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		10.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											DINAS PERTANIAN
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		75.000.000	DINAS PERTANIAN
114	3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1851172 Ton	6.543.776.500						-	6.043.776.500	DINAS PERTANIAN
	3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	45 Poktan	1.113.276.500			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	-	1.113.276.500	DINAS PERTANIAN
	3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi											DINAS PERTANIAN
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani		0	DINAS PERTANIAN
	3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian											DINAS PERTANIAN
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan	1.113.276.500	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani		1.113.276.500	DINAS PERTANIAN
	3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Jenis	4.730.500.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	-	3.560.500.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman											DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	500.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman										DINAS PERTANIAN
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	4.230.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	3.060.500.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	2	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	380 Ekor	700.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	1.370.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	2	2.06	3	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain										DINAS PERTANIAN
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	380 Ekor	700.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	1.370.000.000	DINAS PERTANIAN
115	3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1851172 Ton	2.050.000.000					-	2.050.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	2 Kegiatan	600.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	600.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya										DINAS PERTANIAN
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	600.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	600.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	6 Unit	1.250.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	1.250.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani										DINAS PERTANIAN
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	800.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	800.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya										DINAS PERTANIAN
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	250.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	3	2.02	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani										DINAS PERTANIAN
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	200.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	3	2.02	15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan										DINAS PERTANIAN
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0 Unit	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kelompok Tani	0	DINAS PERTANIAN
	3	27	3	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Terlaksananya Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	30 Ha	200.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	200.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	3	2.04	2	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum										DINAS PERTANIAN
							Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	30 Ha	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	200.000.000	DINAS PERTANIAN
116	3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan veteriner	70%	458.793.600					-	458.793.600	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	458.793.600			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	-	458.793.600	DINAS PERTANIAN
	3	27	4	2.01	8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											DINAS PERTANIAN
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	2 Laporan	458.793.600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani		458.793.600	DINAS PERTANIAN
117	3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	140 Ha	196.424.796						-	196.424.796	DINAS PERTANIAN
	3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	140 Ha	196.424.796			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	-	196.424.796	DINAS PERTANIAN
	3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											DINAS PERTANIAN
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	140 Ha	196.424.796	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani		196.424.796	DINAS PERTANIAN
118	3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	12,95%	487.300.754						-	487.300.754	DINAS PERTANIAN
	3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	17 Kecamatan	487.300.754			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani	-	487.300.754	DINAS PERTANIAN
	3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa											DINAS PERTANIAN
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	97.529.438	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani		97.529.438	DINAS PERTANIAN
	3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa											DINAS PERTANIAN
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Unit	160.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani		160.000.000	DINAS PERTANIAN
	3	27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota											DINAS PERTANIAN
							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	229.771.316	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kelompok Tani		229.771.316	DINAS PERTANIAN
						Dinas Perindustrian dan Perdagangan			15.158.200.614							18.043.958.282	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			15.158.200.614							18.043.958.282	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			15.000.000							17.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
119	3	29	5			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi	20%	15.000.000						-	17.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	29	5	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 persen	15.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Kabupaten Karo	-	17.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	29	5	2.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota											DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Kabupaten Karo		17.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			13.532.098.614							16.111.856.282	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
120	3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 indeks	8.770.098.614						-	11.067.856.282	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	3	30	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	100%	6.055.248.614			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	6.074.356.282	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	5.895.248.614	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		5.904.356.282	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	160.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		170.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	119.850.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	129.850.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	141 Paket	119.850.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		129.850.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	100 persen	685.000.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	806.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	150.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		160.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		26.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		120.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	400.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		500.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja	99 persen	550.000.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	660.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.07	5	Pengadaan Mebel										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		260.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	400.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	1.245.000.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.346.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	46.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.300.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	98 persen	115.000.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.051.650.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.835.650.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
121	3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah siup yang diterbitkan	1250	20.000.000					-	25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	2	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah siup yang diterbitkan	1250 Siup	20.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kabupaten Karo	25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	2	2.06	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	4 Laporan	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kabupaten Karo	25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
122	3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang dikelola dengan baik	58,82%	3.910.000.000					-	3.990.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	3.730.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.800.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	3.730.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		3.800.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	180.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	190.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan											DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	180.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		190.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
123	3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	30.000.000					-		35.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kabupaten Karo	-	35.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kabupaten Karo		35.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
124	3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan nilai ekspor	7499 miliar	658.000.000					-		848.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama dan Misi Dagang yang dilaksanakan	7 Laporan	658.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	848.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional											DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20 Pelaku Usaha	220.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		400.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal											DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	20 Pelaku Usaha	175.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		188.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	5	2.01	4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan											DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	203.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	5	2.01	5	Peningkatan Citra Produk Ekspor											DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 Produk	60.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		60.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
125	3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur sarana perdagangan yang ditera dan tera ulang	100%	144.000.000					-	146.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasann	100%	144.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	146.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	595 Unit	58.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		59.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30 Orang	86.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		87.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.611.102.000						1.915.102.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
126	3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase pertumbuhan industri/ikm	4,12%	1.536.102.000					-	1.825.102.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	1.536.102.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	1.825.102.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		110.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen	553.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		738.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	150 Dokumen	883.102.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		977.102.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
127	3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	75.000.000					-	90.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	100	75.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kabupaten Karo	-	90.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kabupaten Karo	60.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	3	2.01	4	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)										DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
							Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kabupaten Karo	30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	4					Sekretariat Daerah			32.604.023.266						33.628.856.702	SEKRETARIAT DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			32.604.023.266						33.628.856.702	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH			32.604.023.266						33.628.856.702	SEKRETARIAT DAERAH
128	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	100%	28.508.073.266					-	30.377.308.579	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	13.613.839.887			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah - Kabupaten Karo	14.062.506.200	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	12.973.326.257	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	13.621.992.570	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	640.513.630	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	440.513.630	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	149.240.200			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pervujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Sekretariat Daerah - Kabupaten Karo	155.502.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket	105.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pervujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	110.250.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	44.240.200	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	45.252.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.011.125.725			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah - Kabupaten Karo	3.596.893.685	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	117.150.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	120.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	473.712.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	520.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	75.500.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	9.900.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	186.534.500	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	201.800.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2000 Laporan	1.550.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	1.150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Laporan	2.608.229.225	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	1.595.193.685	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.509.157.744			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo	5.301.391.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	294.955.744	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo	2.745.900.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit	651.904.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo	712.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	594.270.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo	702.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	968.028.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo	1.140.891.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.345.052.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	2.262.100.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.584.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	58.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.169.805.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	901.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.114.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	24.900.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.109.549.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo		1.277.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.550.240.920			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	-	1.112.690.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	380.420.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo		165.790.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	886.025.920	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo		512.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	67.888.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo		78.900.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	215.907.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo		356.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	896.781.290			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	988.619.419	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	782.381.290	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		860.619.419	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	114.400.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		128.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	2.041.216.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan ASN sekretariat Daerah Kabupaten Karo	-	2.467.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.022.047.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan ASN sekretariat Daerah Kabupaten Karo		1.190.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	789.555.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan ASN sekretariat Daerah Kabupaten Karo		990.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	229.614.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan ASN sekretariat Daerah Kabupaten Karo		287.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penataan Organisasi	100%	248.025.700			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Perangkat Daerah Kabupaten Karo	-	272.873.095	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan											SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	57.701.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Perangkat Daerah Kabupaten Karo	63.339.100	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	63.047.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Perangkat Daerah Kabupaten Karo	69.528.525	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	84.575.200	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Perangkat Daerah Kabupaten Karo	93.032.720	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	42.702.500	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Perangkat Daerah Kabupaten Karo	46.972.750	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	143.393.800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Karo	157.733.180	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	33.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Karo	36.300.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	68.593.800	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Karo	75.453.180	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	41.800.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Karo	45.980.000	SEKRETARIAT DAERAH
129	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skor E-PPD Persentase Fasilitasi Kebijakan Daerah Terkait Kesejahteraan Rakyat Indeks Reformasi Hukum	2,85 Skor 73 % 87,6 Indeks	3.154.908.000					-	2.216.400.773	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Urusan Administrasi Pemerintahan	73%	988.145.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo	1.086.959.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	30 Dokumen	248.080.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo	272.888.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	50 Dokumen	185.825.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo	204.407.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	60 Dokumen	554.240.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo	609.664.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	73%	1.310.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo	187.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual										SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	47.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo	55.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen	47.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo		55.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	1.195.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo		55.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.02	4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo		22.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	97%	856.763.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo	-	942.441.273	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	610 Dokumen	303.743.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo		334.118.327	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	7 Kasus	376.354.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo		413.990.126	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	610 Dokumen	176.666.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo		194.332.820	SEKRETARIAT DAERAH
130	4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Fasilitasi Kebijakan Daerah Terkait Perekonomian dan Pembangunan	38 Indeks 82 %	941.042.000						-	1.035.147.350	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Diimplementasikan	85%	187.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo	-	205.700.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	55.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo		60.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	57.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo		62.700.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD											SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo		82.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerjanya di Atas 70%	80%	65.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Perangkat Daerah Kabupaten Karo	-	71.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan											SEKRETARIAT DAERAH

No Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	11.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Perangkat Daerah Kabupaten Karo		12.100.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan										SEKRETARIAT DAERAH	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	19.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Perangkat Daerah Kabupaten Karo		20.900.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan										SEKRETARIAT DAERAH	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	29 Laporan	35.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Perangkat Daerah Kabupaten Karo		38.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	40 Indeks	589.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Perangkat Daerah Kabupaten Karo	-	647.901.150	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										SEKRETARIAT DAERAH	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200 Dokumen	484.622.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Perangkat Daerah Kabupaten Karo		533.084.910	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik										SEKRETARIAT DAERAH	
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	46 Dokumen	54.907.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Perangkat Daerah Kabupaten Karo		60.398.030	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa										SEKRETARIAT DAERAH	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	49.471.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Perangkat Daerah Kabupaten Karo		54.418.210	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	100.042.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	110.046.200	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan										SEKRETARIAT DAERAH	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	50.545.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	-		55.599.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup										SEKRETARIAT DAERAH	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	49.497.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	-		54.446.700	SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			59.851.947.595							60.177.580.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			57.957.169.391							58.336.080.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2				SEKRETARIAT DPRD			57.957.169.391							58.336.080.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
131	4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	29.475.209.391					-		30.974.540.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.360.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo	-	3.360.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo		3.200.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	160.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo		160.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	834.400.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	834.400.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	-		25.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	500.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	-		500.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	-		27.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	32.400.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	-		32.400.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	250.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	-		250.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	500.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo	-	500.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo		500.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Operator Komputer, Jasa Supir Kendaraan Dinas, Jasa Kebersihan dan Jasa keamanan yang tersedia dan jumlah Layanan Listrik, Air dan Internet yang tersedia	undefined undefined 12 Laporan	1.271.310.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo	-	1.271.310.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	157.200.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo		157.200.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo		50.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.064.110.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo		1.064.110.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	897.310.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo	-	897.310.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	397.310.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo		397.310.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo		500.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	20.712.669.391			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	-	22.212.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan	20.000.669.391	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		21.500.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	472.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		472.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	240.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		240.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	undefined undefined	1.899.520.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	-	1.899.520.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	27.520.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		27.520.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	1.872.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	1.872.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
132	4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada Ada/ Tidak	28.481.960.000					-	27.361.540.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	4.791.790.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	4.691.790.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah										SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	24.330.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	24.330.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah										SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	4.600.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	4.500.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan										SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	17.600.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	17.600.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik										SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	143.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	143.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD										SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	6.860.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	6.860.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	292.830.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	292.830.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS										SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	67.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	67.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	66.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	66.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	52.680.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		52.680.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	43.300.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		43.300.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	10.450.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		10.450.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	53.400.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		53.400.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	242.800.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	-	242.800.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	35.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		35.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	27.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		27.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	45.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		45.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	34.700.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		34.700.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	34.800.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		34.800.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	18.200.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		18.200.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	18.600.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		18.600.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	28.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		28.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	2.134.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	DPRD Kabupaten Karo	-	2.134.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	300 Dokumen	900.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	DPRD Kabupaten Karo		900.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	180.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		180.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	384.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	DPRD Kabupaten Karo		384.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	500.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		500.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	170.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		170.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	1.338.620.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	-	1.368.200.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	100 Laporan	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		100.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	18.200.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		18.200.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.220.420.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		1.250.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	19.120.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	-	19.120.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	9.560.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		9.560.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	9.560.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		9.560.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	19.662.800.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo	-	18.612.800.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1200 Dokumen	19.050.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		18.000.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	12.800.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		12.800.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		50.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	200 Dokumen	550.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	DPRD Kabupaten Karo		550.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	X					NON URUSAN			1.894.778.204							1.841.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.894.778.204							1.841.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
133	X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	1.894.778.204					-		1.841.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD	100%	644.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo	-	591.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	X	XX	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	91.500.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo		91.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	X	XX	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 Orang	553.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo		500.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.250.278.204			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo	-	1.250.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.278.204	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo		500.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	750.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo		750.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			10.197.657.407							7.875.761.567	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			10.197.657.407							7.875.761.567	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1				PERENCANAAN			9.646.290.921							7.275.761.567	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
134	5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100 Persen	6.667.141.372						-	6.667.141.367	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan SP2D Terselenggaranya Administrasi keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Keuangan Terverifikasinya usulan RKA, RKAP, DPA dan DPPA	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	5.466.093.474			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Bappedalitbang	-	5.466.093.469	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	5.317.098.874	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Bappedalitbang		5.317.098.869	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	148.994.600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Bappedalitbang		148.994.600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya tertib administrasi urusan umum	100 Persen	841.085.005			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Bappedalitbang	-	841.085.005	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.915.850	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Bappedalitbang		1.915.850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	73.151.270	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Bappedalitbang		73.151.270	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	24.712.798	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Bappedalitbang		24.712.798	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	32.732.800	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Bappedalitbang		32.732.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	18.611.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Bappedalitbang		18.611.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	689.961.287	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Bappedalitbang		689.961.287	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya tertib administrasi barang milik daerah	100 Persen	103.142.893			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-	-	103.142.893	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	103.142.893	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-		103.142.893	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya kegiatan kebersihan dan keamanan kantor	100 Persen	114.700.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-	-	114.700.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14.400.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-		14.400.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	25.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-		25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	75.300.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-		75.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan pengelolaan barang milik daerah pada Bappedalitbang	100 Persen	142.120.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-	-	142.120.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.120.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-		42.120.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-		100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
135	5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaaran Pembangunan Daerah	100%	1.427.700.533						-		0BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	1.193.352.410			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-	-		0BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0 Berita Acara	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	0 Berita Acara	33.144.059	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	0 Berita Acara	123.891.345	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-			0BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	0 Dokumen	986.317.006	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-			0BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang perencanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	45.432.705			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi	Masyarakat, Stakeholder	-		0BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	45.432.705	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi	Masyarakat, Stakeholder	-		0BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	2	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	188.915.418			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Seluruh OPD	-		0BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	2	2.04	2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen	188.915.418	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Seluruh OPD	-		0BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
136	5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaaran Pembangunan Daerah	100%	1.551.449.016						-	608.620.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatanKoordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	553.237.850			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi	Pemerintah daerah dan Masyarakat kabupaten Karo	-	608.620.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	75.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi	Pemerintah daerah dan Masyarakat kabupaten Karo		82.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	76.410.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi	Pemerintah daerah dan Masyarakat kabupaten Karo		84.051.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	90.855.850	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi	Pemerintah daerah dan Masyarakat kabupaten Karo	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia										BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	310.972.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi	Pemerintah daerah dan Masyarakat kabupaten Karo	342.069.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	608.211.166			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat, Stakeholder	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	235.810.497	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat, Stakeholder		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian										BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	55.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat, Stakeholder		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian										BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	150.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat, Stakeholder		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	66.069.850	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat, Stakeholder		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA										BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	45.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat, Stakeholder		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA										BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	56.330.819	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat, Stakeholder		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	390.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat, Stakeholder	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	3 Dokumen	120.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat, Stakeholder			0BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	130.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat, Stakeholder			0BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	3 Dokumen	65.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat, Stakeholder			0BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	75.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Masyarakat, Stakeholder			0BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			551.366.486							600.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
137	5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	100 Persen	551.366.486						-	600.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 Persen	162.263.581			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat, Stakeholder	-	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4 Laporan	162.263.581	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat, Stakeholder		200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya jumlah instansi yang melakukan inovasi Terlaksananya fasilitasi permohonan HAKI	100 Persen 100 Persen	389.102.905			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat, Stakeholder	-	400.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi											BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	389.102.905	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat, Stakeholder		400.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Badan Keuangan dan Aset Daerah			300.914.706.853							308.871.861.781	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			300.914.706.853							308.871.861.781	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2				KEUANGAN			300.914.706.853							308.871.861.781	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
138	5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	7.087.737.982						-	7.229.492.741	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	-	15.300.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	15.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		15.300.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.943.721.504			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo	-	6.062.595.934	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	5.653.201.504	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo		5.766.265.534	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	290.520.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo		296.330.400	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	45.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo	-	45.900.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	45.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo		45.900.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	659.456.478			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo	-	672.645.607	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.570.105	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo		6.701.507	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	206.570.105	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo		210.701.507	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	18.517.690	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo	18.888.045	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	61.442.515	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo	62.671.365	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217 Laporan	366.356.063	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo	373.683.184	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	315.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo	321.810.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.200.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo	19.584.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12.740.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo	12.994.800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	283.560.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo	289.231.200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	109.060.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo	111.241.200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	109.060.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo	111.241.200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
139	5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru Yang Dialokasikan melalui TKD, 2. Persentase alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, 3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4. Persentase Penurunan SILPA, 5. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	292.908.007.502						300.705.028.444	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	2.074.268.804			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	2.115.754.181	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	205.957.879	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	210.077.037	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	202.567.900	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	206.619.258	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	161.560.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	164.791.200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	310.960.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	317.179.200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	535.225.545	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	545.930.056	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	552.616.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	563.668.320	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	14.381.480	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	14.669.110	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	92 Orang	91.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	92.820.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	363.026.290			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	364.026.290	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6000 Dokumen	58.283.278	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	58.283.278	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	50.128.639	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	50.128.639	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	46 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	51.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	23 Dokumen	54.614.373	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	54.614.373	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	160 Orang	150.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	150.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	846.556.204			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	-	863.487.328	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kecamatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	69.166.848	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		70.550.185	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	242.760.192	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		247.615.398	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	46 Laporan	203.477.765	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		207.547.320	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	231.151.399	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		235.774.427	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		102.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	289.624.156.204			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Pemerintahan Desa	-	297.361.760.645	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	274.369.276.200	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Pemerintahan Desa		281.801.783.041	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan	3.464.550.812	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Pemerintahan Desa		3.533.841.828	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	11.790.329.192	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Pemerintahan Desa		12.026.135.776	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
140	5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	100%	918.961.369					-		937.340.596	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	918.961.369			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	-	937.340.596	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga										BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	100.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		102.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah											BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Laporan	288.802.074	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		294.578.115	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah											BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	195.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		198.900.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah											BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	40.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		41.310.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah											BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	220.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		224.400.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota											BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	210 Orang	74.659.295	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		76.152.481	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Badan Pendapatan Daerah			12.824.702.634							14.107.172.899	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			12.824.702.634							14.107.172.899	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2				KEUANGAN			12.824.702.634							14.107.172.899	BADAN PENDAPATAN DAERAH
141	5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 Indeks	8.373.018.150					-		9.210.319.965	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.448.811.031			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	-	8.193.692.134	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/bulan	7.283.001.031	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		8.011.301.134	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	165.810.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN		182.391.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	48.720.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	-	53.592.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	48.720.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	53.592.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	348.267.119			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	-	383.093.831BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	85.449.060	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	93.993.966	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	92.044.450	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	101.248.895	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	170.773.609	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	187.850.970	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	447.930.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	-	492.723.000BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.200.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	21.120.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	32.100.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	35.310.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	396.630.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	436.293.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	79.290.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	-	87.219.000BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	79.290.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	87.219.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
142	5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	101353011918 Rp	4.451.684.484					-	4.896.852.934	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	100%	4.451.684.484			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Wajib pajak daerah	-	4.896.852.934	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah										BADAN PENDAPATAN DAERAH	
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	74.515.215	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Wajib pajak daerah	81.966.737	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah										BADAN PENDAPATAN DAERAH	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	381.316.745	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Wajib pajak daerah	419.448.420	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah										BADAN PENDAPATAN DAERAH	
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100 Laporan	473.001.745	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Wajib pajak daerah	520.301.920	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah										BADAN PENDAPATAN DAERAH	
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	31 Laporan	768.596.699	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Wajib pajak daerah	845.456.369	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)										BADAN PENDAPATAN DAERAH	
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	19000 Obyek Pajak	1.632.897.150	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Wajib pajak daerah	1.796.186.865	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah										BADAN PENDAPATAN DAERAH	
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	33.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Wajib pajak daerah	36.300.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah										BADAN PENDAPATAN DAERAH	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5000 Dokumen	50.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Wajib pajak daerah	55.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah										BADAN PENDAPATAN DAERAH	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.038.356.930	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Wajib pajak daerah	1.142.192.623	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			6.013.287.795						6.987.106.017	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.013.287.795						6.987.106.017	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	3				KEPEGAWAIAN			5.743.287.795						6.690.106.017	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
143	5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Laporan Penunjang Perangkat Daerah	100 persen	4.718.528.110						-	5.177.870.364	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	4.202.347.226			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN BKPSDM	-	4.622.581.949	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.082.587.596	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN BKPSDM		4.490.846.356	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120 Dokumen	119.759.630	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN BKPSDM		131.735.593	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	30.240.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo	-	33.264.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	30.240.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		33.264.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen 100 %	256.141.954			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo	-	271.366.909	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.147.190	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		59.561.909	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	29.428.764	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		21.982.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	172.566.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		189.822.600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen 100 %	103.099.300			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN BKPSDM	-	138.787.913	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	25.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN BKPSDM		52.878.683	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No						Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	78.099.300	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN BKPSDM	85.909.230	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	49.079.630				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo	-	53.987.593	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.200.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		21.120.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	29.879.630	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		32.867.593	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	77.620.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN BKPSDM	-	57.882.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	38.420.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN BKPSDM		42.262.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	39.200.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN BKPSDM		15.620.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
144	5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterisian Jabatan/Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Jumlah Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin aparatur Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah,dan Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	100/17/15 %/ASN 15 ASN 17 jam 36 dan 323 jabatan 5600 orang	1.024.759.685						-	1.512.235.653	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	330.000.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo	-	528.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN												BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	150.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		330.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian												BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		27.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian												BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	155.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		170.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	100%	245.470.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo	-	270.017.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100 Dokumen	33.790.040	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		37.169.044	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	46.130.850	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		50.743.935	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	20 Dokumen	165.549.110	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		182.104.021	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	100%	267.344.685			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo	-	514.079.153	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							0	30 0	83.764.685		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		216.166.153	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		260.975.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	80 Orang	33.580.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		36.938.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	181.945.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo	-	200.139.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	60.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		66.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	45 Orang	121.945.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		134.139.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	0	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	0	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	0	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	25 Laporan	0	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			270.000.000							297.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
145	5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	16,72 % 17 % 17/16,72 %/%	270.000.000						-	297.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	45.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo	-	49.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	15 Orang	45.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		49.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	225.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo	-	247.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan											BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	225.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		247.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	6					Inspektorat Daerah			10.014.543.499							28.858.924.995	INSPEKTORAT DAERAH
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			10.014.543.499							28.858.924.995	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1				INSPEKTORAT DAERAH			10.014.543.499							28.858.924.995	INSPEKTORAT DAERAH
146	6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100 persen	7.369.066.189						-	8.468.329.644	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	6.632.440.071			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	6.396.584.627	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	6.447.440.071	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.211.584.627	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	185.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	185.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	275.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	984.335.270	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	75.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.680.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	200.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	853.655.270	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksana Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	176.411.027			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.639.147	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.215.003	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.845.144	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.799.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.612.027	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.579.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	55.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	245.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	245.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel										INSPEKTORAT DAERAH

No Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	137.127.091			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	146.373.800	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.160.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.160.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	29.500.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87.467.091	-	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.213.800	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	93.088.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	102.396.800	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	93.088.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		102.396.800	INSPEKTORAT DAERAH
147	6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunya terjadinya penyelewengan atau penyimpanan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	83.3 persen	1.617.904.130						-	1.697.177.351	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 persen	1.247.100.050			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	1.313.486.681	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah											INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Laporan	130.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal		299.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah											INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Laporan	396.223.402	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal		374.157.960	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja											INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	130.020.028	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal		147.623.113	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan											INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	46 Laporan	60.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal		65.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa											INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	46 Laporan	234.856.620	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal		167.981.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	2	2.01	6	Kerja Sama Pengawasan Internal											INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	10 Kesepakatan	150.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal		144.180.811	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP										INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	146.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	115.043.797	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen	370.804.080			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	383.690.670	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah										INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	135.060.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	148.566.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	235.744.080	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	235.124.670	INSPEKTORAT DAERAH
148	6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpanan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	83.7 persen	1.027.573.180					-	18.693.418.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 persen	100.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan										INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	20.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	20.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan										INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	80.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	20.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100 persen	927.573.180			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Pendampingan dan Asistensi	18.653.418.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah										INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46 perangkat daerah	179.834.180	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Pendampingan dan Asistensi	17.983.418.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi										INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46 perangkat daerah	167.739.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Pendampingan dan Asistensi	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi										INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Kegiatan	450.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Pendampingan dan Asistensi	520.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas										INSPEKTORAT DAERAH
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46 perangkat daerah	130.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana Pendampingan dan Asistensi	150.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
						Kecamatan Kabanjahe			6.940.654.725						7.128.467.820	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			6.940.654.725						7.128.467.820	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1				KECAMATAN			6.940.654.725						7.128.467.820	KECAMATAN KABANJAHE
149	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Perangkat Daerah	100 Persen	6.847.096.686					-	6.999.113.820	KECAMATAN KABANJAHE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.877.962.852			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	-	5.915.989.066	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5.589.447.852	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		5.627.474.066	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	288.515.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		288.515.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	39.480.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	-	48.720.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	47 Paket	39.480.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		48.720.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	83.722.824			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	-	134.249.754	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.107.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		3.481.500	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	47.617.856	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		65.294.320	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	6.281.668	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		8.393.334	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.872.300	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		8.872.600	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	22.844.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		48.208.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	10.776.010			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	-	65.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10.776.010	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		65.000.000	KECAMATAN KABANJAHE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	790.585.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	-	790.585.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		12.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3.530.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		3.530.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	775.055.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		775.055.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	44.570.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	-	44.570.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	44.570.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		44.570.000	KECAMATAN KABANJAHE
150	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	91 Indeks	42.439.000					-		61.404.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Kali	39.589.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	-	52.759.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	17.100.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		20.520.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	22.489.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		32.239.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Urusan	2.850.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	-	8.645.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.850.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		8.645.000	KECAMATAN KABANJAHE
151	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	17.100.000					-		19.950.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Diberdayakan	13 Kelurahan/Desa	17.100.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	-	19.950.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN KABANJAHE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	17.100.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	19.950.000	KECAMATAN KABANJAHE
152	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	95%	2.850.000					-	10.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kali	2.850.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	10.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN KABANJAHE
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.850.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	10.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
153	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	28.729.039					-	34.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	1 Urusan	28.729.039			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	34.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										KECAMATAN KABANJAHE
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	28.729.039	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	34.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
154	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100 Persen	2.440.000					-	4.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya	8 Pemerintahan Desa	2.440.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	4.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN KABANJAHE
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	2.440.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe	4.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
						Kelurahan Kampung Dalam			800.000.000						800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000						800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1				KECAMATAN			800.000.000						800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
155	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000					-	800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang diBerdayakan Kegiatannya di tingkat Kecamatan	5 Kelurahan	800.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kampung Dalam	800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										KECAMATAN KABANJAHE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	500.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kampung Dalam	500.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										KECAMATAN KABANJAHE
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	300.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kampung Dalam	300.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7					Kelurahan Gung Negeri			800.000.000						800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1				UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000						800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1				KECAMATAN			800.000.000						800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
156	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000					-	800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang diBerdayakan Kegiatannya di tingkat Kecamatan	5 Kelurahan	800.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Gung Negeri	800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										KECAMATAN KABANJAHE
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	500.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Gung Negeri	500.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										KECAMATAN KABANJAHE
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	300.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Gung Negeri	300.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7					Kelurahan Padang Mas			800.000.000						800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000						800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1				KECAMATAN			800.000.000						800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
157	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000					-	800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang diBerdayakan Kegiatannya di tingkat Kecamatan	5 Kelurahan	800.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Padang Mas	800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										KECAMATAN KABANJAHE
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	500.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Padang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Padang Mas	500.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										KECAMATAN KABANJAHE
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	300.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Padang Mas	300.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7					Kelurahan Lau Cimba			800.000.000						800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000						800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1				KECAMATAN			800.000.000						800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
158	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000					-	800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang diBerdayakan Kegiatannya di tingkat Kecamatan	5 Kelurahan	800.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Lau Cimba	800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										KECAMATAN KABANJAHE
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	600.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Lau Cimba	600.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										KECAMATAN KABANJAHE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	200.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Padang Mas	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Lau Cimba		200.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
						Kelurahan Gung Leto			800.000.000							800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000							800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1				KECAMATAN			800.000.000							800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
159	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000						-	800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang diBerdayakan Kegiatannya di tingkat Kecamatan	5 Kelurahan	800.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Gung Leto	-	800.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	600.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Gung Leto		600.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	200.000.000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kelurahan Gung Leto		200.000.000	KECAMATAN KABANJAHE
						Kecamatan Berastagi			5.542.080.686							5.961.985.059	KECAMATAN BERASTAGI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			5.542.080.686							5.961.985.059	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1				KECAMATAN			5.542.080.686							5.961.985.059	KECAMATAN BERASTAGI
160	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100 Persen	5.416.883.236						-	5.821.985.059	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.531.125.518			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	-	4.781.188.277	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.281.062.759	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi		4.531.125.518	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	250.062.759	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi		250.062.759	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	40.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	-	40.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi		40.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	137.777.718			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	-	160.056.782	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi		6.500.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											KECAMATAN BERASTAGI

No						Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		60 Paket	62.277.718	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	61.556.782	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5 Paket	4.500.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	7.000.000	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu											KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	5.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	10.000.000	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	60.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	75.000.000	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		20.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	-	0	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel											KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4 Unit	10.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	0	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	10.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	0	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		628.810.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	-	635.740.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan Laporan	55.200.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	60.000.000	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Laporan	7.870.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	10.000.000	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	565.740.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	565.740.000	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		59.170.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	-	205.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit	37.170.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	70.000.000	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	22.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Berastagi	135.000.000	KECAMATAN BERASTAGI	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
161	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,20 Indeks	57.000.000					-	65.000.000	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	2 kali	16.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Berastagi	-	20.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	16.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Berastagi		20.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	2 urusan	35.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kantor Camat Berastagi dan Masyarakat Kecamatan Berastagi	-	35.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	35.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kantor Camat Berastagi dan Masyarakat Kecamatan Berastagi		35.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	2 Laporan	3.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kantor Camat Berastagi dan Masyarakat Kecamatan Berastagi	-	5.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	3.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kantor Camat Berastagi dan Masyarakat Kecamatan Berastagi		5.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 Jenis	3.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kantor Camat Berastagi dan Masyarakat Kecamatan Berastagi	-	5.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan										KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	3.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kantor Camat Berastagi dan Masyarakat Kecamatan Berastagi		5.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
162	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertipan Umum Masyarakat di tingkat Kecamatan	100 Persen	5.000.000					-	20.000.000	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Triaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 kali	5.000.000			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	ASN Kantor Camat Berastagi dan Masyarakat Kecamatan Berastagi	-	20.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN BERASTAGI	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	ASN Kantor Camat Berastagi dan Masyarakat Kecamatan Berastagi		20.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
163	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	63.197.450					-	55.000.000	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlasananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Urusan	63.197.450			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kantor Camat Berastagi dan Masyarakat Kecamatan Berastagi	-	55.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										KECAMATAN BERASTAGI	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	63.197.450	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kantor Camat Berastagi dan Masyarakat Kecamatan Berastagi		55.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
						Kelurahan Tambak Lau Mulgap II			800.000.000							800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000								KECAMATAN BERASTAGI
	7	1				KECAMATAN			800.000.000							800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
164	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000						-	800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Kelurahan	800.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat kecamatan Berastagi	-	800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											KECAMATAN BERASTAGI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 Unit	700.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap II	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat kecamatan Berastagi		700.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											KECAMATAN BERASTAGI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas	100.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap II	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat kecamatan Berastagi		100.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
						Kelurahan Tambak Lau Mulgap I			800.000.000							800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000							800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1				KECAMATAN			800.000.000							800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
165	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000						-	800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Kelurahan	800.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat kecamatan Berastagi	-	800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											KECAMATAN BERASTAGI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 Unit	700.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap I	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat kecamatan Berastagi		700.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											KECAMATAN BERASTAGI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas	100.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap I	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat kecamatan Berastagi		100.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
						Kelurahan Gundaling II			800.000.000							800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000							800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1				KECAMATAN			800.000.000							800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
166	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000						-	800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Kelurahan	800.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat kecamatan Berastagi	-	800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											KECAMATAN BERASTAGI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 Unit	700.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling II	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat kecamatan Berastagi		700.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											KECAMATAN BERASTAGI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas	100.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling II	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat kecamatan Berastagi		100.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
						Kelurahan Gundaling I			800.000.000							800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000							800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1				KECAMATAN			800.000.000							800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
167	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100 Persen	800.000.000						-	800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Kelurahan	800.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat kecamatan Berastagi	-	800.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											KECAMATAN BERASTAGI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	700.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat kecamatan Berastagi	700.000.000	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	100.000.000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat kecamatan Berastagi	100.000.000	KECAMATAN BERASTAGI	
						Kecamatan Barusjahe			2.807.503.412						2.860.510.034	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.807.503.412						2.860.510.034	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7	1				KECAMATAN			2.807.503.412						2.860.510.034	KECAMATAN BARUSJAHE	
168	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	2.703.399.439					-	2.744.728.449	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.493.075.784			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe	-	2.513.658.161	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										KECAMATAN BARUSJAHE	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.448.154.264	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe	2.468.736.641	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										KECAMATAN BARUSJAHE	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	44.921.520	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe	44.921.520	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20.160.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe	-	21.840.000	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										KECAMATAN BARUSJAHE	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	20.160.000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe	21.840.000	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	53.098.655			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe	-	68.918.188	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										KECAMATAN BARUSJAHE	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.257.726	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe	1.258.998	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										KECAMATAN BARUSJAHE	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.089.890	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe	15.659.449	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										KECAMATAN BARUSJAHE	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.475.039	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe	2.642.841	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										KECAMATAN BARUSJAHE	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.196.000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe	2.482.900	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										KECAMATAN BARUSJAHE	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	34.080.000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe	46.874.000	KECAMATAN BARUSJAHE	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
	7	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	11.700.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe	-	15.669.600	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.700.000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe		15.669.600	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	91.895.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe	-	91.172.500	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe		14.400.000	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	1	2.08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.420.000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe		1.420.000	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.475.000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe		75.352.500	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	33.470.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe	-	33.470.000	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.470.000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Barusjahe		33.470.000	KECAMATAN BARUSJAHE
169	7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	3,58 Indeks	51.046.230						-	53.704.700	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	2	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Kegiatan	26.719.700			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	-	29.080.700	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	2	2.01	1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											KECAMATAN BARUSJAHE
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10.450.950	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe		10.450.950	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	2	2.01	2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											KECAMATAN BARUSJAHE
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	16.268.750	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe		18.629.750	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	2	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	1 Urusan	24.326.530			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	-	24.624.000	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	1	2	2.02	3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN BARUSJAHE
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.326.530	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe		24.624.000	KECAMATAN BARUSJAHE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
170	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	85%	3.877.943					-	7.533.950	KECAMATAN BARUSIAHE	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Diberdayakan	19 Pemerintahan Desa	3.877.943		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	-	7.533.950	KECAMATAN BARUSIAHE	
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN BARUSIAHE	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.877.943	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe		7.533.950	KECAMATAN BARUSIAHE
171	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibbum yang dapat diselesaikan	80%	7.560.000					-	6.805.300	KECAMATAN BARUSIAHE	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	7.560.000		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	-	6.805.300	KECAMATAN BARUSIAHE	
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN BARUSIAHE	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.560.000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe		6.805.300	KECAMATAN BARUSIAHE
172	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Wawasan Kebangsaan	75%	30.892.850					-	36.732.685	KECAMATAN BARUSIAHE	
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	1 Urusan	30.892.850		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	-	36.732.685	KECAMATAN BARUSIAHE	
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										KECAMATAN BARUSIAHE	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	30.892.850	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe		36.732.685	KECAMATAN BARUSIAHE
173	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-Rata Capaian Peningkatan Kapasitas Apartur Desa dan Fasilitasi Tata Kelola Desa	80%	10.726.950					-	11.004.950	KECAMATAN BARUSIAHE	
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya	19 Pemerintahan Desa	10.726.950		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pemerintahan Desa	-	11.004.950	KECAMATAN BARUSIAHE	
	7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										KECAMATAN BARUSIAHE	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	38 Dokumen	6.106.950	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pemerintahan Desa		5.082.950	KECAMATAN BARUSIAHE
	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa										KECAMATAN BARUSIAHE	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38 Dokumen	4.620.000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pemerintahan Desa		5.922.000	KECAMATAN BARUSIAHE
						Kecamatan Tiga Panah			2.990.100.773						3.049.902.789	KECAMATAN TIGA PANAH	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.990.100.773						3.049.902.789	KECAMATAN TIGA PANAH	
	7	1				KECAMATAN			2.990.100.773						3.049.902.789	KECAMATAN TIGA PANAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
174	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	2.784.953.527					-	2.798.755.543	KECAMATAN TIGA PANAH	
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.545.189.699			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigapanah	-	2.545.189.699	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										KECAMATAN TIGA PANAH	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.502.709.699	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigapanah		2.502.709.699	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										KECAMATAN TIGA PANAH	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44 Dokumen	42.480.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigapanah		42.480.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	23.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigapanah	-	23.000.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										KECAMATAN TIGA PANAH	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	23.000.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigapanah		23.000.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	94.043.828			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Tigapanah	-	97.845.844	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										KECAMATAN TIGA PANAH	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.600.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Tigapanah		5.600.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										KECAMATAN TIGA PANAH	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.063.828	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Tigapanah		20.865.844	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										KECAMATAN TIGA PANAH	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.700.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Tigapanah		6.700.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										KECAMATAN TIGA PANAH	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.114.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Tigapanah		4.114.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										KECAMATAN TIGA PANAH	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	60.566.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Tigapanah		60.566.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	35.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigapanah	-	45.000.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										KECAMATAN TIGA PANAH	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	35.000.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigapanah		45.000.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	54.250.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Tigapanah	-	54.250.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										KECAMATAN TIGA PANAH	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	19.500.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Tigapanah		19.500.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										KECAMATAN TIGA PANAH	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	4.990.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Tigapanah		4.990.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										KECAMATAN TIGA PANAH	

No Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	29.760.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Tigapanah		29.760.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	33.470.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Tigapanah	-	33.470.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											KECAMATAN TIGA PANAH
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.470.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Tigapanah		33.470.000	KECAMATAN TIGA PANAH
175	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,71 Indeks	110.924.000					-	120.924.000	KECAMATAN TIGA PANAH	
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan	3 Kegiatan	60.924.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Tigapanah	-	80.924.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											KECAMATAN TIGA PANAH
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	25.298.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Tigapanah		25.298.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											KECAMATAN TIGA PANAH
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	35.626.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Tigapanah		55.626.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja di Kecamatan	1 Urusan	50.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	-	40.000.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN TIGA PANAH
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kecamatan Tigapanah		20.000.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN TIGA PANAH
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	40.000.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kecamatan Tigapanah		20.000.000	KECAMATAN TIGA PANAH
176	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	11 kegiatan	16.000.000					-	16.000.000	KECAMATAN TIGA PANAH	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Diberdayakan	29 Desa	16.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Tigapanah	-	16.000.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN TIGA PANAH
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29 Laporan	16.000.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Tigapanah		16.000.000	KECAMATAN TIGA PANAH
177	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Keetertiban Umum Masyarakat di tingkat Kecamatan	100%	16.623.246					-	37.623.246	KECAMATAN TIGA PANAH	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	16.623.246			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Tigapanah	-	37.623.246	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN TIGA PANAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	16.623.246	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Tigapanah		37.623.246	KECAMATAN TIGA PANAH
178	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan idiologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	50.000.000						-	65.000.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	1 urusan	50.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	-	65.000.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											KECAMATAN TIGA PANAH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang	50.000.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Tigapanah		65.000.000	KECAMATAN TIGA PANAH
179	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi	29 Pemerintahan Desa	11.600.000						-	11.600.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya	29 Desa	11.600.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	-	11.600.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa											KECAMATAN TIGA PANAH
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	58 Dokumen	11.600.000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Tigapanah		11.600.000	KECAMATAN TIGA PANAH
	7					Kecamatan Merek			2.965.618.099							3.024.930.461	KECAMATAN MEREK
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.965.618.099							3.024.930.461	KECAMATAN MEREK
	7	1				KECAMATAN			2.965.618.099							3.024.930.461	KECAMATAN MEREK
180	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	2.783.218.099						-	2.842.530.461	KECAMATAN MEREK
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.517.304.191			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK	-	2.576.616.553	KECAMATAN MEREK
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											KECAMATAN MEREK
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.465.164.191	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		2.524.476.553	KECAMATAN MEREK
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											KECAMATAN MEREK
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52.140.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		52.140.000	KECAMATAN MEREK
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	23.520.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK	-	23.520.000	KECAMATAN MEREK
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											KECAMATAN MEREK
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	23.520.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		23.520.000	KECAMATAN MEREK

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	118.103.908			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK	-	118.103.908	KECAMATAN MEREK
	7	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											KECAMATAN MEREK
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		2.000.000	KECAMATAN MEREK	
	7	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											KECAMATAN MEREK
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	40.000.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		40.000.000	KECAMATAN MEREK	
	7	1	1	2.06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											KECAMATAN MEREK
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	3.051.954	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		3.051.954	KECAMATAN MEREK	
	7	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											KECAMATAN MEREK
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.051.954	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		3.051.954	KECAMATAN MEREK	
	7	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											KECAMATAN MEREK
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	70.000.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		70.000.000	KECAMATAN MEREK	
	7	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	21.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK	-	21.000.000	KECAMATAN MEREK
	7	1	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											KECAMATAN MEREK
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.000.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		21.000.000	KECAMATAN MEREK	
	7	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	69.820.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK	-	69.820.000	KECAMATAN MEREK
	7	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											KECAMATAN MEREK
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.300.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		7.300.000	KECAMATAN MEREK	
	7	1	1	2.08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											KECAMATAN MEREK
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3.000.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		3.000.000	KECAMATAN MEREK	
	7	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											KECAMATAN MEREK
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.520.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		59.520.000	KECAMATAN MEREK	
	7	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	33.470.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK	-	33.470.000	KECAMATAN MEREK
	7	1	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											KECAMATAN MEREK
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.470.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		33.470.000	KECAMATAN MEREK	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
181	7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	109.050.000					-	109.050.000	KECAMATAN MEREK	
	7	1	2	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	64.050.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK	-	64.050.000	KECAMATAN MEREK
	7	1	2	2.01	1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										KECAMATAN MEREK	
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	24.050.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		24.050.000	KECAMATAN MEREK
	7	1	2	2.01	2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										KECAMATAN MEREK	
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		40.000.000	KECAMATAN MEREK
	7	1	2	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 urusan	45.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK	-	45.000.000	KECAMATAN MEREK
	7	1	2	2.02	2		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN MEREK	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		10.000.000	KECAMATAN MEREK
	7	1	2	2.02	3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN MEREK	
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	35.000.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		35.000.000	KECAMATAN MEREK
182	7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	8.000.000					-	8.000.000	KECAMATAN MEREK	
	7	1	3	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	8.000.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK	-	8.000.000	KECAMATAN MEREK
	7	1	3	2.01	3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN MEREK	
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8.000.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		8.000.000	KECAMATAN MEREK
183	7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	15.350.000					-	15.350.000	KECAMATAN MEREK	
	7	1	4	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	15.350.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	KECAMATAN MEREK	-	15.350.000	KECAMATAN MEREK
	7	1	4	2.01	1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN MEREK	
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	15.350.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	KECAMATAN MEREK		15.350.000	KECAMATAN MEREK
184	7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	50.000.000					-	50.000.000	KECAMATAN MEREK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	50.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK	-	50.000.000	KECAMATAN MEREK
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											KECAMATAN MEREK
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	50.000.000	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	KECAMATAN MEREK		50.000.000	KECAMATAN MEREK
						Kecamatan Munte			2.459.147.815							2.508.330.771	KECAMATAN MUNTE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.459.147.815							2.508.330.771	KECAMATAN MUNTE
	7	1				KECAMATAN			2.459.147.815							2.508.330.771	KECAMATAN MUNTE
185	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	2.201.848.102						-	2.251.031.058	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.861.438.736			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte	-	1.910.621.692	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.810.058.736	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte		1.859.241.692	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	51.380.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte		51.380.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	31.920.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte	-	31.920.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	31.920.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte		31.920.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	146.039.366			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte	-	146.039.366	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte		5.000.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte		45.000.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											KECAMATAN MUNTE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte	8.000.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte	6.000.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	82.039.366	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte	82.039.366	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-	50.000.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-	50.000.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	76.940.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte	76.940.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte	24.000.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.000.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte	8.000.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44.940.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte	44.940.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	35.510.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte	35.510.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.510.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Munte	35.510.000	KECAMATAN MUNTE
186	7	1	2			PROGRAM PENYELenggaraan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	151.000.000					-	151.000.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tertaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	91.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Munte	91.000.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	20.300.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Munte	20.300.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	70.700.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Munte	70.700.000	KECAMATAN MUNTE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	60.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Munte	-	60.000.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Munte		10.000.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.000.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Munte		50.000.000	KECAMATAN MUNTE
187	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	16.150.000					-		16.150.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	16.150.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Munte	-	16.150.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.150.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Munte		8.150.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8.000.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Munte		8.000.000	KECAMATAN MUNTE
188	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	18.684.000					-		18.684.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	15.660.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Munte	-	15.660.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.660.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Munte		15.660.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	3.024.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Munte	-	3.024.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	3.024.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Munte		3.024.000	KECAMATAN MUNTE
189	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	61.315.713					-		61.315.713	KECAMATAN MUNTE
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	61.315.713			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Munte	-	61.315.713	KECAMATAN MUNTE
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang	61.315.713	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Munte		61.315.713	KECAMATAN MUNTE
190	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100%	10.150.000					-		10.150.000	KECAMATAN MUNTE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	10.150.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Munte	-	10.150.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa											KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	6.000.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Munte		6.000.000	KECAMATAN MUNTE
	7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN MUNTE
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.150.000	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Munte		4.150.000	KECAMATAN MUNTE
						Kecamatan Juhar			2.844.009.512							2.888.654.322	KECAMATAN JUHAR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.844.009.512							2.888.654.322	KECAMATAN JUHAR
	7	1				KECAMATAN			2.844.009.512							2.888.654.322	KECAMATAN JUHAR
191	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100 persen	2.718.154.206						-	2.762.799.016	KECAMATAN JUHAR
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2.479.620.957			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan	-	2.479.620.957	KECAMATAN JUHAR
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											KECAMATAN JUHAR
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.434.701.957	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan		2.434.701.957	KECAMATAN JUHAR
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											KECAMATAN JUHAR
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	44.919.000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan		44.919.000	KECAMATAN JUHAR
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan adminstrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	21.840.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan	-	21.840.000	KECAMATAN JUHAR
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											KECAMATAN JUHAR
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	21.840.000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan		21.840.000	KECAMATAN JUHAR
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	72.805.749			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Juhar	-	102.994.119	KECAMATAN JUHAR
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											KECAMATAN JUHAR
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.306.335	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Juhar		1.306.335	KECAMATAN JUHAR
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											KECAMATAN JUHAR
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.642.475	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Juhar		18.830.845	KECAMATAN JUHAR
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											KECAMATAN JUHAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.364.759	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Juhar	3.364.759	KECAMATAN JUHAR	
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.920.180	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Juhar	4.920.180	KECAMATAN JUHAR	
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	54.572.000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Juhar	74.572.000	KECAMATAN JUHAR	
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	6.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan	-	20.956.440	KECAMATAN JUHAR
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2.500.000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan	11.000.000	KECAMATAN JUHAR	
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.000.000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan	9.956.440	KECAMATAN JUHAR	
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	103.917.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan	-	103.917.500	KECAMATAN JUHAR
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan	12.000.000	KECAMATAN JUHAR	
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.420.000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan	1.420.000	KECAMATAN JUHAR	
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.497.500	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan	90.497.500	KECAMATAN JUHAR	
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	33.470.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan	-	33.470.000	KECAMATAN JUHAR
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.470.000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan	33.470.000	KECAMATAN JUHAR	
192	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Indeks	99.034.340					-	99.034.340	KECAMATAN JUHAR	
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	3 Kali	53.053.140			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Juhar	-	53.053.140	KECAMATAN JUHAR
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	23.053.140	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Juhar	23.053.140	KECAMATAN JUHAR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											KECAMATAN JUHAR
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	30.000.000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Juhar		30.000.000	KECAMATAN JUHAR
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	12 urusan	45.981.200			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	ASN Kecamatan Juhar	-	45.981.200	KECAMATAN JUHAR
	7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN JUHAR
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	ASN Kecamatan Juhar		5.000.000	KECAMATAN JUHAR
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN JUHAR
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	40.981.200	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Juhar		40.981.200	KECAMATAN JUHAR
193	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	6.053.140						-	6.053.140	KECAMATAN JUHAR
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kali	6.053.140			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	ASN Kecamatan Juhar	-	6.053.140	KECAMATAN JUHAR
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN JUHAR
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	6.053.140	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	ASN Kecamatan Juhar		6.053.140	KECAMATAN JUHAR
194	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 persen	20.767.826						-	20.767.826	KECAMATAN JUHAR
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	1 urusan	20.767.826			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Juhar	-	20.767.826	KECAMATAN JUHAR
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											KECAMATAN JUHAR
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	20.767.826	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Juhar		20.767.826	KECAMATAN JUHAR
						Kecamatan Tiga Binanga			2.736.898.035							3.087.521.482	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.734.090.165							3.084.432.825	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1				KECAMATAN			2.734.090.165							3.084.432.825	KECAMATAN TIGA BINANGA
195	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat	100%	2.604.601.572						-	2.926.208.242	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.248.868.502			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	-	2.491.185.693	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											KECAMATAN TIGA BINANGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.140.268.502	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	2.371.725.693	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										KECAMATAN TIGA BINANGA
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	108.600.000	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	119.460.000	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	23.520.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	25.872.000	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	23.520.000	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	25.872.000	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	71.483.070			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	109.774.549	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										KECAMATAN TIGA BINANGA
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.554.871	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	1.710.357	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										KECAMATAN TIGA BINANGA
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.682.675	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	48.050.942	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										KECAMATAN TIGA BINANGA
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.525.500	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	6.078.050	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										KECAMATAN TIGA BINANGA
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	30.720.024	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	53.935.200	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	225.220.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	247.742.000	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										KECAMATAN TIGA BINANGA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	33.000.000	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										KECAMATAN TIGA BINANGA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	7.300.000	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	8.030.000	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										KECAMATAN TIGA BINANGA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	187.920.000	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	206.712.000	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	35.510.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga	51.634.000	KECAMATAN TIGA BINANGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	35.510.000	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Tigabinanga		51.634.000	KECAMATAN TIGA BINANGA
196	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks	69.883.420						-	87.871.762	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	3 kali	45.083.420			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	-	60.591.762	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											KECAMATAN TIGA BINANGA
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	22.329.420	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga		24.562.362	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											KECAMATAN TIGA BINANGA
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	22.754.000	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga		36.029.400	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	12 Urusan	24.800.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	-	27.280.000	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN TIGA BINANGA
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.800.000	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga		27.280.000	KECAMATAN TIGA BINANGA
197	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	20.600.000						-	21.326.096	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya	2/2 Perda/Perkada	20.600.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berakarakter	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	-	21.326.096	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN TIGA BINANGA
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.600.000	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berakarakter	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga		21.326.096	KECAMATAN TIGA BINANGA
198	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	39.005.173						-	49.026.725	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	1 Urusan	39.005.173			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	-	49.026.725	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											KECAMATAN TIGA BINANGA

No						Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	39.005.173	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	49.026.725	KECAMATAN TIGA BINANGA	
	X						NON URUSAN			2.807.870						3.088.657	KECAMATAN TIGA BINANGA	
	X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.807.870						3.088.657	KECAMATAN TIGA BINANGA	
199	X	XX	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat	100%	2.807.870					-	3.088.657	KECAMATAN TIGA BINANGA	
	X	XX	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.807.870			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-	-	3.088.657	KECAMATAN TIGA BINANGA
	X	XX	1	2.06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.807.870	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-	3.088.657	KECAMATAN TIGA BINANGA	
							Kelurahan Tiga Binanga			800.000.000						880.000.000	KECAMATAN TIGA BINANGA	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN			800.000.000						880.000.000	KECAMATAN TIGA BINANGA	
	7	1					KECAMATAN			800.000.000						880.000.000	KECAMATAN TIGA BINANGA	
200	7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	800.000.000					-	880.000.000	KECAMATAN TIGA BINANGA	
	7	1	3	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang Diberdayakan	1 Kelurahan	800.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kelurahan Tigabinanga	-	880.000.000	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	711.332.340	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kelurahan Tigabinanga	782.465.574	KECAMATAN TIGA BINANGA	
	7	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	88.667.660	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kelurahan Tigabinanga	97.534.426	KECAMATAN TIGA BINANGA	
							Kecamatan Lau Baleng			2.394.569.918						2.438.102.723	KECAMATAN LAU BALENG	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN			2.394.569.918						2.438.102.723	KECAMATAN LAU BALENG	
	7	1					KECAMATAN			2.394.569.918						2.438.102.723	KECAMATAN LAU BALENG	
201	7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat	100%	2.267.555.083					-	2.297.367.083	KECAMATAN LAU BALENG	
	7	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.026.807.618			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng	-	2.026.807.618	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.983.998.988	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng	1.983.998.988	KECAMATAN LAU BALENG	
	7	1	1	2.02	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42.808.630	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng	42.808.630	KECAMATAN LAU BALENG	
	7	1	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	12.600.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng	-	13.440.000	KECAMATAN LAU BALENG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	12.600.000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng		13.440.000	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	102.168.885			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng	-	109.960.885	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.676.040	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng		2.676.040	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	17.172.475	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng		17.172.475	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	7.991.720	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng		7.991.720	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.488.650	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng		3.488.650	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	70.840.000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng		78.632.000	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	23.728.580			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng	-	29.728.580	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	23.728.580	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng		29.728.580	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	68.780.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng	-	83.960.000	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.000.000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng		21.000.000	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.840.000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng		2.840.000	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	44.940.000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng		60.120.000	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	33.470.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng	-	33.470.000	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											KECAMATAN LAU BALENG

No Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.470.000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN Kecamatan Lau Baleng		33.470.000	KECAMATAN LAU BALENG
202	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	87,10 Indeks	68.489.130					-		72.935.130	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	3 Kali	44.207.130			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng	-	44.207.130	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	20.328.280	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng		20.328.280	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	23.878.850	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng		23.878.850	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	12 Urusan	24.282.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng	-	28.728.000	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.282.000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng		28.728.000	KECAMATAN LAU BALENG
203	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	9.683.580					-		9.683.580	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Diberdayakan	5 Desa	9.683.580			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng	-	9.683.580	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	9.683.580	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng		9.683.580	KECAMATAN LAU BALENG
204	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	5.000.000					-		5.000.000	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya	1/1 Perda/Perkada	5.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng	-	5.000.000	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng		5.000.000	KECAMATAN LAU BALENG
205	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	40.764.125					-		50.038.930	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	1 Urusan	40.764.125			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng	-	50.038.930	KECAMATAN LAU BALENG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	40.764.125	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng		50.038.930	KECAMATAN LAU BALENG
206	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100%	3.078.000					-		3.078.000	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya	15 Pemerintahan Desa	3.078.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng	-	3.078.000	KECAMATAN LAU BALENG
	7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa											KECAMATAN LAU BALENG
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30 Dokumen	3.078.000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng		3.078.000	KECAMATAN LAU BALENG
						Kecamatan Mardinding			2.289.163.085							2.998.583.537	KECAMATAN MARDINDING
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.289.163.085							2.998.583.537	KECAMATAN MARDINDING
	7	1				KECAMATAN			2.289.163.085							2.998.583.537	KECAMATAN MARDINDING
207	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	89 Persen	2.140.020.105					-		2.173.311.636	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36 Laporan	1.890.890.315			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding	-	1.915.365.449	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											KECAMATAN MARDINDING
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.850.904.065	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding		1.874.979.336	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											KECAMATAN MARDINDING
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	39.986.250	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding		40.386.113	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14 Orang	24.360.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding	-	30.729.000	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											KECAMATAN MARDINDING
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	24.360.000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding		30.729.000	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	81.933.590			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding	-	82.952.625	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											KECAMATAN MARDINDING
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	39 Paket	2.268.790	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding		2.291.478	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											KECAMATAN MARDINDING

No						Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	19.772.190	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding		20.169.611	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	119 Paket	3.151.610	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding		3.183.126	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	444.000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding		448.440	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308 Laporan	56.297.000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding		56.859.970	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	44.989.200				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding	-	45.439.092	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	15.000.000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding		15.150.000	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	29.989.200	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding		30.289.092	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	63.377.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding	-	64.010.770	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.600.000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding		15.756.000	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.760.000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding		2.787.600	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.017.000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding		45.467.170	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	34.470.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding	-	34.814.700	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	34.470.000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	PNS Kecamatan Mardinding		34.814.700	KECAMATAN MARDINDING
208	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks	100.047.280						-	770.465.329	KECAMATAN MARDINDING	
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	4 Kali	73.467.280				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Mardinding	-	742.019.529	KECAMATAN MARDINDING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											KECAMATAN MARDINDING
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	16.592.660	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Mardinding		167.585.867	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											KECAMATAN MARDINDING
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	56.874.620	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Mardinding		574.433.662	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	2 Urusan	26.580.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Mardinding	-	28.445.800	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN MARDINDING
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	26.580.000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Mardinding		28.445.800	KECAMATAN MARDINDING
209	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100 Persen	4.800.000						-	9.648.000	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Kali	4.800.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kecamatan Mardinding	-	9.648.000	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN MARDINDING
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4.800.000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kecamatan Mardinding		9.648.000	KECAMATAN MARDINDING
210	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	41.575.700						-	42.411.372	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	1 Urusan	41.575.700			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Mardinding	-	42.411.372	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											KECAMATAN MARDINDING
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	41.575.700	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Mardinding		42.411.372	KECAMATAN MARDINDING
211	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100 Persen	2.720.000						-	2.747.200	KECAMATAN MARDINDING
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya	12 Pemerintah Desa	2.720.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kestimbangan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Mardinding	-	2.747.200	KECAMATAN MARDINDING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98.180.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Payung	-	98.170.000	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	Kab. Karo, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Payung		20.000.000	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.200.000	Kab. Karo, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Payung		2.190.000	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	75.980.000	Kab. Karo, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Payung		75.980.000	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	33.470.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Payung	-	33.470.000	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.470.000	Kab. Karo, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Payung		33.470.000	KECAMATAN PAYUNG
213	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	tingkat indeks kepuasan masyarakat	84,3 indeks	57.599.940					-		86.459.940	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	3 kali	27.305.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kegiatan pemerintahan desa	-	55.165.000	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											KECAMATAN PAYUNG
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.310.000	Kab. Karo, Payung, Payung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kegiatan pemerintahan desa		39.170.000	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											KECAMATAN PAYUNG
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	14.995.000	Kab. Karo, Payung, Payung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kegiatan pemerintahan desa		15.995.000	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 urusan 100 %	25.296.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kegiatan pemerintahan desa	-	25.296.000	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN PAYUNG
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.296.000	Kab. Karo, Payung, Payung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kegiatan pemerintahan desa		25.296.000	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Partisipasi Masyarakat (stackholder) dalam Pembangunan Desa	1 urusan	4.998.940			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kegiatan pemerintahan desa	-	5.998.940	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan											KECAMATAN PAYUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	4.998.940	Kab. Karo, Payung, Payung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pervujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kegiatan pemerintahan desa	5.998.940	KECAMATAN PAYUNG
214	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	23.987.100					-	25.987.100	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Diberdayakan	7 desa	23.987.100			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kegiatan pemerintahan desa	25.987.100	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										KECAMATAN PAYUNG
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	Kab. Karo, Payung, Payung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kegiatan pemerintahan desa	6.000.000	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN PAYUNG
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	18.987.100	Kab. Karo, Payung, Payung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kegiatan pemerintahan desa	19.987.100	KECAMATAN PAYUNG
215	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	11.980.000					-	12.980.000	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 kali	11.980.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kecamatan Payung	12.980.000	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN PAYUNG
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.980.000	Kab. Karo, Payung, Payung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kecamatan Payung	12.980.000	KECAMATAN PAYUNG
216	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	20.882.304					-	21.882.304	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 urusan	20.882.304			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa Pervujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Payung	21.882.304	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										KECAMATAN PAYUNG
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	20.882.304	Kab. Karo, Payung, Payung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa Pervujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Payung	21.882.304	KECAMATAN PAYUNG
217	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100%	8.000.000					-	9.000.000	KECAMATAN PAYUNG
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya	7 pemdes	8.000.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-	9.000.000	KECAMATAN PAYUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										KECAMATAN PAYUNG	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	8.000.000	Kab. Karo, Payung, Payung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	-	9.000.000	KECAMATAN PAYUNG	
						Kecamatan Simpang Empat			3.105.528.506						3.373.590.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.105.528.506						3.373.590.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7	1				KECAMATAN			3.105.528.506						3.373.590.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
218	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan	100 Persen	2.941.629.256							KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.677.561.900			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN	-	2.805.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.627.841.900	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN		2.750.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	49.720.000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN		55.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	47.040.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN	-	60.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	47.040.000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN		60.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	79.437.356			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN	-	126.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	2.500.000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN		3.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.960.000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN		20.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3.085.500	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN		4.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										KECAMATAN SIMPANG EMPAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.891.856	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN		9.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											KECAMATAN SIMPANG EMPAT
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	55.000.000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN		90.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	35.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN	-	55.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											KECAMATAN SIMPANG EMPAT
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	35.000.000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN		55.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	69.120.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN	-	69.120.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											KECAMATAN SIMPANG EMPAT
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN		3.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											KECAMATAN SIMPANG EMPAT
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6.000.000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN		6.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											KECAMATAN SIMPANG EMPAT
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.120.000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN		60.120.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	33.470.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN	-	33.470.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											KECAMATAN SIMPANG EMPAT
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.470.000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN KECAMATAN		33.470.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
219	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	3.8 Indeks	106.600.000						-	135.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	100 Persen	61.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan	-	85.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											KECAMATAN SIMPANG EMPAT
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	16.000.000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan		30.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											KECAMATAN SIMPANG EMPAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	45.000.000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan		55.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	100 Persen	45.600.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan	-	50.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN SIMPANG EMPAT
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	45.600.000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan		50.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
220	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Kertibian Umum	100 Persen	4.299.250						-	25.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertibian Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertibian Umum yang dikoordinasikan	17 Laporan	4.299.250			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kecamatan	-	25.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN SIMPANG EMPAT
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	4.299.250	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kecamatan		25.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
221	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	53.000.000						-	65.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	1 Urusan	53.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kecamatan	-	65.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											KECAMATAN SIMPANG EMPAT
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang	53.000.000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Masyarakat Kecamatan		65.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
						Kecamatan Kutabuluh			2.385.056.221							2.432.757.345	KECAMATAN KUTABULUH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.385.056.221								KECAMATAN KUTABULUH
	7	1				KECAMATAN			2.385.056.221								KECAMATAN KUTABULUH
222	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	2.206.100.621						-	2.243.801.745	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.980.759.556			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	-	2.008.460.680	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											KECAMATAN KUTABULUH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.935.199.556	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh		1.962.900.680	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											KECAMATAN KUTABULUH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	45.560.000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	45.560.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	16.800.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	16.800.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	16.800.000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	16.800.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	68.941.565			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	78.941.565	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.405.600	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	1.405.600	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.015.545	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	16.015.545	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	7.075.770	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	7.075.770	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.720.750	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	3.720.750	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	40.723.900	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	50.723.900	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	35.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	35.000.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	35.000.000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	35.000.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	60.029.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	60.029.500	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.000.000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	21.000.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	9.250.000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	9.250.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										KECAMATAN KUTABULUH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	29.779.500	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh		29.779.500	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	44.570.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	-	44.570.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										KECAMATAN KUTABULUH	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	44.570.000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh		44.570.000	KECAMATAN KUTABULUH
223	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	95 Indeks	121.925.900					-	126.925.900	KECAMATAN KUTABULUH	
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	73.525.900			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	-	73.525.900	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										KECAMATAN KUTABULUH	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	13.060.000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh		13.060.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										KECAMATAN KUTABULUH	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	60.465.900	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh		60.465.900	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Urusan	48.400.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	-	53.400.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN KUTABULUH	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh		15.000.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN KUTABULUH	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	38.400.000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh		38.400.000	KECAMATAN KUTABULUH
224	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	7.570.000					-	7.570.000	KECAMATAN KUTABULUH	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16 Desa	7.570.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	-	7.570.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										KECAMATAN KUTABULUH	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	7.570.000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh		7.570.000	KECAMATAN KUTABULUH
225	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	5.917.000					-	5.917.000	KECAMATAN KUTABULUH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Kali	5.917.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Kutabuluh	-	5.917.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN KUTABULUH
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	5.917.000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Kutabuluh		5.917.000	KECAMATAN KUTABULUH
226	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	35.982.700						-	40.982.700	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Urusan	35.982.700			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh	-	40.982.700	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											KECAMATAN KUTABULUH
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	800 Orang	35.982.700	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Kutabuluh		40.982.700	KECAMATAN KUTABULUH
227	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100%	7.560.000						-	7.560.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16 Desa	7.560.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Kutabuluh	-	7.560.000	KECAMATAN KUTABULUH
	7	1	6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN KUTABULUH
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	7.560.000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	Kecamatan Kutabuluh		7.560.000	KECAMATAN KUTABULUH
						Kecamatan Dolat Rayat			2.143.058.511							2.347.093.960	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.143.058.511							2.347.093.960	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1				KECAMATAN			2.143.058.511							2.347.093.960	KECAMATAN DOLAT RAYAT
228	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat	100%	2.044.337.783						-	2.257.231.763	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.819.373.653			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat	-	2.001.311.017	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											KECAMATAN DOLAT RAYAT
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.781.753.838	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat		1.959.929.221	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											KECAMATAN DOLAT RAYAT
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	37.619.815	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat		41.381.796	KECAMATAN DOLAT RAYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	33.600.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat	-	36.960.000	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	33.600.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat		36.960.000	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	56.494.315			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat	-	62.143.746	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	9.604.005	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat		10.564.405	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	2.045.510	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat		2.250.061	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.542.800	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat		4.997.080	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	40.302.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat		44.332.200	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	101.399.815			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat	-	120.000.000	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.200.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat		25.520.000	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.840.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat		4.000.000	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.359.815	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat		90.480.000	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	33.470.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat	-	36.817.000	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.470.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kecamatan Dolat Rayat		36.817.000	KECAMATAN DOLAT RAYAT
229	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks	59.465.420					-		46.681.360	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	3 Kali	43.288.820			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat	-	28.887.100	KECAMATAN DOLAT RAYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											KECAMATAN DOLAT RAYAT
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	11.320.200	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat		12.452.220	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											KECAMATAN DOLAT RAYAT
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	31.968.620	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat		16.434.880	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	12 Urusan	16.176.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat	-	17.794.260	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN DOLAT RAYAT
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	16.176.600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat		17.794.260	KECAMATAN DOLAT RAYAT
230	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	14.979.600						-	16.477.560	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Diberdayakan	7 Desa	14.979.600			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat	-	16.477.560	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN DOLAT RAYAT
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	14.979.600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat		16.477.560	KECAMATAN DOLAT RAYAT
231	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	24.275.708						-	26.703.277	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	1 Urusan	24.275.708			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat	-	26.703.277	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											KECAMATAN DOLAT RAYAT
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	275 Orang	24.275.708	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat		26.703.277	KECAMATAN DOLAT RAYAT
						Kecamatan Merdeka			2.308.528.196							2.515.031.119	KECAMATAN MERDEKA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.308.528.196							2.515.031.119	KECAMATAN MERDEKA
	7	1				KECAMATAN			2.308.528.196							2.515.031.119	KECAMATAN MERDEKA
232	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	2.177.455.410						-	2.355.272.573	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.991.355.695			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka	-	2.134.547.196	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											KECAMATAN MERDEKA

No						Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17 Orang/bulan	1.936.791.954	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka		2.088.983.455	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	54.563.741	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka		45.563.741	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	17.320.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka	-	18.320.000	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		22 Paket	17.320.000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka		18.320.000	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	55.191.935			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka	-	84.317.597	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.915.610	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka		6.915.610	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.596.983	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka		12.774.425	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	8.724.232	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka		9.724.232	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	3.140.120	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka		4.925.150	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		36 Dokumen	2.184.000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka		2.584.000	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		300 Laporan	24.630.990	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka		47.394.180	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	78.077.780			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka	-	81.577.780	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	15.000.000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka		15.500.000	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												KECAMATAN MERDEKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.840.000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka		3.840.000	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	60.237.780	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka		62.237.780	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	35.510.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka	-	36.510.000	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.510.000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kecamatan Merdeka		36.510.000	KECAMATAN MERDEKA
233	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks	62.647.820						-	76.991.160	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	35.287.820			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Merdeka	-	41.791.160	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	14.510.880	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Merdeka		19.135.460	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	20.776.940	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Merdeka		22.655.700	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	27.360.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Merdeka	-	35.200.000	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	27.360.000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Merdeka		35.200.000	KECAMATAN MERDEKA
234	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	17.174.610						-	20.082.900	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9 Desa	17.174.610			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Merdeka	-	20.082.900	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	17.174.610	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Merdeka		20.082.900	KECAMATAN MERDEKA
235	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	13.209.824						-	18.331.030	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	5.472.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Merdeka	-	7.840.000	KECAMATAN MERDEKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9 Laporan	5.472.000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Merdeka	7.840.000	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	7.737.824			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Merdeka	10.491.030	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	7.737.824	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Merdeka	10.491.030	KECAMATAN MERDEKA
236	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	34.541.232					-	38.354.456	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Kegiatan	34.541.232			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Merdeka	38.354.456	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	34.541.232	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Merdeka	38.354.456	KECAMATAN MERDEKA
237	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100%	3.499.300					-	5.999.000	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Desa	3.499.300			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Merdeka	5.999.000	KECAMATAN MERDEKA
	7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										KECAMATAN MERDEKA
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	3.499.300	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Merdeka	5.999.000	KECAMATAN MERDEKA
						Kecamatan Namanteran			2.595.732.299						2.602.430.886	KECAMATAN NAMANTERAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.595.732.299						2.602.430.886	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1				KECAMATAN			2.595.732.299						2.602.430.886	KECAMATAN NAMANTERAN
238	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	100%	2.471.043.033					-	2.447.776.430	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2.315.701.840			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Naman Teran	2.316.701.840	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										KECAMATAN NAMANTERAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.264.693.740	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Naman Teran	2.264.693.740	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	51.008.100	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Naman Teran	52.008.100	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	62.867.193			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	27.670.590	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	2.000.000	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.000.000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	12.000.000	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.023.920	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	3.023.920	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.646.670	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	2.646.670	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	4.000.000	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	39.196.603	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN	4.000.000	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	59.474.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Naman Teran	63.904.000	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.964.000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Naman Teran	12.964.000	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.570.000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Naman Teran	6.000.000	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										KECAMATAN NAMANTERAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	44.940.000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Naman Teran		44.940.000	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	33.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Naman Teran	-	39.500.000	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.000.000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	ASN Kantor Camat Naman Teran		39.500.000	KECAMATAN NAMANTERAN
239	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	87,98%	55.590.856					-		64.620.046	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan,	100%	26.590.856			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	masyarakat Kecamatan Naman Teran	-	32.620.046	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	11.151.446	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	masyarakat Kecamatan Naman Teran		15.636.695	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	15.439.410	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	masyarakat Kecamatan Naman Teran		16.983.351	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	29.000.000			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	masyarakat Kecamatan Naman Teran	-	32.000.000	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	29.000.000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	masyarakat Kecamatan Naman Teran		32.000.000	KECAMATAN NAMANTERAN
240	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	8.843.635					-		11.843.635	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	8.843.635			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	masyarakat kecamatan Naman Teran	-	11.843.635	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	8.843.635	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	masyarakat kecamatan Naman Teran		11.843.635	KECAMATAN NAMANTERAN
241	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	15.254.775					-		24.254.775	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakkannya	100%	11.600.000			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	masyrakat Kecamatan Naman Teran	-	13.600.000	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN NAMANTERAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.600.000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	masyarakat Kecamatan Naman Teran	13.600.000	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya	100%	3.654.775			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	masyarakat Kecamatan Naman Teran	10.654.775	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	3.654.775	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter	masyarakat Kecamatan Naman Teran	10.654.775	KECAMATAN NAMANTERAN
242	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	45.000.000					-	53.936.000	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	100%	45.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	masyarakat Kecamatan Naman Teran	53.936.000	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										KECAMATAN NAMANTERAN
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	45.000.000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	masyarakat Kecamatan Naman Teran	53.936.000	KECAMATAN NAMANTERAN
						Kecamatan Tiganderket			2.696.474.456						2.907.250.583	KECAMATAN TIGANDERKET
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.696.474.456						2.907.250.583	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1				KECAMATAN			2.696.474.456						2.907.250.583	KECAMATAN TIGANDERKET
243	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja kecamatan	100%	2.498.324.456					-	2.686.234.583	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	2.263.622.725			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket	2.275.924.483	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.209.142.725	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket	2.221.444.483	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	54.480.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket	54.480.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	18.200.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket	42.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	18.200.000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket	42.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	69.561.731			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket	-	102.010.100	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.800.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		2.880.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	15.000.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		14.977.700	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	4.500.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		4.972.400	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	4.000.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		6.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu											KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.000.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		3.180.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	41.261.731	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		70.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	40.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket	-	100.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	40.000.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		100.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	66.940.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket	-	96.300.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	17.000.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		15.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		6.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	44.940.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		75.300.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	40.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket	-	70.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											KECAMATAN TIGANDERKET

No						Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	40.000.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		70.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET
244	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 Indeks	54.000.000						-	60.680.000	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	54.000.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket	-	60.680.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											KECAMATAN TIGANDERKET	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	19.000.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		20.680.000	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											KECAMATAN TIGANDERKET	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	35.000.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		40.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET	
245	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	100%	29.700.000						-	33.680.000	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	29.700.000				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Tiganderket	-	33.680.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											KECAMATAN TIGANDERKET	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34 Lembaga Kemasyarakatan	14.700.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Tiganderket		15.760.000	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN TIGANDERKET	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Tiganderket		17.920.000	KECAMATAN TIGANDERKET	
246	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	16.850.000						-	19.587.000	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	16.850.000				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Tiganderket	-	19.587.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											KECAMATAN TIGANDERKET	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	16.850.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Tiganderket		19.587.000	KECAMATAN TIGANDERKET	
247	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	55.200.000						-	58.918.000	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	55.200.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket	-	58.918.000	KECAMATAN TIGANDERKET

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	320 Orang	41.000.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		43.297.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa											KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	170 Orang	14.200.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Kecamatan Tiganderket		15.621.000	KECAMATAN TIGANDERKET
248	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	100%	42.400.000						-	48.151.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	42.400.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Tiganderket	-	48.151.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen	27.000.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Tiganderket		30.749.000	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											KECAMATAN TIGANDERKET
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Dokumen	15.400.000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kecamatan Tiganderket		17.402.000	KECAMATAN TIGANDERKET
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			9.380.255.544							10.318.274.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			9.380.255.544							10.318.274.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			9.380.255.544							10.318.274.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
249	8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	100%	5.034.489.094						-	5.537.934.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.638.503.598			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN	-	5.102.355.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.467.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN		4.913.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	171.503.598	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN		188.655.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	30.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN	-	33.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No						Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	39 Paket	30.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN		33.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	182.661.898			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN	-	200.924.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket		39.306.185	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN		43.236.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		1.442.669	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN		1.586.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		10.076.108	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN		11.083.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1.799.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN		1.978.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan		130.037.936	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN		143.041.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	133.803.598			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Pegawai	-	147.183.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12.000.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Pegawai		13.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		14.200.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Pegawai		15.620.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		107.603.598	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	Pegawai		118.363.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	49.520.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN	-	54.472.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		49.520.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	ASN		54.472.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
250	8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	11 Kegiatan		1.086.774.000					-		1.195.451.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kegiatan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	11 Kegiatan	1.086.774.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	Masyarakat, Pelajar, Pemuda dan Tokoh-tokoh lainnya	-	1.195.451.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	11 Dokumen	1.065.642.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	Masyarakat, Pelajar, Pemuda dan Tokoh-tokoh lainnya		1.172.206.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	2	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	21.132.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	Masyarakat, Pelajar, Pemuda dan Tokoh-tokoh lainnya		23.245.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
251	8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	80%	1.111.707.000						-	1.222.877.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilih	85%	1.111.707.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	Partai Politik dan Masyarakat	-	1.222.877.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	1.111.707.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	Partai Politik dan Masyarakat	1.222.877.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
252	8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	80%	27.489.000						-	30.237.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya jumlah pelaporan keberadaan ormas	1 Dokumen	27.489.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat	-	30.237.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	27.489.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Masyarakat	30.237.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
253	8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	36 Dokumen	1.825.262.450						-	2.007.788.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kerukunan dan harmoni umat beragama	78 Indeks	1.825.262.450			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	Masyarakat, Tokoh Agama dan Pelajar/Generasi Muda	-	2.007.788.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	8	1	5	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	348.601.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	Masyarakat, Tokoh Agama dan Pelajar/Generasi Muda		383.461.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	1.370.234.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	Masyarakat, Tokoh Agama dan Pelajar/Generasi Muda		1.507.257.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	106.427.450	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	Masyarakat, Tokoh Agama dan Pelajar/Generasi Muda		117.070.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
254	8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	80%	294.534.000					-		323.987.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Menurunnya persentase gejala konflik sosial	80%	294.534.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	Masyarakat dan Forkopimda	-	323.987.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	294.534.000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	Masyarakat dan Forkopimda		323.987.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H									1.444.715.181.212							1.537.065.573.103	